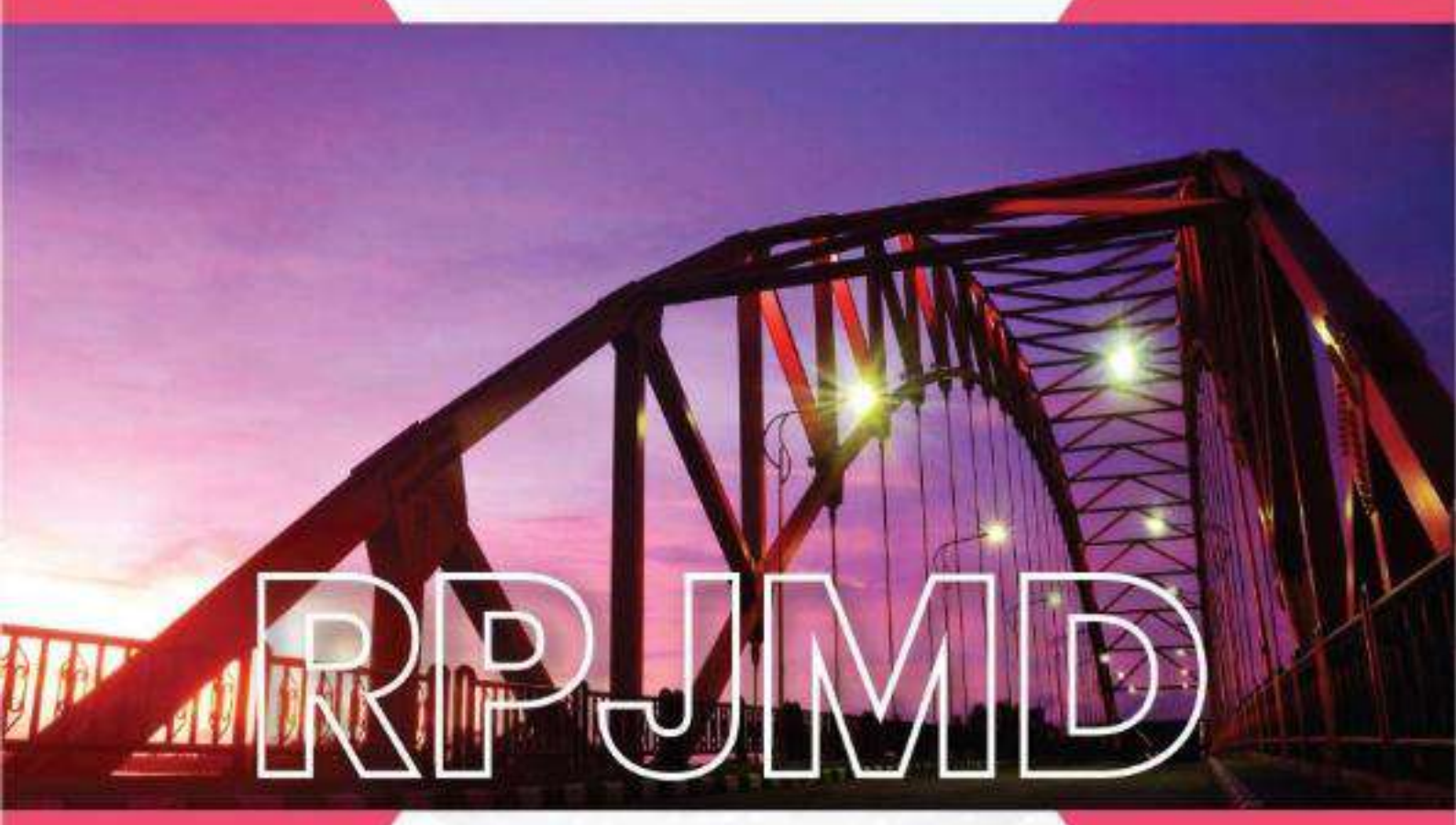




**KABUPATEN
SERUYAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH**



RPJMD

**KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2025 – 2029**





**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 1 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029**

**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2025**



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 1 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menyebutkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 120);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

dan

BUPATI SERUYAN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seruyan.
3. Bupati adalah Bupati Seruyan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.
6. Peraturan Daerah selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan.
7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Seruyan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Seruyan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Seruyan untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Seruyan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
16. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran.
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan.

Pasal 2

- (1) RPJMD dimaksudkan untuk menjabarkan Visi, Misi dan Program Prioritas Bupati yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Pembangunan daerah dan program perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) RPJMD bertujuan sebagai:
 - a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra PD.

- b. Pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD.
- c. Pedoman dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- d. Mewujudkan perencanaan Pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan Pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten.
- e. RPJMD dapat menjadi acuan bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II VISI DAN MISI

Pasal 3

- (1) Visi RPJMD adalah "Terwujudnya Transformasi Pembangunan Kabupaten Seruyan yang Berkelanjutan, Sejahtera, Adil, Maju, dan Amanah Untuk Semua".
- (2) Misi RPJMD meliputi:
 - a. Misi I: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul.
 - b. Misi II: Mewujudkan Iklim kehidupan yang Berbudaya, Demokratis, Agamis, Bermoral, Tertib, dan Inklusif.
 - c. Misi III: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan, Kemandirian Desa, dan Inovasi Layanan Publik.
 - d. Misi IV: Mewujudkan Harmonisasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana.
 - e. Misi V: Mewujudkan Peningkatan Ekonomi dan Daya Saing Investasi Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Potensi Unggulan Daerah.

BAB III SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 4

- (1) Penyusunan Dokumen RPJMD dilakukan dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH
 - BAB III : VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
 - BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
 - BAB V : PENUTUP
- (2) Sistematika Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang perencanaan Pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi RPJMD.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi RPJMD dan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) DPRD melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan dan capaian RPJMD sesuai kewenangannya.

BAB V PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya:
 - a. bencana alam;
 - b. goncangan politik;
 - c. krisis ekonomi;
 - d. konflik sosial budaya;
 - e. gangguan keamanan;
 - f. pemekaran daerah; atau
 - g. perubahan kebijakan nasional.

BAB VI PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Seruyan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI SERUYAN,



AHMAD SELANORWANDA

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 20 Agustus 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**



DIJANUDDIN NOOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025 NOMOR 72..

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : ..01.4.6.2025**

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029**

I. UMUM

RPJMD Kabupaten Seruyan merupakan dokumen perencanaan Kabupaten Seruyan untuk periode 5 (lima) tahun yang dimaksudkan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Seruyan dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program prioritas Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RPJMD digunakan sebagai pedoman penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dan penyusunan RKPD serta digunakan sebagai instrument evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR 10/

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	II
DAFTAR TABEL	IV
DAFTAR GAMBAR.....	XIV
BAB I PENDAHULUAN	I-2
1.1. Latar Belakang Penyusunan	I-2
1.2. Dasar Hukum	I-5
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	I-10
1.4. Maksud dan Tujuan	I-23
1.4.1. Maksud.....	I-23
1.4.2. Tujuan.....	I-24
1.5. Sistematika RPJMD Tahun 2025-2029.....	I-24
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH	II-29
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-29
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-29
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-96
2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah	II-138
2.1.4. Aspek Pelayanan Umum	II-181
2.2. Gambaran Keuangan Daerah	II-259
2.2.1. Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir.....	II-260
2.2.2. Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun ke Depan.....	II-281
2.3. Permasalahan dan Isu Strategis.....	II-283
2.3.1. Permasalahan.....	II-284
2.3.2. Isu Strategis Daerah.....	II-316
BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	III-330
3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	III-330
3.1.1. Visi Pembangunan Kabupaten Seruyan 2025-2029	III-330
3.1.2. Misi Pembangunan Kabupaten Seruyan 2025-2029	III-335
3.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Seruyan 2025-2029	III-345

3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	III-350
3.2.1. Strategi Pembangunan Daerah	III-350
3.2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	III-357
3.2.3. Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	III-375

**BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH..... IV-435**

4.1. Program Perangkat Daerah	IV-435
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pencapaian Tujuan	IV-489
4.2.1. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan.....	IV-489
4.2.2. Target Penyelenggaraan Pemerintahan	IV-503

BAB V PENUTUP..... V-531

5.1. Pedoman Transisi	V-531
5.2. Kaidah Pelaksanaan	V-531

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Hubungan Dokumen RPJMN Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029	I-12
Tabel 1.2. Hubungan Dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029	I-14
Tabel 1.3. Hubungan Dokumen RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 dengan RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 ..	I-18
Tabel 2.1. Luas Wilayah Kabupaten Seruyan Menurut Kecamatan	II-30
Tabel 2.2. Rencana Peruntukan Lahan Kabupaten Seruyan	II-38
Tabel 2.3. Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Seruyan	II-41
Tabel 2.4. Luas Lahan Pertanian Kabupaten Seruyan.....	II-46
Tabel 2.5. Hasil Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Seruyan Tahun 2024.....	II-46
Tabel 2.6. Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.....	II-47
Tabel 2.7. Hasil Komoditi Perkebunan Kabupaten Seruyan Tahun 2022-2024.....	II-48
Tabel 2.8. Daftar Perkebunan Besar Swasta (PBS) di Kabupaten Seruyan Tahun 2024	II-49
Tabel 2.9. Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Usaha Tahun 2021-2024	II-52
Tabel 2.10. Potensi Lahan Pengembangan Budidaya Air Payau (Tambak) tahun 2024	II-53
Tabel 2.11. Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2021-2024.....	II-54
Tabel 2.12. Jumlah Produksi Perikanan Menurut Jenis Komoditas Tahun 2021—2024.....	II-54
Tabel 2.13. Produksi Pengolahan Hasil perikanan Tahun 2024.....	II-56

Tabel 2.14. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2024	II-64
Tabel 2.15. Indeks Risiko Tiap Jenis Bencana di Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2024	II-64
Tabel 2.16. Tingkat Bahaya Tiap Bencana di Kabupaten Seruyan.....	II-65
Tabel 2.17. Hasil Kajian Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.....	II-67
Tabel 2.18. Indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP).....	II-69
Tabel 2.19. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023	II-71
Tabel 2.20. Perubahan Kategori, Indeks, dan Ranking Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2019-2023.....	II-72
Tabel 2.21. Jumlah dan Distribusi/Persebaran Penduduk Kabupaten Seruyan berdasarkan Kecamatan Tahun 2019-2024.....	II-78
Tabel 2.22. Jumlah dan Distribusi/Persebaran Penduduk Kabupaten Seruyan berdasarkan Tahun Sensus 2010 dan 2020	II-79
Tabel 2.23. Data Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024	II-80
Tabel 2.24. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Seruyan berdasarkan Tahun Sensus 2010 dan 2020	II-81
Tabel 2.25. Kepadatan Penduduk Kabupaten Seruyan Tahun 2024....	II-83
Tabel 2.26. Kepadatan Penduduk Kabupaten Seruyan berdasarkan Tahun Sensus 2010 dan 2020.....	II-83
Tabel 2.27. Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Seruyan Tahun 2024.....	II-85
Tabel 2.28. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Sex Ratio per Kecamatan Kabupaten Seruyan Tahun 2022*	II-86
Tabel 2.29. Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029	II-89

Tabel 2.30. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025-2029	II-91
Tabel 2.31. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2025-2045	II-92
Tabel 2.32. Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029	II-93
Tabel 2.33. Proyeksi Penduduk Usia Produktif Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029	II-95
Tabel 2. 34 Indeks Harmoni Indonesia Kabupaten Seruyan	II-105
Tabel 2.35. Status Gizi Balita di Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2024 .II-108	
Tabel 2.36. Jumlah LKSA dan PPKS di Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2024.....	II-137
Tabel 2.37. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020-2024	II-148
Tabel 2.38. Perkembangan Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan (Km) di Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023	II-169
Tabel 2.39. Panjang Jalan menurut Jenis Permukaan (Km) di Kabupaten Seruyan Tahun 2024.....	II-169
Tabel 2.40. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Seruyan	II-171
Tabel 2.41. Partisipasi Perempuan dalam DPRD menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2023	II-171
Tabel 2.42. Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan di Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023	II-174
Tabel 2.43. Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana Per 100.000 Penduduk di Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023.....	II-174
Tabel 2.44. Nilai PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024	II-176

Tabel 2.45. Distribusi Nilai PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024	II-178
Tabel 2.46. Nilai PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Seruyan Tahun 2010, 2015, 2020, 2022,2023 Dan 2024.	II-180
Tabel 2.47. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Seruyan Tahun 2022-2024	II-182
Tabel 2. 48 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Seruyan Tahun 2021-2024.....	II-183
Tabel 2.49. Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024	II-184
Tabel 2.50. Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024	II-188
Tabel 2. 51. Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan Tahun 2020-2024	II-193
Tabel 2.52. Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024.....	II-195
Tabel 2.53. Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024	II-197
Tabel 2.54. Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024	II-199
Tabel 2.55. Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024	II-202
Tabel 2.56. Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seruyan Tahun 2020-2024....	II-204
Tabel 2.57. Capaian Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024	II-206
Tabel 2.58. Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024	II-207

Tabel 2.59. Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024	II-208
Tabel 2.60. Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024 ..	II-212
Tabel 2.61. Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024	II-214
Tabel 2.62. Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024 ..	II-217
Tabel 2.63. Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024	II-219
Tabel 2.64. Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024	II-221
Tabel 2.65. Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024	II-222
Tabel 2.66. Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023	II-224
Tabel 2.67. Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024	II-225
Tabel 2.68. Capaian Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024	II-226
Tabel 2.69. Capaian Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024	II-227
Tabel 2.70. Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024	II-228
Tabel 2.71. Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024	II-229
Tabel 2.72. Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024	II-231

Tabel 2.73. Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024	II-232
Tabel 2.74. Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023	II-233
Tabel 2.75. Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023	II-234
Tabel 2.76. Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023	II-235
Tabel 2.77. Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023	II-235
Tabel 2.78. Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024	II-236
Tabel 2.79. Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023	II-237
Tabel 2.80. Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024	II-238
Tabel 2.81. Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023	II-240
Tabel 2.82. Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Dewan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024	II-241
Tabel 2.83. Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024	II-243
Tabel 2. 84 Capaian Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023	II-244
Tabel 2.85. Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024	II-245
Tabel 2.86. Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023	II-247
Tabel 2.87. Capaian Kinerja Urusan Pengawasan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024	II-248

Tabel 2.88. Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan Tahun 2019- 2024.....	II-249
Tabel 2.89. Capaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Seruyan Tahun 2022-2024	II-250
Tabel 2.90. Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Seruyan Tahun 2022-2024	II-251
Tabel 2.91. Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Seruyan Tahun 2022-2024	II-252
Tabel 2.92. Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Seruyan Tahun 2022-2024	II-253
Tabel 2.93. Capaian SPM Bidang Ketentraman, Keketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan Tahun 2022- 2024.....	II-254
Tabel 2.94. Capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2022- 2024.....	II-255
Tabel 2.95 Penegakan Perda dan Perkada di Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024	II-256
Tabel 2.96. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024	II-264
Tabel 2.97. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024	II-267
Tabel 2.98. Kinerja Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024	II-269
Tabel 2.99. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024	II-270
Tabel 2.100. Neraca Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024.	II- 272

Tabel 2.101. Analisis Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Aktivitas Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023 ..II-	276
Tabel 2.102. Proporsi Belanja Kebutuhan Aparatur Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024	II-278
Tabel 2.103. Analisis Realisasi Surplus (Defisit) Riil Anggaran Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024	II-280
Tabel 2.104. Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030 Kabupaten Seruyan	II-282
Tabel 2. 105. Permasalahan Kualitas Infrastruktur Jalan dan Kinerja Perhubungan	II-286
Tabel 2.106. Permasalahan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Publik ..II-	287
Tabel 2.107. Permasalahan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan	II-290
Tabel 2.108. Permasalahan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana	II-295
Tabel 2.109. Permasalahan Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Bertanggung Jawab Perlu Ditingkatkan	II-297
Tabel 2.110. Permasalahan Pelayanan Publik Belum Merata antara Seruyan Bagian Utara, Tengah, dan Selatan	II-299
Tabel 2.111. Kualitas Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan Masih Rendah	II-305
Tabel 2.112. Permasalahan Belum Optimalnya Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial Masyarakat	II-307
Tabel 2.113. Permasalahan Diversifikasi Ekonomi melalui Penguatan Ekonomi Rakyat Masih Rendah	II-310
Tabel 2.114. Permasalahan Belum Terintegrasinya Basis Data yang Dapat Diakses Publik dan Pembangunan yang Merata di Seruyan Bagian Utara, Tengah, dan Selatan	II-315

Tabel 2.115. Telaah Isu Strategis Kabupaten Seruyan	II-317
Tabel 3.1. Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	III-342
Tabel 3.2. Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029	III-345
Tabel 3.3. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Kabupaten Seruyan	III-347
Tabel 3.4. Rumusan Strategi RPJMD Seruyan Tahun 2025-2029	III-354
Tabel 3.5. Tahapan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Seruyan 5 Tahun Mendatang.....	III-357
Tabel 3.6. Rumusan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029	III-361
Tabel 3.7. Keterkaitan Arah Kebijakan Terhadap Tahap Pembangunan RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029	III-366
Tabel 3.8. Program Prioritas Provinsi Kalimantan Tengah 2025-2029	III-379
Tabel 3.9. Janji Politik Bupati Terpilih Kabupaten Seruyan Tahun 2025- 2029.....	III-382
Tabel 3.10. Program Prioritas RPJMD Kabupaten Seruyan	III-384
Tabel 3.11. Sinkronisasi Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Kalimantan Tengah dan Program Prioritas (Janji Politik) Bupati Seruyan	III-416
Tabel 3.12. Dukungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Terhadap Proyek Strategis Nasional	III-418
Tabel 3.13. Dukungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Terhadap Prioritas Gubernur Kalimantan Tengah.....	III-428
Tabel 3.14. Program Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Program Prioritas Bupati (Janji Politik)	III-430
Tabel 4.1. Pagu Indikatif Per Bidang Urusan RPJMD Kabupaten Seruyan	IV-436

Tabel 4.2. Program Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan IV-438

Tabel 4.3. Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Seruyan IV-490

Tabel 4.4. Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama RPJMD
Kabupaten Seruyan.....IV-492

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Daerah RPJMD Kabupaten Seruyan IV-504

Tabel 4.6. Target Capaian SPM Kabupaten Seruyan Tahun 2026-2030 .IV-
528

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Konstelasi dan Posisi Dokumen RPJMD dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PenganggaranI-10	
Gambar 2.1. Peta Administrasi Kecamatan di Kabupaten Seruyan II-32	
Gambar 2.2. Peta Kelerengan Kabupaten Seruyan II-35	
Gambar 2.3. Peta Hidrologi Kabupaten Seruyan II-37	
Gambar 2.4. Grafik Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan Tahun 2024 II-62	
Gambar 2.5. Grafik Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan Tahun 2024 II-63	
Gambar 2.6. Grafik Perkembangan Indeks Ketahanan Energi (IKE) Nasional Tahun 2021-2023 II-74	
Gambar 2.7. Perkembangan Nilai PDRB Sektor Pengadaan Listrik dan Gas (Juta Rupiah) Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024II-75	
Gambar 2.8. Produksi dan Distribusi Air Minum oleh Perusahaan Air Minum (m3) di Kabupaten Seruyan II-77	
Gambar 2.9. Piramida Penduduk Kabupaten Seruyan Tahun 2010 II-87	
Gambar 2.10. Piramida Penduduk Kabupaten Seruyan Tahun 2023 ..II-87	
Gambar 2.11. Piramida Penduduk Kabupaten Seruyan Tahun 2024 ..II-88	
Gambar 2.12. Grafik Proyeksi Penduduk Tahun 2025-2029 II-90	
Gambar 2.13. Proyeksi Komposisi Umur Penduduk Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 II-92	
Gambar 2.14. Proyeksi Angka Ketergantungan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 II-96	
Gambar 2.15. Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2024 II-97	

Gambar 2.16. Grafik Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional Tahun 2010-2024	II-99
Gambar 2.17. Grafik Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2024	II-101
Gambar 2.18. Grafik Persentase Penduduk Miskin (P0) Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional Tahun 2005-2024	II-102
Gambar 2.19. Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2024	II-103
Gambar 2.20. Grafik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2024	II-105
Gambar 2.21. Grafik Usia Harapan Hidup Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2024	II-107
Gambar 2.22. Grafik Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2024	II-110
Gambar 2.23. Grafik Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2024	II-111
Gambar 2.24. Grafik Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024	II-114
Gambar 2.25. Grafik Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2024	II-116
Gambar 2.26. Grafik Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2024	II-117
Gambar 2.27. Grafik Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2024	II-119

Gambar 2.28. Grafik Perkembangan Angka Putus Sekolah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2024	II-120
Gambar 2.29. Grafik Perkembangan Angka Kelulusan Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2024	II-121
Gambar 2.30. Grafik Perkembangan Angka Melanjutkan Pendidikan Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2024	II-122
Gambar 2.31. Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Seruyan Tahun 2020-2023	II-123
Gambar 2.32. Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2020-2023	II-125
Gambar 2.33. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Seruyan Tahun 2022-2023	II-126
Gambar 2.34. Perkembangan Indeks Perlindungan Anak (IPA) Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2018-2023 ..	II-128
Gambar 2.35. Grafik Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2024	II-130
Gambar 2.36. Grafik Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2024	II-131
Gambar 2.37. Grafik Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2024	II-132
Gambar 2.38. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2015-2024	II-133
Gambar 2.39. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2018-2023 ..	II-134
Gambar 2.40. Kemampuan Berbahasa Indonesia dan Penggunaan Bahasa Daerah di Kabupaten Seruyan Tahun 2020	II-135

Gambar 2.41. Grafik Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024	II-136
Gambar 2.42. Grafik Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional Tahun 2010-2023.....	II-139
Gambar 2.43. Grafik Tipologi Klassen Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.....	II-141
Gambar 2.44. Grafik Nilai Pilar dan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) Kabupaten Seruyan Tahun 2011-2021.	II-144
Gambar 2.45. Grafik Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021	II-145
Gambar 2.46. Grafik Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024.....	II-147
Gambar 2.47. Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024	II-147
Gambar 2.48. Rasio Kewirausahaan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023	II-150
Gambar 2.49. Grafik Perkembangan Indeks Pendidikan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024.....	II-152
Gambar 2.50. Grafik Indeks Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.....	II-153
Gambar 2.51. Grafik Indeks Literasi/Numerasi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Seruyan Tahun 2021-2024.....	II-154
Gambar 2.52. Grafik Nilai IPLM Kabupaten Seruyan Tahun 2022-2024 .	II-156
Gambar 2.53. Grafik Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Seruyan Tahun 2023	II-156

Gambar 2.54. Grafik Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024	II-158
Gambar 2.55. Grafik Rasio Ketergantungan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024.....	II-159
Gambar 2.56. Nilai dan Pilar Indeks Literasi Digital Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2022	II-160
Gambar 2.57. Grafik Nilai Pilar Indeks Masyarakat Digital (IMD) Kabupaten Seruyan Tahun 2024	II-162
Gambar 2.58. Grafik Indeks Masyarakat Digital (IMD) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024	II-162
Gambar 2.59. Grafik Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2024.....	II-164
Gambar 2.60. Grafik Rasio Elektrifikasi Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023	II-165
Gambar 2.61. Grafik Perkembangan Rasio Rumah dan Permukiman Layak Huni Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2024	II-168
Gambar 2.62. Indeks Demokrasi Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2021-2023	II-170
Gambar 2.63. Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Tahun 2019-2023	II-173
Gambar 2.64. Grafik Struktur Ekonomi Kabupaten Seruyan Tahun 2010-2024	II-179
Gambar 2.65. Perkembangan Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2022	II-204
Gambar 2.66. Grafik Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Tahun 2019-2023	II-233
Gambar 2.67. Grafik Nilai Pilar Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Seruyan Tahun 2023	II-258

Gambar 2.68. Grafik Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023	II-259
Gambar 2.69. Perkembangan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023.....	II-262
Gambar 2.70. Grafik Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024	II-266
Gambar 2.71. Grafik Struktur Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024	II-268
Gambar 2.72 Arah Kebijakan dan Permasalahan Kabupaten Seruyan	II-285
Gambar 2.73. Faktor Pengaruh dan Dampak Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup.....	II-328
Gambar 3.1. Rumusan Visi RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029	III-331
Gambar 3.2. Keterkaitan Visi RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan lain.....	III-334
Gambar 3.3. Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029	III-336
Gambar 3.4. Prioritas Daerah Kabupaten Seruyan	III-358
Gambar 3.5. Program Prioritas Nasional & 8 Program Hasil Terbaik Cepat	III-376



BAB I

PENDAHULUAN



**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025-2029**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan

Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Setiap daerah memiliki kewajiban untuk menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kabupaten Seruyan, yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, telah menyelesaikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024. Sejalan dengan amanat peraturan perundang-undangan, kepala daerah yang terpilih memiliki kewajiban untuk menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan. RPJMD ini harus ditetapkan paling lambat enam bulan setelah pelantikan.

Dalam rangka mendukung penyusunan RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029, diperlukan analisis komprehensif terhadap kondisi aktual daerah. Analisis ini mencakup capaian pembangunan, tantangan, serta isu-isu strategis yang berpotensi mempengaruhi arah pembangunan dalam lima tahun ke depan. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD, sehingga kebijakan dan program pembangunan yang disusun dapat lebih terarah, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah.

Lebih lanjut, amanat mengenai penyusunan RPJMD diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun Rencana Pembangunan Daerah.

RPJMD adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan Awal sebelum terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala daerah. Penyusunannya dilakukan dan diselesaikan paling lambat sebelum penetapan bupati dan wakil bupati terpilih.

Sebagai langkah penyusunan RPJMD 2025-2029, Pendekatan Awal merupakan salah satu dari empat pendekatan berdasarkan proses dalam penyusunan dokumen perencanaan. Adapun pendekatan lainnya adalah pendekatan partisipatif, politis, serta pendekatan atas-bawah dan bawah-atas. Maksud dari masing-masing pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan Teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- b. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- c. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
- d. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah

pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten/ kota, daerah provinsi, hingga nasional.

RPJMD Kabupaten Seruyan 2025-2029 disusun dengan menganalisa beberapa hal penting yang menggambarkan pencapaian pembangunan beberapa tahun terakhir, sebagai pijakan dalam pengambilan kebijakan yang akan datang. Bertolak dari gambaran capaian pembangunan beberapa tahun terakhir, dapat diketahui permasalahan pembangunan yang dihadapi. Permasalahan-permasalahan pembangunan dan isu/kebijakan yang berkembang di lingkup Internasional, Nasional, Provinsi dan Kabupaten Seruyan akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah yang akan datang. Penyusunan RPJMD mencakup:

- a) Analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- b) Perumusan gambaran keuangan Daerah;
- c) Perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
- d) Penelaahan dokumen perencanaan lainnya; dan
- e) Perumusan isu strategis daerah.
- f) Penyusunan visi misi lima tahun mendatang
- g) Penyusunan sasaran, strategi dan arah kebijakan lima tahun mendatang
- h) Penyusunan pentahapan pembangunan lima tahun mendatang
- i) Penyusunan program prioritas dan program perangkat daerah
- j) Penyusunan indikator kinerja, baik IKU, IKD dan IKK lima tahun mendatang

Mengingat pentingnya dokumen RPJMD sebagai pedoman pembangunan sekaligus instrumen penilaian kinerja pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun, maka peran aktif dari seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Seruyan sangat dibutuhkan.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan RPJMD Kabupaten Seruyan 2025-2029 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);

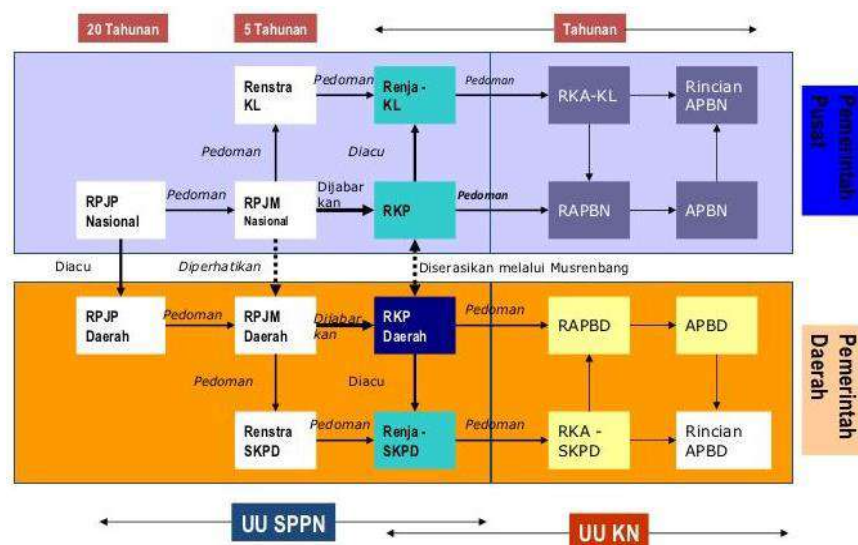
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 120);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98).

Selain berlandaskan pada dasar hukum diatas, penyusunan RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 juga mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029. Sampai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 ditetapkan pada Tanggal 20 Agustus 2025, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 belum ditetapkan sehingga penyusunan RPJMD

Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 mengacu pada Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Rencana pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen-dokumen perencanaan daerah merupakan satu kesatuan yang secara substansi dan sistematis saling terkait dan saling melengkapi. Dalam pelaksanaannya, dokumen-dokumen tersebut terikat secara hierarkis, fungsi (tema dan sektor), serta jangka dan waktu pelaksanaannya. Penjelasan dan justifikasi mengenai keterkaitan antar dokumen dapat dicermati atau sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Secara khusus, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten atau Kota, diamanatkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.



Gambar 1.1. Konstelasi dan Posisi Dokumen RPJMD dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penganggaran

Sumber: <https://jdih.bappenas.go.id/artikel/detailartikel/647>

Sebagai turunannya, penjelasan dan kaitan teknis dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lain diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan tersebut menjelaskan dalam kaitannya secara hierarkis atau hubungan secara vertikal dokumen RPJMD Kabupaten Seruyan dengan dokumen rencana pembangunan dalam jangka panjang tingkat kabupaten serta dokumen rencana pembangunan dalam jangka menengah tingkat provinsi dan nasional. Sehingga RPJMD Kabupaten Seruyan harus selaras dengan muatan mulai dari visi-misi hingga arahan pembangunan yang dirancang dalam dokumen-dokumen tersebut.

Lebih lanjut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 juga mengatur kaitan antara RPJPD dengan RPJMD sesuai dengan Gambar 1.1. Secara jangka waktu, RPJPD akan diacu oleh dokumen rencana pembangunan dalam jangka waktu menengah atau RPJMD yang berlaku atau diacu selama 5 tahun sesuai dengan masa jabatan pimpinan daerah yakni bupati atau wakil bupati terpilih. Dengan kata lain, fungsi RPJMD adalah penerjemahan tujuan serta visi dan misi pembangunan Kepala Daerah terpilih dan juga berisi sasaran pokok RPJPD periode yang sama. Disisi lain, dokumen RPJMD juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen rencana kerja pemerintah 1 tahunan. Dengan kata lain, RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD.

1.3.1. Hubungan antara RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029

Penyusunan RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek pembangunan daerah yang berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Dokumen ini selaras dengan RPJMN Tahun 2025-2029 guna mendukung visi besar bangsa dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025-2045 sebagai bagian dari peringatan satu abad kemerdekaan Indonesia. Dalam perumusannya, kebijakan pembangunan nasional dianalisis secara mendalam melalui kajian terhadap isu-isu strategis dan prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029. Selain itu, penyelarasan dengan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah juga menjadi perhatian utama, khususnya dalam aspek pengembangan wilayah, permasalahan strategis, serta target pembangunan yang perlu didukung pencapaiannya oleh Kabupaten Seruyan.

Analisis terhadap isu strategis dan prioritas pembangunan nasional serta provinsi kemudian diintegrasikan dengan visi, misi, dan agenda pembangunan kepala daerah terpilih. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan isu strategis yang akan menjadi fokus dalam RPJMD Kabupaten Seruyan 2025-2029. Selanjutnya, visi dan misi yang telah dirumuskan diterjemahkan ke dalam strategi serta arah kebijakan pembangunan daerah. Keterkaitan antara visi dan misi RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dengan visi dan misi RPJMN Tahun 2025-2029 disajikan dalam Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1. Hubungan Dokumen RPJMN Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029

RPJMN Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029
VISI	
"BERSAMA INDONESIA MAJU MENUJU INDONESIA EMAS	"TERWUJUDNYA TRANSFORMASI PEMBANGUNAN KABUPATEN

RPJMN Tahun 2025-2029 RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029	
2045"	SERUYAN YANG BERKELANJUTAN, SEJAHTERA, ADIL, MAJU, DAN AMANAH UNTUK SEMUA "
MISI	
Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, Dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Misi 2: Mewujudkan Iklim kehidupan demokratis, agamis, bermoral dan tertib, dan inklusif
Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru	Misi 5: Mewujudkan peningkatan ekonomi dan daya saing investasi daerah berbasis ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan daerah
Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, Dan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur	Misi 3: Mewujudkan pemerataan pembangunan, kemandirian desa, dan inovasi layanan publik
Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, Dan Penyandang Disabilitas	Misi 1: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Membangun Sumberdaya Manusia (SDM) Unggul.
Melanjutkan Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Di Dalam Negeri	Misi 3: Mewujudkan pemerataan pembangunan, kemandirian desa, dan inovasi layanan publik

RPJMN Tahun 2025-2029	RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029
Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pemerataan Ekonomi Dan Pemberantasan Kemiskinan	Misi 5: Mewujudkan peningkatan ekonomi dan daya saing investasi daerah berbasis ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan daerah
Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Dan Narkoba	Misi 2: Mewujudkan Iklim kehidupan demokratis, agamis, bermoral dan tertib
Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam, Dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur	Misi 4: Mewujudkan harmonisasi lingkungan berkelanjutan dan ketahanan bencana

1.3.2. Hubungan antara RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029

Keterkaitan visi dan misi RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dengan visi dan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025-2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2. Hubungan Dokumen RPJMD Prvovinsi Kalimatan Tengah Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029

VISI RPJMD SERUYAN 2025-2029	VISI RPJMD KALIMANTAN TENGAH 2025-2029
Terwujudnya Transformasi Pembangunan Kabupaten Seruyan yang Berkelanjutan, Sejahtera, Adil, Maju dan Amanah Untuk Semua	Mengangkat Harkat Martabat Khususnya Masyarakat Dayak dan Masyarakat Kalimantan Tengah Umumnya (Manggatang Utus), Dengan Spirirt Kearifan Lokal dan Bingkai NKRI Menuju Kalteng maju, Kalteng Bermartabat Untuk Menyambut Indonesia Emas 2045

MISI RPJMD SERUYAN 2025-2029	MISI RPJMD Kalimantan Tengah 2025-2029
Misi 1: mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan membangun Sumberdaya Manusia (SDM) Unggul	Peningkatan pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika melalui pendidikan inklusif sesuai dengan kaidah belom bahadat
	Menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai keadilan sosial
Misi 2: Mewujudkan iklim kehidupan yang berbudaya, demokratis, agamis, bermoral, tertib, dan inklusif	Pemberdayaan kearifan lokal dalam kebijakan dan program pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045
Misi 3: Mewujudkan pemerataan pembangunan, kemandirian desa, dan inovasi layanan publik	Pemberdayaan kearifan lokal dalam kebijakan dan program pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045
	Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan
Misi 4: Mewujudkan harmonisasi lingkungan berkelanjutan dan ketahanan bencana	Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan
Misi 5: Mewujudkan peningkatan ekonomi dan daya saing investasi daerah berbasis ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan daerah	Meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan pemanfaatan sumber daya alam lokal

1.3.3. Hubungan antara RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029, berbagai dokumen perencanaan menjadi acuan utama guna memastikan keselarasan kebijakan pembangunan daerah dengan arah pembangunan nasional dan provinsi. Selain memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029

sebagai pedoman pembangunan nasional serta RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 yang mengarahkan pengembangan wilayah di tingkat provinsi, RPJMD ini juga berlandaskan pada RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045.

RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 berperan sebagai dokumen perencanaan jangka panjang yang menjadi pijakan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah secara berkelanjutan. RPJPD ini tidak hanya memuat visi besar pembangunan Kabupaten Seruyan dalam 20 tahun ke depan, tetapi juga memberikan arah strategis bagi setiap tahapan pembangunan jangka menengah yang dituangkan dalam RPJMD. Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 memiliki kesinambungan dengan periode pembangunan sebelumnya serta menjadi landasan bagi perencanaan pada periode selanjutnya.

Untuk memastikan keterpaduan perencanaan, tahapan pembangunan jangka menengah dalam RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 dirumuskan ke dalam empat tema utama yang menjadi fokus prioritas pembangunan dalam setiap periodenya. Pembagian tema ini bertujuan untuk mengakomodasi berbagai tantangan dan peluang pembangunan yang dihadapi Kabupaten Seruyan, serta memastikan tercapainya visi jangka panjang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Visualisasi tahapan periodisasi pembangunan ini dapat dilihat pada gambar di bawah.

ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN SERUYAN 2025-2045



Sesuai dengan arah kebijakan jangka panjang dalam RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045, periode pertama tahun 2025-2029 difokuskan pada **Fase Penguatan**, yaitu penguatan fondasi transformasi pembangunan di berbagai sektor. Beberapa aspek utama dalam fase ini meliputi: penguatan pelayanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial; peningkatan hilirisasi sektor industri pengolahan serta penguatan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) guna meningkatkan produktivitas tenaga kerja; serta penguatan riset dan inovasi daerah. Selain itu, fase ini juga menitikberatkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan dengan optimalisasi fungsi pemerintahan, peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN), penyusunan regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat sipil. Penguatan regulasi dan ketahanan sosial-ekologi juga menjadi prioritas, seiring dengan pembangunan kewilayahan yang lebih terintegrasi.

Sasaran utama dari fase pertama dalam RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 ini menjadi acuan dalam merumuskan isu strategis untuk RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029. Keterkaitan antara

RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 dapat dilihat dalam Tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.3. Hubungan Dokumen RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 dengan RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029

RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045	RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029
VISI	
"KABUPATEN SERUYAN YANG MAJU, TANGGUH, MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN"	"TERWUJUDNYA TRANSFORMASI PEMBANGUNAN KABUPATEN SERUYAN YANG BERKELANJUTAN, SEJAHTERA, ADIL, MAJU, DAN AMANAH UNTUK SEMUA "
MISI	
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berkualitas	Misi 1: mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan membangun Sumberdaya Manusia (SDM) unggul
Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Misi 3: Mewujudkan pemerataan pembangunan, kemandirian desa, dan inovasi layanan publik
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien, serta Terwujudnya Supremasi Hukum	Misi 3: Mewujudkan pemerataan pembangunan, kemandirian desa, dan inovasi layanan publik
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	Misi 5: Mewujudkan peningkatan ekonomi dan daya saing investasi daerah berbasis ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan daerah
Mewujudkan Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Intra dan Antar Wilayah	Misi 3: Mewujudkan pemerataan pembangunan, kemandirian desa, dan inovasi layanan publik
Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan Daerah	Misi 3: Mewujudkan pemerataan pembangunan, kemandirian desa, dan inovasi layanan publik
Mewujudkan Tata Kelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Misi 4: Mewujudkan harmonisasi lingkungan berkelanjutan dan ketahanan bencana

RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun
2025-2045Meningkatkan Daya Saing dan
Ketahanan DaerahRPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-
2029Misi 4: Mewujudkan harmonisasi
lingkungan berkelanjutan dan
ketahanan bencana

Berdasarkan RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045, tema yang diusung dalam RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 adalah **“Penguatan Fondasi Transformasi”**, yang menjadi dasar utama dalam mewujudkan visi jangka panjang RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045, yaitu **“Kabupaten Seruyan yang Maju, Tangguh, Mandiri, Sejahtera, dan Berkelanjutan”**. Visi ini memiliki makna dan tujuan strategis yang dijabarkan sebagai berikut:

1. **Maju**, yang bermakna Kemajuan Kabupaten Seruyan dicapai melalui pembangunan berkelanjutan di berbagai aspek kehidupan, terutama infrastruktur transportasi. Infrastruktur yang memadai meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas, memperlancar arus barang dan manusia, serta menunjang pembangunan wilayah secara merata dan sinkron antara sektor serta hierarki pemerintahan.
2. **Tangguh** memiliki arti Ketangguhan Kabupaten Seruyan ditunjukkan melalui tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pemerintah harus mampu beradaptasi terhadap berbagai tantangan sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Selain itu, sumber daya manusia yang unggul diperlukan agar masyarakat siap menghadapi perubahan.
3. **Mandiri**, Kemandirian Kabupaten Seruyan diwujudkan melalui daya saing yang kuat di tingkat regional, nasional, hingga internasional. Kemampuan daerah dalam menghadapi guncangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif menjadi kunci utama. Tata kelola yang baik memastikan pemerataan akses sumber daya ekonomi bagi seluruh masyarakat.

4. **Sejahtera**, Kesejahteraan Kabupaten Seruyan meliputi pemenuhan **kebutuhan** dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pangan, air bersih, perumahan layak, pekerjaan, dan jaminan sosial-ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, disparitas sosial dan ekonomi dapat dikurangi, menciptakan kualitas hidup yang tinggi dan merata bagi seluruh warga.
5. **Berkelanjutan**, yang artinya Kabupaten Seruyan berkomitmen **mengelola** sumber daya alam secara bijaksana agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini tanpa mengorbankan generasi mendatang. Prinsip keberlanjutan mencakup pelestarian lingkungan, konservasi sumber daya, serta kesinambungan pembangunan sebagai visi bersama masyarakat dan pemangku kepentingan.

Selain itu, di dalam RPJPD Kabupaten Seruyan 2025-2045 memuat 5 (lima) Sasaran Visi yang menjadi landasan untuk pengembangan dan pembangunan serta menjadi agenda jangka panjang Kabupaten Seruyan menuju **Kabupaten Seruyan yang Maju, Tangguh, Mandiri, Sejahtera, dan Berkelanjutan**, dengan melibatkan partisipasi aktif dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

Sasaran Visi Kabupaten Seruyan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendapatan per Kapita
2. Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan
3. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah
4. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Menuju *Net Zero Emission*

1.3.4. Hubungan antara RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dengan RTRW Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039

Dalam menyusun RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029, selain merujuk pada RPJMN Tahun 2025-2029 dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045, perlu juga memperhatikan

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Seruyan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039. RTRW ini memberikan arah dan pedoman mengenai struktur serta pola ruang yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan sektoral, kewilayahan, dan daerah.

Dokumen RTRW tersebut berperan sebagai acuan utama dalam memastikan bahwa kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJMD tetap sejalan dengan arah kebijakan tata ruang wilayah. Hal ini bertujuan untuk menjamin optimalisasi pemanfaatan ruang dalam lima tahun ke depan, yang mencakup perencanaan struktur ruang, pola ruang, serta indikasi pemanfaatan ruang. Dengan demikian, tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif, kesenjangan wilayah dapat dikurangi, serta tetap mempertahankan keseimbangan tata kelola fungsi keruangan. Selain itu, keselarasan antara sektor dan wilayah dapat terwujud melalui keterpaduan, keterkaitan, serta keseimbangan dalam pembangunan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang RTRW Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039, yang mengamanatkan berbagai aspek yang harus diakomodasi dalam dokumen perencanaan daerah dan sektoral sebagai berikut:

1. Mendorong dan membangun kawasan Ekonomi Terpadu sebagai pusat kegiatan ekonomi wilayah regional baik dalam bidang produksi, pengolahan, perdagangan dan koleksi distribusi;
2. Mengurangi kesenjangan pembangunan dan perkembangan antar kecamatan, melalui peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah di Kabupaten Seruyan;
3. Pengembangan wilayah pusat-pusat pemukiman untuk mendukung pengembangan ekonomi sektor pertanian, perikanan dan pariwisata sesuai potensi wilayah.

4. Peningkatan fungsi Kota Kuala Pembuang menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yang juga sebagai kawasan strategis ekonomi dan peningkatan kawasan strategis lainnya
5. Pensinergian kawasan hutan dan kawasan non hutan;
6. Peningkatan produktivitas wilayah melalui pemanfaatan lahan dengan pengelolaan yang ramah lingkungan;
7. Peningkatan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan;
8. Pengembangan kegiatan usaha potensi pertambangan;
9. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas dalam upaya peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dan merata dalam rangka pewujudan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana;
10. Mendorong peningkatan pelayanan transportasi darat, laut dan udara.

1.3.5. Hubungan antara RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dengan RKPD Kabupaten Seruyan

RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 nantinya akan dijabarkan ke dalam RKPD, sebagai sebuah dokumen perencanaan tahunan. Selain berpedoman pada dokumen RPJMD, penyusunan RKPD juga berpedoman pada RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dimuat dalam pasal 75 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

RKPD berpedoman pada RPJMD terkait dengan penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program perangkat Daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

1.3.6. Hubungan antara RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dengan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan

RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis PD dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah.

Renstra PD sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 272 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

1.3.7. Hubungan antara RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Sektor lainnya

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan berbagai kesepakatan internasional dan dokumen perencanaan multi sektor, antara lain SDGs, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan juga dokumen perencanaan sektoral lainnya yang terkait.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Maksud dari penyusunan RPJMD Kabupaten Seruyan 2025-2029 adalah memberikan dasar penyusunan arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Seruyan untuk 5 (lima) tahun kedepan berdasarkan capaian pembangunan terkini dan isu strategis pembangunan serta kemampuan keuangan daerah lima tahun kedepan. Selain itu, penyusunan RPJMD ini juga bermaksud untuk menjabarkan

visi misi kepala daerah terpilih melalui turunan sasaran hingga program-program prioritas dan indikator kinerja utama daerah.

1.4.2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan RPJMD Kabupaten Seruyan 2025-2029, yaitu:

- 1) Menelaah kinerja pembangunan Kabupaten Seruyan periode lalu.
- 2) Menelaah kinerja keuangan masa lalu dan menganalisis kerangka pendanaan daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan.
- 3) Merumuskan permasalahan pembangunan daerah berdasarkan capaian kinerja pembangunan daerah beberapa tahun terakhir.
- 4) Merumuskan isu-isu strategis pembangunan lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal Kabupaten Seruyan.
- 5) Merumuskan visi misi Kabupaten Seruyan yang memperhatikan visi misi kepala daerah terpilih serta masukan yang disusun secara runtut dari perangkat daerah hingga masyarakat umum
- 6) Merumuskan sasaran, strategi dan arah kebijakan, pentahapan pembangunan hingga program prioritas Kabupaten Seruyan lima tahun mendatang
- 7) Merumuskan program perangkat daerah dan indikator kinerja yang mencakup indikator kinerja utama, indikator kinerja daerah, dan indikator kinerja kunci Kabupaten Seruyan dalam pembangunan lima tahun mendatang

1.5. Sistematika RPJMD Tahun 2025-2029

Dokumen RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 memuat data dan informasi capaian kinerja pembangunan daerah, serta rekomendasi oleh para teknokrat untuk rencana pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, yang disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan

RPJMD, Proses penyusunan RPJMD, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM

Menyajikan gambaran komprehensif mengenai kondisi Kabupaten Seruyan, mencakup aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, serta daya saing daerah. Selain itu, bab ini juga akan mengulas pencapaian dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Seruyan selama periode RPJMD Tahun 2025-2029. Lebih lanjut, bab ini akan menguraikan arah dan kebijakan pembangunan daerah serta proyeksi keuangan daerah, yang bertujuan memberikan gambaran yang jelas mengenai kapasitas finansial untuk mendukung pendanaan pembangunan RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029. Sebagai landasan penyusunan strategi, bab ini juga akan mengidentifikasi berbagai permasalahan daerah yang diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan, serta tantangan nasional dan global, termasuk isu-isu kampanye kepala daerah terpilih. Identifikasi permasalahan ini akan menjadi dasar perumusan isu strategis daerah yang akan menjadi fokus penyelesaian melalui RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Menguraikan secara rinci visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang akan diterjemahkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk periode 2025-

2029. Penyusunan tujuan dan sasaran ini akan dilengkapi dengan penetapan indikator kinerja dan target yang terukur, yang secara langsung akan digunakan untuk menjawab isu-isu strategis daerah yang telah diidentifikasi selama periode RPJMD Tahun 2025-2029. Selain itu, bab ini juga akan memaparkan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang akan menjadi pedoman dalam memfokuskan program-program prioritas daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan, serta mengarahkan pengembangan wilayah Kabupaten Seruyan secara terencana dan berkelanjutan selama periode tersebut.

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Menyajikan secara detail kebijakan dan program prioritas dari setiap perangkat daerah yang akan menjadi fokus utama dalam mencapai sasaran pembangunan jangka menengah. Kebijakan dan program prioritas ini akan menjadi dasar utama dalam penyusunan indikasi rencana program dan kegiatan yang akan tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 2025-2029. Setiap program perangkat daerah akan dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur, target yang jelas, pagu indikatif anggaran, serta penanggung jawab yang spesifik berdasarkan bidang urusan Program Pembangunan Daerah. Selain itu, bab ini juga akan memuat penetapan indikator kinerja daerah yang

bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Indikator-indikator ini akan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah serta Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang akan menjadi tolok ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga akhir periode masa jabatan.

BAB V PENUTUP

Memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan setelah periode RPJMD berakhir atau terjadi perubahan kondisi yang memerlukan penyesuaian.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025-2029**

BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Strategi daerah mengacu pada rencana dan tindakan yang dirancang oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Peran strategis daerah sangat penting dalam konteks otonomi daerah, di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola sebagian besar urusan pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal.

Dilihat dari Peta Regional Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Seruyan terletak di tengah-tengah wilayah provinsi ini sehingga hal ini menjadikan Kabupaten Seruyan memiliki posisi geostrategis. Posisi Kabupaten Seruyan langsung berbatasan dengan Laut Jawa, Kabupaten Melawi di Kalimantan Barat, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Kotawaringin Timur. Posisi geostrategis ini akan meningkatkan keunggulan komparatif Pelabuhan Laut Segintung dan Bandar Udara Perintis Kapten Mulyono Kuala Pembuang yang dimiliki Kabupaten Seruyan akan menarik perekonomian di kabupaten yang ada di sekitar wilayah Kabupaten Seruyan.

Di samping keberadaan Pelabuhan dan Bandara, rencana pembangunan Jalan Poros Seruyan yang membentang dari ujung selatan ke ujung utara Kabupaten Seruyan menjadi potensi besar untuk pengembangan wilayah Kabupaten Seruyan dan meningkatkan potensi posisi geostrategis. Jalan Poros Seruyan akan menjadi jalan alternatif menuju Kalimantan Barat yang akan memangkas waktu perjalanan menuju Kalimantan Barat jika dibandingkan dengan melalui Jalan Trans Kalimantan saat ini. Hal tersebut yang kemudian akan meningkatkan lalu lintas di Kabupaten Seruyan sehingga aksesibilitas dan konektivitas

juga akan meningkat yang berdampak pada perkembangan Kabupaten Seruyan.

a. Lokasi, Luas, dan Batas Wilayah

Kabupaten Seruyan adalah salah satu wilayah kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, dengan pusat pemerintahan berada di Kuala Pembuang (Kecamatan Seruyan Hilir). Wilayah ini terletak pada $0^{\circ}47' - 3^{\circ} 32'$ Lintang Selatan dan $111^{\circ}19' - 112^{\circ}51'$ Bujur Timur dengan luas 15.211,62 km² atau $\pm 9,90\%$ dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut.

Sebelah Utara : Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat
Sebelah Timur : Kabupaten Katingan dan Kabupaten Kotawaringin Timur
Sebelah Selatan : Laut Jawa
Sebelah Barat : Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Kotawaringin Barat

Secara administrasi, Kabupaten Seruyan terdiri atas 10 (sepuluh) kecamatan, yaitu Kecamatan Seruyan Hilir, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kecamatan Danau Sembuluh, Kecamatan Seruyan Raya, Kecamatan Hanau, Kecamatan Danau Seluluk, Kecamatan Seruyan Tengah, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Seruyan Hulu, dan Kecamatan Suling Tambun. Jumlah desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Seruyan yakni 100 desa/kelurahan, yang terbagi ke dalam 97 desa dan 3 kelurahan. Kecamatan Seruyan Hilir memiliki 2 kelurahan, yakni Kelurahan Kuala Pembuang I dan kelurahan Kuala Pembuang II, sementara Kecamatan Seruyan Tengah memiliki 1 (satu) kelurahan, yakni Kelurahan Rantau Pulut.

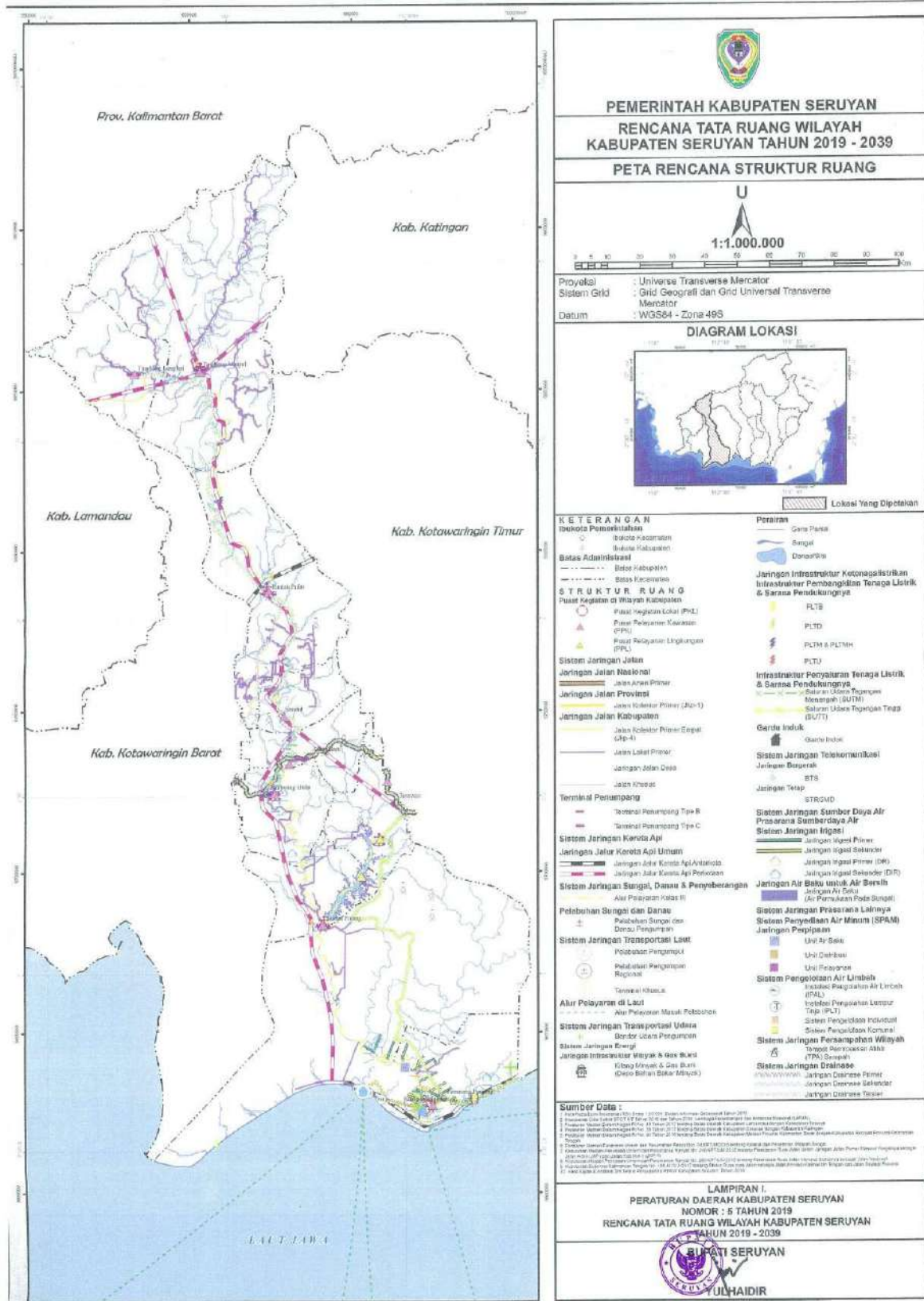
Tabel 2.1. Luas Wilayah Kabupaten Seruyan Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)	Proporsi (%)
1	Seruyan Hilir	10	4.230,10	27,81
2	Seruyan Hilir Timur	6	1.323,41	8,70
3	Danau Sembuluh	8	1.442,06	9,48

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)	Proporsi (%)
4	Seruyan Raya	5	806,22	5,30
5	Hanau	7	509,59	3,35
6	Danau Seluluk	6	543,05	3,57
7	Seruyan Tengah	20	1.245,83	8,19
8	Batu Ampar	9	620,63	4,08
9	Seruyan Hulu	20	3.024,07	19,88
10	Suling Tambun	9	1.376,65	9,05
Kabupaten Seruyan		100	15.211,62	100,00

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Seruyan 2019-2039

Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Seruyan Hilir dengan luas wilayah 4.230,10 km² atau 27,81% dari total luas Kabupaten Seruyan. Sementara itu, kecamatan yang memiliki wilayah terkecil adalah Kecamatan Hanau, yakni seluas 509,59 km² atau 3.35% dari total luas Kabupaten Seruyan.



Gambar 2.1. Peta Administrasi Kecamatan di Kabupaten Seruyan

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Seruyan 2019-2039

b. Topografi

Topografi Kabupaten Seruyan secara garis besar dikelompokkan menjadi 6 (enam) satuan, yaitu:

i. Daerah Dataran Pantai

Wilayah ini merupakan dataran rendah yang terbentuk dari hasil endapan pantai. Umumnya didominasi oleh tanah-tanah dengan tekstur kasar.

ii. Daerah Dataran Aluvial

Wilayah ini merupakan dataran rendah yang terbentuk dari hasil endapan sungai. Wilayah ini umumnya terdapat di tepi sungai dan atau danau kecil. Dataran ini mempunyai tanah dengan tekstur sedang sampai halus.

iii. Daerah Rawa

Merupakan rawa belakang tanggul (*levee*) yang terbentuk dari endapan bahan mineral atau pun juga bahan organik. Pengaruh air sangat dominan sepanjang tahun. Pada wilayah ini, akibat adanya endapan bahan organik, sering dijumpai tanah gambut.

iv. Daerah Pegunungan/Perbukitan

Wilayah ini merupakan daerah dataran tinggi berupa bentang alam perbukitan yang dicirikan oleh adanya bukit-bukit atau singkapan-singkapan. Wilayah pegunungan/perbukitan umumnya dijumpai pada daerah bagian utara Kabupaten Seruyan.

v. Delta/Pulau

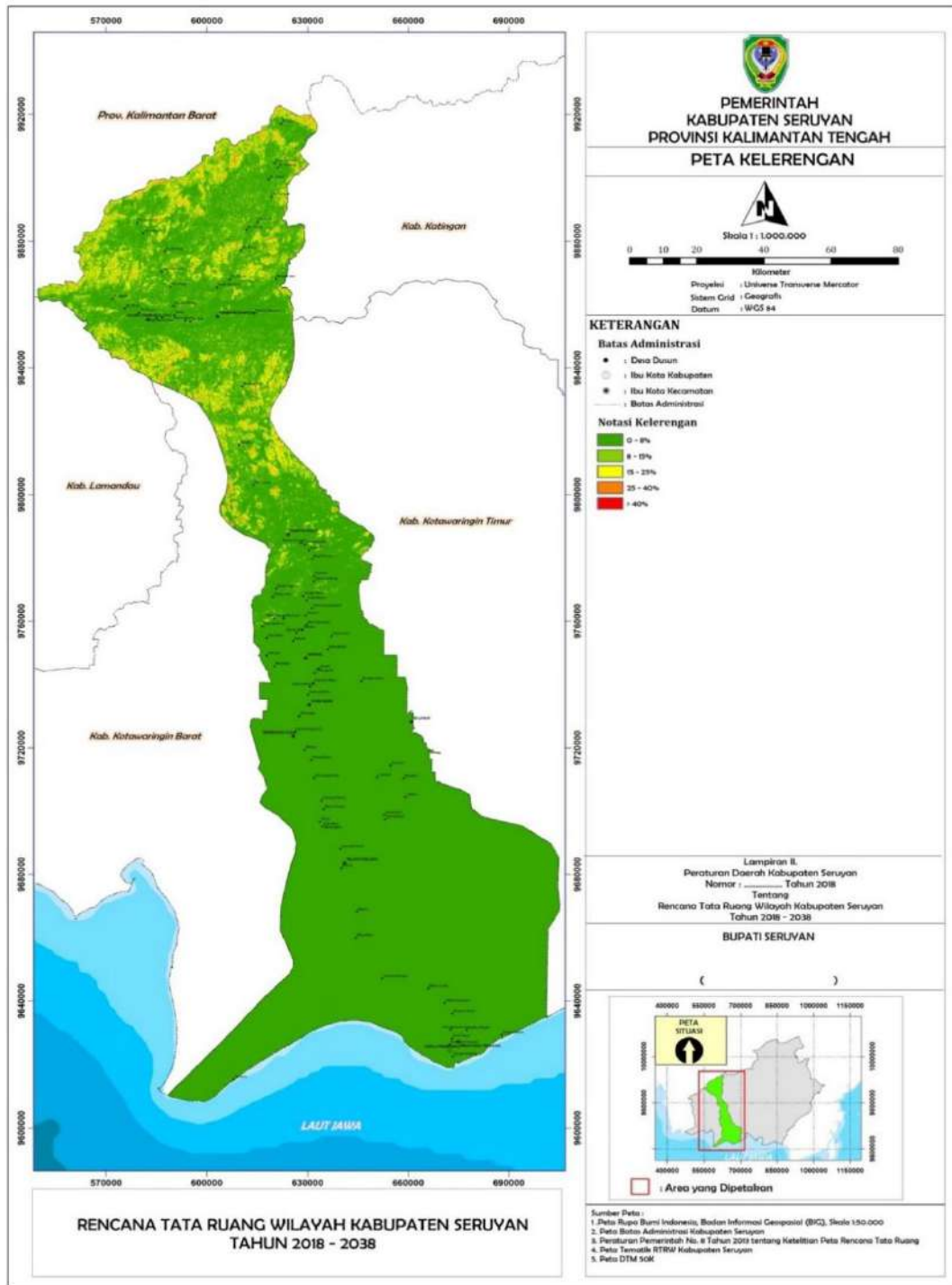
Merupakan daratan dengan luasan yang kecil di tengah laut maupun sungai.

vi. Daerah Perairan

Bagian yang termasuk lain-lain adalah tubuh air, diantaranya danau dan rawa, yaitu merupakan depresi atau cekungan yang airnya masih dalam.

Kabupaten Seruyan memiliki topografi bervariasi membujur secara vertikal dari selatan ke utara. Dilihat dari topografinya, lahan di Wilayah

Kabupaten Seruyan memiliki kemiringan lereng datar hingga berbukit, yaitu dengan kemiringan lereng berkisar antara 0% - >60%. Berdasarkan kemiringan lereng, lahan di Kabupaten Seruyan dapat dikategorikan dalam beberapa kategori sebagai berikut: lahan dengan topografi datar (kelas lereng <2%), berombak (2 – 8%) hingga bergelombang (kelas lereng 9 – 15%), umumnya terdapat di bagian selatan Wilayah Kabupaten Seruyan dan wilayah yang dekat pinggir sungai. Lahan dengan topografi berbukit kecil (kelas lereng 16 - 25%) umumnya dijumpai di bagian tengah Kabupaten Seruyan, sedangkan lahan dengan topografi berbukit (kelas lereng >40%) pada umumnya dijumpai di bagian utara wilayah Kabupaten Seruyan, yaitu merupakan daerah limitasi untuk pengembangan.



Gambar 2.2. Peta Kelerengan Kabupaten Seruyan

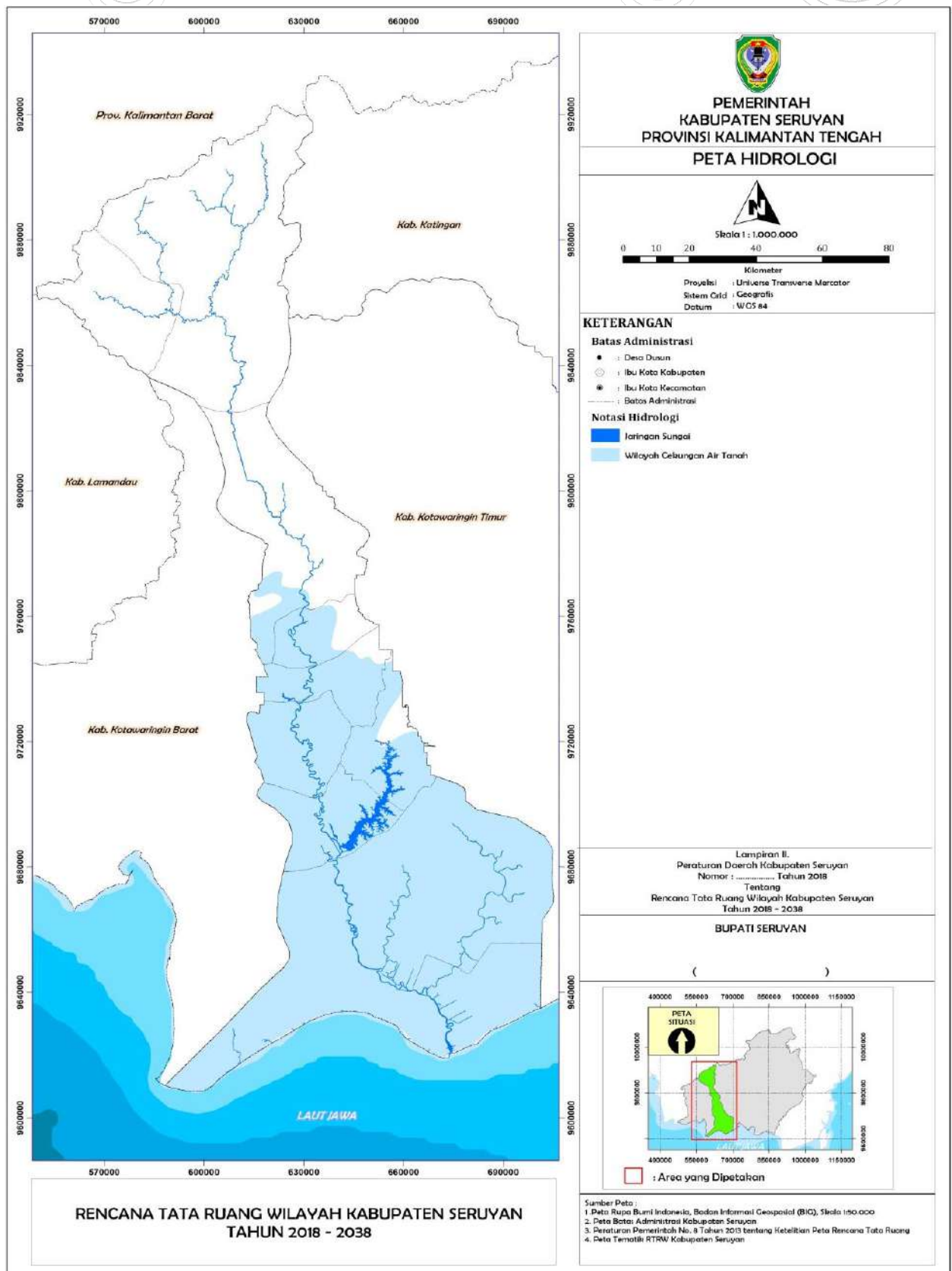
Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Seruyan 2019-2039

c. Hidrologi

Pola aliran sungai di Kabupaten Seruyan sebagian besar berpola dendritik dengan salah satu ciri utamanya adalah apabila terjadi hujan merata di seluruh daerah aliran sungai, maka puncak banjirnya akan

demikian tinggi hingga mempunyai potensi besar untuk menggenangi daerah yang ada di sekitar aliran sungai, khususnya di bagian hilir sungai. Sungai Seruyan dengan panjang sekitar 350 km, merupakan sungai utama yang mengalir dari pegunungan Schwaner di utara menuju Laut Jawa di bagian Selatan. Sungai Seruyan memiliki 6 (enam) buah anak sungai yang besar dan dapat digunakan sebagai sumber air maupun sebagai sarana transportasi. Keenam anak sungai tersebut adalah Danau Sembuluh, Kuala Besar, Manjul, Salau, Pukun dan Kale. Air sungai tersebut telah dimanfaatkan oleh penduduk untuk mandi-cuci-kakus (MCK), air minum, serta irigasi persawahan. Selain air sungai, penduduk juga memanfaatkan air tanah dengan kedalaman air tanah berkisar antara 1 sampai 7 meter pada sistem lahan dataran seperti di Kecamatan Seruyan Hilir.

Sistem jaringan sumber daya air salah satunya terdiri atas sumber air yang meliputi danau yang tersebar di seluruh kecamatan yaitu Danau Sembuluh, Danau Bayuku, Danau Rangas, Danau Segintung, Danau Tanjung Baru, Danau Baung, Danau Laki Bini, Danau Tengkorak, Danau Hantasan Samut, Danau Sari, Danau Kumis, Danau Bogam, Danau Rasau Bangkuk, Danau Empat Belas, Danau Tongkang, Danau Gajah Mina, Danau A'as, Danau Seluluk, Danau Panjang, Danau Pinggir Padang, Danau Burung, Danau Bakung, Danau Marma, Danau Kepala Buaya, Danau Batakan, Danau Pondok Paikat, Danau Tampudau, Danau Jajangkit, Danau Mukat, Danau Bangaluan, Danau Kumpai Panjang, Danau Silip, Danau Simpang Pipih, Danau Belanti, Danau Baru, Danau Parang Batang, Danau Gelanggang, Danau Jahitan, dan Danau Papundak.



Gambar 2.3. Peta Hidrologi Kabupaten Seruyan

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Seruyan 2019-2039

d. Klimatologi

Kabupaten Seruyan termasuk kategori Tipe Iklim A yaitu Sangat Basah. Hal itu tergambar dari hasil perhitungan jumlah bulan-bulan kering dan bulan-bulan basah setiap tahun kemudian dirata-ratakan, yang hasil nilainya yaitu sebesar 0,124 ($Q = 0,124$). Menurut RePPPProT Curah Hujan di Kabupaten Seruyan cukup tinggi dengan curah hujan tahunan terendah 2.300 mm/tahun dan tertinggi mencapai 4.300 mm/tahun. Jumlah bulan basah terendah berkisar dari 0-5 bulan dalam setahun dan jumlah bulan basah tertinggi berkisar antara 6-11 bulan. Sedangkan jumlah bulan kering terendah yaitu 0-1 bulan dalam setahun dan jumlah bulan kering tertinggi berkisar 5-6 bulan dalam setahun. Rata-rata suhu di Kabupaten Seruyan yaitu 20°C - 32°C dengan kelembaban relatif (RH) rata-rata 75 persen.

e. Penggunaan Lahan

Kabupaten Seruyan memiliki luas wilayah sebesar 15.211,62 km². Secara administratif Kabupaten Seruyan terbagi menjadi 10 kecamatan. Kondisi fisiografi wilayahnya cukup bervariasi, mulai dari perbukitan hingga pesisir pantai sehingga penggunaan lahannya pun juga bervariasi. Kawasan hutan dan perkebunan secara umum menjadi yang paling dominan untuk menggambarkan kondisi kegiatan ekonomi di Kabupaten Seruyan. Kegiatan perkebunan masih dominan sehingga kawasan ini menjadi cukup dominan di antara kawasan lain. Selain itu Kabupaten Seruyan juga memiliki kawasan taman nasional yang cukup luas.

Berdasarkan Dokumen RTRW Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039, rencana peruntukan lahan Kabupaten Seruyan meliputi:

Tabel 2.2. Rencana Peruntukan Lahan Kabupaten Seruyan

Rencana Peruntukan Lahan	Luas (Ha)
Danau	8.440,02
Kawasan Budidaya Lainnya	17.800,10
Kawasan Hutan Lindung	30.909,60
Kawasan Hutan Produksi Terbatas	414.131,65

Rencana Peruntukan Lahan	Luas (Ha)
Kawasan Hutan Produksi Tetap	357.508,28
Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	251.787,99
Kawasan Industri	787,85
Kawasan Pariwisata	407,28
Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik	9,63
Kawasan Perikanan Budidaya	3.865,25
Kawasan Perkebunan	237.856,03
Kawasan Permukiman Perdesaan	5.252,21
Kawasan Permukiman Perkotaan	949,29
Kawasan Pertahanan Dan Keamanan	50,66
Kawasan Pertambangan Mineral Logam	3.699,54
Kawasan Ruang Terbuka Hijau	106,45
Kawasan Sekitar Danau/Waduk	3.280,99
Kawasan Tanaman Pangan	14.447,49
Kawasan Transmigrasi	4.393,19
Kawasan Transportasi	33,89
Sempadan Pantai	1.261,85
Sempadan Sungai	20.132,05
Sungai	8.053,76
Taman Nasional	135.995,96

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039

f. Wilayah Rawan Bencana

Pembahasan wilayah rawan bencana di Kabupaten Seruyan meliputi:

a. Potensi Bencana

Untuk wilayah Kalimantan Tengah termasuk Kabupaten Seruyan, potensi rawan bencana terdiri dari kawasan rawan bencana tanah longsor, bencana banjir dan kebakaran hutan, lahan dan gambut. Berdasarkan karakteristik penyebab bencana, dapat diidentifikasi kawasan rawan bencana tersebut sebagai berikut:

- **Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor**

Pada bagian utara dan tengah Kabupaten Seruyan tersebar di Kecamatan Seruyan Tengah, Kecamatan Seruyan Hulu, Kecamatan Suling Tambun, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Danau Seluluk, dan Kecamatan Hanau, berupa potensi bencana longsor lereng dan longsor tebing sungai yang pada umumnya sudah dihuni sebagai kawasan permukiman (terbangun).

- **Kawasan Kebakaran Hutan, Lahan, dan Gambut**

Bencana kebakaran hutan, lahan, dan gambut kerap terjadi di Kabupaten Seruyan, terdapat sejumlah titik kebakaran hutan, lahan, dan gambut yang tersebar di seluruh Kecamatan. Kawasan rawan kebakaran hutan/lahan adalah kawasan yang sebelumnya telah terjadi kebakaran (bekas kebakaran) dan lokasi spotnya tersebar pada kawasan bergambut yang tersebar di Kecamatan Seruyan Hilir, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kecamatan Danau Sembuluh, Kecamatan Seruyan Raya, Kecamatan Danau Seluluk, Kecamatan Hanau, Kecamatan Batu Ampar, dan Kecamatan Seruyan Tengah. Oleh karena itu, usaha pengelolaan kawasan rawan kebakaran hutan, lahan dan gambut perlu diwaspadai.

- **Kawasan Rawan Bencana Banjir**

Kawasan rawan bencana banjir berupa banjir genangan dan banjir bandang (*flash flood*). Potensi banjir bandang hanya dijumpai di wilayah Kecamatan Seruyan Hulu, khususnya daerah-daerah di sekitar sungai besar meliputi Sungai Seruyan. Sedangkan banjir genangan berpotensi terjadi di semua wilayah Kecamatan kecuali Kecamatan Seruyan Hulu.

- **Kawasan Gelombang Pasang dan Abrasi**

Kawasan rawan gelombang pasang yaitu kawasan yang berada di daerah pantai di Kabupaten Seruyan. Sedangkan kawasan rawan abrasi berpotensi terjadi pada garis pantai di pesisir pantai. Kawasan rawan abrasi pantai di Kabupaten Seruyan terdapat di Kecamatan

Seruyan Hilir dan Kecamatan Seruyan Hilir Timur khususnya sekitar pesisir pantai.

Tabel 2.3. Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Seruyan

No	Kawasan Rawan Bencana	Lokasi/Kecamatan	Luas (ha)/Panjang (km)
I.	Longsor		
1.	Zona A	Seruyan Hulu dan Seruyan Tengah	195.231,50 ha
2.	Zona B		44.157,03 ha
3.	Zona C		341.912,77 ha
II.	A. Banjir		
	Bandang	Seruyan Hulu	172.472,37 ha
	B. Genangan/Luapan		
	1. Pasang Surut A1	Seruyan Hilir	120.952,09 ha
	2. Genangan A2	Seruyan Hilir, Danau Sembuluh, Hanau, Seruyan Tengah	27.885,90 ha

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Seruyan 2019-2039

b. Tingkat Ancaman

- Kabupaten Seruyan memiliki indeks ancaman bencana banjir tinggi dan penduduk terpapar tinggi, sehingga memiliki tingkat ancaman bencana banjir TINGGI.
- Indeks ancaman kebakaran hutan, lahan dan gambut tinggi dan penduduk terpapar tinggi, sehingga tingkat ancaman kebakaran hutan, lahan dan gambut adalah TINGGI.
- Indeks ancaman kebakaran tinggi dan penduduk terpapar sedang sehingga tingkat ancaman bahaya kebakaran gedung dan rumah adalah TINGGI.
- Indeks ancaman bencana cuaca buruk (ekstrim) tinggi dan penduduk terpapar sedang, sehingga tingkat ancaman bencana cuaca buruk (ekstrim) adalah TINGGI.
- Indeks ancaman kekeringan tinggi dan indeks penduduk terpapar sedang, sehingga tingkat ancaman bahaya kekeringan adalah TINGGI.

- Indeks ancaman bahaya tanah longsor rendah dan indeks penduduk terpapar rendah, sehingga tingkat bahaya ancaman tanah longsor adalah RENDAH.
- Indeks ancaman kegagalan teknologi tinggi, penduduk terpapar rendah sehingga tingkat bahaya bencananya SEDANG.
- Indeks ancaman wabah penyakit rendah dan penduduk terpapar rendah sehingga tingkat bahayanya RENDAH.
- Indeks ancaman konflik sosial tinggi, dan penduduk terpapar rendah sehingga tingkat bahayanya SEDANG.

c. Tingkat Kerentanan

- Pengkajian risiko bencana banjir di wilayah Kabupaten Seruyan memiliki dampak terhadap penduduk sekitar, kerusakan hutan dan lahan serta kerugian ekonomi. Besaran dampak yang diakibatkan oleh bencana banjir tersebut adalah:
 - 1) 107.123 jiwa penduduk yang tinggal/beraktifitas di sekitar wilayah pesisir dengan penduduk terpapar sebesar 3.180 jiwa.
 - 2) 25.356 ha lingkungan akan rusak.
 - 3) 716 miliar rupiah kerugian ekonomi daerah.
- Pengkajian risiko bencana kebakaran hutan, lahan, dan gambut di wilayah Kabupaten Seruyan memiliki dampak terhadap penduduk sekitar, kerusakan lahan dan kerugian ekonomi. Besaran dampak yang diakibatkan oleh bencana kebakaran hutan, lahan dan gambut tersebut adalah:
 - 1) 151.065 jiwa penduduk yang tinggal/beraktifitas wilayah Kabupaten Seruyan.
 - 2) 8,056 ha lingkungan akan rusak.
 - 3) 14 miliar rupiah kerugian ekonomi.
- Pengkajian risiko bencana kebakaran gedung dan rumah di wilayah Kabupaten Seruyan memiliki dampak terhadap penduduk terkena dampak, kerusakan gedung/rumah, dan

kerugian ekonomi. Besaran dampak yang diakibatkan oleh bencana kebakaran gedung dan rumah tersebut adalah:

- 1) 196 jiwa penduduk terkena dampak.
- 2) 49 unit rumah rusak berat.
- 3) Kerugian daerah rendah.

- Pengkajian risiko bencana cuaca buruk (ekstrem) di wilayah Kabupaten Seruyan memiliki dampak terhadap penduduk terkena dampak, kerusakan ringan terhadap gedung/rumah dan kerugian ekonomi. Besaran dampak yang diakibatkan oleh bencana kebakaran gedung dan rumah tersebut adalah:

- 2.536 jiwa penduduk terkena dampak.
- Kerugian daerah rendah.
- Pengkajian risiko bencana kekeringan di Wilayah Kabupaten Seruyan memiliki dampak terhadap penduduk sekitarnya, kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi. Besaran dampak yang diakibatkan oleh bencana kekeringan adalah:

- 1) 12.455 jiwa penduduk terkena dampak.
- 2) 492 ha kerusakan lingkungan.
- 3) 376 miliar rupiah kerugian daerah.

- Pengkajian risiko bencana tanah longsor di wilayah Kabupaten Seruyan memiliki dampak yang sangat kecil, baik terhadap penduduk karena jauh dari permukiman, kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi. Besaran dampak yang diakibatkan oleh bencana tanah longsor adalah:

- 1) Sangat kecil penduduk terkena dampak.
- 2) 4.009 ha kerusakan lingkungan.
- 3) 175 juta rupiah kerugian daerah.

- Pengkajian risiko bencana kegagalan teknologi di wilayah Kabupaten Seruyan memiliki dampak yang sangat kecil baik terhadap penduduk karena jauh dari pemukiman, kerusakan

lingkungan dan kerugian ekonomi. Besaran dampak yang diakibatkan oleh bencana kegagalan teknologi adalah:

- 1) Sangat kecil penduduk terkena dampak.
 - 2) Sungai Seruyan dan Danau Sembuluh.
 - 3) Penduduk di sekitar pabrik
- Pengkajian risiko bencana wabah penyakit di wilayah Kabupaten Seruyan memiliki dampak yang sangat besar terhadap penduduk, terkait munculnya Pandemi Covid-19 sampai dengan bulan Maret 2021 berdasarkan data pantauan Covid-19 di Kabupaten Seruyan telah terkonfirmasi positif sebanyak 476 **kasus**, dengan total kesembuhan sejumlah 461 orang dan meninggal sejumlah 4 orang, termasuk kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi. Besaran dampak yang diakibatkan oleh bencana wabah penyakit adalah:
 - 1) Sangat kecil penduduk terkena dampak.
 - 2) Terdampak relatif parah adalah daerah padat, daerah dengan struktur lapangan kerja informal non pertanian relatif besar, dan daerah dengan struktur ekonomi menonjol di sektor pariwisata, industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi.
 - **Pengkajian** risiko bencana konflik sosial di wilayah Kabupaten Seruyan memiliki dampak yang sangat besar baik terhadap penduduk, kerusakan lingkungan, dan kerugian ekonomi. Besaran dampak yang diakibatkan oleh bencana konflik sosial adalah:
 - 1) Sangat kecil penduduk terkena dampak.
 - 2) Lahan yang kena konflik.
 - 3) Penduduk/pemilik lahan.

d. Tingkat Kapasitas

Berdasarkan capaian-capaian penanggulangan bencana selama ini, indeks ketahanan daerah berada pada level 2, yaitu daerah

telah melaksanakan beberapa tindakan pengurangan risiko bencana dengan pencapaian-pencapaian yang masih bersifat sporadis yang disebabkan belum adanya komitmen kelembagaan dan/atau kebijakan sistematis.

e. Tingkat Risiko Bencana

Berdasarkan analisis terhadap indeks tingkat ancaman, indeks kerugian, indeks penduduk terpapar dan indeks kapasitas, dapat diperoleh tingkat risikonya tinggi:

- Bencana banjir tingkat risikonya tinggi.
- Bencana kebakaran hutan, lahan dan gambut tingkat risikonya tinggi.
- Bencana kekeringan tingkat risikonya tinggi.
- Bencana cuaca buruk tingkat risikonya sedang.
- Bencana kebakaran gedung dan rumah tingkat risikonya rendah.
- Bencana tanah longsor tingkat risikonya rendah.
- Bencana konflik sosial tingkat risikonya tinggi.
- Bencana wabah penyakit tingkat risikonya tinggi.
- Bencana kegagalan teknologi tingkat risikonya rendah.
- Bencana prioritas yang terdapat di Kabupaten Seruyan adalah banjir, kebakaran hutan, lahan, dan gambut, kekeringan, serta konflik sosial.

2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

Kabupaten Seruyan memiliki berbagai potensi daerah yang meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata. Potensi sumber daya Kabupaten Seruyan meliputi:

a. Pertanian

Luas lahan pertanian di Kabupaten Seruyan Tahun 2024 terdiri dari lahan sawah 7.514 ha dan bukan lahan sawah 332.193,00 ha, dengan komoditas pertanian yang dibudidayakan cukup beragam. Berikut

merupakan rincian dari luas lahan dan komoditas pertanian di Kabupaten Seruyan:

Tabel 2.4. Luas Lahan Pertanian Kabupaten Seruyan

No	Jenis Lahan	Luas (ha)
A	Lahan Sawah	7.514
1	Tadah Hujan	5.687
2	Rawa Pasang Surut	625
3	Rawa Lebak	1.202
B	Lahan Pertanian Bukan Sawah	332.193,00
1	Tegal/Kebun	54.277
2	Ladang/Huma	9.649
3	Perkebunan	82.565
4	Ditanami Pohon/Hutan Rakyat	14.665
5	Padang Pengembalaan/Padang Rumput	7.235
6	Hutan Negara	3.619
7	Sementara Tidak Diusahakan	158.194
8	Lainnya (Tambak, Kolam, Empang, dll)	1.989
Luas Sawah dan Lahan Pertanian Bukan Sawah		234.216,31

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan, 2024

**Tabel 2.5. Hasil Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Seruyan
Tahun 2024**

No	Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	Padi Sawah	4.049,50	15.881,80
2	Padi lahan kering/ladang	963,50	2.505,10
3	Jagung	52,80	135,30
4	Kacang tanah	13,65	15,07
5	Ubi kayu	22,75	397,54
6	Ubi Jalar	36,15	397,54
Jumlah		5.891,30	5.138,35

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan, 2024

Luas lahan pertanian di Kabupaten Seruyan baik lahan sawah maupun lahan pertanian bukan sawah sebesar 234.216,31 ha. Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sebesar 23,58% dari total lahan pertanian di Kabupaten Seruyan merupakan

lahan pertanian yang diberi perlindungan berdasarkan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Luas perencanaan lahan pertanian yang dilindungi di Kabupaten Seruyan seluas 55.227,28 ha yang terbagi menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 27.613,64 ha, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 17.372,95 ha, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 10.240,69 ha. Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan dirsetiap kecamatan di Kabupaten Seruyan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6. Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

No	Perencanaan Lahan Pertanian	Luas (Ha)
I	Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	27.613,64
II	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	17.372,95
1	Kecamatan Seruyan Hilir	2.980,45
2	Kecamatan Seruyan Hilir Timur	2.901,32
3	Kecamatan Danau Sembuluh	568,16
4	Kecamatan Seruyan Raya	2.177,63
5	Kecamatan Hanau	796,56
6	Kecamatan Danau Seluluk	2.229,62
7	Kecamatan Batu Ampar	537,60
8	Kecamatan Seruyan Tengah	4.491,95
9	Kecamatan Seruyan Hulu	606,27
10	Kecamatan Suling Tambun	83,39
III	Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	10.240,69
Jumlah		55.227,28

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2023

b. Perkebunan

Kabupaten Seruyan memiliki potensi besar dalam sektor perkebunan dengan komoditas unggulan berupa kelapa sawit yang dikelola oleh rakyat maupun Perusahaan Besar Swasta (PBS). Pada tahun 2024, kelapa sawit perkebunan rakyat tercatat memiliki luas areal sebesar 30.698,75 hektar dengan luas panen 24.783 hektar dan produksi mencapai 26.648,26 ton dengan produktivitas 1,075 ton per hektar. Sementara itu, kelapa sawit PBS menempati luas areal 419.961,56

hektar, luas panen 379.881,46 hektar, serta produksi sebesar 1.543.979,46 ton dengan produktivitas mencapai 4,064 ton per hektar. Selain kelapa sawit, komoditas perkebunan lainnya yang turut dikembangkan di daerah ini meliputi karet dengan luas areal 12.824 hektar dan produksi 3.876,25 ton, kelapa dalam seluas 1.572 hektar dengan produksi 1.360 ton, kopi robusta seluas 43 hektar dengan produksi 7,75 ton, jambu mete dengan luas areal 38,5 hektar dan produksi 1,5 ton, aren dengan luas areal 77,75 hektar dan produksi 7 ton, serta lada seluas 15,05 hektar dengan produksi 1,57 ton. Total luas areal perkebunan di Kabupaten Seruyan pada tahun 2024 mencapai 465.229,86 hektar dengan luas panen 413.288,96 hektar dan total produksi sebesar 1.575.881,40 ton.

Tabel 2.7. Hasil Komoditi Perkebunan Kabupaten Seruyan Tahun 2022—2024

No	Jenis Komoditas Perkebunan	Luas Areal (Ha)	Luas Panen (Ha)	Jumlah Produksi (Ton)	Produksi Per Hektar (Ton)
2022					
1	Kelapa sawit	705.418,46	467.844,05	1.656.167,94	3,54
2	Karet	13.929,50	13.091,92	6.676,88	0,51
3	Kelapa dalam	1.559,00	1.165,50	1.422,42	1,22
4	Kopi Robusta	28,00	1,23	2,75	3,15
5	Jambu mete	139,50	2,68	1,50	0,56
6	Aren	84,00	30,50	7,32	0,24
7	Lada	14,80	7,26	1,67	0,23
Jumlah		721.173,26	482.143,19	1.664.280,48	
2023					
1	Kelapa Sawit Perkebunan Rakyat	29.890,88	24.557,13	25.476,435	1,037
2	Kelapa sawit PBS	660.226,48	454.001,61	1.241.167	2,733
3	Karet	13.579	7.673,4	15.045,97	1,960
4	Kelapa dalam	1.553	1.150,75	5.486	4,767
5	Kopi Robusta	41,2	11	30,9	2,809
6	Jambu mete	285	5,25	7	1,333
7	Aren	75	242,5	28	0,115
8	Lada	15,1	25,5	6,37	0,249

No	Jenis Komoditas Perkebunan	Luas Areal (Ha)	Luas Panen (Ha)	Jumlah Produksi (Ton)	Produksi Per Hektar (Ton)
	Jumlah	705.665,55	487.667,14	1.287.247,675	
2024					
1	Kelapa Sawit Perkebunan Rakyat	30.698,75	24.783,00	26.648,26	1,075
2	Kelapa sawit PBS	419.961,56	379.881,46	1.543.979	4,064
3	Karet	12.824	7.407,75	3.876,25	0,523
4	Kelapa dalam	1.572	1.164,00	1.360	1,169
5	Kopi Robusta	43	11	7,75	0,705
6	Jambu mete	38,5	5,5	1,5	0,273
7	Aren	77,75	27	7	0,259
8	Lada	15,05	9,25	1,57	0,170
	Jumlah	465.229,86	413.288,96	1.575.881,40	

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan, 2022-2024

Sebagai komoditas perkebunan paling besar di Kabupaten Seruyan, kelapa sawit menjadi potensi dan daya Tarik tersendiri bagi wilayah ini. Berdasarkan jenis kebunnya, kelapa sawit ditanam pada perkebunan rakyat dan Perkebunan Besar Swasta (PBS). Jumlah Perkebunan Besar Swasta (PBS) di Kabupaten Seruyan semakin bertambah dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari jumlah perusahaan yang mengajukan izin perkebunan yang semakin bertambah tiap tahunnya. Berdasarkan wilayah operasionalnya, Perkebunan Besar Swasta di Kabupaten Seruyan dibedakan menjadi 2 yakni operasional dalam Kabupaten Seruyan dan Lintas Kabupaten. Berikut merupakan informasi terkait Perkebunan Besar Swasta (PBS) yang berada di Kabupaten Seruyan.

Tabel 2.8. Daftar Perkebunan Besar Swasta (PBS) di Kabupaten Seruyan Tahun 2024

No	Perusahaan	Luas Perkebunan (Ha)	Wilayah Operasional	Lokasi	Operasional
1	PT. Aditunggal Mahajaya	9.735,00	Kabupaten Seruyan	Seruyan Tengah	Sudah Beroperasi
2	PT. Bangun Jaya Alam	13.500,00	Kabupaten	Seruyan	Sudah

No	Perusahaan	Luas Perkebunan (Ha)	Wilayah Operasional	Lokasi	Operasional
	Permai		Seruyan	Tengah	Beroperasi
3	PT. Binasawit Abadi Pratama	1.250,00	Kabupaten Seruyan	Seruyan Tengah	Sudah Beroperasi
4	PT. Binasawit Abadi Pratama	20.180,00	Kabupaten Seruyan	Seruyan Tengah	Sudah Beroperasi
5	PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar	17.221,00	Kabupaten Seruyan	Seruyan Hilir	Sudah Beroperasi
6	PT. Ciptatani Kumai Sejahtera	11.243,00	Kabupaten Seruyan	Seruyan Tengah	Sudah Beroperasi
7	PT. Gawi Bahandep Sawit Mekar	18.861,89	Kabupaten Seruyan	Seruyan Hilir	Sudah Beroperasi
8	PT. Hamparan Masawit Bangun Persada	11.200,00	Kabupaten Seruyan	Danau Sembuluh	Sudah Beroperasi
9	PT. Kerry Sawit Indonesia	18.994,00	Kabupaten Seruyan	Danau Sembuluh	Sudah Beroperasi
10	PT. Mega Ika Khansa	2.617,08	Kabupaten Seruyan	Danau Sembuluh	Sudah Beroperasi
11	PT. Menthobi Sawit Jaya	1.150,00	Kabupaten Seruyan	Hanau	Sudah Beroperasi
12	PT. Mitrakarya Agroindo	20.000,00	Kabupaten Seruyan	Hanau	Sudah Beroperasi
13	PT. Rim Capital	5.252,00	Kabupaten Seruyan	Hanau & Danau Sembuluh	Sudah Beroperasi
14	PT. Musirawas Citraharpindo	15.000,00	Kabupaten Seruyan	Hanau	Sudah Beroperasi
15	PT. Rimba Harapan Sakti	13.790,00	Kabupaten Seruyan	Seruyan Hilir	Sudah Beroperasi
16	PT. Rim Capital	3.200,00	Kabupaten Seruyan	Hanau & Danau Sembuluh	Sudah Beroperasi
17	PT. Salonok Ladang Mas	14.189,00	Kabupaten Seruyan	Danau Sembuluh	Sudah Beroperasi
18	PT. Sumur Pandanwangi	945,4	Kabupaten Seruyan	Seruyan Hilir Timur	Sudah Beroperasi
19	PT. Sarana Titian Permata	19.979,00	Kabupaten Seruyan	Seruyan Hilir	Sudah Beroperasi
20	PT. Sawitmas Nugraha Perdana	10.829,00	Kabupaten Seruyan	Danau Sembuluh	Sudah Beroperasi
21	PT. Sumur Pandanwangi	4.670,00	Kabupaten Seruyan	Hanau	Sudah Beroperasi

No	Perusahaan	Luas Perkebunan (Ha)	Wilayah Operasional	Lokasi	Operasional
22	PT. Indotruba Timur	763,69	Kabupaten Seruyan	Hanau	Sudah Beroperasi
23	PT. Sumur Pandanwangi	7.468,74	Kabupaten Seruyan	Seruyan Hilir Timur	Sudah Beroperasi
24	PT. Telaga Sari Persada	2.573,00	Kabupaten Seruyan	Seruyan Tengah	Sudah Beroperasi
25	PT. Wana Sawit Subur Lestari	14.200,00	Kabupaten Seruyan	Hanau, Danau Sembuluh, dan Seruyan Hilir	Sudah Beroperasi
26	PT. Ahmad Saleh Perkasa	6.136,79	Kabupaten Seruyan	Hanau	Belum Beroperasi
27	PT. Tapian Nadenggan	17.062,11	Kabupaten Seruyan	Danau Seluluk & Batu Ampar	Sudah Beroperasi
28	PT. Indotruba Timur	1.253,80	Kabupaten Seruyan	Hanau	Sudah Beroperasi
29	PT. Agrindo Sawit Mandiri	-	Kabupaten Seruyan	Danau Seluluk	Sudah Beroperasi
30	PT. Hanau Panen Raya Sejahtera	-	Kabupaten Seruyan	Danau Seluluk	Sudah Beroperasi
31	PT. Surya Inti Palmoil	-	Kabupaten Seruyan	Hanau	Sudah Beroperasi
32	PT. Ahmad Saleh Perkasa	10.705,00	Kabupaten Seruyan	Hanau	Belum Beroperasi
33	PT. Andalan Sentosa Abadi	17.169,00	Kabupaten Seruyan	Batu Ampar	Belum Beroperasi
34	PT. Rimba Sawit Utama Planindo	15.000,00	Kabupaten Seruyan	Seruyan Hilir	Belum Beroperasi
35	PT. Khatulistiwa Sawit Sejahtera	-	Kabupaten Seruyan	Seruyan Tengah	Belum Beroperasi
36	PT. Millenium Resources	19.057,00	Kabupaten Seruyan	Seruyan Hulu	Belum Beroperasi
37	PT. Wahana Agrotama Makmur Perkasa	17.000,00	Kabupaten Seruyan	Seruyan Hilir	Belum Beroperasi
38	PT. Seruyan Sawit Lestari	6.772,00	Kabupaten Seruyan	Seruyan Tengah & Seruyan Hulu	Belum Beroperasi
39	PT. Indotruba Tengah	7.734,60	Lintas Kabupaten	Hanau	Sudah Beroperasi
40	PT. Kridatama Lancar	14.779,92	Lintas Kabupaten	Seruyan Tengah	Sudah Beroperasi

No	Perusahaan	Luas Perkebunan (Ha)	Wilayah Operasional	Lokasi	Operasional
41	PT. Teguh Sampurna	16.601,66	Lintas Kabupaten	Seruyan Tengah	Sudah Beroperasi
42	PT. Agro Indomas	20.500,00	Lintas Kabupaten	Danau Sembuluh	Sudah Beroperasi
43	PT. Mustika Sembuluh	19.450,26	Lintas Kabupaten	Seruyan Raya & Danau Sembuluh	Sudah Beroperasi
44	PT. Buana Artha Sejahtera	14.300,00	Lintas Kabupaten	Danau Sembuluh	Sudah Beroperasi

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan, 2024

c. Perikanan

Sektor Perikanan di Kabupaten Seruyan sangat potensial, sebab komoditi yang dihasilkan berupa jenis ikan yang memiliki nilai ekonomis tinggi baik pada perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Jumlah produksi perikanan budidaya di Kabupaten Seruyan pada tahun 2024 mencapai 18.529,33 ton dengan kontribusi terbesar pada jenis usaha tambak yang mencapai 11.150,94 ton. Secara lebih lengkap, perkembangan produksi perikanan budidaya menurut jenis usaha tahun 2021-2024 di Kabupaten Seruyan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9. Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Usaha Tahun 2021-2024

No	Jenis Usaha	Produksi (Ton)			
		2021	2022	2023	2024
I	Budidaya Air Payau				
1	Tambak	9.544,37	10.498,87	11.540,98	11.150,94
II	Budidaya Air Tawar				
1	Kolam	3.080,97	3.376,34	3.697,92	3.572,94
2	Karamba	3.099,08	3.433,79	3.774,72	3.647,15
3	Jaring Apung Tawar (JAT)	114,65	131,99	144,69	139,81
4	Jaring Tancap Tawar (JTT)	10,23	17,42	19,13	18,49
Jumlah		15.849,15	17.458,41	19.177,45	18.529,33

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan, 2024

Perikanan perairan payau (tambak) di Kabupaten Seruyan menjadi potensi perikanan yang sangat potensial untuk dikembangkan.

Kabupaten Seruyan terutama di Kecamatan Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur yang bagian selatannya berbatasan dengan Laut Jawa mempunyai panjang garis pantai ± 130 Km. Hal ini merupakan potensi untuk pengembangan perikanan budidaya, terutama budidaya air payau. Budidaya air payau sangat didukung pemerintah dengan mengeluarkan berbagai program yang bertumpu pada upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pertambakan. Salah satu komoditas yang paling banyak dihasilkan adalah ikan bandeng dan sebagian kecil jenis ikan lainnya seperti belanak dan udang sayur.

Potensi untuk budidaya tambak di Kabupaten Seruyan diperkirakan sebesar ± 10.000 Ha dengan lahan tambak yang sudah dimanfaatkan/operasional sejak tahun 2021–2023 sebesar ± 3.126 Ha atau berkisar 43,89%. Lahan tambak yang operasional/aktif hanya berada di Kecamatan Seruyan Hilir tepatnya berada di Kelurahan Kuala Pembuang I, Kelurahan Kuala Pembuang II dan Desa Sungai Undang. Masih terbuka luas lahan untuk pengembangan usaha budidaya air payau seluas 6.874 Ha.

Tabel 2.10. Potensi Lahan Pengembangan Budidaya Air Payau (Tambak) tahun 2024

No	Kecamatan	Lahan Budidaya Air Payau			
		Potensi (Ha)	Yang sudah Dimanfaatkan (Ha)	Tk. Pemanfaatan (%)	Pengembangan (Ha)
1	Seruyan Hilir	7.123	3.126	43,89	3.997
2	Seruyan Hilir Timur	2.877	0	0	2.877
Jumlah		10.000	1.760	17,6	6.874

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan, 2024

Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Seruyan pada tahun 2024 mencapai 20.129,81 ton yang terdiri dari perairan laut sebesar 10.468,56 ton dan perairan umum sebesar 9.661,25 ton. Secara lebih lengkap, perkembangan produksi perikanan tangkap menurut jenis usaha tahun 2021-2024 di Kabupaten Seruyan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11. Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2021-2024

No	Jenis Perairan	Produksi (Ton)			
		2021	2022	2023	2024
I	Perairan Laut	12.021,55	11.927,71	11.730,09	10.468,56
II	Perairan Umum	9.574,85	9.638,95	9.644,03	9.661,25
Jumlah		21.596,40	21.521,66	21.374,12	20.129,81

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan, 2021- 2024

Produksi perikanan berdasarkan jenis komoditas di Kabupaten Seruyan pada tahun 2024 mencapai 38.659,14 ton dengan kontribusi terbesar pada perikanan budidaya yang mencapai 18.529,33 ton. Adapun produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap Kabupaten Seruyan pada tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12. Jumlah Produksi Perikanan Menurut Jenis Komoditas Tahun 2021-2024

No	Jenis Komoditas	Produksi (Ton)			
		2021	2022	2023	2024
I	Perikanan Budidaya				
1	Ikan Mas	28,41	31,25	32,37	33,21
2	Ikan Nila	1.727,22	1.900,17	2.090,87	2020,20
3	Ikan Patin	3.921,21	4.337,29	4.746,06	4585,66
4	Ikan Lele	47,25	52	57,27	55,34
5	Ikan Betutu	9,47	10,42	11,46	11,07
6	Ikan Jelawat	502	552,22	612,44	591,74
7	Ikan Belida	18,89	20,8	22,91	22,14
8	Ikan Gabus	50,33	55,39	61,09	59,03
9	Ikan Bandeng	6.587,81	7.246,61	7.937,89	7669,61
10	Ikan Belanak	847,62	932,41	1.027,15	992,45
11	Udang Api-API	2.098,45	2.308,31	2.563,25	2476,62
12	Udang Windu	10,49	11,54	12,69	12,26
Jumlah I		15.849,15	17.458,41	19.177,45	18.529,33
II	Perikanan Tangkap di PUD				
1	Ikan Jambal/Patin	858,43	834,05	881,91	874,60
2	Ikan Gabus	1.045,44	1.126,94	1.130,49	1.127,12
3	Ikan Toman	1.060,31	1.104,15	1.142,98	1.149,86
4	Ikan Tambakan	291,09	237,12	190,05	189,50
5	Ikan Lele	287,11	-	285,43	288,22

No	Jenis Komoditas	Produksi (Ton)			
		2021	2022	2023	2024
6	Ikan Gurame	391,54	313,3	266,26	242,84
7	Ikan Baung	821,97	823,14	906,85	949,13
8	Ikan Jelawat	390,92	359,01	350,94	339,33
9	Ikan Salab	211,74	495,43	433,61	425,84
10	Ikan Lais	719,42	549,1	715,97	741,49
11	Ikan Sepat Rawa	214,89	227,01	216,81	211,93
12	Ikan Sepat Siam	-	172,79	-	184,62
13	Ikan Belida	149,36	120,83	109,82	101,74
14	Ikan Betok	269,36	270,13	291,7	291,27
15	Udang Lainnya	134,37	-	-	-
16	Ikan Tawes	-	235,27	-	356,28
17	Ikan Betutu	-	127,37	45,49	88,77
18	Udang Galah	269,52	425,63	416,86	389,13
19	Ikan Lainnya	2.459,38	2.172,68	2.258,88	1.709,63
Jumlah II		9.574,85	9.593,95	9.644,03	9.661,25
III	Perikanan Tangkap di Perairan Laut				
1	Ikan Kerapu	-	-	-	-
2	Ikan Kakap Merah	341,07	260,79	382,85	369,36
3	Ikan Kakap Putih	401,73	316,11	392,97	314,55
4	Ikan Kurisi	-	-	-	-
5	Ikan Gulamah	-	472,68	-	577,97
6	Ikan Cucut	320,96	314,41	253,75	188,98
7	Ikan Pari	183,24	188,52	169,65	136,87
8	Ikan Bawal Hitam	209,07	176,88	168,43	140,45
9	Ikan Bawal Putih	230,74	206,7	223,37	207,3
10	Ikan Alu-alu/Pacul	149,32	223,87	282,49	195,05
11	Ikan Layang	-	70,27	-	74,86
12	Ikan Selar	168,42	136,97	132,98	148,45
13	Ikan Lainnya	2.142,92	1.157,19	1.946,30	899,12
14	Ikan Kuwe	-	-	-	-
15	Tetengkek	-	61,97	-	-
16	Binatang Berkulit Keras Lainnya	73,38	-	69,09	27,3
17	Ikan Belanak	373,68	370,35	376,75	333,11
18	Ikan Kuro/Senangin	544,08	476,82	518,48	488,09
19	Ikan Julung-julung	-	23,92	-	15,68
20	Ikan Teri	-	-	-	-
21	Ikan Lemuru	-	-	-	-

No	Jenis Komoditas	Produksi (Ton)			
		2021	2022	2023	2024
22	Ikan Golok-Golok	-	265,79	-	219,83
23	Ikan Terubuk	84,77	0,01	-	-
24	Ikan Kembung	206,99	179,8	337,84	282,93
25	Ikan Tenggiri Papan	-	188,59	-	
26	Ikan Tenggiri	328,08	212,6	464,72	409,64
27	Ikan Tongkol	267,06	376,45	602,45	539,59
28	Ikan Sebelah	140,02	146,27	73,79	68,06
29	Ikan Peperek	-	65,04	-	68,33
30	Ikan Manyung	62,52	736,06	788,09	737,05
31	Ikan Talang-Talang	440,67	450,95	500,71	462,19
32	Ikan Banyar	276,97	213,4	-	-
33	Ikan Selanget	232,73	193,34	163,44	139,57
34	Rajungan	34,55	25,23	10,65	9,53
35	Kepiting	43,05	229,01	182,1	163,03
36	Udang Windu	1.103,99	978,41	962,2	801,25
37	Udang Putih	526,89	405,21	554,66	425,43
38	Udang Dogol	428,38	412,1	402,88	389,31
39	Udang Lainnya	1.224,74	1.106,19	1.028,93	1.002,73
40	Cumi-cumi	1.481,54	1.235,70	740,57	615
41	Sotong	-	50,11	-	17,95
Jumlah III		12.021,55	11.927,71	11.730,09	10.468,56
Total		37.445,55	38.980,07	40.551,57	38.659,14

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan, 2021- 2024

Potensi pada sektor perikanan tidak hanya pada produksi hasil perikanannya, namun juga pada produksi pengolahan hasil perikanan. Pada tahun 2024, jumlah produksi pengolahan hasil perikanan mencapai 4.539,64 ton. Beberapa produk olahan hasil perikanan di Kabupaten Seruyan antara lain udang ebi, ikan kering, kerupuk ikan pipih/belida, kerupuk ikan tenggiri, kerupuk ikan gabus, terasi, dan olahan ikan lainnya.

Tabel 2.13. Produksi Pengolahan Hasil perikanan Tahun 2024

No	Jenis Produk Olahan	Jumlah (Ton)
1	Udang Ebi	299,17
2	Ikan Kering	1.928,12

No	Jenis Produk Olahan	Jumlah (Ton)
3	Kerupuk Ikan Pipih/Belida	117,23
4	Kerupuk Ikan Tenggiri	106,53
5	Kerupuk Ikan Gabus	91,25
6	Terasi	83,66
7	Ikan Olahan Lainnya (bakso, abon, empek-empek, udang di-es, udang beku, dll)	1.913,68

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan, 2024

d. Peternakan

Pada tahun 2024, populasi ternak di Kabupaten Seruyan sebanyak 114.437 ekor ternak. Di mana ternak sapi sebanyak 8.456 ekor, ternak kerbau 51 ekor, ternak kambing 4.436 ekor, dan ternak babi sebanyak 3.790 ekor. Semua populasi ternak ini terdapat di semua kecamatan yaitu Kecamatan Seruyan Hilir, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kecamatan Danau Sembuluh, Kecamatan Hanau, Kecamatan Seruyan Raya, Kecamatan Danau Seluluk, Kecamatan Seruyan Tengah, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Seruyan Hulu, dan Kecamatan Suling Tambun. Sedangkan populasi unggas sebagian besar adalah berupa ayam buras sebanyak 83.443 ekor, dan itik 2.727 ekor. Semua populasi unggas ini terdapat di semua kecamatan yaitu Kecamatan Seruyan Hilir, Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kecamatan Danau Sembuluh, Kecamatan Hanau, Kecamatan Seruyan Raya, Kecamatan Danau Seluluk, Kecamatan Seruyan Tengah, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Seruyan Hulu, dan Kecamatan Suling Tambun.

e. Pertambangan

Sektor pertambangan merupakan sektor yang sangat menjanjikan secara ekonomi. Pertambangan yang telah berproduksi di Kabupaten Seruyan adalah bahan galian zircon disusul dengan bahan galian bijih besi. Untuk bahan galian yang masih dalam penyidikan dan penelitian antara lain emas diperkirakan terdapat di bagian utara dan timur, batubara diperkirakan bagian sebelah timur dan barat Kabupaten

Seruyan, uranium di bagian timur Kabupaten Seruyan. Minyak bumi diperkirakan di lepas pantai sebelah selatan Kabupaten Seruyan, serta nikel dan kaolin di sebelah utara Kabupaten Seruyan.

f. Pariwisata

Pariwisata di Kabupaten Seruyan memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan secara terpadu yang meliputi:

1) Wisata Alam

- Pesona wisata Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) di Kecamatan Seruyan Hilir yang dikenal dengan keindahan alam, flora, dan faunanya, yang mana salah satu fauna yang ada di wilayah tersebut adalah orang utan.
- Kawasan wisata Pantai Gosong Buaya di Kecamatan Seruyan Hilir (Kelurahan Kuala Pembuang) dan wisata Sungai Bakau yang terletak di Kecamatan Seruyan Hilir Timur (Desa Sungai Bakau).
- Taman Nasional Bukit Raya dengan keindahan dan keaslian hutan tropisnya di Kecamatan Seruyan Hulu.
- Arum Jeram di Kecamatan Seruyan Tengah, Kecamatan Seruyan Hulu dan Kecamatan Suling Tambun.
- Air Terjun di Kecamatan Seruyan Tengah, Kecamatan Seruyan Hulu, dan Kecamatan Suling Tambun yang memiliki ±160 riam.
- Wisata Danau Sembuluh yang terletak di Kecamatan Danau Sembuluh.

2) Wisata Budaya

Pesta Tiwah di Kecamatan Seruyan Raya (Desa Bangkal), Kecamatan Seruyan Tengah, Kecamatan Seruyan Hulu dan Kecamatan Suling Tambun.

3) Wisata Sejarah

Wisata ini yang sangat dikenal oleh masyarakat di Kabupaten Seruyan antara lain:

- Sandung, tempat menyimpan tulang-tulang orang yang sudah meninggal yang bisa dijumpai di wilayah Kecamatan Seruyan Raya (Desa Bangkal), Kecamatan Seruyan Tengah, Kecamatan Seruyan Hulu, dan Kecamatan Suling Tambun.
- Sapundu (patung) timbal bagi arwah orang yang sudah meninggal dari Suku Dayak yang bisa dijumpai di wilayah Kecamatan Seruyan Raya (Desa Bangkal), Kecamatan Seruyan Tengah, Kecamatan Seruyan Hulu dan Kecamatan Suling Tambun.

2.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

2.1.1.3.1. Daya Dukung Lahan Pertanian

Daya dukung lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya. Daya tampung lingkungan hidup merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Daya dukung lahan pertanian menjadi salah satu analisis yang dilakukan untuk melihat bagaimana produktivitas lahan pertanian dalam mencukupi atau mendukung kebutuhan fisik minimum.

Perhitungan daya dukung lahan pertanian (DDLp) di Kabupaten Seruyan dihitung menggunakan data luas panen, jumlah penduduk, kebutuhan fisik minimum (KFM), dan produksi lahan rata-rata per hektar (Muta'ali, 2015). Formulasi daya dukung lahan pertanian dapat menjadi pendekatan tingkat swasembada pangan wilayah. Apabila nilai DDLp > 1, maka daerah mampu berswasembada pangan, nilai DDLp <1 tidak mampu swasembada, dan jika DDLp = 1, maka daya dukung lahan pertanian optimal.

Daya dukung lahan pertanian, dihitung dengan nilai kebutuhan fisik minimum sebesar 265 kilogram beras per orang per tahun (Kunu, 2020). Luas lahan panen di Kabupaten Seruyan pada tahun 2022 sebesar 3.739,5 Ha dengan jumlah penduduk sebesar 155.072. Produksi lahan rata-rata per Ha di Kabupaten Seruyan berdasarkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar 3.563,87 kg per Ha. Daya dukung lahan pertanian dihitung berdasarkan formulasi berikut.

$$DDL P = \frac{\text{Luas Panen} / \text{Jumlah Penduduk}}{\text{KFM} / \text{Produksi Rata – Rata Lahan Per Ha}}$$

Hasil perhitungan daya dukung lahan pertanian di Kabupaten Seruyan menghasilkan nilai sebesar 0,44. Nilai ini menunjukkan bahwa daerah tidak mampu berswasembada pangan karena jumlah penduduk melampaui batas optimal. Kondisi ini disebabkan oleh nilai daya dukung lahan pertanian yang kurang dari 1.

2.1.1.4. Lingkungan Hidup Berkualitas

Kondisi kualitas lingkungan hidup dapat dilihat dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang terdiri atas Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah pada waktu tertentu. Lokasi pemantauan IKLH harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut.

a. Indeks Kualitas Air

- i. Mewakili sumber pencemar
- ii. Daerah aliran sungai
- iii. Titik intake pengolahan air minum
- iv. Danau, waduk, atau situ

- v. Aliran badan air kawasan hulu yang belum terpengaruh aktivitas manusia

b. Indeks Kualitas Udara

- i. Area padat kendaraan (transportasi) yang meliputi jalan utama dengan lalu lintas padat
- ii. Area pemukiman
- iii. Area perkantoran
- iv. Area industri

c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

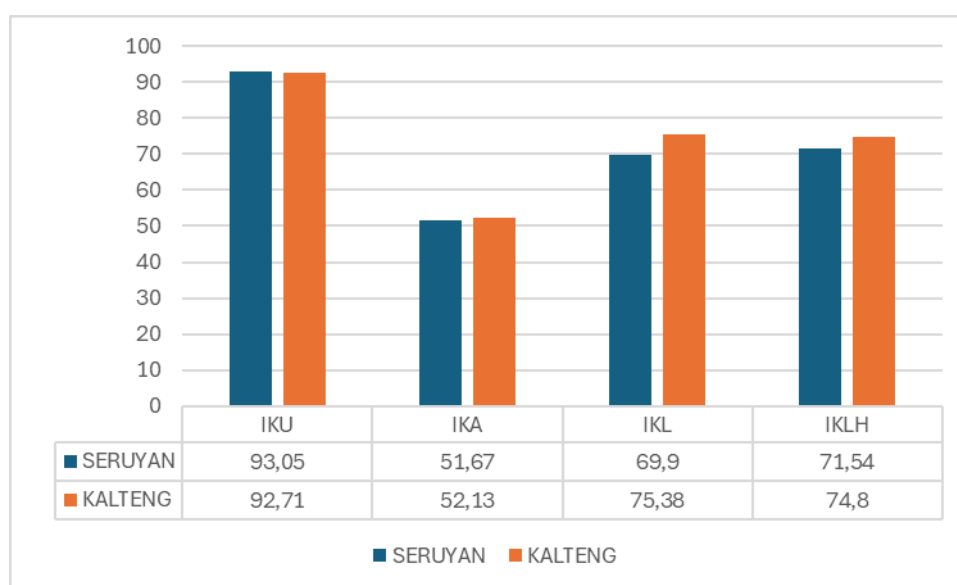
Kabupaten Seruyan bagian utara merupakan wilayah penyangga ekologis yang sangat penting sekaligus pengendali bencana banjir untuk Kabupaten Seruyan. Berdasarkan kategori indeks jasa lingkungan tahun 2024, wilayah utara Kabupaten Seruyan menyediakan 83 % jasa air, karbon, dan keanekaragaman hayati dalam kategori sangat tinggi dan tinggi. Tutupan hutan yang tersisa merupakan kontributor utama dari ketersediaan tiga jasa utama ini. Jasa air mendukung ketersediaan air dan mengendalikan tata air bagi Kabupaten Seruyan bagian tengah dan hilir yang dapat mencegah eskalasi banjir. Sementara jasa karbon mendukung stabilitas Gas Rumah Kaca secara global dan menjadi aset bernilai ekonomi yang dapat direncanakan dalam perencanaan pembangunan ekonomi hijau Kabupaten Seruyan. Jasa keanekaragaman hayati menopang berbagai aspek kehidupan, termasuk ritual kebudayaan, pertumbuhan ekonomi Seruyan melalui jasa penyerbuk.

Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan dihitung berdasarkan luas tutupan hutan, belukar dan belukar rawa yang berada di kawasan hutan dan kawasan berfungsi lindung, Ruang Terbuka Hijau seperti Kebun Raya, Taman Keanekaragaman Hayati, Hutan Kota, dan Taman Kota.

Berdasarkan Profil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2024, Kabupaten Seruyan memiliki nilai IKLH sebesar 71,54 yang tergolong dalam kategori sedang. Nilai tersebut berada di bawah IKLH Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 yang bernilai 76,62. Kabupaten

Seruyan berada di peringkat 13 dari 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah, serta peringkat 184 dari 514 kabupaten/kota di Indonesia.

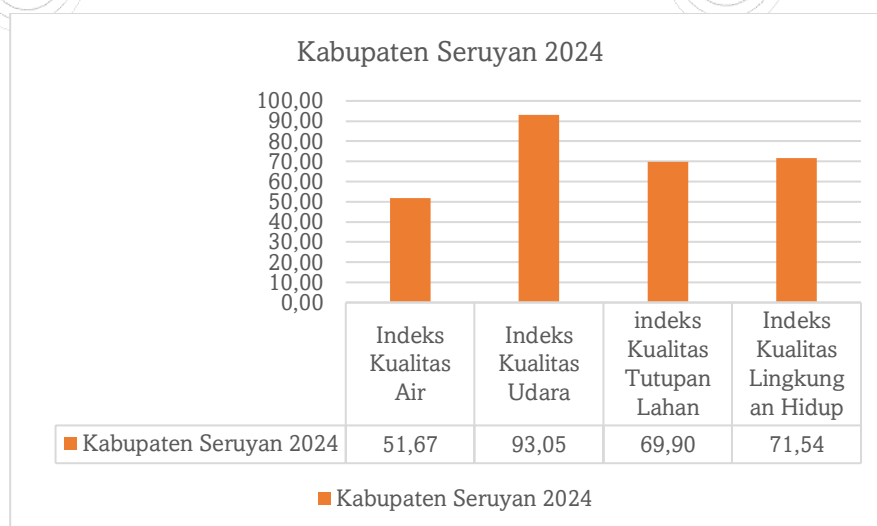
Pemantauan IKLH terdiri atas 6 titik pantau air dan 4 titik pantau udara. Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) sudah termasuk dalam kategori baik, namun yang perlu menjadi perhatian adalah nilai Indeks Kualitas Air (IKA) yang masih tergolong kurang yaitu 48. Salah satu titik pantau IKA berada di Sungai Seruyan yang mempunyai panjang 350 km dan beberapa anak sungai, sehingga membutuhkan perencanaan perlindungan yang bijak.



Gambar 2.4. Grafik Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan Tahun 2024

Sumber: Profil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, 2024

Pada tahun 2024, nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Seruyan mengalami peningkatan menjadi 71,54. Meskipun terjadi penurunan nilai IKLH, pada komponen pembentuk IKLH seperti IKU dan IKTL mengalami perbaikan.



Gambar 2.5. Grafik Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan Tahun 2024

Sumber: Dokumen Evaluasi RPJD Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025

2.1.1.5. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

2.1.1.5.1. Indeks Risiko Bencana

Proses pembangunan suatu wilayah dipengaruhi oleh peristiwa bencana alamnya. Tingkat risiko bencana dapat dilihat dari Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang dipublikasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Perhitungan IRBI mencakup 7 (tujuh) jenis bencana, yaitu banjir, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, gelombang ekstrem, kekeringan, serta cuaca ekstrem. Komponen yang dipertimbangkan dalam IRBI, antara lain bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), dan kapasitas (*capacity*). Secara umum, nilai IRB Kabupaten Seruyan bersifat tetap pada tahun 2018-2021 yaitu 144,4 (tinggi) kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 143,18 (tinggi). Pada tahun 2023, nilai IRB Kabupaten Seruyan kembali mengalami penurunan menjadi 139,51 (sedang). Kemudian, pada tahun 2024 nilai IRB mengalami penurunan sangat pesat menjadi 118,35 (sedang).

Tabel 2.14. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2024

Tahun	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Kelas Risiko
2018	144,40	Tinggi
2019	144,40	Tinggi
2020	144,40	Tinggi
2021	144,40	Tinggi
2022	143,18	Tinggi
2023	139,51	Sedang
2024	118,35	Sedang

Sumber: Indeks Risiko Bencana Indonesia, 2018-2024

Analisis IRB diperoleh melalui komposit analisis indeks risiko tiap jenis bencana. Mengacu pada hasil perhitungan masing-masing bencana, terdapat 4 (empat) jenis bencana yang tergolong dalam kategori risiko tinggi di Kabupaten Seruyan pada tahun 2018-2024 yaitu banjir, kebakaran hutan dan lahan, gelombang ekstrem, serta cuaca ekstrem. Meskipun demikian, seluruh jenis bencana mengalami penurunan IRB pada tahun 2024 khususnya bencana cuaca ekstrem menjadi kategori sedang.

Tabel 2.15. Indeks Risiko Tiap Jenis Bencana di Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2024

Tahun	IRB Banjir	Kelas Risiko	IRB Gempabumi	Kelas Risiko	IRB Karhutla	Kelas Risiko
2018	36	Tinggi	10,8	Sedang	36	Tinggi
2019	36	Tinggi	10,8	Sedang	36	Tinggi
2020	36	Tinggi	10,8	Sedang	36	Tinggi
2021	36	Tinggi	10,8	Sedang	36	Tinggi
2022	29,25	Tinggi	8,77	Sedang	29,25	Tinggi
2023	29,25	Tinggi	8,77	Sedang	29,25	Tinggi
2024	19,08	Tinggi	5,72	Sedang	19,08	Tinggi

Lanjutan tabel 2.15. Indeks Risiko Tiap Jenis Bencana di Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2024

Tahun	IRB Tanah Longsor	Kelas Risiko	IRB Gelombang Ekstrem	Kelas Risiko	IRB Kekeringan	Kelas Risiko	IRB Cuaca Ekstrem	Kelas Risiko
2018	12	Sedang	24	Tinggi	12	Sedang	13,6	Tinggi
2019	12	Sedang	24	Tinggi	12	Sedang	13,6	Tinggi
2020	12	Sedang	24	Tinggi	12	Sedang	13,6	Tinggi
2021	12	Sedang	24	Tinggi	12	Sedang	13,6	Tinggi
2022	9,75	Sedang	19,5	Tinggi	9,75	Sedang	11,05	Sedang
2023	9,75	Sedang	19,50	Tinggi	9,75	Sedang	11,05	Sedang
2024	6,36	Rendah	12,72	Tinggi	9,75	Sedang	7,21	Sedang

Sumber: Indeks Risiko Bencana Indonesia, 2018-2024

Pada tahun 2023, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seruyan mengadakan kajian risiko bencana yang terjadi di Kabupaten Seruyan. Hasil kajian tersebut berhasil memetakan tingkat bahaya tiap bencana di seluruh wilayah Kabupaten Seruyan. Berikut adalah rincian tingkat bahaya tiap bencana di setiap kecamatan di Kabupaten Seruyan.

Tabel 2.16. Tingkat Bahaya Tiap Bencana di Kabupaten Seruyan

Kecamatan	Banjir	Longsor	Karhutla	Kekeringan	Cuaca Ekstrem
Batu Ampar	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi
Danau Seluluk	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi
Hanau	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi
Seruyan Hilir	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang
Seruyan Hilir Timur	Sedang	Rendah	Tinggi	Sedang	Sedang
Seruyan Hulu	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang
Seruyan Raya	Sedang	Rendah	Sedang	Tinggi	Tinggi
Seruyan Tengah	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang
Suling Tambun	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang
Danau Sembuluh	Sedang	Rendah	Sedang	Tinggi	Tinggi

Lanjutan tabel 2.16 Tingkat Bahaya Tiap Bencana di Kabupaten Seruyan

Kecamatan	Konflik Sosial	Covid-19	Wabah Penyakit	Kegagalan Teknologi
Batu Ampar	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
Danau Seluluk	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
Hanau	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
Seruyan Hilir	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
Seruyan Hilir Timur	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
Seruyan Hulu	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
Seruyan Raya	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
Seruyan Tengah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
Suling Tambun	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah
Danau Sembuluh	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah

Sumber: Laporan Akhir Kajian Risiko Bencana Kabupaten Seruyan Tahun 2024

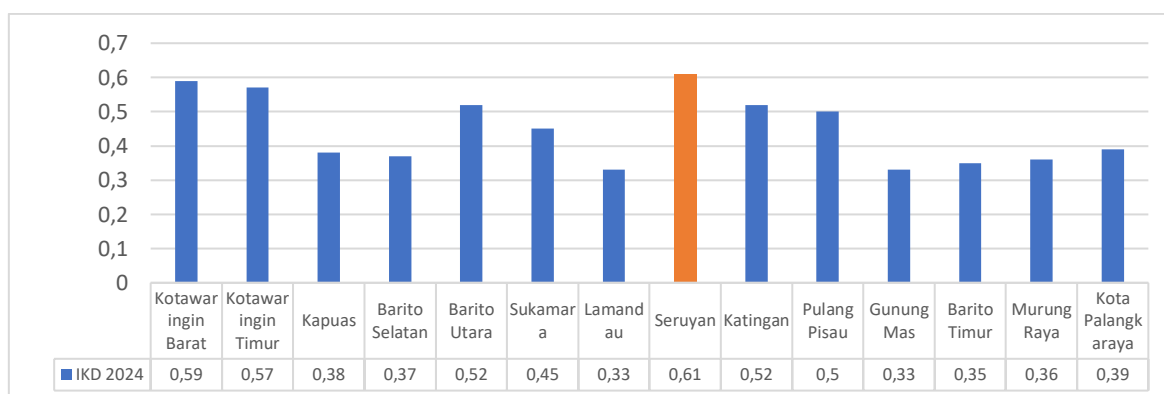
2.1.1.5.2. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah alat pengukuran yang digunakan untuk menilai ketahanan sebuah daerah terhadap berbagai tantangan dan ancaman yang mungkin terjadi, termasuk bencana alam, perubahan iklim, kerawanan sosial, ekonomi, dan faktor-faktor lainnya. IKD bertujuan untuk membantu pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengidentifikasi area-area yang mungkin memerlukan perhatian khusus dan sumber daya untuk memperbaiki ketahanan dan kesiapsiagaan daerah.

IKD terdiri dari 7 fokus prioritas dan 16 sasaran aksi yang dibagi dalam 71 indikator pencapaian Fokus prioritas dalam IKD merupakan analisis terhadap kapasitas penanggulangan bencana daerah, terdiri dari 1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan, 2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, 3) Pengembangan sistem informasi, diklat, dan logistik, 4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana, 5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, 6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, dan 7) Pengembangan sistem pemulihan bencana. Masing-masing indikator terdiri dari 4 pertanyaan

kunci dengan level berjenjang (total 284 pertanyaan). Dari pencapaian 71 indikator tersebut, dengan menggunakan alat bantu analisis yang telah disediakan, diperoleh nilai indeks dan tingkat ketahanan daerah. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) di Kabupaten Seruyan pada tahun 2024 menunjukkan angka 0,61. Di mana angka tersebut merupakan angka tertinggi jika dibandingkan dengan kabupaten atau kota lain di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal tersebut menunjukkan bahwa, Kabupaten Seruyan memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi, menanggapi dan memulihkan dari berbagai risiko atau ancaman. Kemudian, untuk daerah yang memiliki Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terendah berada di Kabupaten Lamandau dan Gunung Mas dengan nilai sebesar 0,33. Lebih detailnya, informasi tersebut dapat dilihat pada grafik berikut,

Tabel 2.17. Hasil Kajian Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024



Sumber: BPBD Kabupaten Seruyan, 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan ketahanan daerah Kabupaten Seruyan dalam menghadapi potensi bencana memiliki tingkat kapasitas tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Seruyan mampu memperkuat kebijakan dan kelembagaan, pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik, serta pengembangan sistem pemulihan bencana.

2.1.1.5.3. Intensitas Emisi GRK

Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan gas-gas di atmosfer yang mampu menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah,

sehingga menyebabkan efek rumah kaca yang berkontribusi pada pemanasan global, dengan komponen utama meliputi karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), dinitrogen oksida (N₂O), dan gas fluorinasi. Intensitas Emisi GRK mengukur jumlah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan per unit aktivitas ekonomi atau per kapita di suatu wilayah, yang menjadi indikator penting untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat. Di Kabupaten Seruyan, data intensitas emisi GRK baru mulai dihitung dan tersedia pada tahun 2025, mengingat urgensi komitmen Indonesia dalam mencapai target *net zero emission* pada tahun 2045 serta implementasi kebijakan mitigasi perubahan iklim yang memerlukan data baseline yang akurat. Ketersediaan data ini sangat krusial untuk mendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan, mengidentifikasi sektor-sektor dengan emisi tinggi, merancang strategi mitigasi yang tepat sasaran, serta memantau efektivitas program-program pengurangan emisi dalam mendukung pencapaian target iklim nasional dan daerah.

2.1.1.6. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

2.1.1.6.1. Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan (Badan Pangan Nasional, 2022). Kondisi ini tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, dari sisi jumlah, dan mutu, seperti aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Indeks Pangan Nasional (IKP) merupakan salah satu inovasi dalam penyediaan data dan informasi pangan serta gizi untuk unit analisis tingkat kabupaten/kota dan provinsi. IKP merupakan bagian dari Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*) yang merupakan adopsi dari indeks global (*Global Food Security Indeks – GFSI*).

Indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP) secara garis besar terdiri dari aspek ketersediaan pangan, aspek keterjangkauan pangan, dan aspek pemanfaatan pangan. Secara lebih rinci indikator masing-masing aspek disajikan pada tabel di bawah. Perhitungan indeks ketahanan pangan dikelompokkan ke dalam enam kelompok berdasarkan IKP yaitu sangat rentan, rentan, agak rentan, agak tahan, tahan, dan sangat tahan.

Tabel 2.18. Indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

No	Indikator
Aspek Ketersediaan Pangan	
1.	Rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, ubi kayu, dan sagu, serta stok beras pemerintah daerah
Aspek Keterjangkauan Pangan	
2.	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan
3.	Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran
4.	Persentase rumah tangga tanpa akses listrik
Aspek Pemanfaatan Pangan	
5.	Rata-rata lama sekolah perempuan berusia di atas 15 tahun
6.	Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih
7.	Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk
8.	Persentase balita <i>stunting</i>
9.	Angka harap hidup pada saat lahir

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2023

Berdasarkan dokumen Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2023 di Kalimantan Tengah, Kabupaten Seruyan secara Nasional berada pada peringkat 353 dengan skor IKP 59,25. Berdasarkan hasil komposit, Kabupaten Seruyan masuk pada kategori prioritas 3 (agak rentan). Dibandingkan dengan hasil analisis pada unit provinsi, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki nilai IKP 68,90 dengan peringkat 28 nasional. Provinsi Kalimantan Tengah berada pada kategori prioritas 5 (tahan). Kabupaten Seruyan relatif memiliki skor lebih rendah dibandingkan dengan skor IKP Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten

Seruyan menjadi salah satu dari 29 kabupaten yang menjadi prioritas 3 pada tahun 2023.

Melihat lebih jauh, perubahan peringkat Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Seruyan dari tahun 2019-2023 terjadi secara fluktuatif. Kondisi ini juga diikuti dengan perubahan skor pada setiap tahunnya. Tahun 2019 Kabupaten Seruyan masuk pada kategori prioritas 4, kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan skor dan masuk pada kategori prioritas 5. Namun pada tahun 2022, Kabupaten Seruyan kembali masuk pada kategori prioritas 4. Pada tahun 2023, kondisi ketahanan pangan Kabupaten Seruyan mengalami penurunan dengan menurunnya nilai Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dan masuk kedalam kategori prioritas 3 (agak rentan).

Tabel 2.19. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

No	Wilayah	Komposit	NCPR	Kemiskinan (%)	Pengeluaran Pangan (%)	Tanpa Listrik (%)	Tanpa Air Bersih (%)	Lama Sekolah Perempuan (tahun)	Rasio Tenaga Kesehatan	Angka Harapan Hidup (tahun)	Stunting (%)	IKP	IKP Ranking
1	Kotawaringin Barat	4	5	3,93	13,93	0	18,93	9,13	1,3	70,98	26,7	60,27	347
2	Kotawaringin Timur	5	2,15	5,95	22,52	0,32	25,29	8,9	1,55	70,15	35,4	73,69	257
3	Kapuas	6	0,49	5,52	36,19	1,86	42,22	8,47	4,03	69,02	29,8	80,59	148
4	Barito Selatan	4	2,83	4,88	32,98	0,14	34,18	8,97	3,03	67,48	22,6	66,35	320
5	Barito Utara	6	0,96	5,8	24,58	2,21	25,24	9,21	0,89	71,5	34,1	83,01	102
6	Katingan	6	0,94	5,5	29,77	2,32	37,8	9,06	1,67	66,16	32,6	76,74	218
7	Seruyan	3	3,99	7,43	24,5	0,11	31,69	8,56	0,86	69,46	25,8	59,25	353
8	Sukamara	4	4,84	3,72	21,98	2,4	22,43	9,51	2,51	71,8	28,3	60,04	349
9	Lamandau	3	4,71	3,34	26	5,47	23,96	9,36	1,87	69,62	22,6	58,9	356
10	Gunung Mas	3	5	5,64	26,45	0,72	42,85	8,54	3,13	70,72	28	55,49	367
11	Pulang Pisau	6	0,26	4,7	18,59	0	49,5	8,4	3,43	68,36	35,3	81,33	136
12	Murung Raya	2	5	6,4	23,12	5,2	53,53	8,75	0,52	69,75	29,9	49,08	384
13	Barito Timur	6	1,08	6,59	12,26	2,75	33,84	8,96	1,56	68,61	24,8	80,29	154
14	Kota Palangkaraya	6	0	3,61	6,8	0,03	9,56	9,08	2,78	73,47	31,2	79,61	68

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2023

Tabel 2.20. Perubahan Kategori, Indeks, dan Ranking Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2019-2023

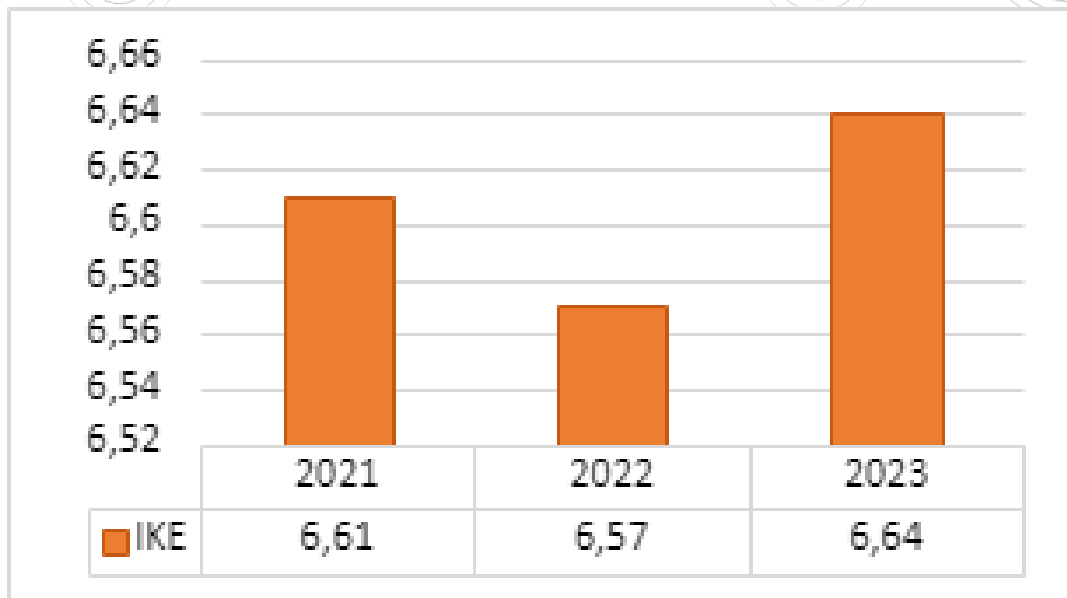
Wilayah	2019			2020			2021			2022			2023		
	Komposit	IKP	IKP Ranking	Komposit	IKP	IKP Ranking	Komposit	IKP	IKP Ranking	Komposit	IKP	IKP Ranking	Komposit	IKP	IKP Ranking
Kotawaringin Barat	4	62,97	328	4	59,76	350	4	4,89	346	4	60,23	342	4	60,27	347
Kotawaringin Timur	6	76,42	192	6	77,80	185	6	1,20	185	6	76,95	196	5	73,69	257
Kapuas	6	77,79	157	6	77,83	184	6	0,32	170	6	78,78	161	6	80,59	148
Barito Selatan	5	68,46	302	5	67,78	309	6	1,24	219	4	64,06	325	4	66,35	320
Barito Utara	6	82,31	61	6	83,10	69	6	0,40	40	6	83,20	67	6	83,01	102
Katingan	6	76,89	177	6	78,94	160	6	0,59	175	6	77,50	185	6	76,74	218
Seruyan	4	66,66	317	4	65,52	331	5	62,67	286	4	62,55	333	3	59,25	353
Sukamara	5	70,06	283	5	73,52	248	5	3,25	295	4	60,10	343	4	60,04	349
Lamandau	6	81,49	77	6	83,10	68	6	1,37	148	5	74,81	225	3	58,9	356
Gunung Mas	3	51,93	370	3	58,18	353	3	5,00	367	3	53,74	369	3	55,49	367
Pulang Pisau	6	80,02	110	6	80,03	133	6	0,36	108	6	79,76	140	6	81,33	136
Murung Raya	2	47,73	382	4	60,27	347	4	2,29	327	2	48,08	382	2	49,08	384
Barito Timur	6	76,23	196	5	74,96	222	6	1,28	211	6	80,41	120	6	80,29	154
Kota Palangkaraya	6	78,16	45	6	75,34	54	6	0,00	40	6	79,24	39	6	79,61	68

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2023

2.1.1.6.2. Indeks Ketahanan Energi

Indeks Ketahanan Energi di Indonesia mencakup *energy sistem performance*, kesiapan lingkungan makro untuk transisi ke sistem energi masa depan yang aman, berkelanjutan dan inklusif. Penilaian ketahanan energi di Indonesia menggunakan aspek 4A, metode pembobotan menggunakan AHP dan penilaian oleh *expert*. Aspek 4A terdiri dari, *Availability* (ketersediaan energi), *Accessibility* (kemampuan akses), *Affordability* (harga terjangkau), *Acceptability* (ramah lingkungan). Skala hasil penilaian Ketahanan Energi Indonesia terbentang dari 0 sampai 10 yang terbagi menjadi lima tingkatan kondisi, yaitu:

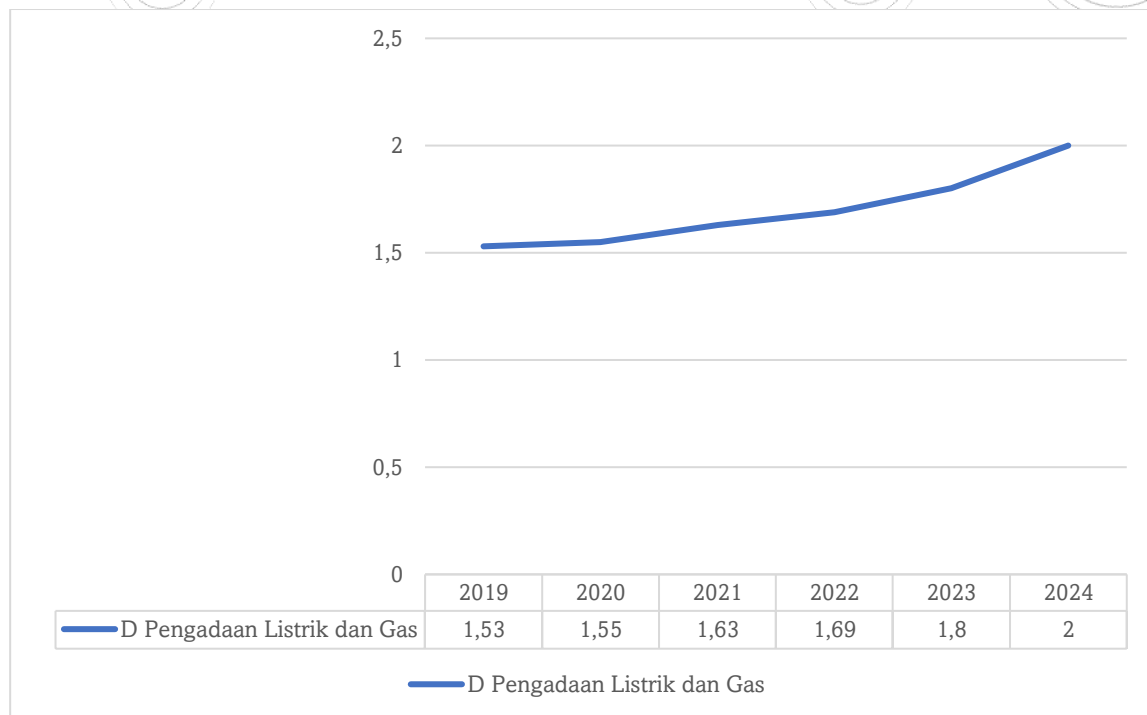
- a. **Sangat Tahan** (Nilai 8 - 10) dengan pertimbangan nilai indikator masing-masing aspek semakin membaik secara signifikan dalam 2 tahun terakhir.
- b. **Tahan** (Nilai 6 - 7,99) dengan pertimbangan nilai indikator masing-masing aspek membaik dalam 2 tahun terakhir.
- c. **Kurang Tahan** (Nilai 4 - 5,99) dengan pertimbangan nilai indikator masing-masing aspek agak membaik dalam 2 tahun terakhir.
- d. **Rentan** (Nilai 2 - 3,99) dengan pertimbangan belum nilai indikator masing-masing aspek tidak membaik dalam 2 tahun terakhir.
- e. **Sangat Rentan** (Nilai 0 - 1,99) dengan pertimbangan belum ada regulasi atau kebijakan yang mendukung dalam 2 tahun terakhir.



**Gambar 2.6. Grafik Perkembangan Indeks Ketahanan Energi (IKE)
Nasional Tahun 2021-2023**

Sumber: Dewan Energi Nasional, 2023

Kondisi perkembangan ketahanan energi di Indonesia menunjukkan nilai ketahanan yang terus meningkat dari tahun 2014 yang terkategori dengan kondisi tahan. **Perhitungan Indeks Ketahanan Energi belum dilakukan pada level kabupaten/kota.** Kondisi energi di Kabupaten Seruyan dianalisis menggunakan perkembangan nilai PDRB pada sektor pengadaan listrik dan gas. Dalam kurun waktu 14 tahun, sektor pengamidaan listrik dan gas di Kabupaten Seruyan telah mengalami perkembangan nilai hingga 3 kali lipat. Pada tahun 2019, sektor ini memberikan sumbangan pada PDRB sebesar Rp 1,53 miliar, nilainya meningkat hingga mencapai Rp2 miliar pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsumsi atau kebutuhan akan kelistrikan dan gas rumah tangga di Kabupaten Seruyan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.



Gambar 2.7. Perkembangan Nilai PDRB Sektor Pengadaan Listrik dan Gas (Juta Rupiah) Kabupaten Seruyan Tahun 2019—2024

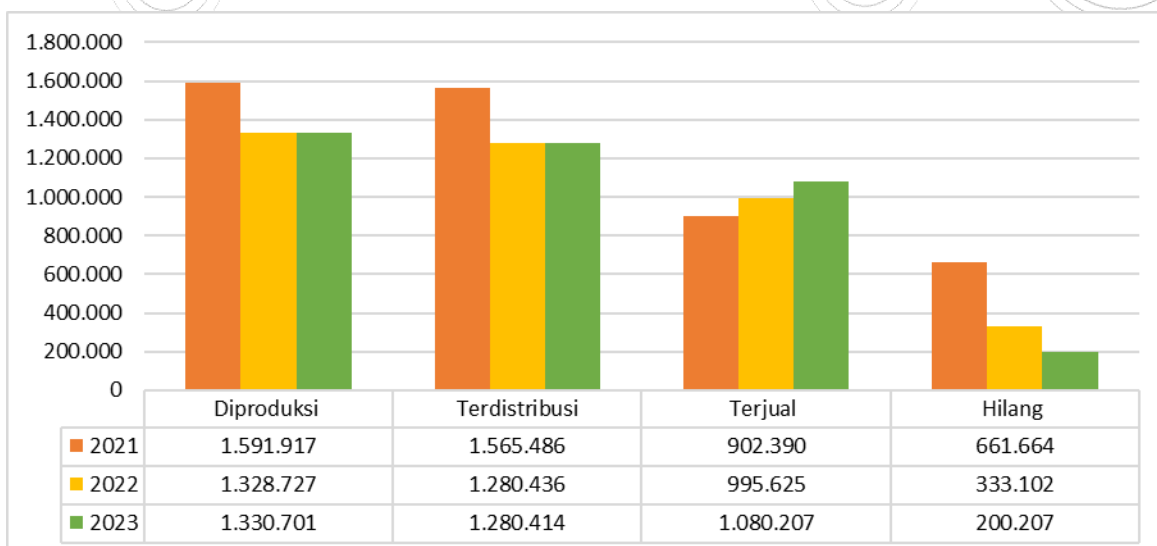
Sumber: BPS Kabupaten Seruyan, 2024

2.1.1.6.3. Indeks Ketahanan Air

Ketahanan air adalah keterpenuhan kebutuhan air yang layak dan berkelanjutan untuk kehidupan dan pembangunan serta terkelolanya risiko yang berkaitan dengan air. Indeks Ketahanan Air diperlukan untuk mengukur secepat mungkin parameter keamanan air yang diperlukan sebagai komponen untuk menjawab pertanyaan kunci yang harus diambil oleh para pembuat kebijakan yang bertanggung jawab dalam membuat keputusan dan investasi dalam mendukung terselenggaranya pembangunan nasional dan regional. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2019 tentang pengelolaan Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah, terdapat indikator ketahanan air Indonesia berdasarkan 5 pilar atau segmen pengelolaan sumber daya air di Indonesia, yakni konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, peran serta masyarakat, dan sistem informasi sumber daya air.

Berdasarkan data dari Dewan Sumber Daya Air Nasional lima pilar yang menjadi indikator ketahanan air dilihat dari beberapa provinsi terpilih berdasarkan kepadatan penduduk, lokasi, kondisi ketersediaan air, dan asumsi ketersediaan data. Provinsi tersebut antara lain Nasional, Jawa Barat, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku Utara. Berdasarkan hasil sementara yang disebarkan melalui kuesioner per 26 Juli 2022, perhitungan indeks ketahanan air di Nasional sebesar 77%, Jawa Barat sebesar 72%, DKI Jakarta sebesar 17%, Nusa Tenggara Timur sebesar 37%, dan Maluku Utara sebesar 34%. Hasil ini berarti masih kurang dari harapan target yang dituju.

Perhitungan Indeks Ketahanan Air masih belum dilakukan pada level kabupaten/kota. Kondisi kebutuhan air di Kabupaten Seruyan dapat digambarkan menggunakan data produksi dan distribusi air minum oleh Perusahaan Air Minum Daerah yang dikeluarkan dari BPS. Selama periode 2021-2023, produksi air minum mengalami penurunan yang cukup banyak dari 1.591.917 m³ pada tahun 2021 menjadi 1.330.701 m³ pada tahun 2023. Penurunan produksi air ini kemudian menyebabkan pula penurunan jumlah air minum yang terdistribusi ke masyarakat, pada tahun 2021 jumlah air minum yang terdistribusi sebanyak 1.565.486 m³, menurun menjadi 1.280.414 m³ pada tahun 2023. Meskipun produksi dan distribusi air minum selama periode 2021-2023 mengalami penurunan, jumlah air minum yang terjual mengalami peningkatan dari 902.390 m³ pada tahun 2021 menjadi 1.080.207 m³ pada tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah air minum yang hilang, dimana pada tahun 2021 jumlah air minum yang hilang sebanyak 661.664 m³ menjadi 200.207 m³ pada tahun 2023.



Gambar 2.8. Produksi dan Distribusi Air Minum oleh Perusahaan Air Minum (m³) di Kabupaten Seruyan

Sumber: BPS Kabupaten Seruyan, 2023

2.1.1.7. Demografi

2.1.1.7.1. Jumlah dan Persebaran Penduduk

Kabupaten Seruyan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah, terdiri dari 10 kecamatan dan 100 desa/kelurahan. Pada tahun 2024, tercatat penduduk Kabupaten Seruyan sebanyak 174.330 jiwa. Persebaran penduduk Kabupaten Seruyan selama 6 tahun dari tahun 2019 hingga 2024 mengalami perubahan yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2019 penduduk Kabupaten Seruyan berjumlah 148.230 jiwa, nilainya naik pada tahun 2020 menjadi 162.910 jiwa, kemudian mengalami peningkatan bertahap hingga tahun 2024 menjadi 174.330 jiwa.

Pada tahun 2024, jumlah penduduk tertinggi berada di Kecamatan Seruyan Hilir sebesar 40.540 jiwa atau sekitar 23,26% dari total penduduk Kabupaten Seruyan. Hal ini sangat wajar karena terdapat Ibukota Kabupaten Seruyan yakni Kuala Pembuang di Kecamatan Seruyan Hilir. Ketersediaan fasilitas umum yang juga cukup memadai juga salah satu penyebab penduduk terkonsentrasi di Kecamatan Seruyan Hilir. Kecamatan Seruyan Tengah berada di posisi kedua dengan

jumlah penduduk 25.320 jiwa atau sekitar 14,52% dari total penduduk Kabupaten Seruyan. Berikutnya adalah Kecamatan Hanau dengan jumlah penduduk sebanyak 22.190 jiwa (12,73%), Kecamatan Seruyan Raya dengan jumlah penduduk sebanyak 19.950 jiwa (11,44%), Kecamatan Danau Seluluk dengan jumlah penduduk sebanyak 18.440 jiwa (10,58%), Kecamatan Danau Sembuluh dengan jumlah penduduk sebanyak 15.390 jiwa (8,83%). Kecamatan Seruyan Tengah, Kecamatan Hanau, Kecamatan Seruyan Raya, Kecamatan Danau Seluluk dan Kecamatan Danau Sembuluh merupakan kecamatan yang memiliki jarak relatif dekat atau dilewati oleh Jalan Trans Kalimantan, sehingga memiliki jumlah penduduk yang relatif banyak.

Kecamatan Batu Ampar memiliki jumlah penduduk sebanyak 9.830 jiwa atau sekitar 5,64% dari seluruh penduduk Kabupaten Seruyan. Kemudian Kecamatan Seruyan Hilir Timur memiliki penduduk sebanyak 10.530 jiwa (6,04%), Kecamatan Seruyan Hulu memiliki penduduk sebanyak 9.350 jiwa (5,37%). Kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Suling Tambun dengan jumlah penduduk sebanyak 2.790 jiwa atau 1,60% dari seluruh penduduk Kabupaten Seruyan. Kondisi tersebut dapat menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kabupaten Seruyan untuk dapat merencanakan persebaran penduduk yang merata dengan cara peningkatan fasilitas-fasilitas umum yang memadai di seluruh kecamatan sehingga penduduk tidak terkonsentrasi di Ibu Kota Kabupaten. Hal ini untuk menghindari terbentuknya kota yang tidak tertata di masa yang akan datang.

Tabel 2.21. Jumlah dan Distribusi/Persebaran Penduduk Kabupaten Seruyan berdasarkan Kecamatan Tahun 2019-2024

Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Seruyan Hilir	35.655	37.380	37.930	38.530	39.710	40.540
Seruyan Hilir Timur	9.672	9.190	9.330	9.486	10.175	10.530
Danau Sembuluh	12.021	13.600	13.790	14.006	14.912	15.390
Seruyan Raya	15.441	19.340	19.380	19.438	19.787	19.950
Hanau	18.321	20.830	20.890	21.037	21.817	22.190
Danau Seluluk	15.405	17.560	17.650	17.708	18.220	18.440
Seruyan Tengah	22.170	23.720	23.970	24.251	24.899	25.320

Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Batu Ampar	7.670	9.420	9.570	9.727	9.721	9.830
Seruyan Hulu	9.033	9.160	9.160	9.182	9.300	9.350
Suling Tambun	2.842	2.700	2.700	2.707	2.763	2.790
Kabupaten Seruyan	148.230	162.910	164.380	166.072	171.304	174,330

Sumber: BPS Kabupaten Seruyan, 2019-2024

Jumlah dan distribusi penduduk Kabupaten Seruyan berdasarkan tahun sensus 2010 dan 2020 disajikan pada Tabel 2.22.

Tabel 2.22. Jumlah dan Distribusi/Persebaran Penduduk Kabupaten Seruyan berdasarkan Tahun Sensus 2010 dan 2020

Kecamatan	2010		2020	
	Jiwa	%	Jiwa	%
Seruyan Hilir	29.456	21,05	37.380	22,95
Seruyan Hilir Timur	6.790	4,85	9.190	5,64
Danau Sembuluh	10.425	7,45	13.600	8,35
Seruyan Raya	18.910	13,51	19.340	11,87
Hanau	18.527	13,24	20.830	12,79
Danau Seluluk	16.424	11,74	17.560	10,78
Seruyan Tengah	20.044	14,32	23.720	14,56
Batu Ampar	7.378	5,27	9.420	5,78
Seruyan Hulu	9.332	6,67	9.160	5,62
Suling Tambun	2.645	1,89	2.700	1,66
Kabupaten Seruyan	139.931	100,00	162.910	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Seruyan (2010 dan 2022)

2.1.1.7.2. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk suatu wilayah dapat diklasifikasikan dalam beberapa ukuran. Untuk mengukur tingkat lambat atau cepatnya pertumbuhan penduduk dapat digolongkan pada empat kategori yakni sangat lambat, lambat, cepat, dan sangat cepat. Adapun pertumbuhan penduduk kategori sangat lambat dengan laju pertumbuhan penduduk kurang dari 1 persen per tahun, sedangkan pertumbuhan penduduk kategori lambat dengan laju pertumbuhan penduduk antara 1–2 persen per tahun. Pertumbuhan penduduk kategori cepat dengan laju pertumbuhan penduduk di atas 2–3 persen per tahun dan pertumbuhan

penduduk dikatakan sangat cepat dengan pertumbuhan penduduk lebih besar dari 3 persen per tahun.

Pertumbuhan penduduk disebabkan oleh adanya kelahiran dan migrasi, baik imigrasi maupun emigrasi. Sampai dengan akhir tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Seruyan adalah 174.330 jiwa. Angka ini naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 171.304 jiwa. Apabila dibandingkan dengan tahun 2020, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Seruyan yakni sebesar 1,44% per tahun, yang termasuk dalam kategori pertumbuhan penduduk "lambat". Meskipun demikian, laju pertumbuhan antar kecamatan menunjukkan variasi yang signifikan. Kecamatan dengan pertumbuhan penduduk sangat cepat (di atas 3%) antara tahun 2020 hingga 2024 adalah Kecamatan Seruyan Hilir Timur (3,69%) dan Danau Sembuluh (3,37%). Sementara itu, Kecamatan Seruyan Hilir (2,19%) masuk dalam kategori cepat.

Sebaliknya, terdapat kecamatan dengan pertumbuhan penduduk sangat lambat yakni Kecamatan Seruyan Hulu (0,58%) dan Kecamatan Suling Tambun (0,08%). Sisanya seperti Kecamatan Hanau (1,77%), Seruyan Tengah (1,76%), Danau Seluluk (1,22%), dan Batu Ampar (1,12%) berada dalam kategori pertumbuhan lambat. Adapun Kecamatan Seruyan Raya mengalami laju pertumbuhan hanya sebesar 0,81%, yang juga termasuk kategori sangat lambat. Variasi laju pertumbuhan ini mencerminkan dinamika kependudukan yang dipengaruhi oleh faktor geografis, ekonomi, sosial, serta infrastruktur yang tersedia di masing-masing wilayah.

Tabel 2.23. Data Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024

Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (2020-2024)
Seruyan Hilir	35.655	37.380	37.930	38.530	39.710	40.540	2,19
Seruyan	9.672	9.190	9.330	9.486	10.175	10.530	3,69

Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (2020- 2024)
Hilir Timur							
Danau Sembuluh	12.021	13.600	13.790	14.006	14.912	15.390	3,37
Seruyan Raya	15.441	19.340	19.380	19.438	19.787	19.950	0,81
Hanau	18.321	20.830	20.890	21.037	21.817	22.190	1,77
Danau Seluluk	15.405	17.560	17.650	17.708	18.220	18.440	1,22
Seruyan Tengah	22.170	23.720	23.970	24.251	24.899	25.320	1,76
Batu Ampar	7.670	9.420	9.570	9.727	9.721	9.830	1,12
Seruyan Hulu	9.033	9.160	9.160	9.182	9.300	9.350	0,58
Suling Tambun	2.842	2.700	2.700	2.707	2.763	2.790	0,8
Kabupaten Seruyan	148.230	162.910	164.380	166.072	171.304	174.330	1,44

Sumber: BPS Kabupaten Seruyan, 2019-2024

Laju pertumbuhan Kabupaten Seruyan apabila ditinjau dari data sensus penduduk 2010 dan 2020 mengalami kenaikan sebesar 16,42% dari 139.931 jiwa menjadi 162.910 jiwa. Adapun jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Seruyan yang didasarkan pada tahun sensus 2010 dan 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.24. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Seruyan berdasarkan Tahun Sensus 2010 dan 2020

Kecamatan	2010	2020	Laju Pertumbuhan Penduduk (2010-2020)
Seruyan Hilir	29.456	37.380	2,38%
Seruyan Hilir Timur	6.790	9.190	3,03%
Danau Sembuluh	10.425	13.600	2,66%
Seruyan Raya	18.910	19.340	0,22%
Hanau	18.527	20.830	1,17%

Kecamatan	2010	2020	Laju Pertumbuhan Penduduk (2010-2020)
Danau Seluluk	16.424	17.560	0,67%
Seruyan Tengah	20.044	23.720	1,68%
Batu Ampar	7.378	9.420	2,44%
Seruyan Hulu	9.332	9.160	-0,19%
Suling Tambun	2.645	2.700	0,21%
Kabupaten Seruyan	139.931	162.910	1,52%

Sumber: BPS Kabupaten Seruyan, 2010 dan 2020

2.1.1.7.3. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan suatu indikator awal untuk menilai perkembangan wilayah, dan juga seluruh dampak yang ditimbulkannya. Wilayah dengan kepadatan tinggi biasanya berupa pusat permukiman penduduk, pusat kegiatan perekonomian, dan pusat suatu peradaban (Muta'ali, 2015). Kepadatan penduduk pada dasarnya merupakan jumlah penduduk yang menempati tiap satuan luas wilayah. Jumlah penduduk Kabupaten Seruyan pada akhir tahun 2024 adalah 174.330 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 11 jiwa/km². Kecamatan terpadat berada di Kecamatan Hanau sebesar 43,5 jiwa/km². Hal ini dikarenakan Kecamatan Hanau memiliki luas wilayah yang paling kecil dan menjadi salah satu dari tiga kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak di Kabupaten Seruyan. Kepadatan penduduk yang tinggi di Kecamatan Hanau terjadi karena wilayah ini dilalui oleh Jalan Trans Kalimantan yang merupakan jalur utama penghubung antar provinsi di Pulau Kalimantan, serta keberadaan fasilitas pelayanan publik seperti rumah sakit yang turut mendorong konsentrasi penduduk di wilayah tersebut.

Kecamatan lainnya selain Kecamatan Hanau, Kecamatan Seruyan Raya dan Kecamatan Danau Seluluk juga memiliki tingkat kepadatan yang tinggi masing-masing sebesar 24,7 jiwa/km² dan 34 jiwa/km². Hal ini disebabkan oleh posisi geografis yang strategis karena juga dilewati oleh Jalan Trans Kalimantan. Sementara itu, Kecamatan Seruyan Hilir

yang merupakan Ibukota Kabupaten Seruyan justru memiliki kepadatan penduduk yang relatif rendah yaitu sebesar 9,6 jiwa/km². Angka ini tergolong kecil jika dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan yang secara langsung terhubung dengan jalur strategis antarprovinsi. Di sisi lain, kecamatan dengan kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Suling Tambun yang hanya memiliki 2 jiwa/km² dan Kecamatan Seruyan Hulu sebesar 3 jiwa/km². Kedua kecamatan ini terletak di wilayah barat laut Kabupaten Seruyan dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Melawi di Provinsi Kalimantan Barat, yang secara geografis berada di daerah perbukitan dan memiliki keterbatasan aksesibilitas, sehingga kepadatan penduduknya pun relatif rendah.

Tabel 2.25. Kepadatan Penduduk Kabupaten Seruyan Tahun 2024

Kecamatan	Luas		Jumlah Penduduk		Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
	Km ²	%	Jiwa	%	
Seruyan Hilir	4.230,10	27,81	40.540	23,25	9,6
Seruyan Hilir Timur	1.323,41	8,7	10.530	6,04	8,0
Danau Sembuluh	1.442,06	9,48	15.390	8,83	10,7
Seruyan Raya	806,22	5,3	19.950	11,44	24,7
Hanau	509,59	3,35	22.190	12,73	43,5
Danau Seluluk	543,05	3,57	18.440	10,58	34,0
Seruyan Tengah	1.245,83	8,19	25.320	14,52	20,3
Batu Ampar	620,63	4,08	9.830	5,64	15,8
Seruyan Hulu	3.024,07	19,88	9.350	5,36	3,1
Suling Tambun	1.376,65	9,05	2.790	1,60	2,0
Kabupaten Seruyan	15.211,62	100	174.330	100	11

Sumber: BPS Kabupaten Seruyan, 2024

Kepadatan penduduk Kabupaten Seruyan yang didasarkan pada tahun sensus 2010 dan 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.26. Kepadatan Penduduk Kabupaten Seruyan berdasarkan Tahun Sensus 2010 dan 2020

Kecamatan	Luas	Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)

	(Km ²)	2010	2020	2010	2020
Seruyan Hilir	4.659,00	29.456	37.380	6	8
Seruyan Hilir Timur	1.428,00	6.790	9.190	5	6
Danau Sembuluh	1.555,00	10.425	13.600	7	9
Seruyan Raya	869,00	18.910	19.340	22	22
Hanau	549,00	18.527	20.830	34	38
Danau Seluluk	586,00	16.424	17.560	28	30
Seruyan Tengah	1.343,32	20.044	23.720	15	18
Batu Ampar	668,68	7.378	9.420	11	14
Seruyan Hulu	3.262,00	9.332	9.160	3	3
Suling Tambun	1.484,00	2.645	2.700	2	2
Kabupaten Seruyan	16.404,00	139.931	162.910	9	10

Sumber: BPS Kabupaten Seruyan (2010 dan 2020)

2.1.1.7.4. Penduduk Menurut Kelompok Umur

Definisi dari penduduk dewasa adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas dan lebih atau kurang dari 15 tahun tetapi sudah kawin atau pernah kawin. Sedangkan anak-anak adalah penduduk yang berumur kurang dari 15 tahun dan belum kawin. Komposisi penduduk Kabupaten Seruyan pada tahun 2024 masih didominasi oleh penduduk usia produktif, yaitu penduduk berusia 15–64 tahun, yang mencapai sekitar 70,54% dari jumlah penduduk secara keseluruhan. Sementara itu, untuk kategori anak-anak (usia 0–14 tahun) mencapai sekitar 25,57%, dan penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) sekitar 3,89% dari total penduduk.

Berdasarkan kelompok umur, jumlah penduduk paling banyak berada pada kategori usia 35–39 tahun sebanyak 15.780 jiwa atau sekitar 9,05% dari total penduduk Kabupaten Seruyan tahun 2024 yang mencapai 174.310 jiwa. Dominasi usia produktif ini mencerminkan dinamika sosial ekonomi daerah yang cukup aktif, di mana sebagian besar penduduk berada pada usia kerja dan berkontribusi pada sektor-sektor strategis seperti perkebunan, jasa, serta pemerintahan. Selain itu,

besarnya penduduk usia produktif ini juga menunjukkan potensi bonus demografi yang dapat dimanfaatkan untuk percepatan pembangunan daerah jika didukung oleh kebijakan yang tepat di bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan..

Tabel 2.27. Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Seruyan Tahun 2024

Kelompok Umur	Jenis Kelamin (Sex)		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0 – 4	7.610	7.290	14.910
5 – 9	7.390	7.140	14.520
10 – 14	7.450	6.950	14.400
15 – 19	7.610	7.010	14.620
20 – 24	7.410	6.960	14.360
25 – 29	7.440	6.900	14.340
30 – 34	7.930	7.140	15.070
35 – 39	8.390	7.400	15.780
40 – 44	7.740	6.780	14.520
45 – 49	7.000	5.820	12.820
50 – 54	5.670	4.550	10.210
55 – 59	4.060	3.090	7.150
60 – 64	2.800	2.170	4.970
65 – 69	1.690	1.460	3.140
70 – 74	990	840	1.830
75+	880	800	1.680
Kab. Seruyan 2024	92.050	82.270	174.310
Kab. Seruyan 2023	90.507	80.797	171.304
Kab. Seruyan 2020	86.211	76.695	162.906
Kab. Seruyan 2010	75.235	64.969	139.931

Sumber: BPS Kabupaten Seruyan, 2024

Jumlah penduduk Kabupaten Seruyan pada tahun 2022 sebanyak 166.072 jiwa. Penduduk di Kabupaten Seruyan terdiri dari 87.776 orang laki-laki dan 78.296 orang perempuan, atau dengan kata lain penduduk

laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan dengan nilai rasio jenis kelaminnya mencapai 112, yang artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 112 penduduk laki-laki di Kabupaten Seruyan. Jika melihat data setiap kecamatan, kecamatan dengan *sex ratio* tertinggi adalah Kecamatan Seruyan Raya sebesar 110,99 yang artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat kurang lebih 111 penduduk laki-laki. Sedangkan *sex ratio* terendah adalah Kecamatan Suling Tambun sebesar 106,72 dimana setiap 100 penduduk perempuan terdapat kurang lebih 107 penduduk laki-laki.

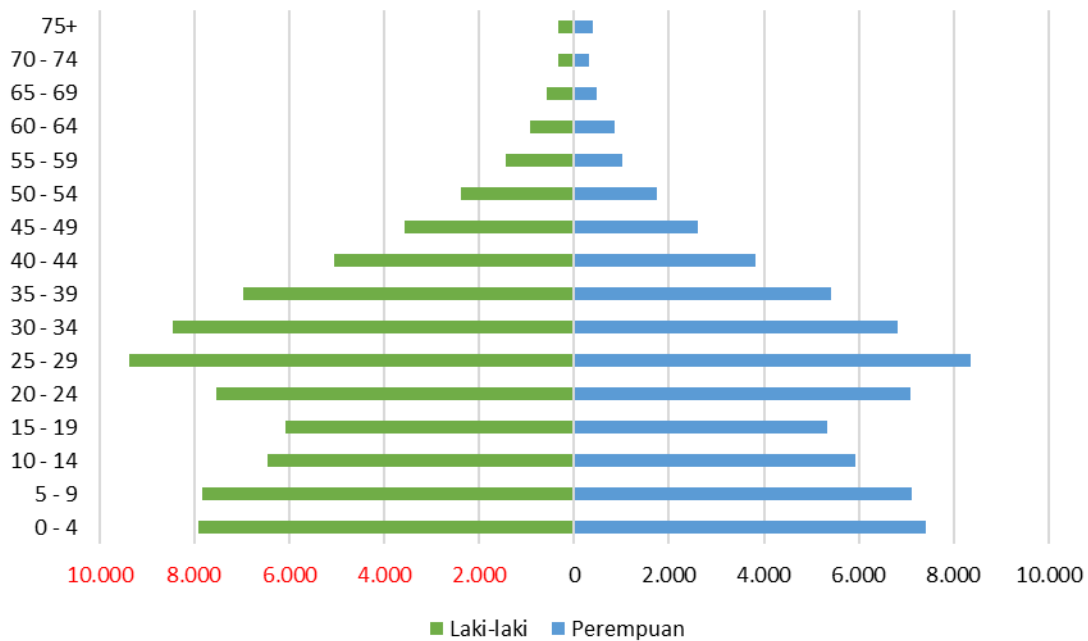
Tabel 2.28. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Sex Ratio per Kecamatan Kabupaten Seruyan Tahun 2022*

Kecamatan	Jenis Kelamin (Sex)		Jumlah	Sex Ratio
	Laki-laki	Perempuan		
Seruyan Hilir	18.653	17.212	35.865	108,37
Seruyan Hilir Timur	5.299	4.865	10.164	108,92
Danau Sembuluh	6.898	6.247	13.145	110,42
Seruyan Raya	8.678	7.819	16.479	110,99
Hanau	9.729	9.082	18.811	107,12
Danau Seluluk	7.847	7.120	14.967	110,21
Seruyan Tengah	11.792	10.882	22.674	108,36
Batu Ampar	4.211	3.930	8.141	107,15
Seruyan Hulu	4.645	4.247	8.951	109,53
Suling Tambun	1.382	1.295	2.677	106,72
Kabupaten Seruyan	87.776	78.296	166.072	112,00

Sumber: BPS Kabupaten Seruyan, 2022

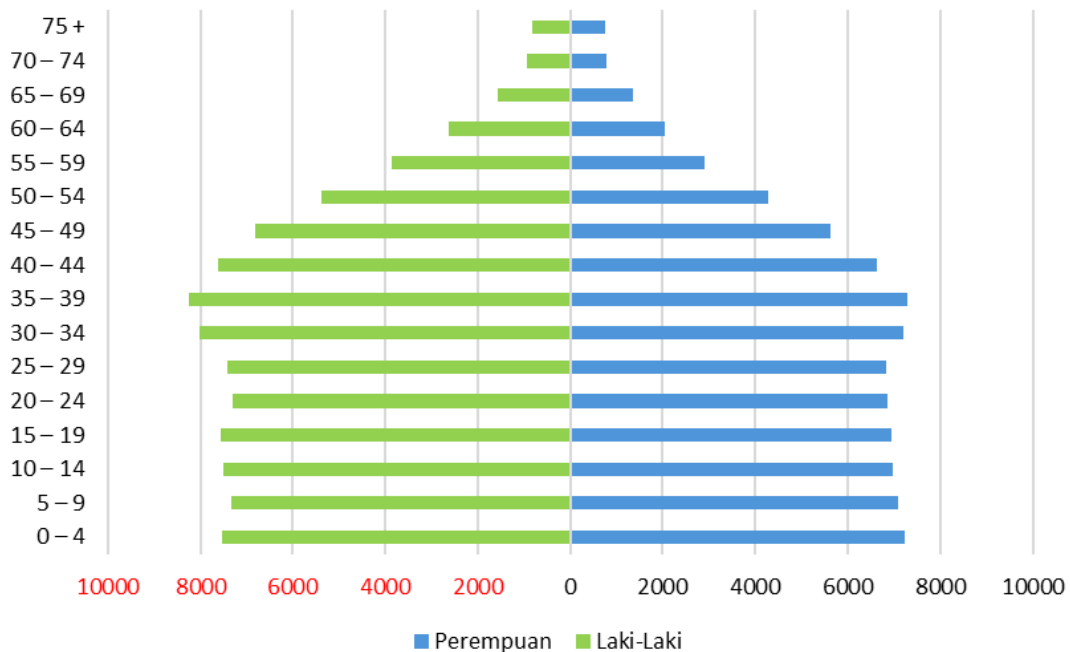
Transisi demografi adalah suatu perubahan struktur kependudukan yang terjadi karena perubahan fertilitas dan mortalitas pada suatu daerah. Hasil dari transisi demografi yang terjadi pada suatu daerah dapat diidentifikasi dengan melihat piramida penduduk. Piramida

penduduk dapat menjelaskan dan menggambarkan struktur penduduk yang terbentuk dari hasil proses fertilitas dan mortalitas di suatu daerah.



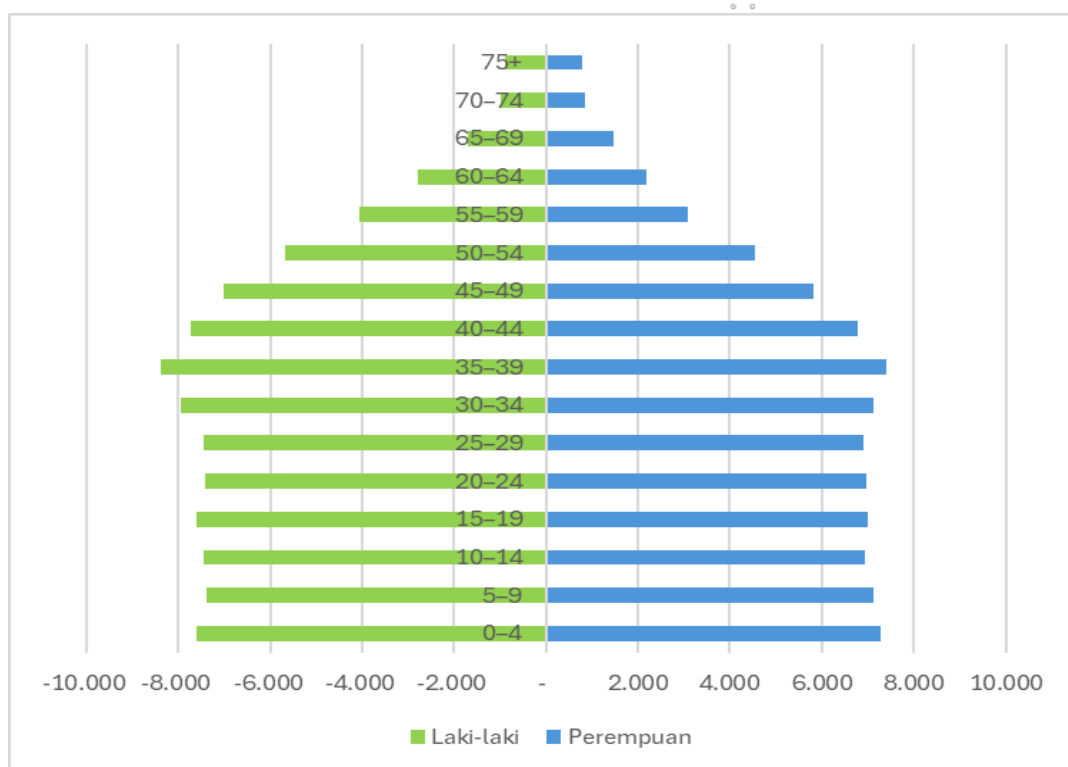
Gambar 2.9. Piramida Penduduk Kabupaten Seruyan Tahun 2010

Sumber: BPS Kabupaten Seruyan, 2010



Gambar 2.10. Piramida Penduduk Kabupaten Seruyan Tahun 2023

Sumber: BPS Kabupaten Seruyan, 2023



Gambar 2.11. Piramida Penduduk Kabupaten Seruyan Tahun 2024

Sumber: BPS Kabupaten Seruyan, 2024

2.1.1.7.5. Proyeksi Kependudukan

Perencanaan pembangunan jangka panjang perlu memperhatikan aspek pertumbuhan demografi. Aspek demografi menggambarkan dinamika kependudukan sehingga berpengaruh terhadap jumlah dan sasaran pemenuhan kebutuhan layanan oleh pemerintah daerah. Dinamika kependudukan dapat diketahui melalui proyeksi yang dilakukan dari tahun 2025-2029. Hasil analisis proyeksi kependudukan meliputi jumlah penduduk, distribusi penduduk, komposisi umur, dan penduduk usia produktif.

2.1.1.7.6. Proyeksi Jumlah Penduduk Total

Data dan informasi jumlah penduduk eksisting dan proyeksi berperan penting terhadap perencanaan pembangunan wilayah. Jumlah penduduk di setiap wilayah memiliki distribusi, kuantitas, komposisi, dan pertumbuhan yang berbeda sehingga perlu mempertimbangkan

karakteristik dinamika kependudukan untuk mencapai arah pembangunan yang lebih baik. Perencanaan pembangunan wilayah bertujuan untuk mencapai perubahan dan perkembangan wilayah ke arah positif bagi publik, pemerintah, dan lingkungan dalam wilayah tertentu. Informasi terkait data kependudukan digunakan untuk mengevaluasi kemajuan pembangunan yang sudah berjalan dan merumuskan kebijakan pembangunan yang akan berlangsung pada masa mendatang.

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk Kabupaten Seruyan, jumlah penduduk tahun 2020 sebesar 162.900 jiwa dan hasil proyeksi pada akhir tahun 2029 mencapai 189.110 jiwa. Apabila dilihat distribusi per kecamatan, jumlah penduduk tertinggi berada di Kecamatan Seruyan Hilir dan jumlah penduduk terendah di Kecamatan Suling Tambun. Perbedaan distribusi jumlah penduduk dapat disebabkan oleh aspek geografi dan faktor lainnya. Selama rentang waktu 2025-2029, jumlah penduduk di Kabupaten Seruyan diperkirakan mengalami peningkatan secara terus menerus sampai akhir tahun 2029. Pertumbuhan penduduk dari 2025 sampai 2029 sebesar 11.790 jiwa.

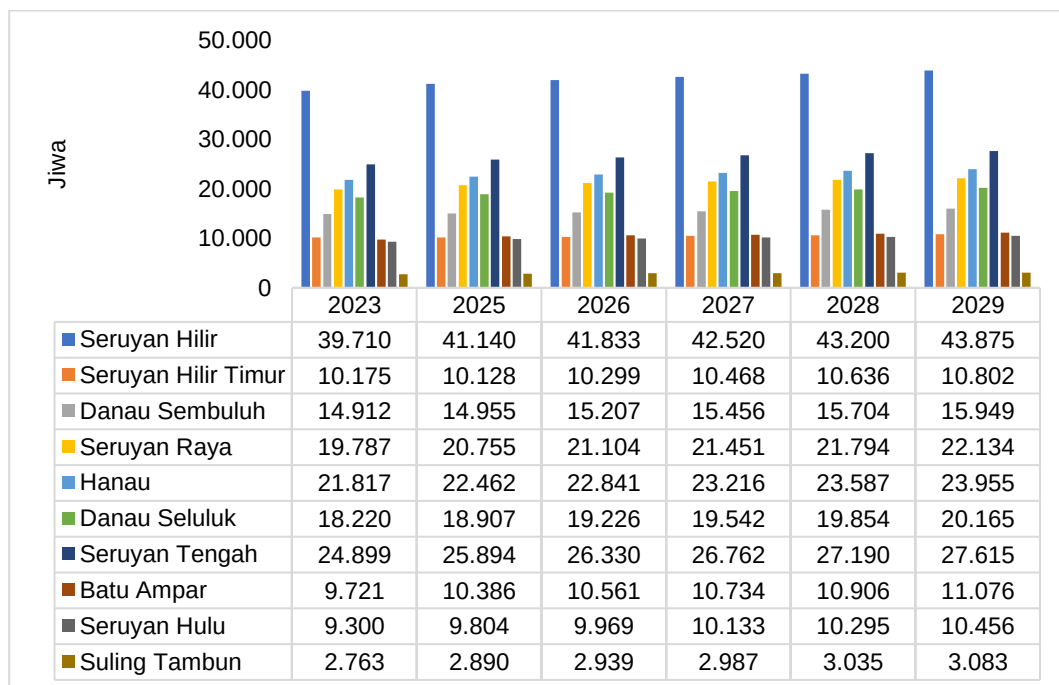
Tabel 2.29. Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029

Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2020 (Jiwa)	Proyeksi Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2025	2026	2027	2028	2029
Seruyan Hilir	37.380	41.140	41.833	42.520	43.200	43.875
Seruyan Hilir Timur	9.190	10.128	10.299	10.468	10.636	10.802
Danau Sembuluh	13.590	14.955	15.207	15.456	15.704	15.949
Seruyan Raya	19.350	20.755	21.104	21.451	21.794	22.134
Hanau	20.770	22.462	22.841	23.216	23.587	23.955
Danau Seluluk	17.620	18.907	19.226	19.542	19.854	20.165
Seruyan Tengah	23.720	25.894	26.330	26.762	27.190	27.615
Batu Ampar	9.420	10.386	10.561	10.734	10.906	11.076

Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2020 (Jiwa)	Proyeksi Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2025	2026	2027	2028	2029
Seruyan Hulu	9.160	9.804	9.969	10.133	10.295	10.456
Suling Tambun	2.700	2.890	2.939	2.987	3.035	3.083
Kabupaten Seruyan	162.900	177.320	180.310	183.270	186.200	189.110

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029

Perkembangan jumlah penduduk paling drastis dapat dilihat dalam Gambar 2.12. Secara umum, distribusi jumlah penduduk di setiap kecamatan memiliki kesamaan karakteristik. Kabupaten Seruyan memiliki perkembangan jumlah penduduk pada rentang 170.000-190.000 jiwa selama 5 tahun perencanaan. Kecamatan Seruyan Hilir mempunyai jumlah penduduk tertinggi, sedangkan Kecamatan Suling Tambun mempunyai jumlah penduduk terendah pada tahun 2025-2029.



Gambar 2.12. Grafik Proyeksi Penduduk Tahun 2025-2029

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029

2.1.1.7.7. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Penduduk di Kabupaten Seruyan didominasi oleh laki-laki sampai akhir tahun 2029 dengan rasio jenis kelamin tertinggi 112,42 pada tahun 2020 dan mengalami penurunan sampai akhir tahun perencanaan. Jumlah penduduk laki-laki diperkirakan mencapai 99.510 jiwa dan perempuan sebesar 89.600 jiwa pada tahun 2029. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Seruyan mendekati seimbang pada tahun 2029 dengan rasio jenis kelamin 111,06 yang berarti terdapat 111-112 penduduk laki-laki setiap 100 penduduk perempuan. Semakin seimbang jumlah penduduk laki-laki dan perempuan akan berpengaruh terhadap arah kebijakan dan sasaran pembangunan.

Tabel 2.30. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025-2029

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2020 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2026	2027	2028	2029
Laki-Laki	85.830	93.570	95.080	96.580	98.050	99.510
Perempuan	76.350	83.750	85.230	86.690	88.150	89.600
Rasio	112,42	111,73	111,56	111,41	111,23	111,06

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029

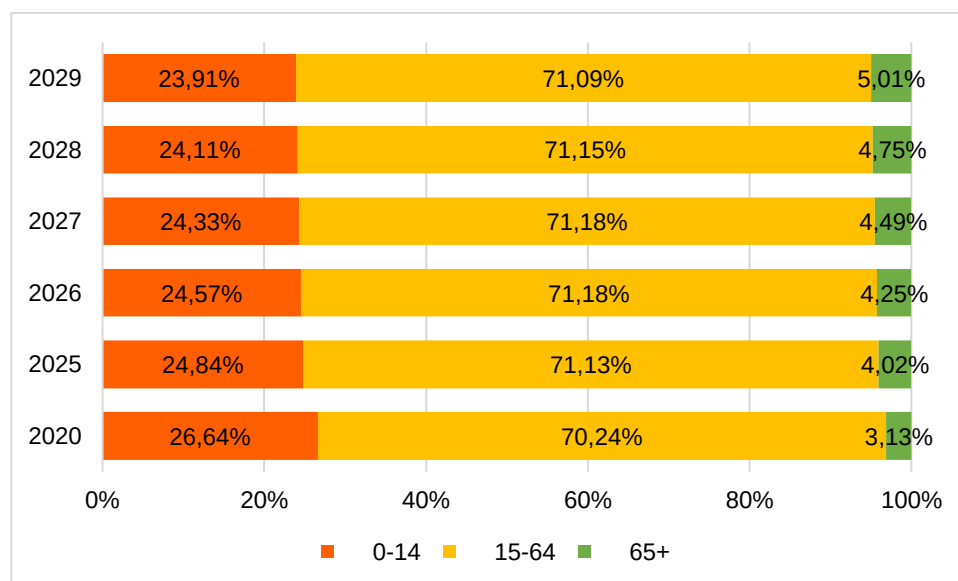
2.1.1.7.8. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok umur terdiri atas usia tidak produktif (0-14 tahun dan >65 tahun) dan usia produktif (15-64 tahun). Berdasarkan kelompok umur, penduduk di Kabupaten Seruyan didominasi oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) sampai akhir tahun 2029 sebanyak 134.440 jiwa. Apabila melihat persentase komposisi umur, penduduk usia produktif berkisar 70%-71% dari jumlah keseluruhan. Penduduk lanjut usia, yaitu kelompok umur >65 tahun, mempunyai persentase dan jumlah terendah yang berkisar antara 3%-5% atau 9.470 jiwa pada tahun 2029. Kondisi tersebut menyebabkan penurunan angka ketergantungan dari 42,37 pada tahun 2020 menjadi 40,67 pada tahun 2029. Dengan demikian, terdapat 40-41 penduduk usia tidak produktif yang ditanggung oleh 100 penduduk usia produktif.

**Tabel 2.31. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
Tahun 2025-2045**

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2020 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2026	2027	2028	2029
0-14 Tahun	43.200	44.050	44.310	44.590	44.890	45.210
15-64 Tahun	113.920	126.130	128.340	30.450	132.480	134.440
> 65 Tahun	5.070	7.130	7.670	8.230	8.850	9.470
Angka Ketergantungan	42,37	40,58	40,50	40,49	40,56	40,67

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029



**Gambar 2.13. Proyeksi Komposisi Umur Penduduk Kabupaten
Seruyan Tahun 2025-2029**

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029

2.1.1.7.9. Proyeksi Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan perbandingan antara jumlah penduduk dengan satuan luas wilayah. Wilayah dianggap semakin padat jika penduduknya semakin banyak. Untuk melihat kepadatan penduduk dan perkembangannya, proyeksi dilakukan dengan membandingkan analisis proyeksi jumlah penduduk dan luas wilayah. Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 3.4, distribusi penduduk tertinggi dan luas lahan

paling kecil berada di Kecamatan Hanau. Kecamatan Hanau mempunyai kepadatan tertinggi sampai akhir tahun 2029 yaitu 44 jiwa tiap km^2 . Wilayah dengan kepadatan penduduk terendah, yaitu 2 jiwa tiap km^2 pada tahun 2025-2029 adalah Kecamatan Suling Tambun. Letaknya berada di bagian utara Kabupaten Seruyan, sekaligus berbatasan langsung dengan Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Seluruh desa di Kecamatan Suling Tambun yang berjumlah 9 desa berada di kawasan hutan.

Secara keseluruhan, kepadatan penduduk di Kabupaten Seruyan mengalami peningkatan pada tahun 2025-2029. Peningkatan kepadatan penduduk berkisar 1 jiwa/ km^2 setiap lima tahun. Tingkat kepadatan tertinggi sebesar 12 jiwa/ km^2 pada tahun 2029, sedangkan tahun sebelumnya yaitu 2025-2028 memiliki perkembangan kepadatan penduduk yang stagnan. Kecamatan dengan angka kepadatan penduduk mencapai >20 jiwa/ km^2 meliputi Kecamatan Hanau, Kecamatan Danau Seluluk, Kecamatan Seruyan Raya, dan Kecamatan Seruyan Tengah.

Tabel 2.32. Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029

No	Kecamatan	Luas (km^2)	Proyeksi Jumlah Penduduk (jiwa)				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Seruyan Hilir	4.659	41.140	41.833	42.520	43.200	43.875
2	Seruyan Hilir Timur	1.428	10.128	10.299	10.468	10.636	10.802
3	Danau Sembuluh	1.555	14.955	15.207	15.456	15.704	15.949
4	Seruyan Raya	869	20.755	21.104	21.451	21.794	22.134
5	Hanau	549	22.462	22.841	23.216	23.587	23.955
6	Danau Seluluk	586	18.907	19.226	19.542	19.854	20.165
7	Seruyan Tengah	1.343	25.894	26.330	26.762	27.190	27.615
8	Batu Ampar	669	10.386	10.561	10.734	10.906	11.076
9	Seruyan Hulu	3.262	9.804	9.969	10.133	10.295	10.456
10	Suling Tambun	1.484	2.890	2.939	2.987	3.035	3.083
Kabupaten Seruyan		16.404	177.320	180.310	183.270	186.200	189.110

Lanjutan Tabel 2.32. Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029

No	Kecamatan	Proyeksi Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Seruyan Hilir	9	9	9	9	9
2	Seruyan Hilir Timur	7	7	7	7	8
3	Danau Sembuluh	10	10	10	10	10
4	Seruyan Raya	24	24	25	25	25
5	Hanau	41	42	42	43	44
6	Danau Seluluk	32	33	33	34	34
7	Seruyan Tengah	19	20	20	20	21
8	Batu Ampar	16	16	16	16	17
9	Seruyan Hulu	3	3	3	3	3
10	Suling Tambun	2	2	2	2	2
Kabupaten Seruyan		11	11	11	11	12

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029

2.1.1.7.10. Proyeksi Penduduk Usia Produktif

Penduduk yang diklasifikasikan ke dalam usia produktif memiliki usia 15-64 tahun dan dianggap mampu produktif secara ekonomi. Proyeksi penduduk usia produktif menjadi penting dilakukan untuk memberikan informasi perubahan populasi penduduk usia produktif dalam periode tertentu. Ketepatan sasaran dan arah pembangunan, lebih khusus pada bidang ketenagakerjaan dan perekonomian, dipengaruhi oleh jumlah penduduk usia produktif. Hasil analisis memberikan gambaran bahwa Kecamatan Seruyan Hilir memiliki jumlah penduduk usia produktif paling tinggi selaras dengan jumlah penduduk totalnya. Jumlah penduduk usia produktif paling rendah berada di Kecamatan Suling Tambun yang berada di kawasan hutan bagian utara Kabupaten Seruyan. Secara keseluruhan, Kabupaten Seruyan mengalami peningkatan penduduk usia produktif yang berlangsung secara terus menerus pada tahun 2025-2029. Terdapat enam kecamatan yang diperkirakan memiliki penduduk usia produktif di atas 10.000 jiwa pada tahun 2029, yaitu Kecamatan Seruyan Hilir, Kecamatan Seruyan Tengah, Kecamatan Hanau, Kecamatan Seruyan Raya, Kecamatan Danau Seluluk, dan Kecamatan Danau Sembuluh. Perbedaan distribusi jumlah

penduduk di Kabupaten Seruyan disebabkan oleh faktor kondisi fisik dan ekonomi wilayah.

**Tabel 2.33. Proyeksi Penduduk Usia Produktif Kabupaten Seruyan
Tahun 2025-2029**

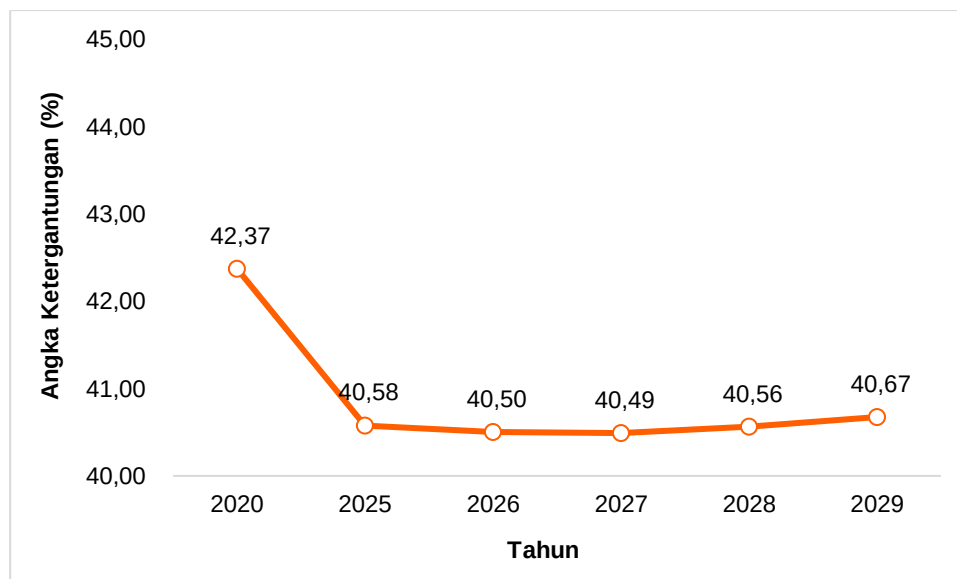
Kecamatan	Penduduk Usia Produktif Tahun 2020 (jiwa)	Proyeksi Penduduk Usia Produktif (Jiwa)				
		2025	2026	2027	2028	2029
Seruyan Hilir	26.430	29.263	29.776	30.265	30.736	31.191
Seruyan Hilir Timur	6.507	7.205	7.331	7.451	7.567	7.679
Danau Sembuluh	9.608	10.637	10.824	11.002	11.173	11.338
Seruyan Raya	13.334	14.763	15.022	15.269	15.506	15.736
Hanau	14.431	15.977	16.257	16.525	16.782	17.030
Danau Seluluk	12.147	13.449	13.685	13.910	14.126	14.335
Seruyan Tengah	16.635	18.418	18.741	19.049	19.346	19.632
Batu Ampar	6.672	7.388	7.517	7.641	7.759	7.874
Seruyan Hulu	6.299	6.974	7.096	7.212	7.325	7.433
Suling Tambun	1.857	2.056	2.092	2.126	2.159	2.191
Kabupaten Seruyan	113.920	126.130	128.340	130.450	132.480	134.440

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029

2.1.1.7.11. Proyeksi Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan merupakan beban tanggungan penduduk usia tidak produktif oleh penduduk usia produktif. Penduduk yang dianggap produktif secara ekonomi memiliki rentang usia 15-64 tahun. Penduduk usia tidak produktif terdiri atas 2 (dua) kelompok umur, yaitu 0-15 tahun dan >65 tahun. Kabupaten Seruyan diperkirakan mengalami penurunan pada tahun 2025-2027, namun kembali meningkat sampai tahun 2029. Angka ketergantungan pada tahun 2029 mencapai nilai 40,67 sehingga setiap 100 penduduk usia produktif memiliki tanggungan 40-41 penduduk usia tidak produktif. Kondisi penurunan angka ketergantungan perlu menjadi perhatian untuk memaksimalkan potensi

usia produktif dan memberikan alternatif pemberdayaan usia tidak produktif khususnya lanjut usia.



Gambar 2.14. Proyeksi Angka Ketergantungan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045

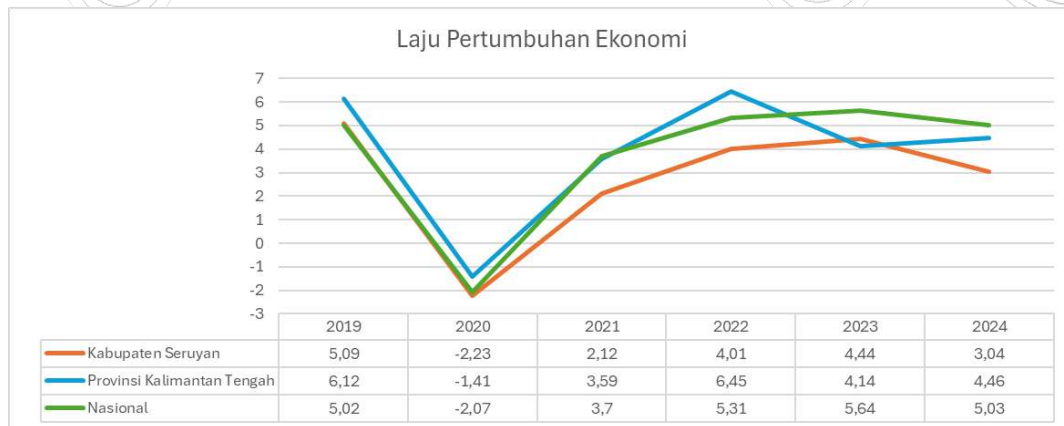
Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

2.1.2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seruyan dapat diketahui dengan menganalisis nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap sektor produksi yang ada pada nilai PDRB ADHK. Nilai PDRB ADHK Kabupaten Seruyan terus mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2020 nilai PDRB ADHK Kabupaten Seruyan sebesar Rp3.809,81 miliar. Nilainya naik hingga mencapai Rp6.560,8 miliar pada tahun 2023. Nilai PDRB ADHK Kabupaten Seruyan yang mengalami peningkatan menunjukkan bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Seruyan mengalami perkembangan yang positif. Meskipun nilai PDRB ADHK mengalami peningkatan namun angka pertumbuhan tidak selalu menunjukkan peningkatan.



Gambar 2.15. Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019-2024

Selama tahun 2019-2024 terjadi perubahan nilai laju pertumbuhan PDRB ADHK yang fluktuatif. Dalam kurun waktu 5 tahun nilai laju pertumbuhan cenderung terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,71 persen. Laju pertumbuhan paling rendah terjadi pada tahun 2020 yakni sebesar -2,23%, hal ini mengindikasikan bahwa nilai PDRB ADHK Kabupaten Seruyan mengalami penurunan yang kemudian juga menyebabkan penurunan produktivitas ekonomi. Penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut disebabkan oleh pandemi COVID-19 di seluruh dunia yang mengakibatkan perekonomian dunia dan nasional mengalami guncangan, begitu pula dengan perekonomian Kabupaten Seruyan. Bahkan pada tahun 2020, nilai laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seruyan lebih rendah daripada Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah, yakni -2,07% untuk Nasional dan -1,41% untuk Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada tahun 2021, nilai laju pertumbuhan mengalami kenaikan karena kondisi pandemi COVID-10 yang sudah mulai terkendali. Banyak program pemerintah terkait penanganan COVID-19 telah dijalankan, masyarakat sudah nilai mampu beradaptasi, sehingga perlahan-lahan kondisi ekonomi di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, serta Nasional mulai membaik. Meski demikian, nilai laju pertumbuhan

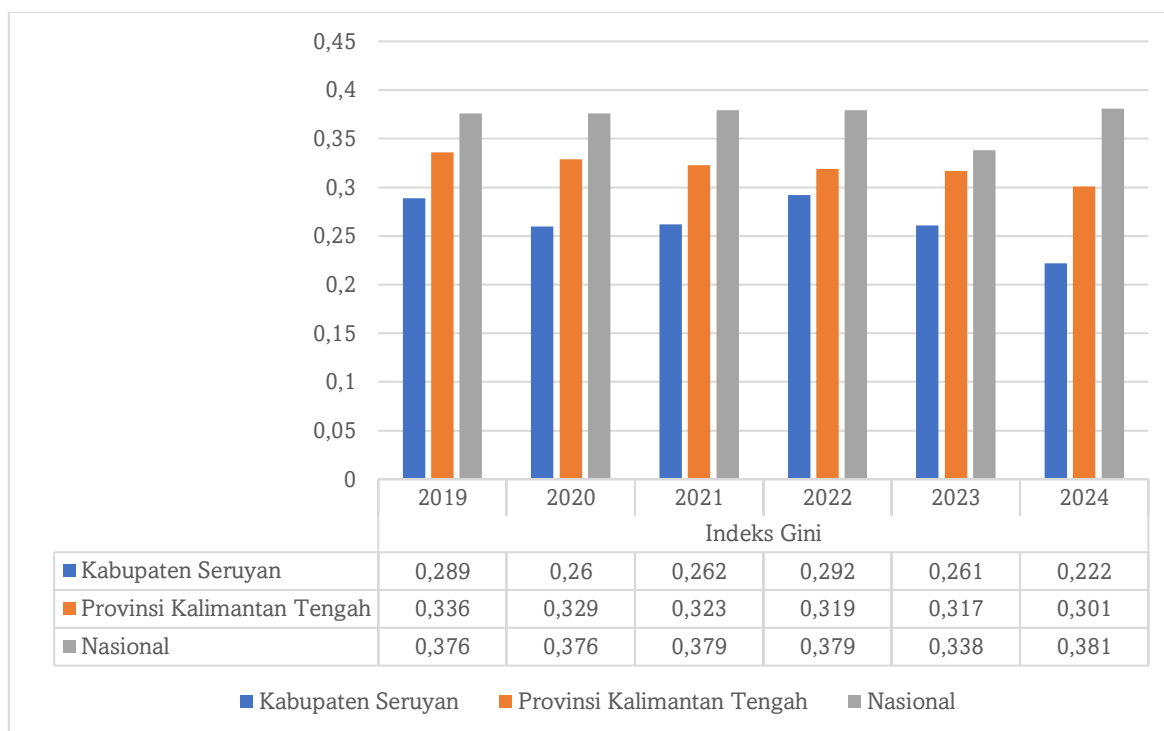
ekonomi Kabupaten Seruyan masih jauh tertinggal dari Nasional dan Provinsi. Pada tahun 2023 terjadi perkembangan yang positif karena nilai laju pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Seruyan yang sebesar 4,55%, lebih tinggi dari nilai pertumbuhan PDRB ADHK Provinsi Kalimantan Tengah yang sebesar 4,14%. Akan tetapi nilai pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Seruyan tersebut masih berada di bawah nilai pertumbuhan PDB ADHK Nasional yang sebesar 5,05%.

2.1.2.1.2. Indeks Gini

Untuk melihat ketimpangan pendapatan penduduk, salah satu indikator yang dapat digunakan adalah Rasio Gini atau Indeks Gini. Indeks Gini adalah ukuran ketimpangan pendapatan agregat yang angkanya berkisar 0 hingga 1. Semakin mendekati 1 maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk semakin tinggi, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya semakin mendekati 0 tingkat ketimpangan pendapatan semakin rendah, atau mendekati pemerataan sempurna. BPS mengkategorikan Indeks Gini menjadi tiga tingkat, yaitu rendah (Indeks Gini $< 0,3$), sedang ($0,3 < \text{Indeks Gini} < 0,4$) dan tinggi (Indeks Gini $> 0,4$).

Indeks Gini Kabupaten Seruyan pada tahun 2019-2023 menunjukkan perubahan yang fluktuatif. Selama periode tersebut, tercatat Indeks Gini tertinggi pada tahun 2022 sebesar 0,292 dan Indeks Gini terendah pada tahun 2020 sebesar 0,260. Nilai Indeks Gini Kabupaten Seruyan pada tahun 2019 sebesar 0,289 kemudian pada tahun 2020 nilainya mengalami penurunan. Pada periode tahun 2021-2022 nilai Indeks Gini Kabupaten Seruyan kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 0,292 dan pada tahun 2024 nilainya kembali turun menjadi 0,222. Secara keseluruhan nilai Indeks Gini Kabupaten Seruyan terus berada pada kategori rendah. Selama 5 tahun Indeks Gini Kabupaten Seruyan selalu berada di bawah Indeks Gini Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa

kondisi ketimpangan di Kabupaten Seruyan lebih merata dibandingkan Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah.



Gambar 2.16. Grafik Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional Tahun 2010-2024

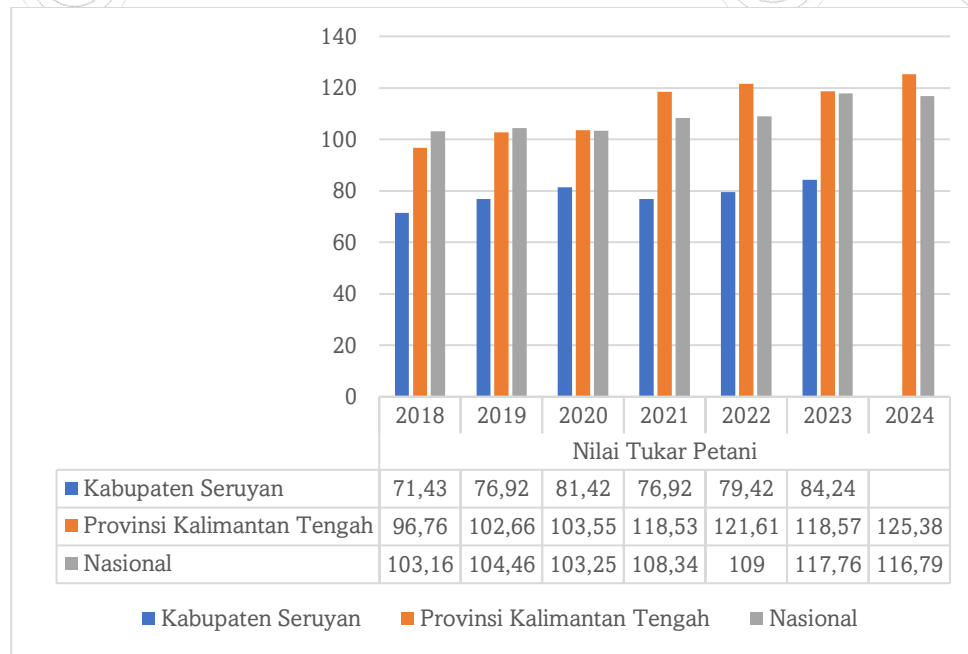
Sumber: Badan Pusat Statistik dan Bank Dunia, 2010-2024

2.1.2.1.3. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) yang sering dikaitkan dengan kondisi ekonomi petani merupakan perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di perdesaan. Semakin tinggi NTP, maka semakin tinggi kemampuan atau daya beli petani di perdesaan. Selain itu NTP juga memiliki manfaat sebagai tolak ukur kemampuan tukar produk yang dijual dari petani dengan berbagai produk yang dibutuhkan dalam segala produksi dan konsumsi rumah tangga. Sehingga besar kecilnya angka NTP akan menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan produk-produk lain.

Penilaian NTP dibedakan menjadi 3 kelompok yakni $NTP > 100$, maka petani mengalami keuntungan/profit, dimana petani memiliki keuntungan dari hasil produksi komoditi pertanian dibanding besarnya hasil konsumsi petani (pengeluaran petani); $NTP = 100$, maka petani mengalami keimpasan hasil keuntungan produksi komoditi pertanian dengan besarnya hasil konsumsi petani (pengeluaran petani); $NTP < 100$, maka petani mengalami kerugian/defisit, dimana petani tidak memiliki keuntungan dari hasil produksi komoditi pertanian.

Selama periode tahun 2018-2023, NTP Kabupaten Seruyan mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2018, NTP Kabupaten Seruyan sebesar 71,43. Nilai tersebut terus meningkat hingga mencapai 82,24 pada tahun 2023. Meskipun NTP Kabupaten Seruyan terus mengalami peningkatan, namun nilainya tidak mampu menyentuh pada angka 100. Kondisi ini menunjukkan bahwa petani mengalami kerugian/defisit, dimana petani tidak memiliki keuntungan dari hasil produksi komoditi pertanian. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya peningkatan NTP untuk membantu petani. Jika dibandingkan dengan kondisi NTP Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional, NTP Kabupaten Seruyan berada di bawah NTP Provinsi dan Nasional. Berbeda dengan Kabupaten Seruyan, NTP Provinsi dan Nasional nilainya sudah mampu melebihi 100. Pada tahun 2023, NTP Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 118,57 dan NTP Nasional sebesar 117,76. Selanjutnya, pada tahun 2024, NTP kabupaten Seruyan belum ada data. Secara lebih jelas dapat diamati pada tabel berikut



Gambar 2.17. Grafik Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018-2024

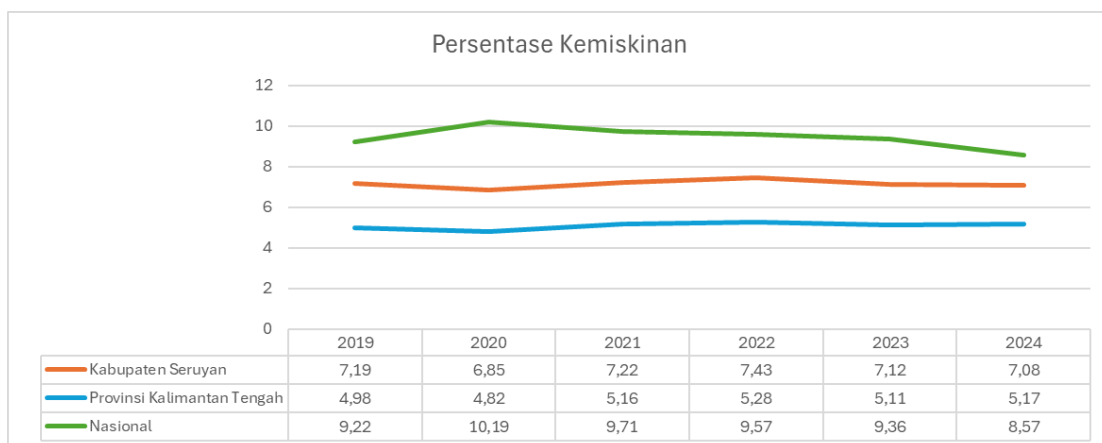
2.1.2.1.4. Angka Kemiskinan

Kemiskinan menjadi salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis kesejahteraan ekonomi. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Kondisi kemiskinan dapat dianalisis menggunakan beberapa indikator, salah satu indikator yang sering digunakan untuk menganalisis kemiskinan adalah persentase penduduk miskin (P0) yang dianggap mampu merepresentasikan angka kemiskinan.

Persentase penduduk miskin (P0) di Kabupaten Seruyan pada tahun 2019-2024 menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2019, persentase penduduk miskin (P0) di Kabupaten Seruyan sebesar 7,19 persen kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan nilai menjadi 6,85 persen. Namun pada tahun 2021-2022 nilainya kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 7,43% pada tahun 2022. Akan tetapi pada tahun 2023 persentase penduduk miskin (P0) di Kabupaten

Seruyan mengalami penurunan menjadi 7,12%, dari yang sebelumnya 7,43% pada tahun 2022.

Kenaikan persentase penduduk miskin (P0) yang terjadi pada tahun 2020-2022 disebabkan karena adanya pandemi COVID-19, yang menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat sehingga pendapatan masyarakat menjadi berkurang. Secara keseluruhan, capaian persentase penduduk miskin (P0) di Kabupaten Seruyan lebih rendah dari Nasional yakni 7,12% untuk Kabupaten Seruyan dan 9,36% untuk Nasional pada tahun 2023. Namun jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin (P0) Provinsi Kalimantan Tengah, nilainya berada diatas Provinsi yakni sebesar 5,11% untuk Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023. Pada tahun 2024 mengalami penurunan kembali di angka 7,08%.



Gambar 2.18. Grafik Persentase Penduduk Miskin (P0) Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional Tahun 2005-2024

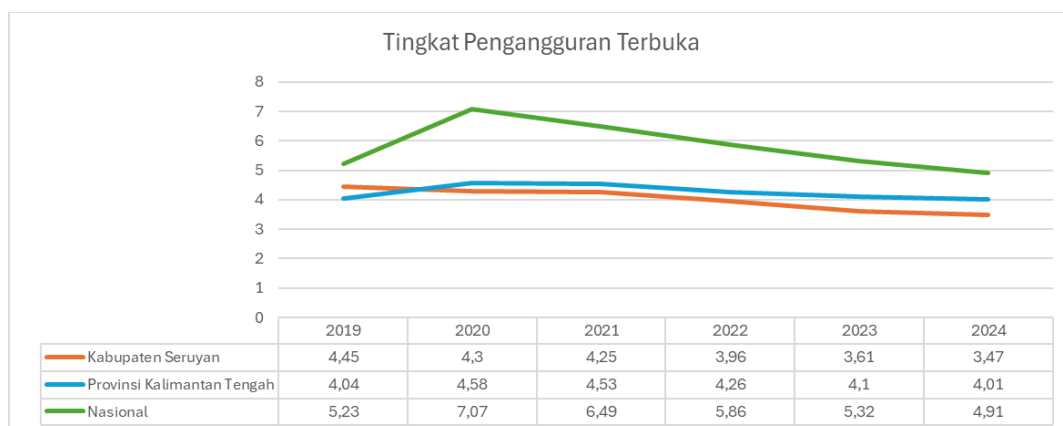
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2005-2024

2.1.2.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja (penduduk usia kerja – 15 tahun ke atas). Nilai TPT menunjukkan besar/kecilnya jumlah pasokan tenaga kerja yang belum termanfaatkan. Sedangkan pengertian pengangguran menurut BPS meliputi penduduk yang tidak bekerja tetapi dalam status mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha, atau

merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Seruyan tahun 2019-2023 mengalami tren yang menurun. Pada tahun 2019, nilai TPT Kabupaten Seruyan sebesar 4,45 persen, nilainya terus menurun menjadi 3,47 persen pada tahun 2024. Adapun kondisi TPT Kabupaten Seruyan dengan Provinsi Kalimantan Tengah cukup relevan. Kenaikan dan penurunan TPT Provinsi Kalimantan Tengah hanya berkisar 0,05-1,3%. Sedangkan kondisi TPT Nasional cenderung mengalami tren penurunan. Kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2020, namun kembali turun pada periode tahun 2021-2022. Pada periode tahun 2020-2022, nilai TPT Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional secara bersamaan mengalami penurunan nilai TPT. Secara keseluruhan nilai TPT Kabupaten Seruyan berada di bawah TPT Nasional. sedangkan jika dibandingkan dengan Provinsi secara keseluruhan nilai TPT Kabupaten Seruyan berada di atas nilai TPT Provinsi Kalimantan Tengah, namun pada periode tahun 2020-2024 nilai TPT Kabupaten Seruyan berada di bawah nilai TPT Provinsi Kalimantan Tengah.



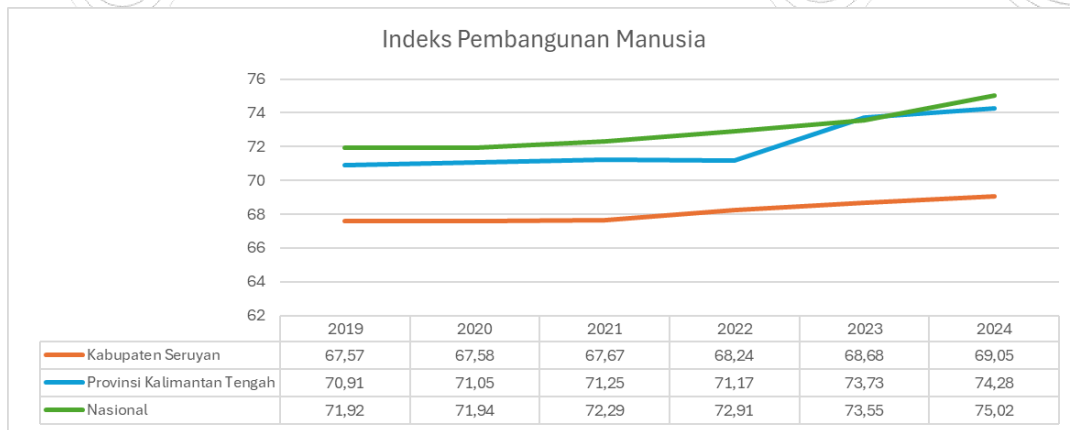
Gambar 2.19. Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019-2024

2.1.2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Di mana dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator angka harapan hidup, dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta dimensi standar hidup layak diwakili dengan indikator pengeluaran per kapita. BPS mengelompokkan IPM menjadi 4 (empat) kategori yaitu rendah ($IPM < 60$), sedang ($60 \leq IPM \leq 70$), tinggi ($70 \leq IPM \leq 80$), dan sangat tinggi ($IPM \geq 80$).

Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Seruyan pada periode tahun 2019-2024 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Di mana pada tahun 2019 nilai IPM Kabupaten Seruyan sebesar 67,57 terus meningkat hingga pada tahun 2024 mencapai 69,05. Rata-rata pertumbuhan IPM di Kabupaten Seruyan adalah 0,4 persen per tahun. Dalam kurun waktu 5 tahun terjadi kenaikan IPM sebesar 1,11 poin. Perkembangan ini menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia secara umum di Kabupaten Seruyan. Dengan capaian ini status pembangunan manusia di Kabupaten Seruyan masih berada di label sedang ($60 \leq IPM \leq 70$). Perkembangan IPM di Kabupaten Seruyan sejalan dengan peningkatan IPM di Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional. Adapun nilai IPM Provinsi Kalimantan Tengah masuk ke dalam kategori sedang tinggi ($70 \leq IPM \leq 80$), sedangkan nilai IPM Nasional yang masuk kedalam kategori tinggi ($70 \leq IPM \leq 80$). Secara keseluruhan nilai IPM Kabupaten Seruyan berada di bawah Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional.



Gambar 2.20. Grafik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019-2024

2.1.2.1.7. Indeks Harmoni Indonesia

Implementasi Indeks Harmoni Indonesia sebagai indikator kinerja pembangunan daerah yang menggantikan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) berdasarkan usulan provinsi pasca konsultasi dengan pemerintah pusat. IHI ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Indikator Kinerja Daerah (IKD) sesuai dengan ketentuan surat Kementerian Dalam Negeri, dengan perhitungan yang baru akan dimulai pada tahun 2025. Transisi dari IDI ke IHI ini menunjukkan evolusi pendekatan pemerintah dalam mengukur kualitas kehidupan sosial masyarakat, dari fokus pada aspek demokrasi menuju perspektif yang lebih komprehensif tentang keharmonisan sosial.

Tabel 2. 34 Indeks Harmoni Indonesia Kabupaten Seruyan

INDIKATOR	TARGET TAHUN					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Indeks Harmoni Indonesia	6,70	6,71	6,72	6,73	6,74	6,75

Sumber : IKU Kabupaten Seruyan, 2025

Kabupaten Seruyan menetapkan target IHI yang progresif, dimulai dari baseline 6,70 pada tahun 2025 sebagai tahun pertama perhitungan, kemudian meningkat bertahap menjadi 6,71 (2026), 6,72 (2027), hingga mencapai 6,75 pada tahun 2028-2030. Penetapan target yang meningkat secara gradual ini mengakomodasi fakta bahwa IHI merupakan indikator baru yang memerlukan proses pembelajaran dan adaptasi dalam implementasinya. Target sampai dengan 2030 menunjukkan ekspektasi bahwa kondisi harmoni sosial Baik dapat dicapai dan dipertahankan sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.

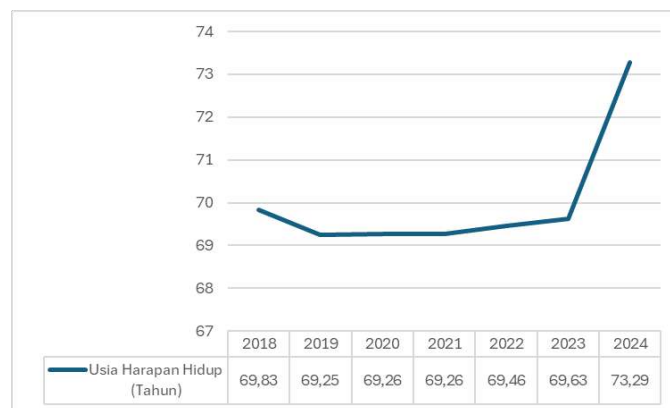
Adopsi IHI sebagai indikator kinerja daerah memiliki signifikansi strategis karena selaras dengan arahan kebijakan nasional melalui Kementerian Dalam Negeri untuk memperkuat pengukuran keharmonisan sosial di tingkat daerah. Sebagai pengganti IDI, IHI diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih holistik tentang kondisi sosial masyarakat Seruyan, tidak hanya dari aspek partisipasi demokratis tetapi juga kerukunan antarkelompok, toleransi, dan kohesi sosial. Implementasi IHI ini akan menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran untuk memelihara dan meningkatkan keharmonisan masyarakat sebagai modal sosial pembangunan daerah.

2.1.2.2. Kesehatan Untuk Semua

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat. Hal ini seperti yang tertuang dalam dokumen Sistem Kesehatan Nasional. Selain itu, pembangunan sektor kesehatan menjadi salah satu pembangunan yang sangat strategis untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk. Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan dan daya beli masyarakat akan berpengaruh terhadap meningkatnya

kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan gizi. Selain penyelenggaraan kinerja yang harus memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM), beberapa indikator yang digunakan sebagai acuan dalam menilai keberhasilan pembangunan kesehatan antara lain: Usia Harapan Hidup (UHH), Status Gizi Balita, Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKI), serta Status Gizi Balita yang akan berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya. UHH menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat, yang mencerminkan “lamanya hidup” sekaligus “hidup sehat” suatu masyarakat. Perkembangan Usia Harapan Hidup cenderung mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan. UHH Kabupaten Seruyan pada tahun 2018 sebesar 69,83 tahun menurun pada tahun 2019 menjadi 69,25 tahun. UHH Kabupaten Seruyan dari tahun 2019 hingga tahun 2024 terus mengalami peningkatan. Hingga akhirnya pada tahun 2024 Kabupaten Seruyan memiliki nilai Usia Harapan Hidup (UHH) sebesar 73,63 tahun.



Gambar 2.21. Grafik Usia Harapan Hidup Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan, 2018-2024

Status gizi balita merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat. Kekurangan gizi terutama pada balita dan anak-anak dapat menyebabkan meningkatnya risiko kematian, terganggunya pertumbuhan fisik dan perkembangan mental serta kecerdasan. Dalam beberapa hal dampak kekurangan gizi bersifat

permanen yang tidak dapat diperbaiki walaupun usia berikutnya kebutuhan gizi terpenuhi. Kekurangan gizi biasanya terjadi secara tersembunyi dan sering luput dari pengamatan.

Kasus balita gizi buruk di Kabupaten Seruyan mengalami penurunan dari tahun 2018 hingga tahun 2024. Pada tahun 2018 dilaporkan sebanyak 3 balita mengalami gizi buruk, begitupula pada tahun 2019 juga dilaporkan sebanyak 3 balita mengalami gizi buruk. Kemudian pada tahun 2020 hingga tahun 2024, dilaporkan bahwa terjadi kenaikan kasus gizi buruk. Di mana pada tahun 2024 ditemukan 26 kasus gizi buruk pada balita.

Status gizi balita terdiri dari Stunting, Wasting, dan Underweight. Pada tahun 2019 jumlah Stunting sebanyak 1250 anak dengan persentase 24,36%, dan pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 831 anak atau 10,68%. Selanjutnya pada tahun 2021 terjadi penurunan kembali menjadi 779 anak atau 17,51% dan pada tahun 2022 menjadi 547 anak. Pada tahun 2024, Angka Stunting di Kabupaten Seruyan kembali mengalami penurunan menjadi 679 anak. Sedangkan untuk Wasting pada tahun 2019 sebanyak 644 anak atau 12,55%, pada tahun 2020 turun menjadi 418 anak atau 5,38% dan tahun 2021 turun lagi menjadi 363 anak atau 8,16%. Nilainya terus turun menjadi 168 anak pada tahun 2022 dan 254 anak pada tahun 2024. Untuk *Underweight* pada tahun 2019 sebanyak 900 anak atau 17,54%, pada tahun 2020 turun menjadi 543 anak atau 6,69% dan tahun 2021 naik menjadi 900 anak atau 20,23%. Kemudian angkanya mengalami penurunan yang sangat signifikan di tahun 2022 menjadi 345 anak dan pada tahun 2024 menjadi 521 anak.

Tabel 2.35. Status Gizi Balita di Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2024

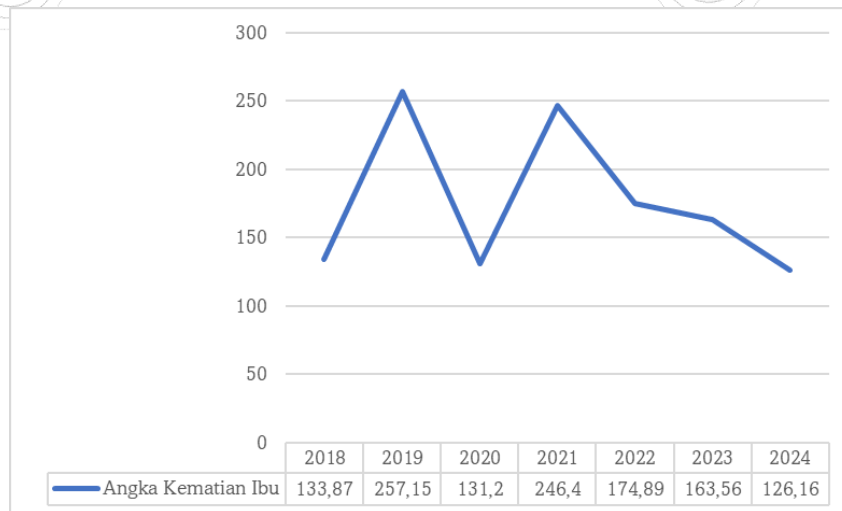
Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gizi Buruk	3	3	2	1	0	TAD	28
Stunting	1.235	1.250	831	779	547	919	31.3 (%)
Wasting	752	644	418	363	168	9 (%)	8,3 (%)

Underweight	810	900	543	900	345	29	521

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan, 2018-2024

Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator yang sangat mempengaruhi derajat kesehatan di Kabupaten Seruyan. AKI merupakan jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin, serta sifat disuatu wilayah pada setiap 100.000 kelahiran hidup. AKI juga dapat digunakan dalam pemantauan kematian terkait dengan kehamilan. Indikator ini dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan. Sensitivitas AKI terhadap perbaikan pelayanan kesehatan menjadi indikator keberhasilan pembangunan sektor kesehatan.

Gambaran AKI di Kabupaten Seruyan selama tahun 2018 hingga tahun 2023 menunjukkan kecenderungan fluktuatif. Terlihat adanya tren kenaikan angka kematian ibu dari tahun 2018 sebanyak 133,87 per 100.000 kelahiran hidup menjadi 257,15 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2019. Kemudian terjadi penurunan AKI pada tahun 2020 menjadi 131,2 per 100.000 kelahiran hidup. Besaran AKI kembali mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2021 menjadi 246,4 per 100.000 kelahiran hidup. Namun besaran AKI pada tahun 2022 mampu turun menjadi 174,89 per 100.000 kelahiran hidup dan kembali turun pada tahun 2024 menjadi 126,16 per 100.000 kelahiran hidup.



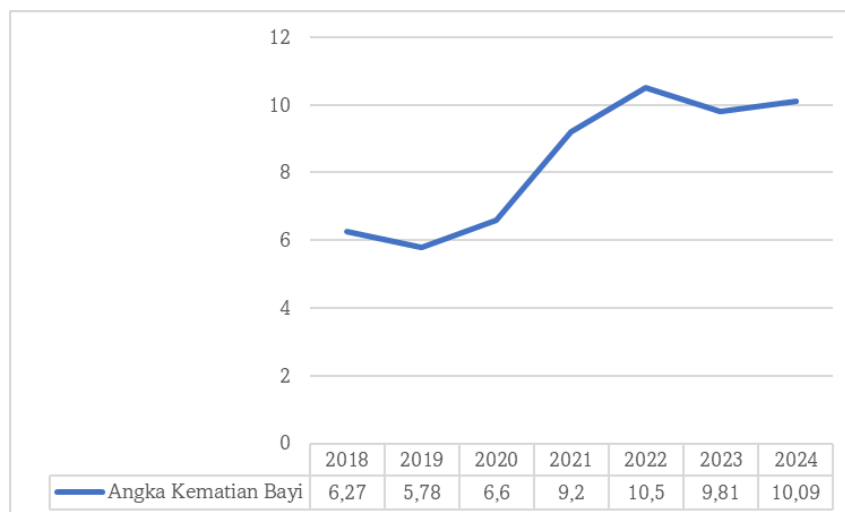
Gambar 2.22. Grafik Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan, 2018-2024

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator yang paling penting dalam menentukan status kesehatan masyarakat karena indikator ini mencerminkan pelayanan kesehatan dasar, yang berperan terhadap mutu pelayanan kebidanan. AKB dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat karena kelompok ini rentan terhadap masalah kesehatan terutama terhadap paparan lingkungan sekitar. Indikator AKB terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial ekonomi dan kesehatan.

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi pada bayi sebelum mencapai usia satu tahun. Sedangkan AKB didefinisikan sebagai jumlah bayi yang meninggal (berumur kurang dari 1 tahun) dalam wilayah dan kurun waktu tertentu setiap 1.000 kelahiran hidup. Tren jumlah kematian bayi di Kabupaten Seruyan pada tahun 2018-2022 menunjukkan kondisi yang terus meningkat. Jumlah kematian bayi di Kabupaten Seruyan pada tahun 2018 sebesar 4,9 per 1.000 kelahiran hidup meningkat hingga 10,5 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2022. Dan mengalami sedikit kenaikan menjadi 10,09 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023. Angka kematian bayi yang cenderung meningkat seharusnya menjadi

perhatian bagi semua pihak di Kabupaten Seruyan, terlebih Pemerintah Daerah dan pihak yang berwenang.



Gambar 2.23. Grafik Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2024

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan, 2018-2024

Berdasarkan sebaran fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan, terlihat bahwa infrastruktur kesehatan didominasi oleh Pustu (Puskesmas Pembantu) dengan 86 unit yang tersebar di seluruh kecamatan, diikuti oleh 52 unit Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) dan 12 unit Puskesmas yang terdiri dari 7 Puskesmas rawat inap dan 5 Puskesmas non rawat inap. Kecamatan Seruyan Hulu memiliki Pustu terbanyak (18 unit) namun hanya memiliki 1 Poskesdes, sementara Kecamatan Seruyan Tengah dan Seruyan Hilir Timur menunjukkan keseimbangan yang baik dengan jumlah Poskesdes yang hampir setara dengan Pustu mereka. Fasilitas kesehatan rujukan masih sangat terbatas dengan hanya 1 rumah sakit yang terletak di Kecamatan Seruyan Hilir dan 1 laboratorium di kecamatan yang sama, menunjukkan perlunya peningkatan fasilitas kesehatan rujukan untuk melayani kebutuhan masyarakat di kecamatan-kecamatan lainnya yang masih bergantung pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.

NO	KECAMATAN	RUMAH SAKIT	PUSKESMAS			PUSTU	POSKESDES	LABORATORIUM
			Rawat Inap	Non Rawat Inap	Jumlah			
1	Seruyan	1	-	1	1	4	2	1

NO	KECAMATAN	RUMAH SAKIT	PUSKESMAS			PUSU	POSKESDES	LABORATORIUM
			Rawat Inap	Non Rawat Inap	Jumlah			
	Hilir							
2	Seruyan Hilir Timur	-	-	1	1	10	9	-
3	Danau Sembuluh	-	2	-	2	8	2	-
4	Seruyan Raya	-	1	-	1	5	3	-
5	Danau Seluluk	-	-	1	1	7	5	-
6	Hanau	-	-	1	1	5	7	-
7	Batu Ampar	-	1	-	1	8	7	-
8	Seruyan Tengah	-	2	-	2	13	12	-
9	Seruyan Hui	-	1	-	1	18	1	-
10	Suling Tambun	-	-	1	1	8	4	-
JUMLAH		1	7	5	12	86	52	1

Berdasarkan data perbandingan tahun 2024 dan 2025, terlihat adanya dinamika dalam ketersediaan tenaga medis di wilayah tersebut dengan penurunan jumlah dokter umum dari 32 orang menjadi 31 orang, namun diimbangi dengan peningkatan signifikan jumlah dokter spesialis dari 13 orang menjadi 17 orang, menunjukkan upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan spesialistik. Meskipun jumlah penduduk tetap stabil di angka 156.005 jiwa, rasio dokter umum per 100.000 penduduk mengalami penurunan dari 20,5 menjadi 19,8, yang masih berada di bawah standar WHO sebesar 23 dokter per 100.000 penduduk, sementara rasio dokter spesialis justru mengalami peningkatan positif dari 8,3 menjadi 10,8 per 100.000 penduduk, mengindikasikan adanya kebijakan redistribusi tenaga medis yang lebih fokus pada peningkatan layanan spesialistik untuk memperkuat sistem rujukan kesehatan, meski masih diperlukan upaya tambahan untuk mencapai rasio dokter umum yang ideal sesuai standar internasional.

No	Uraian	2024	2025
1	Jumlah Dokter Umum	32	31

2	Jumlah Dokter Spesialis	13	17
3	Jumlah Penduduk	156.005	156.005
4	Rasio Dokter Umum (per 100.000 Penduduk)	20,5	19,8
5	Rasio Dokter Spesialis (per 100.000 Penduduk)	8,3	10,8

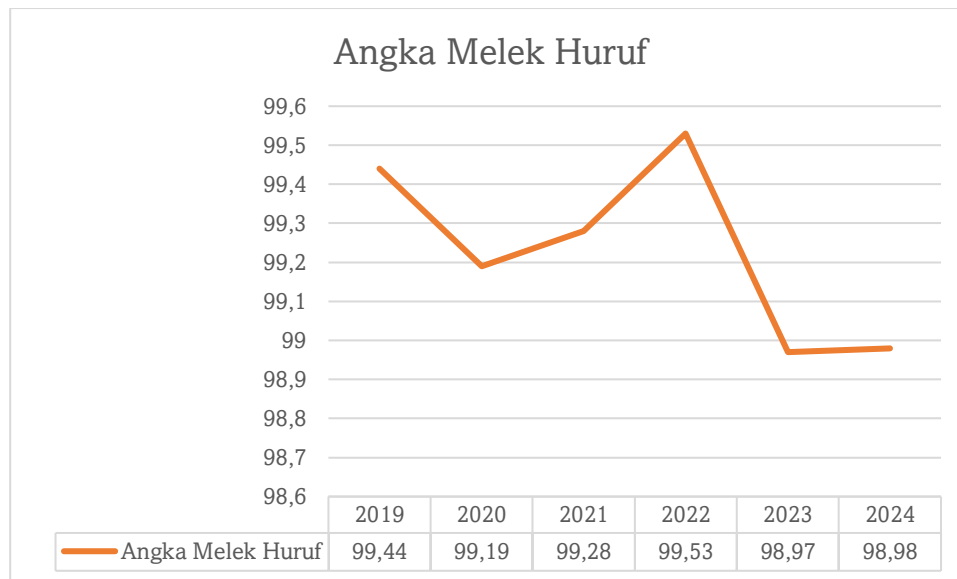
2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas Dan Merata

Pendidikan merupakan salah satu bidang penting dalam pembangunan nasional maupun daerah. Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan modal yang sangat berharga bagi pembangunan, baik pembangunan manusia itu sendiri maupun pembangunan ekonomi. SDM yang berkualitas akan membawa dampak pada kemajuan di bidang teknologi, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Penduduk yang memiliki pendidikan yang cukup akan mempengaruhi kemampuan mereka dalam menghasilkan barang dan jasa, melakukan inovasi teknologi, merancang dan merekayasa lingkungan hidup, menjaga keteraturan sosial, mengembangkan perekonomian dan peningkatan kualitas hidup manusia daerah dengan beberapa indikator pendidikan antara lain Angka Melek Huruf (AMH), Angka Partisipasi Pendidikan (APP), Angka Putus Sekolah, Angka Kelulusan, Angka Melanjutkan, serta Fasilitas Pendidikan.

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya. Perkembangan AMH Kabupaten Seruyan pada periode tahun 2005-2023 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2019, AMH Kabupaten Seruyan 99,44. Selama periode tahun 2019-2024, AMH terendah tercatat terjadi pada tahun 2020 sebesar 99,19 dan AMH tertinggi tercatat terjadi pada tahun 2023 sebesar 99,97. Pada tahun 2024, AMH Kabupaten Seruyan mengalami kenaikan dari 98,97 pada

tahun 2023 menjadi 98,98. Hal ini berarti 98 dari 100 orang dewasa di Kabupaten Seruyan memiliki kemampuan untuk membaca dan menulis.



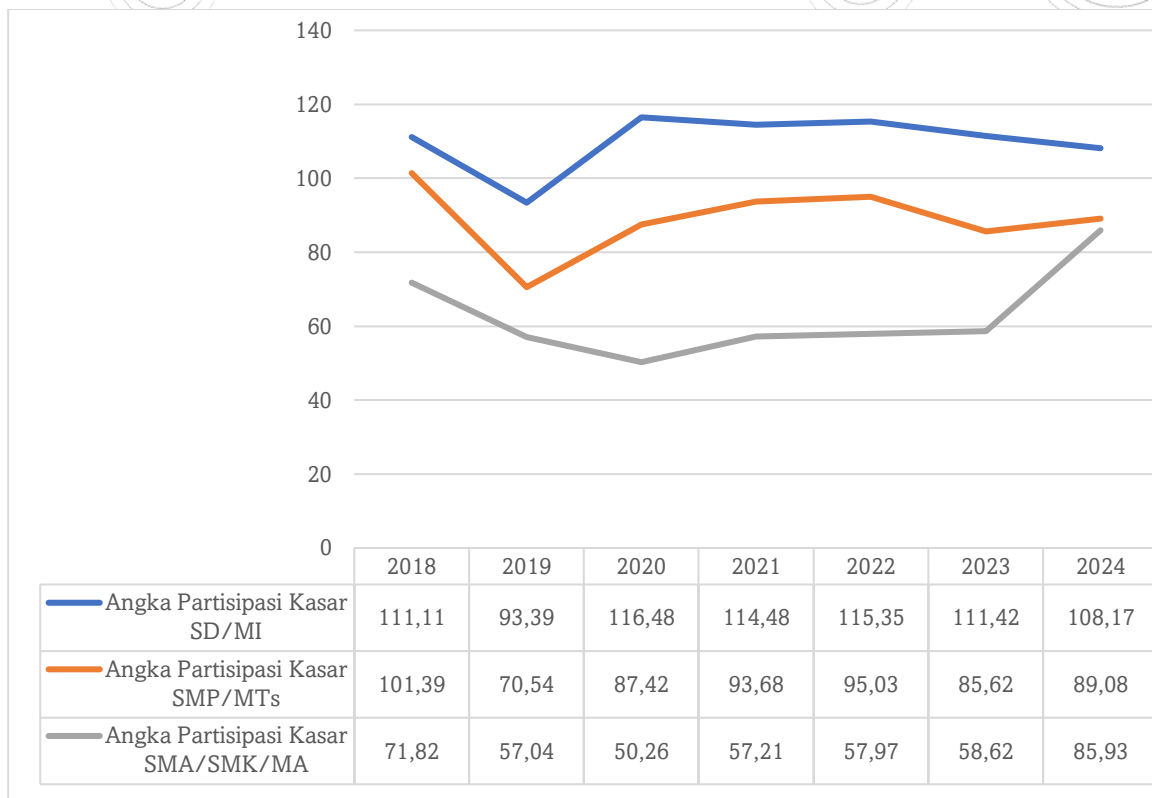
Gambar 2.24. Grafik Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024

Sumber: BPS Kabupaten Seruyan, 2005-2024

Indikator keberhasilan pendidikan selanjutnya adalah Angka Partisipasi Pendidikan (APP). APP digunakan untuk menggambarkan proporsi individu dalam kelompok usia tertentu yang terlibat dalam suatu jenis pendidikan pada suatu periode waktu tertentu. APP dibedakan menjadi 3 kelompok yakni Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Sekolah (APS).

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SMP dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 15 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Kondisi APK pada jenjang Sekolah Dasar (SD) Kabupaten Seruyan pada periode tahun 2018-2024 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2018, APK SD/MI Kabupaten Seruyan sebesar 111,11%, nilainya turun pada tahun 2019 menjadi 93,39%. Hal tersebut juga terjadi pada tahun 2024, yang mana nilai APK SD/MI Kabupaten Seruyan sebesar 111,42% di tahun 2023 dan mengalami penurunan menjadi 108,17 di tahun 2024. Kondisi APK SD/MI yang bernilai diatas 100% menunjukkan bahwa ada penduduk Kabupaten Seruyan yang bersekolah ketika usianya belum mencukupi dan atau melebihi batas umur yang seharusnya. Sedangkan APK pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) mengalami perkembangan yang tidak jauh berbeda dengan APK SD/MI. Pada tahun 2018, APK SMP/MTs sebesar 101,39% dan mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 70,54%. Pada tahun 2024 nilai APK SMP/MTs mengalami kenaikan menjadi 89,08% dari yang sebelumnya sebesar 89,02% pada tahun 2024. Angka tersebut menunjukkan bahwa partisipasi penduduk usia 13 sampai 15 tahun belum maksimal. Masih ada anak usia 13-15 tahun yang belum bersekolah. Selain APK SD/MI dan APK SMP/MTs, APK SMA/SMK/MA juga mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2018, APK SMA/SMK/MA sebesar 71,82% dan mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 57,04%. Akan tetapi pada tahun 2024 APK SMA/SMK/MA mengalami kenaikan menjadi 85,93% dari yang sebelumnya 58,62% pada tahun 2023.



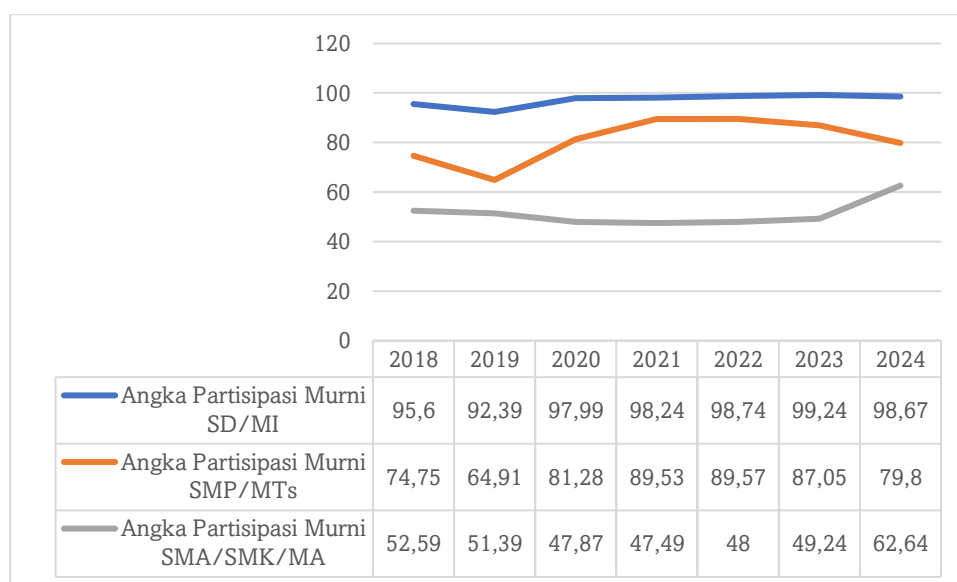
**Gambar 2.25. Grafik Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2024**

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan, 2024

Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 15 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SMP dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 15 tahun. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Kondisi APM Kabupaten Seruyan pada periode tahun 2018-2024 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. APM Kabupaten Seruyan untuk jenjang SD/MI tahun 2018 sebesar 95,60%, mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 92,39%. Pada periode tahun 2020-2024, APM SD/MI mengalami peningkatan menjadi 98,67% di tahun 2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hampir semua anak usia sekolah SD/MI

secara keseluruhan di Kabupaten Seruyan bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI. Perkembangan nilai APM yang fluktuatif juga terjadi pada jenjang SMP/MTs, dimana pada tahun 2018 sebesar 74,75% yang kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 64,91%. Pada tahun 2024 nilai APM SMP/MTs mengalami penurunan menjadi 79,8% dari yang sebelumnya sebesar 87,05% pada tahun 2023. Selain APM SD/MI dan APM SMP/MTs, APM SMA/SMK/MA juga mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2018, APM SMA/SMK/MA sebesar 52,59% dan mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 51,39%. Akan tetapi, pada tahun 2024 APM SMA/SMK/MA mengalami kenaikan menjadi 62,64% dari yang sebelumnya 49,24% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa hanya kurang dari separuh anak usia sekolah SMA/SMK/MA secara keseluruhan di Kabupaten Seruyan yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/SMK/MA.



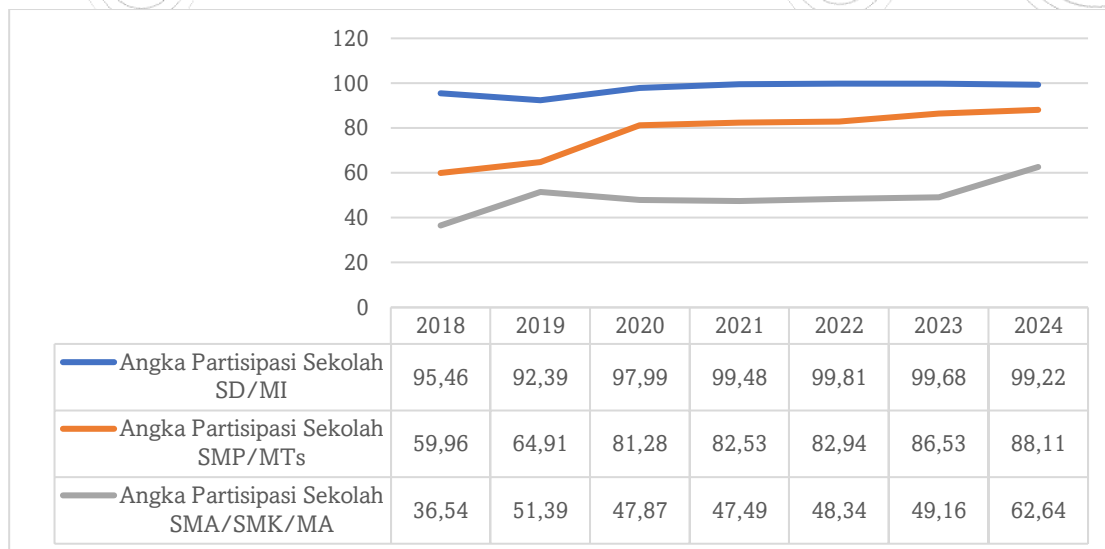
Gambar 2.26. Grafik Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2024

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan, 2024

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda.

Ukuran yang digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. APS dikaitkan dengan keadaan putus sekolah.

Kondisi APS pada jenjang Sekolah Dasar (SD) Kabupaten Seruyan menunjukkan perkembangan yang fluktuatif namun cenderung meningkat. Pada tahun 2018, APS SD/MI Kabupaten Seruyan sebesar 95,46% yang kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 92,23%. Pada periode tahun 2020-2024, APS SD/MI mengalami peningkatan menjadi 99,81% di tahun 2022. Akan tetapi, pada tahun 2024 APS SD/MI Kabupaten Seruyan mengalami penurunan menjadi 99,22%. Hal ini menunjukkan bahwa SD/MI di Kabupaten Seruyan telah mampu menyerap hampir seluruh penduduk usia sekolah SD/MI. Sedangkan untuk APS SMP/MTs pada periode tahun 2018-2023 nilainya terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018 nilainya sebesar 59,96% kemudian nilainya terus meningkat hingga pada tahun 2024 APS SMP/MTs Kabupaten Seruyan mencapai 88,11%. Selain APS SD/MI, APS SMA/SMK/MA di Kabupaten Seruyan juga mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2018, APS SMA/SMK/MA sebesar 36,54% dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 51,39%. Pada tahun 2024 APS SMA/SMK/MA Kabupaten Seruyan mengalami kenaikan menjadi 62,64% dari yang sebelumnya 49,16% pada tahun 2023.

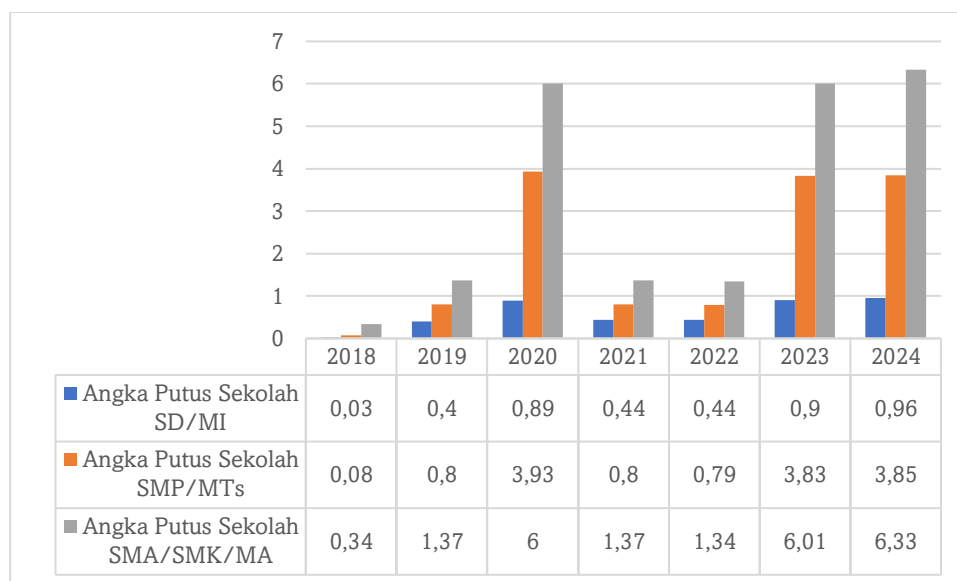


Gambar 2.27. Grafik Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2024

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan, 2024

Kondisi angka putus sekolah di Kabupaten Seruyan mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2018, angka putus sekolah SD/MI sebesar 0,03%. Pada periode tahun 2019-2020, nilainya meningkat menjadi 0,40% dan 0,89%. Namun pada periode tahun 2021-2022, nilainya turun menjadi 0,44% dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2024 menjadi 0,96%. Sedangkan angka putus sekolah SMP/MTs Kabupaten Seruyan pada periode tahun 2018-2019 masing-masing sebesar 0,80%, yang kemudian pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang sangat signifikan menjadi 3,93%. Namun pada periode tahun 2021-2022 nilainya turun menjadi 0,8% dan 0,79% dan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2024 menjadi 3,85%. Peningkatan angka putus sekolah juga terjadi pada jenjang SMA/SMK/MA. Pada tahun 2018, angka putus sekolah SMA/SMK/MA sebesar 0,34% dan mengalami perkembangan yang fluktuatif hingga tahun 2023. Pada tahun 2024 angka putus sekolah jenjang SMA/SMK/MA di Kabupaten Seruyan mencapai 6,33%. Meningkatnya angka putus sekolah pada semua jenjang di Kabupaten Seruyan harus mendapat perhatian lebih, khususnya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan agar tren putus sekolah tidak meningkat. Hal ini

berkaitan dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Seruyan di masa mendatang.

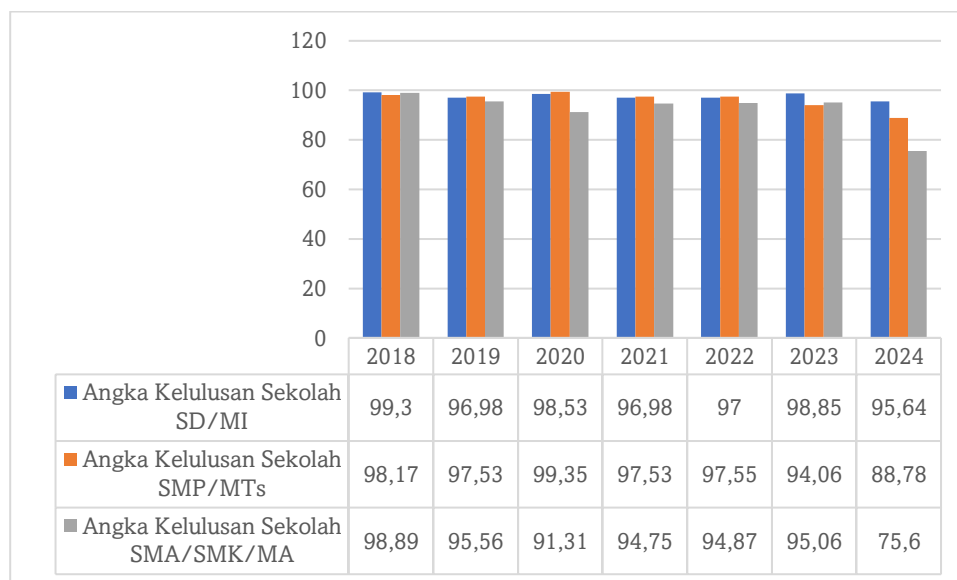


Gambar 2.28. Grafik Perkembangan Angka Putus Sekolah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2024

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan, 2024

Angka kelulusan di Kabupaten Seruyan untuk jenjang SD/MI pada tahun 2018 sebesar 99,3%. Pada tahun 2019, angka kelulusan mengalami penurunan menjadi 96,98% dan mengalami perkembangan yang fluktuatif hingga tahun 2022 memiliki angka kelulusan sebesar 97. Pada tahun 2024, Angka Kelulusan SD/MI di Kabupaten Seruyan mengalami penurunan menjadi 95,64%. Hal ini menandakan bahwa hampir semua siswa SD/MI tingkat akhir di Kabupaten Seruyan dapat lulus dari jenjang SD/MI di tahun 2024. Pada jenjang SMP/MTs, angka kelulusan pada tahun 2018 adalah sebesar 98,17%. Pada tahun 2019 terjadi penurunan angka kelulusan menjadi 97,63% dan angka kelulusan SMP/MTs di Kabupaten Seruyan mengalami perkembangan yang fluktuatif hingga tahun 2024. Pada tahun 2024, Angka Kelulusan SMP/MTs di Kabupaten Seruyan mengalami penurunan menjadi 88,78% dari yang sebelumnya 94,06% pada tahun 2024. Untuk jenjang SMA/SMK/MA, angka kelulusan di Kabupaten Seruyan mengalami

perkembangan yang juga fluktuatif. Pada tahun 2018 jenjang SMA/SMK/MA memiliki Angka Kelulusan sebesar 98,89% dan mengalami penurunan menjadi 95,56% pada tahun 2019. Pada tahun 2024 Angka Kelulusan jenjang SMA/SMK/MA mengalami penurunan menjadi 75,6% dari yang sebelumnya 95,06% pada tahun 2023. Angka Kelulusan yang tidak mencapai 100% pada semua jenjang pendidikan di Kabupaten Seruyan menunjukkan bahwa masih ada siswa/siswi pada setiap jenjang Pendidikan di Kabupaten Seruyan yang tidak mampu menamatkan pendidikannya.

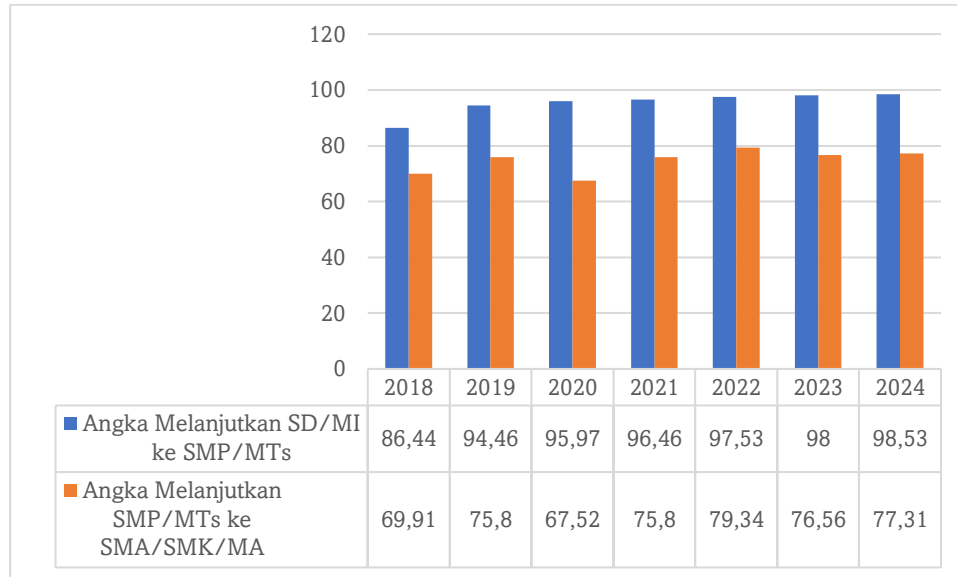


Gambar 2.29. Grafik Perkembangan Angka Kelulusan Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2024

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan, 2024

Angka melanjutkan pendidikan di Kabupaten Seruyan dari jenjang SD/MI ke SMP/MTs pada periode tahun 2018-2024 menunjukkan perkembangan yang positif. Pada tahun 2018, angka melanjutkan pendidikan dari SD/MI ke SMP/MTs sebesar 86,44%. Nilai tersebut terus meningkat hingga pada tahun 2024 angka melanjutkan pendidikan dari SD/MI ke SMP/MTs di Kabupaten Seruyan mencapai 98,53%. Angka melanjutkan pendidikan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA di Kabupaten Seruyan pada periode tahun 2018-2024 mengalami perkembangan yang

fluktuatif. Pada tahun 2018, angka melanjutkan pendidikan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA sebesar 69,91% dan meningkat menjadi 75,8% pada tahun 2019. Pada tahun 2024 angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA mengalami kenaikan menjadi 77,31% dari yang sebelumnya 76,56% pada tahun 2023.



Gambar 2.30. Grafik Perkembangan Angka Melanjutkan Pendidikan Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2024

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan, 2024

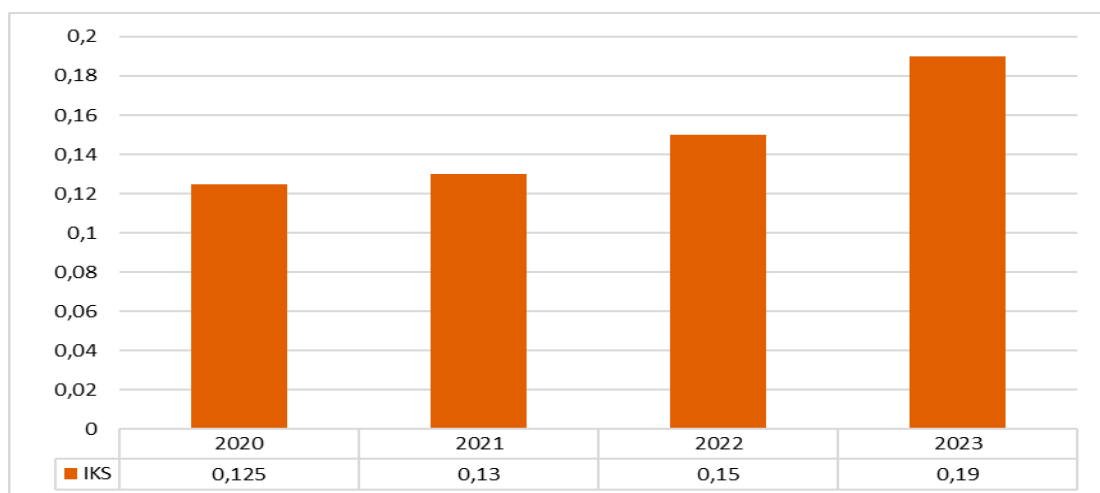
2.1.2.4. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif

2.1.2.4.1. Indeks Keluarga Sehat & Data Kepesertaan JKN

Keluarga yang sehat merupakan pondasi bagi masa depan bangsa. Keluarga yang sehat adalah keluarga dengan kesejahteraan fisik, mental, sosial, dan spiritual yang optimal. Kementerian Kesehatan telah menetapkan indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan keluarga yakni Indeks Keluarga Sehat (IKS). Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan suatu perhitungan untuk mengetahui apakah keluarga tersebut termasuk keluarga sehat, prasehat, atau tidak sehat dengan ketentuan nilai IKS Sehat > 0,80, IKS Prasehat 0,50 – 0,80, dan IKS Tidak Sehat < 0,5. Ada 12 indikator yang menyusun IKS yaitu keluarga

mengikuti program Keluarga Berencana (KB), Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan, bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap, bayi mendapatkan ASI eksklusif, balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan, penderita TB paru mendapatkan pengobatan sesuai standar, penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur, penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan, anggota keluarga tidak ada yang merokok, keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), keluarga mempunyai akses sarana air bersih, dan keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.

Nilai IKS Kabupaten Seruyan pada tahun 2020 hanya sebesar 0,125. Nilainya terus meningkat setiap tahun, dimana pada tahun 2021 nilainya naik menjadi 0,13 dan pada tahun 2023 nilai kembali mengalami kenaikan menjadi 0,19. Secara keseluruhan IKS Kabupaten Seruyan masuk kedalam IKS Tidak Sehat.



Gambar 2.31. Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Seruyan Tahun 2020-2023

Sumber: Kementerian Kesehatan, 2020-2023

Berdasarkan data kepesertaan JKN Kabupaten Seruyan sampai dengan Agustus 2025, terlihat tren positif dalam cakupan kepesertaan dengan jumlah penduduk yang mengalami kenaikan bertahap dari 156.005 jiwa pada tahun 2023 menjadi 159.849 jiwa pada Agustus 2025.

Meskipun persentase UHC (Universal Health Coverage) mengalami fluktuasi dengan penurunan dari 102,46% di tahun 2023 menjadi 100,77% di tahun 2024, namun kembali meningkat menjadi 100,65% pada Agustus 2025, yang menunjukkan pencapaian target cakupan universal yang baik. Yang menggembirakan adalah peningkatan signifikan jumlah peserta aktif dari 137.813 jiwa (88,34%) pada 2023 menjadi 141.385 jiwa (88,45%) pada Agustus 2025, mengindikasikan komitmen masyarakat yang konsisten dalam berpartisipasi aktif pada program JKN dengan tingkat keaktifan yang relatif stabil di kisaran 86-88%, meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2024 namun berhasil pulih kembali pada 2025.

Tabel 2.35 Data Kepesertaan JKN Kabupaten Seruyan

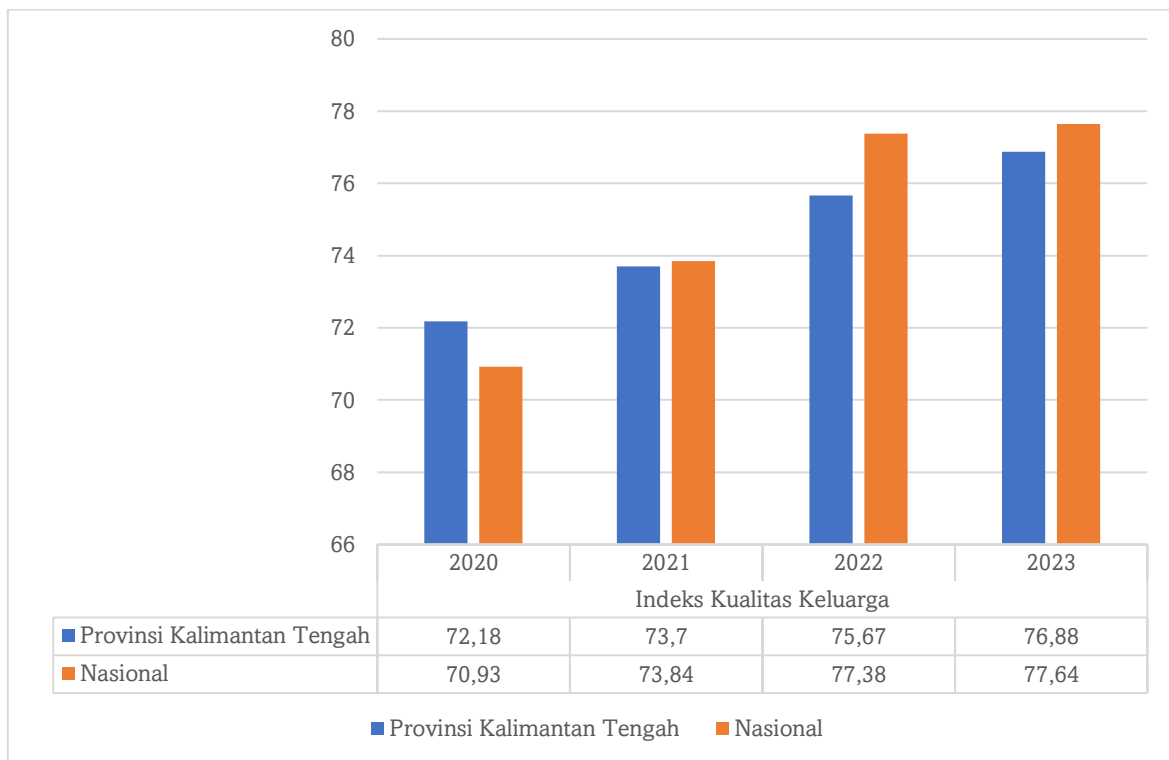
TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH (P) UHC	% UHC	JUMLAH (P) AKTIF	% KEAKTIFAN
2023	156.005	159.845	102,46	137.813	88,34
2024	158.282	159.501	100,77	137.180	86,67
Agustus 2025	159.849	160.883	100,65	141.385	88,45

Sumber; Dinas Kesehatan, Kabupaten Seruyan

2.1.2.4.2. Indeks Kualitas Keluarga

Menurut Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Indeks Kualitas Keluarga (IKK) merupakan suatu pengukuran pencapaian Kualitas Keluarga. IKK menjadi tolak ukur basis perencanaan dan indikator keberhasilan pembangunan keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak di tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota dengan kategori indeks antara 0,00 sampai 100 dengan kategori indeks IKK < 50 (Kurang Responsif Gender dan Hak Anak), IKK 50 – 75 (Cukup Responsif Gender dan Hak Anak), dan IKK > 75 (Responsif Gender dan Hak Anak). IKK dibentuk dari 5 pilar atau dimensi yaitu Kualitas Legalisasi dan Struktur, Kualitas Ketahanan Fisik, Kualitas Ketahanan Ekonomi, Kualitas Ketahanan Sosial Psikologi, dan Kualitas Ketahanan Sosial Budaya.

Nilai Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020-2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020 nilai IKK Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 72,18 yang kemudian mengalami pertumbuhan sebesar 1,89 persen menjadi 73,7 pada tahun 2021. Pada tahun 2023 nilai IKK Provinsi Kalimantan Tengah meningkat menjadi 76,88. Kondisi ini menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Tengah merupakan daerah yang cukup responsif gender dan hak anak. Peningkatan nilai IKK juga terjadi pada skala nasional, dimana nilai IKK Nasional mengalami pertumbuhan sebesar 2,50% dari 70,93 pada tahun 2020 menjadi 73,84 pada tahun 2021. Pada tahun 2023 nilai IKK Nasional meningkat menjadi 77,64. Berdasarkan nilai IKK tersebut, Indonesia masuk kedalam kategori negara yang cukup responsif terhadap gender dan hak anak.



Gambar 2.32. Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2020-2023

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020-2024

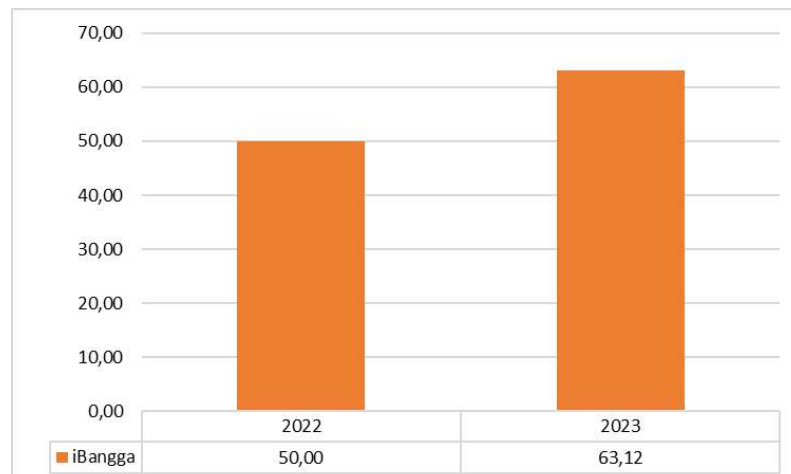
Keterangan:

* : Data 2020 Menggunakan Metadata Lama

Perhitungan Indeks Kualitas Keluarga belum dilakukan hingga level kabupaten/kota, sehingga analisis kondisi IKK hanya dilakukan pada Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional. Untuk menggambarkan kondisi kualitas keluarga pada level kabupaten/kota maka digunakan indeks lain yaitu Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga).

iBangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. iBangga merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga dan digunakan untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang atau rentan.

Nilai iBangga Kabupaten Seruyan menunjukkan kondisi yang cukup baik. Pada tahun 2022, nilai iBangga Kabupaten Seruyan sebesar 50,00 yang kemudian naik menjadi 63,12 pada tahun 2023. iBangga Kabupaten Seruyan menunjukkan kondisi yang cukup baik dengan status pembangunan keluarga yang berkembang.



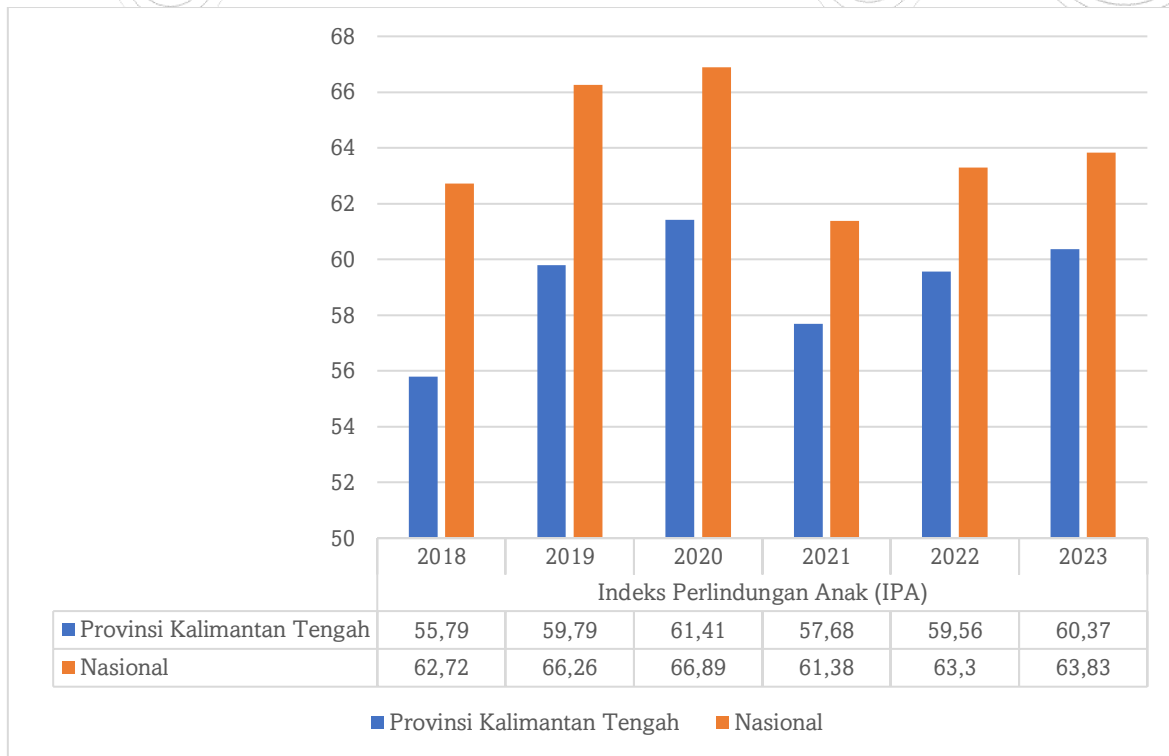
Gambar 2.33. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Seruyan Tahun 2022-2023

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Seruyan, 2023

2.1.2.4.3. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan ukuran baku yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. IPA dibentuk dari Indeks Perlindungan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) yang berdasarkan 5 (lima) klaster hak anak dalam Konvensi Hak Anak. Lima klaster yang menjadi dasar membentuk IPA adalah Hak Sipil dan Kebebasan; Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; serta Perlindungan Khusus. **Perhitungan Indeks Perlindungan Anak belum dilakukan hingga level kabupaten/kota**, sehingga yang dianalisis adalah IPA Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional.

Nilai IPA Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018-2023 menunjukkan perubahan yang fluktuatif. Pada periode tahun 2018-2020 nilai IPA Provinsi Kalimantan Tengah mengalami perkembangan positif namun pada tahun 2021 terjadi penurunan IPA. Pada tahun 2022 Nilai IPA Provinsi Kalimantan Tengah Kembali mengalami perkembangan yang positif. Nilai IPA tertinggi Provinsi Kalimantan Tengah terjadi pada tahun 2020 yakni sebesar 61,41 yang kemudian turun menjadi 57,68 pada tahun 2021 dan kembali meningkat menjadi 60,37 pada tahun 2023. Kondisi serupa juga terjadi pada nilai IPA Nasional. Nilai IPA Nasional mengalami tren kenaikan pada periode tahun 2018-2020 yakni sebesar 66,89 di tahun 2020 namun turun menjadi 61,38 di tahun 2021 dan mengalami pertumbuhan yang positif menjadi 63,83 pada tahun 2023. Penurunan nilai IPA Provinsi dan Nasional ini salah satunya dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020-2021.



Gambar 2.34. Perkembangan Indeks Perlindungan Anak (IPA) Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2018-2023

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020-2024

2.1.2.4.4. Indeks Gender

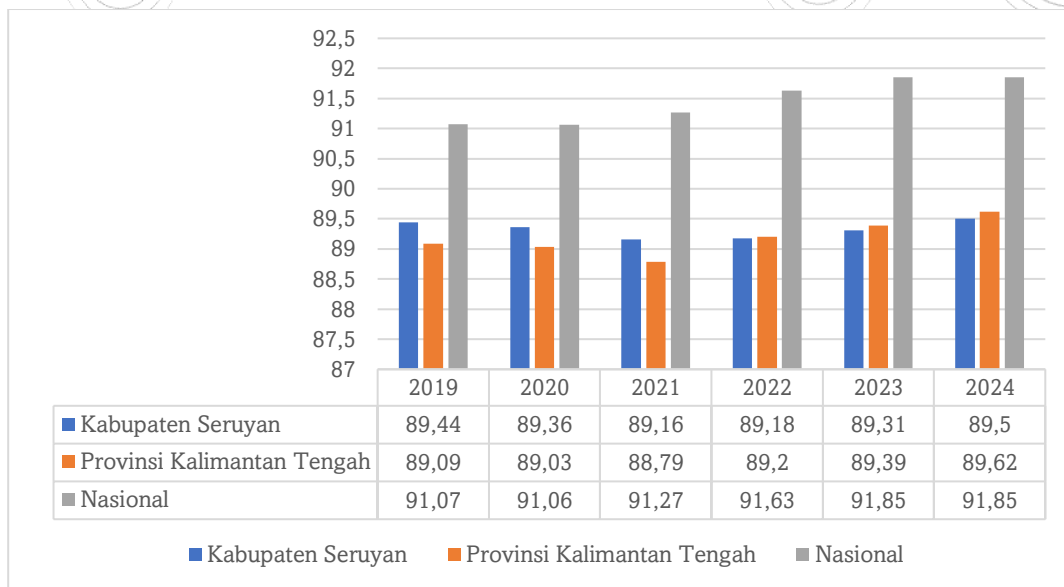
Upaya pembangunan manusia diperuntukkan bagi seluruh penduduk di suatu wilayah, tanpa harus memandang adanya perbedaan jenis kelamin. Capaian pembangunan manusia berbasis gender dilihat diantaranya dari nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Selain itu digunakan pula Indeks Ketimpangan Gender (IKG) sebagai indikator pendukung dalam pembangunan manusia berbasis gender.

a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antara gender dalam pencapaian pembangunan manusia. Nilai IPG yaitu perbandingan (rasio) capaian antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Adapun hasil indeks ini diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tahun. Semakin kecil

jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 menjadi patokan untuk menginterpretasikan angka IPG, karena angka 100 merupakan nilai rasio paling sempurna. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), IPG dapat diklasifikasikan menjadi 2 kategori, yaitu kategori rendah ($IPG < 90,00$) dan tinggi ($IPG > 90,00$).

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Seruyan menunjukkan perkembangan yang fluktuatif namun cenderung menurun meskipun tidak signifikan. Pada tahun 2019 nilai IPG Kabupaten Seruyan sebesar 89,44 dan masuk dalam kategori rendah. Penurunan nilai IPG di Kabupaten Seruyan terjadi pada periode tahun 2020-2021 sebesar 0,28 poin dari tahun 2019 menjadi 89,16 di tahun 2021. Akan tetapi pada tahun 2024 nilai IPG Kabupaten Seruyan mengalami peningkatan 0,19 poin menjadi 89,5. Selama periode tahun 2019-2024 IPG Kabupaten Seruyan masuk dalam kategori rendah. Secara keseluruhan nilai IPG Kabupaten Seruyan berada di bawah nilai IPG Nasional, namun jika dibandingkan dengan nilai IPG Provinsi Kalimantan Tengah perbedaan nilai yang ada tidak begitu jauh berbeda.



Gambar 2.35. Grafik Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2024

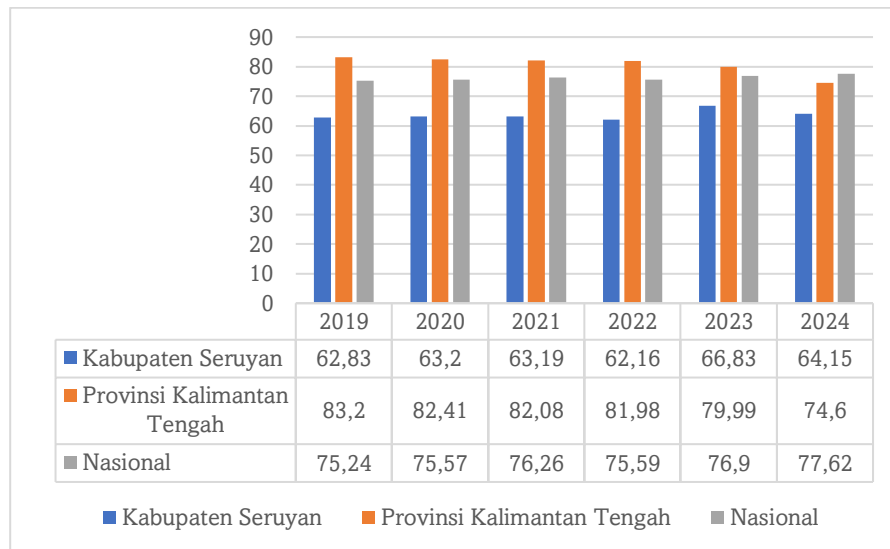
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019-2024

b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi. IDG dihitung melalui rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, dan sumbangan pendapatan perempuan. IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender sudah terbangun melalui partisipasi perempuan di politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Seruyan menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2019, nilai IDG Kabupaten Seruyan sebesar 62,83. Nilai IDG mengalami kenaikan pada periode tahun 2020, namun pada tahun 2022 nilai IDG Kabupaten Seruyan turun dan menjadi hanya sebesar 62,16. Akan tetapi pada tahun 2024 nilai IDG Kabupaten Seruyan mengalami penurunan 2,68 poin menjadi 64,15 dari yang sebelumnya 66,83 pada tahun 2023. Nilai IDG Kabupaten Seruyan ini menunjukkan bahwa kondisi pemberdayaan

gender di Kabupaten Seruyan selama kurun waktu 9 tahun tidak mengalami perubahan. Secara keseluruhan, jika dibandingkan dengan nilai IDG Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah, nilai IDG Kabupaten Seruyan berada di bawah nilai IDG Nasional dan Provinsi.



Gambar 2.36. Grafik Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2024

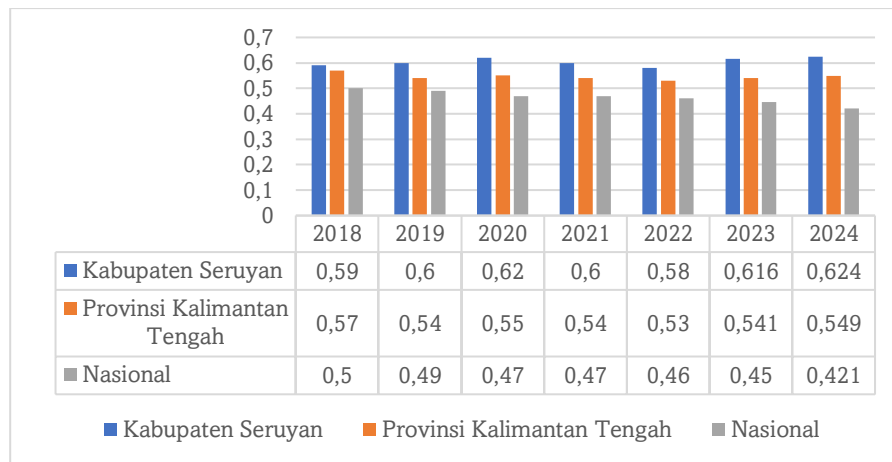
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019-2024

c. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menggambarkan kerugian atau kegagalan dari pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan gender yang diukur dari aspek kesehatan, pemberdayaan, serta akses dalam pasar tenaga kerja. Pengukuran IKG dilakukan untuk membantu pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mengevaluasi capaian pembangunan menurut gender dan memformulasikan kebijakan yang lebih tepat.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Seruyan pada tahun 2018-2022 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Nilai IKG Kabupaten Seruyan berkisar antara 0,58 hingga 0,62. Pada tahun 2018, nilai IKG Kabupaten Seruyan sebesar 0,59. Nilainya terus mengalami kenaikan hingga angka 0,62 pada tahun 2020. Pada periode tahun 2021-

2022 nilai IKG Kabupaten Seruyan mampu turun ke angka 0,58. Namun, terjadi peningkatan kembali pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing mencapai 0,616 dan 0,624. Secara keseluruhan, jika dibandingkan dengan nilai IKG Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah, nilai IKG Kabupaten Seruyan masih di atas nilai IKG Nasional dan Provinsi.



Gambar 2.37. Grafik Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2024

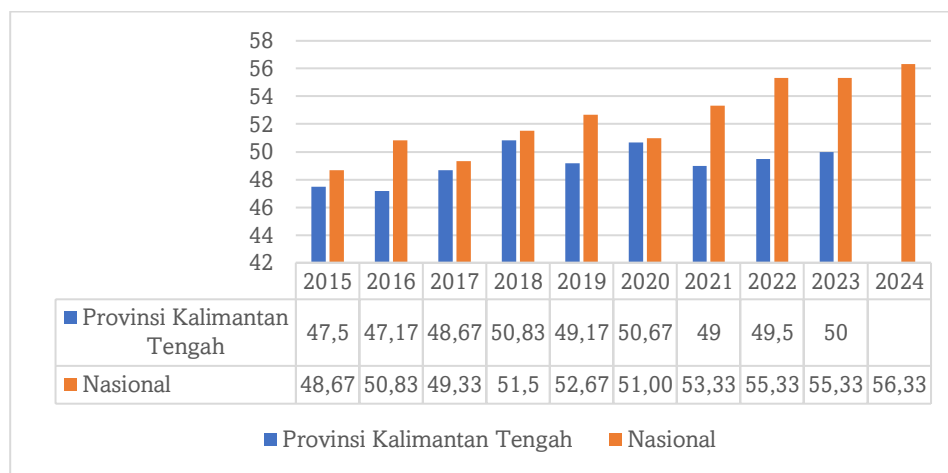
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018-2022

2.1.2.4.5. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. IPP digunakan sebagai tolok ukur pembangunan berdasarkan tiga lapisan, yaitu pembangunan individu, pembangunan penghidupan dan kesejahteraan serta partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan yang dipetakan dalam 5 domain dengan 15 indikator penyusunnya. **Perhitungan Indeks Pembangunan Pemuda belum dilakukan hingga level kabupaten/kota,** sehingga yang dianalisis adalah IPP Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional.

Kondisi IPP Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2015-2022, mengalami perkembangan yang fluktuatif namun cenderung meningkat meskipun peningkatannya tidak signifikan. Pada tahun 2015 nilai IPP

Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 47,5 di mana kemudian nilainya turun menjadi 47,17 pada tahun 2016. Pada periode tahun 2016-2018 nilai IPP Provinsi Kalimantan Tengah mengalami kenaikan hingga 50,83. Selanjutnya nilai IPP Provinsi Kalimantan mengalami penurunan dan kenaikan setiap tahunnya, hingga pada tahun 2023 nilainya sebesar 50. Berbeda dengan IPP Provinsi Kalimantan Tengah, IPP Nasional justru mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dari 48,67 pada tahun 2015 menjadi 55,33 pada tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2024, IPP Provinsi Kalimantan Tengah memiliki nilai yang sama dari tahun 2023 yaitu 50.



Gambar 2.38. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2015-2024

Sumber: Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2015-2024

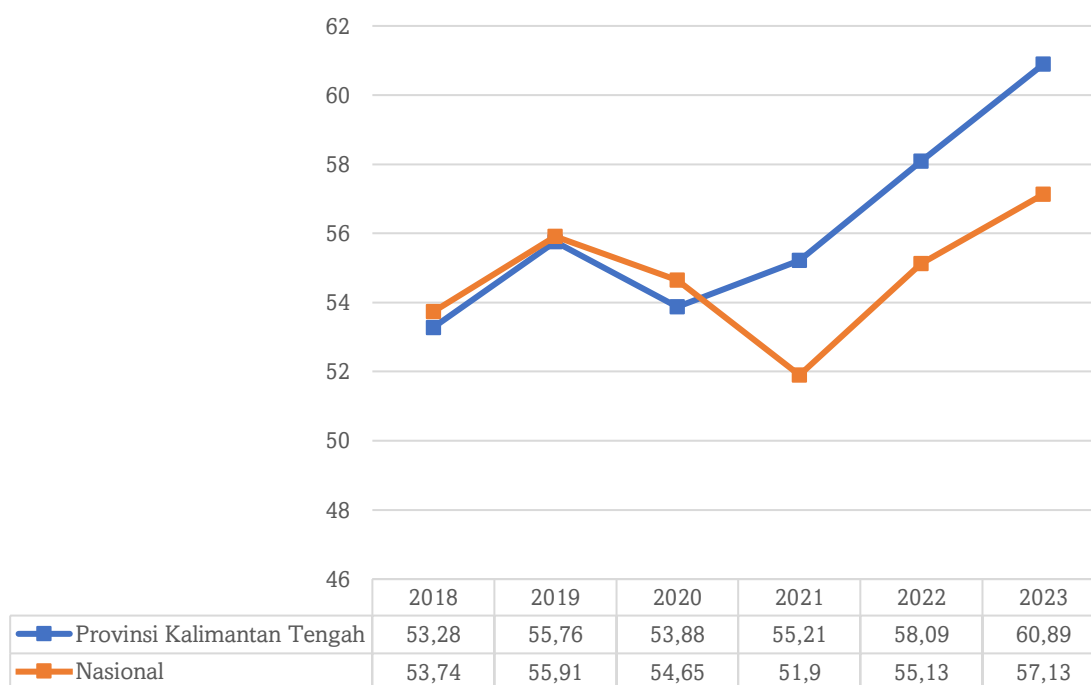
2.1.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

2.1.2.5.1. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan instrumen yang disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. IPK terdiri dari 31 indikator yang dikelompokkan ke dalam tujuh dimensi yang diadopsi secara global. Ketujuh dimensi tersebut mencakup dimensi ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, ekspresi budaya, budaya

literasi dan gender. Kriteria capaian IPK adalah $IPK \leq 20$ (Kurang), $20 < IPK \leq 40$ (Sedang), $40 < IPK \leq 60$ (Cukup), $60 < IPK \leq 80$ (Baik), $80 < IPK \leq 100$ (Amat Baik).

Nilai IPK Provinsi Kalimantan Tengah pada periode tahun 2018-2023 mengalami perubahan yang fluktuatif. Pada tahun 2018 nilai IPK Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 53,28 dan masuk dalam kriteria cukup, pada tahun selanjutnya nilainya naik sebesar 2,48 poin menjadi 55,76. Namun karena pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 nilai IPK Provinsi Kalimantan tengah mengalami penurunan dan kembali pada kondisi yang sama di tahun 2018. Namun di tahun 2021 nilai IPK Provinsi Kalimantan Tengah mampu kembali meningkat menjadi 55,21 dan nilainya terus meningkat di tahun 2023 menjadi 60,89. Kondisi yang hampir serupa terjadi pada nilai IPK Nasional, dimana pada tahun 2018 nilai IPK Nasional sebesar 53,74 yang kemudian turun menjadi 51,9 pada tahun 2021. Pada tahun 2023, nilai IPK Nasional menunjukkan perubahan yang positif menjadi 57,13.

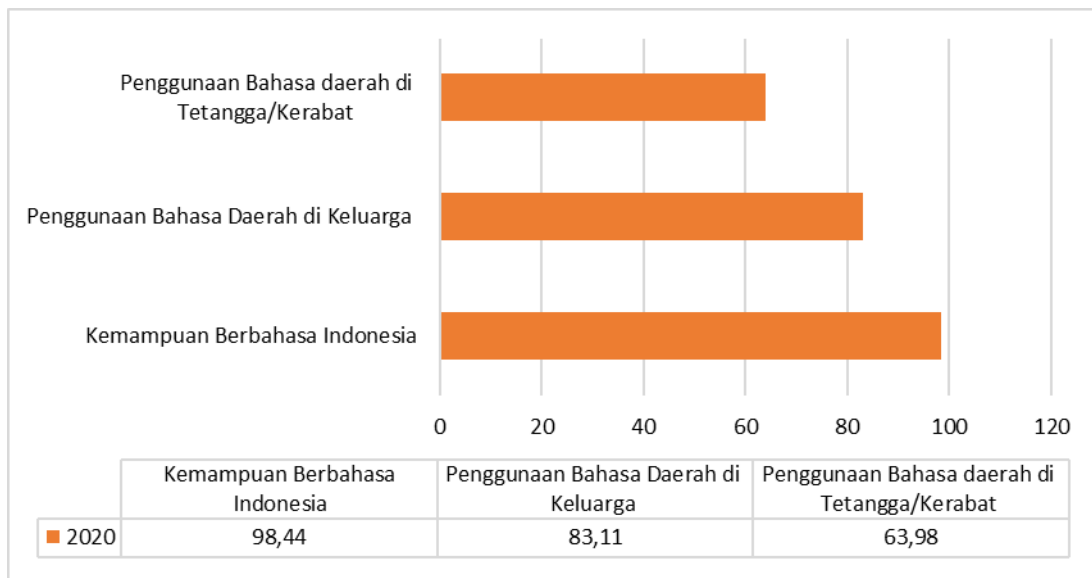


Gambar 2.39. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2018-2023

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (2018-2024)

Perhitungan Indeks Pembangunan Kebudayaan belum dilakukan hingga level kabupaten/kota, sehingga yang dianalisis adalah IPK Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional. Untuk menggambarkan kondisi budaya di Kabupaten Seruyan digunakan data Kemampuan Berbahasa Indonesia dan Penggunaan Bahasa Daerah yang diperoleh dari hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 yang menggambarkan kondisi pembangunan kebudayaan pada dimensi pendidikan.

Bahasa Indonesia dituturkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, karena Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa persatuan. Namun sebagian penduduk juga tetap mempertahankan kelestarian bahasa daerah melalui penggunaan dalam berkomunikasi dengan keluarga dan tetangga/kerabat. Di Kabupaten Seruyan, pada tahun 2020 sebanyak 98,44 persen penduduk mampu atau bisa menggunakan Bahasa Indonesia dalam berkomunikasi. Penduduk Kabupaten Seruyan yang menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi dengan keluarga sebanyak 83,11 persen, sedangkan penduduk yang menggunakan bahasa daerah di lingkungan tetangga/kerabat sebanyak 63,98 persen.



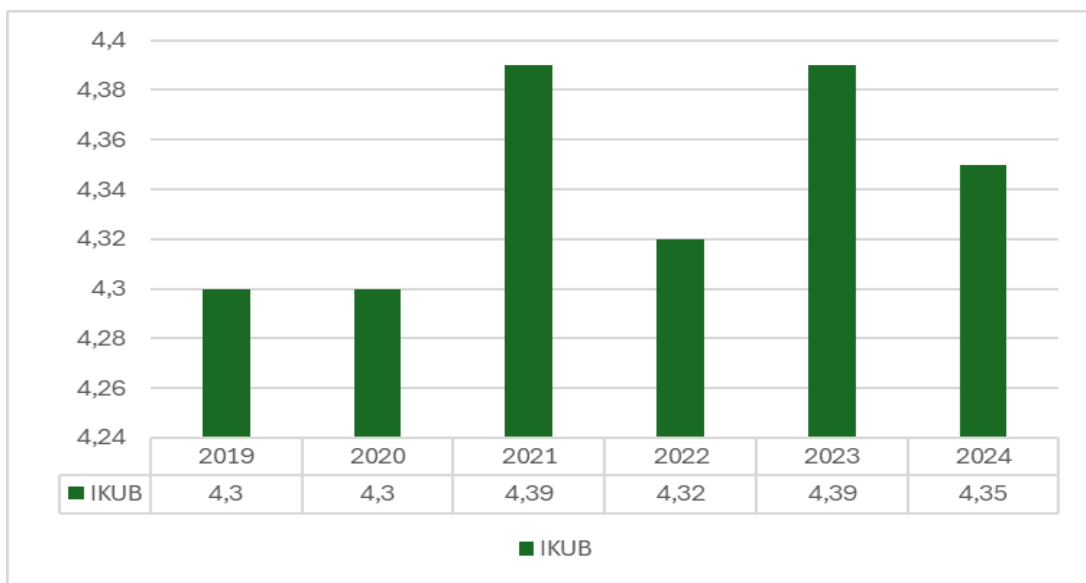
Gambar 2.40. Kemampuan Berbahasa Indonesia dan Penggunaan Bahasa Daerah di Kabupaten Seruyan Tahun 2020

Sumber: Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 Kabupaten Seruyan

2.1.2.5.2. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) merupakan instrumen utama yang dijadikan sebagai alat pengukuran bagi capaian program-program kerukunan. IKUB diukur dengan mengacu pada tiga dimensi utama yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Kriteria capaian IKUB adalah IKUB Sangat Rendah (0-20), IKUB Rendah (21-40), IKUB Sedang (41-60), IKUB Tinggi (61-80), IKUB Sangat Tinggi (80-100).

Nilai IKUB Kabupaten Seruyan pada tahun 2019-2023 menunjukkan perubahan yang fluktuatif namun cenderung stabil. Pada tahun 2019, IKUB Kabupaten Seruyan sebesar 4,30. Nilai IKUB Kabupaten Seruyan sempat mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 4,39. Namun pada periode tahun selanjutnya yakni pada tahun 2022 nilainya turun menjadi 4,32 dan mengalami peningkatan Kembali menjadi 4,39 pada tahun 2023. Secara keseluruhan nilai IKUB Kabupaten Seruyan masuk dalam kategori IKUB Sedang.



Gambar 2.41. Grafik Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan 2019-2024

2.1.2.6. Perlindungan Sosial Yang Adaptif

Sarana sosial berupa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sangat penting karena sebagai wadah untuk mendapatkan layanan kesejahteraan untuk anak-anak tidak mampu atau tidak memiliki keluarga. Pada tahun 2018, Kabupaten Seruyan memiliki 8 unit Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yaitu LKSA Hj. Maskacil, Al Mustagfirin, Pesantren Asseruyaniyah, Darul Mukmin, Pa Aladin Seruyan Hilir, Hidayatul Amin, Hidayatul Salikin Pembuang Hulu, Rodatul Tolibin Seruyan. Namun kini hanya tersisa 4 unit LKSA di Kabupaten Seruyan, yaitu LKSA Hj. Maskacil, Al Mustagfirin, Hidayatul Salikin Pembuang Hulu, Rodatul Tolibin Seruyan.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Pada tahun 2022, jumlah PPKS di Kabupaten Seruyan sebanyak 79.673 jiwa. Jumlah tersebut berdasarkan jumlah bantuan yang disalurkan oleh Dinas Sosial untuk mengatasi bencana banjir dan COVID-19. Jumlah tersebut menurun menjadi 41.893 pada tahun 2024. Penurunan tersebut seiring dengan jumlah penduduk yang dapat bangkit pasca bencana banjir dan COVID-19.

Tabel 2.36. Jumlah LKSA dan PPKS di Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2024

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	8	4	4	4	4	TAD	8
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS)	26.876	5.401	6.558	29.147	79.673	50.001	41.893

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Seruyan

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

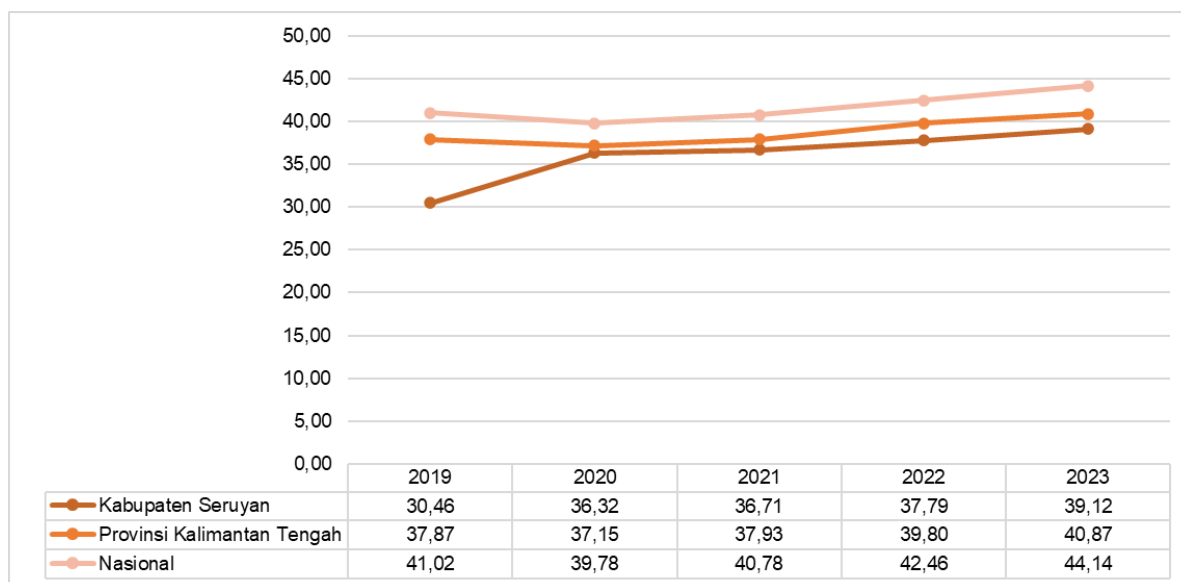
2.1.3.1. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

2.1.3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat juga baik. Indikator lain yang berhubungan dengan PDRB yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat adalah PDRB Per Kapita. PDRB per kapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk di suatu wilayah pada tahun tertentu. PDRB per kapita adalah indikator penting yang menggambarkan perkembangan ekonomi wilayah, sekaligus menunjukkan kinerja dan hasil pembangunan.

PDRB Per Kapita Kabupaten Seruyan dalam kurun waktu tahun 2019-2023 menunjukkan tren yang meningkat yaitu sebesar Rp30,56 juta pada tahun 2019 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya menjadi Rp39,12 juta pada tahun 2023. Kondisi PDRB Per Kapita Kabupaten Seruyan kurang sejalan dengan kondisi Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional. Di mana pada periode tahun 2019-2020 PDRB Per Kapita Kabupaten Seruyan mengalami peningkatan disaat PDRB Per Kapita Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional mengalami penurunan. Pada tahun 2020, karena pandemi COVID-19 PDRB Per Kapita Nasional mengalami penurunan sebesar 3,03% dari Rp. 41,02 juta pada tahun 2019 menjadi Rp. 39,78 juta pada tahun 2020. Selain itu PDRB Per Kapita Provinsi Kalimantan Tengah juga mengalami penurunan pada tahun yang sama, yaitu sebesar 1,90% dari Rp. 37,87 juta menjadi Rp. 37,15 juta. Penurunan nilai PDRB Per Kapita yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional tidak terjadi di Kabupaten Seruyan. Nilai PDRB Per Kapita Kabupaten Seruyan tetap mengalami peningkatan sebesar 19,24% dari Rp. 30,46 juta pada tahun 2019 menjadi Rp. 36,32 juta pada tahun 2020. Meskipun nilai PDRB Per Kapita Kabupaten Seruyan mengalami kenaikan, nilainya tidak cukup mampu berkontribusi untuk menaikkan PDRB Per Kapita Provinsi Kalimantan Tengah yang

secara tidak langsung juga berpengaruh pada PDRB Per Kapita Nasional. Secara keseluruhan dari tahun 2019-2023, nilai PDRB Per Kapita Kabupaten Seruyan selalu lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai PDB per Kapita Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah.



Gambar 2. 42. Grafik Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional Tahun 2010-2023

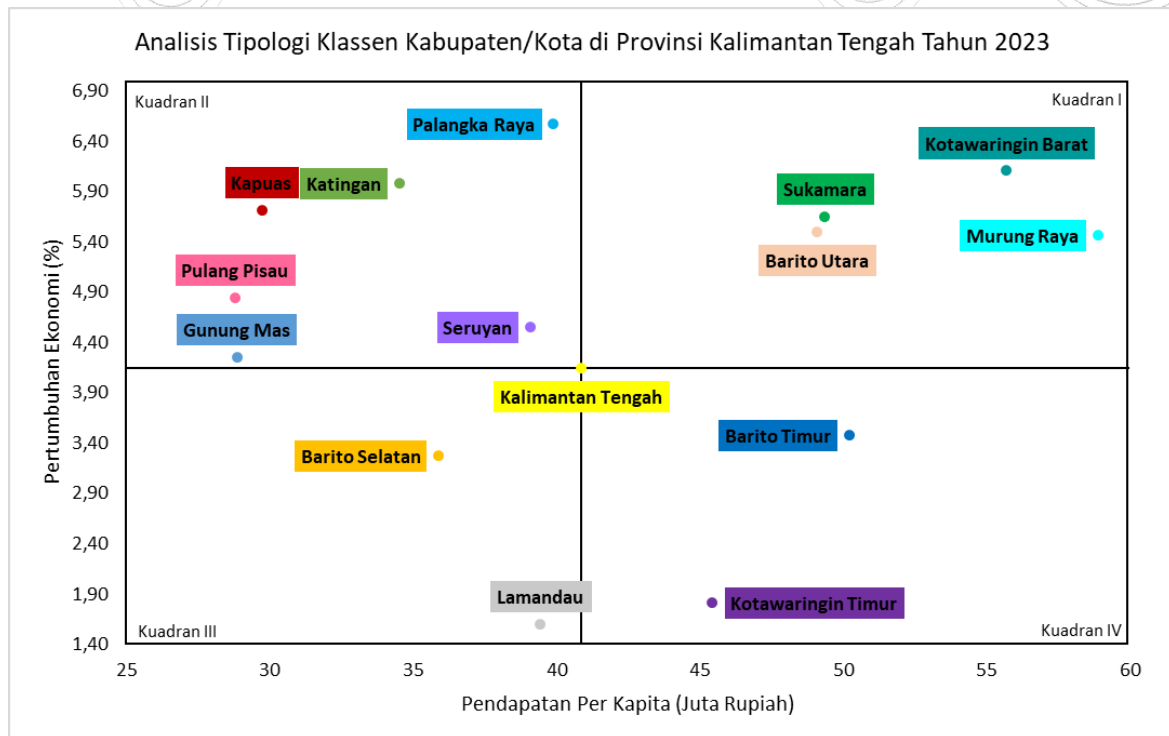
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010-2023

Untuk membandingkan nilai PDRB Per Kapita Kabupaten Seruyan dengan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah digunakan analisis tipologi klassen. Namun tipologi klassen tidak hanya menggunakan basis data PDRB Per Kapita tapi juga menggunakan data pertumbuhan ekonomi. Sehingga analisis ini mampu mengidentifikasi tingkat perkembangan suatu wilayah. Hasil tipologi klassen merupakan klasifikasi wilayah.

Menurut tipologi klassen, wilayah dibagi menjadi empat klasifikasi, yang pertama (Kuadran I) wilayah cepat maju dan cepat tumbuh yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita lebih tinggi dibandingkan rata-rata kabupaten/kota di provinsi. Kedua

(Kuadran II) wilayah maju tapi tertekan yang memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi tapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibandingkan rata-rata kabupaten/kota di provinsi. Ketiga (Kuadran III) wilayah relatif tertinggal yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih rendah dibandingkan rata-rata kabupaten/kota di provinsi. Keempat (Kuadran IV) wilayah berkembang cepat yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi tapi tingkat pendapatan per kapita lebih rendah dari rata-rata kabupaten/kota di provinsi.

Pada tipologi klassen kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023, selain Kabupaten Seruyan, kabupaten/kota yang berada di Kuadran II antara lain Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Gunung Mas, dan Kota Palangka Raya. Pada Kuadran I ada Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Barito Utara. Untuk Kuadran III ada Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Lamandau. Sementara untuk Kuadran IV ada Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Kotawaringin Timur.



Gambar 2.43. Grafik Tipologi Klassen Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

Sumber: Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Seruyan, 2024

2.1.3.1.2. Modal Tetap Bruto

Nilai Modal Tetap Bruto Kabupaten Seruyan menunjukkan tren pertumbuhan yang fluktuatif namun secara keseluruhan mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Dimulai dari Rp 3.534,51 miliar pada tahun 2020, investasi modal tetap mengalami kenaikan menjadi Rp 3.866,86 miliar di tahun 2021, meskipun sempat mengalami penurunan sementara menjadi Rp 3.803,60 miliar pada tahun 2022, kemungkinan akibat dampak ekonomi pasca-pandemi. Namun, pemulihan ekonomi yang kuat terlihat pada tahun 2023 dengan lonjakan investasi mencapai Rp 4.448,87 miliar dan terus meningkat pesat hingga Rp 4.804,03 miliar pada tahun 2024, mencerminkan pertumbuhan kumulatif sebesar 35,9% selama periode lima tahun tersebut. Peningkatan nilai modal tetap bruto ini mengindikasikan adanya investasi infrastruktur dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di

Kabupaten Seruyan, yang berpotensi meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing ekonomi daerah dalam jangka panjang.

Tahun	Nilai Modal Tetap Bruto (Miliar Rupiah)
2020	3.534,51
2021	3.866,86
2022	3.803,60
2023	4.448,87
2024	4.804,03

2.1.3.2. Penerapan Ekonomi Hijau

2.1.3.2.1. Indeks Ekonomi Inklusif

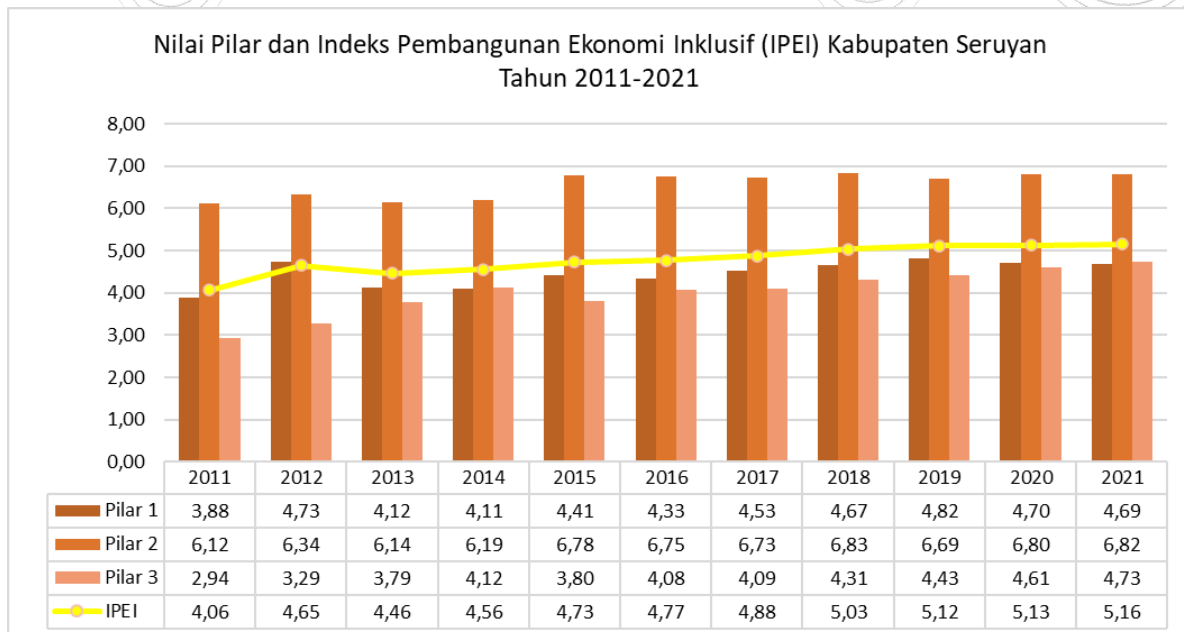
Indeks Ekonomi Inklusif atau Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dengan tujuan menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif mengukur inklusivitas pembangunan dengan melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. IPEI dibentuk dari 3 pilar utama yakni Pilar 1 Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi; Pilar 2 Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan; dan Pilar 3 Perluasan Akses dan Kesempatan. Kriteria capaian IPEI adalah IPEI 1-3 (tidak memuaskan), IPEI 4-7 (memuaskan), IPEI 8-10 (sangat memuaskan).

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) Kabupaten Seruyan pada tahun 2011-2021 menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Selama periode tahun 2011-2021 tercatat nilai IPEI tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 5,16 dan nilai IPEI terendah terjadi pada tahun 2011 yakni sebesar 4,06. Hal ini menunjukkan bahwa selama periode tahun tersebut IPEI Kabupaten Seruyan berada pada kategori memuaskan yang bermakna bahwa pelaksanaan pembangunan ekonomi inklusif di Kabupaten Seruyan mencapai hasil yang memuaskan.

Capaian dari masing-masing pilar pembentuk IPEI di Kabupaten Seruyan pada tahun 2011-2021 menunjukkan kondisi yang berbeda-beda. Pada Pilar 1 Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi, selama periode tahun 2011-2021 mengalami perubahan yang fluktuatif. Pada tahun 2011 nilai Pilar 1 menunjukkan capaian yang tidak memuaskan dengan nilai 3,88. Nilai Pilar 1 IPEI pada tahun berikutnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 4,73 dan kemudian nilainya mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Hingga pada tahun 2021 nilai Pilar 1 IPEI sebesar 4,69 dan berada di kategori memuaskan yang artinya selama periode tahun 2012-2021 pertumbuhan dan perkembangan ekonomi inklusif di Kabupaten Seruyan menunjukkan kinerja yang memuaskan.

Pada Pilar 2 Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan selama periode tahun 2011-2021 menunjukkan perubahan yang fluktuatif namun cenderung meningkat. Pada tahun 2011 nilai Pilar 2 IPEI sebesar 6,12 dan terus meningkat hingga 6,82 pada tahun 2021. Secara keseluruhan nilai Pilar 2 berada pada kategori memuaskan yang artinya selama periode tahun 2011-2021 pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan di Kabupaten Seruyan sudah berjalan lebih terbuka dan adil.

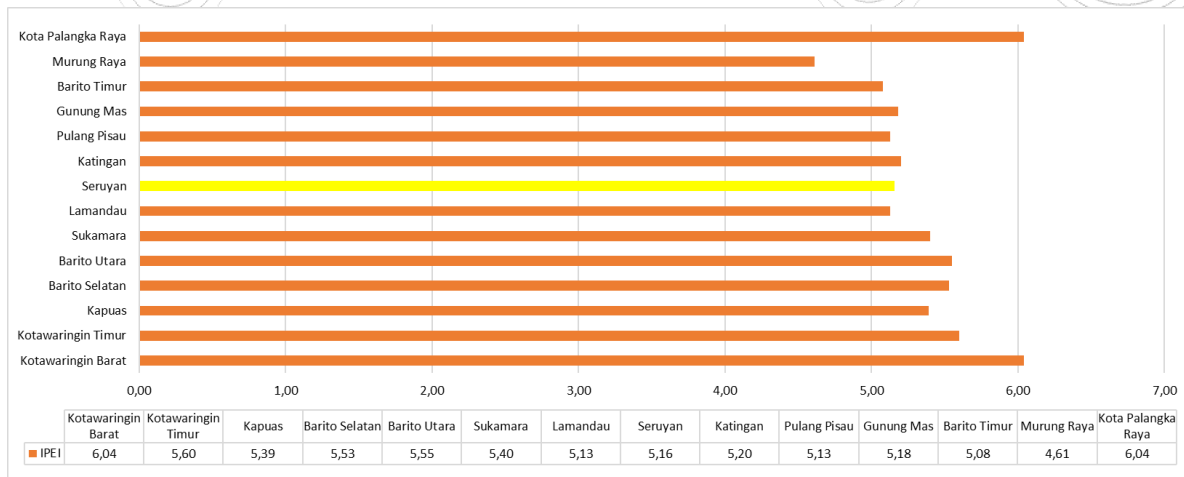
Pilar 3 Perluasan Akses dan Kesempatan selama periode tahun 2011-2021 menunjukkan perubahan yang fluktuatif namun cenderung meningkat. Pada tahun 2011 nilai Pilar 3 IPEI sebesar 2,94 dan masuk dalam kategori tidak memuaskan. Selama periode tahun 2011-2013 dan tahun 2015 nilai Pilar 3 IPEI berada pada kategori tidak memuaskan, nilai Pilar 3 IPEI mengalami peningkatan dan masuk dalam kategori memuaskan pada tahun 2014 dan periode tahun 2016-2021, dimana pada tahun 2021 nilai Pilar 3 IPEI sebesar 4,73. Hal ini menunjukkan bahwa selama periode tahun 2016-2021 perluasan akses dan kesempatan secara ekonomi telah berjalan lebih terbuka dan adil.



Gambar 2.44. Grafik Nilai Pilar dan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) Kabupaten Seruyan Tahun 2011-2021

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2011-2021

Apabila dibandingkan dengan nilai IPEI kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah, nilai IPEI Kabupaten Seruyan berada di peringkat 10 dari 14 kabupaten/kota dengan nilai IPEI pada tahun 2021 sebesar 5,16. Kabupaten/kota dengan nilai IPEI tertinggi di Provinsi Kalimantan Tengah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kota Palangka Raya yakni sebesar 6,04. Sedangkan kabupaten/kota dengan nilai IPEI terendah adalah Kabupaten Murung Raya yakni sebesar 4,61. Seluruh kabupaten/kota dua Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2021 memiliki nilai IPEI dengan kategori memuaskan.



**Gambar 2.45. Grafik Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI)
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021**

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021

2.1.3.2.2. Indeks Ekonomi Hijau

Indeks Ekonomi Hijau atau *Green Economy Indeks* (GEI) merupakan satuan ukur yang digunakan untuk mengukur efektivitas transformasi ekonomi ke arah pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan. GEI terdiri dari 15 indikator yang mencakup 3 pilar utama, yaitu ekonomi (intensitas emisi, intensitas energi, pendapatan nasional bruto (PNB), sosial (tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, angka harapan hidup, dan rata-rata lama sekolah), dan lingkungan (tutupan lahan, lahan gambut terdegradasi, penurunan emisi, sampah terkelola, dan energi baru terbarukan) yang mencerminkan pembangunan ekonomi hijau. GEI bertujuan menjadi arah pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang dan mempercepat penerapan program pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim sebagai tulang punggung dalam transisi menuju ekonomi hijau. **Data untuk GEI belum tersedia baik di tingkat Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota.**

Sebagai bagian dari komitmen ekonomi hijau, sejak 2015 Kabupaten Seruyan secara sukarela mendorong sertifikasi komoditas secara berkelanjutan yang dimulai dari kelapa sawit sebagai komoditas lokomotif ekonomi. Pendekatan sertifikasi ini disebut sertifikasi

kewilayahan atau yurisdiksi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/145/2022 mengenai pembentukan kelompok kerja multipihak untuk sertifikasi yurisdiksi. Pendekatan ini merupakan suatu upaya memfasilitasi keberlanjutan skala wilayah yang dipimpin oleh Pemerintah Daerah di mana standar keberlanjutan diintegrasikan dalam regulasi daerah sesuai dengan kewenangan daerah dan memberlakukannya kepada semua produser komoditas di wilayah Kabupaten Seruyan. Kepatuhan semua produser pada regulasi keberlanjutan mengkondisikan Seruyan agar pada akhirnya menjadi kabupaten yang berkelanjutan dan menumbuhkan model ekonomi hijau. Melalui upaya ini, Kabupaten Seruyan menargetkan peningkatan investasi hijau pada komoditas berkelanjutan, sejalan dengan perlindungan lingkungan, dan memberikan masa depan bagi warga Kabupaten Seruyan.

2.1.3.3. Iptek, Inovasi, Dan Produktivitas Ekonomi

2.1.3.3.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari. Angka TPAK digunakan sebagai dasar untuk mengetahui penduduk yang aktif bekerja ataupun mencari pekerjaan. Semakin tinggi nilai TPAK maka semakin besar bagian dari penduduk usia kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat, dalam kegiatan produktif. Nilai TPAK dikelompokkan menjadi 3 yaitu tinggi ($TPAK \geq 70$), sedang ($50 < TPAK < 70$), rendah ($TPAK \leq 50$).

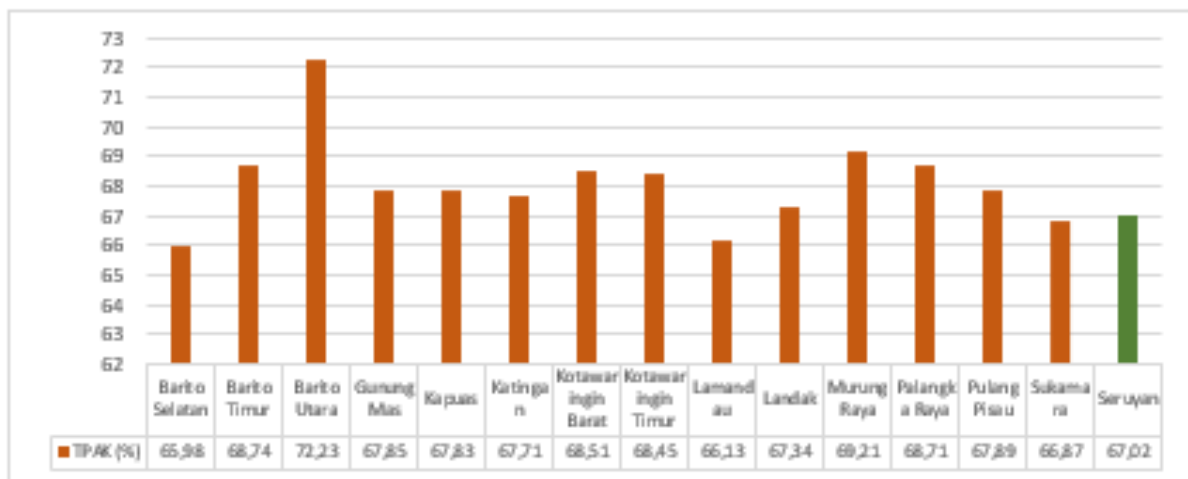
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Seruyan tahun 2019-2024 mengalami tren yang fluktuatif. Pada tahun 2019 TPAK Kabupaten Seruyan sebesar 71,66 persen kemudian pada tahun 2020 nilainya mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar menjadi 65,04 persen. Di tahun 2021-2022 nilai TPAK Kabupaten Seruyan mengalami peningkatan menjadi 72,10 persen dan kemudian kembali mengalami penurunan menjadi 67,66 persen pada

tahun 2023. Tahun 2024 kembali mengalami sedikit peningkatan menjadi 68,71. Jika dibandingkan dengan nilai TPAK Provinsi Kalimantan Tengah dan juga Nasional, nilai TPAK Kabupaten Seruyan secara keseluruhan berada di atas nilai TPAK Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional.



Gambar 2.46. Grafik Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024

Sumber: BPS Kabupaten Seruyan, 2019-2024



Gambar 2.47. Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2024

2.1.3.3.2. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah adalah alat pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat inovasi dan kemajuan di suatu daerah, seperti negara bagian, provinsi, atau kota. Tujuan dari indeks ini adalah untuk mengukur sejauh mana suatu daerah telah berhasil dalam mengembangkan inovasi dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, pendidikan, teknologi, lingkungan, dan pelayanan publik. Indeks Inovasi Daerah membantu pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami dan mempromosikan inovasi dalam pembangunan daerah.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Seruyan memiliki kondisi perkembangan yang kurang baik pada tahun 2020-2023. Di mana pada periode tersebut, Indeks Inovasi Daerah terkategori kurang inovatif. Namun pada tahun 2024, Indeks Inovasi Kabupaten Seruyan mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Skor Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Seruyan pada tahun 2024 sebesar 37,58 dan masuk dalam kategori Inovatif. Nilai tersebut jauh diatas nilai Indeks Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yakni sebesar 31,94 dan masuk dalam kategori kurang inovatif.

Tabel 2.37. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020-2024

Tahun	Indeks Inovasi Daerah			
	Kabupaten Seruyan		Provinsi Kalimantan Tengah	
2020	206	Kurang Inovatif	73	Kurang Inovatif
2021	22,29	Kurang Inovatif	15,69	Kurang Inovatif
2022	18,27	Kurang Inovatif	47,82	Inovatif
2023	46,23	Inovatif	25,70	Kurang Inovatif
2024	37,58	Inovatif	31,94	Kurang Inovatif

Sumber: Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, 2020-2024

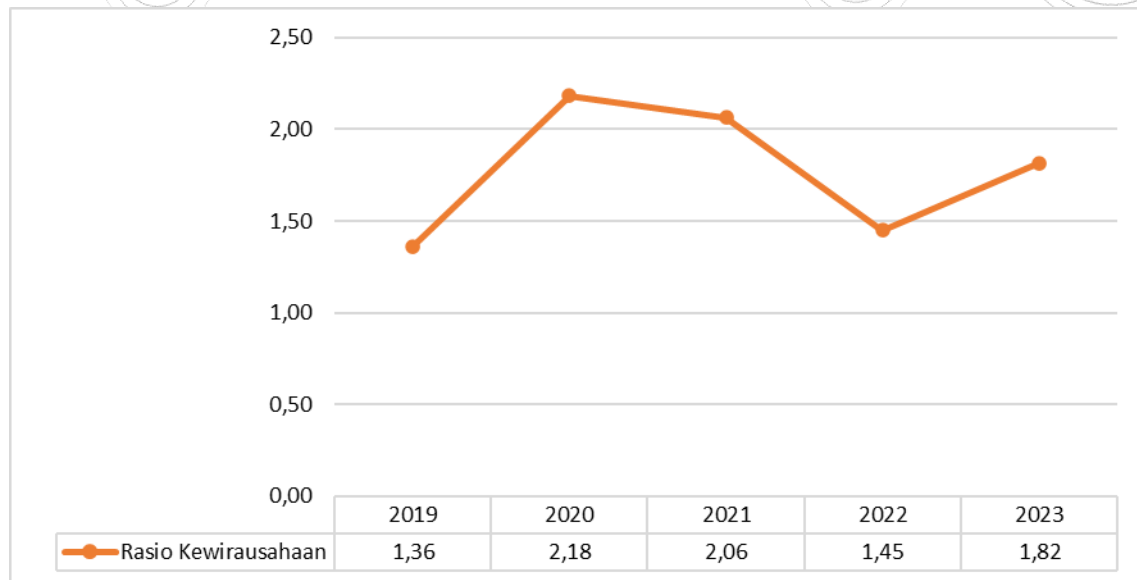
Untuk peningkatan Indeks Inovasi Daerah, Kabupaten Seruyan selain mendorong berbagai inovasi untuk tumbuh dan berkembang juga

mendorong Sertifikasi kewilayahan/yurisdiksi berkelanjutan, dan Gawi Bapakat sebagai inovasi yang secara bertahap membawa Seruyan menuju pemenuhan prinsip-prinsip keberlanjutan, serta masyarakat merasakan langsung manfaat dari upaya keberlanjutan terutama melalui kegiatan konservasi dan restorasi.

2.1.3.3.3. Rasio Kewirausahaan

Rasio Kewirausahaan merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap dengan total angkatan kerja pada tahun yang sama. Pada level nasional, Rasio Kewirausahaan menjadi prasyarat Indonesia untuk menjadi negara maju pada 2045 dengan target yang harus dicapai minimal sebesar 4,00. Saat ini Rasio Kewirausahaan Nasional sebesar 3,47. Peningkatan rasio kewirausahaan perlu dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat struktur ekonomi nasional, karena pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha.

Rasio Kewirausahaan Daerah untuk Kabupaten Seruyan pada periode tahun 2019-2023 menunjukkan kondisi yang cukup fluktuatif namun cenderung meningkat. Pada tahun 2019, rasio kewirausahaan Kabupaten Seruyan sebesar 1,36 meningkat menjadi 1,82 di tahun 2023. Pada periode tahun 2021-2022 terjadi penurunan rasio kewirausahaan yang cukup signifikan, kondisi ini terjadi karena adanya penurunan jumlah pengusaha yang dibantu oleh buruh tetap dan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja.



Gambar 2.48. Rasio Kewirausahaan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kabupaten Seruyan (diolah), 2023

2.1.3.3.4. Rasio PDRB Industri Pengolahan dan Akomodasi Makan Minum

Sektor industri pengolahan merupakan tulang punggung perekonomian Kabupaten Seruyan dengan kontribusi yang sangat dominan, berkisar antara 30,93% hingga 32,09% dari total PDRB selama periode 2020-2024. Kontribusi tertinggi tercatat pada tahun 2022 sebesar 32,09%, namun mengalami fluktuasi dengan penurunan menjadi 31,92% pada tahun 2023 dan 31,58% pada tahun 2024, meskipun tetap mempertahankan posisinya sebagai sektor penyumbang terbesar perekonomian daerah. Dominasi sektor industri pengolahan ini mencerminkan karakteristik ekonomi Kabupaten Seruyan yang berbasis pada pengolahan sumber daya alam, kemungkinan terkait dengan industri kelapa sawit, kayu, dan komoditas pertanian lainnya, sehingga stabilitas dan pengembangan sektor ini menjadi kunci utama dalam menjaga ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus menunjukkan perlunya strategi diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan yang terlalu tinggi pada satu sektor.

Sektor akomodasi dan makan minum di Kabupaten Seruyan menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024, dengan nilai absolut yang meningkat dari Rp 106,3 miliar menjadi Rp 135,7 miliar atau tumbuh sekitar 27,6% selama periode lima tahun tersebut. Meskipun demikian, kontribusi relatif sektor ini terhadap total PDRB mengalami penurunan dari 1,21% pada tahun 2020 menjadi 1,08% pada tahun 2024, yang mengindikasikan bahwa meskipun sektor ini tumbuh secara nominal, pertumbuhannya masih tertinggal dibandingkan dengan sektor-sektor ekonomi lainnya yang berkembang lebih pesat. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata dan jasa makanan minuman di Kabupaten Seruyan masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut, terutama dalam rangka diversifikasi ekonomi dan peningkatan kontribusi sektor jasa terhadap perekonomian daerah.

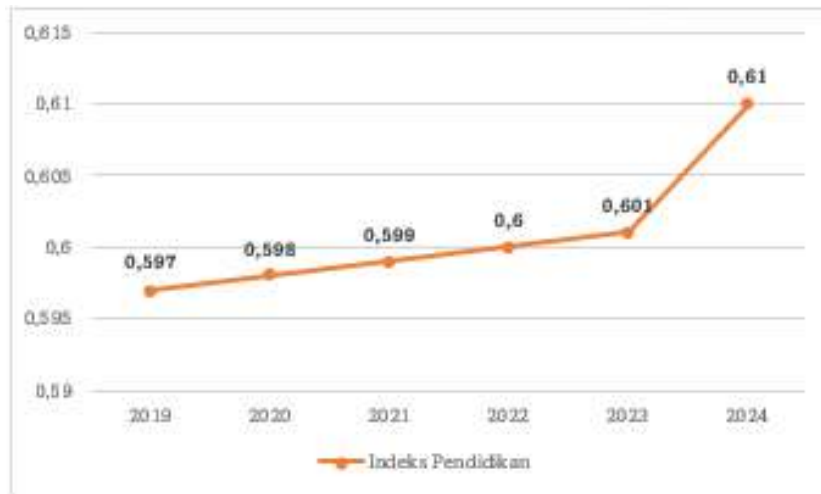
2.1.3.4. Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.1.3.4.1. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan di bidang pendidikan yang mempunyai kedudukan strategis, mengingat kualitas sumber daya manusia yang tercermin di dalamnya sangat menentukan produktivitas suatu bangsa. Indeks Pendidikan sendiri merupakan salah satu dimensi penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam hal pengetahuan atau tingkat pendidikan.

Indeks Pendidikan Kabupaten Seruyan dihitung menggunakan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Perkembangan Indeks Pendidikan Kabupaten Seruyan pada tahun 2019-2024 menunjukkan perkembangan yang positif, dimana nilainya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya meskipun tidak signifikan. Pada tahun 2019 Indeks Pendidikan Kabupaten Seruyan sebesar 0,597. Dalam kurun waktu 5 tahun nilainya meningkat 0,004 poin menjadi 0,601 pada tahun 2023, kemudian pada tahun 2024 mengalami peningkatan yaitu menjadi 0,610. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi

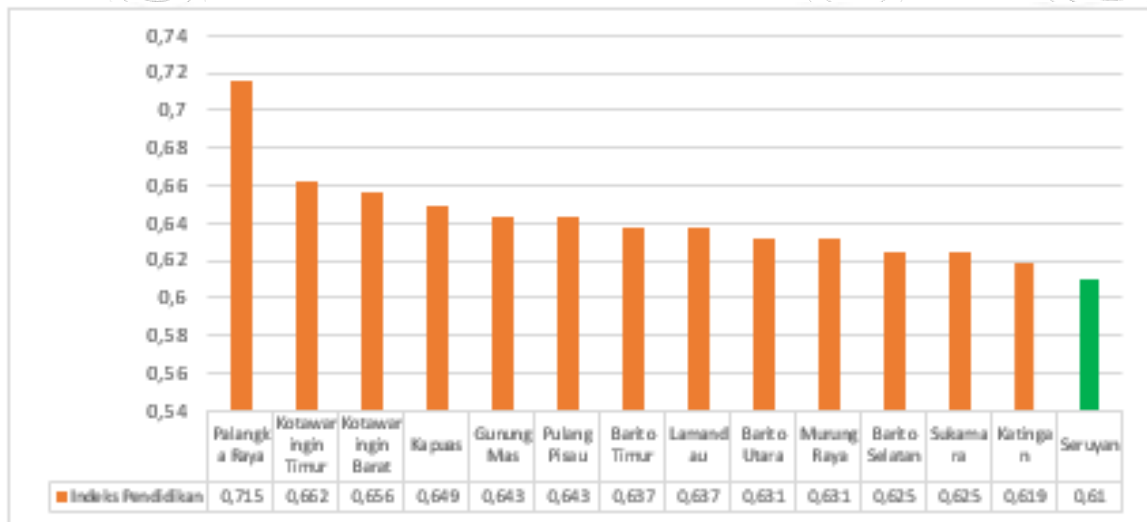
pendidikan di Kabupaten Seruyan semakin baik dan meningkat kualitasnya.



Gambar 2.49. Grafik Perkembangan Indeks Pendidikan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024

Sumber: BPS Kabupaten Seruyan, 2019-2024 (diolah)

Apabila dibandingkan dengan Indeks Pendidikan di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah, Indeks Pendidikan Kabupaten Seruyan pada tahun 2024 sebesar 0,610 dan berada pada peringkat 14 dari 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Peringkat pertama ditempati oleh Kota Palangka Raya dengan nilai Indeks Pendidikan sebesar 0,715.



Gambar 2.50. Grafik Indeks Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2024 (diolah)

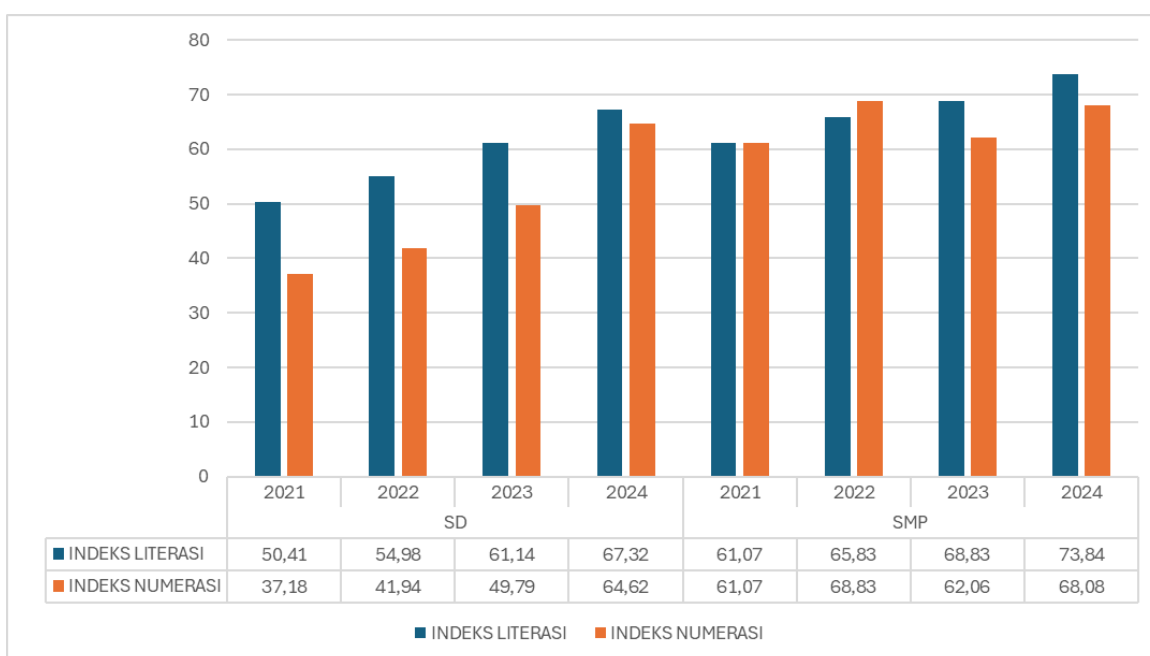
2.1.3.4.2. Angka Literasi/Numerasi

Literasi dan Numerasi merupakan kompetensi atau kemampuan yang sifatnya general dan mendasar. Literasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, dan memahami informasi. Ini tidak hanya terbatas pada keterampilan dasar membaca dan menulis, tetapi juga melibatkan pemahaman yang mendalam terhadap teks, kemampuan menganalisis informasi, serta keterampilan berpikir kritis untuk mengevaluasi dan menggunakan informasi secara efektif. Literasi tidak hanya terkait dengan kata-kata tertulis, tetapi juga mencakup literasi numerik atau Numerasi. Numerasi adalah kemampuan seseorang dalam memahami, menggunakan dan berinteraksi dengan angka, serta menerapkan konsep-konsep matematika dalam berbagai situasi. Kemampuan ini melibatkan pemahaman terhadap bilangan, operasi matematika dasar, dan keterampilan dalam menggunakan angka dalam konteks sehari-hari maupun profesional.

Indeks Literasi/Numerasi digunakan untuk mengukur atau menilai tingkat pemahaman, pengetahuan dan kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, memahami informasi yang kompleks, serta

memahami, menggunakan, dan bekerja dengan angka. Indeks Literasi/Numerasi Kabupaten Seruyan dihitung pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pada periode tahun 2021-2024, Indeks Literasi SD menunjukkan peningkatan angka dari 50,41 pada tahun 2021 menjadi 67,32 pada tahun 2024. Kondisi serupa juga terjadi pada nilai Indeks Literasi SMP yang meningkat dari 61,07 pada tahun 2021 menjadi 73,84 pada tahun 2024. Nilai Indeks Literasi pada jenjang SMP lebih tinggi dibanding pada jenjang SD.

Pada periode yang sama, Indeks Numerasi Kabupaten Seruyan juga mengalami kenaikan di tingkat SD maupun SMP. Indeks Numerasi SD pada tahun 2021 sebesar 37,18 dan meningkat menjadi 64,62 pada tahun 2024. Kondisi serupa juga terjadi pada nilai Indeks Numerasi SMP yang meningkat dari 61,07 pada tahun 2021 menjadi 68,08 pada tahun 2024. Secara keseluruhan nilai Indeks Numerasi pada jenjang SMP jauh lebih tinggi dibandingkan pada jenjang SD.



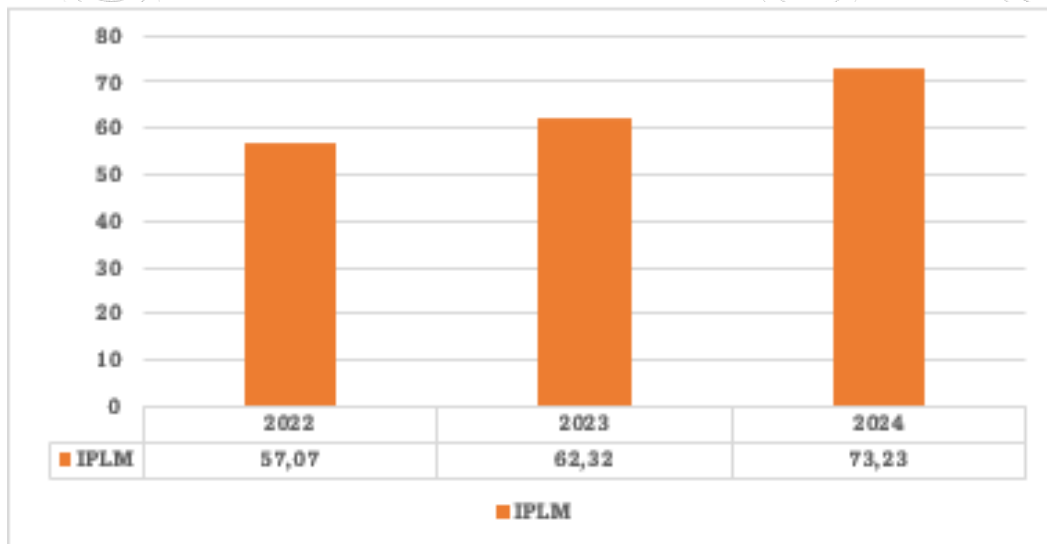
Gambar 2.51. Grafik Indeks Literasi/Numerasi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Seruyan Tahun 2021-2024

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan, 2021-2024

2.1.3.4.3. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas sumber daya manusia. Karena dengan literasi, tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dan informasi yang diterima menjadi lebih baik. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Terdapat tujuh unsur pembangunan literasi masyarakat, yaitu pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan per hari, jumlah perpustakaan ber-SNP, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial/promosi, dan anggota perpustakaan. Perpustakaan Nasional mengelompokkan nilai IPLM menjadi 5 kategori yaitu, Sangat Rendah (0-29,9), Rendah (30-49,9), Sedang (50-79,9), Tinggi (80-89,9), dan Sangat Tinggi (90-100).

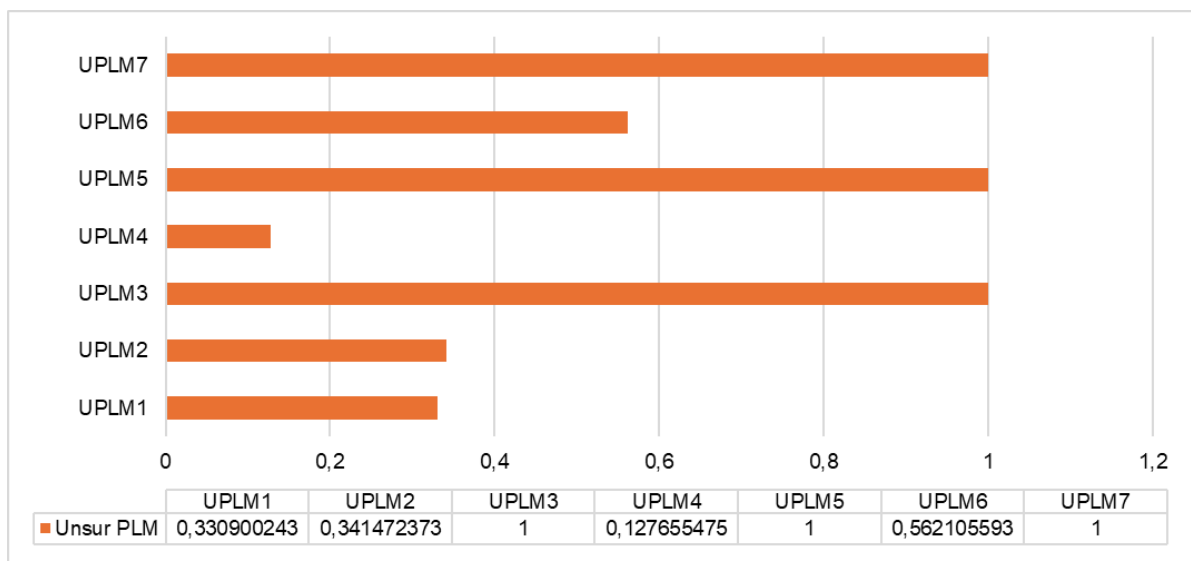
Nilai IPLM mulai dihitung oleh Perpustakaan Nasional pada tahun 2020. Namun untuk tingkat Kabupaten/Kota baru dihitung pada tahun 2022. Pada Tahun 2022 Kabupaten Seruyan memiliki skor IPLM sebesar 57,07. Pada tahun 2023, nilai IPLM Kabupaten Seruyan naik menjadi 62,32. Kemudian, pada tahun 2024 juga mengalami perkembangan menjadi 73,23. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Kabupaten Seruyan memiliki tingkat pembangunan literasi masyarakat yang sedang.



Gambar 2.52. Grafik Nilai IPLM Kabupaten Seruyan Tahun 2022-2024

Sumber: Perpustakaan Nasional, 2024

Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) Kabupaten Seruyan Tahun 2023 menunjukkan besaran antara 0,127 sampai 1. Rasio UPLM terbesar terjadi pada ketercakupan tenaga perpustakaan, rasio perpustakaan ber-SNP, dan anggota perpustakaan yaitu sebesar 1. Sedangkan, nilai rasio UPLM terendah ada pada tingkat kunjungan perpustakaan per hari yaitu sebesar 0,127.



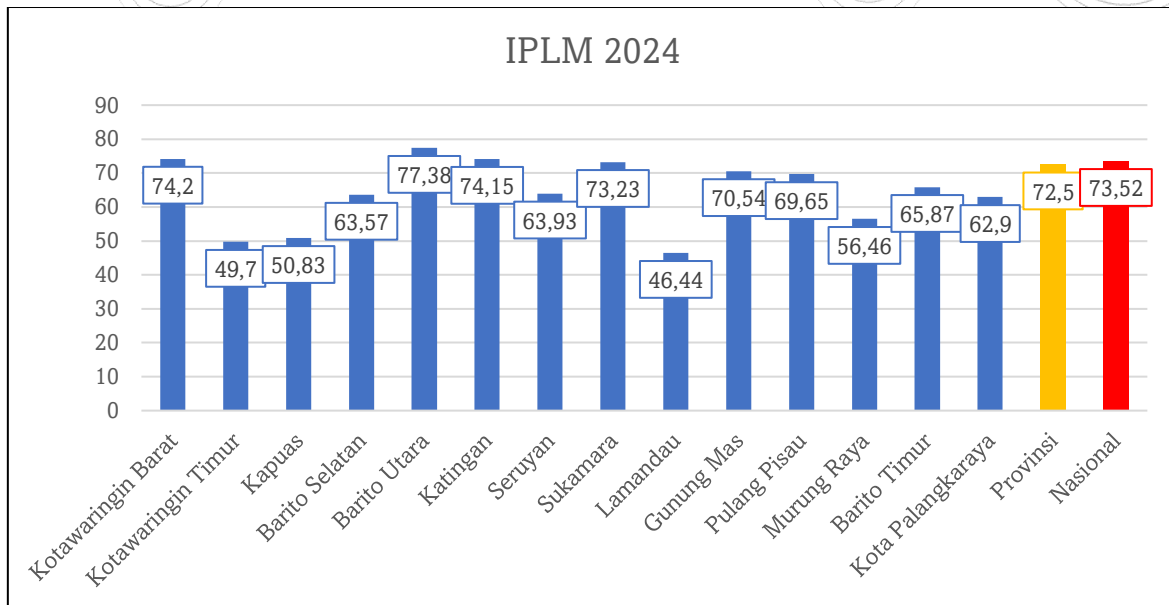
Gambar 2.53. Grafik Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Seruyan Tahun 2023

Sumber: Perpustakaan Nasional, 2023

Keterangan:

- UPLM 1 : Pemerataan Layanan Perpustakaan
- UPLM 2 : Ketercukupan Koleksi Perpustakaan
- UPLM 3 : Ketercukupan Tenaga Perpustakaan
- UPLM 4 : Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari
- UPLM 5 : Perpustakaan ber-SNP
- UPLM 6 : Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi dan Promosi
- UPLM 7 : Anggota Perpustakaan

Apabila dibandingkan dengan nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Seruyan memiliki nilai IPLM sebesar 63,93. Capaian tersebut menunjukkan Kabupaten Seruyan menempati peringkat 8 dari 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Nilai ini menunjukkan bahwa kondisi pembangunan literasi di Kabupaten Seruyan masih berada di tingkat sedang, meskipun belum mampu melampaui rata-rata Provinsi Kalimantan Tengah maupun Nasional. Melihat dari peringkat keseluruhan, capaian IPLM tertinggi di Provinsi Kalimantan Tengah di peroleh oleh Kabupaten Barito Utara dengan nilai IPLM 77,38. Diiikuti oleh Kabupaten Kotawaringin Barat dengan nilai 74,2 dan Kabupaten Katingan dengan nilai 74,15. Ketiga daerah ini berada diatas rata-rata provinsi serta relatif lebih baik dalam hal pembangunan literasi masyarakat dibanding daerah lainnya. Sebaliknya, capaian IPLM terendah dimiliki oleh Kabupaten Lamandau dengan nilai hanya 46,44, yang menunjukkan masih rendahnya akses dan kualitas literasi di daerah tersebut. Kabupaten lain yang juga memiliki nilai relatif rendah adalah Kotawaringin Timir (49,7) serta Barito Selatan (50,63), yang menandakan masih banyak tantangan dalam meningkatkan pembangunan literasi di wilayah tersebut.



Gambar 2.54. Grafik Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

Sumber: Perpustakaan Nasional, 2024

2.1.3.4.4. Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia non produktif dengan jumlah penduduk usia produktif. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk usia produktif yaitu penduduk yang memiliki usia 15-64 tahun. Usia tersebut merupakan usia angkatan kerja. Penduduk usia non produktif yaitu penduduk yang memiliki usia 0-14 tahun dan 65+ atau 65 tahun ke atas. Usia non produktif tersebut tergolong usia bukan angkatan kerja. Semakin rendah angka ketergantungan, semakin baik pula kondisi ekonomi suatu negara. Hal ini disebabkan oleh rendahnya masyarakat non produktif yang harus ditanggung secara ekonomi oleh masyarakat produktif. Tanggungan ini berbentuk jaminan sosial, bantuan pensiun, serta fasilitas lainnya yang didapatkan oleh penduduk non produktif walaupun mereka tidak bekerja.

Angka ketergantungan Kabupaten Seruyan tahun 2019-2024 menunjukkan perubahan yang fluktuatif. Pada tahun 2019 angka ketergantungan Kabupaten Seruyan sebesar 44,15. Artinya sebanyak 44-

45 penduduk usia non produktif di Kabupaten Seruyan bergantung pada 100 penduduk usia produktif. Angka ketergantungan Kabupaten Seruyan sempat mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 44,24 namun nilainya mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya. Hingga pada tahun 2023 Kabupaten Seruyan memiliki angka ketergantungan sebesar 41,03. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat sekitar 41-42 penduduk tidak produktif di Kabupaten Seruyan yang bergantung pada 100 penduduk usia produktif. Namun, pada tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 43,4.



Gambar 2.55. Grafik Rasio Ketergantungan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024

Sumber: Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025

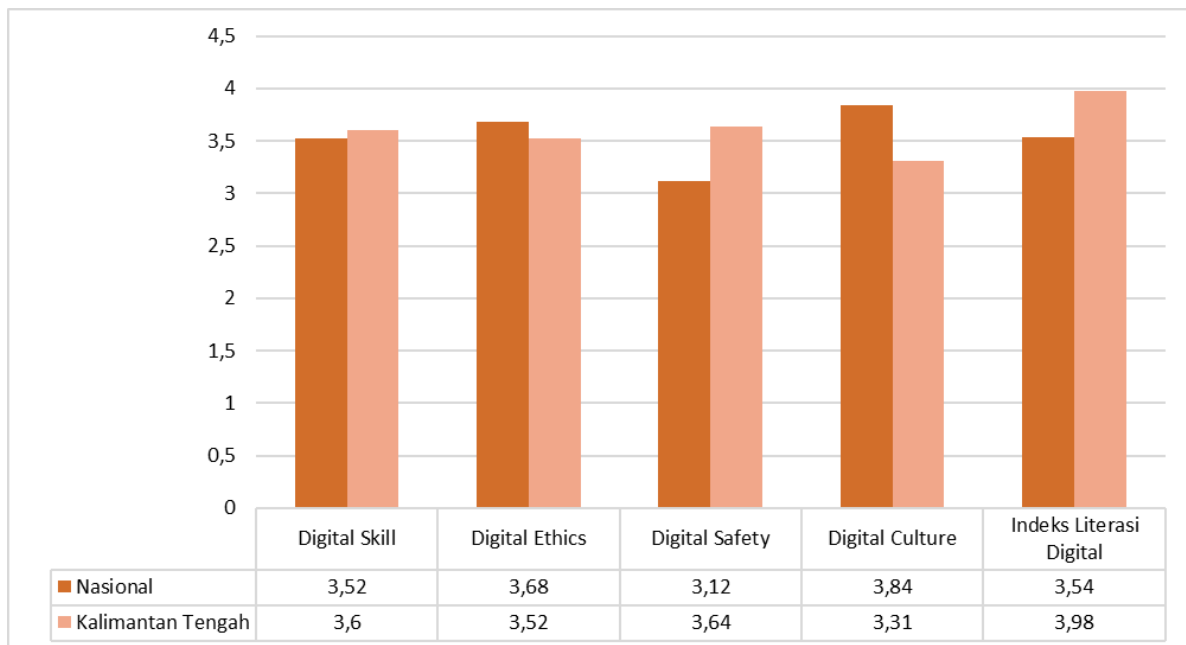
2.1.3.5. Transformasi Digital

2.1.3.5.1. Indeks Literasi Digital

Indeks Literasi Digital merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur pengetahuan serta kecakapan masyarakat dalam menggunakan dan memanfaatkan media digital, seperti alat komunikasi, jaringan internet dan lainnya. Indeks Literasi Digital bentuk dari 4 pilar utama yaitu *Digital Skill*, *Digital Ethics*, *Digital Safety*, dan *Digital Culture*.

Indeks Literasi Digital Nasional tahun 2022 adalah sebesar 3,54 dengan Pilar *Digital Culture* menjadi pilar yang memiliki nilai tertinggi

(3,84), dan Pilar *Digital Safety* merupakan pilar dengan nilai indeks terendah (3,12). Sedangkan nilai Indeks Literasi Digital Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 3,54 dimana Pilar *Digital Safety* menjadi pilar yang memiliki nilai tertinggi (3,64) dan Pilar *Digital Culture* merupakan pilar dengan nilai indeks terendah (3,31).



Gambar 2.56. Nilai dan Pilar Indeks Literasi Digital Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2022

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2022

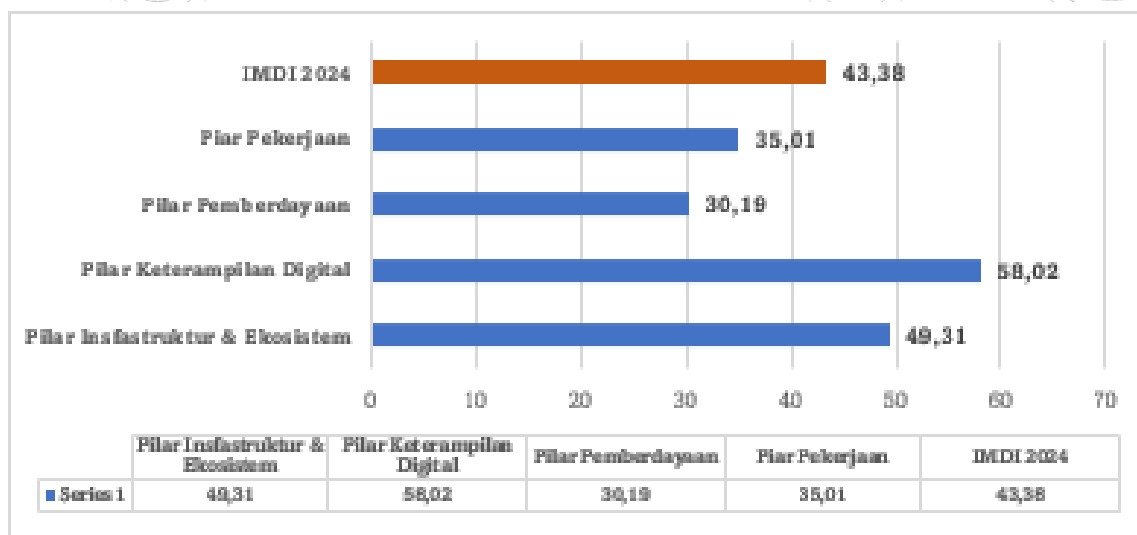
Data Indeks Literasi Digital untuk Kabupaten Seruyan tidak tersedia karena perhitungan Indeks Literasi Digital hanya pada level Nasional dan Provinsi, untuk tetap dapat menggambarkan kemampuan penggunaan teknologi oleh masyarakat maka akan digunakan indeks pengganti yaitu Indeks Masyarakat Digital.

2.1.3.5.2. Indeks Masyarakat Digital

Indeks Masyarakat Digital merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait

pekerjaannya. Masyarakat digital sendiri diartikan sebagai sekumpulan individu yang menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-seharnya, di mana semua aktivitas yang dijalankan secara elektronik dan tanpa kertas (*paperless*) menjadi suatu hal yang biasa. Masyarakat ini diciptakan oleh digitalisasi dengan karakter esensialnya dibentuk melalui pengembangan teknologi digital, dimana kehidupannya sangat bergantung pada TIK, mulai dari penciptaan, distribusi, dan penggunaan seluruh kegiatan utamanya. Terdapat empat pilar utama pembentuk Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) yaitu Infrastruktur dan Ekosistem, Keterampilan, Pemberdayaan, serta Pekerjaan.

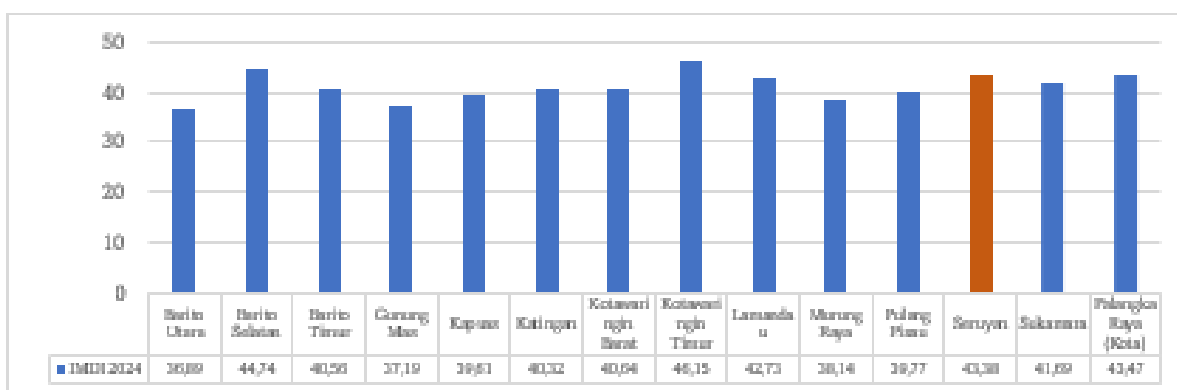
Nilai Indeks Masyarakat Digital (IMD) Kabupaten Seruyan pada tahun 2024 sebesar 43,38 yang berasal dari rata-rata skor 4 pilar yaitu pilar infrastruktur dan ekosistem (49,31), pilar keterampilan digital (58,02), pilar pemberdayaan (30,19), dan pilar pekerjaan (35,01). Secara lebih rinci, pilar keterampilan digital memiliki poin paling tinggi yang artinya sebagian besar dari masyarakat Kabupaten Seruyan telah memiliki keterampilan digital atau memiliki penguasaan teknologi yang baik. Sedangkan nilai terendah ada pada pilar pemberdayaan, hal ini menunjukkan bahwa teknologi informasi belum sepenuhnya dimanfaatkan dengan baik dalam kegiatan masyarakat. Sehingga meskipun masyarakat Kabupaten Seruyan memiliki keterampilan digital yang baik, masyarakat belum memanfaatkannya untuk kegiatan sehari-hari.



**Gambar 2.57. Grafik Nilai Pilar Indeks Masyarakat Digital (IMD)
Kabupaten Seruyan Tahun 2024**

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informasi, 2024

Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Tengah, nilai Indeks Masyarakat Digital (IMD) Kabupaten Seruyan cenderung tinggi. Nilai IMD Kabupaten Seruyan pada tahun 2024 sebesar 43,38 dan berada di peringkat 4 dari 14 kabupaten/kota. Di mana Kabupaten Kotawaringin Timur di peringkat pertama dengan nilai IMDI sebesar 46,15 dan Kabupaten Barito Utara di peringkat 14 atau terakhir dengan nilai IMDI sebesar 36,89.



**Gambar 2.58. Grafik Indeks Masyarakat Digital (IMD)
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024**

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informasi, 2024

2.1.3.5.3. Indeks Pembangunan TIK

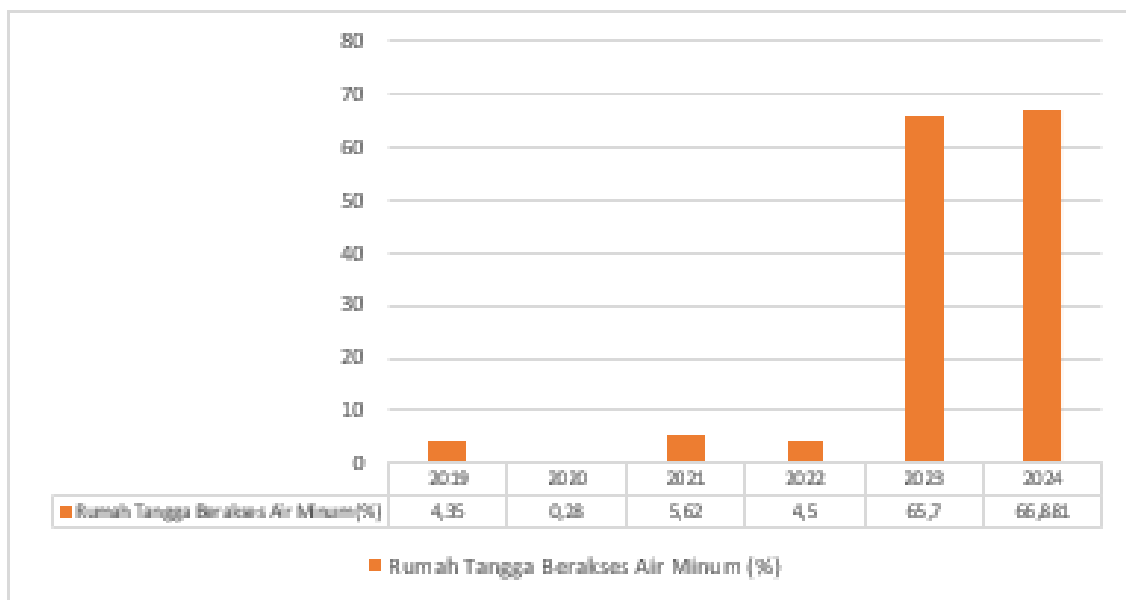
Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merujuk pada upaya pengembangan infrastruktur, aplikasi, dan layanan teknologi digital yang mencakup jaringan telekomunikasi, internet, sistem informasi, dan platform digital untuk mendukung transformasi digital dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan ekonomi. Indikator pembangunan TIK meliputi ketersediaan infrastruktur jaringan, tingkat penetrasi internet, literasi digital masyarakat, adopsi *e-government*, serta pengembangan ekonomi digital yang menjadi fondasi penting dalam mewujudkan *smart city* dan meningkatkan daya saing daerah. Kabupaten Seruyan baru mulai melakukan pengukuran dan penyusunan data pembangunan TIK secara komprehensif pada tahun 2025, seiring dengan percepatan program transformasi digital nasional dan kebutuhan untuk menyediakan layanan publik yang lebih efisien dan aksesible bagi masyarakat. Ketersediaan data ini menjadi sangat vital untuk mengidentifikasi kesenjangan digital, merancang strategi pengembangan infrastruktur TIK yang tepat, mendukung implementasi *smart governance*, serta memfasilitasi pertumbuhan ekonomi digital yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan efektivitas pelayanan pemerintah di era digital.

2.1.3.6. Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

2.1.3.6.1. Indeks Infrastruktur & Kawasan Perdesaaan

Indeks Infrastruktur merupakan salah satu indikator yang membentuk Indeks Pembangunan Kota atau *City Development Indeks* (CDI) yang digunakan untuk mengukur kinerja kota berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada fasilitas-fasilitas dasar. Fasilitas dasar yang menyusun Indeks Infrastruktur adalah akses air bersih, akses sanitasi, akses listrik, dan akses telepon. Indeks infrastruktur yang semakin tinggi menunjukkan bahwa tingkat pembangunan di suatu kota semakin baik. Secara lebih lengkap data Indeks Infrastruktur untuk Kabupaten Seruyan belum tersedia.

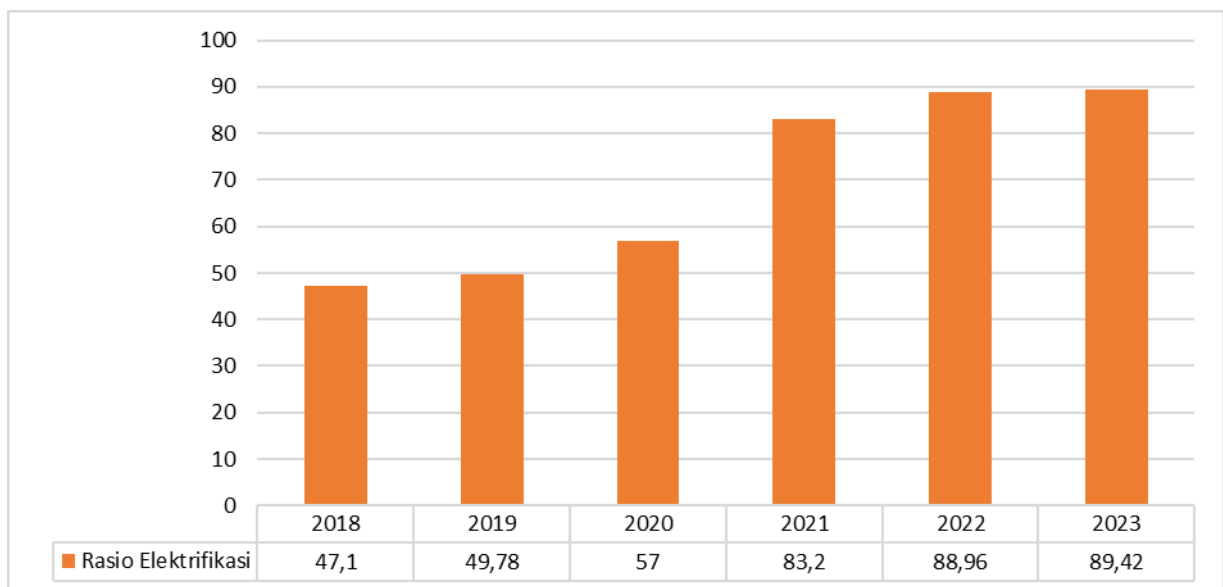
Indikator akses air bersih dan akses listrik yang digunakan untuk menyusun Indeks Infrastruktur dapat disubstitusi menggunakan Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum dan Rasio Elektrifikasi. Persentase rumah tangga berakses air minum di Kabupaten Seruyan pada tahun 2019-2024 menunjukkan perubahan yang fluktuatif namun cenderung meningkat. Pada tahun 2019, sebanyak 4,35% rumah tangga di Kabupaten Seruyan telah memiliki akses terhadap air minum. Nilainya terus turun hingga pada tahun 2020 nilainya turun sangat signifikan menjadi hanya 0,28%. Pada tahun 2021, persentase rumah tangga berakses air minum di Kabupaten Seruyan mengalami peningkatan menjadi 5,62%. Namun nilainya kembali turun pada tahun 2022 menjadi 4,5%. Pada tahun 2023 persentase rumah tangga berakses air minum di Kabupaten Seruyan mengalami peningkatan yang sangat signifikan yakni menjadi 65,7% dari yang sebelumnya 4,5% (meningkat 61,2% dari tahun 2022). Kemudian, pada tahun 2024 terus mengalami peningkatan hingga mencapai angka 66,88%.



Gambar 2.59. Grafik Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2024

Sumber: Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Seruyan 2005-2025

Rasio elektrifikasi merupakan perbandingan atau proporsi dari jumlah rumah tangga atau daerah yang memiliki akses atau keterhubungan dengan pasokan listrik terhadap total jumlah rumah tangga atau daerah yang ada dalam suatu wilayah. Tingkat elektrifikasi yang tinggi menandakan akses yang lebih luas terhadap listrik. Jika rasio elektrifikasi rendah, ini dapat menjadi indikasi adanya kebutuhan untuk meningkatkan akses terhadap listrik bagi masyarakat yang belum terjangkau. Rasio elektrifikasi Kabupaten Seruyan pada tahun 2018-2023 menunjukkan peningkatan nilai yang cukup signifikan. Pada tahun 2018, rasio elektrifikasi Kabupaten Seruyan sebesar 47,1 yang artinya sebanyak 47,1% rumah tangga di Kabupaten Seruyan telah mendapat akses terhadap listrik. Rasio elektrifikasi terus meningkat hingga pada tahun 2023 nilainya mencapai 89,42 yang artinya sudah 89,42% rumah tangga di Kabupaten Seruyan sudah mendapatkan akses terhadap listrik.



Gambar 2.60. Grafik Rasio Elektrifikasi Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023

Sumber: Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Seruyan 2005-2025

Berdasarkan Tabel 2.37 yang menunjukkan jumlah desa dan jenis kawasan perdesaan di Kabupaten Seruyan, terlihat bahwa dari total 97

desa di seluruh kabupaten, tidak ada satupun desa yang masuk dalam kategori sangat tertinggal maupun tertinggal, menunjukkan pencapaian pembangunan yang cukup baik di wilayah ini. Mayoritas desa (55 desa atau sekitar 57%) dikategorikan sebagai desa berkembang, diikuti oleh 24 desa (25%) yang sudah mencapai status mandiri, dan 18 desa (18%) yang masuk kategori maju. Distribusi ini menunjukkan pola pembangunan yang relatif merata di seluruh kecamatan, dengan Kecamatan Seruyan Tengah dan Seruyan Hulu memiliki jumlah desa terbanyak (masing-masing 19 dan 20 desa), sementara kecamatan lainnya berkisar antara 5-9 desa, dimana sebagian besar desa telah mencapai tingkat perkembangan yang memadai dengan dominasi kategori berkembang yang mengindikasikan potensi kemajuan yang baik ke depannya.

Tabel 2.37 Jumlah Desa dan Jenis Kawasan Perdesaaan

KECAMATAN	Σ DESA	SANGAT TERTINGGAL	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MAJU	MANDIRI
SERUYAN HILIR	8	0	0	3	1	4
SERUYAN TENGAH	19	0	0	12	3	4
DANAU SEMBULUH	8	0	0	3	2	3
HANAU	7	0	0	4	1	2
SERUYAN HULU	20	0	0	17	2	1
SERUYAN HILIR TIMUR	6	0	0	0	3	3
SERUYAN RAYA	5	0	0	0	1	4
DANAU SELULUK	6	0	0	2	2	2
BATU AMPAR	9	0	0	6	2	1
SULING TAMBUN	9	0	0	8	1	0
Total	97	0	0	55	18	24

Sumber, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

2.1.3.6.2. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

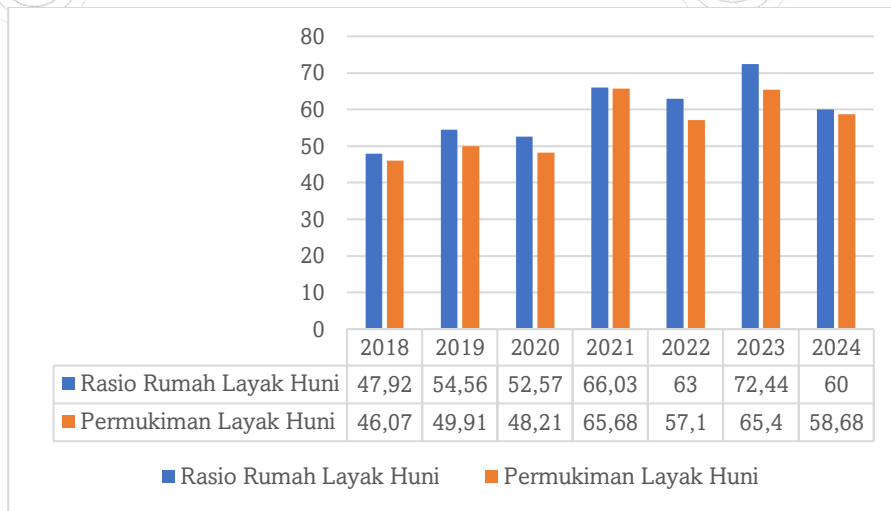
Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur merupakan sarana bagi pemerintah daerah untuk menilai seberapa baik pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur berkaitan dengan kepuasan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah

daerah. Indeks ini disusun berdasarkan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur yang memberikan informasi perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat. **Secara lebih lengkap data Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur untuk Kabupaten Seruyan belum tersedia.**

2.1.3.6.3. Kawasan Permukiman dan Perkotaan

Salah satu infrastruktur dasar yang penting untuk dirasakan seluruh masyarakat Kabupaten Seruyan adalah rumah layak huni. Rumah merupakan salah satu sarana tempat tinggal masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa perumahan rakyat dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan manusia. Dalam penyelenggaraan pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan terdapat permasalahan masih banyaknya jumlah yang menempati rumah tidak layak huni.

Pada periode tahun 2018-2024, rasio rumah layak huni di Kabupaten Seruyan mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2018, rasio rumah layak huni sebesar 47,92% kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 54,56%. Namun pada tahun 2020, nilai rasio rumah layak huni mengalami penurunan menjadi 52,57%. Pada periode tahun 2021-2023, nilainya mampu menurun cukup signifikan menjadi 60% pada tahun 2024. Sedangkan rasio permukiman layak huni di Kabupaten Seruyan pada tahun 2018 sebesar 46,07% yang kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi 49,91%. Pada tahun 2020, rasio permukiman layak huni menurun menjadi 48,21%, namun nilainya kembali meningkat pada periode tahun 2021-2024 menjadi 58,68% di tahun 2024.



Gambar 2.61. Grafik Perkembangan Rasio Rumah dan Permukiman Layak Huni Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2024

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Seruyan, 2024

2.1.3.6.4. Infrastruktur Wilayah

Perencanaan dan pembangunan prasarana kota merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Salah satu prasarana yang paling dibutuhkan adalah jaringan jalan. Jaringan jalan yang baik memiliki keterkaitan yang kuat dengan pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya masyarakat di suatu wilayah. Kemudahan akses jalan akan berdampak pada peningkatan laju distribusi barang dan jasa sehingga roda perekonomian masyarakat terus berputar. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan jaringan jalan yang baik dan memadai akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang semakin maju dan berkembang.

Di Kabupaten Seruyan, panjang jalan negara sepanjang 82,33 km, jalan provinsi mencapai 188,31 km, dan panjang jalan kabupaten sebesar 1.050,89 km. Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Seruyan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 terus mengalami peningkatan, dimana proporsi jalan dalam kondisi baik pada tahun 2018 sebesar 16,73% yang kemudian terus mengalami peningkatan hingga mencapai 26,28% pada tahun 2024. Jika melihat panjang jalan di setiap

kecamatan, Kecamatan Seruyan Hilir memiliki panjang jalan terpanjang mencapai 257,23 km. Sedangkan panjang jalan terpendek berada di Kecamatan Suling Tambun dengan panjang jalan hanya sepanjang 20,00 km pada tahun 2024.

Tabel 2.38. Perkembangan Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan (Km) di Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023

Kondisi Jalan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Baik	175,86	188,92	213,03	224,58	239,95	253,17	276,225
Sedang	106,08	55,57	141,15	186,4	181,02	166,41	116,85
Rusak	769,02	803,81	696,71	639,91	629,82	626,31	657,815
Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik (%)	16,73	17,98	20,27	21,37	22,83	24,21	26,28%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan, 2018-2024

Tabel 2.39. Panjang Jalan menurut Jenis Permukaan (Km) di Kabupaten Seruyan Tahun 2024

Kecamatan	Panjang Jalan (Km)			
	Aspal	Tidak Aspal	Lainnya	Jumlah
Seruyan Hilir	73,844	15,116	168,27	257,23
Seruyan Hilir Timur	41,36	50,4	33,1	124,86
Danau Sembuluh	18,72	2,5	11,02	32,24
Seruyan Raya	31,85	0	33,15	65
Hanau	11,9	3,2	19,9	35
Danau Seluluk	1,8	0,934	45,766	48,5
Seruyan Tengah	62,938	44,5	132,262	239,7
Batu Ampar	33,813	0	29,097	62,91
Seruyan Hulu	0	0,2	165,25	165,45
Suling Tambun	0	0	20	20
Jumlah	276,225	116,85	657,815	1050,89

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan, 2024

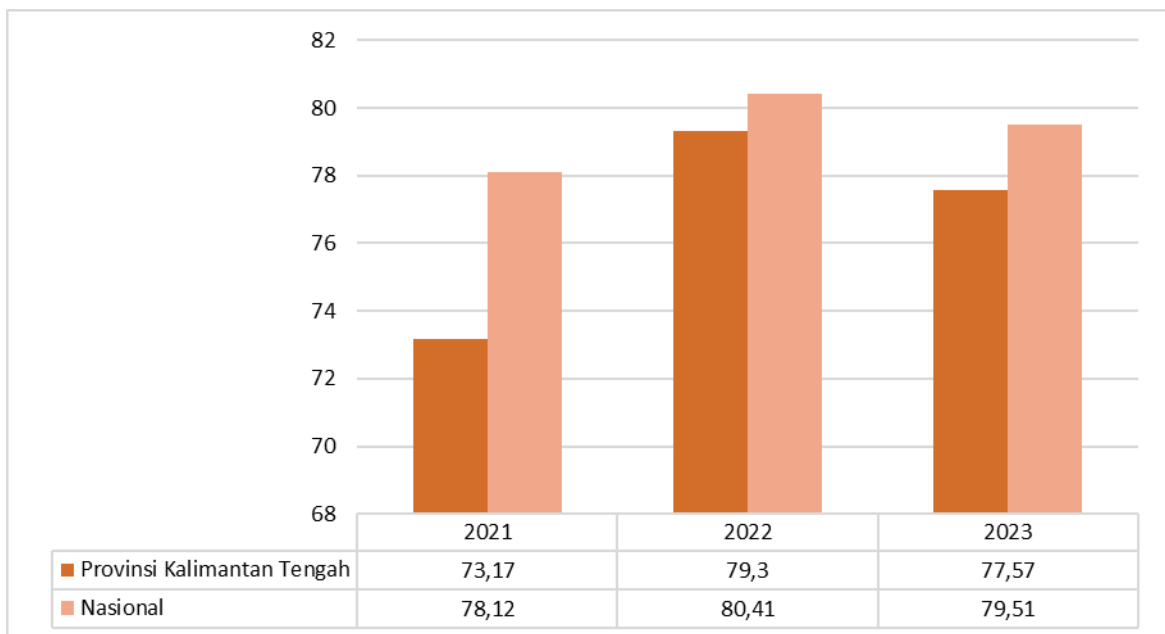
2.1.3.7. Daya Saing Iklim Investasi

2.1.3.7.1. Indeks Demokrasi

Indeks Demokrasi (IDI) merupakan alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan dan

penerapan demokrasi di Pusat maupun di Daerah. Tingkat capaian IDI diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi.

Indeks Demokrasi Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2021-2022 menunjukkan kinerja yang baik. Di mana pada tahun 2021, IDI Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 73,17 kemudian mengalami peningkatan sebesar 6,13 poin menjadi 79,3 pada tahun 2022. Kondisi serupa juga terjadi pada IDI Nasional. Pada tahun 2021 IDI Nasional sebesar 78,12 dan naik menjadi 80,41 pada tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2023, Indeks Demokrasi Provinsi dan Nasional mengalami penurunan menjadi 77,57 untuk Provinsi Kalimantan Tengah dan 79,51 untuk Nasional.



Gambar 2.62. Indeks Demokrasi Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2021-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021-2023

Perhitungan Indeks Demokrasi belum dilakukan hingga level kabupaten/kota, sehingga analisis yang dilakukan akan menggunakan

data IDI Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk menggambarkan kondisi demokrasi di Kabupaten Seruyan digunakan beberapa data pengganti yang merupakan indikator penyusun dari Indeks Demokrasi. Beberapa indikator yang dapat digunakan antara lain Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2024, Partisipasi Perempuan dalam DPRD, Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan.

Pada Pemilu 2024, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Seruyan sebanyak 108.248 pemilih dimana hanya 74,28 persen dari jumlah DPT yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024. Kondisi ini menunjukkan masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan demokrasi.

Tabel 2.40. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Seruyan

Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2024	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah DPT	56.747	51.501	108.248
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT	41.421	38.981	80.402
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	924	582	1.506
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK	1.459	1.276	2.735
Jumlah Pengguna Hak Pilih	43.804	40.839	84.643

Sumber: KPU RI, 2024

Partisipasi perempuan dalam DPRD menjadi salah satu pertimbangan dalam Indeks Demokrasi karena partisipasi ini mencerminkan beberapa aspek penting dari sebuah demokrasi yang sehat dan inklusif. Jumlah anggota DPRD di Kabupaten Seruyan sebanyak 25 orang dimana 4 diantara adalah perempuan.

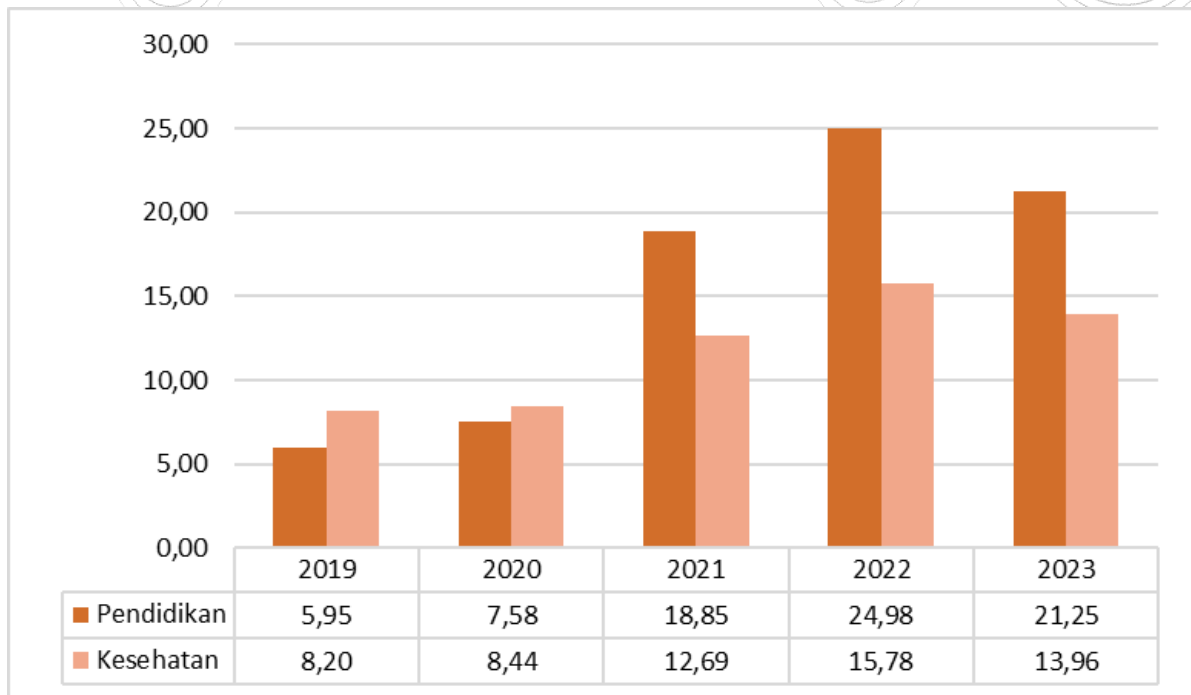
Tabel 2.41. Partisipasi Perempuan dalam DPRD menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2023

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
SLTA	8	2	10
Diploma I/II	-	-	-
Akademi/DIII	-	-	-
DIV	-	-	-
S1	10	1	11

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
S2	3	1	4
S3	-	-	-
Jumlah	21	4	25

Sumber: BPS Kabupaten Seruyan, 2023

Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan menjadi komponen pembentuk Indeks Demokrasi karena keduanya memiliki peran penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih demokratis dan berdaya. Investasi dalam pendidikan dan kesehatan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya memperkuat institusi demokrasi melalui partisipasi yang lebih berkualitas dan informatif. Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Seruyan pada periode tahun 2019-2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2019, anggaran pendidikan dialokasikan sebesar 5,95 persen dan anggaran kesehatan sebesar 8,20 persen. Pada tahun 2022, persentasenya meningkat menjadi 24,98 persen untuk pendidikan dan 15,78 persen untuk kesehatan. Namun pada tahun 2023, terjadi penurunan persentase alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan menjadi 21,25 persen untuk pendidikan dan 13,96 persen untuk kesehatan. Meskipun terjadi penurunan persentase alokasi anggaran, nilai alokasinya tetap meningkat.



Gambar 2.63. Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Tahun 2019-2023

Sumber : BKAD Kabupaten Seruyan, 2023

2.1.3.7.2. Indeks Rasa Aman

Rasa aman merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia yang kemudian pemerintah wajib untuk memenuhi kebutuhan tersebut, karena rasa aman berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Karena rasa aman merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah maka diperlukan alat ukur yang dapat mencerminkan situasi keamanan yang dirasakan masyarakat. Oleh karena itu disusunlah suatu indeks mengenai keamanan manusia, yang kemudian disebut dengan Indeks Rasa Aman (IRA). Indeks Rasa Aman disusun dengan tujuan mampu menggambarkan kondisi keamanan di masyarakat yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. **Secara lebih lengkap data Indeks Rasa Aman untuk Kabupaten Seruyan belum tersedia.** Untuk mengetahui kondisi keamanan masyarakat di Kabupaten Seruyan digunakan data jumlah kejahatan yang dilaporkan dan risiko penduduk terjadi tindak pidana per 100.000 penduduk.

Pada periode tahun 2019-2023, tercatat sebanyak 436 kasus kejahatan dilaporkan kepada pihak berwajib. Di mana angka kejahatan tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebanyak 109 kejahatan. Dari 10 kecamatan, pelaporan kejahatan yang paling tinggi ada di Kecamatan Seruyan Hilir yakni sebanyak 29 kejahatan. Sedangkan di Kecamatan Suling Tambun tidak ada tindak kejahatan yang dilaporkan. Dari catatan pelaporan tindak kejahatan di Kabupaten Seruyan, diketahui bahwa risiko penduduk terjadi tindak pidana per 100.00 penduduk di Kabupaten Seruyan adalah sebesar 65 persen di tahun 2023.

Tabel 2.42. Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan di Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023

Kecamatan	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan				
	2019	2020	2021	2022	2023
Seruyan Hilir	24	32	22	27	29
Seruyan Hilir Timur	3	3	6	5	6
Danau Sembuluh	8	7	10	13	12
Seruyan Raya	10	6	6	9	11
Hanau	8	3	12	4	6
Danau Seluluk	14	3	4	11	10
Seruyan Tengah	4	9	12	8	9
Batu Ampar	5	6	12	12	22
Seruyan Hulu	1	2	12	3	4
Suling Tambun	0	0	0	1	0
Kabupaten Seruyan	77	71	86	93	109

Sumber: BPS Kabupaten Seruyan, 2023

Tabel 2.43. Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana Per 100.000 Penduduk di Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023

Kecamatan	Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana Per 100.000 Penduduk				
	2019	2020	2021	2022	2023
Seruyan Hilir	68	89	14	17	18
Seruyan Hilir Timur	22	30	3	3	3
Danau Sembuluh	67	57	6	6	7
Seruyan Raya	67	38	3	5	7
Hanau	44	16	7	2	3

Kecamatan	Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana Per 100.000 Penduduk				
	2019	2020	2021	2022	2023
Danau Seluluk	91	19	2	7	6
Seruyan Tengah	18	40	7	5	5
Batu Ampar	66	78	7	7	14
Seruyan Hulu	11	22	1	1	2
Suling Tambun	0	0	0	1	0
Kabupaten Seruyan	53	47	42	54	65

Sumber: BPS Kabupaten Seruyan, 2023

2.1.3.7.3. Indeks Ketenteraman dan Ketertiban

Indeks Ketenteraman dan Ketertiban merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mencerminkan stabilitas keamanan suatu daerah. Di mana stabilitas keamanan tersebut berkaitan dengan frekuensi terjadinya masalah ketertiban seperti demonstrasi yang kemudian berdampak pada masalah ketenteraman masyarakat. Indeks ini digunakan sebagai salah satu parameter yang digunakan oleh investor ketika akan melakukan penanaman modal di suatu daerah. **Secara lebih lengkap Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kabupaten Seruyan belum tersedia.**

2.1.3.8. Stabilitas Ekonomi Makro

2.1.3.8.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah pada satu periode waktu tertentu. Nilai PDRB menggambarkan kemampuan suatu wilayah dalam menghasilkan nilai output dari seluruh sektor produksi. Perhitungan PDRB dilakukan dengan menggunakan dasar atas harga berlaku dan atas harga konstan.

PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku (ADHB) atau PDRB nominal disusun menggunakan harga pada tahun berjalan sehingga mampu menggambarkan nilai tambah barang dan jasa pada periode tersebut. Pada umumnya PDRB ADHB digunakan untuk melihat

kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sedangkan PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan (ADHK) atau PDRB riil disusun menggunakan harga yang berlaku pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB ADHK digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi.

Struktur perekonomian Kabupaten Seruyan ditinjau dari nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap sektor produksi yang ada pada PDRB ADHB. Nilai distribusi tersebut dapat menunjukkan besaran kontribusi masing-masing sektor dalam pembentukan total PDRB Kabupaten Seruyan. Dengan melihat kontribusi masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB, maka dapat diketahui seberapa besar peran suatu sektor dalam menunjang perekonomian daerah.

PDRB ADHB Kabupaten Seruyan terus mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2019 hingga 2024. Pada tahun 2019, nilai PDRB ADHB tercatat sebesar Rp8.552,21 miliar dan meningkat menjadi Rp12.608,3 miliar pada tahun 2024, atau bertambah lebih dari Rp4.000 miliar dalam lima tahun terakhir. Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil dan positif.

Sektor utama penyumbang PDRB adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar Rp. 4.973,3 miliar, diikuti oleh Industri Pengolahan Rp. 3.491,2 miliar, serta Perdagangan dan Reparasi Rp. 732,1 miliar. Peningkatan juga terlihat di sektor Transportasi, Administrasi Pemerintahan, dan Jasa Pendidikan, yang menunjukkan semakin beragamnya sumber pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Seruyan..

Tabel 2.44. Nilai PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024

Lapangan Usaha		Nilai PDRB ADHB (Miliar Rupiah)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.988,02	3.166,19	3.697,58	4.121,20	4.355,40	4.973
B	Pertambangan dan Penggalian	57,95	55,95	56,59	60,26	64,8	71,8
C	Industri Pengolahan	2.726,35	2.710,60	3.184,54	3.449,75	3.615,90	3.811,8

Lapangan Usaha		Nilai PDRB ADHB (Miliar Rupiah)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,53	1,55	1,63	1,69	1,8	2
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,43	1,43	1,58	1,53	1,6	1,7
F	Konstruksi	767,36	749,64	835,46	888,95	940,1	1.032,8
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	583,96	565,78	578,26	636,88	684,1	732,1
H	Transportasi dan Pergudangan	194,02	212,62	216,46	232,21	260,7	276,8
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	103,13	106,00	108,34	115,63	124	135,7
J	Informasi dan Komunikasi	57,92	66,35	71,70	73,89	78,5	85,1
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	80,53	88,58	95,57	104,44	110,4	120,9
L	Real Estate	134,96	140,96	148,70	160,46	170,7	192,2
M,N	Jasa Perusahaan	0,94	0,90	0,92	1,00	1,1	1,2
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	355,54	370,78	336,55	367,38	400,3	474,6
P	Jasa Pendidikan	299,88	324,17	336,79	359,80	388	424,7
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	127,16	135,86	146,89	155,18	168,9	185,3
R,S, T,U	Jasa Lainnya	71,54	71,18	72,52	78,44	83,8	86,7
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)		8.552,21	8.768,55	9.890,07	10.808,71	11.450,10	12.608,3

Sumber: BPS Kabupaten Seruyan, 2019-2024

Dilihat dari kontribusinya pada PDRB ADHB, pada tahun 2024 sektor utama yang memberikan kontribusi terbesar bagi PDRB ADHB Kabupaten Seruyan adalah Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Industri Pengolahan; serta Sektor Konstruksi. Dengan nilai atau persentase kontribusi pada tahun 2024 di masing-masing sektor tersebut sebesar 38,04% untuk Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;

31,58% untuk Sektor Industri Pengolahan; serta 8,21% untuk Sektor Konstruksi. Sektor yang memberikan kontribusi paling kecil pada tahun 2024 adalah Sektor Jasa Perusahaan; Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; serta Sektor Pengadaan Listrik dan Gas dengan persentase secara berturut-turut sebesar 0,01%; 0,01%; dan 0,02%.

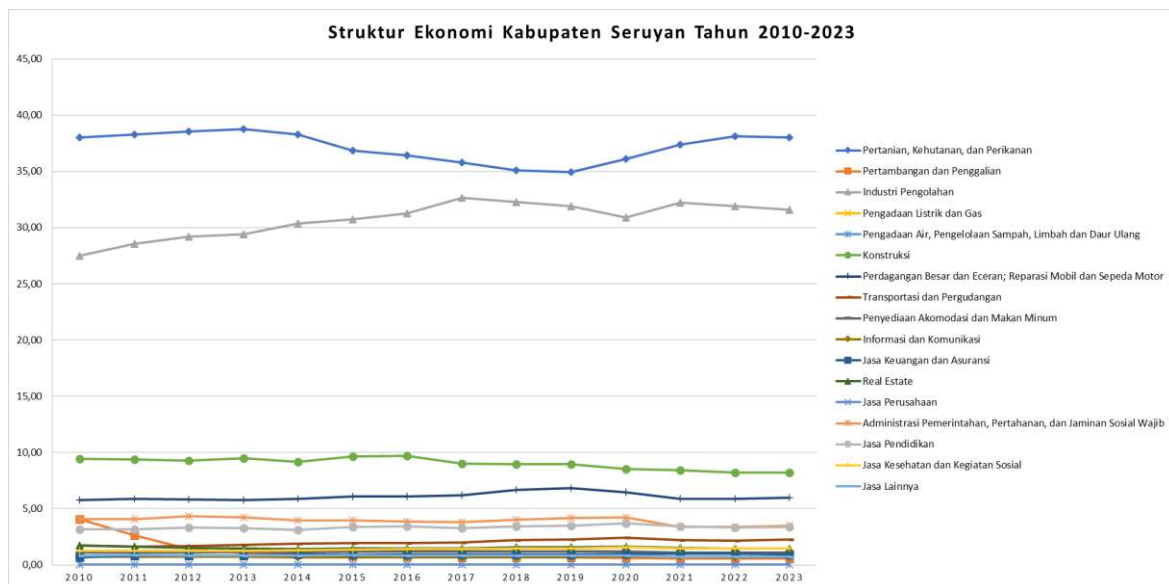
Tabel 2.45. Distribusi Nilai PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024

Lapangan Usaha		Distribusi Nilai PDRB ADHB (Persen)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	34,94	36,11	37,39	38,13	38,04	39,44
B	Pertambangan dan Penggalan	0,68	0,64	0,57	0,56	0,57	0,57
C	Industri Pengolahan	31,88	30,91	32,20	31,92	31,58	30,23
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	8,97	8,55	8,45	8,22	8,21	8,19
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,83	6,45	5,85	5,89	5,97	5,81
H	Transportasi dan Pergudangan	2,27	2,42	2,19	2,15	2,28	2,2
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,21	1,21	1,10	1,07	1,08	1,08
J	Informasi dan Komunikasi	0,68	0,76	0,72	0,68	0,69	0,67
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,94	1,01	0,97	0,97	0,96	0,96
L	Real Estate	1,58	1,61	1,50	1,48	1,49	1,52
M,N	Jasa Perusahaan	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4,16	4,23	3,40	3,40	3,50	3,76
P	Jasa Pendidikan	3,51	3,70	3,41	3,33	3,39	3,37
Q	Jasa Kesehatan dan	1,49	1,55	1,49	1,44	1,48	1,47

Lapangan Usaha		Distribusi Nilai PDRB ADHB (Persen)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Kegiatan Sosial						
R,S, T,U	Jasa Lainnya	0,84	0,81	0,73	0,73	0,73	0,69
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Seruyan, 2019-2024

Nilai kontribusi di atas menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Seruyan masih bergantung pada sektor primer dan sekunder yaitu sektor pertanian, pengolahan dan konstruksi. Selama tahun 2010-2024, Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Industri Pengolahan; serta Sektor Konstruksi menjadi sektor utama yang membentuk struktur perekonomian dan menjadi sektor unggulan di Kabupaten Seruyan. Sehingga selama kurun waktu 14 tahun belum ada transformasi struktur ekonomi di Kabupaten Seruyan.



Gambar 2.64. Grafik Struktur Ekonomi Kabupaten Seruyan Tahun 2010-2024

Sumber: BPS Kabupaten Seruyan, 2010-2024 (diolah)

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seruyan dapat diketahui dengan menganalisis nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap sektor produksi yang ada pada nilai PDRB ADHK. PDRB ADHK Kabupaten Seruyan terus mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 nilai PDRB ADHK Kabupaten Seruyan sebesar Rp6.033,56 miliar. Nilainya naik hingga mencapai Rp6.753,6 miliar pada tahun 2024.

Tabel 2.46. Nilai PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Seruyan Tahun 2010, 2015, 2020, 2022, 2023 Dan 2024

Lapangan Usaha		Nilai PDRB ADHK (Miliar Rupiah)					
		2010	2015	2020	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.249,07	2.211,23	2.243,81	2.336,48	2446	2.499,6
B	Pertambangan dan Penggalian	37,44	36,98	36,84	37,95	39,2	41,7
C	Industri Pengolahan	1.960,38	1.870,53	1.916,12	1.992,64	2086,8	2.097,6
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,97	1,03	1,06	1,07	1,1	1,2
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,95	0,90	0,98	0,91	0,9	1,0
F	Konstruksi	495,85	464,13	498,81	520,71	545,5	584,4
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	359,02	357,77	362,47	385,89	402	412,4
H	Transportasi dan Pergudangan	125,43	131,07	132,57	135,72	140,4	145,5
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	66,63	66,44	67,09	69,82	73,2	77,8
J	Informasi dan Komunikasi	46,36	49,20	52,36	53,71	55,7	59,7
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	60,56	65,57	68,09	69,06	71,7	73,5
L	Real Estate	96,37	99,51	101,78	105,39	108,2	118,1
M,N	Jasa Perusahaan	0,61	0,58	0,58	0,61	0,6	0,7
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	241,29	239,08	227,80	235,98	245,7	285,1
P	Jasa Pendidikan	179,57	190,88	194,26	195,73	203,3	213,3
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	77,30	79,26	84,82	87,51	91,8	94,5
R,S, T,U	Jasa Lainnya	45,02	44,09	44,12	46,21	48,4	47,6

Lapangan Usaha	Nilai PDRB ADHK (Miliar Rupiah)					
	2010	2015	2020	2022	2023	2024
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	6.042,81	5.908,25	6.033,56	6.275,37	6.560,8	6.753,6

Sumber: BPS Kabupaten Seruyan, 2019-2024

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1. Regulasi dan Tata Kelola Yang Berintegrasi dan Adaptif

2.1.4.1.1. Indeks Pelayanan Publik

Berdasarkan PermenPAN RB No.17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

Penyusunan indikator IPP dihasilkan melalui persilangan antara 6 prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas) dengan 6 aspek penilaian kinerja instansi terhadap pelayanan publik (kebijakan pelayanan, sarana prasarana, konsultasi dan pengaduan, profesionalisme SDM, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi pelayanan. Data untuk IPP Kabupaten Seruyan belum tersedia.

2.1.4.1.2. Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*e-Government Index*) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam layanan pemerintahan suatu daerah. Indeks ini mencerminkan sejauh mana pemerintah suatu daerah telah bergerak menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik yang efisien dan terbuka. Berdasarkan Publikasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengenai Evaluasi Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik (SPBE) pada tahun 2022-2023, Indeks SPBE Kabupaten Seruyan mengalami perbaikan dari 1,35 (kurang) pada tahun 2022 menjadi 1,91 (cukup) pada tahun 2023. Namun nilai Indeks SPBE Kabupaten Seruyan masih jauh dibawah nilai Indeks SPBE Provinsi Kalimantan Tengah yakni 2,75 (baik) pada tahun 2023.

**Tabel 2.47. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Kabupaten Seruyan Tahun 2022-2024**

Tahun	Indeks SPBE			
	Kabupaten Seruyan		Provinsi Kalimantan Tengah	
2022	1,35	Kurang	1,902	Cukup
2023	1,91	Cukup	2,75	Baik
2024	2,5	Cukup	2,87	Baik

Sumber: Kementerian PAN-RB, 2022-2024

2.1.4.1.3. Indeks Reformasi Hukum dan Indeks Kepatuhan Hukum

Capaian indeks reformasi hukum Kabupaten Seruyan memiliki kategori CC (Cukup). Hal ini dibuktikan dengan nilai indeks reformasi hukum Kabupaten Seruyan pada tahun 2024 sebesar 57,22. Adanya indeks reformasi hukum ini merupakan penilaian pelaksanaan reformasi hukum dalam mewujudkan birokrasi yang kapable sesuai sasaran roadmap reformasi birokrasi. Selain itu, indeks reformasi hukum ini juga berkaitan dengan pemberian saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi hukum pada Kabupaten Seruyan. Selanjutnya, untuk indeks kepatuhan hukum Kabupaten Seruyan belum memiliki realisasi pada tahun 2024.

2.1.4.1.4. Indeks Reformasi Birokrasi

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Seruyan menampilkan perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Seruyan selama periode 2021-2024 yang menunjukkan tren peningkatan

yang konsisten. Data menunjukkan bahwa indeks ini mengalami perbaikan dari 60,08 pada tahun 2021 menjadi 68 pada tahun 2024, dengan peningkatan yang relatif stabil setiap tahunnya. Capaian ini mengindikasikan komitmen dan upaya berkelanjutan pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi sebagai bagian integral dari peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel 2. 48 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Seruyan Tahun 2021-2024

Tahun	Indeks Refromasi Birokrasi
2021	60,08
2022	62,25
2023	66,05
2024	68

Sumber : Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025

Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi dari 60,08 (2021) ke 62,25 (2022), kemudian ke 66,05 (2023), dan mencapai 68 (2024) mendemonstrasikan progresivitas yang terukur dalam implementasi reformasi birokrasi di Kabupaten Seruyan. Kenaikan rata-rata sekitar 2-4 poin per tahun menunjukkan bahwa proses reformasi birokrasi berjalan secara sistematis dan berkelanjutan. Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan berbagai inisiatif perbaikan sistem, prosedur, dan kualitas sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat.

Peningkatan konsisten Indeks Reformasi Birokrasi memiliki implikasi positif yang signifikan terhadap kualitas pelayanan publik dan iklim investasi di Kabupaten Seruyan. Reformasi birokrasi yang berhasil akan menciptakan birokrasi yang lebih responsif, profesional, dan berintegritas tinggi, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap pemerintah daerah. Capaian ini juga menjadi indikator bahwa Kabupaten Seruyan telah berhasil mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance dalam

penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dapat mendukung percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

2.1.4.2. Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah

2.1.4.2.1. Layanan Urusan Wajib Dasar

2.1.4.2.1.1. Pendidikan

Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Seruyan tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.49. Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Seruyan
Tahun 2019-2024**

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
APK SD/MI	%	11 1,5 2	93 ,3 9	11 1,9 3	11 6,4 8	11 6,8 9	11 4,9 4	11 7,3	11 5,3 5	11 7,7 1	11 1,4 2	11 0,5 2	10 8,1 7	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan
Rasio Guru terhadap murid SD/MI	Rasio	75, 41	71 ,4 4	76, 63	71, 13	77, 88	69, 73	79, 14	71, 72	80, 43	85, 62	1, 14	1,1 2	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan
APK SMP/MTs	%	10 2,6 9	70 ,5 4	10 4,0 1	87, 42	10 5,3 5	93, 68	10 6,7	95, 03	10 8,0 7	97, 53	90, 05	89, 08	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan
Rasio Guru terhadap murid SMP/MTs	Rasio	87, 54	85 ,8 3	89, 57	90, 61	91, 64	76, 73	93, 76	91, 72	95, 93	96, 64	1,1 3	1,1 0	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan
APK SMA/SMK/MA	%	72, 56	57 ,0 4	73, 3	50, 26	74, 04	57, 21	74, 8	57, 97	75, 56	58, 62	88, 42	85, 93	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan
Rasio Guru terhadap murid SMA/SMK/MA	Rasio	TA D	85 ,8 3	TA D	90, 61	91, 64	93, 14	93, 76	93, 14	95, 93	97, 72	1, 18	1, 17	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan

AMP SD/MI	%	96, 12	92 ,3 9	96, 65	97, 99	98, 5	98, 24	99	98, 74	99, 5	99, 24	99, 26	98, 67	Tidak Tercap ai	Dinas Pendidikan
APM SMP/MTs	%	74, 79	64 ,9 1	74, 84	81, 28	81, 32	89, 53	81, 36	89, 57	81, 4	87, 05	82, 52	79, 8	Tidak Tercap ai	Dinas Pendidikan
APM SMA/MA/ SMK	%	53, 08	51 ,3 9	53, 58	47, 87	54, 08	47, 49	54, 59	48	55, 11	49, 24	66, 72	62, 64	Tidak Tercap ai	Dinas Pendidikan
Angka Partisipasi Sekolah SD	%	95, 83	92 ,3 9	96, 21	97, 99	98, 37	99, 43	98, 75	99, 81	99, 13	99, 68	10 0	99, 22	Tidak Tercap ai	Dinas Pendidikan
Angka Partisipasi Sekolah SMP	%	64, 63	64 ,9 1	65, 04	81, 28	81, 69	82, 53	82, 1	82, 94	82, 51	86, 53	10 0	88, 11	Tidak Tercap ai	Dinas Pendidikan
Angka Partisipasi Sekolah SMA	%	37, 3	51 ,3 9	38, 08	47, 87	48, 68	47, 49	49, 49	48, 34	50, 3	49, 16	10 0	62, 64	Tidak Tercap ai	Dinas Pendidikan
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,0 3	0, 4	0,0 3	0,8 9	0,0 3	0,4 4	0,0 3	0,4 4	0,0 3	0,9	0,0 2	0,9 6	Tercap ai	Dinas Pendidikan
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,0 7	0, 8	0,0 6	3,9 3	0,0 5	0,8	0,0 4	0,7 9	0,0 4	3,8 3	0,0 3	3,8 5	Tercap ai	Dinas Pendidikan
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK	%	0,2 8	1, 37	0,2 4	6	0,2	1,3 7	0,1 7	1,3 4	0,1 5	6,0 1	0,1 5	6,3 3	Tercap ai	Dinas Pendidikan
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	99, 55	96 ,9 8	99, 76	98, 53	99, 98	96, 98	10 0	97	10 0	98, 85	10 0	95, 64	Tidak Tercap ai	Dinas Pendidikan

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	98,29	97,53	98,4	99,35	99,98	97,53	100	97,55	100	94,05	100	88,78	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK	%	99,22	95,56	99,55	91,31	99,88	94,75	100	94,87	100	85,06	100	75,6	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	90,42	96,46	94,58	95,97	98,93	96,46	100	97,53	100	98	99,05	98,53	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK	%	73,02	75,8	76,27	67,52	79,67	75,8	83,21	79,34	86,92	76,56	79,56	77,31	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan
Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Unit	175	421	177	519	521	475	523	475	525	512	205	212	Tercapai	Dinas Pendidikan
Sekolah Pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Unit	87	97	87	223	250	250	270	250	290	304	105	114	Tercapai	Dinas Pendidikan
Sekolah Pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	Unit	21	21	21	21	21	24	21	24	21	64	74	68	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan

Rasio Ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	Rasio	127,05	124	127,05	122,56	127,05	186	127,05	186	127,05	120,5	95,25	94,12	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan
Kualifikasi Guru yang Memiliki Ijazah S1/D4	%	97,99	85,74	99,73	87,68	100	99,8	100	99,8	100	100	100	96,84	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan
Persentase Pendidikan Anak Usia Dini	%	TA D	TA D	TA D	49,16	50	63,55	55	68,55	60	84,66	100	81,92	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan

INDIKATOR	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	76,76	66,91	72,44	84,68
Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	97,07	96,52	96,9	98,38
Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)	4,32	7,02	6,1	7,85
Rerata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	50,41	54,98	61,14	60,63
Rerata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	37,18	41,94	49,79	54,2
Rerata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	61,07	65,83	68,83	69,17
Rerata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	61,07	65,83	62,06	61,93
Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	64,49	62	65,6	62,42
Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1	55,64	55,73	70,24	70,24
Indeks Iklim Keamanan SD	67,99	68,16	71,61	71,53
Indeks Iklim Kebinekaan SD	59,13	68,29	72,87	69,19
Indeks Inklusivitas SD	53,67	55,1	54,68	55,77

INDIKATOR	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
Indeks Iklim Keamanan SMP	67,99	66,84	69,81	68,44
Indeks Iklim Kebinekaan SMP	59,13	66,55	74,12	69,34
Indeks Inklusivitas SMP	53,67	56,38	57,41	55,92

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan, 2019-2024

2.1.4.2.1.2. Kesehatan

Capaian kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Seruyan tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.50. Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Seruyan
Tahun 2019-2024**

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Capaian	SOPD Penang- gung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	6,11	5,78	5,95	6,6	5,8	9,2	5,64	10,5	5,5	9,81	16,00	21,00	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
AKHB (Angka Kelangsungan Hidup Bayi)	Per 1.000 KH	19	994,22	19	993,4	994,2	990,8	994	989,5	993	TA D				Dinas Kesehatan
Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	132,53	257,15	131,2	131,2	129,8	246,4	128,57	174,89	127,28	163,56	125,00	126,16	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
Rasio posyandu per satuan balita	Per 100 Balita	6,83	7,86	6,57	6,57	6,31	8,27	6,07	1,27	5,83	1,75	5,90	2,00	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
Rasio puskesmas, poliklinik, puskesmas per satuan penduduk	Per 1.000	0,63	0,63	0,67	0,54	0,69	0,62	0,73	0,69	0,75	0,692	0,75	0,71	Tercapai	Dinas Kesehatan
Rasio Puskesmas per satuan penduduk	Per 1.000	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,06	0,08	0,06	0,072	0,07	0,08	Tercapai	Dinas Kesehatan
Rasio Poliklinik per satuan penduduk	Per 1.000	0,09	0,09	0,09	0,1	0,09	0,08	0,09	0,07	0,09	0,096	0,17	0,10	Tercapai	Dinas Kesehatan

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Rasio Pustu per satuan penduduk	Per 1.000	0,45	0,46	0,45	0,39	0,45	0,47	0,45	0,53	0,45	0,524	0,51	0,53	Tercapai	Dinas Kesehatan
Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit per satuan Penduduk	Per 1.000	0,62	0,63	0,72	0,97	0,98	1,05	1,08	1,35	1,19	1,33	1,20	1,28	Tercapai	Dinas Kesehatan
Rasio dokter per satuan penduduk	Per 100.000	0,26	0,112	0,26	0,2	0,26	0,43	0,26	0,49	0,26	39,1	0,27	36,28	Tercapai	Dinas Kesehatan
Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Per 100.000	400	3,6	400	6,62	9,64	0,43	12,66	4,48	15,68	592,29	15,70	510,48	Tercapai	Dinas Kesehatan
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100	18	100	29,9	35,4	51	43,07	35	50,74	TA D	100,00	75,00	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	71	67	72	28,45	73	84	74	71	75	TA D	100,00	75,00	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
Cakupan Desa/kelurahan Universal Children Immunization (UCI)	%	85	50	85	62,46	85	75,59	85	79,8	85	81	80,00	42,00	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapatkan perawatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Kesehatan

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA +	%	15	53,29	16	15,81	16	23,67	16	27,3	16	33,46	100,00	64,00	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Kesehatan
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	17,75	16,5	20,23	20,23	23,06	20,2	26,28	24,5	29,94	TA D	-	-	-	Dinas Kesehatan
Cakupan kunjungan bayi	%	75,99	61	78,94	29,48	82,01	91	85,19	80	88,5	TA D	95,00	82,00	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
Cakupan puskesmas	%	120	120	120	120	130	120	130	120	130	TA D	120,00	120,00	Tercapai	Dinas Kesehatan
Cakupan Puskesmas Pembantu	%	83	82	85	80	88	84	92	80	95	TA D				Dinas Kesehatan
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	%	100	75,31	100	62,55	100	83,81	100	79	100	87,8	100,00	61,00	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%	100	48,27	100	50,8	100	62,93	100	37	100	63,66	100,00	64,55	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	100	74,02	100	74,65	100	81,15	100	69	100	84,1	100,00	76,00	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	41,31	100	57,79	100	70,5	100	56	100	69,9	100,00	86,00	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	25,5	100	28,15	100	96,66	100	12	100	60,43	100,00	94,00	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	12,59	100	23,16	100	49,31	100	39,4	100	81,78	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Kesehatan
Persentase warga usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	23,21	100	28,89	100	45,23	100	18,5	100	32,63	100,00	60,10	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	%	100	36,47	100	100	100	22,67	100	17,4	100	65	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Kesehatan

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
standar															
Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	39,67	100	100	100	98,34	100	70,9	100	100	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Kesehatan
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	44,88	100	100	100	95,38	100	51,5	100	65,27	343,00	265,00	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
Persentase orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	%	100	25,67	100	12,64	100	17,03	100	39,74	100	52,4	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Kesehatan
Persentase orang dengan risiko teinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100	22	100	9,99	100	44,54	100	62,96	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Kesehatan

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Cakupan Desa/Kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	TA D	TA D	TA D	52	53	51	55	53	55	57	100,00	100,00	Tercapai	Dinas Kesehatan

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan, 2019-2024

2.1.4.2.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 51. Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Capaian Tahun 2024	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	49,76	49,76	45	45,68	47	66,28	47	33,56	49	49,22	6,6	5	Tidak Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Rasio Jaringan Irigasi	%	27,04	22,5	29,33	22,8	31,81	30,2	34,51	9,9	37,43	14,86	6,6	5	Tidak Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Persentase Kawasan Perumahan yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4	%	TAD	73,4	TAD	62,76	49,72	49,72	34,44	29,99	18,3	54,59	15	0,66	Tidak Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator or Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Capaian Tahun 2024	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Rasio bangun an ber-IMB per satuan bangun an	%	TAD	13,23	TAD	14,05	15,2	14,44	17,29	3,63	19,66	41,29	20	20	Terca pai	Dinas Pekerja an Umum dan Penata an Ruang
Rasio tempat pemaka man umum per satuan pendud uk	%	TAD	75,12	TAD	75,12	77	77	79	61,4	81	12,04	81	12,04	Tidak Terca pai	Dinas Pekerja an Umum dan Penata an Ruang
Rasio Areal Kawasa n Kumuh	%	TAD	0,9	TAD	1,9	3,4	2,72	5,88	0,04	9,34	TA D	TA D	TA D	Tidak Terca pai	Dinas Pekerja an Umum dan Penata an Ruang
Persentase Panjang Jaringa n Jalan Kabupa ten dalam Kondisi Mantap	%	14,09	17,98	18,32	20,27	23,82	21,54	30,96	22,6	40,25	24,57	49	37,4	Tidak Terca pai	Dinas Pekerja an Umum dan Penata an Ruang
Persentase SDM Teramp il Konstruksi Bersertif ikat	%	65	65	65	65	75	18,86	85	62	100	71,5	35,94	35,04	Terca pai	Dinas Pekerja an Umum dan Penata an Ruang
Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/H GB	%	2,33	2,33	2,33	2,33	3,75	2,4	4,8	4,62	5,9	4,62	TA D	TA D	Tidak Terca pai	Dinas Pekerja an Umum dan Penata an Ruang
Persentase Rumah Tinggal Bersani tasi	%	45,24	57,32	47,22	54,9	57,4	58,01	59,9	51,38	62,4	67,7	73,49	70,31	Tidak Terca pai	Dinas Pekerja an Umum dan Penata an Ruang

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Capaian Tahun 2024	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Persentase Sistem Air Limbah yang terkelola dengan baik	%	57,32	57,32	54,9	54,9	57,4	58,01	59,9	51,38	62,4	67,7	73,49	70,31	Tidak Tercaipai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	%	107,24	29,09	107,24	30,29	33,98	32,28	35,78	117	37,69	4,76	37,69	4,76	Tidak Tercaipai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	%	TAD	36,75	TAD	48,99	61,24	48,99	73,49	73	85,74	TAD	85,74	100	Tercaipai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Ketaatan Terhadap RTRW	%	TAD	12,36	TAD	13,91	15,45	17,99	16,2	91,48	17,01	91,48	25	25	Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan, 2019-2024

2.1.4.2.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.52. Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024

Indikator Kinerja	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Rasio permukiman layak huni	%	5,61	48,21	55,07	54,68	57,57	57,1	60,07	65,4	58,68	58,68	Tercaipai	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan

Indikator Kinerja	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Rasio Rumah Layak Huni	%	46,13	52,57	52,91	66,03	53,21	63	55,71	72,44	57,5	60	Tercaipai	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	TAD	TAD	80	85	90	87	100	100	-	-	Tercaipai	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	TAD	TAD	20	10	10	10	10	20	19,58	19,58	Tercaipai	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	TAD	TAD	80	20	90	90	100	100	12,4	12,4	Tercaipai	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	%	TAD	TAD	30	20	20	20	10	10	12,24	12,24	Tercaipai	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	TAD	TAD	100	99,61	100	100	100	100	81,97	81,97	Tercaipai	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
Persentase permukiman yang tertata	%	TAD	TAD	80	TAD	85	85	85	85	86,18	86,18	Tercaipai	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Seruyan, 2019-2024

2.1.4.2.1.5. Kententeraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat

Iklim ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang kondusif dalam sebuah kota menjadi salah satu faktor pendukung penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Pemeliharaan situasi wilayah yang kondusif ini telah diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang penyelenggaraannya diserahkan ke pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Peraturan tersebut menyatakan bahwa tujuan pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah untuk menegakan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan kepada masyarakat. Selain dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dilaksanakan pula oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.53. Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Rasio jumlah Linmas per 10.000 Penduduk	Rasio	22,51	47,93	20,9	48,32	49,38	55,86	50,76	58,41	52,14	55,82	52,14	55,97	Ter capai	Satpol PP
Tingkat Penyelesaian	%	TAD	TAD	TAD	TAD	80	100	83	100	85	100	83	100	Ter capai	Satpol PP

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Pelanggan K3															
Penegakan Perda dan Perkada	%	TAD	TAD	TAD	TAD	100	100	100	100	100	100	100	100	Ter cap ai	Satpol PP
Perse ntase penangan an bencana yang ditan gani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	100	Ter cap ai	Badan Penang gulang an Bencan a Daerah
Perse ntase penangan an keba karan huta n dan lahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Ter cap ai	Badan Penang gulang an Bencan a Daerah
Perse ntase penu runa n titik hotsp ot Karh utla	%	100	738	100	95	100	27,85	100	40	100	1,004	100	- 81,4	Ter cap ai	Badan Penang gulang an Bencan a Daerah
Perse ntase pelay anan kepa da masy araka t yang menj adi korba n dan terda mpak keba karan dan non keba karan	%	TAD	TAD	TAD	TAD	100	100	100	100	100	100	100	100	Ter cap ai	Dinas Pemas am Kebaka ran dan Penyelamatan
Caku pan pelay anan benca	%	TAD	TAD	TAD	TAD	100	100	100	100	100	100	100	100	Ter cap ai	Dinas Pemas am Kebaka ran

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
na keba karan kabu paten / kota															dan Penyelamatan
Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) daerah layanan wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	T A D	TA D	TA D	TA D	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan

Sumber: Satpol PP dan BPBD Kabupaten Seruyan, 2019-2024

2.1.4.2.1.6.Sosial

Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.54. Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Unit	8	4	8	4	8	4	8	9	8	6	8	8	tercapai	Dinas Sosial
Persentase Pemberdayaan Sosial	%	TA D	95	TA D	95	98	1	98	100	98	100	100	89,11	tidak tercapai	Dinas Sosial

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	TA D	95	TA D	95	98	0	98	0	98	0	Tidak ada indikator	Tidak ada indikator	Tidak ada indikator	Dinas Sosial
Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	%	TA D	98	TA D	98	98	1	98	100	98	94,45	100	95,7	Tidak Tercapai	Dinas Sosial
Persentase PPKS yang tertangan	%	TA D	98	TA D	98	98	1	98	100	98	96,48	100	95,76	Tidak Tercapai	Dinas Sosial
Persentase PPKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	TA D	98	TA D	98	98	1	98	100	98	94,45	100	95,7	Tidak Tercapai	Dinas Sosial
Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	TA D	95	TA D	95	95	1	95	100	95	100	100	95	Tidak Tercapai	Dinas Sosial

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	TA D	97	TA D	97	97	1	97	100	97	87	100	100	tercapai	Dinas Sosial
Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	TA D	97	TA D	97	97	0	97	0	97	100	100	27,44	Tidak Tercapai	Dinas Sosial

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Seruyan, 2019-2024

2.1.4.2.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.1.4.2.2.1. Ketenagakerjaan

Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor penting bagi pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran. Oleh karena itu upaya pembangunan diarahkan kepada perluasan lapangan pekerjaan sehingga masyarakat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan daerah.

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Seruyan pada tahun 2019-2024 terus mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Seruyan dengan semakin banyaknya tenaga kerja yang terserap dalam kegiatan perekonomian. Penurunan angka pengangguran ini seharusnya diikuti oleh meningkatnya angka partisipasi tenaga kerja. Namun yang terjadi di Kabupaten Seruyan, tingkat partisipasi angkatan kerja nilainya terus mengalami perubahan yang fluktuatif.

Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Seruyan
Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah.

**Tabel 2.55. Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten
Seruyan Tahun 2019-2024**

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,33	4,45	4,17	4,3	3,99	4,25	3,79	3,96	3,66	3,61	3,86	3,47	Tercapai	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	76,92	71,09	79,04	65,04	81,21	71,46	85,74	72,1	85,74	67,66	-	70,04	Tidak Tercapai	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun	Kasus	14	339	14	133	13	133	13	135	12	125	0	11	Tercapai	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	TA D	TA D	TA D	TA D	85	0,019	85	0,23	85	83,33	-	100	Tidak Tercapai	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	TA D	TA D	TA D	TA D	50	0,36	55	12,56	60	10,79	-	14,44	Tidak Tercapai	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Persentase kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	%	TA D	TA D	TA D	TA D	85	100	85	100	85	100	100	100	Tercapai	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Persentase angka sengketa pengusaha-pekerja pertahun	%	TA D	TA D	TA D	TA D	21,31	58,11	21,31	45,76	20	22,2	0	12,69	Tidak Tercapai	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Persentase perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	TA D	TA D	TA D	TA D	85	100	85	100	85	0	-	0	Tercapai	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek	%	TA D	TA D	TA D	TA D	100	88,3	100	82	100	84,12	100	83,72	Tidak Tercapai	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Persentase keselamatan dan perlindungan	%	TA D	TA D	TA D	TA D	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

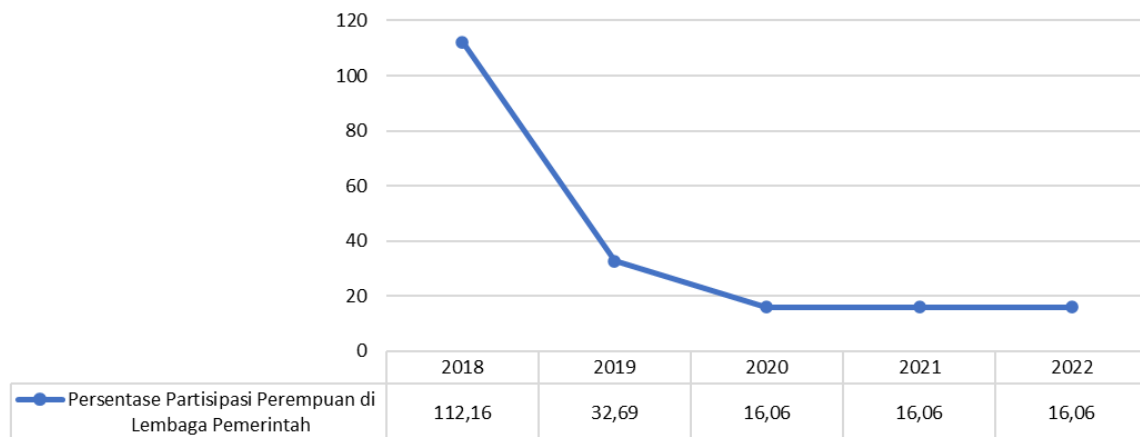
Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan, 2019-2024

2.1.4.2.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Manifestasi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Seruyan mencakup peningkatan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender. Realisasi pelaksanaannya dapat dilihat dari besarnya upaya peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, salah satunya pelibatan perempuan dalam lembaga pemerintah.

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Pada tahun 2018, persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan di Kabupaten Seruyan sebesar 112,16%. Kemudian pada tahun 2019, mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi 32,69% dan pada tahun 2020 nilainya

kembali turun menjadi 16,06%. Nilai tersebut bertahan hingga akhir tahun 2022.



Gambar 2.65. Perkembangan Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas DP3AP2KB Kabupaten Seruyan, 2018-2022

Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.56. Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seruyan Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024		Capaian Tahun 2024	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Jumlah KDRT	Kasus	TAD	1	0	100	0	3	0	TAD	5	2	Tidak Tercapai	DP3AP2KB
Selesai Tindak Pidana KDRT	Kasus	TAD	1	0	100	0	1	0	TAD	5	2	Tidak Tercapai	DP3AP2KB
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	%	TAD	0,96	1,125	0,96	0,02	0,2	0,02	8	10	9	Tidak Tercapai	DP3AP2KB
Proporsi kursi yang diduduki perempuan	%	TAD	12	12	12	12	TAD	12	TAD	12	3	Tidak Tercapai	DP3AP2KB

Indikator Kinerja	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024		Capaian Tahun 2024	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
di DPR													
Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	TAD	0,38	0	0	0	TAD	0	0	0	0	Tidak Tercapai	DP3AP2KB
Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	TAD	0,96	1,125	0,96	0,02	0,2	0,02	3	15	11	Tidak Tercapai	DP3AP2KB

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Seruyan, 2019-2024

2.1.4.2.2.3. Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama manusia yang harus dipenuhi setiap saat. setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996). Pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa sehingga ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidak-stabilan ekonomi, gejolak sosial dan politik. Oleh karena itu ketahanan pangan suatu wilayah akan menjadi sangat penting untuk stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional.

Ketahanan pangan, tidak lepas dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dimana dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Terdapat tiga komponen utama ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Ketersediaan pangan adalah kemampuan memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Akses pangan adalah kemampuan memiliki sumber daya, secara ekonomi maupun fisik, untuk mendapatkan bahan pangan bernutrisi. Sementara itu

pemanfaatan pangan adalah kemampuan dalam memanfaatkan bahan pangan dengan benar dan tepat secara proporsional.

Capaian Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.57. Capaian Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Seruyan
Tahun 2019-2024**

Indikator Kinerja	Satuan	2020		2021		2022		2023		2024		Capaian Tahun 2024	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Ketersediaan Pangan Utama	%	37,2	36,31	38,32	80,34	39,47	80	40,66	38,41	63,59	84,73	Terpenuhi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	TAD	TAD	100	36,02	100	37,32	100	40	100	65	Tidak Terpenuhi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan, 2019-2024

2.1.4.2.2.4. Pertanahan

Pertanahan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan kewenangan Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dalam urusan bidang pertanahan adalah:

- Pemberian izin lokasi dalam satu daerah kabupaten/kota.
- Menyelesaikan sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten/kota.
- Penyelesaian masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah.

- d) Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* dalam daerah kabupaten/kota.
- e) Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota.
- f) Penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah kabupaten/kota.
- g) Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten/kota.
- h) Penerbitan izin membuka tanah.
- i) Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten/kota.

Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.58. Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Persentase pemohon sertifikat yang telah diselesaikan menurut pendaftaran pertama kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercaipai	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Penyelesaian kasus tanah negara	%	TA D	TA D	TA D	TA D	85	85	90	90	100	100	100	100	Tercaipai	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Penyelesaian izin lokasi	%	TA D	TA D	TA D	TA D	80	80	90	90	100	100	100	100	Tercaipai	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Persentase luas lahan bersertifikat	%	TA D	TA D	TA D	TA D	80	80	90	75	100	100	5,2	5,1	Terpenuhi	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Seruyan, 2019-2024

2.1.4.2.2.5. Lingkungan Hidup

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pembagian urusan pemerintah bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/ kota mencakup sub urusan perencanaan lingkungan hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup keanekaragaman Hayati (Kehati), Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup dan persampahan.

Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.59. Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Persentase Penanganan Sampah	%	19	51	21,84	51	25,11	70	28,86	12,28	33,18	24	20	18,65	Tidak Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Persentase Rumah Tinggal Bersantiasi	%	45,24	57,32	47,22	54,9	57,4	58,01	59,9	51,38	62,4	67,7	73,49	70,31	Tidak Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Persentase timbunan sampah yang ditangani	%	TA D	8,96	TA D	8,76	10	0,004	11	12,29	12	0,27	12	0,87	Tidak Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Operasional TPA/TPST/SPADi Kabupaten	Buah	TA D	1	TA D	1	2	1	2	1	3	1	2	1	Tidak Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Persentase Cakupan Area Pelayanan Persampahan	%	TA D	4	TA D	4	5	4	5	20	6	20	6	8	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	TA D	54,98	TA D	56,76	77,4	72,69	79,4	68,71	81,4	66,53	71,07	71,54	Tidak Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	%	TA D	50	TA D	50	50,2	62,29	50,3	48	50,4	56,67	59,7	51,67	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	%	TA D	83,72	TA D	84,56	84,66	84,33	84,76	87,8	84,86	91,89	81,3	93,05	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Terfasilitasi pendampingan pengakuan MHA	Lembaga	TA D	TA D	TA D	TA D	1	1	1	TA D	1	TA D	1	1	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Penetapan hak MHA	Ketetapan	TA D	TA D	TA D	TA D	1	1	1	TA D	1	TA D	1	1	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Indikat or Kinerja	Satu an	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Capaian	SOPD Penan ggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	Lembaga	TA D	TA D	TA D	TA D	TA D	TA D	1	TA D	1	TA D	1	1	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	Lembaga	TA D	TA D	TA D	TA D	TA D	TA D	1	1	1	TA D	1	1	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	Lembaga	TA D	TA D	TA D	TA D	TA D	TA D	1	TA D	1	TA D	1	1	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Lembaga	TA D	TA D	TA D	TA D	TA D	TA D	1	1	1	8	5	5	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada/Tidak Ada	TA D	Tidak Ada	TA D	Tidak Ada	Tidak Ada	TA D	Ada	TA D	Ada	TA D	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Persentase berkurangnya kerusakan lingkungan hidup	%	TA D	TA D	TA D	TA D	76	TA D	76	TA D	77	TA D	TA D	TA D	TAD	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Persentase Terintegrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota	Dokumen	TA D	TA D	TA D	TA D	1	TA D	1	Tidak Ada	1	TA D	1	1	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	TA D	14	TA D	1	25	8	30	24	30	100	12	17	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan, 2019-2024

2.1.4.2.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sistem administrasi menyangkut seluruh masalah kependudukan, yang terdiri atas pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, serta pengelolaan data informasi kependudukan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan dasar kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola sistem administrasi kependudukan, yang mencakup: (1) pelaksanaan pelayanan; (2) pengelolaan pengaduan masyarakat; (3) pengelolaan informasi; (4) pengawasan internal; (5) penyuluhan kepada masyarakat; (6) pelayanan konsultasi; serta (7) pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.60. Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	94	93,66	95	95,27	96	95,11	97	95,11	98	98,59				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Rasio Bayi Berakte Kelahiran	%	96	97,77	96,5	99,73	99,81	100	99,83	99,09	99,85	99,72				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Rasio Pasangan Berakte Nikah	%	49	38,15	52	37,16	55	63,28	58	59,6	61	66,07				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/ Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	TA D	93,66	TA D	95,27	96	95,11	97	95,11	98	98,59				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase Penerbitan Akta Kelahiran	%	TA D	97,77	TA D	99,73	99,81	100	99,83	99,09	99,85	100				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kepemilikan akta kelahiran per	Per 1000	610	576,182	670	599,89	623,6	624,32	647,31	628,08	671,01	659,35				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator or Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
1000 penduduk															tan Sipil
Persentase perekaman KTP elektronik	Persen											98,76	97,78 %	Tercapai	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen											52,53 %	60,73 %	Tercapai	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase kepemilikan akta kelahiran	Persen											96,12 %	92,97 %	Tercapai	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase kepemilikan akta Perkawinan	Persen											100 %	100 %	Tercapai	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase kepemilikan akta perceraian	Persen											100	100 %	Tercapai	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase kepemilikan akta kematian	Persen											100 %	100 %	Tercapai	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja	Persen											19,51	20,69 %	Tercapai	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
sama															
Persentase indeks kepuasan masyarakat	Persen											94,80	94,81 %	Tercapai	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, 2019-2024

2.1.4.2.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya pembangunan untuk meningkatkan kapasitas dan peran serta masyarakat mewujudkan kemandirian dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan. Kemandirian dicerminkan dari meningkatnya kapasitas dan kualitas masyarakat dalam tata kelola pembangunan di tingkat kelurahan/desa, meningkatnya kualitas sumberdaya manusia juga diimbangi dengan meningkatnya kapasitas dan kualitas kelembagaan-kelembagaan kemasyarakatan di tingkat kelurahan. Dengan meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM dan kelembagaan, maka dinamika pembangunan di tingkat kelurahan semakin meningkat dan tingkat kesejahteraan masyarakat kelurahan dapat terwujud.

Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.61. Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Rata-rata jumlah kelompok	Kelompok	177	97	274	97	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Indika- tor Kinerja	Satu- an	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Capaian	SOPD Penang- gung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
ok binaan PKK															akat dan Desa
Persentase PKK aktif	%	10 0	10 0	10 0	10 0	10 0	10 0	10 0	10 0	10 0	10 0	10 0	10 0	Tercapai	Dinas Pember- dayaan Masyar- akat dan Desa
Persentase Posyan- du aktif	%	10 0	10 0	10 0	10 0	10 0	10 0	10 0	10 0	10 0	10 0	10 0	10 0	Tercapai	Dinas Pember- dayaan Masyar- akat dan Desa
Persentase sarana prasara- na perkant- oran pemerin- tahan desa yang baik	%	TA D	70	TA D	70	78 ,8 3	60	86 ,6 5	70 ,1	96 ,6 9	70 ,1			Tidak Tercapai	Dinas Pember- dayaan Masyar- akat dan Desa
Persentase LPM Berpres- tasi	%	TA D	TA D	TA D	TA D	10 ,3	8	20 ,6 1	0	30 ,9 1	0			Tidak Tercapai	Dinas Pember- dayaan Masyar- akat dan Desa
Rata- rata jumlah kelomp- ok binaan lembag	Angk- a	TA D	59 ,3 7	TA D	59 ,3 7	71 ,8 7	60	84 ,7 5	28 ,8 6	10 0	28 ,8 6			Tidak Tercapai	Dinas Pember- dayaan Masyar- akat dan Desa

Indika/ tor Kinerja	Satu an	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Capaian	SOPD Penang gung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
a pember dayaan masyar akat (LPM)															
Persent ase LSM Aktif	%	TA D	5, 54	TA D	5, 54	10 ,3	8	20 ,6 1	4, 12	30 ,9 1	4, 12			Tidak Tercapa i	Dinas Pember dayaan Masyar akat dan Desa
Persent ase Desa Berstat us Swasem bada terhada p total desa	%											6	5. 15 %	Tidak Tercapa i	Dinas Pember dayaan Masyar akat dan Desa
Persent ase peningk atan status desa mandiri	%											10 ,3 0 %	21 .6 4 %	Tercapa i	Dinas Pember dayaan Masyar akat dan Desa

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan, 2019-2024

2.1.4.2.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan pengendalian penduduk tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tiga sub-urusan/bidang terkait pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Seruyan adalah Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.62. Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Capaian Tahun 2024	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Rata-rata jumlah anak per keluarga	Anak	2	2	2	2	2	1,3	2	2,3	2	TA D	2,1	2,21	Terca pai	DP3AP2 KB
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	TA D	0,04	TA D	0,02	1,22	0,02	1,19	1,48	1,16	TA D	1,6	1,48	Terca pai	DP3AP2 KB
Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD dan APBDes	%	TA D	1,5	TA D	1,5	1,5	63	1,5	74,38	1,5	100	100	12	Terca pai	DP3AP2 KB
Persentase PKB/PLKB yang didayagunakan PD KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Bidang Pengendalian Penduduk	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Terca pai	DP3AP2 KB

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Capaian Tahun 2024	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Persentase Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk memenuhi Permintaan masyarakat	%	TA D	10 0	TA D	10 0	10 0	96	10 0	100	10 0	10 0	10 0	10 0	Terca pai	DP3AP2 KB
Persentase Kelompok Kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	TA D	21	TA D	28	29	10 0	30	180	32	10 0	10 0	83	Tidak Terca pai	DP3AP2 KB
Persentase PUS peserta KB anggota usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPKKS) yang ber KB mandiri	%	TA D	10, 2	TA D	11, 6	11, 6	10 0	12	100	15	10 0	10 0	84	Tidak Terca pai	DP3AP2 KB
Persentase Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	TA D	56	TA D	56	56	10 0	60	100	62	80	10 0	88	Tidak Terca pai	DP3AP2 KB
Persentase Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	TA D	41	TA D	41	41	10 0	41	100	41	10 0	95	88	Tidak Terca pai	DP3AP2 KB
Persentase Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	TA D	20	TA D	20	25	10 0	25	100	25	78	10 0	80	Tidak Terca pai	DP3AP2 KB

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Seruyan, 2019-2024

2.1.4.2.2.9. Perhubungan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan kewenangan urusan perhubungan untuk kabupaten dan kota adalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), pelayaran, penerbangan dan perkeretaapian. Untuk meningkatkan mobilitas atau gerak barang, manusia, dan informasi dibutuhkan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai guna memperpendek waktu untuk menempuh jarak antar suatu daerah dengan daerah lainnya. Sarana dan prasarana tersebut harus memadai demi mencapai tujuan akhir yaitu efisiensi ekonomi. Perhubungan tidak hanya dilakukan dalam satu wilayah di suatu daerah saja, tetapi juga antar daerah, antar pulau dan antar negara. Terdapat tiga macam perhubungan, yaitu perhubungan darat, perhubungan laut dan perhubungan udara.

Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.63. Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Jumlah Pelabuhan Laut/Dermaga/Udara/Terminal Bus	Unit	81	96	82	96	100	100	102	100	104	100	102	102	Tidak Tercapai	Dinas Perhubungan
Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	Orang	3.042	3.110	3.236	3.305	3.442	3.685	3.662	3.691	3.895	3.902	3.750	3.784	Tercapai	Dinas Perhubungan
Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	Ton	29.362	6.106	34.998	6.327	6.546	6.954	6.765	6.842	6.984	6.986	6.896	6.905	Tercapai	Dinas Perhubungan
Jumlah uji KIR angkutan umum	Unit	1.460	1.130	1.469	1.362	1.478	1.669	1.486	1.694	1.495	1.497	1.700	1.703	Tercapai	Dinas Perhubungan
Persentase Layanan Angkutan Darat	%	0,71	0,62	0,87	0,63	1,07	0,86	1,31	0,66	1,61	0,85	0,7	0,71	Tidak Tercapai	Dinas Perhubungan
Pemasangan Rambu-	Unit	208	214	207	247	250	247	266	247	275	277	300	349	Tercapai	Dinas Perhub

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Rambu															ungan
Rasio Izin Trayek Lintas Daerah Kabupaten dalam Satu Kabupaten	%	3	3	3	3	5	3	8	3	9	3	4	3	Tidak Tercapai	Dinas Perhubungan
Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	40,2	41	29,12	47	5	39,1	5	39,28	5	39,46	40,2	40,24	Tercapai	Dinas Perhubungan
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	0,05	0,034	0,05	0,032	0,05	0,035	0,05	0,028	0,06	0,032	0,03	0,031	Tidak Tercapai	Dinas Perhubungan

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan, 2019-2024

2.1.4.2.2.10. Komunikasi dan Informatika

Perkembangan suatu daerah antara lain dapat dilihat dari sarana dan prasarana telekomunikasi yang tersedia. Salah satunya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien kepada masyarakat dalam program aplikasi informatika, layanan akses telekomunikasi sangat diperlukan di semua sektor pemerintah, swasta maupun masyarakat. Jumlah operator jaringan seluler di Kabupaten Seruyan sebanyak 3 operator, sedang operator jaringan telepon stationer sebanyak 1 operator.

Jaringan komunikasi seluler telah tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Seruyan. Untuk sebaran jaringan seluler 4G saat ini hanya ada di 4 kecamatan yaitu Kecamatan Seruyan Hilir, Kecamatan Hanau, Kecamatan Danau Sembuluh, dan Kecamatan Seruyan Raya. Sedangkan sebaran jaringan 2G dan 3G ada pada Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kecamatan Danau Seluluk, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Seruyan Raya, Kecamatan Seruyan Hulu, dan Kecamatan Suling Tambun. Guna pemeratakan jangkauan jaringan seluler di Kabupaten Seruyan dan meminimalisir Desa Blank Spot, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Seruyan telah bekerjasama dengan

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Indonesia (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.64. Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024**

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Jumlah Surat Kabar Nasional	Unit	20	11	20	14	16	11	18	11	20	4	20	4	Tidak Terpenuhi	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Jumlah Surat Kabar Lokal	Unit	34	11	35	13	15	14	17	5	19	7	19	7	Tidak Terpenuhi	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Kelompok	53	53	53	53	53	53	53	53	53	44	53	44	Tidak Terpenuhi	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Persentase Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	43	43	54	54	66	85	70	68	70	77	72	78	Terpenuhi	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Proporsi Rumah Tangga Berakses Internet	%	60	60	65	65	65	80	80	61	80	62,83	70	72,1	Terpenuhi	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan, 2019-2024

2.1.4.2.2.11. Koperasi dan UMKM

Koperasi adalah salah satu bentuk lembaga profit sosial yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya melalui berbagai bentuk usaha. Selain itu koperasi merupakan salah satu usaha pemberdayaan ekonomi rakyat, menurunkan kemiskinan dan memperluas lapangan usaha. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam 2 (dua) tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Semakin banyak koperasi yang aktif menunjukkan akan semakin berdayanya ekonomi berbasis kerakyatan, menurunnya kemiskinan dan menurunnya jumlah pengangguran dan semakin besar pelayanan penunjang yang dimiliki daerah dalam menggerakkan perekonomian melalui koperasi.

Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.65. Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	99	99,5	99	99,5	90	94,17	90	90	85	99	-	-	Tercapai	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Persentase koperasi aktif	%	82,19	86,81	82,56	86,81	87,17	87,59	87,53	87,5	87,89	88,44	-	89,91	Tercapai	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Indikator or Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Persentase UKM Non BPR/LK M Aktif	%	86,95	86,95	85,21	83,3	82,46	80,84	81,72	86	79,98	81,72	79,98	81,72	Tercapai	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Persentase BPR/LK M Aktif	%	13,05	13,05	14,79	16,7	16,94	16,94	18,28	14	20,02	18,28	20,02	18,28	Tidak Tercapai	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	32,56	31,38	32,87	32,8	33,18	33,18	33,48	32,04	33,8	31,29	34,18	31,58	Tidak tercapai	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Pertumbuhan industri rumah tangga	%	2,29	2,29	2,58	2,89	2,95	-4,49	3,16	1,76	3,45	5,78	3,83	9,7	Tercapai	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Persentase Usaha Kecil Mikro yang berdaya saing	%	1,94	1,94	2,94	1,94	3,94	TA D	4,94	4	5,94	1	-	-		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Seruyan, 2019-2024

2.1.4.2.2.12. Penanaman Modal

Pemerintah Kabupaten Seruyan memiliki wewenang untuk melakukan aktivitas penanaman modal dengan mengikuti peraturan yang berlaku. Adapun wewenang tersebut adalah (1) merumuskan kebijakan

untuk mengembangkan penanaman modal, (2) melakukan koordinasi dalam rangka kegiatan penanaman modal, (3) menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah dalam penanaman modal, (4) mempromosikan kegiatan penanaman modal dan melakukan kerjasama penanaman modal, (5) mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis untuk mengendalikan pelaksanaan penanaman modal di daerah, serta (6) melaksanakan kegiatan pelayanan penanaman modal, yaitu memberikan izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah, melakukan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah.

Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.66. Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Nilai investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA)	%	72	57,69	75	57,6	80	88	85	62	90	92	Tercapai	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTUP
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/ PMA)	Investor	44	53	44	41	44	87	44	66	45	73	Tercapai	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTUP
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA)	Rupiah	706.429.000.000	458.224.500.000	628.571.428.570	835.499.500.000	1.071.428.570	1.119.292.816.159	592.812.000.000	522.445.950.000	582.741.960.000	900.648.430.000	Tercapai	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTUP
Kenaikan/ Penurunan Nilai	Rupiah	353.214.500.000	256.289.590.000	314.285.714.285	861.783.296.000	535.741.285.700	928.304.283.995	535.714.285.700	552.662.700.000	368.441.800.000	648.749.500.000	Tidak Tercapai	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Realisasi PMDN													TERPADU SATU PINTUP

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan, 2019-2024

2.1.4.2.2.13. Kepemudaan dan Olahraga

Banyaknya jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Semakin banyaknya jumlah organisasi pemuda, menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah dalam memberdayakan pemuda sebagai salah satu aset bangsa.

Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.67. Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Presentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif	%	68	70	83	60	70	86	80	86	90	89	89	89	Terca pai	Dinas Kepemudaa n, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
Cakupa n Pembinaan Olahraga	%	20	62,5	21	92	94	92	96	92	98	96	96	96	Terca pai	Dinas Kepemudaa n, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
Jumlah Atlet Berprestasi	Jum lah	37	32	41	32	37	12	42	31	47	66	7	7	Terca pai	Dinas Kepemudaa n, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
Jumlah Prestasi Olahraga	Jum lah	10	11	12	0	11	2	13	8	15	13	3	3	Terca pai	Dinas Kepemudaa n, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan, 2019-2024

2.1.4.2.2.14. Statistik

Terkait dengan statistik Kabupaten Seruyan, acuan yang digunakan adalah Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkrue Bidang Komunikasi dan Informatika. Adapun tugas pokok pemerintah daerah dalam Urusan Statistik adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang statistik serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Sementara itu, fungsi pemerintah daerah dalam urusan statistik adalah (1) melaksanakan kebijakan di bidang statistik, dan (2) membangun metadata statistik sektoral berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang statistik.

Capaian Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.68. Capaian Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Seruyan
Tahun 2019-2024**

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Terpenuhi	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Buku PDRB Kabupaten	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Terpenuhi	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	Ada / Tidak Ada	TA	TA	TA	TA	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Terpenuhi	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan,
2019-2024

2.1.4.2.2.15. Persandian

Urusan persandian dalam penyediaan layanan informasi pemerintah daerah berbasis elektronik dikelola keamanan informasi dan jaringan komunikasi sandi. Capaian Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.69. Capaian Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Seruyan
Tahun 2019-2024**

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	%	TA D	TA D	TA D	TA D	20	10	20	10	20	20	20	20	Tercapai	Dinas Komunikasi, Informatika , Statistik dan Persandian

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan,
2019-2024

2.1.4.2.2.16. Kebudayaan

Pelestarian cagar budaya merupakan aspek yang penting dalam pembangunan daerah dan telah diatur dalam undang-undang. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam hal kepemilikan, penguasaan, pengalihan, pemberian kompensasi atau insentif, pembentukan tim ahli cagar budaya, pendaftaran, penetapan, penghapusan, pengelolaan dan pemeliharaan cagar budaya pelestarian, perlindungan, penyelamatan, pengembangan, penelitian, revitalisasi,

pemanfaatan, perbanyak benda cagar budaya. Dengan kata lain, Pemerintah Daerah dilindungi undang-undang untuk melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu dalam upaya pelestarian cagar budaya. Pelestarian cagar budaya dilakukan dengan tujuan memelihara warisan budaya bangsa yang mengangkat martabat dan memperkuat kepribadian bangsa, sekaligus mempromosikan warisan budaya tersebut yang pada akhirnya juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.70. Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Jumlah penyelenggaraan festival seni budaya daerah	Jumlah	2	2	2	0	2	0	3	1	4	1	2	2	Tidak Tercapai	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni Budaya	Jumlah	2	2	2	2	3	2	4	2	5	2	2	2	Tidak Tercapai	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	2	2 4	4	2 4	3 0	3 5	3 5	3 5	4 0	4 0	4 3	4 3	Tercapai	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan, 2019-2024

2.1.4.2.2.17. Perpustakaan

Kinerja pembangunan urusan perpustakaan menurut Lampiran 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu jumlah pengunjung perpustakaan per tahun, koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah, jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun, dan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah, jumlah koleksi judul buku perpustakaan, dan jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan perpustakaan untuk Pemerintah Daerah adalah pembinaan perpustakaan, dengan lingkup pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota, pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota. Kemudian pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno yang meliputi pelestarian naskah kuno milik daerah kabupaten/kota, dan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.71. Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Jumlah pengunjung pada Perpustakaan Umum Daerah (dihapus) ganti Persentase Sesuai Rumus PMDN	Orang	11.018	11.784	11.657	7.855	7.900	4.929	8.500	4.929	8.165	9.385	8.700	15.533	Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipanan
Persentase Pengunjung Perpustakaan per Tahun	%	TA D	9,14	TA D	5,98	37	3,53	37,25	3,77	37,5	7,22	6,30	11,25	Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipanan

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul	TA D	64.582	TA D	71.923	72,3	71.923	72,6	72.365	73	73.608	73.500	12.880	Tidak Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Jumlah Perpustakaan Umum Daerah dan Perpustakaan Desa	Unit	45	1 PUD dan 45 PD	45	1 PUD dan 44 PD	1 PUD dan 45 PD	1 PUD dan 49 PD	1 PUD dan 45 PD	1 PUD dan 49 PD	1 PUD dan 45 PD	1 PUD dan 49 PD	1 PUD dan 50 PD	1 PUD dan 51 PD	Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Persentase Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah	%	41,08	35,27	41,08	35,25	37	35,31	37,25	0	37,5	36,5	37,75	36,54	Tidak Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan, 2019-2024

2.1.4.2.2.18. Kearsipan

Arsip mempunyai fungsi sebagai pusat ingatan, sumber informasi dan alat pengawasan yang sangat diperlukan dalam setiap organisasi publik dalam rangka kegiatan perencanaan, penganalisaan, pengembangan, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, pembuatan laporan, akuntabilitas suatu kegiatan. Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan selalu ada kaitannya dengan masalah arsip. Fungsi arsip aktif harus dapat memberikan dampak positif bagi keterbukaan informasi pada pelayanan publik seiring dengan penciptaan aparatur yang bersih dan berwibawa. Arsip mempunyai kontribusi dalam proses penyajian informasi bagi pimpinan untuk membuat keputusan dan merumuskan kebijakan. Fungsi kearsipan sebagai proses kegiatan pengaturan arsip mulai dari penciptaan, penerimaan, pencatatan, dan penyimpanan. Proses kearsipan menggunakan sistem tertentu dalam penyusunan, pemeliharaan arsip agar dapat ditemukan kembali dengan cepat dan tepat serta untuk pemusnahan arsip berdasarkan kriteria tertentu.

Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.72. Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Seruyan
Tahun 2019-2024**

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Capaian Tahun 2024	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Pengelolaan Arsip Secara Baku	%	25	50	25	56	62	100	66	100	72	100	100	100	Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Persentase Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	%	2	0	2	300	40	47,61	42,86	75	62,5	73,2	80	80	Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan, 2019-2024

2.1.4.2.3. Layanan Urusan Pilihan

2.1.4.2.3.1. Pariwisata

Urusan pariwisata diatur dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam pasal 11, dinyatakan bahwa pemerintahan memiliki kewenangan dalam urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Sebagaimana tercantum dalam pasal 12, urusan pariwisata masuk dalam urusan pemerintahan pilihan. Dari payung hukum ini, penyelenggaraan Urusan Pariwisata mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata. Sesuai dengan pasal 5 Undang Undang Nomor 9 Tahun 2009, kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip yang menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal. Masih mengacu pada pasal yang sama, pelaksanaan Urusan Pariwisata ditujukan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dimana masyarakat ikut terlibat aktif dalam pembangunan pariwisata dengan terus menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup. Pelaksanaan Urusan Pariwisata mengedepankan keselarasan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah.

Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

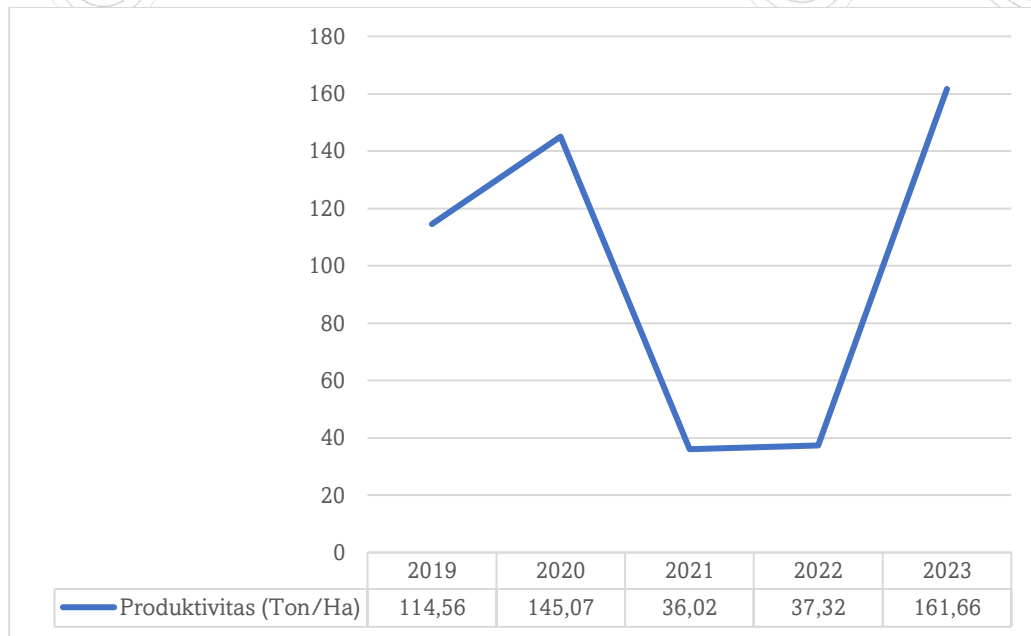
Tabel 2.73. Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	39.859	29.922	45.562	19.164	24.189	24.134	29.214	21.639	34.239	17.490	17,729	12,139	Tidak Terpenuhi	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	0,026	0,14	0,029	0,14	0,29	0,15	0,3	0,25	0,31	0,19	0,19	0,16	Tidak Terpenuhi	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan, 2019-2024

2.1.4.2.3.2. Pertanian

Dari sisi ekonomi makro, pertanian baik itu tanaman pangan, hortikultura, kehutanan, perikanan dan sebagainya memiliki andil yang sangat signifikan pada pembangunan ekonomi Kabupaten Seruyan. Hal ini terlihat dari dominasi struktur ekonomi pertanian pada nilai tambah produk Kabupaten Seruyan hingga mencapai 37,28% pada 2021 yang menggambarkan perekonomian daerah secara umum. Meskipun begitu, pertumbuhan sektor pertanian masih belum optimal dimana pada tahun 2020 hanya berkontribusi sebesar -1,62% dan pada masa pemulihan tahun 2021 baru mencapai 1,09%. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar di Kabupaten Seruyan selama tahun 2018-2023 menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2018, produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar sebesar 114,56% dan terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2023 menjadi 161,66%.



Gambar 2.66. Grafik Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan, 2018-2023

Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.74. Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Persentase produktivitas padi	%	147,42	144,56	152,97	145,07	158,74	36,02	164,73	37,32	170,94	161,66	Tidak Tercaipai	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Cakupan bina kelompok petani	%	100	85	100	85	100	87,31	100	90,86	100	93,12	Tidak Tercaipai	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Persentase kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	TAD	TAD	TAD	TAD	1,2	36,30	1,2	37,60	1,2	37,87	Tercapai	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Persentase kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	TAD	TAD	TAD	TAD	1,2	76,92	1,2	79,42	1,2	79,93	Tercapai	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan, 2019-2024

2.1.4.2.3.3. Kehutanan

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan adalah upaya dasar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan dengan melakukan rehabilitasi hutan dan lahan kritis serta pengawasan terhadap kerusakan kawasan hutan.

Kinerja urusan kehutanan Kabupaten Seruyan diukur menggunakan indikator rehabilitasi hutan dan lahan kritis serta kerusakan kawasan hutan. Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.75. Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	%	2,04	0,31	2,15	0,31	2,28	170,50	2,41	0,05	2,55	0,78	Tidak Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kerusakan kawasan hutan	%	4	9,48	4	9,48	4	TAD	4	1,00	4	7	Terca pai	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan, 2019-2024

2.1.4.2.3.4. Energi dan Sumber Daya

Kinerja urusan energi dan sumber daya di Kabupaten Seruyan diukur dengan menggunakan indikator persentase pemakaian listrik (Kwh) dan produksi listrik. Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.76. Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya
Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023**

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Perse ntase Pema kaian Listrik (kWh)	%	3,97	3,97	4,69	2,64	5,54	3,66	6,54	5,5	7,73	5,78	Tidak Tercapai	Sekretariat Daerah (Bag. Perekonomian)
Produksi Listrik	Kwh	1.75 7.27 7	1.75 7.27 7	1.84 7.70 4	2.00 5.72 2	2.00 6.73 6	2.34 8.82 0	2.17 4.60 8	1.99 6.60 4	2.28 2.48 0	2.17 8.31 0	Tidak Tercapai	Sekretariat Daerah (Bag. Perekonomian)

Sumber: RPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026

2.1.4.2.3.5. Perdagangan

Kinerja urusan perdagangan Kabupaten Seruyan diukur menggunakan indikator cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (pedagang). Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.77. Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal (Pedagang)	%	T A D	8 7, 5	T A D	8 7, 5	86 7, 6	86 7, 6	86 8, 5	86 7, 6	90 4, 5	8 8, 7	Tidak Tercapai	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, 2019-2023

2.1.4.2.3.6. Perindustrian

Sebagai upaya peningkatan nilai tambah sektor-sektor primer yang ada di Kabupaten Seruyan, termasuk didalamnya peningkatan kualitas usaha mikro kecil khususnya industri mikro kecil, maka Kabupaten Seruyan memiliki program kebijakan khusus dalam pengembangan perindustrian daerah. Upaya peningkatan kapasitas perindustrian juga terlihat dari adanya antusiasme masyarakat dalam mengelola barang dan jasanya sehingga mampu menghasilkan barang dan jasa yang lebih bernilai tinggi.

Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.78. Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	32,56	31,38	32,87	32,8	33,18	33,18	33,48	32,04	33,8	31,29	34,18	31,58	Tidak Tercapai	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Pertumbuhan Industri Rumah Tangga	%	2,29	2,29	2,58	2,89	2,95	4,49	3,16	1,76	3,45	5,78	3,83	9,70	Tercapai	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (IKM)	%	TA D	7,85	TA D	3,75	0,18	0,18	10	0,19	12	3,35	-	-	Tidak Tercapai	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan, 2019-2024

2.1.4.2.3.7. Transmigrasi

Transmigrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu daerah yang padat ke daerah yang kurang padat dalam rangka mendukung pengembangan dan wilayah. Tujuan dari transmigrasi dilihat dari

kependudukan yaitu pemeratakan persebaran penduduk dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sementara itu dilihat dari sisi kewilayahan yaitu meningkatkan produksi hasil pertanian dengan cara memperluas lahan pertanian dan memperkuat keamanan dan keamanan nasional dengan menyebarkan penduduk pada wilayah-wilayah terjauh dalam satu negara.

Dalam urusan transmigrasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam perencanaan kawasan transmigrasi, pembangunan kawasan transmigrasi dan pengembangan kawasan transmigrasi. Kinerja urusan transmigrasi Kabupaten Seruyan diukur menggunakan beberapa indikator antara lain persentase kawasan transmigrasi yang direncanakan; persentase kawasan transmigrasi yang dikembangkan; persentase kawasan permukiman transmigrasi yang dibangun. Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.79. Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Persentase Kawasan Transmigrasi yang Direncanakan	%	TA D	TA D	TA D	TA D	80	42,85	80	42,85	80	0	Tidak Tercapai	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Persentase Kawasan Transmigrasi yang Dikembangkan	%	TA D	TA D	TA D	TA D	100	0	100	0	100	0	Tidak Tercapai	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Persentase Kawasan Permukiman Transmigrasi yang Dibangun	%	TA D	TA D	TA D	TA D	65	0	65	0	65	0	Tidak Tercapai	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan, 2019-2024

2.1.4.2.3.8. Kelautan dan Perikanan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan untuk kewenangan urusan kelautan dan perikanan oleh pemerintah daerah mencakup sub urusan (1) Perikanan Tangkap meliputi: a) Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota; b) Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); dan sub urusan Perikanan Budidaya meliputi: a) Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota; b) Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan; dan c) Pengelolaan pembudidayaan ikan.

Sektor Perikanan di Kabupaten Seruyan sangat potensial, sebab komoditi yang dihasilkan berupa jenis ikan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Pada tahun 2023, produksi perikanan budidaya di Kabupaten Seruyan mencapai 19.177,45 ton dan produksi perikanan tangkap mencapai 21.374,12 ton. Kinerja urusan kelautan dan perikanan Kabupaten Seruyan diukur menggunakan beberapa indikator antara lain laju pertumbuhan produksi perikanan; persentase konsumsi ikan; persentase produksi perikanan; angka konsumsi ikan; produksi perikanan; produksi perikanan budidaya; produksi perikanan tangkap; produksi pengolahan hasil perikanan; proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman; persentase kepatuhan pelaku usaha kp terhadap ketentuan dan UU yang berlaku; serta cakupan bina kelompok nelayan (perikanan tangkap dan perikanan budidaya).

Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.80. Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024**

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Laju pertumbuhan produksi perikanan	%	5	4,6	7	6,7	7	8	7	7,36	7	8,8	-	-	-	Dinas Perikanan

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Persentase Konsumsi Ikan	%	95	106	95,2	101,4	96,3	109,4	97,5	102,37	98,6	119	-	-	-	Dinas Perikanan
Persentase Produksi Perikanan	%	95	96,32	96	98,74	98,18	97,9	98,29	96,21	98,65	93,46	97,00	97,97	Terca pai	Dinas Perikanan
Angka Konsumsi Ikan	kg/kapita/tahun	49,3	52,24	51,76	52,5	54,26	57,46	56,96	54,75	59,76	54,68	59,07	54,97	Tidak Terca pai	Dinas Perikanan
Produksi Perikanan	ton/tahun	33.390,16	32.160,67	35.727,96	35.276,92	42.389,98	41.576,51	45.256,00	43.544,46	48.365,44	45.200,14	44.082,41	43.198,78	Tidak Terca pai	Dinas Perikanan
Produksi perikanan budidaya	ton/tahun	13.365,78	12.167,69	14.702,36	14.457,88	16.172,60	15.838,92	17.789,85	17.458,41	19.568,84	19.177,45	18.907,47	18.529,33	Tidak Terca pai	Dinas Perikanan
Produksi perikanan tangkap	ton/tahun	20.024,38	19.992,98	21.025,60	20.819,04	22.076,88	21.596,38	23.180,72	21.521,16	24.339,76	21.374,12	20.518,75	20.129,81	Tidak Terca pai	Dinas Perikanan
Produksi pengolahan hasil perikanan	ton/tahun	TAD	TAD	TAD	TAD	4.140,51	4.141,21	4.285,43	4.564,89	4.456,84	4.648,57	4.656,19	4.539,64	Tidak Terca pai	Dinas Perikanan
Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam Batasan Biologis yang Aman	%	TAD	TAD	TAD	TAD	98,18	97,9	98,29	90,07	98,65	93,46	-	-	-	Dinas Perikanan
Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku	%	TAD	TAD	TAD	TAD	80	81,92	80	81,95	85	82	85	84,21	Tidak Terca pai	Dinas Perikanan
Cakupan Bina Kelompok Nelayan (Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya)	%	TAD	TAD	TAD	TAD	68,29	52	69,35	52,45	70,16	53	-	-	-	Dinas Perikanan
LPE Subkategori Perikanan	%	TAD	TAD	TAD	TAD	TAD	TAD	TAD	TAD	TAD	TAD	1	0,88	Tidak Terca pai	Dinas Perikanan

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
n															...
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	%	TAD	TAD	TAD	TAD	TAD	TAD	TAD	TAD	TAD	TAD	87,42	79,16	Tidak Tercaapai	Dinas Perikanan

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan, 2019-2024

2.1.4.2.4. Penunjang Urusan

2.1.4.2.4.1. Sekretariat Daerah

Kinerja urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan diukur dengan menggunakan satu indikator yaitu jumlah informasi manajemen pemda. Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.81. Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Jumlah Informasi Manajemen Pemda	Jumlah	4	4	4	9	9	25	9	25	9	25	Tercapai	Sekretariat Daerah

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan, 2019-2024

2.1.4.2.4.2. Sekretariat Dewan

Sekretariat Dewan mempunyai tugas untuk menyelenggarakan segala urusan yang berkaitan dengan kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli apabila dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan badan fungsinya Pemerintah Daerah. Indikator yang digunakan untuk mengukur ketercapaian kinerja Sekretariat Dewan antara lain jumlah anggota DPRD; tersedianya rencana kerja tahunan setiap alat-alat kelengkapan DPRD Kabupaten; tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda dan fungsi anggaran dalam

dokumen RPJMD maupun dokumen RKPD; terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan PERDA dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD; persentase terlaksananya fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda dan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan (RKPD); Persentase Pokok Pikiran DPRD yang terintegrasi dalam dokumen RPJM dan RKPD.

Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Dewan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.82. Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Dewan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Jumlah Anggota DPRD	Anggota	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	Tercapai	Sekretariat Dewan
Tersedianya rencana kerja tahunan setiap alat-alat kelengkapan DPRD Kabupaten	Ada/Tidak	TA D	Ad a	TA D	Ad a	Ad a	Ad a	Ad a	Ad a	Ad a	Ad a	Ad a	Ad a	Tercapai	Sekretariat Dewan
Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda dan fungsi anggaran dalam dokumen RPJMD maupun dokumen RKPD	Ada/Tidak	TA D	Ad a	TA D	Ad a	Ad a	Ad a	Ad a	Ad a	Ad a	Ad a	Ad a	Ad a	Tercapai	Sekretariat Dewan
Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan PERDA dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak	TA D	Ad a	TA D	Ad a	Ad a	Ad a	Ad a	Ad a	Ad a	Ad a	Ad a	Ad a	Tercapai	Sekretariat Dewan

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Persentase terlaksananya fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda dan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	%	TA D	TA D	TA D	TA D	95	98,57	95	75	95	100	95	50	Tidak Tercapai	Sekretariat Dewan
Persentase Pokok Pikiran DPRD yang terintegrasi dalam dokumen RPJM dan RKPD	%	TA D	TA D	TA D	93	93	50	93	50	93	50	93	50	Tidak Tercapai	Sekretariat Dewan

Sumber: Sekretariat Dewan Kabupaten Seruyan, 2019-2024

2.1.4.2.4.3. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan memiliki fungsi strategis. Dalam menyelesaikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah disusun mengacu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015. Berdasarkan Undang-Undang tersebut terdapat pengaturan baru tentang pengelompokan urusan kewenangan wajib dan urusan kewenangan pilihan bagi Pemerintah Daerah. Kebijakan tersebut terkait erat dengan keterpaduan perencanaan pembangunan secara nasional. Perencanaan pembangunan daerah bersifat komprehensif dan mencakup seluruh urusan kewenangan daerah dan penugasan lain dari Pemerintah Pusat.

Selain itu, perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Seruyan harus sinergis dengan rencana pembangunan provinsi dan nasional agar keterpaduan pembangunan daerah dapat dicapai. Keterpaduan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dilakukan melalui konsultasi perencanaan pembangunan Kabupaten Seruyan baik ditingkat

provinsi maupun nasional agar rencana pembangunan daerah Kabupaten Seruyan sejalan dengan arahan pembangunan nasional dan kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah.

Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.83. Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024**

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	A da	A da	A da	A da	A da	Ad a	A da	Ad a	A da	Ad a	A da	Ad a	Tercapai	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Dokumen	A da	A da	A da	A da	A da	Ad a	A da	Ad a	A da	Ad a	A da	Ad a	Tercapai	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPd yang telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Dokumen	A da	A da	A da	A da	A da	Ad a	A da	Ad a	A da	Ad a	A da	Ad a	Tercapai	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	T A D	A da	T A D	A da	A da	Ad a	A da	Ad a	A da	Ad a	A da	Ad a	Tercapai	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd	Perse n	100	100	100	100	100	99,54	100	89,47	100	95,85	100	99,55	Tidak Tercapai	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPd kedalam APBD	Perse n	T A D	100	T A D	100	100	97,69	100	93,14	100	100	100	100	Tercapai	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	Perse n	T A D	T A D	T A D	T A D	50	4	50	23	50	23	50	93	Tercapai	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Sumber: Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Seruyan, 2019-2024

2.1.4.2.4.4. Keuangan

Pengelolaan keuangan di Kabupaten Seruyan sudah berjalan transparan dan akuntabel yang mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan berbasis akuntansi, nilai-nilai historis, realistis, periodisasi, konsisten, pengungkapan lengkap dan penyajian secara wajar.

Kinerja pengelolaan keuangan Kabupaten Seruyan antara lain tergambar dari besarnya belanja daerah terhadap anggaran belanja. Ada 8 indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja urusan keuangan di Kabupaten Seruyan. Capaian Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.84 Capaian Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Seruyan
Tahun 2019-2023**

Indikator Kinerja	Sa- tu an	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penang- gung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Ketetapan waktu penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Tepat / Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tercapai	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Persentase bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	TAD	TAD	TAD	TAD	0,6	10	0,5	0,65	0,5	10,16	Tercapai	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Persentase belanja pendidikan (20%)	%	TAD	TAD	TAD	TAD	18,9	18,9	19,9	24,98	21	21,25	Tercapai	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Persentase belanja kesehatan (10%)	%	TAD	TAD	TAD	TAD	12,7	12,7	12,6	15,85	13,3	13,96	Tercapai	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Persentase SILPA terhadap	%	TAD	TAD	TAD	TAD	10,5	12,4	9,9	5,3	4,9	10,81	Tercapai	Badan Keuangan dan

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
APBD													Aset Daerah
Persentase program dalam APBD yang dilaksanakan	%	TAD	TAD	TAD	TAD	100	96,52	100	94,63	100	98,04	Tidak Tercapai	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Persentase kegiatan dalam APBD yang dilaksanakan	%	TAD	TAD	TAD	TAD	100	94,1	100	90,5	100	98,36	Tidak Tercapai	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	%	TAD	7,92	TAD	6,95	10	7,26	11	7,41	12	8,61	Tidak Tercapai	Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan, 2019-2024

2.1.4.2.4.5. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Kinerja urusan kepegawaian di pemerintah Kabupaten Seruyan dilihat dari jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut pendidikan dan jenis kelamin, persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal, persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah yang terisi ASN, jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah yang terisi ASN, jumlah pemangku jabatan fungsional pada instansi pemerintah yang terisi ASN. Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.85. Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut pendidikan dan jenis kelamin	Orang	TAD	3.107	TAD	3.134	3.810	TAD	4.110	3.094	4.110	2.966	3.000	2.839	Tidak Tercapai	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	TA D	TA D	TA D	TA D	5	TA D	5	61	5	TA D	15 0	12 7	Tidak Tercapai	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	TA D	TA D	TA D	TA D	5	TA D	5	4	5	TA D	30	16	Tidak Tercapai	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah yang terisi ASN	Orang	TA D	TA D	TA D	28	30	TA D	34	28	34	35	35	30	Tidak Tercapai	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah yang terisi ASN	Orang	TA D	TA D	TA D	58 3	56 9	TA D	67 1	37 3	67 1	34 9	1, 04 9	1, 01 9	Tidak Tercapai	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Jumlah pemangku jabatan fungsional pada instansi pemerintah yang terisi ASN	Orang	TA D	TA D	TA D	1. 77 1	1. 76 4	TA D	2. 32 5	2. 91 4	2. 35 5	1. 93 0	2, 35 5	1, 79 0	Tidak Tercapai	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seruyan, 2019-2024

2.1.4.2.4.6. Penelitian dan Pengembangan

Kegiatan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Seruyan dilakukan dalam rangka pemecahan masalah dan peningkatan kualitas produk, baik dalam bentuk produk hukum, kebijakan, maupun perencanaan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Seruyan berupaya mendorong implementasi rencana kelitbangan, kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah, dan perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. Penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitas atau efisiensi dalam kegiatan ekonomi, baik

produksi, distribusi dan konsumsi di Kabupaten Seruyan di masa yang akan datang.

Kinerja urusan penelitian dan pengembangan diukur menggunakan beberapa indikator kinerja antara lain persentase implementasi rencana kelitbangan, persentase pemanfaatan hasil kelitbangan, persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.86. Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023**

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	TA D	TA D	TA D	TA D	8 0	10 0	8 0	6 0	8 0	8 0	8 0	8 0	Terca pai	Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	TA D	TA D	TA D	TA D	8 0	76	8 0	6 0	8 0	0	8 0	0	Tida k Terca pai	Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	TA D	TA D	TA D	TA D	8 0	33	8 0	6 0	8 0	8 0	8 0	8 0	Terca pai	Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	TA D	TA D	TA D	TA D	8 0	10 0	8 0	6 0	8 0	8 0	8 0	8 0	Terca pai	Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Sumber: Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Seruyan, 2019-2024

2.1.4.2.4.7. Pengawasan

Pengawasan adalah upaya penting dalam menjalankan kegiatan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan daerah yang diturunkan ke dalam program dan kegiatan. Kinerja urusan pengawasan diukur menggunakan beberapa indikator kinerja antara lain persentase tindak lanjut temuan, persentase pelanggaran pegawai, jumlah temuan BPK, dan persentase terlaksananya pengendalian internal pemerintahan pada perangkat daerah (level maturitas SPIP Perangkat Daerah). Capaian Kinerja Urusan Pengawasan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.87. Capaian Kinerja Urusan Pengawasan Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Capaian	SOPD Pengu ng Jawa b
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Persentase tindak lanjut temuan	%	TA D	TA D	TA D	TA D	70	79,86	75	81,53	80	82	85	80,21	Tidak Tercapai	Inspektora t
Persentase pelanggaran pegawai	%	TA D	TA D	TA D	TA D	2	0,1	2	0,06	1,5	0,23	TA D	TA D		Inspektora t
Jumlah temuan BPK	Temuan	TA D	TA D	TA D	TA D	26	26	24	23	22	37	TA D	TA D		Inspektora t
Persentase terlaksananya pengendalian intern pemerintahan pada perangkat daerah (level maturitas SPIP Perangkat Daerah)	% / Level	TA D	TA D	TA D	TA D	85 / (3)	Level 3	85 / (3)	Level 3	85 / (4)	Level 2	Level 3 (3,025)	Level 3 (3,000)	Tidak Tercapai	Inspektora t

Sumber: Inspektorat Kabupaten Seruyan, 2019-2024

2.1.4.2.4.8. Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan faktor penentu keberlangsungan dan keberlanjutan pemerintahan. Di dalamnya tercakup aspek ideologi bernegara (Pancasila), karakter dan wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan bangsa, organisasi masyarakat, ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya,

serta kerukunan umat beragama. Semua aspek ini bersinergi dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik dan bersatu padu berdasarkan ideologi Pancasila.

Kinerja urusan kesatuan bangsa politik dan perlindungan masyarakat Kabupaten Seruyan menggunakan 3 indikator kinerja antara lain laju pertumbuhan masyarakat yang dibina dalam pengembangan wawasan kebangsaan, laju pertumbuhan masyarakat yang mendapatkan pembinaan politik, dan persentase konflik sosial yang diselesaikan. Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.88. Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Capaian	SOPD Penanggung Jawab
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K	T	K		
Laju Pertumbuhan Masyarakat yang dibina dalam pengembangan wawasan kebangsaan	%	4,50	0,30	4,60	0,14	4,75	17,73	5	5,1	5	7,6	TA D	TA D	TAD (beda Indikator Kinerja)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Laju pertumbuhan Masyarakat yang mendapatkan pembinaan politik	%	4,50	4,71	4,60	0,56	4,75	5,58	72,64	16,12	76,91	99,8	TA D	TA D	TAD (beda Indikator Kinerja)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Persentase konflik sosial yang diselesaikan	%	80	57,14	80	0	90	100	90	50	90	50	50	25	Tidak Tercapai	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan, 2019-2024

2.1.4.3. Capaian Kinerja SPM

2.1.4.3.1. Urusan Bidang Pendidikan

Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Seruyan merupakan bagian penting dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Penyelenggaraan urusan pendidikan ini dilaksanakan secara teknis oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan, sesuai dengan kewenangan daerah dan ketentuan yang berlaku. Salah satu instrumen utama dalam penyelenggaraan pendidikan adalah pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Pencapaian SPM pada bidang pendidikan di Kabupaten Seruyan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.89. Capaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Seruyan
Tahun 2022-2024**

No.	Bidang Urusan	Indikator Kinerja SPM	Capaian		
			2022	2023	2024
1	Pendidikan				
		Pendidikan Dasar Usia Dini	100%	93%	100%
		Pendidikan Dasar (SD dan SMP)	100%	98%	100%
		Pendidikan Kesetaraan	100%	100%	99%

Indikator	2021	2022	2023	2024
Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	76.76	66.91	72.44	84.68
Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	97.07	96.52	96.90	98.38
Jumlah anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)	4.32	7.02	6.10	7.85
Rerata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	50.41	54.98	61.14	64.63
Rerata kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	37.18	41.94	49.79	54.2
Rerata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	61.07	65.83	68.83	69.17
Rerata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	61.07	65.83	62.06	61.93
Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	64.49	62.00	65.60	62.42
Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1	55.64	55.73	70.24	70.24
Indeks Iklim Keamanan SD	67.99	68.16	71.61	71.53
Indeks Iklim Kebinekaan SD	59.13	68.29	72.87	69.19
Indeks Inklusivitas SD	53.67	55.1	54.68	55.77
Indeks Iklim Keamanan SMP	67.99	69.68	69.81	68.44
Indeks Iklim Kebinekaan SMP	59.13	66.56	74.12	69.34
Indeks Inklusivitas SMP	53.67	58.36	57.41	55.92

2.1.4.3.2. Urusan Bidang Kesehatan

Pembangunan di bidang kesehatan merupakan salah satu prioritas utama dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Seruyan. Pemerintah daerah, melalui Dinas Kesehatan, bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menjamin aksesibilitas dan kualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar ini adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan.

SPM bidang kesehatan dirancang untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar layanan kesehatan bagi individu dan masyarakat sesuai dengan kelompok sasaran tertentu. Standar ini mencakup berbagai jenis pelayanan dasar yang harus diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota secara optimal dan merata. Secara umum, pelayanan dasar dalam bidang kesehatan meliputi pelayanan kesehatan ibu dan anak, penanggulangan penyakit, serta layanan kesehatan berbasis pencegahan dan promosi kesehatan. Secara lebih rinci, capaian SPM bidang kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.90. Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Seruyan
Tahun 2022-2024**

No.	Bidang Urusan	Indikator Kinerja SPM	Capaian		
			2022	2023	2024
2	Kesehatan				
		Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	87%	89%	91%
		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	59%	67%	97%
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	77%	83%	100%
		Pelayanan Kesehatan Balita	59%	86%	100%
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	12%	64%	79%
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	36%	84%	100%
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	20%	42%	100%
		Pelayanan Kesehatan Penderita	32%	69%	100%

No.	Bidang Urusan	Indikator Kinerja SPM	Capaian		
			2022	2023	2024
		Hipertensi			..
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	92%	97%	100%
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	51%	71%	77%
		Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	42%	61%	100%
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	42%	70%	94%

2.1.4.3.3. Urusan Bidang Pekerjaan Umum

Urusan pekerjaan umum merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Seruyan. Penyelenggaraan pelayanan dasar di bidang ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar infrastruktur bagi masyarakat, seperti jalan, drainase, dan jaringan air minum.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam bidang pekerjaan umum difokuskan pada penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur dasar yang mendukung kelancaran aktivitas masyarakat, terutama aksesibilitas antarwilayah dan ketersediaan air minum yang layak. SPM ini bertujuan menjamin bahwa masyarakat memperoleh manfaat dari infrastruktur publik secara merata, aman, dan berkelanjutan. Capaian SPM bidang pekerjaan umum secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.91. Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Seruyan Tahun 2022-2024

No.	Bidang Urusan	Indikator Kinerja SPM	Capaian		
			2022	2023	2024
3	Pekerjaan Umum				

No.	Bidang Urusan	Indikator Kinerja SPM	Capaian		
			2022	2023	2024
		Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	53%	60%	100%
		Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	51%	68%	100%

2.1.4.3.4. Urusan Bidang Perumahan Rakyat

Urusan perumahan rakyat merupakan bagian dari urusan wajib pelayanan dasar yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak masyarakat terhadap hunian yang layak, aman, dan sehat. Pemerintah Kabupaten Seruyan, melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, bertanggung jawab melaksanakan pelayanan dasar bidang perumahan sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam urusan perumahan rakyat difokuskan pada penyediaan rumah layak huni dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH). Pelayanan ini menjadi prioritas karena masih banyak masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan kawasan kumuh, yang menempati hunian dengan kondisi fisik tidak memenuhi standar kelayakan. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya intervensi perbaikan dan pendampingan terhadap rumah-rumah yang tidak layak huni. Secara lebih rinci, capaian SPM bidang perumahan rakyat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.92. Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Seruyan Tahun 2022-2024

No.	Bidang Urusan	Indikator Kinerja SPM	Capaian		
			2022	2023	2024
4	Perumahan Rakyat				
		Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	44%	100%	100%

No.	Bidang Urusan	Indikator Kinerja SPM	Capaian		
			2022	2023	2024
		Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0%	100%	0%

2.1.4.3.5. Urusan Bidang Ketenteraman, Keketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman dan tertib di tengah masyarakat. Pemerintah Kabupaten Seruyan melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), BPBD, dan Damkar, memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan dasar yang bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman gangguan ketertiban, bencana, dan kondisi darurat lainnya.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Trantibumlinmas berfokus pada respons cepat terhadap kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, serta peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi dalam perlindungan masyarakat. Pelayanan ini bersifat langsung dan berbasis wilayah, sehingga sangat penting untuk dijalankan secara terpadu, cepat, dan sesuai prosedur operasional tetap (SOP) yang ditetapkan. Capaian SPM pada bidang ini dari tahun 2022 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.93. Capaian SPM Bidang Ketenteraman, Keketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan Tahun 2022-2024

No.	Bidang Urusan	Indikator Kinerja SPM	Capaian		
			2022	2023	2024
5	Ketenteraman, Keketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat				
		Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	100%	93%	100%

No.	Bidang Urusan	Indikator Kinerja SPM	Capaian		
			2022	2023	2024
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	100%	90%	100%
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)	100%	83%	93%
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)	100%	93%	100%
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	16%	100%	100%

2.1.4.3.6. Urusan Bidang Sosial

Urusan sosial merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin perlindungan dan kesejahteraan kelompok rentan. Pemerintah Kabupaten Seruyan, melalui Dinas Sosial, menyelenggarakan pelayanan sosial dasar yang ditujukan untuk masyarakat miskin, penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, anak terlantar, serta korban bencana sosial dan kekerasan.

Pelayanan dasar ini bertujuan untuk melindungi dan memberdayakan kelompok rentan agar dapat hidup layak, mandiri, dan bermartabat. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial mengatur bentuk intervensi pelayanan yang harus diberikan kepada kelompok sasaran secara cepat, tepat, dan sesuai prosedur. Pelayanan meliputi identifikasi, rujukan, pemberian bantuan, dan pendampingan sosial secara berkelanjutan. Capaian SPM bidang sosial dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.94. Capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2022-2024

No.	Bidang Urusan	Indikator Kinerja SPM	Capaian		
			2022	2023	2024
6	Sosial				

No.	Bidang Urusan	Indikator Kinerja SPM	Capaian		
			2022	2023	2024
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti	7%	60%	100%
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	0%	100%	100%
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	19%	100%	100%
		Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	0%	100%	100%
		Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100%	100%	100%

2.1.4.4. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

2.1.4.4.1. Penegakan Perda dan Perkada

Indikator dan Target Penegakan Peraturan Daerah ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Seruyan dalam memperkuat penegakan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada) sebagai bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang baik. Tabel menampilkan indikator kinerja berupa persentase penegakan Perda dan Perkada dengan target yang ambisius, dimana pada tahun 2019-2020 masih tercatat "TAD" (Tidak Ada Data), namun mulai tahun 2021 hingga 2024 ditetapkan target konsisten 100 persen.

Tabel 2. 95 Penegakan Perda dan Perkada di Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024

Indikator Kinerja	Satuan	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		T	K	T	K	T	K	T	K	T	K	T	K
Penegakan Perda dan Perkada	%	TAD	TAD	TAD	TAD	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Satpol PP (2025)

Penetapan target 100 persen untuk penegakan Perda dan Perkada dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan tekad kuat pemerintah

daerah untuk memastikan seluruh regulasi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara optimal. Konsistensi target ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Seruyan berkomitmen untuk tidak hanya memproduksi regulasi, tetapi juga memastikan enforcement yang efektif sebagai wujud kepastian hukum dan ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Fokus pada penegakan Perda dan Perkada ini memiliki signifikansi strategis dalam mendukung pencapaian visi-misi pembangunan daerah, karena regulasi yang ditegakkan dengan baik akan menciptakan iklim investasi yang kondusif, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha, serta memastikan program-program pembangunan dapat berjalan sesuai dengan koridor hukum yang telah ditetapkan. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

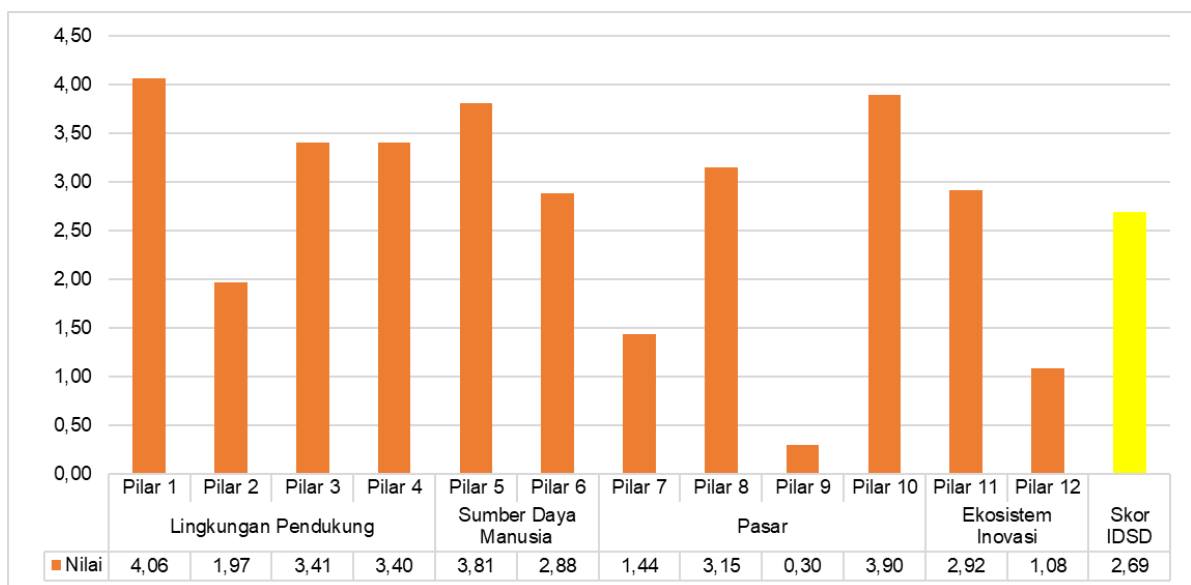
2.1.4.5. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

2.1.4.5.1. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah memperoleh suatu ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Kerangka pengukuran IDSD terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Keempat komponen tersebut ditopang oleh 12 pilar daya saing. Komponen lingkungan pendukung ditopang oleh pilar institusi, infrastruktur, adopsi TIK, dan kestabilan ekonomi makro. Komponen sumber daya manusia ditopang oleh pilar kesehatan dan keterampilan. Komponen pasar ditopang oleh pilar pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, dan ukuran pasar.

Komponen ekosistem inovasi ditopang oleh pilar dinamisme bisnis dan kapabilitas inovasi.

Pada tahun 2023 Kabupaten Seruyan memiliki nilai Indeks Daya Saing sebesar 2,69. Jika dilihat secara rinci pada setiap pilar di tiap komponen daya saing daerah memiliki nilai yang berbeda-beda. Rincian nilai tiap pilar pada komponen lingkungan pendukung yakni 4,06 pada pilar 1; 1,97 pada pilar 2; 3,41 pada pilar 3; dan 3,40 pada pilar 4. Nilai setiap pilar pada komponen sumber daya manusia sebesar 3,81 pada pilar 5 dan 2,88 pada pilar 6. Nilai setiap pilar pada komponen pasar sebesar 1,44 pada pilar 7; 3,15 pada pilar 8; 0,30 pada pilar 9; dan 3,90 pada pilar 10. Kemudian besarnya nilai setiap pilar pada komponen ekosistem inovasi sebesar 2,92 pada pilar 11 dan 1,08 pada pilar 12.



Gambar 2.67. Grafik Nilai Pilar Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Kabupaten Seruyan Tahun 2023

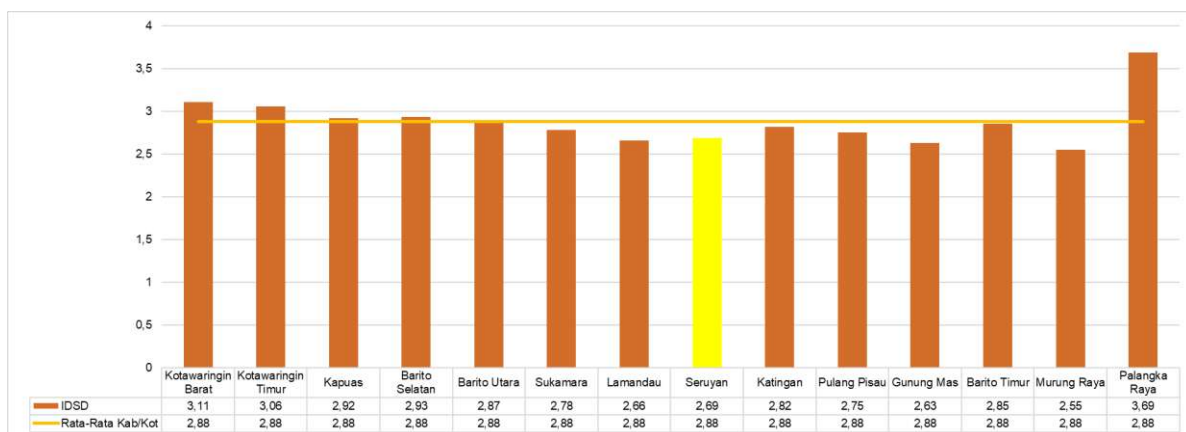
Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), 2023

Keterangan:

- Pilar 1 : Institusi
- Pilar 2 : Infrastruktur
- Pilar 3 : Adopsi TIK
- Pilar 4 : Stabilitas Ekonomi Makro
- Pilar 5 : Kesehatan

- Pilar 6 : Keterampilan
- Pilar 7 : Pasar Produk
- Pilar 8 : Pasar Tenaga Kerja
- Pilar 9 : Sistem Keuangan
- Pilar 10 : Ukuran Pasar
- Pilar 11 : Dinamisme Bisnis
- Pilar 12 : Kapabilitas Inovasi

Apabila dibandingkan dengan nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, nilai IDSD Kabupaten Seruyan cenderung rendah. Nilai IDSD Kabupaten Seruyan pada tahun 2023 yaitu sebesar 2,69 dan berada di bawah rata-rata nilai IDSD Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Tengah yakni sebesar 2,88. Sehingga IDSD Kabupaten Seruyan cenderung rendah jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah.



**Gambar 2.68. Grafik Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023**

Sumber: Indeks Daya Saing Daerah, 2023

2.2. Gambaran Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa Keuangan Daerah

mencakup semua hak dan kewajiban yang terkait dengan pelaksanaan pemerintahan daerah dan bisa dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Sementara itu, Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup seluruh aktivitas yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Analisis pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kapasitas atau kemampuan finansial daerah dalam membiayai pembangunan daerah. Ini sangat penting dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Untuk memahami kemampuan keuangan daerah, perlu memperhatikan kondisi kinerja keuangan daerah, termasuk kinerja keuangan masa lalu dan kebijakan yang mendasari pengelolaannya.

2.2.1. Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir

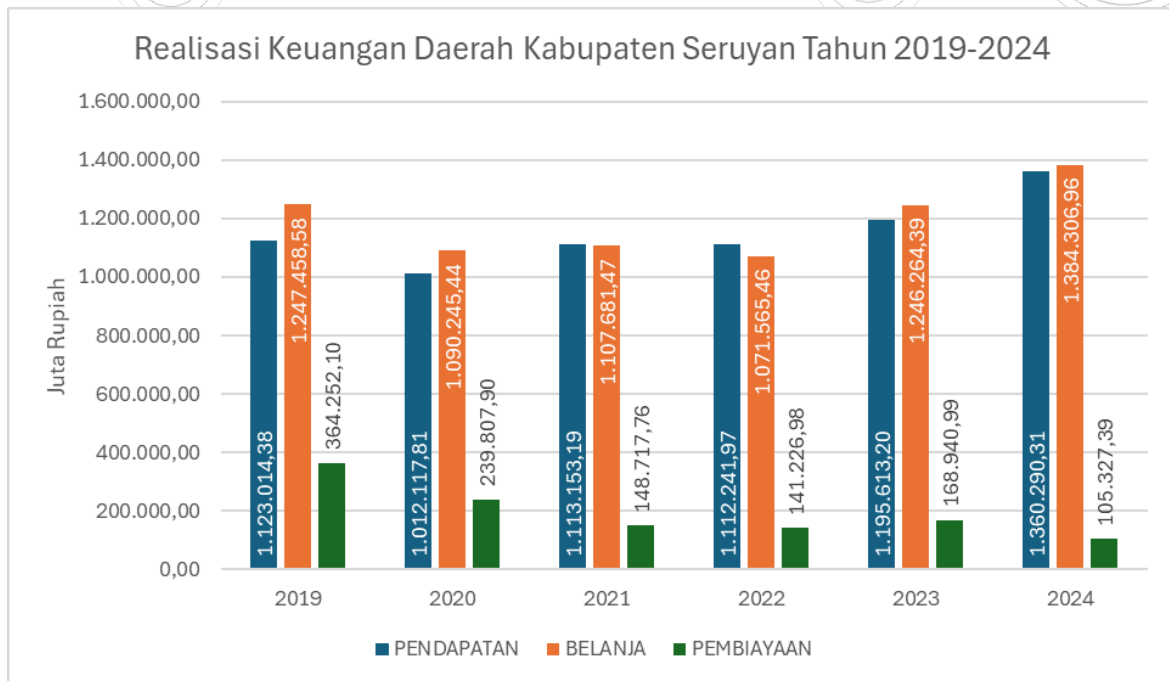
Keuangan Daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada dasarnya, APBD merupakan salah satu alat kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD adalah penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, yang disusun dalam struktur yang menggambarkan jumlah pendanaan untuk berbagai sasaran yang ingin dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi, dan kebutuhan riil masyarakat untuk tahun tertentu.

Analisis kinerja keuangan daerah dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pemerintah daerah dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan daerah meliputi pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah. Oleh karena itu, untuk memahami kinerja keuangan daerah, diperlukan pemahaman

yang mendalam tentang objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan dan struktur masing-masing APBD. Dalam rangka memahami kinerja keuangan Kabupaten Seruyan, dibutuhkan analisis kinerja keuangan masa lalu, yaitu kinerja keuangan Kabupaten Seruyan pada tahun 2019-2024.

2.2.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Seruyan dapat dilihat dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan daerah mencakup semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan pembiayaan adalah setiap penerimaan yang harus dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran tersebut maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum, perkembangan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah Kabupaten Seruyan dari tahun ke tahun menunjukkan kondisi yang cukup fluktuatif. Kondisi ini disebabkan salah satunya karena terjadinya Pandemi COVID-19.



Gambar 2. 69. Perkembangan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan, 2024

Pada bulan Desember 2019 di Kota Wuhan, Tiongkok, pemerintah setempat mendeteksi adanya Virus Corona (SARS-CoV-2) atau yang kemudian dikenal dengan nama COVID-19 dengan tingkat penularan yang cepat dan menyebar ke hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, hanya dalam beberapa bulan. Hal ini menyebabkan semua negara menerapkan berbagai kebijakan, termasuk *lockdown*, untuk mencegah penyebaran COVID-19 secara masif. Di Indonesia, beberapa daerah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebarannya. Dampak dari merebaknya COVID-19 tidak hanya terbatas pada masalah kesehatan, tetapi juga mempengaruhi hampir seluruh sektor, terutama sektor ekonomi.

Melihat kondisi tersebut, Presiden telah menginstruksikan kepada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) dan Daerah untuk melakukan *refocusing* anggaran bagi dana kesehatan, bantuan sosial (bansos) dan mendukung dunia usaha khususnya UMKM. Pemerintah pusat melalui

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, mengeluarkan kebijakan menghadapi COVID-19 dengan mengarahkan sumber daya dari sisi keuangan untuk mendukung penanganan COVID-19. Dalam hal ini, Kemenkeu telah membuat peraturan yang mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan *refocusing* anggaran untuk tujuan penanganan COVID-19.

Dalam rangka mendukung penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya, Pemerintah Kabupaten Seruyan melakukan beberapa kali penyesuaian anggaran pada tahun 2020-2022. Penyesuaian dan perubahan anggaran dalam rangka penanggulangan COVID-19 diprioritaskan pada 3 aspek yaitu penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaringan pengaman sosial.

2.2.1.1.1. Pendapatan Daerah

Perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Seruyan dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan kenaikan rata-rata sebesar 1,88 persen, dimana pendapatan pada tahun 2019 sebesar Rp1.123.014.379.268,72 menjadi Rp1.360.290,31 juta pada tahun 2024. Walaupun secara rata-rata pendapatan daerah mengalami peningkatan, tetapi apabila dibandingkan dengan tahun 2019, pendapatan daerah untuk tahun 2020 mengalami penurunan. Hal tersebut juga terjadi pada tahun 2022, dimana pendapatan daerah pada tahun tersebut juga mengalami penurunan. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020, secara umum faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja pendapatan Tahun Anggaran 2020, yaitu:

1. Masih kurang optimalnya pengelolaan potensi pendapatan yang ada di Kabupaten Seruyan (baik pajak maupun retribusi daerah);
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah kepada masyarakat, sehingga berdampak kepada kurang pedulinya

masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak dan Retribusi Daerah;

3. Dampak pandemi COVID-19 yang dalam penanganannya perlu dilakukan penyesuaian, *refocusing*, dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Gambaran tentang Pendapatan Daerah yang disajikan selama lima tahun terakhir menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 96. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024

Uraian	Realisasi (Rp Juta)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PENDAPATAN	1.123.014,38	1.012.117,81	1.113.153,19	1.112.241,97	1.195.613,20	1.360.290,31
PENDAPATAN ASLI DAERAH	88.983,63	70.357,79	83.036,15	82.433,03	71.958,28	75.395,13
Pendapatan Pajak Daerah	32.508,78	16.400,86	23.335,09	14.379,21	16.639,75	18.504,35
Pendapatan Retribusi Daerah	11.288,99	11.621,36	2.329,98	3.126,46	3.660,96	2.229,51
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.453,17	7.738,22	9.301,91	10.802,81	81,15	3.858,82
Lain-lain PAD yang Sah	37.732,69	34.597,36	48.069,17	54.124,55	51.576,42	50.802,44
PENDAPATAN TRANSFER	1.013.416,06	921.579,43	1.004.973,55	1.019.316,82	1.123.634,92	1.284.895,18
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	981.587,83	893.885,08	971.033,50	967.508,35	1.055.560,89	1.227.572,31
Dana Perimbangan	844.143,55	787.070,03	850.871,01	869.303,51	961.073,24	1.131.425,43
Dana Penyesuaian	37.543,95	-	-	-	-	0
Dana Insentif Daerah (DID)	0	879,08	8.806,69	9.687,18	0	0
Dana Desa	99.900,32	105.935,98	111.355,81	88.517,66	94.487,66	96.146,88
Pendapatan Transfer Antar Daerah	31.828,24	27.694,35	33.940,05	51.808,47	68.074,03	57.322,88
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	31.828,24	27.694,35	33.940,05	51.808,47	68.074,03	57.322,88

Uraian	Realisasi (Rp Juta)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Bantuan Keuangan	0	0	0	0	0	0
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	20.614,68	20.180,59	25.143,48	10.492,12	20	0
Pendapatan Hibah	20.614,68	20.180,59	0	5.596,70	20	0
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	25.143,48	4.895,41	0	0

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan, 2024

Jika melihat struktur penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Seruyan pada tahun 2024, sebesar 94 persen pendapatan daerah Kabupaten Seruyan berasal dari Pendapatan Transfer yang nilainya mencapai Rp1.284.895,18 juta. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkontribusi sebesar 6 persen dari total pendapatan daerah Kabupaten Seruyan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah memberikan kontribusi sebesar 0,0 persen. Gambaran terkait struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 disajikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.70. Grafik Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024

Sumber: LKPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024 (diolah)

2.2.1.1.2. Belanja Daerah

Realisasi belanja daerah Kabupaten Seruyan selama periode tahun 2019-2024 mengalami perkembangan yang fluktuatif namun cenderung meningkat. Pada tahun 2019 realisasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Seruyan sebesar Rp1.247.458.582.270,84 dan meningkat menjadi Rp1.107.681.472.520,82 pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022 realisasi belanja daerah mengalami penurunan menjadi Rp1.071.565.463.005,51 dan pada tahun 2024 meningkat Rp1.384.306,96 juta. Gambaran tentang realisasi Belanja Daerah Kabupaten Seruyan selama periode tahun 2019-2024 tercantum pada tabel berikut.

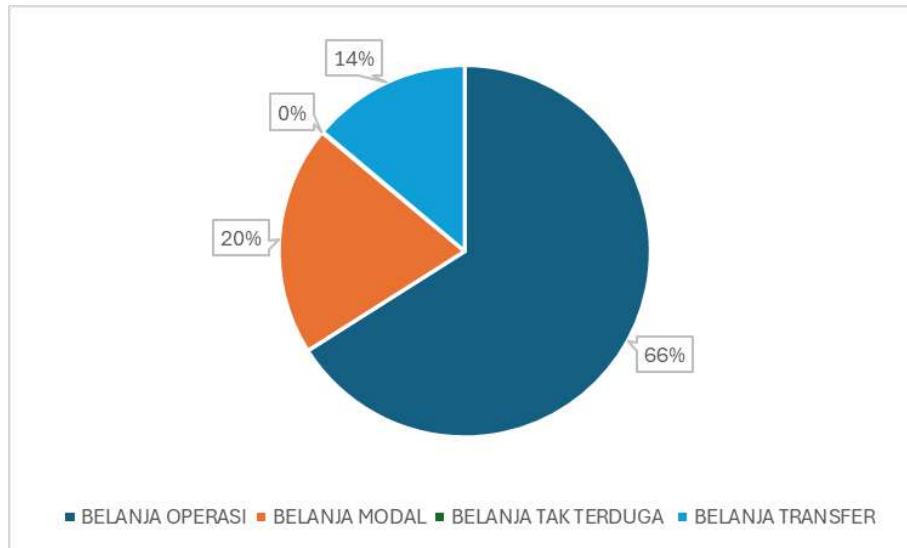
**Tabel 2.97. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024**

Uraian	Realisasi (Rp Juta)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
BELANJA	1.247.458,58	1.090.245,44	1.107.681,47	1.071.565,46	1.246.264,39	1.384.306,96
BELANJA OPERASI	697.995,13	612.765,22	714.898,92	747.007,67	832.448,84	913.806,53
Belanja Pegawai	380.619,58	383.996,18	329.783,90	366.213,21	365.545,40	418.254,62
Belanja Barang Jasa	244.184,07	211.224,71	317.828,52	329.372,64	368.195,90	388.166,39
Bunga	0	0	0	0	0	0
Subsidi	1.711,44	1.837,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Hibah	61.256,30	9.629,10	52.584,98	29.943,45	86.720,99	103.060,85
Bantuan Sosial	10.223,74	6.077,85	12.701,52	19.478,37	9.986,54	2.324,67
BELANJA MODAL	364.951,71	269.202,72	213.378,39	159.703,74	235.059,25	277.396,00
Belanja Tanah	0	6,75	0	0	0	9,01
Belanja Peralatan dan Mesin	70.512,08	72.657,14	74.927,64	48.875,92	45.974,88	70.347,47
Belanja Gedung dan Bangunan	69.240,18	48.314,92	40.971,06	31.520,63	57.398,96	52.371,26
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	217.282,52	133.766,41	96.672,38	77.887,87	130.384,67	153.015,36
Belanja Aset Tetap Lainnya	7.916,92	14.457,51	807,31	1.419,32	870,29	743,21
Belanja Aset Lainnya	0	0	0	0	430,44	909,70
BELANJA TAK TERDUGA	0	34.932,86	1.089,77	1.357,58	732,66	980,86
Belanja Tak Terduga	0	34.932,86	1.089,77	1.357,58	732,66	980,86
BELANJA TRANSFER	184.511,74	173.344,64	178.314,38	163.496,48	178.023,65	192.123,56
Belanja Bagi Hasil	4.775,81	2.359,67	2.357,93	1.479,32	1.727,17	1.785,60
Belanja Bantuan Keuangan	179.735,94	170.984,97	175.956,45	162.017,15	176.296,48	190.337,96

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan, 2024

Jika melihat struktur belanja daerah Kabupaten Seruyan pada tahun 2024, sebesar 66 persen realisasi belanja daerah digunakan untuk belanja operasional. Belanja operasional merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Realisasi belanja daerah terbesar berikutnya adalah belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Di tahun 2024, porsi belanja

modal sebesar 20 persen dari seluruh belanja modal. Alokasi belanja modal yang masih rendah dan pertumbuhan nilai belanja modal yang tidak signifikan menunjukkan kurangnya keseriusan Pemerintah Kabupaten Seruyan dalam meningkatkan infrastruktur wilayah, yang pada akhirnya menghambat proses pembangunan. Sementara realisasi belanja tidak terduga dan belanja transfer di tahun 2024, masing-masing sebesar 0,0 persen dan 14 persen dari total belanja daerah.



Gambar 2.71. Grafik Struktur Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024

Sumber: LKPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024 (diolah)

Apabila dilihat dari kinerja realisasi belanja daerah, Pemerintah Kabupaten Seruyan menunjukkan hasil yang cukup baik dengan tingkat penyerapan lebih dari 85 persen. Kinerja belanja operasional juga mengalami kecenderungan membaik dari 697.995,13 juta di tahun 2019 meningkat menjadi 913.806,53 juta di tahun 2024. Sedangkan, belanja modal memiliki kinerja realisasi yang kurang memuaskan karena nilainya cenderung mengalami penurunan dengan tingkat penyerapan pada tahun 2019 sebesar 364.951,71 juta dan turun menjadi 277.396,25 juta pada tahun 2024. Untuk melihat gambaran kinerja belanja Pemerintah Kabupaten Seruyan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.98. Kinerja Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024

Uraian	Realisasi (Rp Juta)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
BELANJA	1.247.458,58	1.090.245,44	1.107.681,47	1.071.565,46	1.246.264,39	1.384.306,96
BELANJA OPERASI	697.995,13	612.765,22	714.898,92	747.007,67	832.448,84	913.806,53
Belanja Pegawai	380.619,58	383.996,18	329.783,90	366.213,21	365.545,40	418.254,62
Belanja Barang Jasa	244.184,07	211.224,71	317.828,52	329.372,64	368.195,90	388.166,39
Bunga	0	0	0	0	0	0
Subsidi	1.711,44	1.837,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Hibah	61.256,30	9.629,10	52.584,98	29.943,45	86.720,99	103.060,85
Bantuan Sosial	10.223,74	6.077,85	12.701,52	19.478,37	9.986,54	2.324,67
BELANJA MODAL	364.951,71	269.202,72	213.378,39	159.703,74	235.059,25	277.396,00
Belanja Tanah	0	6,75	0	0	0	9,01
Belanja Peralatan dan Mesin	70.512,08	72.657,14	74.927,64	48.875,92	45.974,88	70.347,47
Belanja Gedung dan Bangunan	69.240,18	48.314,92	40.971,06	31.520,63	57.398,96	52.371,26
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	217.282,52	133.766,41	96.672,38	77.887,87	130.384,67	153.015,36
Belanja Aset Tetap Lainnya	7.916,92	14.457,51	807,31	1.419,32	870,29	743,21
Belanja Aset Lainnya	0	0	0	0	430,44	909,7
BELANJA TAK TERDUGA	0	34.932,86	1.089,77	1.357,58	732,66	980,86
Belanja Tak Terduga	0	34.932,86	1.089,77	1.357,58	732,66	980,86
BELANJA TRANSFER	184.511,74	173.344,64	178.314,38	163.496,48	178.023,65	192.123,56
Belanja Bagi Hasil	4.775,81	2.359,67	2.357,93	1.479,32	1.727,17	1.785,60
Belanja Bantuan Keuangan	179.735,94	170.984,97	175.956,45	162.017,15	176.296,48	190.337,96

Sumber: LKPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan secara umum faktor yang menghambat kinerja belanja daerah adalah keterbatasan sumber daya yang tersedia sehingga masih ada kebutuhan yang belum terakomodasi serta terdapat program-program lanjutan strategis, terutama program dan kegiatan fisik dengan nilai anggaran yang cukup besar sehingga berpengaruh terhadap keseluruhan rencana alokasi anggaran belanja.

2.2.1.1.3. Pembiayaan Daerah

Informasi realisasi pengeluaran pembiayaan digunakan untuk melihat seberapa besar pengeluaran pemerintah yang bersifat mengikat dan harus dipenuhi oleh surplus anggaran yang ada. Kondisi pembiayaan daerah Kabupaten Seruyan selama periode tahun 2019-2024 tercantum pada tabel di bawah. Dari tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa SiLPA 2019 sampai dengan 2024 cenderung mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja APBD semakin baik.

Tabel 2.99. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024

Uraian	Realisasi (Rp Juta)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PEMBIAYAAN	364.252,10	239.807,90	148.717,76	141.226,98	168.940,99	105.327,39
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	364.252,10	239.807,90	161.680,26	154.189,48	181.903,49	118.289,89
Penggunaan SiLPA	364.252,10	239.807,90	161.680,26	154.189,48	181.903,49	118.289,89
Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0	0
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0	0	0	0	0	0
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0	12.962,50	12.962,50	12.962,50	12.962,50
Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
Penyertaan Modal Pemerintahan Daerah	0	0	12.962,50	12.962,50	12.962,50	12.962,50
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0	0	0	0	0	0

Uraian	Realisasi (Rp Juta)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0	0	0	0	0	0
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0	0	0	0	0	0

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan, 2024

2.2.1.2. Neraca Daerah

Neraca Daerah merupakan salah satu komponen laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat pada masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter.

Data menunjukkan bahwa aset pemerintah Kabupaten Seruyan selama kurun waktu 2019-2024 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2019, aset pemerintah Kabupaten Seruyan sebesar Rp3.279.683.519.259,68, meningkat menjadi Rp3.385.603.095.486,51 pada tahun 2023 dan kemudian menurun pada tahun 2024 menjadi Rp3.237.645,88 juta. Proporsi terbesar aset pemerintah Kabupaten Seruyan merupakan aset tetap, dimana keadaan tahun 2023 menyumbang sebesar 82,45 persen keseluruhan aset daerah. Aset tetap meliputi tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya; konstruksi dalam pengerjaan; serta akumulasi penyusutan.

Data kewajiban daerah, menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Seruyan tidak memiliki kewajiban jangka panjang. Kewajiban daerah hanya pada kewajiban jangka pendek, yang meliputi pendapatan diterima dimuka, utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya.

Besaran kewajiban sampai keadaan tahun 2024 sebesar Rp5.130,22 juta. Sedang untuk ekuitas dana pemerintah Kabupaten Seruyan pada tahun 2019 sebesar Rp3.276.774.277.016,37 menjadi Rp3.232.515,66 juta pada tahun 2024.

Gambaran tentang Neraca Daerah Kabupaten Seruyan pada periode tahun 2019-2023 tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.100. Neraca Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024

Uraian		Tahun (Rp Juta)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
ASET							
ASET LANCAR							
	Kas di Kas Daerah	233.101,10	153.859,43	138.401,22	170.205,28	107.133,71	72.606,10
	Kas Bendahara di Penerimaan	2,85	5,54	0	0	0	0
	Kas Bendahara di Pengeluaran	0,99	36,26	0	0	0	71,69
	Kas di BLUD	4.327,53	3.267,40	13.373,66	10.869,79	7.170,94	5.336,53
	Kas Dana BOS	761,66	2.193,89	1.458,96	338,45	189,37	236,27
	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	903,13	1.446,19	955,63	489,96	0	0
	Kas Lainnya	0	160,94	0	0	0	0
	Kas Dana BOK Puskesmas	-	-	-	0	3.795,88	3.060,15
	Piutang Pajak Daerah	7.700,01	8.800,03	7.315,12	6.323,71	6.550,67	7.304,87
	Piutang Retribusi Daerah	318,06	291,23	282,5	159,04	171,47	263,51
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.662,45	3.395,07	17.886,63	1.197,05	833,96	744,01
	Piutang Transfer Antar Daerah	11.032,18	11.676,36	15.229,25	12.649,58	9.301,46	0
	Piutang Lainnya	0	0	0	44,91	0	29,94
	Penyisihan Piutang	-4.035,55	-5.474,08	-3.508,42	-2.905,94	-3.586,78	-4.392,81
	Beban Dibayar Dimuka	140,96	174,17	231,85	267,84	51,3	60,51

Uraian		Tahun (Rp Juta)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Persediaan	41.693,80	42.301,47	85.604,06	87.307,38	99.866,08	119.467,30
Jumlah Aset Lancar		297.609,21	222.133,90	277.230,45	286.947,07	231.478,05	204.788,08
INVESTASI JANGKA PANJANG							
1	Investasi Nonpermanen						
	Pinjaman Jangka Panjang	0	0	0	0	0	0
	Investasi Nonpermanen Lainnya	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Investasi Nonpermanen	0	0	0	0	0	0
2	Investasi Permanen						
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	56.627,78	56.753,60	68.873,30	80.443,98	92.793,07	105.432,28
	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Investasi Permanen	56.627,78	56.753,60	68.873,30	80.443,98	92.793,07	105.432,28
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	56.627,78	56.753,60	68.873,30	80.443,98	92.793,07	105.432,28
ASET TETAP							
	Tanah	199.911,61	202.644,39	201.458,42	201.272,23	223.764,85	224.501,19
	Peralatan dan Mesin	378.567,49	443.189,23	514.226,30	507.663,21	542.510,73	551.538,08
	Gedung dan Bangunan	854.460,72	908.330,55	945.497,50	957.633,32	1.013.131,62	1.064.225,87
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.771.783,47	2.951.864,23	3.045.121,81	3.117.629,27	3.176.719,12	3.331.989,28
	Aset Tetap Lainnya	27.658,16	38.567,61	41.759,86	42.001,64	119.955,53	126.177,27
	Konstruksi dalam Pengerjaan	114.649,27	96.717,17	116.014,43	122.011,56	127.499,31	133.496,72
	Akumulasi Penyusutan	-1.515.950,80	-1.727.905,14	-1.953.498,55	-2.283.218,65	-2.411.817,62	-2.596.611,11
	Jumlah Aset Tetap	2.831.079,92	2.913.408,03	2.910.579,78	2.664.992,57	2.791.763,53	2.835.317,29
DANA CADANGAN							
	Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
ASET LAINNYA							
	Tagihan Jangka Panjang	51.461,11	51.895,76	51.727,94	51.606,10	51.515,66	51.272,90

Uraian		Tahun (Rp Juta)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	0
	Aset Tak Berwujud	9.997,61	11.006,31	11.006,31	11.228,03	11.777,42	13.927,56
	Amortisasi Aset Tak Berwujud	-2.903,98	-3.538,88	-4.325,82	-4.981,75	-5.739,85	-6.632,22
	Aset Lain-lain	79.229,62	70.912,03	81.716,51	70.115,57	76.983,22	124.183,32
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	-43.417,74	-37.768,88	-46.462,76	-41.148,16	-47.866,25	-94.150,92
	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0	0	0	30.714,82	182.898,24	3.507,58
Jumlah Aset Lainnya		94.366,62	92.506,34	93.662,19	117.534,60	269.568,44	92.108,23
JUMLAH ASET		3.279.683,52	3.284.801,87	3.350.345,72	3.149.918,23	3.385.603,10	3.237.645,88
KEWAJIBAN							
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK							
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0	0	0	0	0	0
	Utang Bunga	0	0	0	0	0	0
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0	0	0	0	0	0
	Pendapatan Diterima Dimuka	0,93	7,01	61,31	53,01	14,54	70,56
	Utang Belanja	2.181,06	3.449,48	18.309,97	5.681,39	3.007,83	5.029,18
	Utang Jangka Pendek Lainnya	727,25	1.072,89	5.300,32	39,61	693,39	30,47
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		2.909,24	4.529,38	23.671,60	5.774,10	3.715,76	5.130,22
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG							
	Utang kepada Pemerintah Pusat	0	0	0	0	0	0
	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0	0	0	0	0	0

Uraian		Tahun (Rp Juta)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0	0	0	0	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0	0	0	0	0	0
JUMLAH KEWAJIBAN		2.909,24	4.529,38	23.671,60	5.774,10	3.715,76	5.130,22
EKUITAS/EKUITAS DANA							
	Ekuitas/Ekuitas Dana	3.276.774,28	3.280.272,49	3.326.674,13	3.144.144,13	3.381.887,34	3.232.515,66
JUMLAH EKUITAS/EKUITAS DANA		3.276.774,28	3.280.272,49	3.326.674,13	3.144.144,13	3.381.887,34	3.232.515,66
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		3.279.683,52	3.284.801,87	3.350.345,72	3.149.918,23	3.385.603,10	3.237.645,88

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan, 2024

Untuk memahami kemampuan keuangan Kabupaten Seruyan dilakukan analisis menggunakan analisis rasio keuangan, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Analisis rasio keuangan yang digunakan untuk menganalisis kemampuan keuangan Kabupaten Seruyan adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Rasio likuiditas dilakukan untuk menganalisis kemampuan kas Pemerintah Daerah dalam memenuhi operasional pemerintah dan utang jangka pendeknya. Rasio solvabilitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan aset dan ekuitas daerah dalam memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah di masa mendatang. Kemudian, rasio aktivitas dilakukan untuk mengetahui seberapa cepat piutang daerah dan persediaan dapat dikonversi menjadi kas atau pelayanan. Hasil perhitungan untuk analisis rasio likuiditas,

rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas Pemerintah Kabupaten Seruyan selama 5 tahun terakhir tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.101. Analisis Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Aktivitas Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun (Rp Juta)				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Rasio Likuiditas					
	Aset Lancar	297.609,21	222.133,90	277.230,45	286.947,07	231.478,05
	Persediaan	41.693,80	42.301,47	85.604,06	87.307,38	99.866,08
	Kewajiban Jangka Pendek	2.909,24	4.529,38	23.671,60	5.774,10	3.715,76
1	Rasio Lancar	102,30	49,04	11,71	49,70	62,30
2	Rasio <i>Quick</i>	87,97	39,70	8,10	34,58	35,42
B	Rasio Solvabilitas					
	Total Aset	3.279.683,52	3.284.801,87	3.350.345,72	3.149.918,23	3.385.603,10
	Total Utang	2.909,24	4.529,38	23.671,60	5.774,10	3.715,76
	Total Ekuitas	3.276.774,28	3.280.272,49	3.326.674,13	3.144.144,13	3.381.887,34
1	DAR	0,00089	0,00138	0,00707	0,00183	0,00110
2	DER	0,00089	0,00138	0,00712	0,00184	0,00110
C	Rasio Aktivitas					
	Pendapatan Daerah	1.123.014,38	1.012.117,81	1.113.153,19	1.112.241,97	1.195.613,20
	Saldo Awal Piutang	20.617,73	20.712,72	24.162,69	40.713,49	20.374,30
	Saldo Akhir Piutang	20.712,72	24.162,69	40.713,49	20.374,30	16.857,57
1	Rata-rata Umur Piutang	6,72	8,09	10,64	10,02	5,68
	Nilai Persediaan (Beban Persediaan)	54.919,56	73.578,71	67.571,82	55.268,73	51.543,25
	Saldo Awal Persediaan	35.853,29	41.693,80	42.301,47	85.604,06	87.307,38
	Saldo Akhir Persediaan	41.693,80	42.301,47	85.604,06	87.307,38	99.866,08
2	Rata-rata Umur Persediaan	257,69	208,34	345,45	570,96	662,73

Sumber: Diolah dari Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan

Hasil perhitungan Rasio Likuiditas ditunjukkan dengan menggunakan nilai rasio lancar dan rasio *quick*. Berdasarkan hasil perhitungan nilai rasio lancar neraca keuangan pemerintah Kabupaten Seruyan tahun 2019 sebesar 102,30, menurun pada tahun 2020 dan

2021 menjadi 49,04 dan 11,71. Kemudian kembali meningkat menjadi 49,70 pada tahun 2022 dan 62,30 pada tahun 2023. Relatif sama dengan rasio lancar, rasio *quick* juga menunjukkan indikasi yang sama. Pada tahun 2019, rasio *quick* pemerintah Kabupaten Seruyan sebesar 87,97 terus menurun secara signifikan menjadi 8,10 pada tahun 2021. Kemudian nilainya mengalami peningkatan menjadi 34,58 pada tahun 2022. Dari nilai rasio lancar dan rasio *quick* ini mengindikasikan bahwa pemerintah Kabupaten Seruyan masih mampu melunasi kewajiban jangka pendek melalui pencairan aset lancar, dengan tetap memperhatikan bahwa penurunan nilai yang signifikan pada tahun 2020 dan 2021 memberi indikasi agar lebih berhati-hati dalam mengelola aset lancar, dalam rangka menjamin terpenuhinya kewajiban jangka pendek secara baik.

Rasio solvabilitas dilakukan dengan menghitung analisis rasio *Debt to Assets Ratio* (DAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER). Hasil perhitungan solvabilitas menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah Kabupaten Seruyan cukup baik. Nilai DAR Kabupaten Seruyan sangat kecil yaitu 0,00089 pada tahun 2019 dan terakhir pada tahun 2023 sebesar 0,00110. Nilai DER juga menunjukkan indikasi yang sama, yaitu sebesar 0,00089 pada tahun 2019 menjadi 0,00110 pada tahun 2023. Meskipun terus mengalami peningkatan, namun masih berada pada toleransi dibawah 0,75. Angka rasio solvabilitas ini menunjukkan bahwa selama tahun 2019-2023 pemerintah Kabupaten Seruyan cukup kuat untuk membayar utang jika melakukan pinjaman jangka panjang.

Analisis rasio aktivitas pada neraca keuangan daerah menggunakan rasio rata-rata umur piutang dan rasio rata-rata umur persediaan. Rasio rata-rata umur piutang adalah 365 hari dibagi dengan perputaran piutang, sedang rasio rata-rata umur persediaan adalah 365 hari dibagi dengan perputaran persediaan. Berdasarkan formula tersebut, maka rasio aktivitas neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Seruyan kondisi yang cukup baik.

Jika dilihat dari rasio rata-rata umur piutang, terjadi perkembangan yang cukup fluktuatif dan cenderung menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi perbaikan kinerja piutang menjadi kas untuk operasional Pemerintah Kabupaten Seruyan terjadi antara 5-10 hari. Jika dilihat dari besaran umur piutang, konversi piutang daerah menjadi kas relatif rendah dan ini menunjukkan indikasi kinerja keuangan yang baik. Sedangkan rata-rata umur persediaan, menunjukkan adanya peningkatan rata-rata umur persediaan. Kondisi ini menunjukkan adanya penurunan konversi persediaan untuk memenuhi pelayanan publik, jika dilihat dari umur persediaan antara 257-662 hari yang artinya perlu adanya kebijakan anggaran belanja persediaan yang lebih efisien.

2.2.1.3. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran yang dimaksud berkaitan dengan realisasi dan proporsi belanja penyelenggaraan pemerintahan atau untuk kebutuhan aparatur. Belanja penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam rangka memenuhi kewajiban daerah, yang diwujudkan melalui peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, serta pengembangan sistem jaminan sosial.

Proporsi realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Seruyan tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.102. Proporsi Belanja Kebutuhan Aparatur Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024

Uraian	Realisasi (Rp Juta)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Total Belanja Pegawai	380.619,58	383.996,18	329.783,90	366.213,21	365.545,40	418.254,62

Uraian	Realisasi (Rp Juta)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Total Pengeluaran (Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan)	1.611.710,68	1.330.053,34	1.256.399,24	1.212.792,44	1.415.205,38	1.489.634,35
Proporsi Belanja Aparatur (%)	23,62	28,87	26,25	30,20	25,83	28,08

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan (diolah), 2024

Proporsi belanja pemenuhan aparatur terhadap total pengeluaran pada periode tahun 2019-2024 menunjukkan kondisi yang fluktuatif namun cenderung meningkat. Pada tahun 2019, porsi realisasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur sebesar 23,62 persen dari total realisasi pengeluaran daerah. Kemudian realisasinya meningkat pada tahun 2020 menjadi 28,87 persen dan kemudian turun menjadi 26,25 persen pada tahun 2021. Pada tahun 2022, proporsi belanja aparatur naik menjadi 30,20 persen, namun pada tahun selanjutnya kembali mengalami penurunan menjadi 25,83 persen dan naik kembali di tahun 2024 menjadi 28,08. Hal ini menunjukkan bahwa ada upaya kebijakan dan pelaksanaan anggaran yang lebih memprioritaskan keberhasilan program pembangunan daerah. Meski nilai proporsi belanja aparatur mengalami kecenderungan meningkat, namun realisasi belanja pegawai mengalami pertumbuhan negatif begitu pula dengan realisasi pengeluaran daerah.

2.2.1.4. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau belanja yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan dapat dibedakan atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah. Penerimaan daerah terdiri dari penggunaan SiLPA

tahun anggaran sebelumnya, penerimaan dana cadangan, serta penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah. Sedangkan pengeluaran daerah terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, serta pembayaran pokok utang.

Gambaran mengenai realisasi surplus (defisit) riil anggaran pemerintah Kabupaten Seruyan pada periode tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.103. Analisis Realisasi Surplus (Defisit) Riil Anggaran Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2024

No	Uraian	Realisasi (Rp Juta)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.123.014,38	1.012.117,81	1.113.153,19	1.112.241,97	1.195.613,20	1.360.290,31
	Dikurangi Realisasi :						
2	Belanja Daerah	1.247.458,58	1.090.245,44	1.107.681,47	1.071.565,46	1.246.264,39	1.384.306,96
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	0,00	12.962,50	12.962,50	12.962,50	12.962,50
A	Surplus (Defisit) Riil	-124.444,20	-78.127,64	-7.490,78	27.714,01	-63.613,69	-36.979,15
	Ditutup Realisasi :						
	Penggunaan SiLPA	364.252,10	239.807,90	161.680,26	154.189,48	181.903,49	118.289,89
	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
B	Penerimaan Pembiayaan Daerah	364.252,10	239.807,90	161.680,26	154.189,48	181.903,49	118.289,89
	SILPA	239.807,90	161.680,26	154.189,48	181.903,49	118.289,79	81.310,74

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan (diolah), 2024

Penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutup defisit riil yang meliputi selisih pendapatan dengan belanja dan pengeluaran daerah.

Selama periode tahun 2019-2023, terlihat bahwa pada tahun 2019, 2020, 2021, 2023, dan 2024 terjadi defisit anggaran sedangkan pada tahun 2022 terjadi surplus anggaran. Selanjutnya defisit riil anggaran Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2021 dan 2024 ditutup dengan penerimaan pembiayaan daerah, dengan komposisi sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas.

2.2.2. Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun ke Depan

Sebagai bagian dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemerintah Kabupaten Seruyan menyusun proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah tahun 2025–2030. Proyeksi ini menjadi acuan penting dalam merancang arah kebijakan fiskal yang sehat, berkelanjutan, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah secara efektif.

Secara umum, pendapatan daerah Kabupaten Seruyan diproyeksikan meningkat dari Rp1,4 triliun pada tahun 2025 menjadi sekitar Rp1,64 triliun pada tahun 2030. Peningkatan ini didominasi oleh pendapatan transfer dari pemerintah pusat, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren yang relatif stabil. Di sisi belanja, komponen belanja operasi tetap menjadi porsi terbesar dalam struktur pengeluaran, disusul belanja modal yang juga tumbuh secara moderat. Untuk menjaga keseimbangan fiskal, pembiayaan netto tetap dikendalikan dalam kisaran Rp104–105 miliar per tahun, mencerminkan strategi fiskal yang hati-hati dan terukur. Secara lebih jelas, proyeksi keuangan Kabupaten Seruyan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.104. Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030 Kabupaten Seruyan

NO	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	PENDAPATAN						
A.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	75.395.125.019	164.406.468.824	172.049.981.408	180.092.723.428	188.537.602.550	197.957.046.423
B.	Pendapatan Transfer	1.284.895.183.856	1.118.382.407.534	1.124.706.228.484	1.180.542.766.110	1.239.171.130.617	1.300.730.913.350
C.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	1.360.290.308.875	1.282.788.876.358	1.296.756.209.892	1.360.635.489.538	1.427.708.733.167	1.498.687.959.773
2	BELANJA						
A.	Belanja Operasi	913.827.830.899	852.066.202.418	850.840.565.404	870.840.565.404	890.840.565.404	915.840.565.404
B.	Belanja Modal	277.396.004.732	200.261.782.359	216.392.067.453	247.363.949.455	280.739.995.558	312.178.291.762
C.	Belanja Tidak Terduga	980.862.176	26.260.000.000	28.886.000.000	31.774.600.000	34.952.060.000	38.447.266.000
D.	Belanja Transfer	192.123.559.939	204.200.891.581	200.637.577.035	210.656.374.679	221.176.112.205	232.221.836.607
	JUMLAH BELANJA	1.384.328.257.746	1.282.788.876.358	1.296.756.209.892	1.360.635.489.538	1.427.708.733.167	1.498.687.959.773
	SURPLUS/(DEFISIT)		-	-	-	-	-
3	PEMBIAYAAN						
A.	Penerimaan Pembiayaan	118.289.891.990	-	-	-	-	-
B.	Pengeluaran Pembiayaan	12.962.500.000	-	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	105.327.391.990	-	-	-	-	-

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029

*Catatan: rincian pendapatan, belanja daerah, dan pembiayaan daerah bersifat indikatif

Pendapatan Kabupaten Seruyan diproyeksikan mengalami peningkatan yang konsisten, dari Rp1,51 triliun pada tahun 2025 menjadi Rp1,66 triliun pada tahun 2030. Sumber utama pendapatan berasal dari pendapatan transfer, yang mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan sumber lainnya dari pemerintah pusat. Meskipun demikian, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih tergolong rendah dan menunjukkan fluktuasi, menandakan perlunya penguatan kapasitas fiskal lokal untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer.

Belanja daerah juga menunjukkan tren peningkatan yang sejalan dengan kenaikan pendapatan. Belanja operasi menjadi komponen terbesar, naik dari Rp994,38 miliar pada 2025 menjadi sekitar Rp1,09 triliun pada 2030, mencerminkan beban rutin pemerintah dalam menjalankan layanan publik. Belanja modal menunjukkan kecenderungan peningkatan moderat, menandakan adanya upaya pembangunan infrastruktur dan aset daerah. Peningkatan belanja yang proporsional ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pelayanan dan pembangunan.

Dari sisi pembiayaan, Kabupaten Seruyan memproyeksikan pembiayaan netto yang relatif stabil di kisaran Rp104–105 miliar setiap tahun. Penerimaan pembiayaan didominasi oleh penggunaan SiLPA atau pembiayaan lain yang sah, sementara pengeluaran pembiayaan tetap konstan di angka Rp12,96 miliar. Stabilitas ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah berupaya menjaga postur fiskal yang berimbang, dengan meminimalkan ketergantungan pada pembiayaan utang atau defisit yang besar.

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis

Pembangunan daerah adalah upaya strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Di Kabupaten Seruyan, pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2018-2023 telah berjalan dengan baik. Indikator-indikator pembangunan

menunjukkan bahwa program-program yang direncanakan dalam RPJMD tersebut sebagian besar mencapai target yang diharapkan. Namun, kemajuan pembangunan di Kabupaten Seruyan bervariasi. Beberapa program berhasil mencapai tujuannya, sementara yang lain belum memberikan hasil yang signifikan. Pelaksanaan program-program ini menghadapi berbagai tantangan, baik dari faktor internal maupun eksternal. Pelaksanaan program-program pembangunan mungkin menghadapi berbagai masalah, baik dari dalam maupun luar. Hal ini menciptakan berbagai masalah pembangunan dan isu penting yang harus diperhatikan dalam rencana pembangunan berikutnya. Bab ini mengevaluasi kemajuan pembangunan sebelumnya dan mengidentifikasi masalah serta isu yang ada di Kabupaten Seruyan. Evaluasi ini menjadi dasar untuk merancang perencanaan pembangunan selanjutnya.

2.3.1. Permasalahan

Permasalahan dalam pembangunan daerah merupakan isu penting karena menunjukkan ketidakselarasan antara kondisi ideal yang diharapkan dengan kondisi nyata selama pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, perumusan permasalahan harus dilakukan dengan cermat, karena menjadi dasar bagi penyusunan visi dan misi kepala daerah terpilih dalam perencanaan pembangunan. Di Kabupaten Seruyan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 merupakan langkah awal menuju Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) periode 2025-2045. RPJMD ini adalah bagian dari RPJPD, sehingga setiap kebijakan dan program yang direncanakan harus selaras dengan tujuan jangka panjang yang ditetapkan dalam RPJPD. Analisis dan kajian terhadap permasalahan pembangunan daerah sangat penting, karena hasilnya akan memberikan panduan lebih lanjut tentang arah kebijakan pembangunan untuk tahap pertama periode 2025-2029 dalam RPJPD. Arah kebijakan dan identifikasi masalah utama yang dihadapi Kabupaten Seruyan akan disajikan secara visual dalam gambar berikut.



Gambar 2. 72 Arah Kebijakan dan Permasalahan Kabupaten Seruyan

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029

2.3.1.1. Pembangunan Infrastruktur Jalan Intra Wilayah (Kabupaten), Penghubung antar Desa dan Kecamatan

A. Masalah Utama : Kualitas Infrastruktur Jalan dan Kinerja Perhubungan

Dalam rangka mewujudkan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045, tahap awal perencanaan pembangunan difokuskan pada peningkatan konektivitas dan aksesibilitas. Konektivitas yang baik merupakan kunci untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, distribusi barang dan jasa, serta mobilitas masyarakat. Namun, saat ini terdapat beberapa masalah utama yang perlu diatasi, terutama terkait kualitas infrastruktur jalan dan kinerja perhubungan.

Kualitas jalan yang menghubungkan desa dan kecamatan di Kabupaten Seruyan masih perlu ditingkatkan. Banyak jalan yang belum memenuhi standar kualitas yang memadai, sehingga menghambat mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, kinerja

perhubungan juga belum optimal, dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Tabel dibawah merangkum permasalahan utama yang dihadapi terkait kualitas infrastruktur jalan dan kinerja perhubungan, beserta akar permasalahan dan urusan yang terkait.

Tabel 2. 105. Permasalahan Kualitas Infrastruktur Jalan dan Kinerja Perhubungan

Masalah Daerah	Akar Permasalahan	Data Profil Daerah	Urusan
Kualitas infrastruktur jalan belum memadai	Kondisi jalan belum seluruhnya dalam kondisi baik	Kondisi Jalan Rusak tahun 2024 sepanjang 657,815 Km atau hanya sebesar 26,28% jalan dengan kondisi baik	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Konektivitas dan kinerja perhubungan belum memadai	Sarana prasarana dan pelayanan lalu lintas angkutan sungai danau dan penyeberangan belum memadai dan perlu pengembangan	Persentase Layanan Angkutan Darat masih di angka 0,71% serta jumlah Pelabuhan Laut/Dermaga/Udara/ Terminal Bus sebanyak 102 unit	Perhubungan
	Sarana prasarana dan pelayanan lalu lintas angkutan darat belum memadai		
	Kinerja perwujudan keselamatan lalu lintas dan rekayasa lalu lintas belum optimal		

Sumber: Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan 2024-2026

2.3.1.2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar, Pendidikan, Kesehatan, dan Kantor Pelayanan Publik yang Merata

A. Masalah Utama : Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Publik

Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan dasar merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan daerah. Infrastruktur yang memadai dan merata sangat penting untuk

memastikan akses yang setara terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kantor pelayanan publik. Namun, masih terdapat berbagai masalah yang menghambat tercapainya kualitas pelayanan yang optimal. Dalam konteks Kabupaten Seruyan, beberapa permasalahan utama dalam infrastruktur pelayanan dasar dan publik meliputi rendahnya kualitas pelayanan serta akses yang belum merata. Faktor geografis, seperti jarak yang jauh antara fasilitas pelayanan dengan tempat tinggal penduduk, dan keterbatasan sarana serta prasarana menjadi kendala signifikan.

Tabel di bawah ini memberikan gambaran lebih rinci tentang permasalahan infrastruktur pelayanan dasar dan publik di Kabupaten Seruyan, beserta akar permasalahan dan urusan terkait.

Tabel 2.106. Permasalahan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Publik

Masalah Daerah	Akar Permasalahan	Data Profil Daerah	Urusan
Masih rendahnya kualitas pelayanan dan akses pendidikan dan kesehatan	Faktor geografis (jarak ke sekolah yang jauh) Belum maksimalnya daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah	Angka Partisipasi Sekolah (APM) untuk jenjang SMA/SMK masih di angka 62,64%	Pendidikan
Masih rendahnya kualitas pelayanan dan akses kesehatan	Jarak tempuh antara pelayanan dengan ibu yg melahirkan Sarana dan prasarana yang masih belum sesuai standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Masih adanya kendala jangkauan dan kualitas pelayanan bagi masyarakat karena belum terpenuhinya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang belum maksimal	Angka kematian bayi mencapai 10,09 per 1.0000 kelahiran hidup pada tahun 2024	Kesehatan
Permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni	Belum optimalnya sistem drainase sehingga masih terjadi genangan Sulitnya mendapatkan ketersediaan air baku yang	Rasio Permukiman layak huni masih di angka 58,68%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Masalah Daerah	Akar Permasalahan	Data Profil Daerah	Urusan
	layak di beberapa daerah tertentu untuk pembangunan SPAM		
	Masih adanya sejumlah rumah penduduk yang tidak layak huni	Rasio Areal Kawasan Kumuh masih di angka 9,04% serta Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi masih di angka 70,31	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Belum memadainya ketersediaan Prasarana Sarana Umum (PSU) di kawasan Permukiman		
	Masih adanya lingkungan kawasan pemukiman kumuh		
	Belum optimalnya pengentasan layanan rumah tidak layak huni		
	Belum optimalnya pengembangan kawasan pemukiman		
	Masih terdapatnya warga yang belum terlayani akses air bersih dan sanitasi air limbah.		
	Ketersediaan sarana dan prasarana pemadam masih kurang		Ketentraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat
Pelayanan pendaftaran penduduk belum sepenuhnya lengkap	Pencatatan KTP-el belum optimal	Belum tersedianya Database Kependudukan Skala Kabupaten	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Belum lengkapnya penerbitan KK		
	Belum lengkapnya penerbitan KIA		
	Belum lengkapnya penerbitan surat keterangan kependudukan terhadap pendaftaran Peristiwa Kependudukan		
Basis data kependudukan belum optimal	Pemutakhiran data penduduk di SIAK belum optimal		
Sarana prasarana jaringan komunikasi dan informatika yang	Kurang Memadainya Sarana dan Prasarana Penunjang dalam Menjalankan Tugas dan	Persentase Cakupan Layanan Telekomunikasi masih di angka	Komunikasi dan Informatika

Masalah Daerah	Akar Permasalahan	Data Profil Daerah	Urusan
belum memadai	Fungsi Dokumentasi/Publikasi	78%	
Sarana prasarana penunjang penanaman modal yang belum optimal	Belum Optimal Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan ruang pelayanan kurang representatif		Penanaman Modal
Pelayanan penanaman modal yang belum memenuhi kepuasan masyarakat	Belum Optimal Sistem Informasi Promosi dan sistem informasi Pelayanan yang belum berjalan secara maksimal		
	Belum Optimal tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilakukan belum optimalnya tindak lanjut persen pengeluaran tingkat masyarakat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan kepada masyarakat. Permasalahan ini perlu diatasi melalui perlunya diadakan secara rutin pengukuran tingkat kepuasan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui kegiatan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
Belum optimalnya koleksi bahan perpustakaan sebagai upaya peningkatan kegemaran membaca	Kurangnya koleksi perpustakaan	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan masih di angka 12.880 buku	Perpustakaan
	Kurangnya sarana prasarana perpustakaan		
	Kurangnya kualitas SDM perpustakaan dan kearsipan		
	Kurangnya alat transportasi untuk pelaksanaan perpustakaan keliling terbatas, terkait wilayah geografis yang akan dilayani		
Belum optimalnya kunjungan ke	Kurang optimalnya mutu dan jenis pelayanan	Persentase Pengunjung	

Masalah Daerah	Akar Permasalahan	Data Profil Daerah	Urusan
perpustakaan	perpustakaan	Perpustakaan per Tahun hanya 11,25%	
	Kurangnya kapasitas masyarakat		
	Kurangnya pembinaan perpustakaan		
	Belum optimalnya sistem layanan perpustakaan dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK)		
Sarana dan prasarana kearsipan yang belum memadai	Kurangnya sarana prasarana perpustakaan dan kearsipan	Persentase Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan masih di angka 80%	Kearsipan

Sumber: Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan 2024-2026

2.3.1.3. Meningkatkan Tingkat Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat serta Penguatan Kualitas Kelompok Usia Produktif (Tenaga Kerja)

A. Masalah Utama : Kualitas sumber daya manusia dan tenaga kerja

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan tenaga kerja merupakan salah satu aspek krusial dalam pembangunan daerah. SDM yang berkualitas dan tenaga kerja yang kompeten sangat dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan mempercepat pembangunan di berbagai sektor. Namun, Kabupaten Seruyan masih menghadapi beberapa masalah utama dalam aspek ini. Kualitas pendidikan dan pelatihan kerja yang belum optimal, rendahnya tingkat keterampilan dan kompetensi tenaga kerja, serta kesadaran akan hidup sehat yang perlu ditingkatkan menjadi tantangan besar yang perlu segera diatasi.

Tabel di bawah ini merangkum permasalahan utama terkait kualitas sumber daya manusia dan tenaga kerja di Kabupaten Seruyan, beserta akar permasalahan dan urusan terkait.

Tabel 2.107. Permasalahan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan

Masalah Daerah	Akar Permasalahan	Data Profil Daerah	Urusan	
Menurunnya Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Kelulusan tingkat SMA, serta Numerasi dan Literasi sesuai dengan Asesmen Nasional	Kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan oleh orang tua murid	Angka Partisipasi Sekolah (APM) untuk jenjang SMA/SMK masih di angka 62,64%	Pendidikan	
	Kurangnya kesadaran adanya regulasi PPDB (penerimaan peserta didik baru)			
	Faktor ekonomi			
	Lingkungan keluarga tidak mendukung			
	Kurangnya pemahaman peserta didik dalam proses pembelajaran Kurikulum Merdeka			
Terjadinya penurunan Angka Melanjutkan untuk jenjang pendidikan SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/SMK	Kenakalan remaja/ minat sekolah rendah	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK masih di angka 71,33%		
	Belum meratanya siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yg lebih tinggi			
	Angka putus sekolah tinggi			
	Kurangnya pemahaman terhadap materi/ pembelajaran			
Masih Tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI). Serta masih ditemukan Kasus Gizi Buruk/Stunting	Masyarakat di desa masih menggunakan dukun kampung dalam proses persalinan	Angka kematian bayi mencapai 10,09 per 1.0000 kelahiran hidup pada tahun 2024	Kesehatan	
	Tingkat pemahaman keluarga dan masyarakat masih rendah akan pentingnya makna kesehatan ibu dan anak serta pemenuhan kebutuhan gizi			
Rendahnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat	Masih rendahnya masyarakat dalam sadar kebersihan lingkungan dan berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi masih di angka 70,31		
	Masih terdapat Rumah Tangga yang belum memiliki toilet dan masih memakai jamban			
Kesadaran masyarakat yang	Kesediaan masyarakat untuk pembangunan SPALD masih	Persentase Rumah Tinggal		Pekerjaan Umum dan Penataan

Masalah Daerah	Akar Permasalahan	Data Profil Daerah	Urusan
masih rendah terkait sanitasi	rendah Kebiasaan masyarakat berperilaku BABS terutama masyarakat bantaran sungai	Bersanitasi masih di angka 70,31	Ruang
Kurangnya tenaga kerja yang berkualitas dan bersertifikasi	Terbatasnya kuota pelatihan jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh Kabupaten pada tiap tahunnya sehingga belum seluruh tenaga kerja konstruksi bersertifikasi		
Kurang diperhatikannya kondisi dan perkembangan pasar kerja	Minimnya tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja masih di angka 68,71%	Ketenagakerjaan
	Masih terjadi ketimpangan pasar kerja yang ditandai dengan kelebihan tenaga kerja, disebabkan terutama oleh struktur ekonomi yang belum mampu menyerap seluruh angkatan kerja yang ada		
	Masih kurangnya mutu dan produktivitas tenaga kerja		
	Kurangnya semangat dan jiwa kewirausahaan bagi penduduk usia kerja agar mampu bekerja secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru		
	Belum sinkronnya pembangunan pendidikan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja		
Pembangunan perempuan dan anak yang belum optimal	Masih adanya kasus perselisihan Hubungan Industrial antar Pekerja dan Pengusaha, sehingga perlu mewujudkan hubungan industrial yang harmonis	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di angka 65,15%	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Menurunnya IPG dan IDG		
	Belum terlaksananya Kabupaten Layak Anak (KLA)		
	Tingginya jumlah korban kekerasan terhadap		

Masalah Daerah	Akar Permasalahan	Data Profil Daerah	Urusan
	perempuan dan anak		
	Stunting pada anak		
Masih belum optimalnya kinerja pengendalian kuantitas penduduk menuju kondisi penduduk tumbuh seimbang	Tingginya Angka kelahiran total (TFR)	Laju Pertumbuhan Penduduk di angka 1,48	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kualitas sumber daya manusia olahraga yang masih rendah	Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang olahraga	Cakupan Pembinaan Olahraga mencapai 96%	Kepemudaan dan Olahraga
Kelembagaan olahraga yang belum berjalan dengan baik	Mengoptimalkan pembinaan keolahragaan dan atlet-atlet berbakat		
Sarana prasarana olahraga yang belum memadai	Menciptakan olahraga bagi peyandang difabel	Presentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif sebanyak 89%	
	Meningkatkan sarana prasarana pemuda dan olahraga, termasuk gedung olahraga, stadion, gelanggang remaja dan sebagainya		
	Meningkatkan upaya pembibitan dan identifikasi bakat-bakat olahraga		
	Meningkatkan pelatih olahraga yang memenuhi kualifikasi pelatih		
	Meningkatkan fasilitasi olahraga bagi masyarakat penyandang cacat		
Rendahnya pemahaman masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara	Belum optimalnya pembinaan, pengembangan, dan peningkatan pemahaman masyarakat terdapat 4 (empat) pilar kebangsaan dalam rangka memantapkan ketahanan ideologi bangsa, kewaspadaan masyarakat dan pemerintah daerah, politik dan kemasyarakatan, dan ketahanan sosial budaya dan ekonomi	Laju Pertumbuhan Masyarakat yang dibina dalam pengembangan wawasan kebangsaan masih di angka 7,6%	Kesatuan Bangsa dan Politik

Masalah Daerah	Akar Permasalahan	Data Profil Daerah	Urusan
	Pendidikan politik masyarakat masih rendah		
Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia komunikasi dan informatika yang masih kurang	Kurangnya SDM dalam Melakukan Tugas Dokumentasi serta Publikasi	Persentase Cakupan Layanan Telekomunikasi masih di angka 78%	Komunikasi dan Informatika
	Penguatan Sarana dan Prasarana serta Pelatihan Berkelanjutan Tenaga SDM dalam Menjunjung Tugas dan Fungsi Dokumentasi/Publikasi		
	Terintegrasinya Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Seruyan		
	Pengelolaan Aplikasi dan Domain/Sub Domain milik Pemerintah yang Berkualitas		
	Sosialisasi dan Pelatihan TIK		
Sumber daya manusia yang belum optimal dalam penyelenggaraan kearsipan	Belum optimalnya sistem pengelolaan perpustakaan dan kearsipan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi	Persentase Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan masih di angka 80%	Kearsipan
	Kurangnya pembinaan dan pengawasan perpustakaan dan kearsipan		
	Kurangnya kualitas SDM perpustakaan dan kearsipan		

Sumber: Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan 2024-2026

2.3.1.4. Penguatan Sistem Kelembagaan dan Regulasi Pengelolaan Sumber Daya Alam di Lingkungan serta Kebencanaan

A. Masalah Utama : Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana

Penguatan sistem kelembagaan dan regulasi pengelolaan sumber daya alam di lingkungan serta kebencanaan melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang baik adalah kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Seruyan. Sumber daya alam yang melimpah harus dikelola dengan bijaksana untuk memastikan kesejahteraan masyarakat saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan

generasi mendatang. Selain itu, mitigasi bencana juga menjadi aspek penting mengingat Kabupaten Seruyan rentan terhadap bencana alam. Namun, saat ini terdapat beberapa masalah utama yang perlu diatasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta mitigasi bencana, seperti kelembagaan yang belum memadai, degradasi lingkungan, dan infrastruktur yang belum terpenuhi.

Tabel di bawah ini merangkum permasalahan utama terkait pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta mitigasi bencana di Kabupaten Seruyan, beserta akar permasalahan dan urusan terkait.

Tabel 2.108. Permasalahan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana

Masalah	Akar Permasalahan	Data Profil Daerah	Urusan
Tingginya alih fungsi lahan di Kabupaten Seruyan	Banyaknya daerah irigasi yang sudah beralihfungsi, sehingga berkurangnya lahan pertanian dikarenakan beralih fungsinya lahan pertanian ke perkebunan.	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB masih di angka 4,62%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kelembagaan dan tata kelola kebencanaan dan lingkungan yang belum memadai	Masih belum lengkapnya data rumah masyarakat yang terdampak bencana dan relokasi akibat program pemerintah serta rumah masyarakat yang rawan terhadap bencana.	Rasio Rumah Layak Huni mencapai angka 60%	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Sumber daya manusia dan infrastruktur terkait kebencanaan yang belum terpenuhi	Masih lemahnya kapasitas kelembagaan Penanggulangan Bencana		Ketentraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat
	Belum lengkapnya Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana menyulitkan BPBD dalam menyusun Rencana PB yang berbasis masyarakat rawan bencana		
	Kuantitas dan kualitas serta profesionalisme aparaturnya penanggulangan bencana yang belum		

Masalah	Akar Permasalahan	Data Profil Daerah	Urusan
	memadai		
	Peralatan dan logistik penanggulangan bencana selain karhutla belum memadai		
	Luasnya dan letak geografis Kabupaten Seruyan yang begitu luas sehingga penanggulangan bencana tidak bisa cepat		
	Masih belum adanya tenaga yang memenuhi syarat dalam melakukan pengkajian kebutuhan pasca bencana		
	Masih kurangnya koordinasi antar instansi dalam fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana		
	Fenomena perubahan iklim yang mengakibatkan kondisi cuaca yang tidak dapat diprediksi secara tepat, sehingga dalam hal kesiapsiagaan terhadap bencana menjadi kurang dapat terantisipasi dengan baik		
Menurunnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya pencemaran	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai 71,54	Lingkungan Hidup
	Pengelolaan sampah yang belum optimal		
Pengelolaan hutan yang belum optimal	Banyaknya aktivitas yang berpotensi menyebabkan degradasi kualitas ekologi hutan	Kerusakan Kawasan Hutan mencapai 7%	Kehutanan
	Regulasi dan administrasi dalam pengelolaan hutan yang belum memadai		

Sumber: Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan 2024-2026

2.3.1.5. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Bersih (*Good Governance*) dan Penegakan Hukum

A. Masalah Utama 1 : Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Bertanggung Jawab Perlu Ditingkatkan

Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan penegakan hukum yang efektif merupakan dua komponen utama dalam menciptakan masyarakat yang adil, transparan, dan sejahtera. Pemerintahan yang bersih dan akuntabel tidak hanya mencerminkan integritas dan komitmen pemerintah dalam melayani masyarakat, tetapi juga menjadi dasar penting dalam mendorong kepercayaan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Namun, dalam praktiknya, sering kali terdapat berbagai tantangan yang menghambat pencapaian tujuan tersebut. Dalam konteks Kabupaten Seruyan, tata kelola pemerintahan baik serta penegakkan hukum masih harus dioptimalkan. Permasalahan seperti birokrasi yang belum efisien, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas masih menjadi hambatan signifikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif dan terstruktur untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum.

Tabel berikut merangkum permasalahan utama terkait pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bertanggung jawab yang perlu ditingkatkan di Kabupaten Seruyan.

Tabel 2.109. Permasalahan Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Bertanggung Jawab Perlu Ditingkatkan

Masalah Daerah	Akar Permasalahan	Data Profil Daerah	Urusan
Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan kebijakan yang telah ditetapkan	Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan regulasi yang mengatur tata ruang	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB masih di angka 4,62%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Masih rendahnya penegakkan hukum	Kurang optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang dan belum efektifnya penegakan hukum dalam mengatasi penyimpangan		

Masalah Daerah	Akar Permasalahan	Data Profil Daerah	Urusan
	pemanfaatan tata ruang		
Rendahnya pelaksanaan tata kelola dan administrasi pemerintahan	Belum tertibnya administrasi pelaporan	Penegakan Perda dan Perkada mencapai 100%	Ketentraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat
Terbatasnya anggaran dan sumber daya penyelenggaraan pemerintahan	Terbatasnya dukungan anggaran untuk pelaksanaan urusan wajib sosial dan penunjang pelayanan administrasi perkantoran	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi sebanyak 8 unit	Sosial
Rendahnya partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Rendahnya sistem tata kelola pemerintahan desa	Persentase peningkatan status desa mandiri di angka 21,64%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Rendahnya integrasi dan kualitas data statistik sektoral	Rendahnya partisipasi masyarakat di desa dalam mendukung pembangunan		
Rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia sesuai kompetensi bidang	Bagaimana Meningkatkan Partisipasi Pemangku Kepentingan terhadap Pengelolaan PPID	Persentase Cakupan Layanan Telekomunikasi masih di angka 78%	Komunikasi dan Informatika
Kurangnya motivasi kerja aparatur dalam penyusunan dan penyelenggaraan program dan kegiatan berbasis kinerja	Penguatan Pengelolaan PPID Kabupaten Seruyan Menuju Informatif		

Sumber: Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan 2024-2026

B. Masalah Utama 2 : Pelayanan Publik Belum Merata antara Seruyan Bagian Utara, Tengah, dan Selatan

Pelayanan publik yang merata merupakan kunci untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, di Kabupaten Seruyan, ketidakmerataan dalam

kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik antara wilayah utara, tengah, dan selatan menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan. Ketidakmerataan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari infrastruktur, kualitas layanan, hingga sumber daya manusia yang tersedia di setiap wilayah. Hal ini akan menjadi hambatan dalam melakukan sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan.

Tabel di bawah ini merangkum permasalahan utama terkait pelayanan publik belum merata antara Seruyan Bagian Utara, Tengah, dan Selatan di Kabupaten Seruyan, beserta akar permasalahan dan urusan terkait.

Tabel 2.110. Permasalahan Pelayanan Publik Belum Merata antara Seruyan Bagian Utara, Tengah, dan Selatan

Masalah Daerah	Akar Permasalahan	Data Profil Daerah	Urusan
Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	Jumlah Pengaduan dari Masyarakat masih Rendah	Persentase Cakupan Layanan Telekomunikasi masih di angka 78%	Komunikasi dan Informatika
	Penguatan Kelembagaan, Kebijakan, SDM, Optimalisasi Pemanfaatan Data dan Aplikasi serta Peningkatan Partisipasi Pemangku Kepentingan pada Pengelolaan SP4N-LAPOR!		
	Menuju SPBE Kabupaten Seruyan		
	Ketersediaan sarana prasarana ruang PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) yang belum memadai		Kecamatan
	Sarana prasarana Ruang Aula yang kurang memadai di beberapa kecamatan		
	Akses menuju kantor kecamatan yang masih dalam kondisi rusak di beberapa kecamatan		

Masalah Daerah	Akar Permasalahan	Data Profil Daerah	Urusan
Integrasi data dan informasi serta ketersediaan sumber daya manusia	Fungsi dinas yang menyelenggarakan urusan statistik sektoral adalah sebagai walidata terhadap data dan informasi yang berkaitan dengan urusan kewenangan daerah dari masing-masing OPD yang menyelenggarakan kewenangan daerah, untuk mendukung satu data indonesia	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	Statistik
	Menjadikan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai satu-satunya sumber data dan informasi statistik sektoral bagi kebutuhan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah		
	Rendahnya penyediaan anggaran yang memadai dan ketersediaan sumber daya manusia dan tidak tersedianya asn formasi bidang statistik		
	Rendahnya integrasi dan kualitas data statistik sektoral		
Kualitas sumber daya manusia dalam pelayanan publik dan monitoring masih rendah	Kurangnya sumber daya keamanan informasi dan sumber daya manusia	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah mencapai 20%	Persandian
	Tidak memadainya alat keamanan informasi		
	Belum dilibatkan dalam kegiatan yang bersipat internal dalam pemerintah daerah		

Masalah Daerah	Akar Permasalahan	Data Profil Daerah	Urusan
	Belum pernah dilakukannya kontra penginderaan pada pemerintah daerah Kabupaten Seruyan		
	Belum pernah melakukan pelatihan fungsi persandian pada tingkat provinsi maupun pusat		
	Audit informasi pada perangkat daerah kabupaten seruyan masih dilakukan masing-masing belum melalui bidang persandian		
	Kerjasama antar pemerintah dan swasta dalam pengembangan transmigrasi belum optimal	Persentase Kawasan Transmigrasi yang Dikembangkan masih berada di angka 0%	Transmigrasi
	Belum optimalnya layanan fasilitasi dan kebijakan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan		
	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik		
	Belum optimalnya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah	Jumlah Informasi Manajemen Pemda mencapai 25 informasi	Sekretariat Daerah
	Masih rendahnya fungsi pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan daerah		
	Belum optimalnya kebijakan penanganan permasalahan pembangunan,		

Masalah Daerah	Akar Permasalahan	Data Profil Daerah	Urusan
	perekonomian daerah dan kesejahteraan sosial dan masyarakat		
	Belum optimalnya capaian kinerja daerah		
	Tingkat kordinasi aparatur kewilayahan masih rendah		
	Kurangnya motivasi kerja aparatur dalam penyusunan program dan kegiatan yang berbasis kinerja		
	Kurangnya fungsi pengawasan dan pengendalian internal dalam pelaksanaan program/kegiatan		
	Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan belum optimal		
	Masih rendahnya pemahaman aparatur terhadap perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan keuangan		
	Kuantitas dan kualitas SDM pada sebagian/unit kerja masih kurang		
	Kurangnya komitmen aparatur dalam mewujudkan capaian kinerja organisasi		
	Kurang memadainya sarana kerja terutama akses jaringan internet yang belum sepenuhnya dapat memberikan kemudahan dan keamanan dalam menunjang peningkatan kinerja aparatur		
	Rendahnya pelayanan Sekretariat DPRD		Sekretariat Dewan

Masalah Daerah	Akar Permasalahan	Data Profil Daerah	Urusan
	terhadap kinerja DPRD		
	Belum optimalnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran		
	Kurangnya SDM di BKAD sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah		
	Terbatasnya kualitas sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara berkualitas dan tepat waktu		Keuangan
	Belum optimalnya penerapan Teknologi Informasi dalam proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan	Persentase program dalam APBD yang dilaksanakan masih di angka 98,04%	
	Belum optimalnya tata kelola aset secara tertib administrasi sehingga kurang akuratnya data barang milik daerah		
	Belum optimalnya penyusunan penilaian kompetensi		
	Belum optimalnya pengawasan internal OPD terhadap pegawai		
	Belum tersedianya sarana dan prasarana untuk melakukan pendidikan dan pelatihan di daerah sehingga masih bekerjasama dengan instansi pemerintah/lembaga lain di luar daerah	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal masih diangka 12,7%	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Masalah Daerah	Akar Permasalahan	Data Profil Daerah	Urusan
	Belum optimalnya sarana untuk pelaksanaan kegiatan <i>Assesmen Center</i> dan <i>Computer Asisted Competency Test</i> (CACT)		
	Belum optimalnya pemanfaatan hasil kajian penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah.	Persentase implementasi rencana kelitbangan masih diangka 80%	Penelitian dan Pengembangan
Sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan masih kurang	Masih adanya temuan-temuan hasil pengawasan yang sifatnya berulang	Persentase tindak lanjut temuan masih di angka 80,21%	Pengawasan
	Masih rendahnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan		
	Belum meratanya kompetensi sumber daya manusia aparatur pengawasan		
	Banyaknya objek pemeriksaan yang tidak sebanding dengan kuantitas aparatur pengawas yang tersedia		
	Belum terpenuhinya ketersediaan data dan informasi pembangunan (statistik sektoral) perangkat daerah yang akurat dan muktahir pada KESBANGPOL untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan	Belum adanya data terkait Laju pertumbuhan Masyarakat yang mendapatkan pembinaan politik	Kesatuan Bangsa dan Politik
	Belum optimalnya keterlibatan atau aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan pada KESBANGPOL		
	Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur KESBANGPOL dalam		

Masalah Daerah	Akar Permasalahan	Data Profil Daerah	Urusan
	melaksanakan tugas dan fungsi		
	Terbatasnya anggaran yang berpotensi tidak tercapainya target kinerja pada KESBANGPOL		

Sumber: Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan 2024-2026

2.3.1.6. Meningkatkan Infrastruktur Wilayah dan Sarana Prasarana Pelayanan Dasar serta Sumber Daya Manusia Tangguh

A. Masalah Utama 1 : Kualitas Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan Masih Rendah

Kualitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan adalah aspek vital dalam memastikan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan manusia yang berkelanjutan. Namun, di banyak daerah, termasuk Kabupaten Seruyan, terdapat sejumlah masalah utama yang menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan dalam kedua sektor tersebut. Bidang pendidikan sering menghadapi masalah yang mencakup kekurangan fasilitas pendidikan yang memadai, rendahnya kualitas pengajaran, dan ketidakmerataan distribusi sumber daya pendidikan. Tantangan yang serupa dihadapi dalam bidang kesehatan, seperti kekurangan fasilitas kesehatan, rendahnya standar pelayanan medis, dan kurangnya aksesibilitas bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

Tabel 2.111. Kualitas Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan Masih Rendah

Masalah Daerah	Akar Permasalahan	Data Profil Daerah	Urusan
Sarana prasarana dan SDM pendidikan masih kurang	Kurangnya sarana dan prasarana	Sekolah Pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik sebanyak 68 unit	Pendidikan
	Tidak memiliki buku penunjang		
	Distribusi SDM Pendidikan yang belum merata		

Masalah Daerah	Akar Permasalahan	Data Profil Daerah	Urusan
Belum optimalnya hasil yang dicapai dalam pengembangan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit, khususnya dalam menekan angka kesakitan yang disebabkan oleh penyakit menular dan penyakit tidak menular serta wabah/KLB	Jumlah dan jenis Tenaga Kesehatan belum memenuhi standar sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019	Rasio tenaga medis per satuan penduduk mencapai 510,48 per 100.000 penduduk	Kesehatan
Jumlah dan jenis Tenaga Kesehatan belum memenuhi standar sesuai peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014	Distribusi SDM Kesehatan belum merata		
Terbatasnya jumlah personil, sarana prasarana yang belum memadai serta luasnya	Keterampilan SDM kesehatan yang belum sepenuhnya memadai		Ketentraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat
	Sarana dan prasarana yang masih belum sesuai standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019		
	Kurang Personil, sarana dan prasarana, serta luasnya cakupan patroli	Rasio jumlah Linmas per 10.000 Penduduk hanya sebesar 55,9	
	Jumlah anggota linmas sudah mencukupi tapi penyebarannya belum merata di masing-masing RT		
	Masih lemahnya kesadaran masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana		
	Kurangnya kesadaran masyarakat Kabupaten Seruyan akan bahaya kebakaran hutan dan lahan		

Sumber: Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan 2024-2026

B. Masalah Utama 2 : Belum Optimalnya Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Kesejahteraan sosial masyarakat merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan daerah. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap penduduknya dapat menikmati kualitas hidup yang layak, dengan akses yang memadai terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan layanan sosial lainnya. Namun, hingga saat ini, penanganan masalah kesejahteraan sosial masyarakat di Kabupaten Seruyan masih belum optimal. Berbagai tantangan masih dihadapi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial, seperti akses yang terbatas terhadap layanan dasar masih menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian serius. Selain itu, distribusi sumber daya dan fasilitas yang tidak merata dan kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintahan sering kali memperburuk situasi ini.

Tabel berikut merangkum permasalahan utama terkait belum optimalnya penanganan masalah kesejahteraan sosial masyarakat di Kabupaten Seruyan.

Tabel 2.112. Permasalahan Belum Optimalnya Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Masalah Daerah	Akar Permasalahan	Data Profil Daerah	Urusan
Belum optimalnya pengembangan potensi olahraga dan pelestarian budaya	Mengoptimalkan pembinaan terhadap IMTAQ di kalangan pemuda	Presentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif mencapai 89%	Kepemudaan dan Olahraga
	Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan organisasi kepemudaan		
	Meningkatkan pemuda yang berpotensi dan kreatif		
	Meningkatkan sarana dan prasarana bagi pemuda		
	Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang olahraga		
	Mengoptimalkan pembinaan		

Masalah Daerah	Akar Permasalahan	Data Profil Daerah	Urusan
	keolahragaan dan atlet-atlet berbakat		
	Menciptakan olahraga bagi peyandang difabel		
	Meningkatkan sarana prasarana pemuda dan olahraga, termasuk gedung olahraga, stadion, gelanggang remaja dan sebagainya		
	Meningkatkan upaya pembibitan dan identifikasi bakat-bakat olahraga		
	Meningkatkan pelatih olahraga yang memenuhi kualifikasi pelatih		
	Meningkatkan fasilitasi olahraga bagi masyarakat penyandang cacat		
	Meningkatkan keikutsertaan penyelenggaraan pergelaran seni budaya berskala regional, nasional dan internasional	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni Budaya sebanyak 2	Kebudayaan
	Mengoptimalkan pembinaan bagi sanggar dan group kesenian/ kebudayaan		
	Mengoptimalkan pelestarian benda dan situs cagar budaya		
	Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap budaya		
Kurangunya kualitas sarana prasarana pertanian dalam arti luas	Fasilitas pada jaringan irigasi yang belum memadai	Cakupan bina kelompok petani sebesar 93,12%	Pertanian
	Pemanfaatan jalan usaha tani yang tidak maksimal oleh petani		
	Kondisi bangunan dan fasilitas pendukung kegiatan pertanian, peternakan dan perkebunan yang masih		

Masalah Daerah	Akar Permasalahan	Data Profil Daerah	Urusan
	kurang memadai		
	Kurangnya sarana prasarana peternakan, daya saing produk hewan, skala usaha peternakan, kelembagaan, kelompok, jejaring pemasaran, inovasi, kreatifitas pengelolaan produk hewan dan potensi beredarnya produk hewan tidak ASUH serta sistem pemasaran (tata niaga produk hewan belum efektif dan efisien		
Pembinaan transmigran belum optimal	Masih perlunya pembinaan masyarakat di wilayah transmigrasi khususnya pembinaan usaha dan keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah transmigrasi yang juga memberi pengaruh positif terhadap perkembangan ekonomi masyarakat secara luas Belum tersedianya tenaga penyuluh untuk peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di kawasan transmigrasi	Belum adanya Persentase Kawasan Permukiman Transmigrasi yang Dibangun	Transmigrasi
Harmonisasi kehidupan masyarakat menurun	Harmonisasi kehidupan bermasyarakat cenderung menurun Terdapat potensi gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Persentase konflik sosial yang diselesaikan sejumlah 25%	Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber: Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan 2024-2026

2.3.1.7. Meningkatkan Upaya Penguatan Ekonomi Rakyat Berbasis Pertanian dan UMKM Melalui Peningkatan Akses Modal, Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan

A. Masalah Utama : Diversifikasi Ekonomi melalui Penguatan Ekonomi Rakyat Masih Rendah

Penguatan ekonomi rakyat, terutama yang berbasis pada sektor pertanian dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), merupakan salah satu strategi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sektor pertanian dan UMKM memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi kemiskinan. Namun, diversifikasi ekonomi melalui penguatan ekonomi rakyat masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat optimalisasi potensinya. Masalah utama yang masih dihadapi oleh Kabupaten Seruyan meliputi perkembangan sektor pertanian, perekonomian lokal dan ketahanan pangan yang belum optimal.

Tabel berikut merangkum permasalahan utama terkait diversifikasi ekonomi melalui penguatan ekonomi raykat yang masih rendah di Kabupaten Seruyan.

Tabel 2.113. Permasalahan Diversifikasi Ekonomi melalui Penguatan Ekonomi Rakyat Masih Rendah

Masalah Daerah	Akar Permasalahan	Data Profil Daerah	Urusan
Belum optimalnya pembangunan ekonomi daerah berbasis ketahanan ekologi	Belum optimalnya pembangunan ekonomi daerah berbasis ketahanan ekologi	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik sebesar 50%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penanganan masalah kesejahteraan sosial belum optimal	Penambahan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tidak bisa terprediksi akibat adanya kejadian bencana alam / sosial (banjir, kebakaran, dll) dampak pandemi covid dan dampak inflasi kenaikan harga kebutuhan bahan pokok	Persentase PPKS yang tertangani sebesar 95,76%	Sosial

Masalah Daerah	Akar Permasalahan	Data Profil Daerah	Urusan
	dan kenaikan harga BBM Masih belum optimalnya mutu pelayanan sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) akibat dari jumlah PPKS yang terus meningkat dan keterbatasan anggaran kegiatan Kurangnya partisipasi dan kompetensi Potensi Sumberdaya Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Seruyan dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial Kelemahan dalam segi administrasi (juklak dan juknis) untuk dasar pelaksanaan kegiatan pemberian hibah dan Bantuan Sosial Masih ada beberapa elemen dari 26 (dua puluh enam) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang belum tertangani Data PPKS dari hasil MusDes dan MusKel tidak disampaikan secara periodik pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan sebagai bahan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial pada SIKS-NG Penetapan dari Kementerian Sosial terkait Balai Rujukan untuk rehabilitasi sosial berada di termasuk zona/wilayah Jawa (Solo) yang menyebabkan jangkauan dan pelayanan terkendala jarak		

Masalah Daerah	Akar Permasalahan	Data Profil Daerah	Urusan
Ekonomi lokal kurang berkembang	Iklim investasi untuk mendorong perluasan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja masih perlu ditumbuhkan	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi mencapai 100%	Ketenagakerjaan
	Kurangnya pemanfaatan potensi lokal desa melalui lembaga perekonomian desa	Persentase Desa Berstatus Swasembada terhadap total desa mencapai 5,15%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pembangunan sarana prasarana perdagangan yang belum optimal dan kurang memperhatikan kondisi lapangan	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal (Pedagang) sebesar 88,7%	Perdagangan
Belum optimalnya perwujudan ketahanan pangan kabupaten	Kinerja perwujudan ketahanan pangan dari aspek kualitas belum efektif	Ketersediaan Pangan Utama sebesar 84,73%	Pangan
Minimnya upaya perwujudan ketahanan ekonomi kerakyatan dalam menghadapi resesi ekonomi global	Belum Optimalnya Pembangunan Seruyan yang Adil dan Sejahtera	Persentase Usaha Kecil Mikro yang berdaya saing sebesar 1%	Koperasi dan UKM
	Masih banyaknya koperasi yang tidak menyampaikan dokumen laporan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT)		
	Kelengkapan dan akurasi data UMKM		
Pengelolaan pariwisata belum optimal	Destinasi pariwisata yang perlu ditingkatkan	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB masih sebesar 0,16%	Pariwisata
	Masih rendah peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata		
	Perlu peningkatan investasi dalam bidang pariwisata		
	Belum adanya kerjasama pemasaran yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta		
	Promosi pariwisata yang belum optimal		
	Belum adanya kemitraan antara usaha pariwisata		

Masalah Daerah	Akar Permasalahan	Data Profil Daerah	Urusan
	sehingga belum terciptanya sinergi antar usaha		
	Perlunya peningkatan pembinaan pelaku ekonomi kreatif		
Perkembangan sektor pertanian dalam arti luas masih rendah	Tidak terjangkaunya harga alsintan	Persentase kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB masih diangka 37,87%	Pertanian
	Jumlah penghasil benih bersertifikat yang terbatas		
	Tingginya tingkat kehilangan hasil dan rendahnya mutu hasil produksi pertanian dan perkebunan		
	posisi tawar petani lemah		
	Rendahnya pengetahuan sikap dan keterampilan petani		
	Kelas kelompok tani dan perkebunan masih didominasi kelompok pemula dan generasi tua		
	Rendahnya kerjasama antar kelompok petani		
	Kurangnya ketersediaan benih dan bibit berkualitas, tingkat kepemilikan ternak relatif kecil, sehingga tidak ekonomis		
	Status kesehatan ternak masih rendah, dan lalu lintas ternak dari dan wilayah Kabupaten Seruyan		
	Belum optimalnya potensi genetik ternak		
Kuantitas industri kecil dan menengah sebagai salah satu kontributor ekonomi lokal masih rendah	Belum optimalnya bina kelompok pengrajin industri kecil menengah karena minimnya dana yang dialokasikan	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal (Pedagang) sebesar 88,7%	Perdagangan
	Masih rendahnya kontribusi industri rumah	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Perindustrian

Masalah Daerah	Akar Permasalahan	Data Profil Daerah	Urusan
	tangga terhadap PDRB sektor industri pengolahan	terhadap PDRB masih diangka 31,58%	
	Pertumbuhan industri yang masih rendah		
	Belum optimalnya bina kelompok pengrajin industri kecil menengah karena minimnya dana yang dialokasikan		
	Belum optimalnya peningkatan nilai tambah produksi sektor unggulan daerah		Transmigrasi
	Belum optimalnya produktivitas perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap	Persentase Produksi Perikanan mencapai 97,9%	Kelautan dan Perikanan
	belum optimalnya pengawasan Sumber Daya Perikanan (SDI)		
	Belum optimalnya penerapan sistem rantai dingin yang berakibatkan rendahnya mutu kualitas bahan baku olahan		

Sumber: Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan 2024-2026

2.3.1.8. Meningkatkan Kestinambungan Pembangunan Daerah Antar Waktu dan Antar Daerah Khususnya Seruyan Utara, Tengah, dan Selatan

A. Masalah Utama : Belum Terintegrasinya Basis Data yang Dapat Diakses Publik dan Pembangunan yang Merata di Seruyan Bagian Utara, Tengah, dan Selatan

Pembangunan daerah yang berkelanjutan dan merata adalah salah satu tujuan utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kestinambungan pembangunan daerah antar waktu dan antar wilayah sangat penting untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat secara adil dan merata. Kabupaten Seruyan, khususnya di wilayah Utara, Tengah, dan

Selatan, terdapat tantangan yang signifikan dalam mencapai pembangunan yang terintegrasi dan merata. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah belum terintegrasinya basis data yang dapat diakses oleh publik. Basis data yang lengkap, akurat, dan mudah diakses sangat diperlukan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan yang efektif. Data yang terintegrasi memungkinkan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan potensi setiap wilayah, serta merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Namun, hingga saat ini, akses terhadap data yang diperlukan masih terbatas, sehingga menghambat upaya pembangunan yang berkelanjutan dan merata.

Tabel 2.114. Permasalahan Belum Terintegrasinya Basis Data yang Dapat Diakses Publik dan Pembangunan yang Merata di Seruyan Bagian Utara, Tengah, dan Selatan

Masalah Daerah	Akar Permasalahan	Data Profil Daerah	Urusan
Belum optimalnya kinerja pencatatan objek pertanahan	Registrasi dan basis data pertanahan belum lengkap dan terintegrasi	Persentase pemohon sertifikat yang telah diselesaikan menurut pendaftaran pertama kecamatan mencapai 100%	Pertanahan
Sarana prasarana perumahan dan permukiman yang belum memadai	Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk pengelolaan sampah regional	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan masih diangka 73%	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Masih banyak Desa/Kelurahan yang belum tersedia Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskessos)	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar diangka 95,7%	Sosial

Sumber: Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan 2024-2026

2.3.2. Isu Strategis Daerah

Perencanaan pembangunan daerah menuntut berbagai macam intervensi dan penanganan yang termanifestasi dalam program dan penganggaran. Intervensi dan penanganan tersebut ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di daerah tersebut dan isu-isu strategis di daerah. Berbeda dengan permasalahan, isu strategis mencakup potensi dampak yang dapat ditimbulkan serta signifikansi dari dampak tersebut terhadap pembangunan dan operasional daerah tersebut. Signifikansi dampak dan potensinya dinilai berdasarkan urgensi, luasan, intensitas dan jumlah masyarakat atau penduduk yang dapat terdampak dari isu tersebut. Selain itu, isu strategis juga memiliki cakupan lebih umum dan dapat terkait antara satu isu dengan isu yang lain baik secara longitudinal (horizontal) maupun hirarkikal (vertikal).

Perumusan isu strategis menjadi sangat krusial dalam perencanaan daerah sebagai landasan dalam memperkirakan tren dan tantangan atau permasalahan yang dapat muncul di masa atau tahun-tahun berikutnya. Karena dampaknya, isu strategis juga terkait dengan proyeksi dan tujuan serta mitigasi suatu daerah di masa mendatang. Isu strategis dirumuskan berdasarkan permasalahan yang terkait dengan program pembangunan daerah (prioritas utama), yang disinergikan dengan isu internasional, nasional, regional, dan lokal sesuai dinamika yang berkembang saat ini.

Isu strategis Kabupaten Seruyan dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan hasil sintesis dari berbagai masalah dan potensi yang bisa menjadi peluang di masa mendatang. Dokumen ini mencakup isu-isu yang relevan dari tingkat internasional hingga level provinsi, termasuk evaluasi hasil pembangunan dari RPJMD sebelumnya serta masalah yang muncul dari berbagai bidang urusan. Tujuannya adalah merumuskan fokus perencanaan pembangunan untuk waktu yang akan datang dengan mempertimbangkan kondisi saat ini dan berbagai dokumen yang relevan.

Tabel 2.115. Telaah Isu Strategis Kabupaten Seruyan

Potensi Daerah	Permasalahan	Permasalahan Utama Kabupaten Seruyan	Isu Strategis KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Kabupaten Seruyan
				Isu Internasional	Isu/ Kebijakan Nasional	Isu Strategis Kewilayahan Pulau Kalimantan	
Sektor Unggulan Perkebunan	Ekonomi	Diversifikasi Ekonomi Melalui Penguatan Ekonomi Rakyat Masih Rendah	Peningkatan Ekonomi dan Ketenagakerjaan	Krisis Sumber Daya Alam	Dampak Hilirisasi Mulai Terlihat Posistif bagi Perekonomian Indonesia	Minimnya Hilirisasi Industri dan Diversifikasi Produk Turunan Berbasis SDA	Investasi dan Daya Saing
				Dampak Buruk Teknologi AI			Ekonomi Lokal
Sumber daya manusia dan kebudayaan lokal adat	Sosial Budaya	Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tenaga Kerja	Kesenjangan Sosial dan Kemiskinan	Involuntary Migration	Aging Population Negara Maju	Masih Rendahnya Kualitas dan Daya Saing SDM karena Terbatasnya Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kesehatan	Penanganan Kemiskinan
		Kualitas Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan Masih Rendah		Polarisasi Sosial			Kualitas Kesehatan dan Pendidikan
		Belum Optimalnya Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial Masyarakat					
Tata Kelola Pemerintahan Partisipatif	Tata Kelola	Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Bertanggung Jawab Perlu Ditingkatkan	Pengelolaan SDA dan Pengaturan Alih Fungsi Lahan	Misinformasi dan Disinformasi	Sinkronisasi Kebijakan Makro dan Sektoral	Belum Optimalnya Pembangunan Daerah Perbatasan, Pedalaman, Tertinggal, dan Terluar	Peningkatan Pelayanan Publik
		Pelayanan Publik Belum Merata antara Seruyan bagian Utara, Tengah, dan Selatan	Perwujudan Pemerintahan Good Governance			Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	Pemerintahan Bersih (Good Governance)
		Belum Terintegrasinya Basis Data yang Dapat				Pembentukan Ibu Kota Negara (IKN)	

Potensi Daerah	Permasalahan	Permasalahan Utama Kabupaten Seruyan	Isu Strategis KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Kabupaten Seruyan
				Isu Internasional	Isu/ Kebijakan Nasional	Isu Strategis Kewilayahan Pulau Kalimantan	
		Diakses Publik dan Pembangunan yang Merata di Seruyan bagian Utara, Tengah, dan Selatan				Nusantara	
Pengelolaan kawasan hutan dan ekowisata	Lingkungan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana	Alih Fungsi Lahan yang Meningkat	Cuaca Ekstrem	Penerapan Standar <i>Sustainability</i> yang Tinggi di Level Global	Degradasi Lingkungan karena Aktivitas Pertambangan dan Perkebunan Kelapa Sawit	Tata Kelolan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana
			Bencana Alam	Perubahan Kritis terhadap Ekosistem		Masih Rentannya Ketahanan Air, Energi, dan Pangan	
			Kebakaran Hutan dan Pembukaan Lahan Gambut	<i>Biodiversity Loss</i> dan Gangguan Ekosistem			
			Rendahnya Daya Dukung dan Daya Tampung Air				
Konektivitas transportasi darat dan laut	Infrastruktur	Kualitas Infrastruktur dan Kinerja Perhubungan		<i>Cyber Insecurity</i>	Transisi Energi untuk Mendorong Pemerataan	Masih Terbatasnya Kapasitas dan Kualitas Konektivitas Antarwilayah dan Infrastruktur Dasar	Infrastruktur Jalan dan Transportasi
	Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Publik						

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029

Sejalan dengan Isu Global, Nasional, dan Provinsi Kalimantan Tengah, serta memperhatikan permasalahan utama yang harus diselesaikan, maka dirumuskan isu strategis Kabupaten Seruyan sebagai berikut:

1. Infrastruktur Jalan dan Transportasi

Luas wilayah Kabupaten Seruyan relatif besar jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Tengah dengan bentuk wilayah memanjang dari utara ke selatan. Ibu kota kabupaten berada di bagian selatan atau pesisir pantai sekaligus menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan kawasan strategis ekonomi. Merujuk pada RTRW Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039, rencana PKL terdiri atas Kuala Pembuang di bagian selatan, Rantau Pulut di bagian utara, dan Pembuang Hulu di bagian tengah. Rencana tersebut memerlukan infrastruktur jalan dan transportasi untuk mempermudah akses antar wilayah di dalam Kabupaten Seruyan. Apabila melihat kondisi eksisting sampai tahun 2024, Kabupaten Seruyan bagian utara, tengah, dan selatan belum terhubung secara langsung oleh jalan permanen. Kondisi tersebut menyebabkan mobilitas penduduk dan barang dari selatan tidak dapat secara langsung ke arah tengah dan utara. Keberadaan jalan eksisting masih berupa tanah dan tidak dapat dilalui saat musim hujan.

Transportasi publik baik darat maupun air di Kabupaten Seruyan belum berkembang secara memadai. Kegiatan ekonomi suatu wilayah akan berkembang jika didukung oleh sarana mobilitas yang memadai karena umumnya semakin tinggi mobilisasi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Selain transportasi publik jalur darat yang dapat dikembangkan, Kabupaten Seruyan dapat mengoptimalkan sumber daya sungai sebagai jalur transportasi penghubung khususnya untuk produk bernilai ekonomi. Produk hasil olahan industri kecil dan menengah di bagian pesisir belum dapat terdistribusikan secara maksimal ke target pasar jika hanya mengandalkan Pelabuhan Sigintung. Oleh karena itu, transportasi atau

kendaraan angkut jalur sungai menjadi penting dikembangkan untuk menghubungkan jalur distribusi barang dan produk ekonomi.

Pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi menjadi fokus pembangunan jangka menengah untuk membuka lebih banyak peluang ekonomi. Fokus ini diiringi dengan penentuan lokasi prioritas yang akan dilakukan pembangunan jalan. Apabila mengacu pada RTRW Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039, pembangunan jalan dapat difokuskan pada jaringan jalan kolektor primer empat (JKP-4), jalan lokal primer (JLP), jalan desa, dan jalan khusus yang berstatus jalan kabupaten. Selain itu, jalan penghubung lokasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) (Kuala Pembuang, Rantau Pulut, dan Pembuang Hulu), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) (Pematang Panjang, Telaga Pulang, Selunuk, Asam Baru, Sandul, Tumbang Manjul, dan Tumbang Langkai), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) (Bangkal dan Sembuluh I) perlu menjadi prioritas untuk mengoptimalkan peran pusat kegiatan dan fungsi pengembangan wilayah. Secara umum, peran pusat kegiatan tersebut meliputi administrasi pemerintahan, perdagangan, pendidikan dan kesehatan, industri, serta pertanian dalam arti luas.

2. Investasi dan Daya Saing

Sebagai wilayah yang kaya akan Sumber Daya Alam, Kabupaten Seruyan memiliki peluang untuk meningkatkan daya saingnya di masa yang akan datang. Selain dari potensi Sumber Daya Alam yang melimpah, dalam peningkatan daya saing ekonomi daerah diperlukan strategi berupa optimalisasi investasi, khususnya dalam bidang industri. Mengingat banyaknya potensi Sumber Daya Alam Kabupaten Seruyan yang hanya diekstraksi langsung dari alam tanpa melalui proses hilirisasi sebelum dipasarkan keluar dari wilayah Kabupaten Seruyan.

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (khususnya sub sektor perkebunan sawit) serta Sektor Industri pengolahan merupakan 2 (dua) sektor utama penyumbang PDRB Kabupaten Seruyan. Hal ini menunjukkan bahwa 2 (dua) sektor ini merupakan penggerak utama perekonomian daerah, sehingga optimalisasi yang lebih pada 2 (dua)

sektor ini diperlukan untuk mendorong kemajuan daya saing ekonomi Kabupaten Seruyan. Optimalisasi sektor perkebunan dan industri dapat dilakukan melalui promosi investasi di Kabupaten Seruyan, pemberian insentif, serta kemudahan dalam perizinan.

Optimalisasi investasi di sektor perkebunan dan industri sawit tidak hanya bermanfaat untuk meningkatkan nilai tambah dari produk sawit, tetapi juga bermanfaat dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan pendapatan daerah, dan memperkuat perekonomian lokal. Proses hilirisasi ini melibatkan pengolahan produk mentah menjadi produk setengah jadi atau produk jadi yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

Optimalisasi daya saing pertanian dan perkebunan juga dilakukan melalui penguatan inovasi Sertifikasi Yurisdiksi dan Gawi Bapakat. Inisiatif sertifikasi yurisdiksi akan memberikan keunggulan kompetitif bagi Kabupaten Seruyan berkenaan dengan sumber kelapa sawit lestari yang diterima oleh pasar-pasar berkelanjutan seperti Eropa. Sementara Gawi Bapakat menghubungkan komoditas unggulan tingkat desa yang mencegah ketergantungan semata-mata pada kelapa sawit. Salah satu komoditas unggulan antara lain nipah yang memiliki potensi ekonomi Rp. 36.000.000 per ha/tahun. Kabupaten Seruyan memiliki hutan nipah mencapai 1.143 ha yang tersebar di 3 desa pesisir Seruyan. Selain itu, Nipah (*Nypa fruticans*) adalah jenis tanaman yang memiliki berbagai manfaat, baik dari segi ekologi maupun ekonomi (gula nipah).

3. Ekonomi Lokal

Salah satu tantangan yang dihadapi Kabupaten Seruyan adalah penguatan ekonomi lokal. Perekonomian lokal yang dimotori oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak ekonomi di Kabupaten Seruyan. Sehingga penguatan daya saing dan kapasitas UMKM di Kabupaten Seruyan harus dilakukan. Salah satu strategi yang dapat dilakukan dalam rangka mendorong kinerja UMKM lokal Kabupaten Seruyan yakni melalui penguatan relasi antara UMKM dan perusahaan besar yang dijumpai oleh Pemerintah Daerah.

Mengingat terdapat beberapa perusahaan besar yang beroperasi di wilayah Kabupaten Seruyan khususnya perusahaan perkebunan.

Melalui penguatan relasi antara perusahaan besar dan UMKM diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas UMKM serta dapat menyediakan dukungan lain yang diperlukan dalam memperluas jaringan dan peluang bagi UMKM di Kabupaten Seruyan. Selain itu, melalui skema penguatan relasi antara perusahaan besar dan UMKM, Pemerintah Daerah akan lebih mudah dalam memastikan bahwa perusahaan besar yang beroperasi di Kabupaten Seruyan telah melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan baik dan memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat sekitar.

Dengan memperkuat ekonomi lokal melalui penguatan relasi antara perusahaan besar dan UMKM maka peluang terciptanya ekosistem ekonomi yang tangguh inklusif, dan berdaya saing akan semakin besar. Selain itu, melalui skema ini kesejahteraan masyarakat dapat terwujud dan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dapat terwujud.

4. Peningkatan Pelayanan Publik

Peningkatan pelayanan publik merupakan salah satu isu strategis bagi Pemerintah Kabupaten Seruyan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Upaya peningkatan pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan layanan yang lebih baik, cepat, dan tepat.

Kondisi wilayah dari Kabupaten Seruyan yang luas, dengan distribusi penduduk yang tidak merata diperlukan peningkatan pelayanan publik guna mempermudah akses bagi masyarakat. Selain itu, kondisi Ibu Kota Kabupaten yang berada di sisi selatan mengakibatkan adanya kesenjangan antara wilayah bagian utara dengan bagian selatan. Terobosan diperlukan pada pelayanan publik guna menjangkau masyarakat khususnya yang berada di level tapak yaitu desa bisa diakomodasi dengan baik. Salah satu terobosan peningkatan pelayanan

publik dengan memanfaatkan teknologi yaitu dengan Starlink. Starlink, jaringan satelit internet yang dikembangkan oleh SpaceX, menawarkan konektivitas internet berkecepatan tinggi dan latensi rendah di daerah-daerah terpencil dan kurang terlayani. Penerapan Starlink di Kabupaten Seruyan memiliki potensi besar untuk menyempurnakan berbagai aspek pelayanan publik, terutama di wilayah yang sulit dijangkau oleh infrastruktur internet konvensional. Dengan memanfaatkan potensi Starlink, Kabupaten Seruyan dapat meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik secara signifikan. Akses internet yang cepat dan stabil akan mendukung berbagai sektor, mulai dari pendidikan dan kesehatan hingga pemerintahan digital dan ekonomi lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

5. Kualitas Kesehatan dan Pendidikan

Kualitas kesehatan dan pendidikan menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Di Kabupaten Seruyan, rendahnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan menjadi salah satu isu strategis yang penting karena secara signifikan menghambat pembangunan SDM dan menurunkan IPM. Pendidikan yang berkualitas rendah menghasilkan individu yang kurang terampil dan berpengetahuan. Rendahnya kualitas pelayanan dan akses pendidikan, angka partisipasi sekolah yang rendah, serta sarana prasarana pendidikan yang masih kurang, menyebabkan penurunan kualitas SDM. Di sisi lain, derajat kesehatan yang rendah, akibat rendahnya kualitas pelayanan dan akses kesehatan menyebabkan tingginya angka penyakit serta menurunnya produktivitas dan harapan hidup.

Kombinasi dari rendahnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan ini memperburuk siklus kemiskinan, mengurangi peluang untuk mobilitas sosial, dan menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan. Akibatnya, IPM yang mencakup dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup, terpengaruh negatif, yang kemudian menghambat pembangunan ekonomi dan sosial. Pembangunan

kesehatan diarahkan untuk menekan angka kematian, angka kesakitan, penderita gizi buruk, stunting, dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara umum. Sedangkan pembangunan manusia diarahkan kepada penumbuhan SDM yang memiliki kompetensi, berkarakter, kreatif dan inovatif.

6. Penanganan Kemiskinan

Kemiskinan tidak hanya berarti kekurangan finansial, tetapi juga mencakup kurangnya akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Kemiskinan menjadi isu strategis daerah karena dampaknya yang luas dan mendalam terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Dari masalah pangan, kesehatan, pendidikan, hingga ketidakstabilan sosial, dampak kemiskinan merembet ke berbagai sektor dan memperburuk kondisi kehidupan secara keseluruhan. Di banyak wilayah, tak terkecuali Kabupaten Seruyan, kemiskinan menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus, menghambat pertumbuhan dan memicu ketidaksetaraan. Bahkan di Kabupaten Seruyan angka kemiskinan mencapai 7,12 persen.

Pengentasan kemiskinan menjadi tantangan bagi pemerintah yang memerlukan upaya terpadu dan berkelanjutan dari berbagai pihak. Upaya pengentasan kemiskinan haruslah bersifat komprehensif, mencakup penyediaan akses yang lebih baik terhadap kebutuhan dasar, pemberdayaan ekonomi, serta perbaikan infrastruktur dan layanan publik. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, siklus kemiskinan dapat diputus dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.

7. Pemerintahan Bersih (*Good Governance*)

Pemerintahan bersih atau *good governance* merupakan salah satu isu strategis yang penting untuk Kabupaten Seruyan dalam rangka mencapai tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. *Good governance* merupakan prasyarat bagi pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. *Good*

governance dapat terwujud dengan dimulainya inisiasi *smart governance*. *Smart governance* memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, partisipasi publik, dan pelayanan publik.

Dalam konteks ini, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi juga diintegrasikan dalam perencanaan dan penyusunan kebijakan yang lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan. Pendekatan yang holistik dan inklusif diperlukan untuk mengakomodasi berbagai kepentingan, termasuk kepentingan masyarakat lokal, pendatang, serta pelaku usaha. Hal ini dilakukan untuk mengurangi munculnya potensi konflik yang akan muncul di kemudian hari, langkah ini juga akan mendukung keberlanjutan pembangunan dan mewujudkan pemerintahan yang lebih responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pengawasan yang ketat serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan akan memastikan bahwa kebijakan yang diambil lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan semua pihak yang terlibat.

Kondisi tata ruang perlu disesuaikan dengan kondisi karakteristik topografi dari setiap wilayah. Selain itu, pemerataan pembangunan dapat menjadi pertimbangan dalam penyesuaian tata ruang dan penyelesaian permasalahan yang ada. Pemerataan pembangunan juga dipengaruhi dengan adanya pendatang dengan pengembangan kawasan transmigrasi. Hal ini dapat menimbulkan konflik sosial dan sengketa tanah atau lahan. Sehingga, perlu dilakukan revitalisasi dari peran pemda guna menyelesaikan permasalahan yang ada, selain itu optimalisasi organisasi masyarakat juga diperlukan guna membantu pemerintah daerah. Skema pendanaan juga perlu diperhatikan baik untuk organisasi masyarakat, dan organisasi lainnya yang menunjang kegiatan pemerintahan.

8. Tata Kelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana

Lingkungan hidup merupakan modal sekaligus objek pembangunan daerah yang mencakup sumber daya nabati dan hewani serta kualitas ruang tinggal bagi makhluk hidup. Kualitas ruang tinggal merujuk pada sumber daya lahan sebagai ruang hidup, sumber daya air dan udara. Keanekaragaman sumber daya alam baik nabati maupun hewani serta kualitas lingkungan hidup perlu dikelola secara bijak dan dilestarikan untuk menjaga keberlanjutan fungsi untuk generasi sekarang dan mendatang. Pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup juga meminimalisasi risiko bencana alam selain dari risiko yang muncul dari faktor geografis suatu daerah. Perbedaan faktor geografis setiap daerah yang meliputi topografi, hidrologi, klimatologi, geologi, dan jenis tanah menghasilkan risiko bencana yang berbeda juga di setiap daerah. Risiko bencana juga dipengaruhi oleh faktor penggunaan lahan yang muncul dari kebutuhan manusia akan lahan untuk berbagai kepentingan.

Kabupaten Seruyan, sebagai salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah, memiliki sumber daya alam yang melimpah sekaligus kualitas lingkungan hidup yang cukup baik. Lingkungan hidup yang memiliki kualitas rendah adalah sumber daya air khususnya air sungai akibat limbah kelapa sawit sebagai komoditas unggulan di Kabupaten Seruyan. Selain sumber daya air yang mengalami ancaman pencemaran, lahan hutan mengalami deforestasi akibat perubahan fungsi lahan hutan menjadi perkebunan khususnya perkebunan kelapa sawit. Selain berkurangnya luasan lahan hutan, deforestasi mengurangi potensi cadangan stok karbon pada vegetasi. Limbah kelapa sawit juga mencemari udara karena bau yang tidak sedap.

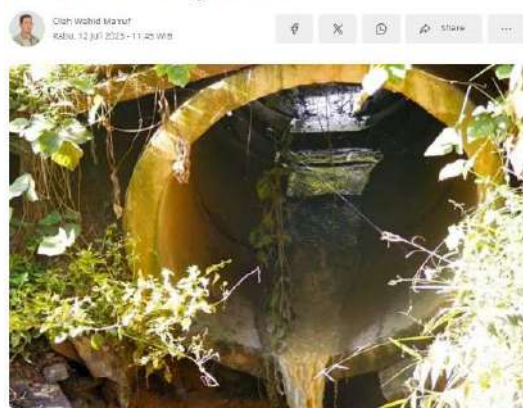
Alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit ini, tidak hanya berdampak pada pencemaran lingkungan yang masif di Kabupaten Seruyan. Hal ini juga menyebabkan munculnya konflik sengketa lahan sawit antara pihak perusahaan dengan masyarakat yang berujung pada kematian warga di Kabupaten Seruyan. Konflik lahan berkepanjangan ini terjadi karena buruknya pengelolaan lahan sawit di Kabupaten Seruyan. Di mana banyak perusahaan belum memenuhi kewajiban memberikan 20

persen kebun plasma untuk masyarakat. Selain itu terdapat lahan yang ditanami oleh perusahaan yang ternyata berada di luar HGU. Lahan tersebut kemudian menjadi sengketa. Masyarakat mengklaim bahwa lahan tersebut merupakan hutan adat tempat mereka melaksanakan ritual adat sedangkan perusahaan menyatakan telah mengantongi izin untuk pengelolaan lahan tersebut.

Sertifikasi kewilayahan memberikan dorongan kuat untuk membentuk tata kelola sumber daya alam yang sehat. Melalui kelompok kerja multipihak yang dipimpin pemerintah daerah sendiri, dialog yang terbuka dan target yang disepakati bersama para pihak merupakan upaya memastikan proses kebijakan yang partisipatif dan transparan. Ke depan proses ini akan terus didorong ke dalam peraturan di tingkat daerah untuk memastikan keberlanjutan strategi dalam target Pemerintah Daerah, pembiayaan, dan pelibatan para pihak di dalamnya.

Seluruh permasalahan terkait kualitas lingkungan hidup, sumber daya alam, dan lahan di Kabupaten Seruyan dibuktikan beberapa laman berita berikut.

Warga Seruyan Kalteng Bongkar Limbah Sawit, Malah Temukan Lahan Sinarmas Tanpa HGU



Pencemaran limbah sawit di Danau Sembuluh, Seruyan Provinsi Kalteng tahun 2018. (foto: mongabay.co.id)

Keluhan warga desa di Kecamatan Danau Sembuluh, kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, tentang pencemaran limbah sawit ke Sungai Seruyan pada tahun 2014, baru membukakan hasil pada tahun 2019. Akhirnya, Pengadilan Tipikor menghukum tiga pejabat PT Sinarmas Group, 1 tahun 8 bulan.

2.3.2.1. Kualitas Sungai Seruyan Menurut Akibat Limbah Kelapa Sawit (inilah.com – Rabu, 12 Juli 2023)

DLHK Seruyan Cek Pabrik PT Permata Timur Lestari, Ditemukan Udara Berbau

Warga RT 006 Meminta Kompensasi dan Dibuatkan Sumur Bor



Menindak lanjuti laporan warga, tim dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Seruyan turun langsung menemui pihak perusahaan sebagai pihak yang diadukan warga akibat bau limbah hasil pabrik pengolahan buah kelapa sawit milik PT Permata Timur Lestari.

2.2. Udara Berbau Akibat Limbah Kelapa Sawit (Mentayanet – Rabu, 1 Mei 2024)

Konflik sawit dan penembakan berujung kematian warga di Seruyan: Akar persoalan muncul belasan tahun lalu, kenapa tak kunjung selesai?

11 Oktober 2023



Warga Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan, Kalteng, membawa jenazah Gajik untuk dikuburkan.

Masyarakat Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, dalam beberapa bulan terakhir terus menuntut perusahaan kelapa sawit PT. Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) agar melunasi janjinya untuk memberikan lahan plasma sawit kepada mereka.

- 2.4.** Konflik Lahan Kelapa Sawit (BBC News Indonesia – Rabu, 11 Oktober 2023)

Akibat alih fungsi hutan, dua individu orang utan masuk permukiman warga di Seruyan

© Senih, 29 November 2022 20:04 WIB



Individu anak orang utan yang berhasil diamankan oleh tim dari SKW II Pangkalan Bun dan OF-UI di Kabupaten Seruyan, Senin (28/11/2022). ANTARA/YHO-BKSDA SKW II Pangkalan Bun

Pangkalan Bun (ANTARA) - Dikarenakan habitatnya semakin sempit akibat pembukaan hutan yang beralih fungsi menjadi perkebunan sawit, menyebabkan dua individu orang utan masuk ke permukiman warga di Desa Pemuang Hulu 2.

- 2.5.** Habitat Satwa Liar Terganggu karena Penurunan Luas Lahan Hutan (Antara Kalteng – Senin, 28 November 2022)

Gambar 2.73. Faktor Pengaruh dan Dampak Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup

Risiko bencana di Kabupaten Seruyan merujuk pada Indeks Risiko Bencana termasuk dalam kategori tinggi sampai tahun 2022 lalu menurun menjadi kategori sedang pada tahun 2023. Bencana alam yang sering terjadi dan memiliki risiko bencana tinggi sebesar 36 adalah banjir serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Faktor yang menyebabkan terjadinya banjir di Kabupaten Seruyan, antara lain alih fungsi lahan hutan dan pendangkalan sungai akibat sedimen limbah. Berbeda dengan banjir, kebakaran hutan dan lahan lebih dipicu oleh musim kemarau berkepanjangan dan jenis tanah gambut yang dapat menyimpan cadangan karbon lebih banyak daripada tanah mineral biasa. Deforestasi lahan gambut menyebabkan tanah gambut menjadi kering sehingga menjadi lebih mudah terbakar. Upaya yang dapat dilakukan untuk mitigasi bencana khususnya banjir dan karhutla, antara lain rehabilitasi hutan, mengurangi dan mengendalikan pembuangan limbah kelapa sawit dan/atau industri lain ke badan air (sungai), dan restorasi lahan gambut.



BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH



**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025-2029**

BAB III: VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.1.1. Visi Pembangunan Kabupaten Seruyan 2025-2029

Visi dalam perencanaan pembangunan daerah adalah pernyataan yang menggambarkan kondisi ideal yang ingin dicapai oleh masyarakat atau suatu wilayah pada akhir periode perencanaan. Dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), visi ini menjadi arah utama pembangunan yang ditargetkan dalam jangka waktu lima tahun. Visi bukan sekadar harapan, tetapi merupakan bentuk komitmen yang menjembatani kondisi saat ini dengan masa depan yang diinginkan. Sebagai pedoman utama dalam pembangunan daerah, visi harus dirumuskan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal ini bertujuan agar visi yang disusun dapat mencerminkan kepentingan bersama serta mampu menjawab berbagai tantangan dan permasalahan strategis yang dihadapi. Selain itu, visi pembangunan daerah harus selaras dengan kebijakan jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan diterjemahkan ke dalam misi, tujuan, serta program pembangunan yang terukur.

Dalam pemerintahan daerah, visi yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menjadi landasan utama dalam merumuskan kebijakan serta menetapkan prioritas pembangunan selama masa jabatannya. Oleh karena itu, visi harus dirancang dengan cermat agar dapat menjadi arah yang jelas bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Visi pembangunan Kabupaten Seruyan tahun 2025-2029 merupakan

operasionalisasi dari visi jangka panjang yang ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Seruyan, dimana sebagai bagian dari tahap pertama pembangunan jangka panjang, visi ini dirancang untuk meletakkan fondasi kokoh pembangunan daerah melalui penguatan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal seperti perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Keselarasan visi RPJMD dengan pembangunan tahap pertama RPJPD tercermin dalam komitmen meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, serta mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menjaga kelestarian lingkungan, sehingga pencapaian visi lima tahun ini akan berkontribusi signifikan terhadap terwujudnya Kabupaten Seruyan sebagai daerah yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan sesuai cita-cita jangka panjang yang telah ditetapkan.

Visi pembangunan Kabupaten Seruyan tahun 2025-2029 dirumuskan setelah mengkaji kondisi umum daerah, menganalisis potensi dan permasalahan yang ada, menilai isu-isu strategis, dan memperhatikan aspirasi dari pemangku kepentingan (stakeholder) yang kemudian dirumuskan sebagai berikut,



Gambar 3.1. Rumusan Visi RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029

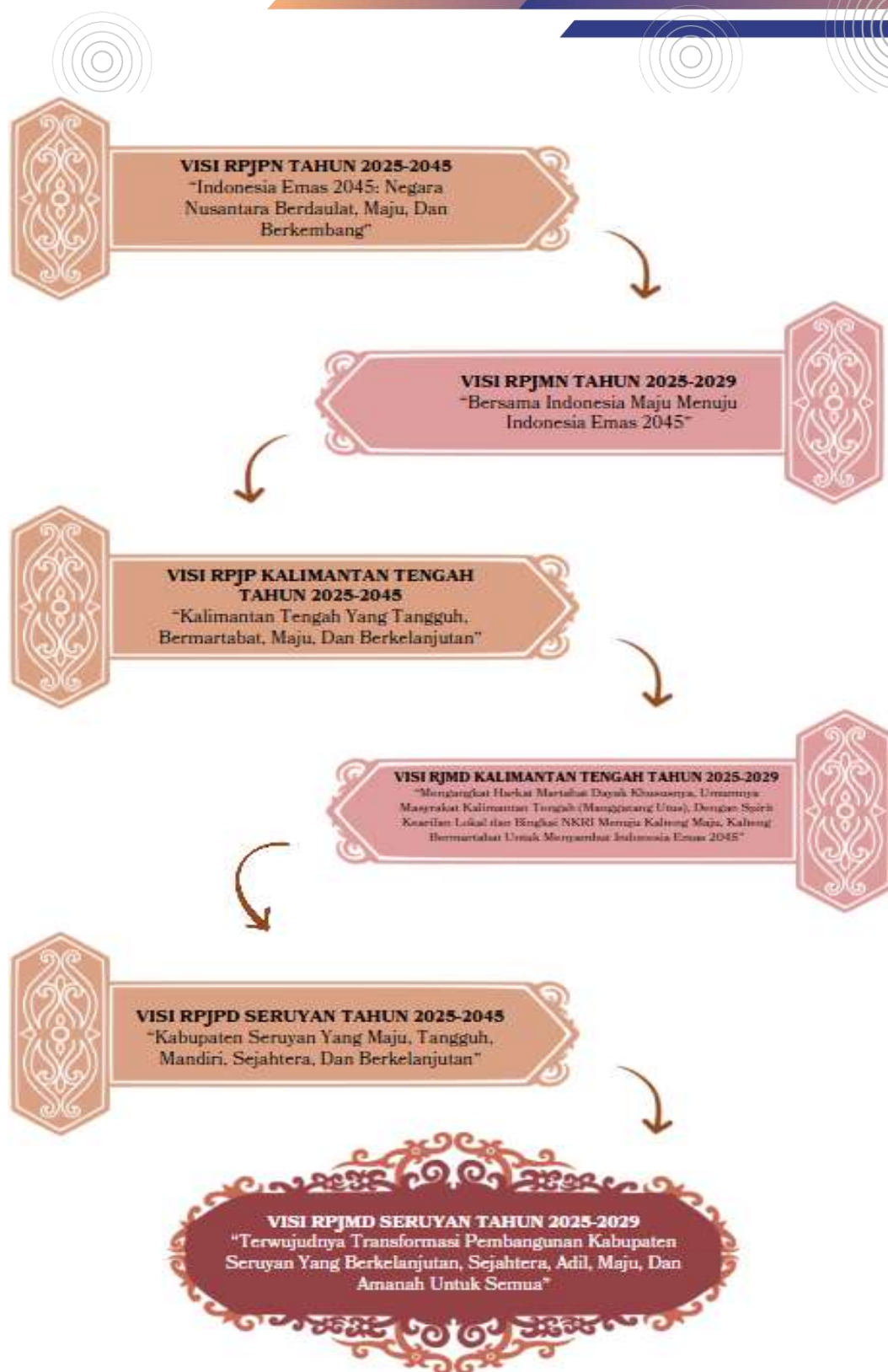
Secara filosofi, visi tersebut mencerminkan makna dan harapan besar bagi Kabupaten Seruyan untuk terus berkembang dibidang ekonomi dengan dengan tetap mempedomani pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan lingkungan yang lestari, masyarakat yang sejahtera dan wilayah yang maju serta pemerintah yang amanah dan adil. Secara lebih rinci, Visi Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dijelaskan sebagai berikut:

- **“Berkelanjutan”** memiliki arti bahwa Kabupaten Seruyan berkontribusi dalam menerapkan Tujuan Pembangunan berkelanjutan (TPB) dengan tetap memperhatikan keseimbangan pertumbuhan ekonomi, keadilan dan kehidupan sosial Masyarakat terhadap pelestarian lingkungan dengan tata kelola yang baik untuk memastikan keberlangsungan kualitas kehidupan saat ini dan generasi mendatang.
- **“Sejahtera”** memiliki arti bahwa Kabupaten Seruyan akan mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan tepenuhnya pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, papan, jaminan sosial dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menumbuh kembangkan ekonomi daerah, lingkungan yang sehat dan dinamis, rendahnya tingkat kriminalitas serta tingkat kebahagiaan yang relatif lebih tinggi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan cerdas.
- **“Maju”** memiliki arti bahwa Kabupaten Seruyan berkomitmen untuk menciptakan daya saing ekonomi yang inklusif dan kolaboratif dengan daerah lainnya melalui pengembangan segala potensi daerah yang dimaknai dengan peningkatan pendapatan PAD dan DBH melalui peningkatan pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya daerah.
- **“Adil”** memiliki arti bahwa Kabupaten Seruyan berpegang teguh untuk mewujudkan pemerataan pembangunan tanpa diskriminasi sesuai dengan pengembangan potensi daerah yang

mengedepankan persatuan dari semua pihak. Selain itu, menjamin keterbukaan akses secara merata dan kesempatan yang sama dalam pelayanan publik, serta menjamin prinsip persamaan hak dihadapan hukum, penegakan supremasi hukum dan perlindungan HAM.

- **“Amanah”** memiliki arti bahwa Kabupaten Seruyan akan menjamin terwujudnya pemerintahan yang dapat dipercaya oleh masyarakat dan membentuk masyarakat yang sadar dalam hak dan kewajibannya masing-masing untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, akuntabel, transparan, responsif, dan bersih, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga tercipta solidaritas, kepercayaan, kejujuran, kerjasama, komitmen dan tanggung jawab yang baik antara pemimpin dan masyarakat.

Visi RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 juga diselaraskan dengan dengan dokumen perencanaan lain sehingga terlihat konsistensi dan hubungan dengan visi RPJP Nasional Tahun 2025-2045, Visi RPJM Nasional Tahun 2025-2029, Visi RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025-2045, dan visi RPJPD Kabupaten Seruyan tahun 2025-2045. Adapun keterkaitan visi sebagaimana dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3. 2. Keterkaitan Visi RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan lain

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029

3.1.2. Misi Pembangunan Kabupaten Seruyan 2025-2029

Misi merupakan penjabaran dari visi yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengimplementasikan langkah-langkah strategis untuk mewujudkannya. Misi dirancang sebagai landasan dalam menetapkan tujuan, sasaran, serta kebijakan. Proses penyusunan misi mempertimbangkan berbagai faktor lingkungan strategis, baik dari aspek internal maupun eksternal. Analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam pembangunan daerah juga menjadi bagian penting dalam menyusun misi. Dengan demikian, misi bertujuan untuk memperjelas langkah-langkah konkret yang harus ditempuh agar visi dapat direalisasikan secara optimal. Sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi, telah ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Seruyan untuk periode 2025-2029, antara lain:

- **MISI I:** Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Membangun Sumberdaya Manusia (SDM) Unggul.
- **MISI II:** Mewujudkan Iklim kehidupan yang Berbudaya, Demokratis, Agamis, Bermoral, Tertib, dan Inklusif
- **MISI III:** Mewujudkan Pemerataan Pembangunan, Kemandirian Desa dan Inovasi Layanan Publik
- **MISI IV:** Mewujudkan Harmonisasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana
- **MISI V:** Mewujudkan Peningkatan Ekonomi dan Daya Saing Investasi Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Potensi Unggulan Daerah



Gambar 3. 3. Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029

Berdasarkan misi diatas, penjabaran masing-masing misi untuk mewujudkan visi pembangunan daerah selama periode pemerintahan tahun 2025-2029 dijelaskan sebagai berikut:

3.1.2.1. MISI I : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Membangun Sumberdaya Manusia (SDM) Unggul

Misi ini bertujuan untuk membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul sebagai fondasi utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. SDM yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh tingkat pendidikan, tetapi juga oleh kesehatan, keterampilan, dan daya saing dalam menghadapi tantangan global. Pemerintah Kabupaten Seruyan berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual melalui peningkatan akses pendidikan berkualitas, penguatan layanan kesehatan, serta penyediaan pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan industri dan ekonomi lokal. Selain itu, pembangunan SDM juga diarahkan

agar setiap individu memiliki etos kerja yang produktif, inovatif, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Selain aspek pendidikan dan kesehatan, misi ini juga menekankan pentingnya pemerataan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam memperoleh hak-hak dasar untuk meningkatkan taraf hidupnya. Upaya ini dilakukan dengan memperkuat sektor ekonomi berbasis kerakyatan, memberdayakan perempuan, serta mengembangkan kebijakan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Seruyan juga akan berfokus pada pengembangan SDM yang berbasis kearifan lokal, berkelanjutan, berbasis pada komoditas unggulan desa sehingga pembangunan daerah tetap berlandaskan pada identitas budaya yang kuat. Dengan demikian, Kabupaten Seruyan dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun global.

3.1.2.2. MISI II : Mewujudkan Iklim Kehidupan Yang Berbudaya, Demokratis, Agamis, Bermoral, Tertib, dan Inklusif

Misi ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai demokrasi, agama, moralitas, serta ketertiban dalam masyarakat. Demokrasi yang sehat harus didukung oleh partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemerintahan, kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab, serta keadilan sosial yang merata. Pemerintah Kabupaten Seruyan berkomitmen untuk mewujudkan iklim kehidupan yang berbudaya, demokratis, agamis, bermoral, tertib, dan inklusif. Upaya ini dilakukan dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemerintahan, menjamin kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab, serta memastikan keadilan sosial yang merata. Tata kelola pemerintahan yang transparan dan terbuka akan terus dikembangkan dengan memperkuat peran lembaga adat dan organisasi kemasyarakatan. Selain itu, edukasi

mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara akan ditingkatkan guna menumbuhkan kesadaran kolektif dalam menjaga stabilitas demokrasi yang adil dan berkelanjutan. Karena itu, beberapa upaya yang saat ini telah berkembang antara lain perlindungan perempuan dan anak, kerja sama yang harmonis antara berbagai pihak, pembentukan masyarakat yang sadar hukum melalui paralegal desa akan terus diperkuat sebagai fondasi untuk menerapkan misi ini.

Nilai-nilai agama dan moral menjadi fondasi dalam membentuk karakter masyarakat yang berakhlak dan bertanggung jawab. Pemerintah daerah mendukung berbagai program keagamaan melalui peningkatan sarana ibadah, penguatan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai religius, serta pembinaan kehidupan beragama yang moderat dan toleran. Ketertiban sosial dan keamanan masyarakat juga menjadi prioritas, dengan mengoptimalkan peran aparat penegak hukum, meningkatkan kesadaran hukum warga, serta mengembangkan sistem keamanan berbasis komunitas. Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, Kabupaten Seruyan diharapkan menjadi daerah yang damai, adil, dan harmonis dalam kehidupan sosialnya.

3.1.2.3. MISI III : Mewujudkan Pemerataan Pembangunan, Kemandirian Desa, dan Inovasi Layanan Publik

Misi ini menitikberatkan pada peningkatan kualitas layanan publik yang inovatif, efektif, dan berbasis teknologi guna memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Pemerintah Kabupaten Seruyan berkomitmen untuk menghadirkan pemerataan pembangunan melalui peningkatan kualitas layanan publik yang inovatif, efektif, dan berbasis teknologi. Digitalisasi pelayanan akan terus diperluas guna mempercepat birokrasi, memudahkan akses layanan bagi masyarakat, serta menjamin inklusivitas dan pemerataan di

seluruh wilayah. Dalam rangka mendukung hal tersebut, kapasitas aparatur pemerintahan akan terus ditingkatkan agar mampu memberikan pelayanan yang profesional, cepat, dan berorientasi pada kepuasan publik, serta menginisiasi pengembangan profil desa dari inisiatif Gawi Bapakat yang terintegrasi dengan sistem nasional untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang mandiri dan berkelanjutan guna mencapai tujuan pembangunan Kabupaten. Inovasi layanan ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta membuka ruang partisipasi yang lebih luas dalam pembangunan daerah.

Di sisi lain, penguatan kemandirian desa menjadi bagian integral dari misi ini. Pemerintah daerah akan mendorong pemberdayaan desa melalui pengembangan potensi lokal, optimalisasi pemanfaatan dana desa, dan penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penggerak utama ekonomi desa. Prioritas juga diberikan pada pembangunan infrastruktur pedesaan, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta integrasi teknologi digital dalam tata kelola desa untuk meningkatkan efisiensi dan konektivitas. Dengan sinergi antara inovasi layanan publik dan kemandirian desa, Kabupaten Seruyan diarahkan menjadi daerah yang tumbuh secara merata, maju secara teknologi, dan tangguh dalam pembangunan jangka panjang.

3.1.2.4. MISI IV : Mewujudkan Harmonisasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana

Misi ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana alam. Pemerintah Kabupaten Seruyan berkomitmen untuk mewujudkan harmonisasi lingkungan yang berkelanjutan melalui perlindungan dan pelestarian ekosistem terutama perlindungan

dan pengelolaan wilayah bernilai konservasi tinggi, pengendalian pencemaran dan kebakaran hutan, pengelolaan sampah, perbaikan wilayah yang rusak, serta pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, dan kerjasama multipihak melalui pendekatan keberlanjutan secara kewilayahan (jurisdictional approach). Penerapan prinsip pembangunan yang ramah lingkungan menjadi landasan dalam setiap kebijakan dan program pembangunan daerah. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi lingkungan juga diupayakan agar tercipta partisipasi aktif dalam menjaga kelestarian alam secara kolektif dan berkelanjutan.

Selaras dengan itu, misi ini juga bertujuan untuk meningkatkan ketahanan daerah terhadap risiko bencana, baik yang bersifat alamiah maupun non-alamiah. Wilayah-wilayah yang menjadi penyangga Kabupaten Seruyan seperti dua Kecamatan di wilayah utara Seruyan dilindungi dari upaya deforestasi dan perubahan tutupan lahan agar mendukung pengendalian banjir dan ketersediaan air. Pemerintah daerah akan memperkuat sistem mitigasi dan adaptasi bencana melalui perencanaan tata ruang yang responsif risiko, peningkatan kapasitas aparaturnya serta masyarakat, dan penyediaan infrastruktur pendukung penanggulangan bencana. Edukasi kebencanaan serta pengembangan sistem peringatan dini berbasis komunitas juga menjadi bagian penting dari upaya ini. Dengan strategi yang terpadu, Kabupaten Seruyan diharapkan mampu membangun lingkungan hidup yang sehat, tangguh, dan berkelanjutan demi masa depan generasi yang akan datang.

3.1.2.5. MISI V^a: Mewujudkan Peningkatan Ekonomi dan Daya Saing Investasi Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Potensi Unggulan Daerah

Misi ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan dengan mengutamakan kekuatan ekonomi kerakyatan serta optimalisasi potensi unggulan yang dimiliki Kabupaten Seruyan. Pemerintah daerah berkomitmen mengembangkan sektor-sektor strategis seperti pertanian, perikanan, peternakan, dan kehutanan melalui penerapan teknologi tepat guna, peningkatan produktivitas, dan pendekatan berkelanjutan. Selain itu, pemanfaatan sumber daya alam akan dilakukan secara bijak dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan dan menerapkan prinsip ekonomi hijau. Pendekatan keberlanjutan skala wilayah melalui proses yang melibatkan pemangku kepentingan termasuk pelaku usaha, masyarakat, petani, nelayan akan mendorong Kabupaten Seruyan mencapai ekonomi hijau yang partisipatif sejalan dengan regulasi dan standar-standar pasar. Karena itu, Kabupaten Seruyan mengkondisikan terbentuknya wujud ekonomi hijau antara lain melalui ekonomi jasa lingkungan, sertifikasi komoditas berkelanjutan, ekowisata. Pemberdayaan pelaku usaha lokal melalui pelatihan, pendampingan, serta penguatan kapasitas kelembagaan juga akan terus ditingkatkan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan adaptif terhadap perubahan pasar.

Sebagai bagian dari strategi peningkatan daya saing daerah, misi ini juga diarahkan pada penciptaan iklim investasi yang menarik dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Seruyan akan memfasilitasi kemudahan perizinan, penyediaan infrastruktur pendukung ekonomi, serta memperkuat konektivitas antara sentra produksi dan pasar. Penguatan sektor UMKM dan pengembangan industri kreatif berbasis potensi lokal juga menjadi fokus utama

dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan sinergi antara penguatan ekonomi kerakyatan dan peningkatan daya tarik investasi, Kabupaten Seruyan diharapkan mampu menjadi daerah yang kompetitif, sejahtera, dan berdaya saing tinggi di tingkat regional maupun nasional.

Sebagaimana visi RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029, untuk mewujudkan visi tersebut maka misi pada RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 juga berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2029, Misi RPJMN Tahun 2025-2029, Misi RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025-2045, dan Misi RPJPD Kabupaten Seruyan tahun 2025-2045. Berikut keselarasan dan konsistensi serta hubungan antara misi RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 1. Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

MISI RPJMD SERUYAN 2025-2029	MISI RPJPD SERUYAN 2025-2029	MISI RPJPD Kalimantan Tengah 2025- 2045	MISI RPJMD Kalimantan Tengah 2025- 2029	MISI RPJMN 2025-2029	MISI RPJPN 2025-2045
Misi 1: mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan membangun Sumberdaya Manusia (SDM) unggul.	Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas	Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun sdm yang sehat, unggul, berdaya saing dan adaptif	Peningkatan pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika melalui pendidikan inklusif sesuai dengan kaidah belum bahadat Penghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai keadilan sosial	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (sdm), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Transformasi sosial
Misi 2: Mewujudkan iklim kehidupan yang	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel,	Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan	Pemberdayaan kearifan lokal dalam kebijakan dan program	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Transformasi tata kelola

MISI RPJMD SERUYAN 2025-2029	MISI RPJPD SERUYAN 2025-2029	MISI RPJPD Kalimantan Tengah 2025- 2045	MISI RPJMD Kalimantan Tengah 2025- 2029	MISI RPJMN 2025-2029	MISI RPJPN 2025-2045
berbudaya, demokratis, agamis, bermoral, tertib, dan inklusif	efektif dan efisien, serta terwujudnya supremasi hukum		pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpi nan indonesia
		Mewujudkan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Ketahanan sosial budaya dan ekologi
				Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	
Misi 3: Mewujudkan pemerataan pembangunan, kemandirian desa, dan inovasi layanan publik	Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar	Mewujudkan keamanan daerah yang tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah	Pemberdayaan kearifan lokal dalam kebijakan dan program pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045 Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pembangunan kewilayahannya yang merata dan berkeadilan

MISI RPJMD SERUYAN 2025-2029	MISI RPJPD SERUYAN 2025-2029	MISI RPJPD Kalimantan Tengah 2025- 2045	MISI RPJMD Kalimantan Tengah 2025- 2029	MISI RPJMN 2025-2029	MISI RPJPN 2025-2045
Misi 4: Mewujudkan harmonisasi lingkungan berkelanjutan dan ketahanan bencana	Mewujudkan tata kelola sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Mewujudkan transformasi ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi berwawasan lingkungan dan berdaya saing global	Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, ekonomi biru	Ketahanan sosial budaya dan ekologi
Misi 5: Mewujudkan peningkatan ekonomi dan daya saing investasi daerah berbasis ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan daerah	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pembangunan daerah mewujudkan pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah	Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Transformasi ekonomi

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029

3.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Seruyan 2025-2029

Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan pencapaian strategis yang mencerminkan tingkat keberhasilan tertinggi dalam pembangunan daerah. Penyusunannya didasarkan pada visi dan misi kepala daerah serta wakil kepala daerah sebagai pedoman utama dalam merumuskan strategi, kebijakan, serta Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah untuk periode lima tahun.

Tujuan pembangunan menggambarkan kondisi yang ingin diwujudkan dalam lima tahun sebagai hasil dari keberhasilan berbagai program prioritas daerah. Tujuan ini dirancang untuk menjawab berbagai isu strategis dan tantangan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Seruyan, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan strategi serta mengevaluasi efektivitas kebijakan yang diterapkan. Sementara itu, sasaran pembangunan merupakan pencapaian konkret yang ingin direalisasikan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran harus disusun agar terukur, spesifik, realistis, dan dapat diwujudkan dalam periode lima tahun sehingga dapat menjadi indikator keberhasilan berbagai program perangkat daerah. Dengan demikian, perumusan tujuan dan sasaran yang tepat akan memastikan pembangunan Kabupaten Seruyan berjalan lebih terarah, sistematis, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. Secara lebih detail, keterkaitan misi hingga sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan tahun 2025-2029 dijelaskan pada bagian berikut.

Tabel 3. 2. Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi I: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Membangun	Terwujudnya kemandirian daerah melalui peningkatan kualitas SDM dan	Meningkatnya kualitas Pendidikan dan literasi masyarakat

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN
Sumberdaya Manusia (SDM) Unggul.	ketahanan pangan.	Meningkatnya pemanfaatan ketahanan pangan
		Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
		Menurunnya Pengangguran
		Menurunnya Kemiskinan
Misi II: Mewujudkan Iklim kehidupan yang Berbudaya, Demokratis, Agamis, Bermoral, Tertib, dan Inklusif	Meningkatkan iklim lingkungan masyarakat yang tertib dan tentram, serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, demokrasi, keagamaan, dan moralitas dalam kehidupan yang inklusif dan harmonis.	Meningkatnya Kesadaran Politik dan Hukum Masyarakat
		Menurunnya konflik Masyarakat
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan
Misi III: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan, Kemandirian Desa, dan Inovasi Layanan Publik	Meningkatkan tata kelola birokrasi yang berkualitas dan inovatif dalam mendukung pemerataan pembangunan serta kemandirian desa	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis digital
		Meningkatnya kualitas pelayanan public
		Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah
Misi IV: Mewujudkan Harmonisasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana	Terwujudnya keberlanjutan Lingkungan hidup dan Menurunnya risiko bencana daerah	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
		Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana
Misi V: Mewujudkan Peningkatan Ekonomi dan Daya Saing Investasi Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Potensi Unggulan Daerah	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatnya nilai tambah ekonomi sektor UMKM dan Koperasi
		Meningkatnya nilai tambah ekonomi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
		Meningkatnya investasi daerah

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029

Berdasarkan sasaran-sasaran diatas, setiap sasaran diturunkan kedalam indikator kinerja penilai dari setiap sasaran sebagai penilai keberhasilan capaian dari setiap sasaran dalam periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten Seruyan tahun 2025-2029. Secara lebih detail, setiap indikator kinerja dari setiap sasaran RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dijelaskan pada bagian berikut.

Tabel 3. 3. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Kabupaten Seruyan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Visi: Terwujudnya Transformasi Pembangunan Kabupaten Seruyan yang Berkelanjutan, Sejahtera, Adil, Maju, dan Amanah untuk Semua										
Misi I: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Membangun Sumberdaya Manusia (SDM) Unggul.	Terwujudnya kemandirian daerah melalui peningkatan kualitas SDM dan ketahanan pangan.		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,94	71,4	71,87	72,33	72,79	73,25	
			Indeks Ketahanan Pangan	65,5	65,97	66,45	66,93	67,41	67,9	
		Meningkatnya kualitas Pendidikan dan literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	74,27	75,95	77,62	79,30	80,97	80,97	
			Indeks Pendidikan	0,614	0,618	0,622	0,626	0,630	0,634	
		Meningkatnya kualitas Kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	73,4	73,6	73,8	74	74,2	74,2	
			Prevelensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	20	19	17,5	16	15	15	
		Meningkatnya pemanfaatan ketahanan pangan	Presentase Ketersediaan Pangan	86,90	88,70	89,20	89,70	92,20	95,80	
		Menurunnya Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,45	3,4	3,3	3,2	3,16	3,1	
		Menurunnya Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	6,36	6,2	5,5	5,1	5,06	5,01	
Misi II: Mewujudkan Iklim kehidupan yang Berbudaya, Demokratis, Agamis, Bermoral, Tertib, dan Inklusif	Meningkatkan iklim lingkungan masyarakat yang tertib dan tentram, serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, demokrasi,		Indeks Harmoni Indonesia	6,7	6,71	6,72	6,73	6,74	6,75	
		Meningkatnya Kesadaran Politik dan Hukum Masyarakat	Persentase Peningkatan Jumlah Partisipan Pemilu	77,14	77,14	77,14	77,14	77,5	77,5	
		Menurunnya konflik Masyarakat	Persentase penurunan konflik	55	60	65	70	75	80	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	keagamaan, dan moralitas dalam kehidupan yang inklusif dan harmonis.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan	Angka kriminalitas	7,45	7,3	7,15	7	6,85	6,7	
Misi III: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan, Kemandirian Desa, dan Inovasi Layanan Publik	Meningkatkan tata kelola birokrasi yang berkualitas dan inovatif dalam mendukung pemerataan pembangunan serta kemandirian desa		Indeks Reformasi Birokrasi	63,5	65,5	68,39	70,56	70,92	70,99	
			Persentase Desa Mandiri	34,92	49,47	54,32	59,17	64,02	68,87	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Nilai SAKIP	71	73	74	75	76	77	
			Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis digital	Indeks Pemerintahan Digital	2,51	2,51	2,61	2,71	2,81	3,01	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	2,85	3,00	3,10	3,25	3,40	3,50	
		Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	100	100	100	100	100	100	
Misi IV: Mewujudkan Harmonisasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana	Terwujudnya keberlanjutan lingkungan hidup dan Menurunnya risiko bencana daerah		Penurunan Emisi GRK Kumulatif	951.714,31	1.070.403,14	1.213.264,31	1.376.624,50	1.534.027,75	1.679.606,11	
			Indeks Risiko Bencana	136,28	130,28	124,2	118,4	115,47	115,47	
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	79,55	79,72	79,9	80,07	80,24	80,64	
		Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi	Indeks Ketahanan Daerah	0,63	0,64	0,65	0,67	0,7	0,72	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		bencana								
Misi V: Mewujudkan Peningkatan Ekonomi dan Daya Saing Investasi Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Potensi Unggulan Daerah	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah		Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,75	5	5,25	5,5	5,75	6	
		Meningkatnya nilai tambah ekonomi sektor UMKM dan Koperasi	PDRB Sektor UMKM dan Koperasi	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	
		Meningkatnya nilai tambah ekonomi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	PDRB Sektor Pariwisata dan Ekraf	0,18	0,19	0,2	0,21	0,21	0,22	
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	265.791.039.698,00	164.390.227.109,00	172.049.981.408,00	180.092.723.428,00	188.537.602.550,00	197.957.046.423,00	
			Rasio PAD terhadap PDRB	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	
		Meningkatnya investasi daerah	Nilai Investasi (Rp)	1.313.371.481.423	1.352.772.625.686	1.392.173.832.949	1.431.575.040.212	1.470.976.247.475	1.510.377.454.738	

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029

3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Strategi dan arah kebijakan disusun sebagai panduan utama bagi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan serta sasaran RPJMD secara efektif dan efisien. Dalam perencanaan pembangunan daerah, terdapat dua pendekatan utama, yaitu perencanaan strategis dan operasional. Perencanaan strategis berfokus pada perwujudan visi dan misi pembangunan daerah serta menjadi acuan dalam menerjemahkan visi dan misi kepala daerah. Sementara itu, perencanaan operasional lebih menitikberatkan pada optimalisasi kinerja layanan di berbagai bidang pemerintahan sesuai ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, strategi untuk setiap sasaran RPJMD dirancang guna memastikan tercapainya tujuan pembangunan secara menyeluruh.

3.2.1. Strategi Pembangunan Daerah

Strategi merupakan langkah yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi dijabarkan ke dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya operasional yang bertujuan mencapai visi pembangunan. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, strategi mencakup langkah-langkah yang berisi program-program indikatif guna merealisasikan visi dan misi. Oleh karena itu, strategi harus menjadi acuan utama dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy-focused management*).

Rumusan strategi harus menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas melalui serangkaian arah kebijakan. Selain itu, strategi juga harus mencerminkan tekad Pemerintah Daerah dalam menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Untuk itu, diperlukan parameter utama yang dapat menunjukkan bagaimana strategi tersebut memberikan nilai strategis (*strategic objective*). Parameter ini akan membantu mengidentifikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi serta mendorong budaya berpikir strategis.

Guna memastikan bahwa transformasi menuju tata kelola keuangan daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja dapat terwujud, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi secara berkala sebagai bagian dari proses pembelajaran (*learning process*).

Sehubungan dengan hal tersebut, strategi pembangunan daerah Kabupaten Seruyan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Misi 1: MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DENGAN MEMBANGUN SUMBERDAYA MANUSIA (SDM) UNGGUL, dengan strategi:
 - a. Pemerataan dan peningkatan terhadap akses dan kualitas pendidikan
 - b. Penguatan upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan di tingkat masyarakat
 - c. Peningkatan kapasitas sumberdaya tenaga kesehatan
 - d. Peningkatan sediaan farmasi dan pengawasan obat dan makanan
 - e. Peningkatan produksi pangan berkelanjutan
 - f. Peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku usaha pangan
 - g. Optimalisasi pemanfaatan lahan dan distribusi pangan wilayah
 - h. Perluasan akses terhadap peluang kerja yang inklusif
 - i. Penguatan pembinaan kepemudaan dan pengembangan bakat olahraga
 - j. Optimalisasi program perlindungan sosial bagi kelompok rentan
 - k. Peningkatan Kolaborasi Perlindungan dan Jaminan Sosial Masyarakat
2. Misi 2: MEWUJUDKAN IKLIM KEHIDUPAN YANG BERBUDAYA, DEMOKRATIS, AGAMIS, BERMORAL, TERTIB DAN INKLUSIF, dengan strategi:
 - a. Peningkatan edukasi toleransi, kesadaran hukum dan keamanan serta ketertiban bersama
 - b. Peningkatan partisipasi politik masyarakat
 - c. Penguatan pendidikan politik dan demokrasi masyarakat
 - d. Penguatan ketahanan ideologi, ekonomi, sosial dan budaya

- e. Pemeliharaan dan pemerataan fasilitas ibadah
 - f. Memperkuat penegakan perda secara konsisten dan terkoordinasi
 - g. Penguatan sistem perlindungan anak dan perempuan
 - h. Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan daerah
 - i. Peningkatan Keluarga berkualitas
 - j. Pengembangan organisasi yang mengembangkan kesadaran hukum masyarakat
3. Misi 3: MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN, KEMANDIRIAN DESA, DAN INOVASI LAYANAN PUBLIK, dengan strategi:
- a. Percepatan reformasi birokrasi dan sistem pengelolaan keuangan daerah
 - b. Penguatan sistem akuntabilitas dan pengawasan kinerja internal pemerintahan
 - c. Peningkatan transparansi informasi daerah dan penguatan keamanan data publik
 - d. Peningkatan standar dan digitasilasi pelayanan publik
 - e. Pemerataan dan perbaikan infrastruktur daerah yang layak
 - f. Pemerataan akses layanan dasar dan ketahanan ekonomi desa
 - g. Peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti air bersih dan sanitasi
 - h. Penguatan sistem pengelolaan sampah dan limbah berbasis teknologi ramah lingkungan
 - i. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik
4. Misi 4: MEWUJUDKAN HARMONISASI LINGKUNGAN BERKELANJUTAN DAN KETAHANAN BENCANA, dengan strategi:
- a. Peningkatan pelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup
 - b. Peningkatan perlindungan keanakeragaman hayati daerah
 - c. Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup

- d. Penguatan sistem pencegahan dan kesiapsiagaan bencana
- e. Perlindungan wilayah Bernilai Konservasi Tinggi skala Kabupaten dan Desa.

5. Misi 5: MEWUJUDKAN PENINGKATAN EKONOMI DAN DAYA SAING INVENTASI DAERAH BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN DAN POTENSI UNGGULAN DAERAH, dengan strategi:

- a. Pembentukan ekosistem wirausaha lokal yang berkelanjutan
- b. Pemanfaatan potensi dan seni budaya lokal sebagai potensi ekonomi kreatif
- c. Pengembangan destinasi wisata secara matang dan berkelanjutan
- d. Penguatan tata kelola keuangan daerah
- e. Peningkatan sumber-sumber pendapatan asli daerah
- f. Peningkatan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing

Tabel 3.4 Rumusan Strategi RPJMD Seruyan Tahun 2025-2029

VISI : TERWUJUDNYA TRANSFORMASI PEMBANGUNAN KABUPATEN SERUYAN YANG BERKELANJUTAN, SEJAHTERA, ADIL, MAJU, DAN AMANAH UNTUK SEMUA		
MISI I : MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DENGAN MEMBANGUN SUMBERDAYA MANUSIA (SDM) UNGGUL		
TUJUAN RPJMD 2025-2029	SASARAN RPJMD SERUYAN 2025-2029	STRATEGI RPJMD SERUYAN 2025-2029
Terwujudnya kemandirian daerah melalui peningkatan kualitas SDM dan ketahanan pangan.	Meningkatnya kualitas pendidikan dan literasi masyarakat	Pemerataan dan peningkatan terhadap akses dan kualitas Pendidikan
	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Penguatan upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan di tingkat masyarakat
		Peningkatan kapasitas sumberdaya tenaga kesehatan
		Peningkatan sediaan farmasi dan pengawasan obat dan makanan
	Meningkatnya pemanfaatan ketahanan pangan	Peningkatan produksi pangan berkelanjutan
		Peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku usaha pangan
		Optimalisasi pemanfaatan lahan dan distribusi pangan wilayah
	Menurunnya pengangguran	Perluasan akses terhadap peluang kerja yang inklusif
	Menurunnya kemiskinan	Optimalisasi program perlindungan sosial bagi kelompok rentan
		Peningkatan kolaborasi perlindungan dan jaminan sosial Masyarakat
Penguatan pembinaan kepemudaan dan pengembangan bakat olahraga		
Penguatan inovasi tingkat desa untuk komoditas unggulan berbasis desa		
MISI II : MEWUJUDKAN IKLIM KEHIDUPAN YANG BERBUDAYA, DEMOKRATIS, AGAMIS, BERMORAL, TERTIB DAN INKLUSIF		
Meningkatkan iklim lingkungan masyarakat yang tertib dan tentram, serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, demokrasi, keagamaan, dan moralitas dalam kehidupan yang inklusif dan harmonis.	Meningkatnya kesadaran politik dan hukum masyarakat Menurunnya konflik masyarakat	Peningkatan edukasi toleransi, kesadaran hukum dan keamanan serta ketertiban bersama
		Peningkatan partisipasi politik masyarakat
		Penguatan pendidikan politik dan demokrasi masyarakat
		Pengembangan organisasi yang mengembangkan kesadaran hukum masyarakat
		Penguatan ketahanan ideologi, ekonomi, sosial dan budaya
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban	Pemeliharaan dan pemerataan fasilitas ibadah

VISI : TERWUJUDNYA TRANSFORMASI PEMBANGUNAN KABUPATEN SERUYAN YANG BERKELANJUTAN, SEJAHTERA, ADIL, MAJU, DAN AMANAH UNTUK SEMUA

	lingkungan	
	Menurunnya kriminalitas	Memperkuat penegakan perda secara konsisten dan terkoordinasi
		Penguatan sistem perlindungan anak dan perempuan
		Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan daerah
		Peningkatan Keluarga Berkualitas
MISI III : MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN, KEMANDIRIAN DESA, DAN INOVASI LAYANAN PUBLIK		
Meningkatkan tata kelola birokrasi yang berkualitas dan inovatif dalam mendukung pemerataan pembangunan serta kemandirian desa	Meningkatnya akuntabiitas kinerja dan keuangan daerah	Percepatan reformasi birokrasi dan sistem pengelolaan keuangan daerah
		Penguatan sistem akuntabilitas dan pengawasan kinerja internal pemerintahan
		Peningkatan transparansi informasi daerah dan penguatan keamanan data publik
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis digital	Peningkatan standar dan digitasilasi pelayanan publik
		Pemerataan dan perbaikan infrastruktur daerah yang layak
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Pemerataan akses layanan dasar dan ketahanan ekonomi desa
		Peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti air bersih dan sanitasi
	Meningkatnya pemeratan dan kualitas infrastruktur daerah	Penguatan sistem pengelolaan sampah dan limbah berbasis teknologi ramah lingkungan
		Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik
		Pengembangan sistem informasi desa melalui pemetaan tata guna lahan dan penetapan wilayah bernilai konservasi tinggi
		Pembentukan infrastruktur regulasi dan tata kelola tingkat desa
MISI IV : MEWUJUDKAN HARMONISASI LINGKUNGAN BERKELANJUTAN DAN KETAHANAN BENCANA		
Terwujudnya keberlanjutan Lingkungan hidup dan Menurunnya risiko bencana daerah	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan pelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup
		Peningkatan perlindungan keanakeragaman hayati daerah
		Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup
		Perlindungan wilayah Bernilai Konservasi Tinggi skala Kabupaten dan Desa
	Meningkatnya kapasitas daerah dalam	Penguatan sistem pencegahan dan kesiapsigaan bencana

VISI : TERWUJUDNYA TRANSFORMASI PEMBANGUNAN KABUPATEN SERUYAN YANG BERKELANJUTAN, SEJAHTERA, ADIL, MAJU, DAN AMANAH UNTUK SEMUA

menghadapi bencana

MISI V : MEWUJUDKAN PENINGKATAN EKONOMI DAN DAYA SAING INVENTASI DAERAH BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN DAN POTENSI UNGGULAN DAERAH

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatnya nilai tambah ekonomi sektor umkm dan koperasi	Pembentukan ekosistem wirausaha lokal yang berkelanjutan
	Meningkatnya nilai tambah ekonomi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Pemanfaatan potensi dan seni budaya lokal sebagai potensi ekonomi kreatif
		Pengembangan destinasi wisata secara matang dan berkelanjutan
	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Penguatan tata kelola keuangan daerah
		Peningkatan sumber-sumber pendapatan asli daerah
	Meningkatnya nilai tambah ekonomi sektor umkm dan koperasi	Peningkatan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing.
		Pengembangan sertifikasi komoditas berkelanjutan skala kabupaten
		Pengembangan model ekonomi hijau berbasis jasa lingkungan

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029

3.2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

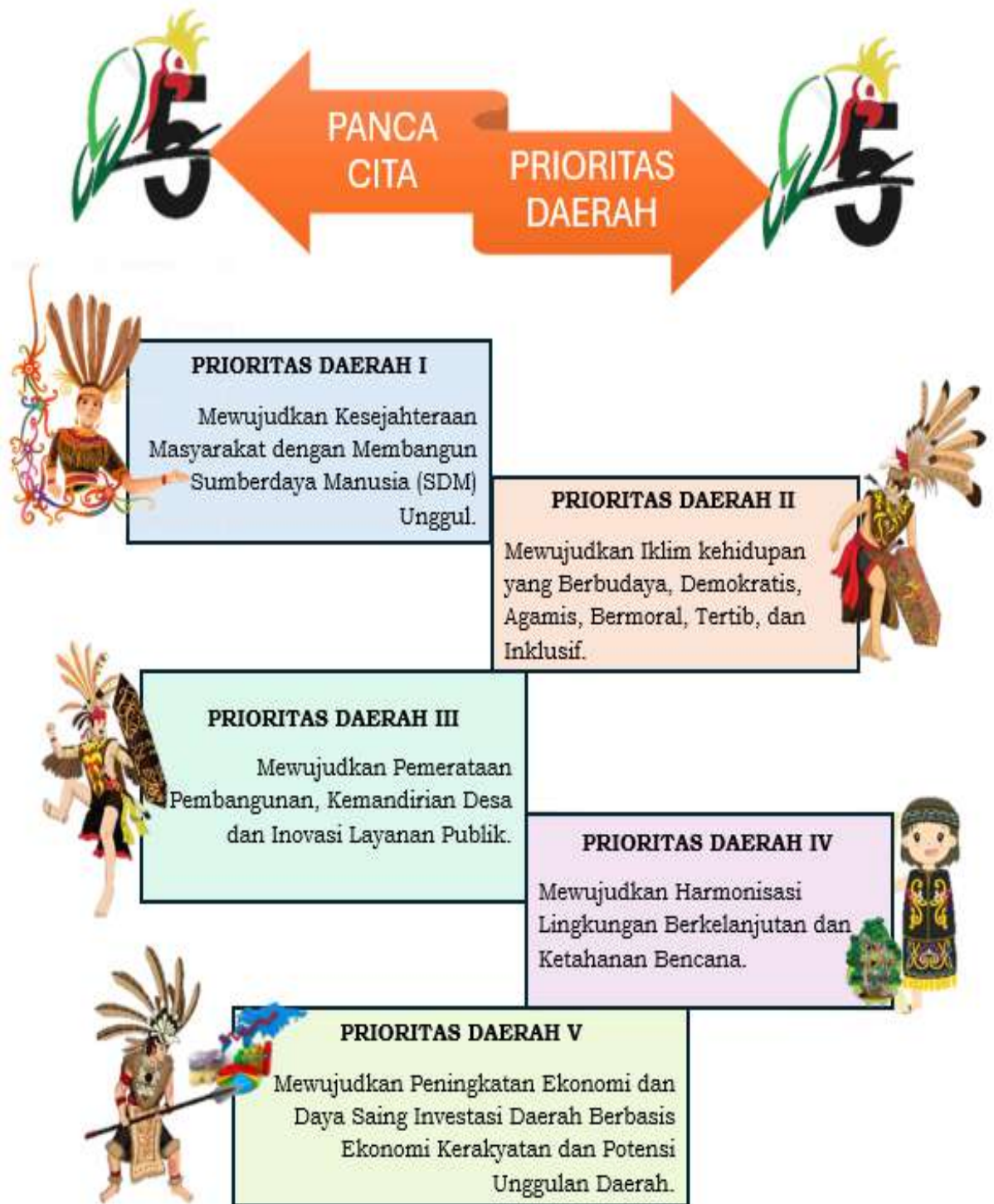
3.2.2.1. Tema Tahapan Pembangunan

Kesinambungan pembangunan setiap tahun dalam jangka waktu lima tahun, RPJMD Kabupaten Seruyan dirancang berdasarkan tema pembangunan tahunan. Tema ini menjadi landasan dalam merumuskan arah kebijakan yang lebih jelas sehingga memudahkan implementasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Setiap tema memiliki keterkaitan dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Tema pembangunan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 adalah **Transformasi Pembangunan Menuju Kabupaten Seruyan yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing**, yang kemudian dijabarkan dalam lima tahun ke depan sebagai berikut:

Tabel 3.5 Tahapan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Seruyan 5 Tahun Mendatang

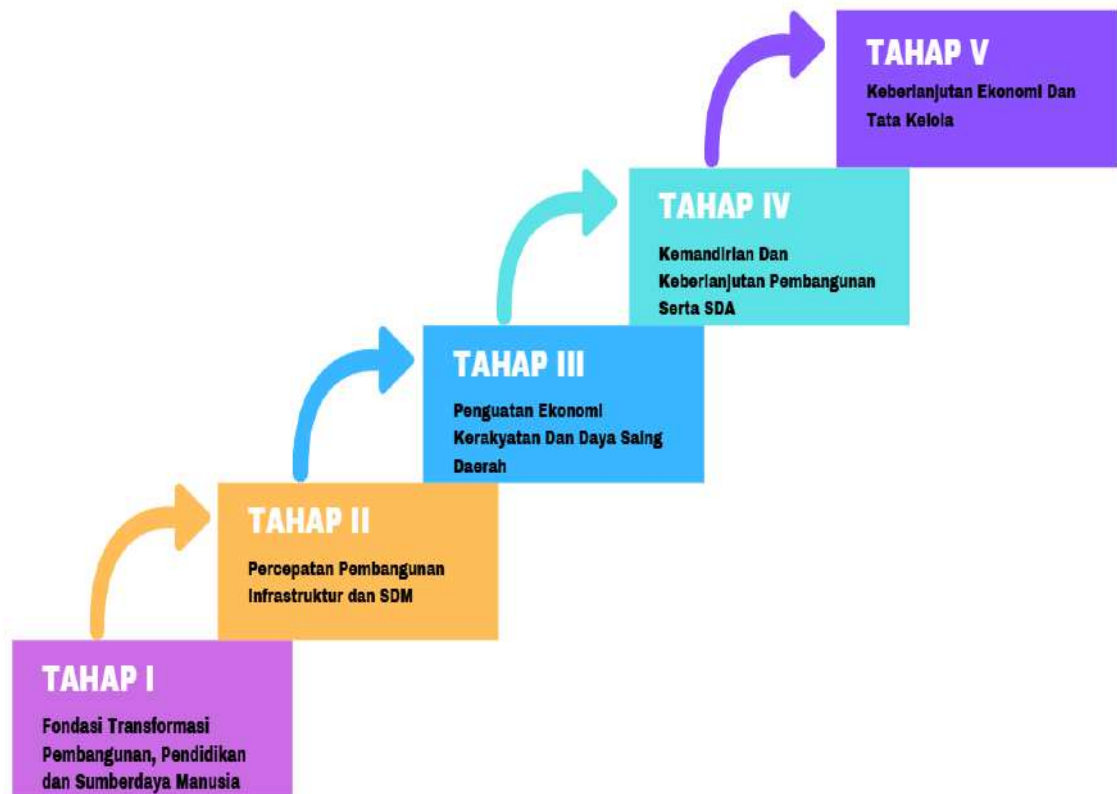
TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
Fondasi Transformasi Pembangunan, Pendidikan dan SDM	Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan SDM	Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Daerah	Kemandirian dan Keberlanjutan Pembangunan serta SDA	Keberlanjutan Ekonomi dan Tata Kelola

RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 memuat 5 (lima) Prioritas Daerah. Prioritas Daerah ini merupakan wujud implementasi langsung dari Panca Cita yang merupakan Misi dari Bupati Seruyan. Setiap Prioritas Daerah mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029. Secara lebih detail, tema pembangunan memiliki prioritas yang menggambarkan pencapaian misi Kabupaten Seruyan 5 tahun mendatang. Prioritas Kabupaten Seruyan dapat diamati pada bagian berikut.



Gambar 3. 4 Prioritas Daerah Kabupaten Seruyan

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029



Tahapan pembangunan jangka menengah tersebut dijabarkan ke dalam arah kebijakan Kabupaten Seruyan Tahun 2025–2029 yang disusun secara sistematis untuk setiap misi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Arah kebijakan ini berfungsi sebagai pedoman dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan, sehingga pelaksanaannya dapat lebih terarah, efektif, dan selaras dengan visi pembangunan daerah.

3.2.2.2. Arah Kebijakan Pembangunan

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah diwujudkan melalui strategi yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan sebagai prioritas pembangunan. Arah kebijakan berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun, mengalokasikan sumber daya, serta menjalankan program secara efektif, efisien, dan terukur guna mencapai prioritas tujuan dan sasaran misi pembangunan. Selain itu, arah kebijakan memastikan strategi yang dipilih tetap terintegrasi dan harmonis dalam setiap tahapan perencanaan lima tahunan, dengan mempertimbangkan faktor strategis seperti kondisi sosial-ekonomi, potensi sumber daya, tantangan pembangunan, serta dinamika kebijakan nasional dan global. Perumusan

arah kebijakan bertujuan untuk merasionalkan pilihan strategi agar lebih terfokus, terarah, dan sesuai dengan mekanisme pelaksanaannya, sehingga tidak hanya mampu merespons tantangan saat ini tetapi juga mengantisipasi perubahan di masa depan. Dengan pendekatan ini, diharapkan strategi pembangunan yang diterapkan dapat menciptakan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah dalam skala yang lebih luas.

Arah kebijakan yang dirancang mencerminkan strategi pembangunan yang berkelanjutan serta berdaya saing dengan mempertimbangkan potensi dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Seruyan. Dengan adanya arah kebijakan yang jelas, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat berperan aktif dalam mendukung pencapaian target pembangunan yang telah direncanakan. Adapun uraian lebih lanjut mengenai tahapan pembangunan jangka menengah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 6 Rumusan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029

No.	Misi	Arah Kebijakan RPJMD Seruyan 2025-2029	Keterangan
1.	Misi I : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Membangun Sumberdaya Manusia (SDM) Unggul	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan PAUD hingga Sekolah Menengah Pertama	
		Meningkatkan Pelatihan dan Sertifikasi Pendidik	
		Meningkatkan kualitas satuan pendidikan dengan akreditasi	
		Meningkatkan akses pembelajaran dan kearsipan berbasis digital	
		Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan formal dan non formal	
		Meningkatkan Penyediaan fasilitas kesehatan di tingkat puskesmas	
		Meningkatkan pelayanan rujukan di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama dan selanjutnya	
		Mengembangkan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi	
		Meningkatkan jumlah dan pelayanan di rumah sakit tingkat kabupaten/kota	
		Meningkatkan jumlah tenaga kesehatan di tingkat pertama dan selanjutnya	
		Meningkatkan pelatihan dan sertifikasi tenaga Kesehatan	
		Meningkatkan sediaan farmasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan selanjutnya	
		Meningkatkan pengawasan dan pemberian izin kegiatan kefarmasian	
		Meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan produksi makanan dan minuman di tingkat Masyarakat	
		Meningkatkan hasil pertanian pangan strategis	
		Menguatkan peran pendamping pertanian	
		Meningkatkan pemberdayaan kelompok tani Masyarakat	
		Memperluas peningkatan skil dan ketrampilan petani	
		Meningkatkan ketersediaan lahan pertanian	
		Meningkatkan pemanfaatan teknologi pertanian	
		Meningkatkan produktivitas dan keterampilan tenaga kerja	
		Meningkatkan Upah Minimum Kabupaten 2 kali diatas Angka Garis Kemiskinan Kabupaten	
		Memperluas ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal	
		Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial inklusif dan adaptif bagi masyarakat rentan dan miskin	
		Mengoptimalkan pelayanan rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan	

No.	Misi	Arah Kebijakan RPJMD Seruyan 2025-2029	Keterangan
		Menguatkan pemberdayaan sosial bagi kelompok miskin dan rentan	
		Memperbaiki Sistem Bantuan Sosial Tepat Sasaran	
		Meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan perlindungan sosial.	
		Meningkatkan kerjasama dengan swasta dalam pemberian bantuan sosial	
		Meningkatkan kapasitas kepemudaan daerah	
		Meningkatkan kapasitas keolahragaan daerah	
		Mengoptimalkan peran komunitas dalam kepemudaan dan olahraga	
		Memperkuat inovasi tingkat desa untuk komoditas unggulan berbasis desa	
		Penguatan ekonomi keuangan syariah	
		Pembentukan dan pelaksanaan TP Posyandu di lingkup desa	
		Meningkatkan pemahaman ormas tentang kerukunan dan toleransi	
2.	Misi II : Mewujudkan Iklim Kehidupan Yang Berbudaya, Demokratis, Agamis, Bermoral, Tertib Dan Inklusif	Meningkatkan pengawasan dan deteksi dini gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	
		Meningkatkan pembinaan dan pendidikan politik bagi masyarakat	
		Menguatkan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai pancasila	
		Penguatan ketahanan masyarakat dalam bidang ideologi, ekonomi, sosial dan budaya secara berkelanjutan	
		Meningkatkan pemahaman politik dan hukum kepada ormas dan LSM	
		Memastikan keterlibatan peran masyarakat dalam hal pengawasan kegiatan politik	
		Mengembangkan forum diskusi demokrasi dan politik	
		Meningkatkan partisipasi pelaksanaan pemilihan umum	
		Meningkatkan bantuan operasional perawatan rumah ibadah	
		Mengoptimalkan fungsi fasilitas ibadah sebagai kegiatan sosial kemasyarakatan	
		Menguatkan sistem pelayanan aduan tindak kekerasan dan eksploitasi	
		Meningkatkan sosialisasi mengenai hak-hak perempuan dan anak	
		Mengembangkan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak	
		Meningkatkan proporsi keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan daerah	
		Mendorong Partisipasi Perempuan Dalam Berbagai Sektor	
		Mengoptimalkan peran serta kelompok ketahanan keluarga	
		Mengoptimalkan pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk dalam pembangunan keluarga	

No.	Misi	Arah Kebijakan RPJMD Seruyan 2025-2029	Keterangan
3.	Misi III : Mewujudkan Pemerataan Pembangunan, Kemandirian Desa, dan Inovasi Layanan Publik	Penguatan penegakan peraturan daerah yang konsisten dan terkoordinasi untuk menjaga ketertiban umum	
		Mengembangkan organisasi bantuan hukum dan paralegal desa	
		Penguatan ekosistem halal	
		Meningkatkan kualitas pelayanan publik pemerintah daerah	
		Meningkatkan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah	
		Meningkatkan kualitas pengelolaan dan administrasi barang milik daerah	
		Meningkatkan sistem pemantauan kinerja aparatur pemerintah daerah	
		Meningkatkan sistem pelaporan yang transparan	
		Meningkatkan penyelenggaraan pengawasan pemerintah daerah	
		Meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi pemerintah daerah berbasis internet	
		Meningkatkan keterbukaan dan akses informasi pemerintah daerah	
		Meningkatkan penggunaan teknologi dalam menyebarluaskan informasi ke public	
		Menguatkan sistem keamanan data pemerintahan dan data masyarakat	
		Mengoptimalkan sistem pelayanan pemerintah daerah berbasis IoT	
		Menguatkan pelayanan publik berbasis online	
		Mengefisiensikan sistem pelayanan administrasi masyarakat	
		Meningkatkan edukasi masyarakat terkait pelayanan publik cepat dan efisien	
		Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana jalan dan jembatan yang layak	
		Meningkatkan aksesibilitas di wilayah terluar Kabupaten	
		Mempercepat perbaikan sarana dan prasarana jalan, dan jembatan yang kurang layak	
		Meningkatkan infrastruktur telekomunikasi di desa	
		Meningkatkan akses informasi di desa	
		Meningkatkan pelayanan dasar dan pemerintahan di desa	
		Mengembangkan pusat investasi usaha di desa berbasis potensi lokal	
		Meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM Desa di bidang usaha	
		Meningkatkan kualitas sanitasi dan akses air bersih di lingkungan Masyarakat	
		Mengembangkan teknologi pengolahan air bersih berbasis lingkungan	
		Meningkatkan pengelolaan persampahan daerah	

No.	Misi	Arah Kebijakan RPJMD Seruyan 2025-2029	Keterangan
		Meningkatkan kondisi saluran pembuangan dan pembuatan IPAL Komunal	
		Meningkatkan sarana dan prasarana angkutan umum darat	
		Meningkatkan sarana dan prasarana telekomunikasi dan informatika di area public	
		Meningkatkan sarana dan prasarana angkutan umum air	
		Mengembangkan sistem angkutan umum yang selaras dan terintegrasi	
		Mengembangkan sistem informasi melalui update reguler portal desa	
		Mengembangkan dan menetapkan pemetaan tata guna lahan	
		Menetapkan dan mengelola wilayah bernilai konservasi tinggi desa	
		Mengembangkan ekonomi desa berbasis komoditas unggulan berkelanjutan	
		Membentuk infrastruktur regulasi yang memperkuat tata kelola tingkat desa	
		Menguatkan dana sosial syariah	
4.	Misi IV : Mewujudkan Harmonisasi Lingkungan Berkelanjutan Dan Ketahanan Bencana	Meningkatkan konservasi dan rehabilitasi lahan kritis potensial	
		Meningkatkan Perlindungan Kawasan Konservasi Gambut	
		Meningkatkan Rehabilitasi Kawasan Bekas Tambang	
		Meningkatkan pelayanan informasi kebencanaan	
		Menyusun Skema Mitigasi Bencana yang Tepat dan Berkelanjutan	
		Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap Kebencanaan Daerah	
		Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penganggulangan bencana dan alat pelindung diri	
		Meningkatkan Pelindungan Flora dan Fauna Endemik	
		Pengembangan Kawasan Cagar Alam dan Suaka Marga Satwa Daerah	
		Peningkatan pelatihan dan pembinaan lingkungan hidup dikalangan masyarakat dan komunitas	
		Pengembangan sistem penghargaan dalam pengelolaan lingkungan hidup di kalangan pendidikan dan Masyarakat	
		Peningkatan sosialisasi terkait kesadaran lingkungan sehat berkelanjutan di lingkungan Pendidikan	
		Melindungi dan mengelola wilayah bernilai konservasi tinggi skala kabupaten	
		Mendorong Munculkan Wirausaha di Sektor Ekonomi Lokal	
5.	Misi V : Mewujudkan Peningkatan Ekonomi Dan Daya Saing Inventasi Daerah Berbasis Ekonomi	Menjamin Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Produk Lokal	
		Meningkatkan Sosialisasi "Gerakan Bangga Memakai Produk Lokal"	
		Penyediaan Akses Modal Untuk Para Pelaku UMKM dan Wirausaha lainnya	

No.	Misi	Arah Kebijakan RPJMD Seruyan 2025-2029	Keterangan
1	Kerakyatan Dan Potensi Unggulan Daerah	Meingkatkan industry halal dan UMKM Halal	
		Mengoptimalkan promosi potensi pariwisata dan seni budaya	
		Mendorong Kolaborasi Antara Pengusaha Kreaif dan Komunitas Budaya	
		Meningkatkan pengelolaan destinasi wisata secara terstruktur dan akuntabel	
		Mengembangkan destinasi wisata ramah lingkungan	
		Meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah	
		Mengembangkan teknologi pelaporan keuangan daerah berbasis internet	
		Meningkatkan sektor non unggulan dalam peningkatan pendapatan daerah	
		Mengembangkan katalog potensi investas daerah	
		Membuat roadmap investasi daerah	
		Mengembangkan sertifikasi komoditas berkelanjutan skala kabupaten	
		Mengembangkan nilai ekonomi berkelanjutan berbasis konservasi dan jasa lingkungan	
		Meningkatkan ekspor halal dan Kerjasama ekonomi syariah internasional	

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029

Tabel 3. 7 Keterkaitan Arah Kebijakan Terhadap Tahap Pembangunan RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029

MISI RPJMD 2025-2029	TUJUAN RPJMD 2025-2029	SASARAN RPJMD SERUYAN 2025-2029	STRATEGI RPJMD SERUYAN 2025-2029	ARAH KEBIJAKAN
Misi I : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Membangun Sumberdaya Manusia (SDM) Unggul	Terwujudnya kemandirian daerah melalui peningkatan kualitas SDM dan ketahanan pangan.	Meningkatnya kualitas Pendidikan dan literasi masyarakat	Pemerataan dan peningkatan terhadap akses dan kualitas pendidikan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Pendidikan Anak Usia Dini hingga Sekolah Menengah Pertama
				Meningkatkan Pelatihan dan Sertifikasi Pendidik
				Meningkatkan kualitas satuan pendidikan dengan akreditasi
				Meningkatkan akses pembelajaran dan kearsipan berbasis digital
				Meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan formal dan non formal
		Meningkatnya kualitas Kesehatan masyarakat	Penguatan upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan di tingkat masyarakat	Meningkatkan Penyediaan fasilitas kesehatan di tingkat puskesmas
				Meningkatkan pelayanan rujukan di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama dan selanjutnya
				Mengembangkan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi
				Meningkatkan jumlah dan pelayanan di rumah sakit tingkat kabupaten/kota
			Peningkatan kapasitas sumberdaya tenaga kesehatan	Meningkatkan jumlah tenaga kesehatan di tingkat pertama dan selanjutnya
				Meningkatkan pelatihan dan sertifikasi tenaga Kesehatan

MISI RPJMD 2025-2029	TUJUAN RPJMD 2025-2029	SASARAN RPJMD SERUYAN 2025-2029	STRATEGI RPJMD SERUYAN 2025-2029	ARAH KEBIJAKAN
			Peningkatan sediaan farmasi dan pengawasan obat dan makanan	Meningkatkan sediaan farmasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan selanjutnya
				Meningkatkan pengawasan dan pemberian izin kegiatan kefarmasian
				Meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan produksi makanan dan minuman di tingkat masyarakat
		Meningkatnya pemanfaatan ketahanan pangan	Peningkatan produksi pangan berkelanjutan	Meningkatkan hasil pertanian pangan strategis
				Menguatkan peran pendamping pertanian
				Memperluas peningkatan skil dan ketrampilan petani
			Peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku usaha pangan	Meningkatkan pemberdayaan kelompok tani Masyarakat
			Optimalisasi pemanfaatan lahan dan distribusi pangan wilayah	Meningkatkan ketersediaan lahan pertanian
				Meningkatkan pemanfaatan teknologi pertanian
		Menurunnya Pengangguran	Perluasan akses terhadap peluang kerja yang inklusif	Meningkatkan produktivitas dan keterampilan tenaga kerja
				Meningkatkan Upah Minimum Kabupaten 2 kali diatas Angka Garis Kemiskinan Kabupaten
				Memperluas ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat local
			Penguatan pembinaan kepemudaan dan	Meningkatkan kapasitas kepemudaan daerah

MISI RPJMD 2025-2029	TUJUAN RPJMD 2025-2029	SASARAN RPJMD SERUYAN 2025-2029	STRATEGI RPJMD SERUYAN 2025-2029	ARAH KEBIJAKAN
		Menurunnya Kemiskinan	pengembangan bakat olahraga	Meningkatkan kapasitas keolahragaan daerah
				Mengoptimalkan peran komunitas dalam kepemudaan dan olahraga
			Optimalisasi program perlindungan sosial bagi kelompok rentan	Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial inklusif dan adaptif bagi masyarakat rentan dan miskin
				Mengoptimalkan pelayanan rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan
				Menguatkan pemberdayaan sosial bagi kelompok miskin dan rentan
				Memperbaiki Sistem Bantuan Sosial Tepat Sasaran
			Peningkatan Kolaborasi Perlindungan dan Jaminan Sosial Masyarakat	Meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan perlindungan sosial.
Misi II : Mewujudkan Iklim Kehidupan Yang Berbudaya, Demokratis, Agamis, Bermoral, Tertib Dan Inklusif	Meningkatkan iklim lingkungan masyarakat yang tertib dan tentram, serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, demokrasi, keagamaan, dan moralitas dalam kehidupan yang inklusif dan harmonis	Meningkatnya Kesadaran Politik dan Hukum Masyarakat	Peningkatan edukasi toleransi, kesadaran hukum dan keamanan serta ketertiban bersama	Meningkatkan pemahaman ormas tentang kerukunan dan toleransi
				Menguatkan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila
				Meningkatkan pengawasan dan deteksi dini gangguan ketenteraman dan ketertiban umum

MISI RPJMD 2025-2029	TUJUAN RPJMD 2025-2029	SASARAN RPJMD SERUYAN 2025-2029	STRATEGI RPJMD SERUYAN 2025-2029	ARAH KEBIJAKAN
			Penguatan ketahanan ideologi, ekonomi, sosial dan budaya	Penguatan ketahanan masyarakat dalam bidang ideologi, ekonomi, sosial dan budaya secara berkelanjutan
				Menguatkan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila
			Peningkatan partisipasi politik masyarakat	Meningkatkan pembinaan dan pendidikan politik bagi Masyarakat
				Meningkatkan pemahaman politik dan hukuma kepada ormas dan LSM
				Memastikan keterlibatan peran masyarakat dalam hal pengawasan kegiatan politik
			Penguatan pendidikan politik dan demokrasi masyarakat	Mengembangkan forum diskusi demokrasi dan politik
				Meningkatkan partisipasi pelaksanaan pemilihan umum
		Menurunnya konflik Masyarakat	Pemeliharaan dan Pemerataan fasilitas ibadah	Meningkatkan bantuan operasional perawatan rumah ibadah
				Mengoptimalkan fungsi fasilitas ibadah sebagai kegiatan sosial kemasyarakatan
		Peningkatan Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan Daerah		Mendorong Partisipasi Perempuan Dalam Berbagai Sektor
				Meningkatkan proporsi keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan daerah
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan	Penguatan Sistem Perlindungan Anak dan Perempuan	Menguatkan sistem pelayanan aduan tindak kekerasan dan eksploitasi
				Meningkatkan sosialisasi mengenai hak-hak perempuan dan anak

MISI RPJMD 2025-2029	TUJUAN RPJMD 2025-2029	SASARAN RPJMD SERUYAN 2025-2029	STRATEGI RPJMD SERUYAN 2025-2029	ARAH KEBIJAKAN
Misi III : Mewujudkan Pemerataan Pembangunan, Kemandirian Desa, dan Inovasi Layanan Publik	Meningkatkan tata kelola birokrasi yang berkualitas dan inovatif dalam mendukung pemerataan pembangunan serta kemandirian desa	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Mengembangkan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak
				Mengoptimalkan peran serta kelompok ketahanan keluarga
				Mengoptimalkan pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk dalam pembangunan keluarga
			Memperkuat penegakan perda secara konsisten dan terkoordinasi	Penguatan penegakan peraturan daerah yang konsisten dan terkoordinasi untuk menjaga ketertiban umum
			Percepatan reformasi birokrasi dan sistem pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan publik pemerintah daerah
				Meningkatkan kualitas kebijakan dan kinerja pemerintah daerah
				Meningkatkan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah
				Meningkatkan kualitas pengelolaan dan administrasi barang milik daerah
			Penguatan sistem akuntabilitas dan pengawasan kinerja internal pemerintahan	Meningkatkan sistem pemantauan kinerja aparatur pemerintah daerah
				Meningkatkan sistem pelaporan yang transparan
				Meningkatkan penyelenggaraan pengawasan pemerintah daerah
				Meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi pemerintah daerah berbasis internet
			Peningkatan transparansi informasi	Meningkatkan keterbukaan dan akses informasi pemerintah daerah

MISI RPJMD 2025-2029	TUJUAN RPJMD 2025-2029	SASARAN RPJMD SERUYAN 2025-2029	STRATEGI RPJMD SERUYAN 2025-2029	ARAH KEBIJAKAN
			daerah dan penguatan keamanan data publik	Meningkatkan penggunaan teknologi dalam menyebarluaskan informasi ke publik
				Menguatkan sistem keamanan data pemerintahan dan data masyarakat
				Mengoptimalkan sistem pelayanan pemerintah daerah berbasis IoT
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis digital	Peningkatan standar dan digitisasi pelayanan publik	Menguatkan pelayanan publik berbasis online
				Mengefisiensikan sistem pelayanan administrasi masyarakat
				Meningkatkan edukasi masyarakat terkait pelayanan publik cepat dan efisien
				Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana jalan dan jembatan yang layak
				Meningkatkan aksesibilitas di wilayah terluar Kabupaten
				Mempercepat perbaikan sarana dan prasarana jalan, dan jembatan yang kurang layak
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Pemerataan akses layanan dasar dan ketahanan ekonomi desa	Meningkatkan infrastruktur telekomunikasi di desa
				Meningkatkan akses informasi di desa
				Meningkatkan pelayanan dasar dan pemerintahan di desa
				Meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM Desa di bidang usaha
			Peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti air bersih dan	Meningkatkan kualitas sanitasi dan akses air bersih di lingkungan masyarakat

MISI RPJMD 2025-2029	TUJUAN RPJMD 2025-2029	SASARAN RPJMD SERUYAN 2025-2029	STRATEGI RPJMD SERUYAN 2025-2029	ARAH KEBIJAKAN
		Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah	sanitasi	Mengembangkan teknologi pengolahan air bersih berbasis lingkungan
			Penguatan sistem pengelolaan sampah dan limbah berbasis teknologi ramah lingkungan	Meningkatkan pengelolaan persampahan daerah
				Meningkatkan kondisi saluran pembuangan dan pembuatan IPAL Komunal
			Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik	Meningkatkan sarana dan prasarana angkutan umum darat
				Meningkatkan sarana dan prasarana telekomunikasi dan informatika di area publik
				Meningkatkan sarana dan prasarana angkutan umum air
Misi IV : Mewujudkan Harmonisasi Lingkungan Berkelanjutan Dan Ketahanan Bencana	Terwujudnya keberlanjutan Lingkungan hidup dan Menurunnya risiko bencana daerah	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Pemerataan dan perbaikan infrastruktur daerah yang layak	Mengembangkan sistem angkutan umum yang selaras dan terintegrasi
			Peningkatan pelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan konservasi dan rehabilitasi lahan kritis potensial
				Meningkatkan Perlindungan Kawasan Konservasi Gambut
				Meningkatkan Rehabilitasi Kawasan Bekas Tambang
			Peningkatan Perlindungan Keanakeragaman Hayati Daerah	Meningkatkan Pelindungan Flora dan Fauna Endemik
			Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan dan Perlindungan	Pengembangan Kawasan Cagar Alam dan Suaka Marga Satwa Daerah
				Peningkatan pelatihan dan pembinaan lingkungan hidup dikalangan masyarakat dan komunitas

MISI RPJMD 2025-2029	TUJUAN RPJMD 2025-2029	SASARAN RPJMD SERUYAN 2025-2029	STRATEGI RPJMD SERUYAN 2025-2029	ARAH KEBIJAKAN
			Lingkungan Hidup	Pengembangan sistem penghargaan dalam pengelolaan lingkungan hidup di kalangan pendidikan dan masyarakat
				Peningkatan sosialisasi terkait kesadaran lingkungan sehat berkelanjutan di lingkungan pendidikan
		Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana	Penguatan sistem pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Meningkatkan pelayanan informasi kebencanaan
				Menyusun Skema Mitigasi Bencana yang Tepat dan Berkelanjutan
Misi V : Mewujudkan Peningkatan Ekonomi Dan Daya Saing Inventasi Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Potensi Unggulan Daerah	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatnya nilai tambah ekonomi sektor UMKM dan Koperasi	Pembentukan Ekosistem Wirausaha Lokal yang Berkelanjutan	Mendorong Munculkan Wirausaha di Sektor Ekonomi Lokal
				Menjamin Stabilitas Harga dan Ketersediaan Produk Lokal
				Meningkatkan Sosialisasi "Gerakan Bangga Memakai Produk Lokal"
				Penyediaan Akses Modal Untuk Para Pelaku UMKM dan Wirausaha lainnya
		Meningkatnya nilai tambah ekonomi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Pemanfaatan Potensi dan Seni Budaya Lokal Sebagai Potensi Ekonomi Kreatif	Mengoptimalkan promosi potensi pariwisata dan seni budaya
				Mendorong Kolaborasi Antara Pengusaha Kreaif dan Komunitas Budaya
			Pengembangan destinasi wisata secara matang dan berkelanjutan	Meningkatkan pengelolaan destinasi wisata secara terstruktur dan akuntabel

MISI RPJMD 2025-2029	TUJUAN RPJMD 2025-2029	SASARAN RPJMD SERUYAN 2025-2029	STRATEGI RPJMD SERUYAN 2025-2029	ARAH KEBIJAKAN
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Penguatan tata kelola keuangan daerah	Mengembangkan destinasi wisata ramah lingkungan
				Meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah
				Mengembangkan teknologi pelaporan keuangan daerah berbasis internet
		Meningkatnya investasi daerah	Peningkatan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah	Meningkatkan sektor non unggulan dalam peningkatan pendapatan daerah
			Peningkatan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing.	Mengembangkan katalog potensi investas daerah
				Membuat roadmap investasi daerah
				Mengembangkan pusat investasi usaha di desa berbasis potensi lokal

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029

3.2.3. Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.2.3.1. Program Prioritas Turunan Nasional

Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025. Program prioritas ini merupakan turunan langsung dari Asta Cita sebagai visi pembangunan nasional yang menjadi prioritas utama pemerintahan periode 2025-2029. Asta Cita sebagai Prioritas Nasional RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan prioritas pembangunan jangka menengah yang merupakan wujud implementasi langsung dari misi Presiden, yang selaras dengan agenda transformasi RPJPN Tahun 2025-2045 untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Prioritas Nasional menjadi struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029. Untuk pencapaian sasarnya, setiap prioritas nasional diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki sasaran terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha (BUMN, Swasta). Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029, yang diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

Asta Cita memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) sejumlah 8 program. Keseluruhan upaya tersebut dirancang untuk memberikan dampak pembangunan yang signifikan dalam jangka menengah sekaligus memberikan hasil yang dapat dirasakan masyarakat dalam jangka pendek. Program prioritas ini mencakup berbagai aspek pembangunan mulai dari ketahanan pangan, energi, dan air, reformasi tata kelola pemerintahan,

pemberantasan kemiskinan dan korupsi, hingga penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan.



Gambar 3. 5 Program Prioritas Nasional & 8 Program Hasil Terbaik Cepat

Sumber: Bappenas, 2025

Berdasarkan 17 program prioritas dan 8 program hasil terbaik cepat diatas, RPJMN tahun 2025-2029 memiliki setidaknya 77 proyek strategis nasional (PSN). Seluruh PSN tersebut secara jelas memiliki lokus atau

lokasi pelaksanaan yang berbeda. Mulai dari tingkat nasional hingga khusus kepada beberapa daerah otonomi.

Proyek Strategis Nasional ini akan diimplementasikan di tingkat daerah melalui sinkronisasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk memastikan koherensi kebijakan antara pusat dan daerah. Penyesuaian alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan dilakukan untuk mendukung implementasi program prioritas nasional di tingkat daerah, dengan penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan program. Sistem monitoring dan evaluasi akan diterapkan secara berkala untuk memastikan pencapaian target dan sasaran program prioritas, dengan indikator keberhasilan yang terukur meliputi tingkat pencapaian swasembada pangan, energi, dan air, peningkatan rasio pajak terhadap PDB, indeks reformasi birokrasi, penurunan tingkat kemiskinan absolut, cakupan layanan kesehatan universal, indeks pembangunan manusia, tingkat literasi digital masyarakat, dan indeks ketahanan lingkungan.

Program Prioritas Pembangunan Daerah ini menjadi panduan utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah periode 2025-2029, dengan fokus pada pencapaian visi Indonesia Emas 2045 melalui implementasi Asta Cita di tingkat lokal. Keseluruhan program ini dirancang untuk menciptakan dampak pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Indonesia, dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan spesifik setiap daerah.

3.2.3.2. Program Prioritas Turunan Provinsi

Dalam upaya menyelaraskan kebijakan pembangunan antara tingkat pusat dan daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan visi strategis bersama dengan para kepala daerah kabupaten dan kota. Visi yang dicanangkan adalah **"MENGANGKAT HARKAT DAN MARTABAT KHUSUSNYA MASYARAKAT DAYAK DAN MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAH UMUMNYA (MANGGATANG UTUS) DENGAN KEARIFAN LOKAL DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK**

INDONESIA MENUJU KALTENG MAJU, MODERN, BERMARTABAT, DAN BERKAH MENUJU INDONESIA EMAS 2045."

Guna merealisasikan visi tersebut, telah diidentifikasi lima misi utama (Upaya/Misi) yang mencakup:

1. **Optimalisasi Tata Kelola Ekonomi Berbasis Kekayaan Daerah** Meningkatkan efektivitas pengelolaan kesejahteraan ekonomi melalui pemanfaatan optimal Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pengembangan potensi sumber daya lokal.
2. **Transformasi Sistem Pendidikan Inklusif** Mengembangkan kualitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat dengan mengutamakan prinsip kesetaraan melalui program pendidikan yang menyeluruh dan berkeadilan.
3. **Pengembangan Infrastruktur Terintegrasi** Membangun dan memperkuat jaringan infrastruktur yang menghubungkan berbagai wilayah, serta meningkatkan daya saing ekonomi melalui peningkatan konektivitas regional.
4. **Peningkatan Layanan Kesehatan Komprehensif** Mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang berkualitas dan dapat diakses oleh seluruh segmen masyarakat sebagai bentuk kepedulian sosial pemerintah.
5. **Penguatan Identitas Lokal dalam Konteks Global** Memberdayakan kearifan lokal melalui berbagai inisiatif kebijakan dan program pemerintah yang bertujuan mewujudkan Visi Indonesia Mas 2045.

Untuk mengoperasionalkan kelima misi tersebut, telah disusun **Program Prioritas** dari Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. Program Prioritas Turunan Provinsi merupakan implementasi program prioritas nasional yang disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kebutuhan spesifik daerah. Program Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan ini dikenal sebagai Program Prioritas Hutam Betang. Program ini terdiri dari komponen-komponen utama:

1. **Kalteng Bermartabat** - Membangun harkat dan martabat daerah
2. **Batang Maju** - Mendorong kemajuan pembangunan berkelanjutan

3. **Batang Sehat** - Mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera
4. **Batang Harmoni** - Menciptakan keharmonisan sosial

Secara lebih khusus Huma Batang kemudian diimplementasikan agar lebih sistematis, efektif, dan efisien dengan menjadikan Program Prioritas Pro Rakyat Huma Batang Sejahtera, yaitu terdiri atas (1) BLT 2 Juta Per KK; (2) Operasi Pasar Sembako Murah; (3) Sekolah/Kuliah Gratis; (4) Kesehatan Gratis Berbasis KTP/BPJS; (5) Akses Lapangan Kerja; (6) Modal Bantuan Petani; (7) Akses Bantuan Nelayan; (8) Bantuan Rumah Guru. Kemudian jika dijabarkan secara lebih umum, maka penjelasan dan turunan Program Prioritas Huma Batang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 8 Program Prioritas Provinsi Kalimantan Tengah 2025-2029

Pilar Program	Program Prioritas	Deskripsi
Kalteng Bermartabat	Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan	Membangun infrastruktur jalan dan jembatan, termasuk menembus keterisolasian daerah pedalaman dan pesisir
	Memperluas sosialisasi spirit Belom Bahadat	Sosialisasi di berbagai instansi dan kalangan masyarakat agar menjiwai spirit Belom Bahadat dalam berkompetisi di berbagai bidang guna menumbuhkan masyarakat yang berdaya saing
Batang Maju	Pembangunan 1.000 km jalan desa	Membangun jalan sepanjang 1.000 km untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antardesa serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal
	Revitalisasi infrastruktur lintas kabupaten dan kota	Memperbaiki dan memperbarui infrastruktur jalan di seluruh kabupaten dan kota untuk meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat
	Pembangunan Delta Kalteng Ekonomi Eksklusif	Mengembangkan wilayah khusus ekonomi dengan fokus pada hilirisasi mineral, transportasi, dan distribusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
	Peningkatan Infrastruktur Air Bersih Desa	Meningkatkan akses masyarakat desa terhadap air bersih yang layak melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur
	Peningkatan Akses Listrik Desa, 100% Bersinar	Menyediakan akses listrik bagi seluruh desa di Provinsi Kalimantan Tengah untuk memastikan 100% wilayah mendapatkan penerangan
	Akses Sinyal dan Internet Daerah Pedalaman	Memperluas jangkauan sinyal telekomunikasi dan akses internet di daerah pedalaman untuk menghubungkan masyarakat dan mendukung kegiatan ekonomi
Batang Makmur	Rp2 juta per Kartu Keluarga Bantuan Pangan	Menyediakan bantuan pangan sebesar Rp2 juta per keluarga untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan mengurangi angka kemiskinan
	Operasi Pasar Murah	Menyelenggarakan pasar murah secara berkala untuk menyediakan kebutuhan

Pilar Program	Program Prioritas	Deskripsi
		pokok dengan harga terjangkau
	250 Miliarder Muda Baru	Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan 250 pengusaha muda sukses melalui dukungan modal dan bimbingan bisnis
	Milenial Job Center	Fasilitas pelatihan kewirausahaan dan peningkatan kompetensi SDM berbasis wirausaha untuk meningkatkan keterampilan dan kesempatan kerja bagi generasi milenial
	Inkubasi UMKM	Menyediakan program pendampingan dan dukungan bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas usaha, akses pasar, legalitas hukum, dan daya saing
	Asuransi Petani dan Nelayan	Memberikan perlindungan asuransi bagi petani dan nelayan untuk menjamin kelangsungan usaha mereka dari risiko alam dan ekonomi
	Bantuan Perahu dan Alat Tangkap	Mendukung nelayan dengan menyediakan perahu dan alat tangkap yang lebih modern untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan warga pesisir
Batang Cerdas	Sekolah/Kuliah Gratis	Menyediakan akses pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi untuk memastikan setiap anak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas
	Satu Keluarga Harus Ada Sarjana	Mendorong setiap keluarga untuk memiliki minimal satu anggota keluarga lulusan perguruan tinggi guna meningkatkan taraf pendidikan dan kesejahteraan sosial-ekonomi
	1.000 Rumah Guru	Memangun 1.000 rumah untuk guru sebagai bentuk apresiasi dan dukungan agar mereka dapat tinggal dekat dengan tempat mengajar
	Insentif Guru Agama	Memberikan insentif khusus bagi guru mengaji, guru sekolah minggu, Balai Basarah, dan guru agama lainnya untuk menghargai peran mereka dalam membentuk karakter dan moral
	Kalteng Mengaji	Program untuk memperdalam penghayatan dan pengamalan ajaran agama sesuai dengan keyakinan masing-masing, memperkuat spiritualitas dan toleransi
Batang Sehat	Berobat Gratis Berbasis KTP	Memberikan akses layanan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah hanya dengan menunjukkan KTP
	Insentif Tenaga Kesehatan Desa	Menyediakan insentif bagi tenaga kesehatan yang bekerja di desa untuk meningkatkan motivasi dan kinerja serta memastikan layanan kesehatan yang lebih baik
	Revitalisasi Puskesmas Desa	Memperbaiki dan memperbarui fasilitas puskesmas di desa-desa untuk menyediakan layanan kesehatan yang lebih lengkap dan berkualitas
	Pendampingan Ibu Hamil dan Pascahamil	Menyediakan program pendampingan komprehensif bagi ibu hamil dan setelah melahirkan untuk memastikan kesehatan ibu dan bayi

Pilar Program	Program Prioritas	Deskripsi
	1 Desa 1 Ambulans	Menyediakan satu ambulans untuk setiap desa guna memastikan respon cepat dalam situasi darurat dan meningkatkan kemampuan penanganan medis di daerah pedesaan
Batang Harmoni	Berdayakan 100 Dewi (Desa Wisata)	Mengembangkan 100 desa wisata dengan memberikan pelatihan dan dukungan untuk meningkatkan potensi pariwisata lokal dan menciptakan lapangan kerja
	Rp150 Miliar Bantuan Provinsi untuk Kabupaten Kota	Mengalokasikan dana Rp150 miliar untuk mendukung pembangunan dan program prioritas di seluruh kabupaten dan kota
	Rp250 Juta Stimulus Desa	Memberikan stimulus Rp250 juta kepada setiap desa untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup warga desa
	Insentif Kepala Desa, BPD, Damang, Mantir, dan RT/RW	Menyediakan insentif bagi pemimpin desa dan tokoh masyarakat sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam memimpin dan menjaga keharmonisan
	Layanan Cepat Tanggap Kebakaran Lahan dan Bantuan Warga	Membentuk tim respon cepat untuk menangani kebakaran lahan dan memberikan bantuan langsung kepada warga terdampak

Program prioritas Provinsi Kalimantan Tengah ini menunjukkan bagaimana program prioritas nasional dapat diadaptasi dan disesuaikan dengan karakteristik lokal daerah. Implementasi program ini dilakukan melalui koordinasi yang erat antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa untuk memastikan sinergi dalam pencapaian tujuan pembangunan. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program dan pencapaian target yang telah ditetapkan, dengan indikator keberhasilan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan spesifik Provinsi Kalimantan Tengah.

3.2.3.3. Program Prioritas Kepala Daerah

Dalam upaya mewujudkan visi Kabupaten Seruyan sebagai "Terwujudnya Transformasi Pembangunan Kabupaten Seruyan yang Berkelanjutan, Sejahtera, Adil, Maju, dan Amanah untuk Semua", diperlukan langkah-langkah strategis yang sistematis dan terukur. Oleh karena itu, pemerintah daerah telah menetapkan program prioritas pembangunan sebagai pedoman dalam merancang serta melaksanakan kebijakan pembangunan di Kabupaten Seruyan untuk periode 2025-2029.

Program-program ini disusun guna menjawab berbagai isu strategis utama, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur, pengembangan perekonomian daerah, serta optimalisasi tata kelola pemerintahan. Dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan dan daya saing daerah, program prioritas ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Adapun program prioritas Pembangunan Daerah di Kabupaten Seruyan Sebagai berikut.

Tabel 3. 9. Janji Politik Bupati Terpilih Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029

No	Program Priotas
1	1500 Beasiswa Pendidikan Tinggi D3/D4/S1/S2/S3, 1000 STDB, dan Wajib Belajar 12 tahun
2	Transformasi tata kelola (digitalisasi) keuangan daerah
3	Pemberdayaan UMKM pada berbagai sektor
4	Bantuan bibit unggul, pupuk, alat dan mesin
5	Peningkatkan sarana dan prasarana bidang keagamaan secara menyeluruh (semua agama).
6	Peningkatan kesejahteraan PNS, Pegawai Honorer, Unsur Pemerintahan dan Guru Keagamaan
7	Peningkatan sarana prasarana sekolah umum, madrasah, pondok pesantren, sekolah minggu, dan sekolah keagamaan lainnya
8	Peningkatan pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas/transportasi, pelayanan umum, penyelenggaraan pemerintahan desa
9	Pembangunan dan peningkatan kapasitas perekonomian pada berbagai sektor utama, termasuk pendirian BUMD, Pendirian Perseroan Terbatas bidang Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan, serta pengembangan BUMDES
10	Keberlanjutan Islamic Center dan Pelabuhan Sigintung
11	Peningkatan Jaringan Listrik, Telekomunikasi, Internet, dan Air Bersih

No	Program Priotas
	untuk Semua

Sumber: Janji Politik Bupati Terpilih Kabupaten Seruyan tahun 2025-2029, 2025

3.2.3.4. Program Prioritas Perangkat Daerah

Sejalan dengan visi Kabupaten Seruyan untuk mewujudkan "Transformasi Pembangunan Kabupaten Seruyan yang Berkelanjutan, Sejahtera, Adil, Maju, dan Amanah untuk Semua", setiap Perangkat Daerah memiliki peran strategis dan tanggung jawab yang tidak dapat dipisahkan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah periode 2025-2029. Program prioritas Perangkat Daerah disusun sebagai wujud komitmen kolektif seluruh organisasi pemerintah daerah dalam mentransformasikan visi menjadi aksi nyata yang terukur dan berkelanjutan.

Melalui pendekatan yang terintegrasi dan sinergis, setiap Perangkat Daerah diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi dan kewenangannya untuk berkontribusi secara maksimal terhadap penyelesaian isu-isu strategis pembangunan daerah. Program-program ini dirancang dengan mempertimbangkan kapasitas kelembagaan, ketersediaan sumber daya, serta keterkaitan antar sektor untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan.

Dengan mengutamakan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat, program prioritas Perangkat Daerah ini diharapkan mampu menjadi katalis percepatan pembangunan yang memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup seluruh masyarakat Kabupaten Seruyan. Adapun program prioritas masing-masing Perangkat Daerah di Kabupaten Seruyan adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 10 Program Prioritas RPJMD Kabupaten Seruyan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Visi: Terwujudnya Transformasi Pembangunan Kabupaten Seruyan yang Berkelanjutan, Sejahtera, Adil, Maju, dan Amanah untuk Semua						
Misi I: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Membangun Sumberdaya Manusia (SDM) Unggul.	Terwujudnya kemandirian daerah melalui peningkatan kualitas SDM dan ketahanan pangan.	Meningkatnya kualitas Pendidikan dan literasi masyarakat		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		
				Indeks Ketahanan Pangan		
				Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)		
				Indeks Pendidikan		
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Nilai)	2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
				Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)		
			Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar (%)		
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)		
				Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B (%)		
				Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV (%)		
				Iklim Inklusivitas SD (Nilai)		
				Iklim Keamanan SD (Nilai)		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Iklim Kebhinekaan SD (Nilai)		
				Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)		
				Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)		
				Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)		
				Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)		
				Iklim Inklusivitas SMP (Nilai)		
				Iklim Keamanan SMP (Nilai)		
				Iklim Kebinekaan SMP (Nilai)		
			Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
			Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
				Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)		
			Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Institusi Pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)	1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
			Terlestarikannya Bahasa dan Sastra Daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase)	1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
		Meningkatnya kualitas kesehatan		Usia Harapan Hidup		
				Prevelensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup)) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
			Meningkatnya Mutu Dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
			Meningkatnya Kualitas Dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (Persentase)	1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
			Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
			Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%) Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar (%) Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%) Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B (%)	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV (%)		
				Iklim Inklusivitas SD (Nilai)		
				Iklim Keamanan SD (Nilai)		
				Iklim Kebhinekaan SD (Nilai)		
				Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)		
				Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)		
				Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)		
				Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)		
				Iklim Inklusivitas SMP (Nilai)		
				Iklim Keamanan SMP (Nilai)		
				Iklim Kebinekaan SMP (Nilai)		
			Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
			Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
			Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
			Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan	Indeks Kualitas Air (Indeks)	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang
				Indeks Kualitas Udara (Indeks)		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Lingkungan Hidup		PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
			Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
			Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
				Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (Persentase)		
				Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin (%)		
				Persentase keluarga miskin dan rnetan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan (%)		
			Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Terhadap Banjir dan Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Irigrasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase)	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				Persentase Luas Layanan Irigrasi Multikomoditas (Persentase)		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota (Persentase)	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			Meningkatnya Produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
			Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran serta masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)		
			Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
			Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
			Terjaminnya Pemeuhan Hak Anak secara Komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan tindak Kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
				Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)		
			Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan MHA dalam Pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Meningkatnya pemanfaatan ketahanan pangan	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
				Presentase Ketersediaan Pangan		
			Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
			Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
			Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
			Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Terhadap Banjir dan Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Irigrasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase)	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				Persentase Luas Layanan Irigrasi Multikomoditas (Persentase)		
			Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
		Menurunnya Pengangguran		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		
			Meningkatnya Produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
			Meningkatnya penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
			Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
			Meningkatnya Kapasitas UMKM Yang Tangguh dan Mandiri	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
				Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)		
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)		
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
			Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
			Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase lembaga di bidang sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial (%)	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
				Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial (%)		
				Persentase penyelenggara PUB/UGB yang tertib perizinan pengumpulan sumbangan (%)		
		Menurunnya Kemiskinan		Tingkat Kemiskinan		
				Pendapatan Per Kapita		
			Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase lembaga di bidang sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial (%)	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
				Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial (%)		
				Persentase penyelenggara PUB/UGB yang tertib perizinan pengumpulan sumbangan (%)		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
				Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)		
				Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)		
				Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)		
				Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)		
			Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
				Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (Persentase)		
				Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin (%)		
				Persentase keluarga miskin dan rnetan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan (%)		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatkan perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
				Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial (%)		
				Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya (%)		
			Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar (%)		
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)		
				Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B (%)		
				Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV (%)		
				Iklim Inklusivitas SD (Nilai)		
				Iklim Keamanan SD (Nilai)		
				Iklim Kebhinekaan SD (Nilai)		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)		
				Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)		
				Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)		
				Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)		
				Iklim Inklusivitas SMP (Nilai)		
				Iklim Keamanan SMP (Nilai)		
				Iklim Kebinekaan SMP (Nilai)		
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))		
			Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Terhadap Banjir dan Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Irigrasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase)	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)		
			Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
			Meningkatnya pengawasan sumber daya perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (%)	3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
			Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
			Meningkatnya Produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
			Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Efektivitas Kerja Sama Daerah (%) Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (%)		
			Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Yang Dihasilkan	Persentase Produk Hukum yang dihasilkan (%)		
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (Persentase)	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)		
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ (Angka)		
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Perekaman KTP elektronik (%)	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)		
				Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)		
			Meningkatnya Kualitas	Kepemilikan akta kelahiran (%)	2.12.03 - PROGRAM	Dinas/Badan yang

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Layanan Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	PENCATATAN SIPIL	menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)		
				Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)		
				Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)		
			Meningkatnya kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase)	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
			Meningkatnya kualitas layanan dan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat pascabencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)		
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana (%)		
			Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Dasar, Kader, Manajerial, dan Fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (Persentase)	5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
				Indeks Harmoni Indonesia		
Misi II: Mewujudkan Iklim kehidupan	Meningkatkan iklim lingkungan	Meningkatnya Kesadaran Politik		Persentase Peningkatan Jumlah Partisipan Pemilu		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
yang Berbudaya, Demokratis, Agamis, Bermoral, Tertib, dan Inklusif	masyarakat yang tertib dan tentram, serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, demokrasi, keagamaan, dan moralitas dalam kehidupan yang inklusif dan harmonis.	dan Hukum Masyarakat	Meningkatnya Etika dan Budaya Politik	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik dan etika budaya politik (%)	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Menurunnya konflik Masyarakat		Persentase penurunan konflik		
			Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase konflik sosial yang diselesaikan (%)	8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan		Angka kriminalitas		
			Meningkatnya Kesadaran/Pemahaman Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan tentang ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan (%)	8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
			Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Indeks Kinerja Ormas (%)	8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
				Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang ber-SKT/Aktif (%)		
			Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya Masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Indeks)	8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Dan Politik
Misi III: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan, Kemandirian Desa, dan Inovasi Layanan Publik	Meningkatkan tata kelola birokrasi yang berkualitas dan inovatif dalam mendukung pemerataan pembangunan serta kemandirian desa	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Indeks Reformasi Birokrasi		
				Persentase Desa Mandiri		
				Nilai SAKIP		
				Opini BPK		
			Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
			Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
			Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)		
				Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)		
			Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)		
				Persentase Penurunan SILPA (Persentase)		
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (%)	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
				Persentase tindak lanjut hasil pengawasan APIP tahun N-1 (%)		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis digital		Indeks Pemerintahan Digital		
			Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publikasi Pemerintahan Daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survei) (%)	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Infrastruktur Layanan Digital (%)	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
			Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
			Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)		
				Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)		
			Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)		
				Persentase Penurunan SILPA (Persentase)		
			Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
			Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
			Meningkatnya Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)		
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Perekaman KTP elektronik (%)	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)		
				Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)		
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Kepemilikan akta kelahiran (%)	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)		
				Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)		
				Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)		
				Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)		
			Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (%)	2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (Persentase)		
				Persentase penyajian data kependudukan yang disediakan (%)		
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN,	Dinas/Badan yang menangani Bidang

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Perencanaan
			Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
			Meningkatnya Kualitas Penilaian Kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)		
			Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)		
			Meningkatnya Tata Kelola Pengembangan Karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)		
			Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Pelayanan Publik		
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Perekaman KTP elektronik (%)	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)		
				Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)		
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Kepemilikan akta kelahiran (%)	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan
				Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)		Dan Pencatatan Sipil
				Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)		
				Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)		
			Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%))		
			Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar (%)		
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)		
				Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B (%)		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV (%)		
				Iklim Inklusivitas SD (Nilai)		
				Iklim Keamanan SD (Nilai)		
				Iklim Kebhinekaan SD (Nilai)		
				Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)		
				Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)		
				Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)		
				Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)		
				Iklim Inklusivitas SMP (Nilai)		
				Iklim Keamanan SMP (Nilai)		
				Iklim Kebinekaan SMP (Nilai)		
			Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase lembaga di bidang sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial (%)	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
				Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial (%)		
				Persentase penyelenggara PUB/UGB yang tertib perizinan pengumpulan sumbangan (%)		
			Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani (%)	1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			kekerasan		MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	
			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
				Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)		
				Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)		
				Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)		
				Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)		
			Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
				Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (Persentase)		
				Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin (%)		
				Persentase keluarga miskin dan rnetan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan (%)		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatkan perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
				Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial (%)		
				Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya (%)		
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten/Kota (%)	1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	Konektivitas Darat (Persentase)	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
				Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)		
			Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
			Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)		
			Meningkatnya Perlindungan Terhadap Masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)		
			Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya kualitas layanan dan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat pascabencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)		
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana (%)		
			Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
			Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)		
		Meningkatnya pemeratan dan kualitas infrastruktur daerah		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)		
			Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Terhadap Banjir dan Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Irigrasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase)	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				Persentase Luas Layanan Irigrasi Multikomoditas (Persentase)		
			Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota (Persentase)	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			Meningkatnya Layanan Persampahan Regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan Yang Tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat yang Nyaman dan Aman	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kontruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten/Kota (%)	1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
			Meningkatnya penyediaan PSU Permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
			Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	Konektivitas Darat (Persentase)	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
				Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)		
			Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut / Sungai	Konektivitas laut/sungai (%)	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
Misi IV: Mewujudkan Harmonisasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana	Terwujudnya keberlanjutan Lingkungan hidup dan Menurunnya risiko bencana daerah	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Penurunan Emisi GRK Kumulatif		
				Indeks Risiko Bencana		
			Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		
				Indeks Kualitas Air (Indeks)	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
				Indeks Kualitas Udara (Indeks)		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
		Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana		Indeks Ketahanan Daerah		
			Meningkatnya kualitas layanan dan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat pascabencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)		
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana (%)		
Misi V: Mewujudkan Peningkatan Ekonomi dan Daya Saing Investasi Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Potensi Unggulan Daerah	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatnya nilai tambah ekonomi sektor UMKM dan Koperasi		Laju Pertumbuhan Ekonomi		
				PDRB Sektor UMKM dan Koperasi		
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
			Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
			Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
			Meningkatnya Kapasitas UMKM Yang Tangguh dan	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
			Meningkatnya Daya Saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
			Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang Yang Efisien, Merata dan Terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
			Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
			Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
			Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
				Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)		
				Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase)		

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Meningkatnya nilai tambah ekonomi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
				PDRB Sektor Pariwisata dan Ekraf		
			Meningkatnya Daya Tarik Destrinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
			Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
			Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah		Jumlah Pendapatan Asli Daerah		
				Rasio PAD terhadap PDRB		
			Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
			Meningkatnya Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)		
			Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)		
			Meningkatnya Daya Tarik Destrinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
			Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
		Meningkatnya investasi daerah		Nilai Investasi (Rp)		
			Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
			Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
			Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
			Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
			Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029

3.2.3.5. Keterkaitan Program Prioritas Nasional-Provinsi-Daerah

Pembangunan nasional yang efektif dan berkelanjutan menuntut keterpaduan antara program prioritas di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Keterkaitan ini menjadi kunci dalam memastikan bahwa arah kebijakan nasional tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga adaptif terhadap kebutuhan dan potensi lokal. Program prioritas nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025–2029 merupakan penjabaran dari visi Asta Cita Presiden dan agenda besar RPJPN 2025–2045 menuju Indonesia Emas. Program tersebut terdiri atas 17 program prioritas dan 8 Quick Wins yang dirancang untuk menjawab tantangan pembangunan strategis nasional, seperti pengentasan kemiskinan, reformasi birokrasi, ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Untuk menjamin implementasi di tingkat wilayah, pemerintah provinsi menyelaraskan program prioritas nasional dalam kerangka pembangunan daerah yang berbasis karakteristik dan keunggulan lokal. Contohnya, Provinsi Kalimantan Tengah menerjemahkan program nasional ke dalam enam pilar pembangunan daerah seperti Kalteng Bermartabat dan Betang Maju, yang memuat kegiatan konkret seperti pembangunan jalan desa, listrik desa, pengembangan ekonomi eksklusif, dan peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya, keterkaitan program prioritas nasional dan provinsi dioperasionalisasikan oleh kabupaten/kota, seperti yang tercermin dalam RPJMD Kabupaten Seruyan 2025–2029. Kabupaten ini menyusun program prioritas daerah yang mendukung pencapaian target nasional dan provinsi, antara lain melalui: penyediaan beasiswa pendidikan tinggi dan wajib belajar 12 tahun (mendukung penguatan SDM nasional), transformasi digital dalam tata kelola keuangan (sejalan dengan reformasi birokrasi nasional), pembangunan dan penguatan UMKM (sinkron dengan agenda ekonomi kerakyatan nasional), serta pengembangan infrastruktur dasar, listrik, internet, dan air bersih (menopang konektivitas dan kesejahteraan).

Sinergi ini diperkuat melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran terpadu, baik melalui forum Musrenbang maupun penyelarasan RPJMN–RPJMD–RKPD. Di samping itu, sistem monitoring dan evaluasi berbasis kinerja menjadi instrumen utama dalam mengukur konsistensi dan efektivitas keterkaitan lintas level pemerintahan. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari harmonisasi vertikal antara pusat dan daerah, yang tercermin melalui keterpaduan program prioritas dan keselarasan pelaksanaan antarlevel pemerintahan.

Tabel 3. 11 Sinkronisasi Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Kalimantan Tengah dan Program Prioritas (Janji Politik) Bupati Seruyan

Prioritas Nasional	Pilar & Program Prioritas Provinsi Kalimantan Tengah	Program Prioritas (Janji Politik) Bupati Seruyan
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Batang Cerdas – Sekolah/Kuliah Gratis, Satu Keluarga Sarjana, Kalteng Mengaji	1500 Beasiswa D3–S3, 1000 STDB, Wajib Belajar 12 Tahun
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.	Batang Harmoni – Rp150 M Bantuan Provinsi, Rp250 Juta Stimulus Desa	Transformasi tata kelola keuangan daerah
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agroindustri industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Batang Makmur – Inkubasi UMKM, 250 M Muda Baru, Milenial Job Center	Pemberdayaan UMKM
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Batang Makmur – Asuransi Petani dan Nelayan	Bantuan bibit, pupuk, alat & mesin
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.	Batang Cerdas – Insentif Guru Agama, Kalteng Mengaji	Peningkatan sarpras keagamaan semua agama
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Batang Harmoni – Insentif Kepala Desa, RT/RW; Batang Cerdas – Insentif Guru Agama	Kesejahteraan PNS, Honorer, Guru Keagamaan

Prioritas Nasional	Pilar & Program Prioritas Provinsi Kalimantan Tengah	Program Prioritas (Janji Politik) Bupati Seruyan
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Batang Cerdas – 1.000 Rumah Guru, Sekolah Gratis	Sarpras sekolah umum, madrasah, pesantren
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agroindustri industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Kalteng Bermartabat – Infrastruktur Jalan & Jembatan; Batang Maju – Jalan Desa, 1 Desa 1 Ambulans, Listrik & Internet	Pelayanan dasar, infrastruktur, transportasi, pemerintahan desa
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.	Batang Makmur – Inkubasi UMKM, Ekonomi Eksklusif	Kapasitas ekonomi (BUMD, PT pertanian, BUMDes)
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agroindustri industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.		Keberlanjutan Islamic Center dan Pelabuhan Sigintung
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agroindustri industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Batang Maju – 100% Listrik, Akses Internet, Air Bersih Desa	Peningkatan listrik, internet, air bersih

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029

Tabel 3.12. Dukungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Terhadap Proyek Strategis Nasional

ASTA CITA / PRIORITAS NASIONAL		PROGRAM PRIORITAS		PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT		PROYEK STRATEGIS NASIONAL	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
PN 1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).	PP 16	Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendanaan, dan Perawatan Rumah Ibadah			Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila	Meningkatnya Kesadaran/Pemahaman Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
							Meningkatnya Etika dan Budaya Politik	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
							Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang Diselesaikan	8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
							Meningkatnya kualitas layanan dan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
							Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publikasi Pemerintahan Daerah	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
PN 2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	PP 1	Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air	PHTC 3	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional	Ketahanan Pangan Melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
							Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
							Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
							Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
							Meningkatnya produksi perikanan tangkap	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
							Meningkatnya pengawasan sumber daya perikanan	3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	
							Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

ASTA CITA / PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	PERTANIAN	
				Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
				Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
				Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
PN 3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 9 Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif	PHTC 6 Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara			Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
PN 3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PP 13 Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersantitas Baik untuk Masyarakat Perdesaan/Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan	PHTC 7 Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersantitas baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Pembangunan 3 Juta Rumah		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
PN 3	Melanjutkan pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-Kota Inovatif-Karakteristik-Mandiri Lainnya	PP 14		Percepatan pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
PN 3						Dinas/Badan yang menangani Bidang

ASTA CITA / PRIORITAS NASIONAL		PROGRAM PRIORITAS		PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT		PROYEK STRATEGIS NASIONAL	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
								DESA	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
							Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
							Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut / Sungai	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
							Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kebudayaan	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
							Meningkatnya Daya Tarik Destrinasi Pariwisata	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
							Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
PN 4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PP 7	Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat	PHTC 2	Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten	Jaminan Kesehatan Nasional	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
						Program Penuntasan TB	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
						Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
							Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
							Meningkatnya Mutu Dan Distribusi Tenaga Kesehatan	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
		PP 8	Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi	PHTC 4	Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi	Sekolah Rakyat	Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
							Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
						Pembangunan dan revitalisasi Pendidikan dasar dan menengah	Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
							Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar	2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang

ASTA CITA / PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Nasional Perpustakaan		Perpustakaan
	PP 10 Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas	PHTC 1 Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil	Makan Bergizi Gratis (MBG)	Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
				Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
				Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
				Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
				Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
	PP 17 Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga			Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
				Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
				Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
				Meningkatnya kualitas dan efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
				Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan tindak Kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
				Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran serta masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	

ASTA CITA / PRIORITAS NASIONAL		PROGRAM PRIORITAS		PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT		PROYEK STRATEGIS NASIONAL	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
PN 5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP 15	Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam (SDA), termasuk Sumber Daya Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas-Luasnya dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi	PHTC 3	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional	Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
							Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
							Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
							Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
							Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
		PP 12	Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani			Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
							Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Terhadap Banjir dan Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Irigrasi	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
							Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Sistem Penyediaan Air Minum	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
							Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
							Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
PN 6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.	PP 5	Pemberantasan Kemiskinan	PHTC 5	Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut	Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Meningkatnya pemberdayaan sosial	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
							Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
							Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
							Meningkatkan perlindungan sosial korban bencana	1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
							Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
							Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

ASTA CITA / PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Terhadap Banjir dan Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Irigrasi Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan terkena relokasi akibat program pemerintah Meningkatnya kualitas kawasan permukiman Meningkatnya kualitas kawasan permukiman Meningkatnya penyediaan PSU Permukiman Meningkatnya produksi perikanan tangkap Meningkatnya produksi perikanan budidaya Meningkatnya pengawasan sumber daya perikanan Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja Meningkatnya Produktivitas tenaga kerja Meningkatnya penempatan Tenaga Kerja Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah

ASTA CITA / PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
				Meningkatnya kualitas layanan dan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
				Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Dasar, Kader, Manajerial, dan Fungsional	5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
				Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi
				Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
				Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
				Meningkatnya Kapasitas UMKM Yang Tangguh dan Mandiri	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
				Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
PP 2	Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara	PHTC 8	Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%	Pengendalian Inflasi	Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
					Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	
					Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	
					Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan

ASTA CITA / PRIORITAS NASIONAL		PROGRAM PRIORITAS		PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT		PROYEK STRATEGIS NASIONAL	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
							Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publikasi Pemerintahan Daerah	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
							Meningkatnya pemberdayaan sosial	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
							Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
							Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
							Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
PN 7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	PP 4	Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	PHTC 8	Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%	Kemudahan Perizinan Di Daerah	Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
			PP 6				Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba	Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	
		Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan					8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik	
		Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu				Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publikasi Pemerintahan Daerah	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika	
						Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		
						Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian	
						Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan	
						Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		
		Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						

ASTA CITA / PRIORITAS NASIONAL		PROGRAM PRIORITAS		PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT		PROYEK STRATEGIS NASIONAL	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
							Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
							Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
							Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
							Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
							Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
							Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
							Tercapainya Kolaborasi Integrasi dan Standardisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
PN 8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PP 11	Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup			Pengelolaan Sampah Terpadu	Meningkatnya Layanan Persampahan Regional	1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
							Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
		PP 16	Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendanaan, dan Perawatan Rumah Ibadah				Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
							Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
							Meningkatnya kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
							Meningkatnya Warisan Budaya Yang Dilestarikan	2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
							Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan

ASTA CITA / PRIORITAS NASIONAL		PROGRAM PRIORITAS		PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT		PROYEK STRATEGIS NASIONAL	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis	2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
							Meningkatnya Etika dan Budaya Politik	8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029

**Tabel 3.13. Dukungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Terhadap
Prioritas Gubernur Kalimantan Tengah**

NO	PROGRAM PRIORITAS HUMA BETANG		PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
1	KALTENG BERMARTABAT	1	Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan termasuk menembus keterisolasian daerah pedalaman dan pesisir	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		2	Memperluas sosialisasi diberbagai instansi dan kalangan masyarakat agar menjiwai spirit Belom Bahadat (hidup beradat) dalam berkompetensi diberbagai bidang guna menumbuhkan masyarakat Kalteng yang berdaya saing	8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
				8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
2	BETANG MAJU	1	Pembangunan 1000 Km Jalan Desa	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		2	Revitalisasi Infrastruktur Lintas Kota/Kabupaten		
		3	Pembangunan Delta Kalteng Ekonomi Eksklusif	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
		4	Peningkatan Akses Listrik Desa, 100% Bersinar		
		5	Peningkatan Infrastruktur Air Bersih Desa	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		6	Akses sinyal dan internet daerah pedalaman	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
3	BETANG MAKMUR	1	Rp 2 Juta per KK Bantuan Pangan	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
		2	Operasi Pasar Murah	3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
				2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
		3	250 Miliarder Muda Baru	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
				2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
		4	Milenial Job Center	2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
				2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
				3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
		5	Inkubasi UMKM	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

NO	PROGRAM PRIORITAS HUMA BETANG	PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	6	Asuransi Petani dan Nelayan	2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
			3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
			3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
			3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
			3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
	7	Bantuan Perahu dan Alat Tangkap	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
4	BETANG CERDAS	1 Sekolah/Kuliah gratis	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
		2 1000 rumah guru	
		3 Satu keluarga harus ada sarjana	4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		4 Insentif guru agama	
		5 Kalteng mengaji	
5	BETANG SEHAT	1 Berobat gratis berbasis KTP	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		2 Insentif tenaga kesehatan desa	
		3 Revitalisasi puskesmas desa	
		4 Pendampingan ibu hamil dan pasca hamil	
		5 1 Desa 1 Ambulans	
6	BETANG HARMONI	1 Berdayakan 100 Dewi (Desa Wisata)	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
			3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
			3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
		2 Rp 150 Miliar bantuan Provinsi untuk Kabupaten/Kota	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		3 Rp 250 Juta Stimulus Desa	
		4 Insentif Kepala Desa, BPD, Damang, Mantir, RT/RW se-Kalteng	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
		5 Layanan cepat tanggap kebakaran lahan dan bantuan warga	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
			1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029

Tabel 3. 14. Program Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Program Prioritas Bupati (Janji Politik)

NO	PROGRAM PRIORITAS BUPATI (JANJI POLITIK)	PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	1500 Beasiswa Pendidikan Tinggi D3/D4/S1/S2/S3, dan Wajib Belajar 12 tahun.	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
		4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	1000 (Surat Tandar Daftar Budidaya) STDB	3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
		3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
2	Transformasi tata kelola (digitalisasi) keuangan daerah.	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
		5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
		5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
		5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
3	Pemberdayaan UMKM pada berbagai sektor.	2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
		2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
		2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
		2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
		2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
		3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
		3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
		3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
		3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
		3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
		3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
		3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
		3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
		2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal

NO	PROGRAM PRIORITAS BUPATI (JANJI POLITIK)	PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
4	Bantuan bibit unggul, pupuk, alat dan mesin.	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
		3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
		3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
5	Peningkatkan sarana dan prasarana bidang keagamaan secara menyeluruh (semua agama).	1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
6	Peningkatan kesejahteraan PNS, Pegawai Honorer, Unsur Pemerintahan dan Guru Keagamaan.	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
		5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
		5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
7	Peningkatan sarana prasarana sekolah umum, madrasah, pondok pesantren, sekolah minggu, dan sekolah keagamaan lainnya.	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
		4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
		1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
8	Peningkatan pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas/transportasi, pelayanan umum, penyelenggaraan pemerintahan desa.	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
		1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
		1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
		1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
		1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
		1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
		1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
		1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
		1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
		1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
		1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
		1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	

NO	PROGRAM PRIORITAS BUPATI (JANJI POLITIK)	PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
		2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPI	
		2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
		2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
		5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
		2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
		2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
		2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
		2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
		2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
9	Pembangunan dan peningkatan kapasitas perekonomian pada berbagai sektor utama, termasuk pendirian BUMD, Pendirian Perseroan Terbatas bidang Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan, serta pengembangan BUMDES.	2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
		2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
		2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
		2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
		2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
		3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
		3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
		3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
		3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
		3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
		3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
		3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	

NO	PROGRAM PRIORITAS BUPATI (JANJI POLITIK)	PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	
		2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
		4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
10	Keberlanjutan Islamic Center dan Pelabuhan Sigintung.	1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	
		1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
		2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
11	Peningkatan Jaringan Listrik, Telekomunikasi, Internet, dan Air Bersih untuk Semua.	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
		2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
		1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029



BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH



**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025-2029**

BAB IV: PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perangkat daerah Kabupaten Seruyan memiliki peran yang sangat penting dalam menyusun dan melaksanakan program kerja yang efektif, efisien, serta tepat sasaran. Setiap program yang dirancang harus sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah serta memperhatikan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Pembahasan program perangkat daerah ini bertujuan untuk mengkaji, mengevaluasi, dan menyelaraskan rencana kerja masing-masing perangkat daerah agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta potensi daerah. Tampilan program tersebut mencakup nilai target indikator dan pagu indikatif dalam periode 5 tahun mendatang.

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan bidang urusannya yang dijabarkan setiap tahun ke dalam RKPD, sehingga setiap Perangkat Daerah sesuai dengan bidang urusannya bertanggung jawab melaksanakan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan yang selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. Mekanisme ini memastikan keterpaduan antara perencanaan jangka menengah (RPJMD) dengan perencanaan tahunan (RKPD) serta mendukung pencapaian target kinerja daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Tabel 4. 1 Pagu Indikatif Per Bidang Urusan RPJMD Kabupaten Seruyan

NO	BIDANG URUSAN	PAGU INDIKATIF (Rp)				
		2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	314.777.547.798	318.262.557.085	333.989.693.773	350.503.187.296	367.978.337.377
2	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	257.706.820.224	260.645.358.535	273.484.963.713	286.966.549.149	301.233.229.213
3	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	115.683.920.417	116.190.711.632	121.914.361.848	127.924.194.575	134.284.007.459
4	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	7.536.241.894	7.623.671.954	7.993.967.579	8.328.618.986	8.702.351.627
5	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	23.870.782.442	24.133.650.564	25.273.233.257	26.469.795.084	27.736.038.202
6	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	5.783.347.586	5.848.150.473	6.136.235.185	6.438.724.133	6.758.828.401
7	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	6.796.069.447	6.886.982.487	7.175.576.094	7.525.791.927	7.895.929.046
8	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	9.556.392.932	9.869.066.873	10.125.150.797	10.745.788.916	11.407.569.644
9	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	13.857.655.689	14.745.626.968	14.094.726.283	15.176.850.264	15.919.021.554
10	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	339.471.200	339.971.200	361.971.200	439.230.200	501.395.400
11	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	10.742.090.929	10.821.597.194	11.359.604.073	11.924.511.296	12.522.315.661
12	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.744.681.753	6.820.353.836	7.156.330.087	7.509.105.151	7.882.423.926
13	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5.384.039.485	5.444.295.998	5.712.486.505	5.994.086.539	6.292.085.435
14	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.310.000.000	2.130.000.000	2.465.000.000	2.465.000.000	2.460.000.000
15	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	10.429.707.234	10.517.411.405	11.035.507.759	11.579.508.930	12.155.189.788
16	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.066.664.421	8.152.099.172	8.494.488.683	8.921.577.769	9.373.538.214
17	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5.412.967.702	5.475.211.269	5.753.545.332	6.045.796.099	6.278.565.971
18	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5.845.354.748	5.910.706.156	6.201.872.413	6.507.596.982	6.831.125.297

NO	BIDANG URUSAN	PAGU INDIKATIF (Rp)				
		2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	8.894.024.726	8.894.024.726	9.165.026.543	9.514.743.613	9.865.620.109
20	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	50.000.000	50.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000
21	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	50.000.000	55.000.000	89.362.000	89.362.000	89.362.000
22	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	359.553.230	386.783.626	539.553.230	611.829.980	706.082.680
23	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	7.346.452.091	7.307.483.348	7.547.639.579	7.950.209.211	8.374.602.848
24	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	410.472.200	535.504.200	681.700.000	684.800.000	689.700.000
25	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	10.483.208.549	10.599.578.019	11.121.721.968	11.669.973.115	12.250.151.443
26	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	633.560.825	715.252.013	783.894.764	878.935.825	980.950.825
27	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.909.904.600	3.220.238.000	4.756.152.000	4.603.292.000	4.844.500.000
28	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	60.560.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
29	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	95.000.000
30	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	156.500.000
31	3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	78.665.000	64.640.900	118.489.990	127.838.989	138.205.814
32	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	39.018.414.494	39.422.263.397	41.364.236.582	43.403.308.427	45.561.124.789
33	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	39.173.258.595	39.579.146.731	41.528.848.119	43.576.034.577	45.742.438.102
34	5.01 - PERENCANAAN	8.832.658.270	9.338.638.605	9.722.953.278	10.175.983.683	10.668.016.685
35	5.02 - KEUANGAN	262.282.627.707	265.253.555.681	278.320.164.449	292.040.103.654	306.559.017.921
36	5.03 - KEPEGAWAIAN	7.857.330.689	7.927.156.285	8.376.418.292	8.752.295.979	9.257.392.133
37	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	100.000.000	113.188.020	60.000.000	100.000.000	35.000.000
38	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	200.000.000	290.000.000	380.000.000	425.000.000	460.000.000
39	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH	22.836.384.503	23.087.444.671	24.224.751.223	25.418.923.103	26.682.637.095
40	7.01 - KECAMATAN	49.448.808.624	49.997.947.981	52.460.888.106	55.046.975.237	57.783.662.097
41	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	9.744.236.354	9.825.940.888	10.309.974.835	10.818.210.479	11.356.043.018
	JUMLAH	1.282.788.876.358	1.296.756.209.892	1.360.635.489.538	1.427.708.733.167	1.498.687.959.773

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029

Tabel 4. 2 Program Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					314.777.547.798,00		318.262.557.084,51		333.989.693.772,91		350.503.187.295,89		367.978.337.376,73	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					222.662.755.904,75		223.258.557.084,51		223.642.693.772,91		224.164.187.295,89		225.335.787.376,73	
Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	84.68	100	100	222.662.755.904,75	100	223.258.557.084,51	100	223.642.693.772,91	100	224.164.187.295,89	100	225.335.787.376,73	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					89.834.791.893,25		92.694.000.000,00		107.697.000.000,00		123.419.000.000,00		139.492.550.000,00	
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	84.68	87.65	90.62	89.834.791.893,25	93.17	92.694.000.000,00	95.72	107.697.000.000,00	98.27	123.419.000.000,00	100	139.492.550.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar (%)	98.38	99.00	99.55		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	7.85	8.61	9.37		10.14		10.90		11.66		12.42		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B (%)	62.42	70.98	81.49		95.50		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV (%)	70.24	60.87	61.62		62.37		63.12		63.87		64.62		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Iklim Inklusivitas SD (Nilai)	55.77	58.27	60.77		63.27		65.77		68.27		70.77		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Iklim Keamanan SD (Nilai)	71.53	72.43	73.33		74.23		75.13		76.03		76.93		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Iklim Kebhinekaan SD (Nilai)	69.19	70.19	71.19		72.19		73.19		74.19		75.19		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	60.63	63.13-65.63	65.63-68.13		68.13-70.63		70.63-73.13		73.13-75.63		75.63-77.13		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	54.24	57.14	60.04		62.94		65.84		68.74		71.64		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	69.17	70.27	71.37		72.47		73.57		74.67		75.77		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	61.93	63.43	64.93		66.43		67.93		69.43		70.93		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Iklim Inklusivitas SMP (Nilai)	55.92	58.32	60.72		63.12		65.52		67.92		70.32		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Iklim Keamanan SMP (Nilai)	68.44	69.94	71.44		72.94		74.44		75.94		77.44		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Iklim Kebinekaan SMP (Nilai)	69.34	70.34	71.34		72.34		73.34		74.34		75.34		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					1.100.000.000,00		1.100.000.000,00		1.100.000.000,00		1.100.000.000,00		1.100.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	80	100	100	1.100.000.000,00	100	1.100.000.000,00	100	1.100.000.000,00	100	1.100.000.000,00	100	1.100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					900.000.000,00		900.000.000,00		1.100.000.000,00		1.250.000.000,00		1.400.000.000,00	
Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	40	60	70	900.000.000,00	80	900.000.000,00	90	1.100.000.000,00	100	1.250.000.000,00	100	1.400.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	55	60	70		80		90		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					70.000.000,00		80.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Institusi Pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)	42	56.78	62.45	70.000.000,00	74.75	80.000.000,00	82.35	150.000.000,00	93.56	200.000.000,00	100	200.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					210.000.000,00		230.000.000,00		300.000.000,00		370.000.000,00		450.000.000,00	
Terlestarikannya Bahasa dan Sastra Daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase)	42	54.35	64.84	210.000.000,00	72.82	230.000.000,00	81.62	300.000.000,00	92.06	370.000.000,00	100	450.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					257.706.820.224,00		260.645.358.535,00		273.484.963.713,00		286.966.549.149,00		301.233.229.213,00	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					184.151.344.434,00		200.995.872.297,60		207.223.725.351,86		213.512.148.295,75		219.848.032.681,02	
Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administarsi perkantoran (%)	100	100	100	106.026.992.383,00	100	108.839.915.730,60	100	111.404.938.350,86	100	114.078.242.371,75	100	116.658.876.757,02	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	78.124.352.051,00	100	92.155.956.567,00	100	95.818.787.001,00	100	99.433.905.924,00	100	103.189.155.924,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan (RSUD)
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					72.170.083.756,00		58.125.555.000,00		64.584.914.000,00		71.610.444.056,00		79.356.844.055,00	
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	126.16	123	120	56.695.553.756,00	110	55.625.555.000,00	100	61.084.914.000,00	90	66.829.591.025,00	90	73.150.154.140,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	10.51	20	19		17.5		16		15		15		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	126.16	123	120	15.474.530.000,00	110	2.500.000.000,00	100	3.500.000.000,00	90	4.780.853.031,00	90	6.206.689.915,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan (RSUD)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	10.51	20	19		17.5		16		15		15		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan (RSUD)
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					521.690.534,00		573.859.587,40		631.245.546,14		694.370.100,75		763.807.110,83	
Meningkatnya Mutu Dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	100	100	100	521.690.534,00	100	573.859.587,40	100	631.245.546,14	100	694.370.100,75	100	763.807.110,83	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					500.000.000,00		550.000.000,00		605.000.000,00		665.500.000,00		732.050.000,00	
Meningkatnya Kualitas Dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase)	100	100	100	500.000.000,00	100	550.000.000,00	100	605.000.000,00	100	665.500.000,00	100	732.050.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					363.701.500,00		400.071.650,00		440.078.815,00		484.086.696,50		532.495.366,15	
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	100	100	100	363.701.500,00	100	400.071.650,00	100	440.078.815,00	100	484.086.696,50	100	532.495.366,15	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					115.683.920.417,00		116.190.711.632,00		121.914.361.848,00		127.924.194.575,00		134.284.007.459,00	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.681.588.353,00		16.225.329.288,00		16.225.329.288,00		16.225.329.288,00		16.225.329.288,00	
Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	13.681.588.353,00	100	16.225.329.288,00	100	16.225.329.288,00	100	16.225.329.288,00	100	16.225.329.288,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					13.436.072.490,00		13.436.072.490,00		13.436.072.490,00		13.436.072.490,00		13.436.072.490,00	
Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Terhadap Banjir dan Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Irigasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase)	0	0	6	13.436.072.490,00	7	13.436.072.490,00	8	13.436.072.490,00	9	13.436.072.490,00	10	13.436.072.490,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)	54	54.15	54.16		54.17		54.18		54.19		54.20		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					7.320.485.272,00		5.820.485.274,00		5.820.485.274,00		5.820.485.274,00		5.820.485.274,00	
Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota (Persentase)	40.55	100	100	7.320.485.272,00	100	5.820.485.274,00	100	5.820.485.274,00	100	5.820.485.274,00	100	5.820.485.274,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					2.300.000.000,00		2.300.000.000,00		2.300.000.000,00		2.300.000.000,00		2.300.000.000,00	
Meningkatnya Layanan Persampahan Regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	0.87	0.87	0.87	2.300.000.000,00	0.90	2.300.000.000,00	0.95	2.300.000.000,00	1	2.300.000.000,00	1.5	2.300.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					6.550.000.000,00		8.050.000.000,00		8.050.000.000,00		8.050.000.000,00		8.050.000.000,00	
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	70.33	70.50	70.53	6.550.000.000,00	70.55	8.050.000.000,00	70.60	8.050.000.000,00	70.80	8.050.000.000,00	70.80	8.050.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					4.850.000.000,00		4.850.000.000,00		4.850.000.000,00		4.850.000.000,00		4.850.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	70	70	73	4.850.000.000,00	75	4.850.000.000,00	78	4.850.000.000,00	80	4.850.000.000,00	82	4.850.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					11.300.517.699,00		11.300.517.699,00		11.300.517.699,00		11.300.517.699,00		11.300.517.699,00	
Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	61.06	61.06	63	11.300.517.699,00	66	11.300.517.699,00	69	11.300.517.699,00	72	11.300.517.699,00	75	11.300.517.699,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					5.299.999.999,00		5.299.999.999,00		5.299.999.999,00		5.299.999.999,00		5.299.999.999,00	
Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan Yang Tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	61.06	61.06	63	5.299.999.999,00	66	5.299.999.999,00	69	5.299.999.999,00	72	5.299.999.999,00	75	5.299.999.999,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAA N JALAN					45.588.927.204,00		43.551.977.484,00		49.275.627.700,00		55.285.460.427,00		61.645.273.311,00	
Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat yang Nyaman dan Aman	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	37.40	37.40	39.12	45.588.927.204,00	40.84	43.551.977.484,00	42.56	49.275.627.700,00	44.36	55.285.460.427,00	45.25	61.645.273.311,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					1.621.672.000,00		1.621.672.000,00		1.621.672.000,00		1.621.672.000,00		1.621.672.000,00	
Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kontruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	12.50	12.50	30	1.621.672.000,00	47.50	1.621.672.000,00	65	1.621.672.000,00	87.50	1.621.672.000,00	100	1.621.672.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAA N PENATAAN RUANG					3.734.657.400,00		3.734.657.398,00		3.734.657.398,00		3.734.657.398,00		3.734.657.398,00	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten/Kota	0	5	10	3.734.657.400,00	12	3.734.657.398,00	15	3.734.657.398,00	16	3.734.657.398,00	20	3.734.657.398,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	(%)													
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					7.536.241.894,00		7.623.671.954,00		7.993.967.579,00		8.328.618.986,00		8.702.351.627,00	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.500.316.094,00		6.602.816.094,00		6.922.041.779,00		7.014.294.530,00		7.014.294.530,00	
Terpenuhiya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	95	100	100	6.500.316.094,00	100	6.602.816.094,00	100	6.922.041.779,00	100	7.014.294.530,00	100	7.014.294.530,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					355.667.000,00		340.597.060,00		391.667.000,00		453.667.000,00		513.667.000,00	
Terpenuhiya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	90	100	100	355.667.000,00	100	340.597.060,00	100	391.667.000,00	100	453.667.000,00	100	513.667.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					396.932.000,00		396.932.000,00		396.932.000,00		557.330.656,00		656.932.000,00	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	85	100	100	396.932.000,00	100	396.932.000,00	100	396.932.000,00	100	557.330.656,00	100	656.932.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					137.000.000,00		137.000.000,00		137.000.000,00		157.000.000,00		327.000.000,00	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	85	100	100	137.000.000,00	100	137.000.000,00	100	137.000.000,00	100	157.000.000,00	100	327.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					146.326.800,00		146.326.800,00		146.326.800,00		146.326.800,00		190.458.097,00	
Meningkatnya penyediaan PSU Permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	80	100	100	146.326.800,00	100	146.326.800,00	100	146.326.800,00	100	146.326.800,00	100	190.458.097,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					23.870.782.442,00		24.133.650.564,00		25.273.233.257,00		26.469.795.084,00		27.736.038.202,00	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					21.728.235.442,00		23.037.504.085,00		23.920.675.944,00		24.249.852.087,00		24.806.923.839,00	
Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	10.327.907.500,00	100	10.443.712.120,00	100	10.921.642.785,00	100	11.093.048.442,00	100	11.493.048.442,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Ketenteraman dan Ketertiban Umum)
Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	92.5	100	100	5.301.756.513,00	100	5.355.825.937,00	100	5.514.781.357,00	100	5.603.184.548,00	100	5.710.256.300,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Penanggulangan Bencana)
Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administarsi perkantoran (%)	100	100	100	6.098.571.429,00	100	7.237.966.028,00	100	7.484.251.802,00	100	7.553.619.097,00	100	7.603.619.097,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Masyarakat (Penyelamatan Kebakaran)
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					258.331.500,00		258.331.500,00		258.331.500,00		588.753.041,00		719.803.942,00	
Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100	100	100	85.380.000,00	100	85.380.000,00	100	85.380.000,00	100	365.801.541,00	100	346.852.442,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Keterliban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	85	83	85	78.234.000,00	87	78.234.000,00	89	78.234.000,00	91	128.234.000,00	91	278.234.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Keterliban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Perlindungan Terhadap Masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	52.14	54	56	94.717.500,00	58	94.717.500,00	60	94.717.500,00	62	94.717.500,00	62	94.717.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Keterliban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					500.000.000,00		510.000.000,00		640.000.000,00		855.000.000,00		1.069.000.000,00	
Meningkatnya kualitas layanan dan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	0.93	100	100	230.000.000,00	100	210.000.000,00	100	285.000.000,00	100	425.000.000,00	100	615.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Keterliban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pascabencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	0	100	100	95.000.000,00	100	125.000.000,00	100	130.000.000,00	100	180.000.000,00	100	160.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Keterliban Umum Serta Perlindungan Masvarakat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana (%)	100	100	100	175.000.000,00	100	175.000.000,00	100	225.000.000,00	100	250.000.000,00	100	294.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					1.384.215.500,00		327.814.979,00		454.225.813,00		776.189.956,00		1.140.310.421,00	
Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	100	100	100	1.121.667.500,00	100	287.438.708,00	100	354.225.813,00	100	636.189.956,00	100	930.310.421,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	100	100	100	262.548.000,00	100	40.376.271,00	100	100.000.000,00	100	140.000.000,00	100	210.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					5.783.347.586,00		5.848.150.473,00		6.136.235.185,00		6.438.724.133,00		6.758.828.401,00	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.214.608.486,00		5.279.411.373,00		5.466.139.775,00		5.620.151.623,00		5.740.255.891,00	
Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	95.77	100	100	5.214.608.486,00	100	5.279.411.373,00	100	5.466.139.775,00	100	5.620.151.623,00	100	5.740.255.891,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					121.715.100,00		121.715.100,00		133.886.610,00		133.886.610,00		183.886.610,00	
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase lembaga di bidang sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial (%)	0	100	100	121.715.100,00	100	121.715.100,00	100	133.886.610,00	100	133.886.610,00	100	183.886.610,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase penyelenggara PUB/UGB yang tertib perizinan pengumpulan sumbangan (%)	42.50	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial		
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					3.823.000,00		3.823.000,00		3.823.000,00		4.205.300,00		4.205.300,00	
Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani (%)	100	100	100	3.823.000,00	100	3.823.000,00	100	3.823.000,00	100	4.205.300,00	100	4.205.300,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					145.673.500,00		145.673.500,00		171.127.500,00		221.240.850,00		271.240.850,00	
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	95	100	100	145.673.500,00	100	145.673.500,00	100	171.127.500,00	100	221.240.850,00	100	271.240.850,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	95	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial		
	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	95	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial		
	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	95	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial		
	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	60.71	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial		
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					150.000.000,00		150.000.000,00		165.200.000,00		229.833.000,00		279.833.000,00	
Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	88.63	100	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	165.200.000,00	100	229.833.000,00	100	279.833.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (Persentase)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin (%)	0	70	70		70		70		70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial		
	Persentase keluarga miskin dan rnetan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan (%)	0	1	1.5		2		2.5		3		3		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					119.242.500,00		119.242.500,00		164.944.800,00		198.293.250,00		248.293.250,00	
Meningkatkan perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	100	100	100	119.242.500,00	100	119.242.500,00	100	164.944.800,00	100	198.293.250,00	100	248.293.250,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial (%)	0	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial		
	Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya (%)	0	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial		
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					28.285.000,00		28.285.000,00		31.113.500,00		31.113.500,00		31.113.500,00	
Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola dengan baik (%)	77.78	100	100	28.285.000,00	100	28.285.000,00	100	31.113.500,00	100	31.113.500,00	100	31.113.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					6.796.069.447,00		6.886.982.487,00		7.175.576.094,00		7.525.791.927,00		7.895.929.046,00	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.401.458.447,00		6.471.935.996,00		6.659.610.622,00		6.940.243.334,00		7.224.776.805,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	6.401.458.447,00	100	6.471.935.996,00	100	6.659.610.622,00	100	6.940.243.334,00	100	7.224.776.805,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					5.000.000,00		5.500.000,00		6.050.000,00		6.655.000,00		6.655.000,00	
Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	100	100	100	5.000.000,00	100	5.500.000,00	100	6.050.000,00	100	6.655.000,00	100	6.655.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					264.000.000,00		277.783.191,00		323.800.000,00		374.166.573,00		443.979.000,00	
Meningkatnya Produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	70	70	73	264.000.000,00	75	277.783.191,00	78	323.800.000,00	80	374.166.573,00	83	443.979.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					22.315.000,00		23.646.500,00		26.011.150,00		28.612.265,00		29.701.265,00	
Meningkatnya penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	50	50	52	22.315.000,00	55	23.646.500,00	57	26.011.150,00	60	28.612.265,00	60	29.701.265,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					103.296.000,00		108.116.800,00		160.104.322,00		176.114.755,00		190.816.976,00	
Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	41.030	39.23 2	39.232	103.296.000,00	39.232	108.116.800,00	39.232	160.104.322,00	39.232	176.114.755,00	39.232	190.816.976,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					9.556.392.932,00		9.869.066.873,00		10.125.150.797,00		10.745.788.916,00		11.407.569.644,00	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.586.392.932,00		9.024.066.873,00		9.110.150.797,00		9.785.788.916,00		10.477.569.644,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	8.586.392.932,00	100	9.024.066.873,00	100	9.110.150.797,00	100	9.785.788.916,00	100	10.477.569.644,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					575.000.000,00		455.000.000,00		480.000.000,00		480.000.000,00		480.000.000,00	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	1.00	1.00	1.2	575.000.000,00	1.4	455.000.000,00	1.60	480.000.000,00	1.80	480.000.000,00	2.00	480.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	48.06	50.60	51.80		52.75		53.40		54.50		54.80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					75.000.000,00		75.000.000,00		120.000.000,00		100.000.000,00		60.000.000,00	
Menurunnya kekerasan terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	100	120.000.000,00	100	100.000.000,00	100	60.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					60.000.000,00		60.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	10	20	30	60.000.000,00	40	60.000.000,00	60	100.000.000,00	80	100.000.000,00	100	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan (%)	100	100	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					140.000.000,00		140.000.000,00		180.000.000,00		155.000.000,00		165.000.000,00	
Terjaminnya Pemeuhan Hak Anak secara Komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	51.22	51.53	51.80	140.000.000,00	60	140.000.000,00	61	180.000.000,00	61.25	155.000.000,00	61.50	165.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					95.000.000,00		90.000.000,00		110.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan tindak Kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	79.82	79.85	79.91	95.000.000,00	79.93	90.000.000,00	79.96	110.000.000,00	79.98	100.000.000,00	80.10	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					13.857.655.689,00		14.745.626.968,00		14.094.726.283,00		15.176.850.264,00		15.919.021.554,00	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.469.655.689,00		13.616.326.968,00		13.007.726.283,00		14.018.255.455,00		14.541.121.554,00	
Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	12.469.655.689,00	100	13.616.326.968,00	100	13.007.726.283,00	100	14.018.255.455,00	100	14.541.121.554,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					77.000.000,00		130.000.000,00		100.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00	
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	100	100	100	77.000.000,00	100	130.000.000,00	100	100.000.000,00	100	130.000.000,00	100	130.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					851.400.000,00		619.300.000,00		598.300.000,00		721.400.000,00		813.300.000,00	
Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	81.10	88.5	90.8	851.400.000,00	93.1	619.300.000,00	95.4	598.300.000,00	97.7	721.400.000,00	100	813.300.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					79.600.000,00		175.000.000,00		148.000.000,00		147.194.809,00		128.000.000,00	
Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	60	100	100	79.600.000,00	100	175.000.000,00	100	148.000.000,00	100	147.194.809,00	100	128.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					380.000.000,00		205.000.000,00		240.700.000,00		160.000.000,00		306.600.000,00	
Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	60	100	100	380.000.000,00	100	205.000.000,00	100	240.700.000,00	100	160.000.000,00	100	306.600.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					339.471.200,00		339.971.200,00		361.971.200,00		439.230.200,00		501.395.400,00	
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENKGETA TANAH GARAPAN					45.750.000,00		45.750.000,00		45.750.000,00		72.009.000,00		72.009.000,00	
Meningkatnya penyelesaian sengkata tanah garapan	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase)	85	85	85	45.750.000,00	85	45.750.000,00	85	45.750.000,00	85	72.009.000,00	85	72.009.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					19.050.000,00		19.050.000,00		28.050.000,00		33.050.000,00		33.050.000,00	
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	85	85	85	19.050.000,00	85	19.050.000,00	85	28.050.000,00	85	33.050.000,00	85	33.050.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					245.506.000,00		246.006.000,00		259.006.000,00		302.006.000,00		335.006.000,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee (%)	85	85	85	245.506.000,00	85	246.006.000,00	85	259.006.000,00	85	302.006.000,00	85	335.006.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					29.165.200,00		29.165.200,00		29.165.200,00		32.165.200,00		61.330.400,00	
Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah (Persentase)	85	100	100	29.165.200,00	100	29.165.200,00	100	29.165.200,00	100	32.165.200,00	100	61.330.400,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					10.742.090.929,00		10.821.597.194,00		11.359.604.073,00		11.924.511.296,00		12.522.315.661,00	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.217.354.382,00		4.382.318.126,00		4.823.145.546,00		5.388.052.769,00		5.800.654.764,00	
Terpenuhiya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	4.217.354.382,00	100	4.382.318.126,00	100	4.823.145.546,00	100	5.388.052.769,00	100	5.800.654.764,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					9.790.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		130.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan Untuk Memitigasi Dampak KRP	Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	100	100	100	9.790.000,00	100	50.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	130.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					170.893.547,00		260.000.000,00		260.000.000,00		260.000.000,00		320.000.000,00	
Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	51.67	79.32	79.52	170.893.547,00	79.72	260.000.000,00	79.92	260.000.000,00	80.12	260.000.000,00	80.20	320.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	93.05	79.90	80.10		80.30		80.50		80.70		80.90		
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					54.681.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		95.769.488,00	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	80	80	80	54.681.000,00	80	55.000.000,00	80	55.000.000,00	80	55.000.000,00	80	95.769.488,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					35.085.000,00		35.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		80.000.000,00	
Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	80	80	80	35.085.000,00	80	35.000.000,00	80	55.000.000,00	80	55.000.000,00	80	80.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					79.990.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	30	30	30	79.990.000,00	30	80.000.000,00	30	90.000.000,00	30	90.000.000,00	30	90.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					51.793.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00	
Meningkatnya Kapasitas MHA dan Kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	100	100	100	51.793.000,00	100	100.000.000,00	100	110.000.000,00	100	110.000.000,00	100	110.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					58.890.000,00		60.000.000,00		67.179.459,00		67.179.459,00		67.687.218,00	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	100	100	100	58.890.000,00	100	60.000.000,00	100	67.179.459,00	100	67.179.459,00	100	67.687.218,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					41.042.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	100	100	100	41.042.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					48.180.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	100	100	100	48.180.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					5.974.392.000,00		5.699.279.068,00		5.699.279.068,00		5.699.279.068,00		5.728.204.191,00	
Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	50	50	50	5.974.392.000,00	50	5.699.279.068,00	50	5.699.279.068,00	50	5.699.279.068,00	50	5.728.204.191,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					6.744.681.753,00		6.820.353.836,00		7.156.330.087,00		7.509.105.151,00		7.882.423.926,00	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.238.854.753,00		6.438.854.836,00		6.686.691.087,00		7.059.296.151,00		7.365.793.926,00	
Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	6.238.854.753,00	100	6.438.854.836,00	100	6.686.691.087,00	100	7.059.296.151,00	100	7.365.793.926,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					238.981.000,00		186.350.000,00		226.350.000,00		186.350.000,00		211.100.000,00	
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Perekaman KTP elektronik (%)	98.76	98.97	97.78	238.981.000,00	97.78	186.350.000,00	97.78	226.350.000,00	97.79	186.350.000,00	97.79	211.100.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	52.53	53.34	60.73		60.73		60.73		60.74		60.74		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	0	0	10		10		10		10		10		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					115.896.000,00		87.580.000,00		107.580.000,00		135.250.000,00		120.500.000,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Kepemilikan akta kelahiran (%)	96.12	96.92	0	115.896.000,00	0	87.580.000,00	0	107.580.000,00	0	135.250.000,00	0	120.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					86.418.000,00		73.209.000,00		73.209.000,00		73.209.000,00		112.530.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (%)	19.51	24.39	34.48	86.418.000,00	41.38	73.209.000,00	48.28	73.209.000,00	55.17	73.209.000,00	62.07	112.530.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sioil

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (Persentase)	0	0	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase penyajian data kependudukan yang disediakan (%)	0	0	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					64.532.000,00		34.360.000,00		62.500.000,00		55.000.000,00		72.500.000,00	
Menigkatnya kualitas profil kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan (Indeks)	94.85	94.85	94.82	64.532.000,00	94.83	34.360.000,00	94.84	62.500.000,00	94.85	55.000.000,00	94.86	72.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	0	0	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					5.384.039.485,00		5.444.295.998,00		5.712.486.505,00		5.994.086.539,00		6.292.085.435,00	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.694.039.485,00		4.904.339.584,00		5.161.888.557,00		5.353.488.591,00		5.518.298.828,00	
Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya pelayanan penunjang urusan Pemerintah Daerah (%)	90	90	90	4.694.039.485,00	90	4.904.339.584,00	90	5.161.888.557,00	90	5.353.488.591,00	90	5.518.298.828,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					120.000.000,00		120.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		200.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa (Persentase)	13.40	13.40	13.40	120.000.000,00	13.40	120.000.000,00	13.40	80.000.000,00	13.40	80.000.000,00	13.40	200.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					90.000.000,00		79.956.414,00		65.000.000,00		95.000.000,00		108.188.659,00	
Meningkatnya efektivitas kerjasama desa	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa (Persentase)	10	10	10	90.000.000,00	10	79.956.414,00	10	65.000.000,00	10	95.000.000,00	10	108.188.659,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					270.000.000,00		180.000.000,00		195.597.948,00		255.597.948,00		255.597.948,00	
Meningkatnya kualiras Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (Persentase)	90	90	90	270.000.000,00	90	180.000.000,00	90	195.597.948,00	90	255.597.948,00	90	255.597.948,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					210.000.000,00		160.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan MHA dalam Pembangunan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	14.58	19.58	19.58	210.000.000,00	19.58	160.000.000,00	19.58	210.000.000,00	19.58	210.000.000,00	19.58	210.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					2.310.000.000,00		2.130.000.000,00		2.465.000.000,00		2.465.000.000,00		2.460.000.000,00	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					450.000.000,00		395.000.000,00		410.000.000,00		400.000.000,00		410.000.000,00	
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	38.90	38.60-	38.30-	450.000.000,00	37.90-	395.000.000,00	37.60-	410.000.000,00	37.30-	400.000.000,00	37-	410.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Berencana
	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) (Jiwa)	2.21	2.21	2.20		2.20		2.20		2.19		2.19		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					1.055.000.000,00		905.000.000,00		1.035.000.000,00		1.020.000.000,00		1.050.000.000,00	
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran serta masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	66.20	6.80	6.80	1.055.000.000,00	6.80	905.000.000,00	6.80	1.035.000.000,00	6.70	1.020.000.000,00	6.70	1.050.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	6.80	6.80	6.80		6.80		6.80		33.5		34		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					805.000.000,00		830.000.000,00		1.020.000.000,00		1.045.000.000,00		1.000.000.000,00	
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	80	85	90	805.000.000,00	95	830.000.000,00	100	1.020.000.000,00	100	1.045.000.000,00	100	1.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					10.429.707.234,00		10.517.411.405,00		11.035.507.759,00		11.579.508.930,00		12.155.189.788,00	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.451.992.781,00		6.751.550.592,00		7.069.604.818,00		7.354.262.555,00		7.654.262.555,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	6.451.992.781,00	100	6.751.550.592,00	100	7.069.604.818,00	100	7.354.262.555,00	100	7.654.262.555,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAA N LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					3.345.786.453,00		3.141.513.813,00		3.172.273.941,00		3.289.803.375,00		3.565.484.233,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	Konektivitas Darat (Persentase)	100	100	100	3.345.786.453,00	100	3.141.513.813,00	100	3.172.273.941,00	100	3.289.803.375,00	100	3.565.484.233,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan		
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					631.928.000,00		624.347.000,00		793.629.000,00		935.443.000,00		935.443.000,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut / Sungai	Konektivitas laut/sungai (%)	100	100	100	631.928.000,00	100	624.347.000,00	100	793.629.000,00	100	935.443.000,00	100	935.443.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					8.066.664.421,00		8.152.099.172,00		8.494.488.683,00		8.921.577.769,00		9.373.538.214,00	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.730.646.321,00		6.859.358.572,00		6.837.368.885,00		6.914.068.629,00		7.339.437.702,00	
Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	6.730.646.321,00	100	6.859.358.572,00	100	6.837.368.885,00	100	6.914.068.629,00	100	7.339.437.702,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					1.076.853.100,00		1.027.288.100,00		1.046.038.100,00		1.046.038.100,00		1.046.038.100,00	
Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publikasi Pemerintahan Daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survei) (%)	-	75	78	1.076.853.100,00	81	1.027.288.100,00	83	1.046.038.100,00	85	1.046.038.100,00	88	1.046.038.100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					259.165.000,00		265.452.500,00		611.081.698,00		961.471.040,00		988.062.412,00	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Infrastruktur Layanan Digital (%)	89	89	74	259.165.000,00	74	265.452.500,00	87	611.081.698,00	87	961.471.040,00	100	988.062.412,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					5.412.967.702,00		5.475.211.269,00		5.753.545.332,00		6.045.796.099,00		6.278.565.971,00	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.307.967.702,00		5.368.821.796,00		5.647.155.859,00		5.939.406.626,00		6.067.176.498,00	
Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	5.307.967.702,00	100	5.368.821.796,00	100	5.647.155.859,00	100	5.939.406.626,00	100	6.067.176.498,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	100	100	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	100	100	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					-		-		-		-		50.000.000,00	
Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	100	50.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Meningkatnya Kapasitas UMKM Yang Tangguh dan Mandiri	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	100	100	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					70.000.000,00		71.389.473,00		71.389.473,00		71.389.473,00		126.389.473,00	
Meningkatnya Daya Saing UMKM	Proporsi UKM Menjalini Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	100	100	100	70.000.000,00	100	71.389.473,00	100	71.389.473,00	100	71.389.473,00	100	126.389.473,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					5.845.354.748,00		5.910.706.156,00		6.201.872.413,00		6.507.596.982,00		6.831.125.297,00	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.432.696.748,00		5.475.398.156,00		5.766.564.413,00		6.072.288.982,00		6.395.817.297,00	
Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	5.432.696.748,00	100	5.475.398.156,00	100	5.766.564.413,00	100	6.072.288.982,00	100	6.395.817.297,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					50.105.000,00		50.105.000,00		50.105.000,00		50.105.000,00		50.105.000,00	
Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	100	100	100	50.105.000,00	100	50.105.000,00	100	50.105.000,00	100	50.105.000,00	100	50.105.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					51.250.000,00		51.250.000,00		51.250.000,00		51.250.000,00		51.250.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	93	94	95	51.250.000,00	96	51.250.000,00	97	51.250.000,00	98	51.250.000,00	98	51.250.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					97.914.000,00		106.639.000,00		106.639.000,00		106.639.000,00		106.639.000,00	
Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	100	100	100	97.914.000,00	100	106.639.000,00	100	106.639.000,00	100	106.639.000,00	100	106.639.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					118.389.000,00		132.314.000,00		132.314.000,00		132.314.000,00		132.314.000,00	
Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	100	100	100	118.389.000,00	100	132.314.000,00	100	132.314.000,00	100	132.314.000,00	100	132.314.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00	
Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100	100	100	95.000.000,00	100	95.000.000,00	100	95.000.000,00	100	95.000.000,00	100	95.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					8.894.024.726,00		8.894.024.726,00		9.165.026.543,00		9.514.743.613,00		9.865.620.109,00	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.014.282.268,00		7.014.282.268,00		7.014.282.268,00		7.014.282.268,00		7.014.282.268,00	
Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administarsi perkantoran (%)	86.48	100	100	7.014.282.268,00	100	7.014.282.268,00	100	7.014.282.268,00	100	7.014.282.268,00	100	7.014.282.268,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					461.684.000,00		461.684.000,00		561.684.000,00		661.684.000,00		742.885.383,00	
Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	-	0.05	0.10	461.684.000,00	0.15	461.684.000,00	0.20	561.684.000,00	0.25	661.684.000,00	0.30	742.885.383,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					1.151.058.458,00		1.151.058.458,00		1.322.060.275,00		1.571.777.345,00		1.841.452.458,00	
Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	-	4.40	4.80	1.151.058.458,00	5.30	1.151.058.458,00	6.00	1.322.060.275,00	6.20	1.571.777.345,00	6.70	1.841.452.458,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					267.000.000,00		267.000.000,00		267.000.000,00		267.000.000,00		267.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	0.44	0.46	0.47	267.000.000,00	0.49	267.000.000,00	0.50	267.000.000,00	0.52	267.000.000,00	0.52	267.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					50.000.000,00		50.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAA N STATISTIK SEKTORAL					50.000.000,00		50.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00	
Tercapainya Kolaborasi Integrasi dan Standardisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	-	2.7	2.9	50.000.000,00	3.0	50.000.000,00	3.2	80.000.000,00	3.4	80.000.000,00	3.5	80.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					50.000.000,00		55.000.000,00		89.362.000,00		89.362.000,00		89.362.000,00	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAA N PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					50.000.000,00		55.000.000,00		89.362.000,00		89.362.000,00		89.362.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	-	8	10	50.000.000,00	15	55.000.000,00	20	89.362.000,00	25	89.362.000,00	30	89.362.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					359.553.230,00		386.783.626,00		539.553.230,00		611.829.980,00		706.082.680,00	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					242.840.230,00		242.840.230,00		422.840.230,00		495.116.980,00		589.369.680,00	
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	-	34.12	34.37	242.840.230,00	34.50	242.840.230,00	34.62	422.840.230,00	34.75	495.116.980,00	35.06	589.369.680,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					53.750.000,00		53.750.000,00		53.750.000,00		53.750.000,00		53.750.000,00	
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kesenian Tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	-	50	60	53.750.000,00	70	53.750.000,00	80	53.750.000,00	90	53.750.000,00	100	53.750.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					42.963.000,00		42.963.000,00		42.963.000,00		42.963.000,00		42.963.000,00	
Meningkatnya Warisan Budaya Yang Dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	38.43	73.53	76.47	42.963.000,00	77.94	42.963.000,00	79.41	42.963.000,00	80.88	42.963.000,00	82.35	42.963.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					20.000.000,00		47.230.396,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Meningkatnya Tata Kelola Museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)	-	0.0	1.03	20.000.000,00	1.29	47.230.396,00	1.39	20.000.000,00	1.46	20.000.000,00	1.49	20.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					7.346.452.091,00		7.307.483.348,00		7.547.639.579,00		7.950.209.211,00		8.374.602.848,00	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.046.452.091,00		6.007.483.348,00		6.247.639.579,00		6.650.209.211,00		7.074.602.848,00	
Terpenuhiya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Perangkat	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	6.046.452.091,00	100	6.007.483.348,00	100	6.247.639.579,00	100	6.650.209.211,00	100	7.074.602.848,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Daerah														
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					1.267.452.000,00		1.252.500.000,00		1.244.500.000,00		1.244.500.000,00		1.244.500.000,00	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Nilai)	40	74.27	75.95	1.267.452.000,00	77.62	1.252.500.000,00	79.3	1.244.500.000,00	80.97	1.244.500.000,00	80.97	1.244.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	47.11	49.29	50.30		51.35		52.40		53.45		54.50		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					32.548.000,00		47.500.000,00		55.500.000,00		55.500.000,00		55.500.000,00	
Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	69.70	71.21	72.73	32.548.000,00	74.24	47.500.000,00	75.76	55.500.000,00	77.27	55.500.000,00	78.79	55.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					410.472.200,00		535.504.200,00		681.700.000,00		684.800.000,00		689.700.000,00	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					245.972.200,00		262.004.200,00		324.700.000,00		335.800.000,00		387.700.000,00	
Meningkatnya Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	75	75	75	245.972.200,00	75.50	262.004.200,00	75.50	324.700.000,00	80	335.800.000,00	80	387.700.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Arsip secara baku (%)	100	75	80		90		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					148.000.000,00		244.500.000,00		330.000.000,00		309.000.000,00		267.000.000,00	
Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (%)	16.67	16.67	16.67	148.000.000,00	16.67	244.500.000,00	16.67	330.000.000,00	16.67	309.000.000,00	16.67	267.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGUNAAN ARSIP					16.500.000,00		29.000.000,00		27.000.000,00		40.000.000,00		35.000.000,00	
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (Persentase)	13.33	13.33	13.33	16.500.000,00	13.33	29.000.000,00	13.33	27.000.000,00	13.33	40.000.000,00	13.33	35.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					10.483.208.549,00		10.599.578.019,00		11.121.721.968,00		11.669.973.115,00		12.250.151.443,00	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.389.122.748,00		9.454.684.019,00		9.937.517.968,00		10.438.973.115,00		10.974.151.443,00	
Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	93.84	100	100	9.389.122.748,00	100	9.454.684.019,00	100	9.937.517.968,00	100	10.438.973.115,00	100	10.974.151.443,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					343.482.501,00		344.000.000,00		356.000.000,00		369.000.000,00		391.000.000,00	
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	20129.81	21134 .31	21716.04	343.482.501,00	22131.26	344.000.000,00	22481.65	356.000.000,00	22777.45	369.000.000,00	23033.04	391.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					308.713.300,00		313.774.000,00		329.774.000,00		348.000.000,00		359.500.000,00	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	18529.33	19973 .23	21039.00	308.713.300,00	23142.89	313.774.000,00	25457.18	329.774.000,00	28002.90	348.000.000,00	30803.19	359.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					200.000.000,00		202.000.000,00		205.000.000,00		209.000.000,00		214.000.000,00	
Meningkatnya pengawasan sumber daya perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (%)	84.21	85	86	200.000.000,00	87	202.000.000,00	88	205.000.000,00	90	209.000.000,00	91	214.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					241.890.000,00		285.120.000,00		293.430.000,00		305.000.000,00		311.500.000,00	
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	54.97	60.25	60.85	241.890.000,00	61.64	285.120.000,00	62.38	293.430.000,00	63.13	305.000.000,00	64.22	311.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					633.560.825,00		715.252.013,00		783.894.764,00		878.935.825,00		980.950.825,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					278.560.825,00		360.252.013,00		428.894.764,00		523.935.825,00		625.950.825,00	
Meningkatnya Daya Tarik Destrinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	-	0.018	0.034	278.560.825,00	0.042	360.252.013,00	0.050	428.894.764,00	0.058	523.935.825,00	0.060	625.950.825,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					255.000.000,00		255.000.000,00		255.000.000,00		255.000.000,00		255.000.000,00	
Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	88.69	100	100	255.000.000,00	100	255.000.000,00	100	255.000.000,00	100	255.000.000,00	100	255.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	-	27.00	35.10	100.000.000,00	45.63	100.000.000,00	59.32	100.000.000,00	77.11	100.000.000,00	80.11	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					3.909.904.600,00		3.220.238.000,00		4.756.152.000,00		4.603.292.000,00		4.844.500.000,00	
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					1.932.214.000,00		1.002.000.000,00		1.470.787.000,00		1.144.614.000,00		1.894.900.000,00	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	70	100	100	1.932.214.000,00	100	1.002.000.000,00	100	1.470.787.000,00	100	1.144.614.000,00	100	1.894.900.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	50	70	70		70		70		70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian		
	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Persentase)	1	1	1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian		
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					920.010.000,00		1.273.998.000,00		1.893.565.000,00		2.274.718.000,00		1.828.700.000,00	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	50	100	150	920.010.000,00	150	1.273.998.000,00	150	1.893.565.000,00	150	2.274.718.000,00	150	1.828.700.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN					210.700.000,00		223.000.000,00		395.000.000,00		253.800.000,00		281.800.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER														
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	1	1	1	210.700.000,00	1	223.000.000,00	1	395.000.000,00	1	253.800.000,00	1	281.800.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					268.680.600,00		231.960.000,00		383.500.000,00		333.860.000,00		360.500.000,00	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	100	100	100	268.680.600,00	100	231.960.000,00	100	383.500.000,00	100	333.860.000,00	100	360.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian		
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					115.000.000,00		129.280.000,00		194.800.000,00		118.700.000,00		129.500.000,00	
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	100	100	100	115.000.000,00	100	129.280.000,00	100	194.800.000,00	100	118.700.000,00	100	129.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					463.300.000,00		360.000.000,00		418.500.000,00		477.600.000,00		349.100.000,00	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	100	100	100	463.300.000,00	100	360.000.000,00	100	418.500.000,00	100	477.600.000,00	100	349.100.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian		
3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					60.560.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.28.04 - PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					60.560.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Indeks Keanekaragaman Hayati (%)	80	80	80	60.560.000,00	80	100.000.000,00	80	100.000.000,00	80	100.000.000,00	80	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kehutanan
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		95.000.000,00	
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang Yang Efisien, Merata dan Terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	100	100	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		60.000.000,00	
Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	100	100	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	60.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	-	-	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		156.500.000,00	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		156.500.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	100	100	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	156.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					78.665.000,00		64.640.900,00		118.489.990,00		127.838.989,00		138.205.814,00	
3.32.02 - PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI					25.750.000,00		25.000.000,00		30.500.000,00		31.050.000,00		37.237.485,00	
Meningkatnya Pelaksanaan Transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan (Persentase)	0	0	46	25.750.000,00	47	25.000.000,00	48	30.500.000,00	49	31.050.000,00	50	37.237.485,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					39.815.000,00		26.330.900,00		73.348.990,00		80.683.889,00		83.532.229,00	
Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang (Persentase)	0	45	46	39.815.000,00	47	26.330.900,00	48	73.348.990,00	49	80.683.889,00	50	83.532.229,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					13.100.000,00		13.310.000,00		14.641.000,00		16.105.100,00		17.436.100,00	
Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase)	0	0	46	13.100.000,00	47	13.310.000,00	48	14.641.000,00	49	16.105.100,00	50	17.436.100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					39.018.414.494,00		39.422.263.397,00		41.364.236.582,00		43.403.308.427,00		45.561.124.789,00	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					33.958.348.494,00		34.362.197.397,00		36.304.170.582,00		38.343.242.427,00		40.369.624.789,00	
Terpenuhiya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	-	4	4	33.958.348.494,00	4	34.362.197.397,00	4	36.304.170.582,00	4	38.343.242.427,00	4	40.369.624.789,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					3.462.906.000,00		3.462.906.000,00		3.462.906.000,00		3.462.906.000,00		3.491.500.000,00	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan	-	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kesejahteraan Rakyat	Rakyat (Persentase)													Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Efektivitas Kerja Sama Daerah (%)	-	100	100	3.462.906.000,00	100	3.462.906.000,00	100	3.462.906.000,00	100	3.462.906.000,00	100	3.491.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (%)	-	100	100				100				100		
Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Yang Dihasilkan	Persentase Produk Hukum yang dihasilkan (%)	-	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					1.597.160.000,00		1.597.160.000,00		1.597.160.000,00		1.597.160.000,00		1.700.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (Persentase)	-	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	-	100	100	1.597.160.000,00	100	1.597.160.000,00	100	1.597.160.000,00	100	1.597.160.000,00	100	1.700.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ (Angka)	-	7	8	-	8	-	8	-	9	-	9	-	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					39.173.258.595,00		39.579.146.731,00		41.528.848.119,00		43.576.034.577,00		45.742.438.102,00	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					30.590.488.246,00		31.762.286.243,00		33.148.912.106,00		35.406.324.106,00		34.685.095.706,00	
Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	30.590.488.246,00	100	31.762.286.243,00	100	33.148.912.106,00	100	35.406.324.106,00	100	34.685.095.706,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					8.582.770.349,00		7.816.860.488,00		8.379.936.013,00		8.169.710.471,00		11.057.342.396,00	
Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	100	100	100	8.582.770.349,00	100	7.816.860.488,00	100	8.379.936.013,00	100	8.169.710.471,00	100	11.057.342.396,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					8.832.658.270,00		9.338.638.605,00		9.722.953.278,00		10.175.983.683,00		10.668.016.685,00	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.786.214.270,00		7.949.638.605,00		8.159.953.278,00		8.426.983.683,00		8.624.016.685,00	
Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	91.63	100	100	7.786.214.270,00	100	7.949.638.605,00	100	8.159.953.278,00	100	8.426.983.683,00	100	8.624.016.685,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					584.840.000,00		790.000.000,00		880.000.000,00		1.000.000.000,00		1.165.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	99.55	100	100	584.840.000,00	100	790.000.000,00	100	880.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.165.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	-	100	-		100		-		-		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					461.604.000,00		599.000.000,00		683.000.000,00		749.000.000,00		879.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	100	100	100	126.996.000,00	100	178.000.000,00	100	206.000.000,00	100	228.000.000,00	100	272.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	100	100	100	179.919.000,00	100	218.000.000,00	100	246.000.000,00	100	268.000.000,00	100	310.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	100	100	100	154.689.000,00	100	203.000.000,00	100	231.000.000,00	100	253.000.000,00	100	297.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.02 - KEUANGAN					262.282.627.707,00		265.253.555.681,46		278.320.164.448,51		292.040.103.653,59		306.559.017.920,75	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					24.930.182.665,40		29.229.408.309,73		28.906.825.115,24		28.869.182.759,92		28.487.432.300,31	
Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	12.918.785.083,40	100	16.755.264.358,26	100	15.823.705.493,01	100	15.176.638.683,99	100	14.482.072.847,85	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan (Keuangan)
Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	12.011.397.582,00	100	12.474.143.951,47	100	13.083.119.622,23	100	13.692.544.075,93	100	14.005.359.452,46	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan (Pendapatan)
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					233.090.488.341,60		232.118.577.035,20		245.215.974.678,50		258.803.172.204,60		273.219.102.606,90	
Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	30	30	30	233.090.488.341,60	30	232.118.577.035,20	30	245.215.974.678,50	30	258.803.172.204,60	30	273.219.102.606,90	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	40	40	40		40		40		40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan		
Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	95	95	95	-	95	-	95	-	95	-	95	-	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	90	90	90		85		85		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					600.000.000,00		530.000.000,00		650.000.000,00		610.000.000,00		540.000.000,00	
Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	8	8	8	600.000.000,00	8	530.000.000,00	8	650.000.000,00	8	610.000.000,00	8	540.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					3.661.956.700,00		3.375.570.336,53		3.547.364.654,77		3.757.748.689,07		4.312.483.013,54	
Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	0	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	0	65	70	-	75	-	80	-	85	-	90	-	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	5.54	12.47	12.47	3.661.956.700,00	12.27	3.375.570.336,53	13.24	3.547.364.654,77	13.21	3.757.748.689,07	13.21	4.312.483.013,54	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.03 - KEPEGAWAIAN					7.857.330.689,00		7.927.156.285,00		8.376.418.292,00		8.752.295.979,00		9.257.392.133,00	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.707.330.689,00		7.742.156.285,00		8.158.418.292,00		8.602.295.979,00		8.691.905.879,00	
Terpenuhiya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada BKPSDM	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	7.707.330.689,00	100	7.742.156.285,00	100	8.158.418.292,00	100	8.602.295.979,00	100	8.691.905.879,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					150.000.000,00		185.000.000,00		218.000.000,00		150.000.000,00		565.486.254,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	80	80	80	150.000.000,00	80	185.000.000,00	80	218.000.000,00	80	150.000.000,00	80	565.486.254,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya Kualitas Penilaian Kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	63	70	75	-	75	-	80	-	80	-	80	-	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	27	35	40	-	45	-	50	-	55	-	60	-	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya Tata Kelola Pengembangan Karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	80	80	80	-	80	-	80	-	80	-	80	-	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					100.000.000,00		113.188.020,00		60.000.000,00		100.000.000,00		35.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					100.000.000,00		113.188.020,00		60.000.000,00		100.000.000,00		35.000.000,00	
Meningkatnya Layanan Pengembangan Komptensi Dasar, Kader, Manajerial, dan Fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (Persentase)	30	35	36	100.000.000,00	37	113.188.020,00	38	60.000.000,00	39	100.000.000,00	40	35.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					200.000.000,00		290.000.000,00		380.000.000,00		425.000.000,00		460.000.000,00	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					135.000.000,00		150.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00		240.000.000,00	
Meningkatnya Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah (Persentase)	-	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
Meningkatnya Kajian yang Termanfaatkan sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Pengembangan Potensi Unggulan	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	-	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
Meningkatnya Kajian yang Termanfaatkan sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	-	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	-	100	100	135.000.000,00	100	150.000.000,00	100	230.000.000,00	100	230.000.000,00	100	240.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					65.000.000,00		140.000.000,00		150.000.000,00		195.000.000,00		220.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Fasilitas, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	Persentase Fasilitas, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)	-	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
Meningkatnya Kajian yang Termanfaatkan sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah (Persentase)	-	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
Meningkatnya Kajian yang Termanfaatkan sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah (Persentase)	-	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah dalam Pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	-	-	100	65.000.000,00	100	140.000.000,00	100	150.000.000,00	100	195.000.000,00	100	220.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					22.836.384.503,00		23.087.444.671,00		24.224.751.223,00		25.418.923.103,00		26.682.637.095,00	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					17.706.384.503,00		17.782.444.671,00		17.969.751.223,00		18.888.923.103,00		19.237.637.095,00	
Terpenuhinya penunjang urusan pemerintah daerah pada Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	17.706.384.503,00	100	17.782.444.671,00	100	17.969.751.223,00	100	18.888.923.103,00	100	19.237.637.095,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAA N PENGAWASAN					3.515.000.000,00		3.590.000.000,00		4.220.000.000,00		4.395.000.000,00		4.895.000.000,00	
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (%)	80.21	82	83	3.515.000.000,00	84	3.590.000.000,00	85	4.220.000.000,00	86	4.395.000.000,00	87	4.895.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan APIP tahun N-1 (%)	80	82	84		85		87		89		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					1.615.000.000,00		1.715.000.000,00		2.035.000.000,00		2.135.000.000,00		2.550.000.000,00	
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	3.000	3.025	3.050	1.615.000.000,00	3.100	1.715.000.000,00	3.125	2.035.000.000,00	3.150	2.135.000.000,00	3.200	2.550.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
7.01 - KECAMATAN					49.448.808.624,00		49.997.947.981,00		52.460.888.106,00		55.046.975.237,00		57.783.662.097,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					42.355.604.674,00		42.484.259.706,00		44.625.420.967,00		47.110.308.876,00		49.767.795.537,00	
Terpenuhinya Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	85	85	5.594.120.734,00	85	4.958.283.850,00	85	5.379.398.279,00	85	6.201.568.403,00	85	7.019.667.725,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Seruyan Hilir)
Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administarsi perkantoran (%)	100	100	100	3.634.204.366,00	100	3.747.120.714,00	100	3.845.682.878,00	100	3.970.173.151,00	100	3.970.173.151,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Seruyan Hilir Timur)
Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	3.768.511.510,00	100	3.725.402.232,00	100	3.960.804.836,00	100	4.053.065.046,00	100	4.351.550.352,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Danau Sembuluh)
Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	97.47	97.5	98	3.605.776.081,00	99	3.700.484.860,00	100	3.860.895.619,00	100	4.018.201.917,00	100	4.196.887.596,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Seruyan Raya)
Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administarsi perkantoran (%)	100	100	100	3.276.045.811,00	100	3.311.779.034,00	100	3.491.124.349,00	100	3.677.570.106,00	100	3.874.873.455,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Danau Seluluk)
Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	5.497.281.804,00	100	5.492.637.812,00	100	5.670.482.962,00	100	5.988.945.369,00	100	6.343.783.607,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Hanau)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	3.550.757.716,00	100	3.561.424.696,00	100	3.718.867.317,00	100	3.882.408.677,00	100	4.053.844.338,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Batu Ampar)
Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administarsi perkantoran (%)	100	94	95	5.213.584.750,00	96	5.838.708.735,00	98	6.096.625.167,00	98	6.354.382.420,00	98	6.664.745.589,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Seruyan Tengah)
Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	4.029.233.854,00	100	3.991.412.944,00	100	4.255.929.739,00	100	4.401.798.724,00	100	4.563.061.382,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Seruyan Hulu)
Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	4.186.088.048,00	100	4.157.004.829,00	100	4.345.609.821,00	100	4.562.195.063,00	100	4.729.208.342,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Suling Tambun)
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					1.284.781.474,00		1.421.201.798,00		1.479.103.548,00		1.123.708.574,00		798.194.500,00	
Persentase Layanan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Persentase layanan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan (%)	85	85	85	1.031.048.574,00	85	1.211.048.548,00	85	1.211.048.548,00	85	831.048.574,00	85	480.869.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Seruyan Hilir)
Meningkatnya layanan Pemerintahan yang cepat dan mudah ditingkat Kecamatan	Persentase layanan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan (%)	100	100	100	111.500.000,00	100	43.148.250,00	100	111.500.000,00	100	111.500.000,00	100	111.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Seruyan Hilir Timur)
Meningkatnya Layanan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase layanan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan (%)	100	100	100	5.000.000,00	100	6.000.000,00	100	6.000.000,00	100	12.000.000,00	100	12.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Danau Sembuluh)
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan	Persentase layanan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan (%)	100	86.78	87	20.000.000,00	89	20.000.000,00	90	20.000.000,00	91	39.000.000,00	91	50.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Seruyan Raya)
Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase layanan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan (%)	87	87	87	15.000.000,00	87	15.000.000,00	87	5.000.000,00	87	5.000.000,00	87	5.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Danau Seluluk)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Layanan Pemerintahan yang Cepat dan Mudah di Tingkat Kecamatan	Persentase layanan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan (%)	100	100	100	2.000.000,00	100	7.000.000,00	100	9.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Hanau)
Meningkatnya Layanan Pemerintahan yang Cepat dan Mudah di Tingkat Kecamatan	Persentase layanan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan (%)	100	100	100	5.000.000,00	100	5.500.000,00	100	6.050.000,00	100	6.655.000,00	100	7.320.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Batu Ampar)
Meningkatnya Layanan Pemerintahan yang Cepat dan Mudah di Tingkat Kecamatan	Persentase layanan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan (%)	100	94	95	35.232.900,00	96	58.500.000,00	98	58.500.000,00	98	61.500.000,00	98	61.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Seruyan Tengah)
Meningkatnya layanan pemerintahan yang cepat dan mudah di tingkat kecamatan	Persentase layanan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan (%)	100	100	100	40.000.000,00	100	25.005.000,00	100	25.005.000,00	100	25.005.000,00	100	25.005.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Seruyan Hulu)
Meningkatnya Layanan Pemerintahan Yang Cepat dan Mudah di Tingkat Kecamatan	Persentase layanan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan (%)	100	100	100	20.000.000,00	100	30.000.000,00	100	27.000.000,00	100	22.000.000,00	100	35.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Suling Tambun)
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.997.839.726,00		3.078.001.300,00		3.141.523.650,00		3.255.233.285,00		3.354.007.384,00	
Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat desa dan kelurahan	Persentase terbentuknya desa/kelurahan mandiri (%)	85	85	85	1.485.334.976,00	85	2.035.514.550,00	85	2.035.514.550,00	85	2.035.514.550,00	85	2.035.514.550,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Seruyan Hilir)
Meningkatnya Kemandirian dan Partisipasi masyarakat desa dan Kelurahan	Persentase terbentuknya desa/kelurahan mandiri (%)	90	90	90	54.837.750,00	90	54.837.750,00	90	74.837.750,00	90	74.837.750,00	90	74.837.750,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Seruyan Hilir Timur)
Meningkatnya Kemandirian dan Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase terbentuknya desa/kelurahan mandiri (%)	100	100	100	45.499.000,00	100	53.695.500,00	100	74.100.000,00	100	93.280.000,00	100	95.071.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Danau Sembuluh)
Meningkatnya Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Persentase terbentuknya desa/kelurahan mandiri (%)	80	100	100	115.000.000,00	100	115.000.000,00	100	115.000.000,00	100	125.000.000,00	100	130.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Seruyan Raya)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase terbentuknya desa/kelurahan mandiri (%)	90	90	90	34.775.000,00	90	35.775.000,00	90	35.775.000,00	90	35.775.000,00	90	35.775.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Danau Seluluk)
Meningkatnya Kemandirian dan Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase terbentuknya desa/kelurahan mandiri (%)	100	100	100	64.958.000,00	100	110.000.000,00	100	110.000.000,00	100	110.000.000,00	100	110.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Hanau)
Meningkatnya Kemandirian dan Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase terbentuknya desa/kelurahan mandiri (%)	100	85	85	37.435.000,00	85	41.178.500,00	85	45.296.350,00	85	49.825.985,00	85	54.808.584,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Batu Ampar)
Meningkatnya Kemandirian dan Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase terbentuknya desa/kelurahan mandiri (%)	100	94	95	1.050.000.000,00	96	522.000.000,00	98	544.000.000,00	98	606.000.000,00	98	661.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Seruyan Tengah)
Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat desa dan kelurahan	Persentase terbentuknya desa/kelurahan mandiri (%)	70	75	80	90.000.000,00	85	90.000.000,00	90	80.000.000,00	95	90.000.000,00	99	120.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Seruyan Hulu)
Meningkatnya Kemandirian dan Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase terbentuknya desa/kelurahan mandiri (%)	100	85	85	20.000.000,00	85	20.000.000,00	85	27.000.000,00	85	35.000.000,00	85	37.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Suling Tambun)
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					226.398.000,00		238.349.000,00		224.449.000,00		231.659.000,00		277.990.000,00	
Persentase Penanganan Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan masalah ketentraman dan ketertiban umum (%)	85	85	85	54.249.000,00	85	54.249.000,00	85	54.249.000,00	85	54.249.000,00	85	54.249.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Seruyan Hilir)
Meningkatnya Rasa aman dan tertib di lingkungan masyarakat	Persentase penanganan masalah ketentraman dan ketertiban umum (%)	98	98	98	13.000.000,00	98	13.000.000,00	98	13.000.000,00	98	13.000.000,00	98	13.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Seruyan Hilir Timur)
Meningkatnya Rasa Aman dan Tertib di Lingkungan Masyarakat.	Persentase penanganan masalah ketentraman dan ketertiban umum (%)	0	0	0	21.180.000,00	0	29.100.000,00	0	29.100.000,00	0	29.100.000,00	0	29.100.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Danau Sembuluh)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan masalah ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	20.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Seruyan Raya)
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase penanganan masalah ketentraman dan ketertiban umum (%)	95	95	95	40.000.000,00	95	40.000.000,00	95	40.000.000,00	95	40.000.000,00	95	40.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Danau Seluluk)
Meningkatnya Rasa Aman dan Tertib di Lingkungan Masyarakat	Persentase penanganan masalah ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	100	4.969.000,00	100	5.000.000,00	100	7.500.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Hanau)
Meningkatnya Rasa Aman dan Tertib di Lingkungan Masyarakat	Persentase penanganan masalah ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	85	85	10.000.000,00	85	11.000.000,00	85	12.100.000,00	85	13.310.000,00	85	14.641.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Batu Ampar)
Meningkatnya Rasa Aman dan Tertib di Lingkungan Masyarakat	Persentase penanganan masalah ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	94	100	15.000.000,00	96	16.000.000,00	98	16.500.000,00	98	17.000.000,00	98	17.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Seruyan Tengah)
Meningkatnya rasa aman dan tertib di lingkungan masyarakat.	Persentase penanganan masalah ketentraman dan ketertiban umum (%)	85	87	89	50.000.000,00	90	50.000.000,00	93	30.000.000,00	95	30.000.000,00	99	50.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Seruyan Hulu)
Meningkatnya Rasa Aman dan Tertib di Lingkungan Masyarakat	Persentase penanganan masalah ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	85	85	8.000.000,00	85	10.000.000,00	85	12.000.000,00	85	15.000.000,00	85	30.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Suling Tambun)
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					2.009.113.500,00		2.016.000.927,00		2.251.405.691,00		2.490.265.252,00		2.794.672.926,00	
Meningkatnya Dukungan Kecamatan Terhadap Kelancaran Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi (%)	85	85	85	204.653.000,00	85	204.653.000,00	85	204.653.000,00	85	204.653.000,00	85	204.653.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Seruyan Hilir)
Meningkatnya Dukungan Kecamatan Terhadap Kelancaran Urusan Pemerintah Umum	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi (%)	100	100	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	163.534.191,00	100	249.514.428,00	100	472.241.602,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Seruyan Hilir Timur)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya dukungan kecamatan terhadap kelancaran urusan pemerintahan umum	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi (%)	100	100	100	225.588.600,00	100	199.395.000,00	100	220.850.000,00	100	251.010.000,00	100	247.815.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Danau Sembuluh)
Meningkatnya Kualitas Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi (%)	100	100	100	235.875.000,00	100	185.875.000,00	100	220.875.000,00	100	245.000.000,00	100	245.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Seruyan Raya)
Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi (%)	85	85	85	150.000.000,00	85	171.777.927,00	85	180.000.000,00	85	180.000.000,00	85	180.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Danau Seluluk)
Meningkatnya Dukungan Kecamatan Terhadap Kelancaran Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi (%)	100	100	100	255.039.900,00	100	255.000.000,00	100	315.000.000,00	100	320.000.000,00	100	320.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Hanau)
Meningkatnya Dukungan Kecamatan Terhadap Kelancaran Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi (%)	100	85	85	205.000.000,00	85	225.500.000,00	85	248.050.000,00	85	272.855.000,00	85	300.140.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Batu Ampar)
Meningkatnya Dukungan Kecamatan terhadap Kelancaran Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi (%)	100	94	95	160.690.000,00	96	125.800.000,00	98	167.000.000,00	98	183.500.000,00	98	183.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Seruyan Tengah)
Meningkatnya dukungan kecamatan terhadap kelancaran urusan pemerintahan umum	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi (%)	100	100	100	287.267.000,00	100	320.000.000,00	100	329.443.500,00	100	378.732.824,00	100	416.322.824,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Seruyan Hulu)
Meningkatnya Dukungan Kecamatan Terhadap Kelancaran Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi (%)	100	85	85	135.000.000,00	85	178.000.000,00	85	202.000.000,00	85	205.000.000,00	85	225.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Suling Tambun)
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					575.071.250,00		760.135.250,00		738.985.250,00		835.800.250,00		791.001.750,00	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Tertib dan Akuntabel	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa (%)	85	85	85	84.919.000,00	85	84.919.000,00	85	84.919.000,00	85	84.919.000,00	85	84.919.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Seruyan Hilir)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang tertib dan Akuntabel	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	61.011.250,00	100	61.011.250,00	100	61.011.250,00	100	61.011.250,00	100	61.011.250,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Seruyan Hilir Timur)
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang tertib dan akuntabel	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa (%)	0	0	0	65.360.000,00	0	163.400.000,00	0	91.900.000,00	0	160.350.000,00	0	91.900.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Danau Sembuluh)
Meningkatnya Tata Kelola Desa yang Baik	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	37.000.000,00	100	37.000.000,00	100	42.000.000,00	100	42.000.000,00	100	60.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Seruyan Raya)
Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	49.420.550,00	100	30.305.000,00	100	30.305.000,00	100	30.305.000,00	100	30.305.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Danau Seluluk)
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Tertib dan Akuntabel	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	44.989.000,00	100	65.000.000,00	100	115.000.000,00	100	95.000.000,00	100	65.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Hanau)
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Tertib dan Akuntabel	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	65.000.000,00	100	71.500.000,00	100	78.650.000,00	100	86.515.000,00	100	95.166.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Batu Ampar)
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Tertib dan Akuntabel	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	94	95	127.371.450,00	96	114.000.000,00	100	121.200.000,00	100	126.700.000,00	100	126.700.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Seruyan Tengah)
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang tertib dan akuntabel	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa (%)	90	90	90	0	92	70.000.000,00	95	50.000.000,00	97	80.000.000,00	99	80.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Seruyan Hulu)
Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa yang Tertib dan Akuntabel	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	100	40.000.000,00	100	63.000.000,00	100	64.000.000,00	100	69.000.000,00	100	96.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan (Suling Tambun)
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					9.744.236.354,00		9.825.940.888,00		10.309.974.835,00		10.818.210.479,00		11.356.043.018,00	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					6.342.237.830,00		6.322.890.064,00		6.766.285.891,00		6.892.615.580,00		7.077.743.274,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administarsi perkantoran (%)	100	100	100	6.342.237.830,00	100	6.322.890.064,00	100	6.766.285.891,00	100	6.892.615.580,00	100	7.077.743.274,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					1.372.974.724,00		1.443.544.724,00		1.472.974.724,00		1.572.974.724,00		1.672.974.724,00	
Meningkatnya Kesadaran/Pemahaman Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan tentang ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan (%)	-	0.33	0.53	1.372.974.724,00	0.73	1.443.544.724,00	0.94	1.472.974.724,00	1.15	1.572.974.724,00	1.38	1.672.974.724,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					1.344.841.500,00		1.349.872.500,00		1.344.841.500,00		1.564.798.655,00		1.347.503.500,00	
Meningkatnya Etika dan Budaya Politik	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik dan etika budaya politik (%)	-	0.38	0.38	1.344.841.500,00	0.51	1.349.872.500,00	0.65	1.344.841.500,00	0.81	1.564.798.655,00	0.98	1.347.503.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					187.642.800,00		194.693.900,00		190.692.800,00		212.000.000,00		242.000.000,00	
Meningkatnya Keterlibatan Organisasi Kemasyarakatan	Indeks Kinerja Ormas (%)	-	60	60	187.642.800,00	60.35	194.693.900,00	60.40	190.692.800,00	60.45	212.000.000,00	60.50	242.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang ber-SKT/Aktif (%)	46.53	46.53	47.53		48.53		49.53		50.53		51.53		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					184.002.000,00		202.402.200,00		222.642.420,00		246.629.020,00		446.629.020,00	
Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya Masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Indeks)	4.00	4.00	4.00	184.002.000,00	4.05	202.402.200,00	4.10	222.642.420,00	4.15	246.629.020,00	4.20	446.629.020,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					312.537.500,00		312.537.500,00		312.537.500,00		329.192.500,00		569.192.500,00	
Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase konflik sosial yang diselesaikan (%)	50	60	60	312.537.500,00	65	312.537.500,00	70	312.537.500,00	75	329.192.500,00	80	569.192.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					1.282.788.876.358,00		1.296.756.209.892,00		1.360.635.489.538,00		1.427.708.733.167,00		1.498.687.959.773,00	

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pencapaian Tujuan

Pengukuran kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan merupakan salah satu instrumen yang sangat penting dal upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Pengukuran ini dilakukan melalui penetapan indikator-indikator yang mampu mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara terukur. Dua instrumen utama yang digunakan dalam kerangka ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja utama suatu instansi pemerintah Kabupaten Seruyan. IKU ditetapkan berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta sasaran strategis instansi, dan digunakan untuk melihat sejauh mana capaian dari visi misi hingga tujuan dan sasaran Bupati Kabupaten Seruyan periode 2025-2029. Selanjutnya, Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja pembangunan di tingkat daerah secara menyeluruh, mencerminkan hasil pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Secara lebih detail, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Seruyan pada periode RPJMD tahun 2025-2029 dapat diamati pada bagian berikut.

4.2.1.Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan

Indikator Kinerja Utama Daerah (IKU) Kabupaten Seruyan disusun berdasarkan turunan visi misi dan sasaran Bupati Kabupaten Seruyan tahun 2025-2029. Indikator-indikator ini telah disesuaikan juga dengan program program prioritas Kabupaten Seruyan tahun 2025-2029. Secara lebih detail, IKU Kabupaten Seruyan tahun 2025-2029 dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Seruyan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Koefisien	70,94	71,4	71,87	72,33	72,79	73,25	
2	Indeks Ketahanan Pangan	Koefisien	65,5	65,97	66,45	66,93	67,41	67,9	
3	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Nilai	74,27	75,95	77,62	79,30	80,97	80,97	
4	Indeks Pendidikan	Koefisien	0,614	0,618	0,622	0,626	0,630	0,634	
5	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,4	73,6	73,8	74	74,2	74,2	
6	Prevelensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	Persen	20	19	17,5	16	15	15	
7	Presentase Ketersediaan Pangan	Persen	86,90	88,70	89,20	89,70	92,20	95,80	
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3,45	3,4	3,3	3,2	3,16	3,1	
9	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,36	6,2	5,5	5,1	5,06	5,01	
10	Pendapatan Per Kapita	Rp	76.000.000	78.000.000	80.000.000	82.000.000	85.000.000	87.000.000	
11	Indeks Harmoni Indonesia	Koefisien	6,7	6,71	6,72	6,73	6,74	6,75	
12	Persentase Peningkatan Jumlah Partisipan Pemilu	Persen	77,14	77,14	77,14	77,14	77,5	77,5	
13	Persentase penurunan konflik	Persen	55	60	65	70	75	80	
14	Angka kriminalitas	Persen	7,45	7,3	7,15	7	6,85	6,7	
15	Indeks Reformasi Birokrasi	Koefisien	63,5	65,5	68,39	70,56	70,92	70,99	
16	Persentase Desa Mandiri	Persen	34,92	49,47	54,32	59,17	64,02	68,87	
17	Nilai SAKIP	Nilai	71	73	74	75	76	77	
18	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
19	Indeks Pemerintahan Digital	Koefisien	2,51	2,51	2,61	2,71	2,81	3,01	
20	Indeks Pelayanan Publik	Koefisien	2,85	3,00	3,10	3,25	3,40	3,50	
21	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Koefisien	100	100	100	100	100	100	
22	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Ton CO2 eq	951.714,31	1.070.403,14	1.213.264,31	1.376.624,50	1.534.027,75	1.679.606,11	
23	Indeks Risiko Bencana	Koefisien	136,28	130,28	124,2	118,4	115,47	115,47	
24	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Koefisien	79,55	79,72	79,9	80,07	80,24	80,64	
25	Indeks Ketahanan Daerah	Koefisien	0,63	0,64	0,65	0,67	0,7	0,72	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
26	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,75	5	5,25	5,5	5,75	6	
27	PDRB Sektor UMKM dan Koperasi	Persen	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	
28	PDRB Sektor Pariwisata dan Ekraf	Persen	0,18	0,19	0,2	0,21	0,21	0,22	
29	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp	265.791.039.698,00	164.390.227.109,00	172.049.981.408,00	180.092.723.428,00	188.537.602.550,00	197.957.046.423,00	
30	Rasio PAD terhadap PDRB	Persen	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	
31	Nilai Investasi (Rp)	Nilai	1.313.371.481.423	1.352.772.625.686	1.392.173.832.949	1.431.575.040.212	1.470.976.247.475	1.510.377.454.738	

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029

Tabel 4. 4 Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Seruyan

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
(1)	(2)	(3)
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau <i>Human Development Index (HDI)</i> merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan manusia di suatu wilayah. Indeks ini dikembangkan oleh <i>United Nations Development Programme (UNDP)</i> dan menggabungkan tiga dimensi utama: 1. Kesehatan: Diukur melalui harapan hidup saat lahir. 2. Pendidikan: Diukur melalui dua indikator, yaitu rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. 3. Standar Hidup Layak: Diukur melalui <i>Gross National Income (GNI) per kapita</i> dalam PPP (<i>Purchasing Power Parity</i>). Rumus dasar untuk menghitung IPM adalah sebagai berikut: $IPM = \sqrt[3]{IndeksKesehatan \times IndeksPendidikan \times IndeksStandarHidupLayak}$ Masing-masing indeks dihitung sebagai berikut: 1. Indeks Kesehatan (Indeks Harapan Hidup): $IndeksKesehatan = \frac{HarapanHidup - 20}{85 - 20}$ Di mana, Harapan Hidup adalah angka harapan hidup saat lahir. 2. Indeks Pendidikan: $IndeksPendidikan = \sqrt{\left(\frac{Rata - rataLamaSekolah}{15}\right) \times \left(\frac{HarapanLamaSekolah}{18}\right)}$ • Rata-rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun pendidikan yang dijalani oleh orang yang berusia 25 tahun ke atas. • Harapan Lama Sekolah adalah jumlah tahun pendidikan yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak-anak pada usia memasuki sekolah. 3. Indeks Standar Hidup Layak: $IndeksStandarHidupLayak = \frac{\log(GNI \text{ per kapita}) - \log(100)}{\log(75,000) - \log(100)}$ • GNI per kapita adalah <i>Gross National Income per kapita</i> dalam PPP (<i>Purchasing Power Parity</i>).

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
(1)	(2)	(3)
		Setelah ketiga indeks dihitung, nilai IPM diperoleh dengan mengambil rata-rata geometris dari ketiganya, seperti pada rumus di atas. IPM dinyatakan dalam skala 0 hingga 1, di mana semakin mendekati 1, semakin tinggi tingkat pembangunan manusia di wilayah tersebut.
2.	Indeks Ketahanan Pangan	digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan di suatu wilayah. Indeks ini mencerminkan seberapa mampu suatu daerah atau negara memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya secara berkelanjutan.
3.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah ukuran yang menggambarkan tingkat perkembangan literasi dalam suatu masyarakat. Literasi tidak hanya mencakup kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara efektif. Definisi operasional dari variabel ini dapat dipecah menjadi beberapa komponen utama: Tingkat Melek Huruf: Persentase populasi yang dapat membaca dan menulis pada usia tertentu. Akses ke Pendidikan: Kemudahan akses ke fasilitas pendidikan dan bahan bacaan. Kualitas Pendidikan: Kualitas pengajaran dan kurikulum yang berfokus pada pengembangan literasi. Infrastruktur Literasi: Ketersediaan perpustakaan, pusat belajar, dan fasilitas lain yang mendukung kegiatan literasi. Partisipasi dalam Kegiatan Literasi: Jumlah dan jenis kegiatan literasi yang diikuti oleh masyarakat, seperti klub buku, seminar, dan lokakarya. Penggunaan Teknologi untuk Literasi: Akses dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk kegiatan literasi.

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
(1)	(2)	(3)
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat = $0.2T + 0.2A + 0.2K + 0.15I + 0.15P + 0.1G$ Di mana: T = Tingkat Melek Huruf A = Akses ke Pendidikan K = Kualitas Pendidikan I = Infrastruktur Literasi P = Partisipasi dalam Kegiatan Literasi G = Penggunaan Teknologi untuk Literasi
4.	Indeks Pendidikan	Indeks Pendidikan adalah ukuran capaian pembangunan manusia dalam bidang pendidikan yang dihitung berdasarkan dua dimensi utama, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). HLS menggambarkan jumlah tahun sekolah yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak pada usia 7 tahun di masa mendatang, sedangkan RLS menggambarkan rata-rata jumlah tahun sekolah yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas. $I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}}$ $I_{\text{pendidikan}} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$
5.	Usia Harapan Hidup	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur
6.	Prevelensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Cara perhitungan (1) Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%)

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
(1)	(2)	(3)
		$PAB(5)P\ stunting = \frac{JAB(5)P\ stunting}{JAB(5)} \times 100\%$ Keterangan: - PAB(5) P : Prevalensi anak balita yang menderita pendek (<i>stunting</i>) - JAB(5) P <i>stunting</i> : Jumlah anak balita pendek (<i>stunting</i>) pada waktu tertentu - JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama Cara perhitungan (2) Jumlah anak balita sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). $PAB(5)SP\ stunting = \frac{JAB(5)SP\ stunting}{JAB(5)} \times 100\%$ Keterangan: - PAB(5) SP : Prevalensi anak balita yang menderita sangat pendek (<i>stunting</i>) - JAB(5) SP <i>stunting</i> : Jumlah anak balita sangat pendek (<i>stunting</i>) pada waktu tertentu - JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama Cara perhitungan (3) $Prevalensi\ stunting = PAB(5)P + PAB(5)SP$
7.	Persentase Ketersediaan Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan = (Jumlah Produksi Pangan + Jumlah Impor Pangan – Jumlah Ekspor Pangan – Jumlah Kehilangan Pangan) / Per Kebutuhan Pangan Penduduk x 100 %
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
(1)	(2)	(3)
		karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. $TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$ Keterangan: TPT = Tingkat pengangguran terbuka (%) PP = Jumlah pengangguran (orang) PAK = Jumlah angkatan kerja (orang)
9.	Tingkat Kemiskinan	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) $P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ Dimana : $\alpha = 0$ z = garis kemiskinan. y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$ q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. n = jumlah penduduk.
10.	Pendapatan Per Kapita	Pendapatan perkapita adalah ukuran jumlah uang yang diperoleh per orang di suatu negara atau wilayah geografis. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk menentukan pendapatan rata-rata per orang untuk menentukan pendapatan rata-rata per orang untuk suatu mengevaluasi standar hidup dan kualitas hidup penduduk $\text{Pendapatan per Kapita} = \frac{\text{PDRB atau PDB Atas Dasar Harga Berlaku}}{\text{Jumlah Penduduk}}$
11.	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) merupakan alat ukur yang dikembangkan untuk memahami, memantau, dan meningkatkan harmoni sosial di berbagai wilayah Indonesia dengan mengukur 4 dimensi yaitu ekonomi, sosial, budaya dan keberagamaan. Adapun IHaI mencakup 5 tujuan diantaranya: 1. Sosialisasi dan Edukasi 2. Potret dan Pemetaan Skor PPA 3. Menggali Data Usul Saran dan Kritik 4. Mendapatkan Evidence dan 5. Menyajikan Saran dan Rekomendasi.

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
(1)	(2)	(3)
12.	Persentase Peningkatan Jumlah Partisipan Pemilu	Persentase peningkatan jumlah partisipan pemilu adalah ukuran yang menunjukkan perbandingan kenaikan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada suatu pemilihan umum dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Indikator ini mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi elektoral dari waktu ke waktu $\text{Persentase Peningkatan} = \frac{(\text{Jumlah Partisipan Pemilu Tahun Berjalan} - \text{Jumlah Partisipan Pemilu Sebelumnya})}{\text{Jumlah Partisipan Pemilu Sebelumnya}} \times 100\%$
13.	Persentase penurunan konflik	Persentase Penyelesaian Konflik adalah indikator yang mengukur proporsi jumlah kasus konflik yang berhasil diselesaikan dibandingkan dengan total jumlah konflik yang terjadi dalam suatu wilayah atau periode tertentu. $\text{Persentase Penyelesaian Konflik} = \left(\frac{\text{Jumlah konflik yang diselesaikan}}{\text{Jumlah total konflik yang terjadi}} \right) \times 100\%$
14.	Angka kriminalitas	Angka kriminalitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kejadian tindak pidana yang tercatat dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, serta efektivitas sistem penegakan hukum. $\text{Angka Kriminalitas} = \frac{\text{Jumlah Kasus Kriminal yang Dilaporkan pada Tahun Tertentu}}{\text{Jumlah Penduduk pada Tahun yang Sama}} \times 100.000$
15.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi bersumber dari 5 penilaian komponen hasil Nilai Akuntabilitas Kinerja (NAK), Nilai Kapabilitas Organisasi, Nilai Integritas Organisasi (Nilai Persepsi Korupsi), Nilai Opini BPK, serta Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan Publik.
16.	Persentase Desa Mandiri	Persentase Desa Mandiri = (Jumlah Desa Mandiri / Total Jumlah Desa) x 100 %
17.	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP didasarkan pada 4 komponen penilaian, yaitu Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (30%), Pelaporan Kinerja (15%), dan Evaluasi Internal (25%)
18.	Opini BPK	merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
19.	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks Pemerintahan Digital adalah ukuran capaian transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup aspek tata kelola, pelayanan publik berbasis digital, serta kebijakan dan implementasi teknologi informasi di lingkungan instansi pemerintah. Indeks ini digunakan untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah mampu memanfaatkan teknologi digital guna mewujudkan birokrasi yang efektif, transparan, adaptif,

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
(1)	(2)	(3)
		dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
20.	Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks. 1. Menentukan nilai untuk setiap Indikator Nilai per indikator: $(\frac{\text{nilai FO1} + \text{nilai FO2} + \text{nilai FO3}}{3}) \times \text{bobot per indikator}$ 2. Menentukan nilai setiap aspek Nilai per aspek: $\sum \text{nilai per indikator}$ 3. Menentukan indeks Nilai indeks: $\sum (\text{nilai aspek}_n \times \text{bobot aspek}_n)$
21.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	- digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah atau penyedia layanan publik lainnya. Infrastruktur yang dimaksud di sini meliputi berbagai sektor, seperti transportasi, energi, air bersih, saluran pembuangan, telekomunikasi, perumahan, jalan, dan jembatan. $IKLI = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Skor Unsur}_i}{n \times \text{Skor Maksimal}} \times 100$ Dimana: Skor Unsur_i = nilai rata-rata penilaian responden untuk unsur layanan ke-i. n = jumlah unsur layanan (misalnya aksesibilitas, kualitas infrastruktur, keandalan, dsb). Skor Maksimal = nilai tertinggi yang bisa diberikan responden (misalnya skala Likert 1–4, berarti skor maksimal = 4).
22.	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfir, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Upaya penurunan emisi GRK adalah pelaksanaan

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
(1)	(2)	(3)
		rencana kerja dari berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Penurunan emisi GRK tahunan adalah penurunan emisi GRK tahunan melalui kegiatan yang dijalankan berdasarkan rencana kegiatan untuk lima sektor prioritas yaitu kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri, limbah serta ekosistem pesisir dan laut (blue carbon). Rumus: $\text{Penurunan Emisi GRK} = (\text{Emisi baseline} - \text{Emisi Proyek}) \times 100$ Keterangan: Penurunan emisi GRK merujuk pada emisi setelah menerapkan aksi mitigasi.
23.	Indeks Risiko Bencana	IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan. $\text{Risk} = \text{Hazard} \times \frac{\text{Vulnerability}}{\text{Capacity}}$ Keterangan Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (<i>magnitude</i>) dari suatu fenomena alam seperti gempabumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya.
24.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan suatu nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup (yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut, dan Indeks Kualitas Air Laut). $\text{IKLH} = (0,3400 \times \text{IKA}) + (0,4280 \times \text{IKU}) + (0,1040 \times \text{IKTL}) + (0,0209 \times \text{IKEG}) + (0,099 \times \text{IKAL})$ IKLH : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKA : Indeks Kualitas Air IKU : Indeks Kualitas Udara IKTL : Indeks Kualitas Tutupan Lahan

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
(1)	(2)	(3)
		IKEG : Indeks Kualitas Ekosistem Gambut IKAL : Indeks Kualitas Air Laut
25.	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kapasitas dan kesiapan suatu kabupaten/kota dalam menghadapi potensi bencana. Indeks ini menilai sejauh mana pemerintah daerah bersama masyarakat mampu melakukan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, dan pemulihan pascabencana secara terencana dan berkelanjutan. Upaya mengurangi indeks risiko bencana akan mampu dilaksanakan di daerah dengan implementasikan fase perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasinya. Kewenangan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan terkait dengan kebencanaan dapat dilaksanakan secara lintas sektor, melalui pelaksanaan rencana kerja masing-masing unit OPD dan penganggaran daerah yang disusun berdasarkan koordinasi Bappeda di tataran daerah.
26.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	- Merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang. $\text{Laju Pertumbuhan Ekonomi} = \left(\frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \right) \times 100\%$ Keterangan: $PDRB_t$ = Produk Domestik Regional Bruto tahun berjalan $PDRB_{t-1}$ = Produk Domestik Regional Bruto tahun sebelumnya
27.	PDRB Sektor UMKM dan Koperasi	- untuk mengukur persentase sumbangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap total nilai tambah (PDRB) suatu wilayah dalam periode tertentu. $\text{Kontribusi UMKM terhadap PDRB} = \left(\frac{\text{PDRB yang dihasilkan oleh UMKM}}{\text{Total PDRB}} \right) \times 100\%$ - Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah¹. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
(1)	(2)	(3)
		$\text{Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (\%)} = \frac{\text{Total Volume Usaha Koperasi}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$
28.	PDRB Sektor Pariwisata dan Ekraf	- Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Harga Berlaku adalah ukuran yang menunjukkan persentase sumbangan sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah dalam harga pasar yang berlaku pada periode tertentu. PDRB harga berlaku mencerminkan nilai tambah bruto dari semua sektor ekonomi di wilayah tersebut pada harga pasar yang berlaku saat ini. $\text{Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB (\%)} = \frac{\text{PDRB Sektor Pariwisata}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$ - Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas ekonomi kreatif dari 17 subsektor yang termasuk: 1. Fesyen 2. Kuliner 3. Kriya 4. Film, Animasi dan Video 5. Pengembang Permainan 6. Aplikasi 7. Musik 8. Seni Pertunjukan 9. Fotografi 10. Desain Komunikasi Visual 11. Televisi dan Radio 12. Seni Rupa 13. Desain Produk 14. Periklanan 15. Penerbitan 16. Arsitektur 17. Desain Interior $\text{Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif} = \frac{\sum \text{PDRB 17 Subsektor Ekonomi Kreatif Regional}}{\text{PDRB}} \times 100\%$
29.	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah adalah total penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan yang digali dan dikelola sendiri, sesuai dengan kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. PAD mencerminkan kemandirian fiskal daerah dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. $\text{Jumlah PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan}$
30.	Rasio PAD terhadap PDRB	Rasio PAD terhadap PDRB adalah perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada periode tertentu di suatu wilayah. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian fiskal daerah serta kontribusi penerimaan asli daerah terhadap keseluruhan aktivitas ekonomi yang dihasilkan wilayah tersebut. $\text{Rasio PAD terhadap PDRB} = \frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{PDRB Atas Dasar Harga Berlaku}} \times 100\%$
31.	Nilai Investasi (Rp)	Nilai Investasi adalah total jumlah dana dalam bentuk rupiah yang ditanamkan oleh penanam modal, baik dari

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
(1)	(2)	(3)
		dalam negeri maupun luar negeri, untuk kegiatan usaha di suatu daerah atau wilayah pada periode tertentu. Indikator ini mencerminkan tingkat minat dan kepercayaan investor terhadap potensi ekonomi serta iklim usaha daerah. Nilai Investasi (Rp) = Nilai Realisasi PMDN + Nilai Realisasi PMA

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029

4.2.2. Target Penyelenggaraan Pemerintahan

Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 diturunkan berdasarkan IKU dan pertimbangan perangkat daerah dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan kinerja perangkat daerah yang dipimpin oleh Bupati Kabupaten Seruyan tahun 2025-2029. Secara lebih detail, IKD Kabupaten Seruyan tahun 2025-2029 dapat diamati pada bagian berikut.

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Daerah RPJMD Kabupaten Seruyan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI										
1	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/kapita	196.901	196.901	196.901	196.901	196.901	196.901	196.901	
2	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	Persen	35,34	35,34	40,14	44,95	49,75	54,55	54,55	
3	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	37,76	37,76	42,73	47,71	52,68	57,65	57,66	
4	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	
5	Rasio Penduduk	Persen	112	112	112	112	112	112	112	
6	Kepadatan Penduduk	Orang/m2	10,63	10,63	10,63	10,63	10,63	10,63	10,63	
7	Indeks Kualitas Lahan	Skor	79,31	79,31	79,38	79,45	79,52	79,59	79,62	
8	Kapasitas Air Baku	(m ³ /detik)	1,52	1,52	1,65	1,78	1,91	2,05	2,1	
9	Indeks Kualitas Udara	Skor	79,9	79,9	80,1	80,3	80,5	80,7	80,9	
10	Indeks Kualitas Air	Skor	79,32	79,32	79,52	79,72	79,92	80,12	80,2	
II ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
1	Indeks Gini	angka	0,220	0,220	0,213	0,204	0,195	0,186	0,177	
2	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	8,35	8,35	8,6	8,85	9,1	9,35	9,35	
3	Harapan Lama Sekolah	tahun	12,44	12,44	12,51	12,59	12,66	12,73	12,73	
4	Angka Literasi/Numerasi	Persen	62,32	62,32	62,32	62,32	62,32	62,32	62,32	
5	Indeks Literasi Digital	angka	41,06	41,06	41,06	41,06	41,06	41,06	41,06	
6	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persen	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	
7	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	angka	70	70	71,08	72,15	73,23	74,3	74,3	
8	Jumlah Kematian Ibu	Orang	4	4	3	3	2	2	2	
9	Jumlah Kematian Balita	Orang	20	20	18	15	13	10	10	
10	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	Persen	65,7	65,7	68,52	71,35	74,17	77	76	
11	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)	Persen	90	90	90	90	90	90	90	
12	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca	Persen	75,7	75,7	77,37	79,05	80,72	82,4	83,3	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
13	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	Persen	73,56	73,56	75,28	77	78,72	80,44	81,2	
14	Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca	Persen	60,52	60,52	62,84	65,17	67,49	69,82	70,32	
15	Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	Persen	37,62	37,62	41,68	45,75	49,81	53,88	54,4	
16	Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	11,23	11,23	11,35	11,48	11,60	11,73	12,21	
17	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	Persen	30,85	30,85	34,47	38,1	41,72	45,35	46,35	
18	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen	43,97	43,97	48,14	52,32	56,49	60,67	62,65	
19	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	Persen	46,99	46,99	49,74	52,49	55,24	57,99	59,44	
20	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian	Persen	11,88	11,88	12,30	12,73	13,15	13,58	14,68	
21	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah	Persen	2,7	2,7	2,97	3,25	35,25	3,8	4,2	
22	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	Persen	52	52	54	56	58	60	62	
23	Tingkat Partisipasi Angka Kerja Perempuan	Persen	45,22	45,22	46,42	47,62	48,82	50,02	52,12	
24	Nilai Tukar Petani (NTP)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
25	Persentase Rumah Tangga Terakses Internet	Persen	87	87	88,5	90	91,5	93	93,5	
26	Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Rupiah	3.834.445	3.834.445	3.979.589	4.124.733	4.269.877	4.415.022	4.503.322	
27	Rumah tangga dengan Akses Hunian Layak, Aman, dan Berkelanjutan	Persen	51,18	51,18	55,46	59,74	64,02	68,31	69,95	
28	Persentase Individu Memiliki Rekening di Bank	Persen	87,74	87,74	88,88	90,02	91,16	91,3	93,62	
29	Persentase Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Muatan Lokal	Persen	70	70	71,25	72,5	73,75	75	75,5	
30	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Persen	65,7	65,7	66,9	68	69,1	70,2	71,3	
31	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Persen	64,6	64,6	69,7	73,1	75,4	76,9	78,4	
32	Persentase Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Perahu Pengangkut Sampah	Persen	37,96	37,96	42,88	47,80	52,72	57,65	59,55	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
33	Prevalensi Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Persen	11,67	11,67	11,22	10,77	10,32	9,87	9,35	
34	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	35,34	35,34	40,14	44,94	49,74	54,55	55,85	
35	Persentase Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Pengarusutamaan Kebudayaan	Persen	60	60	70	80	90	100	100	
36	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Persen	0,49	0,49	0,47	0,45	0,43	0,41	0,39	
37	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	13,89	13,89	16,7	19,51	22,31	25,12	27,93	
38	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	24,92	24,92	29,75	34,59	39,42	44,26	49,09	
39	Angka Melek Huruf	Persen	98,95	98,95	98,87	98,79	98,71	98,63	98,55	
40	Indeks Kualitas Sehat	skor	0,21	0,21	0,22	0,23	0,25	0,27	0,28	
41	Indeks Pembangunan Pemuda	skor	57,33	57,33	58,28	59,23	60,18	61,13	62,09	
42	Indeks Pembangunan Kebudayaan	skor	56,45	56,45	56,82	57,18	57,55	57,91	58,28	
43	Kabupaten Layak Anak (KLA)	Skor	400 - 500	400 - 500	501 - 550	551 - 600	601 - 635	636 - 675	676 - 695	
44	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen	89,7	89,7	89,8	89,9	90	90,1	90,2	
45	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Persen	65,00	65,00	66,50	67,55	69,57	71,65	73,79	
46	Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Skor	251 - 310	251 - 310	310 - 350	351 - 400	401 - 500	501 - 550	551 - 600	
47	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	4	4	4	4,05	4,1	4,15	4,2	
48	Rasio Desa Berlistrik	Persen	89	89	90	91	92	93	94	
49	Indeks Zakat Nasional	Koefisien	0,31	0,31	0,41	0,51	0,61	0,71	0,81	
50	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
III ASPEK DAYA SANG DAERAH										
1	Angka Ketergantungan	Persen	40,58	40,58	40,62	40,67	40,72	40,77	40,82	
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	31,82	31,82	32,59	33,27	33,94	34,61	34,61	
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	Persen	1,18	1,18	1,34	1,5	1,65	1,81	1,81	
4	Rasio Kewirausahaan	Persen	2,54	2,54	2,94	3,34	3,74	4,14	4,14	
5	Indeks Inovasi Daerah	skor	2,92	2,92	3,05	3,17	3,3	3,42	3,43	
6	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	18,35	18,35	38,57	38,29	38,02	37,74	37,74	
7	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	Persen	51,18	51,18	55,46	59,75	64,03	68,31	68,31	
8	Return on Asset (ROA) BUMD	Persen	1,89	1,89	2,19	2,49	2,79	3,09	3,49	
9	Indeks Kapabilitas Inovasi	skor	2,92	2,92	3,04	3,17	3,29	3,42	3,54	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
10	Kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan	Persen	1,89	1,89	1,95	2,02	2,09	2,16	2,21	
11	Ekspor Barang dan Jasa	Persen	16,05	16,05	16,65	17,25	17,85	18,45	19,55	
12	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	0,8	0,8	0,81	0,82	0,83	0,85	0,92	
13	Tingkat Inflasi	Persen	2,4	2,4	2,35	2,3	2,25	2,2	2,1	
14	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	Persen	23,19	23,19	26,49	29,80	33,11	36,42	37,42	
15	Total Kredit/PDRB	Persen	21,8	21,8	24,65	27,51	30,37	33,23	34,21	
16	Kontribusi PDRB Kab/Kota	Persen	5,75	5,75	5,9	6,04	6,19	6,33	6,45	
17	PDRB Per Kapita	Rp Juta	79,59	79,59	95,88	112,16	128,45	144,73	166,12	
18	Indeks Akses Keuangan Daerah (IAKD)	Indeks	2,85	2,85	2,9	2,95	3	3,05	3,08	
19	Indeks Kepatuhan Hukum	Koefisien	35	35	40	45	50	50	55	
IV ASPEK PELAYANAN UMUM										
1	Indeks Reformasi Hukum	skor	70	70	71,38	72,75	74,13	75,5	75,5	
2	Persentase Jumlah Daftar pemilih Tetap (DPT)	Persen	70	70	78	78	78	80	80	
3	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	2,96	2,96	3,04	3,1	3,15	3,29	4,29	
4	Survei Penilaian Integritas	Skor (Kategori)	71, 50 (Rentan)	73,00 (Waspada)	75,00 (Waspada)	77,00 (Waspada)	78,00 (Terjaga)	79,00 (Terjaga)	80,00 (Terjaga)	
5	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	Persen	60	60	61,25	62,5	63,75	65	66	
6	Indeks Maturitas SPIP	Skor	3,16	3,16	3,21	3,26	3,31	3,36	3,41	
7	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	Persen	60	60	60	65	70	75	80	
8	Nilai Monitoring Centre for Prevention	Skor	84,76	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	
9	Rasio Elektrifikasi	Persen	100,13	100,13	100,13	100,13	100,13	100,13	100,13	
10	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal	Buah	1.295	1.295	1.795	2.295	2.795	3.295	3.795	
11	Aset Perbankan Syariah	Persen	0	0	0	0,79	0,8	0,81	0,82	
12	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	B - A	B - A	B - A	B - A	B - A	B - A	B - A	
V INDIKATOR KINERJA KUNCI										
AA 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1	Indeks Pemerataan Guru	Rasio	40	60	70	80	90	100	100	
2	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	Persen	42	56,78	62,45	74,75	82,35	93,56	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	84,68	87,65	90,62	93,17	95,72	98,27	100	
4	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persen	42	54,35	64,84	72,82	81,62	92,06	100	
5	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Persen	80	100	100	100	100	100	100	
6	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	Persen	98,38	99,00	99,55	100	100	100	100	
7	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Persen	55	60	70	80	90	100	100	
8	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	7,85	8,61	9,37	10,14	10,90	11,66	12,42	
9	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	Persen	62,42	70,98	81,49	95,5	100	100	100	
10	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	Persen	70,24	60,87	61,62	62,37	63,12	63,87	64,62	
11	Iklim Inklusivitas SD	Nilai	55,77	58,27	60,77	63,27	65,77	68,27	70,77	
12	Iklim Keamanan SD	Nilai	71,53	72,43	73,33	74,23	75,13	76,03	76,93	
13	Iklim Kebhinekaan SD	Nilai	69,19	70,19	71,19	72,19	73,19	74,19	75,19	
14	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	60,63	63,13- 65,63	65,63- 68,13	68,13- 70,63	70,63- 73,13	73,13- 75,63	75,63- 77,13	
15	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	54,24	57,14	60,04	62,94	65,84	68,74	71,64	
16	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	69,17	70,27	71,37	72,47	73,57	74,67	75,77	
17	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	61,93	63,43	64,93	66,43	67,93	69,43	70,93	
18	Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	55,92	58,32	60,72	63,12	65,52	67,92	70,32	
19	Iklim Keamanan SMP	Nilai	68,44	69,94	71,44	72,94	74,44	75,94	77,44	
20	Iklim Kebinekaan SMP	Nilai	69,34	70,34	71,34	72,34	73,34	74,34	75,34	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
AB	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
1	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase ibu hamil ANC 6 kali	Persen	80	80	82	85	88	90	90	
5	Persentase persalinan di fasyankes	Persen	88	88	89	90	91	92	93	
6	Persentase remaja putri diskriminasi anemia	Persen	75	75	77	80	83	85	85	
7	Persentase bayi usia 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	Persen	61	61	64	64	70	73	75	
8	Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping ASI	Persen	73	73	76	79	82	85	88	
9	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan SHK	Persen	50	50	55	60	65	75	77	
10	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan skrining Penyakit Jantung Bawaan (PJB) kritis	Persen	25	25	30	35	37	40	42	
11	Prevalensi jumlah balita usia 0 sampai 59 bulan dengan kategori stunting yang diperoleh dari hasil pengukuran diaplikasi e-pggbm	Persen	20	20	19	17,5	16	15	14	
12	Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada Balita	Persen	8	8	7	6	6	5	5	
13	Cakupan Balita yang ditimbang berat badannya (D/S)	Persen	70	70	72	74	77	80	82	
14	Persentase balita gizi kurang yang mendapatkan makanan tambahan	Persen	65	65	70	75	80	85	85	
15	Angka Kesakitan Akibat Penyakit	Persen	12	12	11	10	10	10	9	
16	Jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) yang terbentuk di tempat kerja informal	Pos	10	10	11	12	13	14	15	
17	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	Persen	20	20	30	40	50	80	85	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
18	Persentase Kab/Kota dengan minimal 75% Posyandu Siklus Hidup yang aktif	Persen	25	25	35	45	64	80	85	
19	Cakupan skrining kesehatan jiwa	Persen	10	10	15	20	25	30	35	
20	persentase puskesmas santun lansia	Persen	70	70	75	80	85	90	95	
21	persentase lanjut usia yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standart	Persen	50	50	55	60	65	70	75	
22	Persentase Bayi/Balita mendapatkan Pelayanan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	Persen	80	80	85	90	93	95	95	
23	Persentase Desa/Kelurahan UCI	Persen	45	45	55	60	65	70	75	
24	Persentase Desa/Kelurahan yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi (PE) ≤ 24 jam	Persen	80	80	80	80	80	80	80	
25	Presentasi Diabetes dalam pengendalian	Persen	10	10	12	14	16	18	20	
26	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	5	5	15	25	32	38	38	
27	Prevalensi Obesitas di > 18 tahun	Persen	15	15	17	19	21	23	23	
28	Presentasi merokok pada penduduk 10 - 21 tahun	Persen	12,4	12,4	10,4	8,4	6,4	4,4	4,2	
29	Cakupan penemuan Orang terduga TBC	Persen	70	70	75	80	90	95	95	
30	Cakupan pemberian obat pencegahan masal gangguan POPM untuk kecacingan	Persen	80	80	85	90	95	100	100	
31	Presentasi penurunan angka kesakitan DBD	Persen	40	40	50	60	70	80	85	
32	Presentasi skrining HIV terhadap populasi beresiko	Persen	70	70	75	80	85	90	90	
33	Persentase tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar	Persen	50	50	60	65	70	75	75	
34	Persentase tempat dan fasilitas umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar	Persen	50	50	60	65	70	75	75	
35	Persentase Kualitas Air minum yang memenuhi syarat sesuai standar	Persen	70	70	75	80	85	90	90	
36	Jumlah Desa/Kel yang melaksanakan STBM	Desa/Kel	50	50	60	75	85	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
37	Jumlah Fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar	Puskesmas	5	5	7	10	12	12	12	
38	Survey Kepuasan Masyarakat	Skor	80	80	82	83	84	85	86	
39	Persentase Puskesmas yang dilakukan pembinaan secara terpadu oleh TPCB Dinas Kesehatan Kab. Seruyan	Persen	80	80	85	90	95	100	100	
40	Persentase FKTP (Puskesmas, Klinik) yang dilakukan Pengawasan dan Pembinaan pasca terbitnya Izin Operasional	Persen	50	50	60	70	80	90	95	
41	Persentase Kepesertaan JKN memenuhi Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Seruyan	Persen	95	95	96	97	98	99	99	
42	Peresentase Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan Sesuai Standar	Persen	20	20	25	35	40	50	60	
43	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Orang	5	5	5	5	5	5	5	
44	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	4	4	27	12	12	12	12	
45	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	Persen	36	36	46	55	61	70	75	
46	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)	Persen	86	86	87	88	89	90	90	
47	Angka Keberhasilan pengobatan TB	Persen	90	90	90	90	90	90	90	
48	Proporsi penduduk dengan aktivitas cukup	Persen	64,3	64,3	66,1	67,9	69,7	72	75	
49	Jumlah Desa yang sudah memiliki Nakes (Perawat dan atau Bidan) serta Lokus Desa (Sangat Tertinggal/Tertinggal/Biasa)	desa	83	83	85	87	89	91	92	
50	Jumlah Desa yang belum memiliki Nakes (Perawat dan atau Bidan) serta Lokus Desa (Sangat Tertinggal/Tertinggal/Biasa)	desa	9	9	7	5	3	1	0	
51	Jumlah Desa yang sudah memiliki faskes/sarpras (Pustu,Polindes, Pokesdes) serta lokus desa (sangat tertinggal/tertinggal/biasa)	desa	20	20	26	35	40	50	60	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
52	Jumlah Desa yang belum memiliki faskes/sarpras (Pustu, Polindes, Pokesdes) serta lokus desa (sangat tertinggal/tertinggal/biasa)	desa	77	77	71	62	57	47	37	
53	Jumlah Ibu hamil dan kondisi (Resiko tinggi) serta lokus desa (sangat tertinggal/tertinggal/biasa)	Ibu	703	703	682	659	634	609	582	
54	Jumlah desa yang sudah memiliki Ambulans (Darat/Air) dan lokus desa (sangat tertinggal/tertinggal/biasa)	desa	48	48	53	64	75	85	97	
55	Jumlah desa yang belum memiliki Ambulans (Darat/Air) dan lokus desa (sangat tertinggal/tertinggal/biasa)	desa	49	49	44	33	22	12	0	
56	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persen	80	80	85	90	93	95	95	
57	Persentase jenis layanan RS yang dimanfaatkan untuk pemenuhan UKP dan UKM	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
AC	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	Persen	0	0	6	7	8	9	10	
2	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	Persen	54	54,15	54,16	54,17	54,18	54,19	54,20	
3	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Persen	40,55	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	Persen	0,87	0,87	0,87	0,90	0,95	1	1,5	
5	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	Persen	70,33	70,50	70,53	70,55	70,60	70,80	70,80	
6	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Persen	70	70	73	75	78	80	82	
7	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	Persen	61,06	61,06	63	66	69	72	75	
8	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persen	61,06	61,06	63	66	69	72	75	
9	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	37,40	37,40	39,12	40,84	42,56	44,36	45,25	
10	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Persen	12,50	12,50	30	47,50	65	87,50	100	
11	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten/Kota	Persen	0	5	10	12	15	16	20	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
AD	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	Persen	76,42	77	78	78	80	80	80	
4	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	29,00	28	28	27,5	26	25	25	
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	50	50	55	55	60	65	65	
AE	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Persen	52,14	54	56	58	60	62	62	
5	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persen	0,93	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persen	0	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persen	85	83	85	87	89	91	91	
9	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	0,93	20	25	50	75	100	100	
10	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	Persen	88,76	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
AF	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
1	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	Persen	0	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	95	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	Persen	0	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola dengan baik	Persen	77,78	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Persen	88,63	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	95	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial	Persen	0	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	Persen	0	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	Persen	0	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin	Persen	0	70	70	70	70	70	70	
12	Persentase penyelenggara PUB/UGB yang tertib perizinan pengumpulan sumbangan	Persen	42,5	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	95	100	100	100	100	100	100	
14	Persentase keluarga miskin dan rnetan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	Persen	0	1	1,5	2	2,5	3	3	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
15	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	95	100	100	100	100	100	100	
16	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	60,71	100	100	100	100	100	100	
17	Persentase korban bencana alam, sosial dan/non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
18	Persentase Penurunan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persen	95,76	95	90	85	80	75	75	
19	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani	Persen	95,76	100	100	100	100	100	100	
20	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti (SPM)	Persen	80	100	100	100	100	100	100	
21	Jumlah Warga Negara Anak Terlantar yang memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti (SPM)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
22	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti (SPM)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
23	Jumlah Warga Negara Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti (SPM)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
24	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Kab/Kota (SPM)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
AG	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
1	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	Persen	70	70	73	75	78	80	83	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Persen	50	50	52	55	57	60	60	
5	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	41.030	39.232	39.232	39.232	39.232	39.232	39.232	
AH 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
1	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persen	1,00	1,00	1,2	1,4	1,60	1,80	2,00	
2	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	79,82	79,85	79,91	79,93	79,96	79,98	80,10	
3	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
5	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	51,22	51,53	51,80	60	61	61,25	61,50	
6	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai	Indeks	10	20	30	40	60	80	100	
7	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Persen	50,00	50,60	51,80	52,75	53,40	54,50	54,80	
9	Persentase perempuan dilembaga pemerintah	Orang	12	12	12	13	14	15	16	
AI 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
2	Skor Pola Pangan Harapan	Point	80,1	85	86,2	86,3	86,4	86,5	86,6	
3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Persen	60	70	75	75	80	80	80	
4	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persen	60	100	100	100	100	100	100	
AJ 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										
1	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
2	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase pemanfaatan tanah dengan yang sesuai peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
AK	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
1	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
2	Indeks Kualitas Air	Indeks	51,67	79,32	79,52	79,72	79,92	80,12	80,20	
3	Indeks Kualitas Udara	Indeks	93,05	79,90	80,10	80,30	80,50	80,70	80,90	
4	Persentase RTH	Persen	80	80	80	80	80	80	80	
5	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Persen	80	80	80	80	80	80	80	
6	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	Persen	30	30	30	30	30	30	30	
7	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
11	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Poin	50	50	50	50	50	50	50	
AL	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
1	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Persen	0	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	92,97	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase penyajian data kependudukan yang disediakan	Persen	0	100	100	100	100	100	100	
7	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persen	0	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	54,55	63,64	72,73	81,82	90,91	100	100	
9	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Persen	0	5	7,5	10	12,5	15	15	
10	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Persen	60,73	64,42	68,27	72,12	75,97	79,82	79,82	
11	Persentase Perekaman KTP Elektronik	Persen	97,78	97,78	97,98	97,99	98,01	98,03	98,03	
12	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks	94,81	94,86	94,87	94,88	94,89	94,90	94,90	
AM	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
1	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Persen	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	
2	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	Persen	10	10	10	10	10	10	10	
3	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	Persen	90	90	90	90	90	90	90	
4	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persen	14,58	19,58	19,58	19,58	19,58	19,58	19,58	
AN	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
1	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	38,90	38,60	38,30	37,90	37,60	37,30	37	
2	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	Jiwa	2,21	2,21	2,20	2,20	2,20	2,19	2,19	
3	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Persen	9,70	6,80	5,40	4,70	4,30	5,20	4,10	
4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	3,63	6,80	6,80	6,80	6,80	6,70	6,70	
5	Indeks Lansia Berdaya	Indeks	58,20	59,90	61,60	63,20	64,60	66,60	67,40	
6	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	Persen	8,00	9,50	10,90	12,20	13,50	14,60	15,70	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persen	80	85	90	95	100	100	100	
8	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	Persen	78,03	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	
9	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Indeks	88,20	89,00	89,80	91,60	91,20	91,90	92,60	
10	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	Persen	90,40	90,80	91,10	91,40	91,60	91,90	92,00	
AO 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										
1	Konektivitas Darat	Km	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Konektivitas laut/sungai	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
AP 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
1	Persentase Infrastruktur Layanan Digital	Persen	89	89	74	74	87	87	100	
2	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survei)	Persen	-	75	78	81	83	85	88	
3	Jumlah Desa Blankspot	Desa	55	44	33	22	11	0	0	
AQ 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
1	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persen	0	0	0	0	0	0	100	
4	Pertumbuhan Wirausaha	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
6	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Persen	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
AR	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
1	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Persen	93	94	95	96	97	98	98	
3	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten	Persen	93	94	95	96	97	98	98	
AS	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
1	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	Persen	0,44	0,46	0,47	0,49	0,50	0,52	0,52	
2	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	Persen	-	4,40	4,80	5,30	6,00	6,20	6,70	
3	Rasio Wirausaha Pemuda	Persen	-	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	
AT	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	-	2,7	2,9	3,0	3,2	3,4	3,5	
AU	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
1	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Angka	-	8	10	15	20	25	30	
AV	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
1	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persen	38,43	73,53	76,47	77,94	79,41	80,88	82,35	
2	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	Persen	-	0	1,03	1,29	1,39	1,46	1,49	
3	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Persen	-	50	60	70	80	90	100	
4	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Persen	-	34,12	34,37	34,50	34,62	34,75	35,06	
AW	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									
1	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	Persen	69,70	71,21	72,73	74,24	75,76	77,27	78,79	
2	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	47,11	49,29	50,30	51,35	52,40	53,45	54,50	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
AX	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									
1	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persen	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	
2	Tingkat Ketersediaan Arsip	Persen	75	75	75	75,50	75,50	80	80	
3	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Persen	13,33	13,33	13,33	13,33	13,33	13,33	13,33	
4	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Arsip secara baku	Persen	100	75	80	90	100	100	100	
AY	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	18.529,33	19.973,23	21.039,00	23.142,89	25.457,18	28.002,90	30.803,19	
2	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	20.129,81	21.134,31	21.716,04	22.131,26	22.481,65	22.777,45	23.033,04	
3	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Persen	84,21	85	86	87	88	90	91	
4	Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/TH	54,97	60,25	60,85	61,64	62,38	63,13	64,22	
AZ	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
1	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persen	-	0,018	0,034	0,042	0,050	0,058	0,060	
2	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Persen	88,69	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Persen	-	27,00	35,10	45,63	59,32	77,11	80,11	
4	Jumlah Desa Wisata	Desa	-	5	9	12	14	16	16	
BA	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persen	70	100	100	100	100	100	100	
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	Persen	50	70	70	70	70	70	70	
3	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Persen	1	1	1	1	1	1	1	
4	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persen	70	100	100	100	100	100	100	
5	Peningkatan Produksi Hortikultura	Persen	50	70	70	70	70	70	70	
6	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Persen	1	1	1	1	1	1	1	
7	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Ha	50	100	150	150	150	150	150	
8	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
9	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
14	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
BB 3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN										
1	Indeks Keanekaragaman Hayati	Persen	80	80	80	80	80	80	80	
BC 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										
1	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase penanganan pengaduan konsumen	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
BD 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
1	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
BE 3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI										
1	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	Persen	0	0	46	47	48	49	50	
2	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	Persen	0	45	46	47	48	49	50	
3	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	Persen	0	0	46	47	48	49	50	
BF 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH										
1	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	-	2,85	3,00	3,10	3,25	3,40	3,40	
2	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	Nilai	-	69	71	72	73	74	74	
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai B	Jumlah OPD	-	7	10	15	20	29	29	
4	Indeks kualitas kebijakan	Nilai	-	60	68	74	79	85	85	
5	Nilai komponen pengukuran kinerja SAKIP	Nilai	-	18,05	18,15	18,30	18,45	20	20	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6	Nilai komponen pelaporan kinerja SAKIP	Nilai	-	10,90	11,05	11,15	11,25	11,45	11,45	
7	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	-	60	65	70	75	80	80	
8	Persentase ketercapaian berdasarkan roadmap/peta jalan pengendalian inflasi Kab. Seruyan	Persen	-	70	70	70	70	70	70	
9	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat Daerah	Nilai	-	CC (50)	B (61,00)	B (61,10)	B (61,20)	B (61,30)	B (61,30)	
10	Tingkat Kematangan UKPBJ	Angka	-	7	8	8	8	9	9	
11	Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	-	4	4	4	4	4	4	
12	Efektivitas Kerja Sama Daerah	Persen	-	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase Produk Hukum yang dihasilkan	Persen	-	100	100	100	100	100	100	
14	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Persen	-	100	100	100	100	100	100	
15	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persen	-	100	100	100	100	100	100	
16	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Skor	-	2,989	2,989	2,989	2,989	2,989	2,989	
17	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persen	-	100	100	100	100	100	100	
BG 4.02 - SEKRETARIAT DPRD										
1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
4	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
BH 5.01 - PERENCANAAN										
1	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	91,63	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persen	99,55	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persen	-	100	-	100	-	-	100	
BI 5.02 - KEUANGAN										
1	Persentase laporan keuangan tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Persen	30	30	30	30	30	30	30	
3	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persen	40	40	40	40	40	40	40	
4	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persen	95	95	95	95	95	95	95	
5	Persentase Penurunan SILPA	Persen	90	90	90	85	85	85	85	
6	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persen	8	8	8	8	8	8	8	
7	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	Persen	0	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Persen	0	65	70	75	80	85	90	
9	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	5,54	12,47	12,47	12,27	13,24	13,21	13,21	
BJ 5.03 - KEPEGAWAIAN										
1	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persen	27	35	40	45	50	55	60	
2	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	Persen	63	70	75	75	80	80	80	
3	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	Persen	80	80	80	80	80	80	80	
4	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	Persen	80	80	80	80	80	80	80	
5	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
BK 5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										
1	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional	Persen	30	35	36	37	38	39	40	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
BL	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
1	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	Persen	-	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Persen	-	-	100	100	100	100	100	
3	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	Persen	-	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	Persen	-	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	Persen	-	-	100	100	100	100	100	
6	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	Persen	-	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	Persen	-	-	100	100	100	100	100	
8	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	Persen	-	-	100	100	100	100	100	
BM	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH									
1	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3,00	3,025	3,05	3,10	3,125	3,15	3,20	
2	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persen	80,21	82	83	84	85	86	87	
3	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan APIP tahun N-1	Persen	80	82	84	85	87	89	90	
5	Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (EPK)	Level	2,892	3,00	3,025	3,05	3,075	3,10	3,125	
6	Indeks Kepuasan Layanan Stakeholder	Nilai	0	80	82	85	88	90	95	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
BN	7.01 - KECAMATAN									
1	Persentase layanan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase terbentuknya desa/kelurahan mandiri	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase penanganan masalah ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase kegiatan urusan pemerintahan umum yang difasilitasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
BO	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
1	Indeks Kinerja Ormas	Persen	-	60	60	60,35	60,40	60,45	60,50	
2	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	4,00	4,00	4,00	4,05	4,10	4,15	4,20	
3	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	Persen	50	60	60	65	70	75	80	
4	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik dan etika budaya politik	Persen	-	0,38	0,38	0,51	0,65	0,81	0,98	
5	Persentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan tentang ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	Persen	-	0,33	0,53	0,73	0,94	1,15	1,38	
6	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang ber-SKT/Aktif	Persen	46,53	46,53	47,53	48,53	49,53	50,53	51,53	

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas bagi seluruh masyarakat, Pemerintah Kabupaten Seruyan berkomitmen untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. SPM menjadi tolok ukur capaian pelayanan dasar yang wajib disediakan pemerintah daerah sebagai bentuk pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Pemenuhan SPM difokuskan pada enam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, serta sosial. Oleh karena itu, penetapan target SPM selama periode RPJMD 2025–2029 disusun secara terukur, realistis, dan berkesinambungan, dengan mempertimbangkan kondisi eksisting, potensi daerah, serta ketersediaan sumber daya.

Berikut ini disajikan tabel Target SPM Kabupaten Seruyan Tahun 2025–2029, yang menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan strategis guna menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat Kabupaten Seruyan secara merata dan berkeadilan.

Tabel 4. 6 Target Capaian SPM Kabupaten Seruyan Tahun 2026-2030

No.	Bidang Urusan	Indikator Kinerja SPM	Target Capaian				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	Pendidikan						
		Pendidikan Dasar Usia Dini	100%	100%	100%	100%	100%
		Pendidikan Dasar (SD dan SMP)	100%	100%	100%	100%	100%
		Pendidikan Kesenjangan	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kesehatan						
		Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	100%	100%	100%	100%
		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	100%	100%	100%	100%
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	100%	100%	100%	100%
		Pelayanan Kesehatan Balita	100%	100%	100%	100%	100%
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100%	100%	100%	100%	100%
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100%	100%	100%	100%	100%
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100%	100%	100%	100%	100%
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	100%	100%	100%	100%
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100%	100%	100%	100%	100%
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100%	100%	100%	100%	100%
		Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100%	100%	100%	100%	100%
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100%	100%	100%	100%	100%
3	Pekerjaan Umum						
		Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	100%	100%	100%	100%	100%
		Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	100%	100%	100%	100%	100%
4	Perumahan Rakyat						
		Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%
		Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Bidang Urusan	Indikator Kinerja SPM	Target Capaian				
			2026	2027	2028	2029	2030
5	Ketentraman, Keketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat						
		Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	100%	100%	100%	100%	100%
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	100%	100%	100%	100%	100%
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)	100%	100%	100%	100%	100%
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)	100%	100%	100%	100%	100%
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	100%	100%	100%	100%	100%
6	Sosial						
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti	100%	100%	100%	100%	100%
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	100%	100%	100%	100%	100%
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	100%	100%	100%	100%	100%
		Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	100%	100%	100%	100%	100%
		Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029



BAB V

PENUTUP



**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025-2029**

BAB V

PENUTUP

5.1 Pedoman Transisi

Masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seruyan periode 2025 – 2029 akan berakhir pada Desember 2029, dengan demikian RPJMD juga akan berakhir pada kurun waktu yang sama, sementara RPJMD yang baru belum dibuat. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Seruyan, penyusunan RKPD Kabupaten Seruyan Tahun 2030 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045, penyelesaian target kinerja RPJMD 2025-2029 yang belum tercapai, dan menjaga keselarasan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Seruyan dengan pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah, serta mengantisipasi perkembangan pembangunan yang akan mempengaruhi kinerja Pemerintah Kabupaten Seruyan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa RPJMD sesuai peraturan perundangan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan Tahun 2025–2029 merupakan panduan bagi Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan selama 5 tahun. Keberhasilan pelaksanaan RPJMD diukur dari ketercapaian target-target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama semua pihak untuk mewujudkannya, dengan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

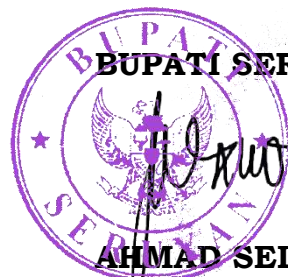
- a. RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Seruyan. Renstra adalah dokumen indikatif yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan

pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Renstra perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Seruyan harus konsisten dan sinergis dengan dokumen RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029. Renstra yang mengatur perencanaan pembangunan lima tahunan perangkat daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah.

- b. RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 merupakan perencanaan pembangunan lima tahunan di Kabupaten Seruyan yang akan dijabarkan menjadi rencana pembangunan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Seruyan. Selanjutnya RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
- c. RPJMD harus benar-benar diperhatikan, dipedomani dan dilaksanakan oleh pemerintah kota dalam melaksanakan pembangunan di berbagai aspek, karena setiap ketidak sesuaian, baik yang menyangkut kebijakan maupun pelaksanaannya dapat dinyatakan sebagai ketidak patuhan bahkan pelanggaran.
- d. Dalam pelaksanaan program/kegiatan, selain menggunakan anggaran Pemerintah Kabupaten Seruyan, dapat pula menggunakan anggaran yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Corporate Social Responsibility (CSR), hibah/bantuan dalam dan luar negeri, serta swadaya masyarakat dan/atau sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
- e. Pasca penetapan RPJMD, apabila terjadi perubahan struktur organisasi perangkat daerah maka struktur/kelembagaan baru tersebut harus menyesuaikan antara urusan pemerintahan yang diampunya dengan urusan pemerintahan yang tercantum dalam RPJMD ini dan harus membuat renstra baru.
- f. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program/kegiatan dalam renstra/renja serta konsistensinya dengan RPJMD dilakukan

pengendalian, monitoring, dan evaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- g. RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dimungkinkan diubah apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan, hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan terjadi perubahan yang mendasar seperti: terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, dan/atau perubahan kebijakan nasional.


BUPATI SERUYAN,

AHMAD SELANORWANDA

Selamat Datang Di Pantai
SERIBU CEMARA



**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025-2029**